



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bunga Rampai Pewarta

Mereka Mencatat, Kita Membaca, Mendengar, Melihat & Memahami Ada Apa Dengan Pemilihan Tahun 2020



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**komisi
pemilihan
umum**
Sulawesi Utara

Bunga Rampai Pewarta

Pengarah :

Ardiles M.R. Mewoh;
Yessy Y. Momongan;
Lanny A. Ointu;
Salman Saelangi;
Meidy Y. Tinangon;
Pujiastuti.

Penyusun :

Alfrits Semen;
Livrando Kambey;
Angel Anita;
Jeane Rondonuwu;
Lina N



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Bunga Rampai Pewarta

Editor :

Alfrits Semen, Livrando Kambey, Angel Anita,
Jeane Rondonuwu, Lina N

Desain Sampul dan Isi :

E Paendong

Ukuran :

21 X 29,7 cm

ISBN :

978-623-6183-26-7

Cetakan :

2021

Copyright © 2021 by KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT



KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang,
Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado,
Sulawesi Utara 95112

Website: www.sulut.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

Sambutan



Salam Demokrasi...

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 131 : “Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.”. Poin ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan Pemilu, tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih maka sesungguhnya Pemilihan tidak memiliki

makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di TPS pada hari Pemungutan suara atau *voter turn out*, tetapi keterlibatan pemilih untuk seluruh tahapan Pemilihan.

Target tingkat partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5% telah dapat dicapai oleh KPU pada perhelatan Pemilu Serentak 2019, bahkan melebihi target hingga mencapai 81%. Rentang waktu yang tidak terlalu jauh antara Pemilu Serentak 2019 dengan Pemilihan Serentak 2020, menjadi tantangan bagi KPU penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat.

Tantangan selanjutnya yakni pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Meskipun KPU telah menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan tahun 2020 mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi sebagian masyarakat masih dihindangi kekhawatiran yang akhirnya dapat mendorong mereka untuk cenderung tidak datang ke TPS. Tentunya penyelenggara harus mampu berinovasi dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar meyakinkan pemilih bahwa Pemilihan tahun 2020 aman dan sehat.

Tantangan tersebut dijawab oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang lebih kreatif

dan menarik sehingga pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020, salah satunya dengan menggandeng Pihak Pers baik cetak, elektronik maupun online untuk terlibat pada semua tahapan pemilihan dengan menyiapkan media center sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi untuk pemberitaan serta diundang langsung melakukan media gatering yang dijadikan forum khusus dalam memberikan informasi, penjelasan maupun menjawab pertanyaan dari kalangan wartawan terkait dengan proses, jadwal dan tahapan yang sedang dan sementara dijalankan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karenanya sebagai Penyelenggara tentunya patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman wartawan atas peran dari Bapak/Ibu skalian, maka penyelenggaraan Pemilihan di bumi Nyiur Melambai dalam kondisi pandemi Covid-19 dapat terlaksana dengan sukses serta mencatatkan prestasi sebagai Provinsi dengan partisipasi pemilih tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 .

Untuk itu tentunya sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada teman-teman wartawan yang telah bersedia menuangkan karya jurnalistiknya dijadikan sebagai goresan sejarah pemberitaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam bentuk Buku "Bunga Rampia Pewarta". Semoga dengan terbitnya buku ini banyak kalangan yang akan diperkaya wawasannya untuk mengetahui proses dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Sulawesi Utara.

Ardiles Mewoh

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga buku Bunga Rampai Pewarta; Mereka Mencatat, Kita Membaca, Mendengar, Melihat & Memahami Ada Apa Dengan Pemilihan Tahun 2020, telah selesai.

Buku ini berisi pemberitaan media massa. Baik cetak, radio, maupun media online, selama tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020.

Rangkuman tulisan pers yang telah dipublikasikan di media massa ini didibukukan. Sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi media massa dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020.

Buku ini menjadi jejak manis, selama ini KPU Provinsi Sulawesi Utara selalu di-backup media massa dalam pemberitaan dan informasi seluruh kegiatan KPU. Sehingga semua tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 bisa berjalan dengan baik.

Melalui buku ini juga terlihat kontribusi pers cukup besar dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Selain memberitakan sosialisasi tahapan, pers juga memberikan pengawasan untuk penyelenggara lewat kritik dan saran dalam pemberitaan.

Akhir kata, semoga buku ini bisa memberi manfaat kedepan, berkontribusi dalam pembangunan demokrasi Indonesia, terutama Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, April 2021

Salman Saelangi

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Daftar Isi

Sambutan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga	3 - 92
Epilog	93 - 94
Bab II Perekrutan Badan Adhoc Penyelenggara	97 - 114
Epilog	115
Bab III Mengolah Data Pemilih	118 - 150
Epilog	150 - 151
Bab IV Pendaftaran Pasangan Calon	154 - 208
Epilog	209
Bab V Kampanye	212 - 251
Epilog	251 - 252
Bab VI Distribusi Logistik	255 - 279
Epilog	279
Bab VII Pemungutan Suara	282- 299
Epilog	300
Bab VIII Penghitungan Suara	303 - 321
Epilog	322 - 323
Bab IX Penetapan dan Pengusulan Pasangan Calon	326 - 357
Epilog	357 - 358
Bab X Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	361 - 389
Epilog	389 - 390



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab I

Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga





Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga

Masyarakat Harus Tahu Ada Pilkada KPU Sulut Siapkan Berbagai Kegiatan di Launching 31 Januari

MANADO—Dari 7 daerah di Sulut yang akan gelar pilkada, baru 4 daerah yang lakukan launching. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sendiri baru akan melaunching Pilkada 2020 pada 31 Januari. Menurut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, seluruh masyarakat harus tahu bahwa tahun ini ada pelaksanaan pilkada.

“Kami sebagai penyelenggara harus menyampaikan seluas-luasnya. Masyarakat harus tahu bahwa kita akan selenggarakan pilkada,” kata Ardiles saat menyampaikan sambutan di kegiatan launching Pilkada Kota Tomohon pekan lalu.

Dalam sambutannya juga, Ardiles berharap KPU di kabupaten/kota mampu menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berintegritas. “KPU Tomohon itu penyelenggara paling berintegritas se Sulut. Kami harap juga daerah lain bisa terpacu,” ujarnya.

Dirinya juga meminta agar memperhatikan partisipasi pemilih di Pilkada tahun ini yang akan digelar 23 September nanti.

“Tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi, dipertahankan dan harus dinaikan lagi. Semua harus melampaui target partisipasi pemilih. Karena ini salah satu pilkada bisa dikatakan sukses,” tuturnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Launching Pilkada, KPU Sulut Siapkan Sejumlah Kegiatan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut telah menyiapkan berbagai kegiatan di acara launching Pilkada 31 Januari mendatang. Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, pihaknya telah mengatur sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat di launching Pilkada 2020.

“Launching dari siang. Ada beberapa kegiatan lomba. Fun run malam hari start dari God Bless finis di Mega mas. Kemudian Lomba Masamper, yel-yel dan dancer,” kata Komisioner KPU Sulut Salman. Di siang hari jelang sore, ada juga lomba fotografer dan game online di kompleks Mega Mas.

“Lomba maskot dan jingle pilkada. Nanti akan diisi dengan Basgilanos,” paparnya. Yang menarik juga, lanjutnya, ada festival anggaran.

“Nanti akan sajikan RKA masing-masing kabupaten/kota ke publik. Ada tenda-tenda disediakan. Kemudian ada demo moral pemilihan,” tuturnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Dorong Pencairan Dana Hibah Pilkada Tepat Waktu

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah siap melaksanakan Pilkada 2020 bersama 7 KPU kabupaten/kota. Hal itu dibuktikan dengan telah berjalan tahapan-tahapan pilkada.



“Untuk tahapan pemilihan serentak sampai saat ini tetap berjalan sesuai program tahapan yang diatur PKPU,” ujar Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, kemarin.

Dikatakannya, ada beberapa tahapan yang sudah dituntaskan baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti naskah perjanjian hibah daerah.

“Kami bisa jamin anggaran sudah tersedia. Meski memang ada daerah yang paling terlambat soal NPHD yakni Manado. Tapi syukur telah terlewati. Dan sekarang sementara lanjutkan tahapan,” ucapnya. Dirinya juga berharap dalam pencairan anggaran hibah tersebut sesuai waktu agar tak mengganggu jalannya tahapan. “Kami dorong pencarian anggaran tepat waktu. Kami harap keterlambatan tidak pengaruhi tahapan. Tapi sejauh ini masih berjalan baik,” tandasnya.

Tahapan selanjutnya kata dia, penyusunan peraturan perundangan kemudian pemutakhiran data pemilih. “Ini Kan disosialisasikan secara luas pada masyarakat. Setelah itu pencalonan,” tuturnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Sepakat 360 Miliar Dana Pilgub 2020, Gubernur Teken NPHD

MANADO—Akhirnya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD). Anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Senin (4/11/2019), di Rumah Dinas Gubernur. Kepada wartawan, Gubernur Olly Dondokambey menjelaskan, anggaran untuk KPU Sulut Rp220 Miliar, Bawaslu Rp110 Miliar, TNI/Polri Rp30 Miliar.

Gubernur menjelaskan, apa yang sudah ditandatangani pada hari ini sudah berjalan dengan baik.

“Besok akan disampaikan pada RAPBD 2020 dalam rapat Paripurna DPRD Sulut.

Angka-angka yang disepakati, kita sudah lakukan koordinasi dengan Depdagri sehingga nilai-nilai yang kita dapati baik Bawaslu, KPU, TNI/Polri yang kita siapin semua sudah terangkul di APBD 2020,” tegas Gubernur Olly Dondokambey, sembari mengakui tidak ada hal-hal lain yang jadi hambatan untuk Pilkada 2020. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Jelang Pilkada Serentak, KPU Sulut Lakukan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pilgub 2020

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2020 nanti terus melakukan tahapan. Kali ini, sosialisasi terkait Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Seperti yang dilaksanakan pada Rabu (4/11/2019) pagi hingga sore di salah satu ruangan Hotel Aston Manado.

Saat memberikan sambutan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, bahwa sengaja mengundang seluruh stakeholder dengan alasan agar bisa mengetahui seluruh tahapan KPU.

“KPU sementara melakukan tahapan pemilihan Kepala Daerah. Ada tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Sementara, tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu produk hukum, teknis, dan sosialisasi,” tutur Ardiles di hadapan para undangan.

Lebih lanjut dikatakan Ardiles, kegiatan sosialisasi oleh KPU sangat penting dan strategis bagi penyelenggara.

“Kami ingin memastikan seluruh elemen masyarakat memahami regulasi terkait teknis penyelenggaraan pilkada. Sosialisasi akan dilakukan setiap tahapan yang perlu diketahui oleh masyarakat Sulut,” ucap Ardiles seraya menambahkan bila tahapan



Pilkada terus di-publish lewat media massa.

Dan, terkait Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pun sudah dipublikasi lewat media massa.

“Sosialisasi pencalonan perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut sudah kita mulai dan kita publikasi lewat media masa, persyaratannya, kapan mulainya, sudah umumkan,” tukasnya.

Ardiles juga mengatakan, terkait dengan Pencalonan Perseorangan, KPU Sulut saat ini telah membuka layanan Help Desk.

“KPU Sulut sudah membuka layanan help desk. Namun, baru satu orang yang datang menyampaikan keinginan untuk maju melalui jalur perseorangan. Tapi dia baru berkonsultasi,” tandas Ardiles sembari menambahkan, dengan digelarnya sosialisasi ini, semakin banyak orang mengetahui informasi, regulasinya, pengaturan teknisnya, kemudian ada keinginan untuk maju melalui jalur perseorangan.

Harapannya, bisa mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder. Sementara, Salman Saelangi, salah satu komisioner KPU Sulut dan juga Ketua Divisi Sosialisasi saat kegiatan berlangsung mengungkapkan bahwa PKPU Nomor 16 Tahun 2019, baru diterima KPU Sulut pekan lalu.

“PKPU 16 baru diterima saat Rapim minggu lalu, dan langsung bergegas melakukan sosialisasi,” terang Salman yang diiyakan Yessy Momongan yang juga Komisioner KPU Sulut.

Diketahui, Sosialisasi Pencalonan Perseorangan, sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor : 379/PL.02.2-Und/71/Prov/XII/2019 tentang Undangan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 serta Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Hadir dalam sosialisasi tersebut dua komisioner KPU Sulut lainnya yaitu Meidy Tinangon dan Lanny Ointu. Hadir pula seluruh KPU di 15 Kabupaten/Kota juga stakeholder yang ada.

Penulis: *Jane Tungkagi*
Sumber: *cintasulut.com*

Hadapi Pilgub 2020, KPU Sulut Terbitkan SK Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan

MANADO—Menghadapi Pemilihan Gubernur tahun 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menetapkan Keputusan Nomor:140/PP.02-2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Dikatakan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh kepada BeritaManado.com, Minggu (27/10/2019) sore ini mengatakan, keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

“Dan keputusan tersebut dapat diakses pada JDIH KPU SULUT melalui menu Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Ardiles Mewoh.

Dilanjutkannya, penetapan tersebut menjadi acuan pencalonan untuk calon perseorangan.

“Bahwa jumlah dukungan minimum dan sebaran tersebut harus dipenuhi dan ketika diverifikasi baik administrasi maupun faktual memenuhi syarat baru ditetapkan sebagai calon,” tegasnya.

Penulis: *AnggawiryaMega/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*



KPU Sulut Gelar Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pilgub dan Wagub

SULUT – Sosialisasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), melalui jalur perseorangan sangat penting untuk dilakukan, agar mekanisme ketentuan teknis, regulasi, skema dan pentahapannya dapat di pahami semua pihak.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) jelang Pilkada 2020, menggelar sosialisasi pencalonan perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Rabu (04/12/19) bertempat di Hotel Aston Manado.

Ketua KPU Ardiles Mewoh, mengungkapkan memang perlunya sosialisasi menyeluruh kepada semua pihak, terkait jalur perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pada Pilkada 2020 nanti.

“Harus kita sampaikan terkait jalur perseorangan supaya tidak ada hambatan informasi untuk mengetahui regulasi, ketentuan-ketentuan teknis, serta skema waktu tahapannya,” ungkap Mewoh.

Lanjutnya lagi, bahwa dalam proses verifikasi para peserta nantinya sudah disediakan aplikasi online guna mempermudah proses tersebut.

“KPU Provinsi Sulut sudah membuka layanan tersebut di hari kerja mulai kemarin tanggal 3 Desember,” jelasnya.

Untuk tahapan sosialisasi pencalonan perseorangan ini sudah diumumkan baik lewat media cetak maupun media elektronik.

“Waktunya masih panjang maka dapat dipersiapkan dengan baik oleh bakal calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen, pada tanggal 16-20 februari 2020,” ucap Mewoh, sembari menambahkan minimal dukungan jumlahnya 1.812.000 suara dan harus tersebar lebih dari 50% di 15 Kabupaten dan Kota.

Disisi lain, ketua komisi Divisi sosialisasi, Parmas dan SDM KPU sulut, Salman Saelangi mengungkapkan untuk penggunaan Aplikasi Digital, KPU akan mengoptimalkan pengawasan terjadinya masalah pencalonan perseorangan dalam menginput data ganda dukungan bagi pasangan calon sehingga tidak akan ada dua kali penyerahan KTP atau dukungan dari TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

“Kami KPU provinsi telah mengembangkan website yang sebelumnya sudah ada, saat ini kami sedang mengembangkan arung kontrol agar bisa mengakses sistem yang sedang berjalan di 15 kabupaten kota sampai mengembangkan dan mengakses data pemilih sampai TPS,” pungkasnya.

Hadir sebagai pemateri yakni Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut, Yessy Momongan, Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Sulut, Salman Saelangi dengan moderator Kasubag Teknis dan Parmas KPU Sulut Ruddy Laonsang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan KPU Sulut. (*)

Penulis: *Silvana*

Sumber: *portalsulutnews.com*

Jalur Perorangan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Harus Siapkan 190.812 KTP

MANADO – Mendaftar sebagai kepala daerah terlebih khusus Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 lewat jalur perorangan, setiap kandidat harus mendapat dukungan warga sebanyak 190.812 dan terbagi di 8 kabupaten dan kota.

Hal tersebut dikatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Divisi Teknis Yessi Momongan, S.Th, dalam Sosialisasi Calon Perorangan, Rabu (05/11) di Aston Hotel.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju dalam Pilgub berkisar antara 6,5 persen



hingga 10 persen dari jumlah pemilih. Dalam Daftar Pemilih (DPT) Pemilihan Umum yang baru lewat terdata 1.908.115 jumlah pemilih, itu berarti calon perorangan harus mengumpulkan KTP berjumlah 190.812 KTP yang terbagi di 8 Kabupaten dan Kota se Sulut,” kata Momongan.

Lebih lanjut dijelasakannya, bakal calon ini wajib mengisi formulir yang disiapkan KPU dan input dalam Aplikasi Silon (Sistem Aplikasi Pencalonan)

“Data calon ini akan diinput di Aplikasi Silon yang disiapkan KPU, dan wajib mengisi formulir B1.1 yang didalamnya menyangkut item dalam KTP berupa, Nama, Alamat, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Pekerjaan dan Status Perkawinan. Waktu yang diberikan selama 30 hari,” terangnya.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/05*

KPU Sulut Gelar Sosialisasi Calon Perseorangan Pilkada 2020

TONDANO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Utara (Sulut) gelar sosialisasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kegiatan yang digelar di Aston Hotel Manado, Rabu (04/11) ini dihadiri sejumlah lembaga terkait, yakni unsur Polri, TNI, LSM, Pemerhati Pemilu, Perutusan Mahasiswa, serta Sejumlah Wartawan Liputan KPU Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan tujuan sosialisasi yang digelar guna menarik minat warga Sulawesi Utara untuk mendaftar dalam Pencalonan Kepala Daerah 2020.

“Sosialisasi ini sangat penting bagi para bakal calon kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan maju di Pilkada serentak 2020 mendatang. Salah satunya syarat dukungan untuk calon independen atau perseorangan wajib menyertakan surat pernyataan dari pemilik KTP,” kata Mewoh

Lebih lanjut dijelasakannya, masyarakat perlu memahami dan mengetahui persis bagaimana mekanisme ketika akan menjadi calon perseorangan dalam pilkada nanti.

Bahkan dikatakan Mewoh jika siapa saja bisa mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon melalui jalur perseorangan.

“Kalau mendaftar siapa saja bisa, karena nanti kami akan melihat apakah sesuai ketentuan atau tidak. Seperti dokumen persyaratan maupun hal lain yang terkait aturan,” jelas Mewoh.

Selain itu menurutnya untuk penyerahan dokumen persyaratan akan dilakukan mulai 16 sampai 20 Februari 2020. Karena setelah itu untuk dukungan terhadap bakal pasangan calon akan diverifikasi faktual lagi. Hal itu guna mengetahui dan memastikan apakah dukungan itu benar diberikan serta sesuai aturan atau tidak.

Jika nantinya ditemukan tak sesuai dan menyalahi aturan maka dukungan tersebut akan langsung dicoret.

Sementara Koordinator Divisi Parmas KPU Sulut Salman Gansalangi menjelaskan bahwa dalam sosialisasi itu pihaknya melibatkan sejumlah Ormas, LSM maupun Pers. Dengan harapan melalui elemen ini tahapan tersebut bisa diketahui masyarakat Sulut.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/05/12/2019*

Dukungan Calon Perseorangan Ada Batasan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan sosialisasi pencalonan perseorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut, Rabu (4/11) di salah satu hotel di Manado. Sosialisasi tersebut dilakukan terbuka. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh saat diwawancarai mengatakan, ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut.

“Misalnya soal dukungan ada batasan dan



larangan siapa-siapa yang boleh memberi dukungan, kecuali PNS, TNI/Polri, perangkat desa, kepala desa, jajaran penyelenggara pemilu. Itu di undang-undang,” kata Ardiles.

Selain itu juga yang penting untuk diinformasikan yakni KPU telah buka layanan helpdesk. “Ini penting diinformasikan. Sebab menggunakan perangkat teknologi informasi untuk memudahkan calon peserta pemilihan. Sistem ini memudahkan,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, jika nanti dokumen persyaratan perseorangan yang sudah didapat, di input ke sistem. “Nanti diolah, dilakukan penelitian termasuk menganalisa dukungan ganda. Misalnya ada 1 orang mendukung 2 calon,” paparnya.

Sistem ini, lanjutnya, perlu dikenalkan kepada bakal calon peserta. “Sejak diumumkan, KPU sudah buka layanan helpdesk. Setiap hari jam kerja, silahkan lakukan konsultasi syarat-syarat lainnya,” tutur Ardiles.

Dirinya berharap, setelah kegiatan sosialisasi tersebut, ada yang menindaklanjuti untuk berkonsultasi lebih lanjut. Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda saat diwawancarai usai membawa materi di sosialisasi mengatakan bahwa siapa saja berwenang melakukan sosialisasi tentang tahapan, misalnya apa yang tidak boleh dilakukan.

“Seperti TNI, Polri, ASN tak bisa lakukan sosialisasi calon,” ucapnya. Menurutnya, dalam sosialisasi juga diingatkan soal pidana pemilu dan potensi kecurangan dalam perseorangan.

“Misalnya ada manipulasi dukungan, dokumen palsu, memakai dukungan lama. Kita berupaya agar dokumen yang berisi fakta bahwa yang bersangkutan benar-benar mendukung,” terangnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Sosialisasikan Pencalonan Perseorangan di KPU Kabupaten/Kota

TONDANO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) datang ke setiap Kabupaten dan Kota guna mensosialisasikan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Dari pantauan Wartawan Media ini, Sabtu (07/11) dibawah pimpinan DR.Ardiles Mewoh yang adalah Ketua KPU Sulut, beserta Komisioner Yessy Momongan, S.Th.M.Si yang adalah Ketua Divisi Teknis mensosialisasikannya di Kabupaten Minahasa.

“KPU Sulut dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terus melakukan sosialisasi terhadap semua tahapan pemilihan diantaranya pencalonan calon perseorangan,” kata Ketua Ardiles Mewoh.

Lebih lanjut dijelaskannya, KPU berkeinginan seluruh masyarakat mengetahui tahapan pilkada sementara berjalan. “Kami berkeinginan seluruh masyarakat tau bahwa ada pencalonan dari perseorangan walaupun sebagian besar orang sudah tau,” ujarnya.

Dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pihak KPU sendiri terdapat dua jalur pencalonan yakni melalui Partai Politik serta Pencalonan Perseorangan. “Ada dua jalur pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 ini yakni lewat partai politik serta perseorangan. Namun dalam peryaratannya banyak yang belum tau. Jadi kami berharap, kita menjadi medium untuk perpanjangan tangan bagi masyarakat. baik stakeholder dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan berjalan aman dan damai,” terang Mewoh.

Untuk Pilkada 2020 ini, Mewoh pun meminta masyarakat Kabupaten Minahasa akan bekerja sama dengan pihak



Penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi Pemilih.

“Yang kami inginkan adalah partisipasi masyarakat dalam TPS pemilihan ini meningkat. Dalam pemilu lalu, partisipasi masyarakat Sulawesi Utara masuk angka 83 persen. Sangat di sayangkan nanti kalau dalam pemilihan pilkada turun jadi kita sangat berharap partisipasi masyarakat akan naik di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti,” pintanya.

Sementara Yessy Momongan dalam penjelasan calon perorangan menerangkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bakal dikumpulkan setiap calon perorangan berjumlah 19.0812 KTP.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju dalam Pilgub berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih. Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum yang baru lewat terdata 1.908.115 jumlah pemilih, itu berarti calon perorangan harus mengumpulkan KTP berjumlah 190.812 KTP yang terbagi di 8 Kabupaten dan Kota se Sulut,” kata Momongan.

Lebih lanjut dijelaskannya, bakal calon ini wajib mempersiapkan operator yang bakal menginput setiap data pendukung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU. “Ada 30 hari dan dimulai dari tanggal 16 Desember ini data pendukung wajib diisi dalam aplikasi Silon (Sistem Aplikasi Pencalonan) yang disiapkan KPU. Operator ini akan kita beri bimbingan teknis (Bimtek) terkait pengisian datanya,” imbuhnya.

Hadir dalam sosialisasi ini, Ketua KPU Minahasa Lord CH Malonda, serta Komisioner Rendy Suawa, Kristoforus Ngantung, Lidya Malonda serta Piter Mawikere.dari Perutusan Bawaslu Minahasa Donny Rumagit, serta Polres Minahasa Kasat Intel Polres Minahasa.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber : *Sulutpos.com/07/12/2019*

Tahapan Pilkada, Sitindaon Warning Protokol Kesehatan

MINSEL - Tahapan Pemilihan bupati (Pilbub) dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus berjalan. Sebanyak 114 personel jajaran Polres Minsel, dilibatkan dalam kegiatan pengamanan. Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, ketika diwawancarai mengaku bahwa masih ditemukan sejumlah warga yang tidak memakai masker saat mengantar bakal calon bupati dan wakil Bupati Minsel mendaftar di KPU.

Menurut Sitindaon, bahwa memakai masker adalah salah satu anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan.

“Kami tentu terus mengimbau kepada warga yang tergabung dalam massa pendukung pasangan calon kontestan Pilkada tahun 2020, agar memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Jadi kepada warga yang terlibat langsung dalam kelompok massa pendukung agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker, ini adalah bagian dari anjuran pemerintah yang harus kita patuhi bersama,” imbuhnya.

Kapolres Minsel juga menjamin bahwa jajarannya bersama TNI siap menjaga keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Pilkada merupakan pesta rakyat, bagian dari perwujudan atau implementasi sistem demokrasi di negara kita. Masyarakat yang melibatkan diri dalam pesta demokrasi ini, disilakan, kami aparat TNI/Polri siap menjaga, mengawal dan mengamankan,” kuncinya. (*)

Penulis : *Balladewa Setlight*

Sumber: *Manado Post*

Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Libur

MINAHASA—Penyelenggara pemilu diminta agar tidak mengenal dengan kata libur. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut



Ardiles Mewoh saat membuka sosialisasi pencalonan perseorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut, Sabtu (7/12) di Kantor KPU Minahasa. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada di Sulut tahun 2020.

“Banyak yang harus dikerjakan oleh penyelenggara, sekalipun diperhadapkan dengan hari libur. Saya berharap penyelenggara bisa bekerja, termasuk di hari raya keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru,” seru Ardiles.

Seluruh jajaran penyelenggara, dalam aspek menyelenggarakan pilgub, terus melakukan sosialisasi terhadap sebuah tahapan pemilu.

“Kali ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan pencalonan calon perseorangan. Dan tentu kami berkeinginan seluruh masyarakat di Sulut tahu bahwa ada pencalonan lewat jalur perseorangan. Tapi kami ingin memastikan itu apakah semua orang sudah tahu,” terangnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Rumuskan PKPU Soal Eks Napi

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU), siap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait aturan yang akan membatasi keikutsertaan eks narapidana dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU RI Viryan Aziz, saat menghadiri sosialisasi pembentukan badan adhoc pemilihan serentak, Jumat (27/12) silam, di Hotel Four Points by Sheraton Manado.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan KPU (PKPU) yang akan menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. “Nantinya PKPU spesifik mengatur jika eks narapidana harus memiliki jeda waktu lima tahun selepas masa hukuman, baru bisa mencalonkan diri,” tuturnya.

Meski begitu Aziz mengatakan pihaknya melakukan pengkajian pasal dalam PKPU

yang mengatur terkait masa hukuman eks narapidana dengan tafsiran tentang lima tahun tersebut. “Apakah dihitung pas keluar penjara atau seperti apa, itu nanti kita lihat saja bagaimana,” kuncinya.

Terpisah Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh mengatakan pihaknya hingga saat ini, masih menunggu juknis dari KPU RI. “Karena sebagai penyelenggara Pilkada, kita harus menunggu keputusan resmi dari KPU RI, baru bisa mengeksekusi putusan tersebut,” bebarnya

“Di sisi lain, sebagai penyelenggara, kita harus mematuhi putusan konstitusional. Pastiya kedepan jika sudah ditetapkan KPU RI, maka kita siap mengeksekusi aturan itu,” ujarnya.

Mewoh pun mengungkapkan pihaknya akan lebih selektif memeriksa berkas bakal calon. “Hal ini guna mewujudkan Pilkada 2020 yang berintegritas, bermartabat dan sesuai aturan yang ada,” singkatnya. (*)

Penulis: *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Gelar Sosialisasi Pencalonan Perseorangan

Manado - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang akan di laksanakan pada tahun 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Rabu (4/12/19) pagi menggelar kegiatan sosilasi pencalonan perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Ketua KPU Sulut DR. Ardiles Mewoh membuka secara langsung kegiatan sosiliasi tersebut.

Dalam sambutannya Mewoh mengatakan pentingnya kegiatan sosialisasi ini dikarenakan dalam pilkada nanti ada dua jalur yang bisa diikuti pertama lewat jalur partai politik dan kedua lewat jalur perseorangan.

“Jadi kami selaku penyelenggara pemilukada perlu menggelar sosialisasi



menyeluruh juga kepada semua pihak. Harus kita sampaikan terkait jalur perseorangan supaya tidak ada hambatan informasi untuk mengetahui regulasi, ketentuan-ketentuan teknis, serta skema waktu tahapannya,” jelasnya.

Dia juga mengatakan dalam proses verifikasi para peserta nantinya sudah disediakan aplikasi online guna mempermudah proses tersebut.

“Kami sudah membuka layanan tersebut di hari kerja mulai kemarin tanggal 3 Desember,” ungkapnya.

Dikatakannya pula, tahapan sosialisasi pencalonan perseorangan ini sudah diumumkan baik lewat media cetak maupun media elektronik.

“Jadi waktunya memang masih panjang untuk dipersiapkan dengan baik bagi bakal calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen, yakni dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 20 februari 2020,” kata dia, sembari menambahkan minimal dukungan jumlahnya 1.812.000 suara dan harus tersebar lebih dari 50% di 15 Kabupaten dan Kota.

Penulis: *RAKA*

Sumber: *Elnusanews.com*

KPU Sulut Mantapkan Pengendalian Internal

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar Rapat Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Minggu (17/1). Rapat yang akan digelar selama tiga hari itu merupakan upaya melakukan penguatan pengendalian internal dalam rangka optimalisasi pelaporan keuangan dan kinerja tahapan Pemilihan 2020.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh saat membuka kegiatan itu mengharapkan agar implementasi SPIP di KPU kabupaten/kota makin ditingkatkan sampai akhir tahapan Pilkada, bahkan sesudah Pilkada. Raker kali ini terbilang istimewa karena dihadiri

Inspektur Inspektorat KPU RI, Adiwijaya Bakti.

Dalam materinya, inspektur Adiwijaya yang memaparkan materi tentang Implementasi SPIP di lingkungan KPU menyebutkan bahwa SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus yang ditujukan untuk memberi jaminan untuk tercapainya tujuan organisasi.

“Ini layaknya sebuah proses mawas diri yang harus melekat pada setiap tindakan dan kegiatan dari pimpinan hingga staf,” ungkap Adiwijaya. Penanggung jawab utama pengendalian internal adalah Ketua KPU. “Sedangkan penanggung jawab operasional sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan yang secara teknis dilaksanakan oleh sekretaris selaku Ketua Satgas / Pokja SPIP,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon dalam arahannya berharap, melalui Raker SPIP ini dapat dihasilkan output berupa identifikasi kendala dalam kegiatan pengendalian dan formulasi rencana penyelenggaraan SPIP di tahun 2021.

“Peserta kegiatan ini adalah Pokja/Satgaa SPIP KPU Sulut, dan peserta utusan KPU Kab/Kota meliputi Kadiv Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kasubag Hukum,” tambahnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Masyarakat Baiknya Tahu Setiap Tahapan Pilkada

MANADO—Salah satu suksesnya pemilu adalah partisipasi pemilih. Hal ini menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk gencar menginformasikan segala tahapan pilkada. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya terus membangun kesadaran untuk lebih masif sampaikan ke



publik informasi yang benar terkait tahapan pilkada.

“Kita harus sajikan berita benar. Bukan hoax. Keinginan dan komit kami menyajikan informasi yang valid ke publik soal tahapan pilkada,” ujar Ardiles dalam kegiatan media gathering, Rabu (29/1) di Manado.

Menurutnya, pihaknya butuh inovasi supaya informasi tersebut sampai ke publik. “Saat media menginformasikan setiap tahapan, ini bisa menaikan partisipasi publik. Dengan adanya pemberitaan luas dan masif, masyarakat bisa ketahui setiap proses tahapan pilkada. Ini jembatan bagi KPU,” terangnya. Dirinya berkomitmen bahwa setiap tahapan akan melibatkan publik. “Kita akan lakukan inovasi supaya informasi sampai ke publik. Kita ingin publik ketahui. Maka dari itu perlu sebarluaskan informasi ini,” ucapnya. Dirinya berharap di pilkada tahun ini media tidak sampai keluarkan informasi yang keliru.

“Kita butuh dukungan media untuk memberikan informasi yang benar,” haranya. Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi menambahkan bahwa pihaknya inginkan kerja sama dengan media untuk melakukan sosialisasi demi meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada.

“Misalnya seperti apa berita yang dipublikasikan. Kami inginkan partisipasi masyarakat itu bisa ikuti dari tahap demi tahap. Bukan hanya di hari H saja,” tuturnya. Pihaknya berharap agar peran media itu bisa memberikan informasi tahapan supaya sampai ke masyarakat.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Modal Sejarah, Pilkada di Sulut Diyakini Berintegritas dan Demokratis

MANADO—Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengaku yakin bahwa KPU Sulut dan 7 kabupaten/kota akan bisa selenggarakan pilkada dengan baik dan berintegritas serta demokratis dan damai.

Hal itu dikatakannya, saat menghadiri launching pilkada berintegritas yang digelar KPU Sulut, Jumat (31/1) pekan lalu di Kawasan Mega Mas.

“Sulut punya akar tradisi dan sejarah yang panjang akan nilai demokrasi dan perdamaian. Yang paling lama disebutkan dalam launching yakni Watu Pinabetengan. Saya pernah ke sana. Memang menunjukkan bahwa sejak lama para leluhur kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah,” terangnya.

Banyak di daerah lain di Indonesia, akar sejarahnya itu adalah otoritarianisme dan kekerasan. Selesaikan masalah dengan perang sampai habis-habisan.

“Tapi di Sulut punya akar tradisi baik. Selesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Meski hati panas,” ucapnya. Dirinya berharap pilkada Sulut bisa berlangsung baik meski beda pendapat.

“Itu biasa. Tapi ketika masyarakat menggunakan hak suara di TPS dan hasilnya apapun, itulah nilai musyawarah tertinggi. Karena kedaulatan ada di tangan pemilih. Siapapun yang menang maka harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Karena itulah tradisi yang sejak lama berakar kepada masyarakat Sulut,” tutupnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salam yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, memberi apresiasi kepada KPU se-Sulut karena sudah nyatakan komitmen untuk berintegritas.

“Sekarang kami dari DKPP menunggu janji agar komitmen itu dilakukan serius. Jangan sampai malam ini Festival Anggaran, nanti 23 September, festival pelanggaran,” sindirnya sembari berpesan agar KPU se Sulut jaga integritas, netralitas. “Kami harap pilkada Sulut bisa jadi yang terbaik di Indonesia,” haranya.

Launching tersebut dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan antara lain Festival Anggaran, Night Run, lomba-lomba dancer,



game online, Masamper dan lainnya. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, dalam kegiatan tersebut salah satunya adalah Festival Anggaran. “Festival Anggaran ini dengan maksud agar publik bisa lihat, mengamati apa yang akan kita selenggarakan di tahun ini,” ujarnya.

Dirinya berharap agar pilkada tahun ini bisa berintegritas. “Kami percaya penyebaran berita hoax, kampanye hitam, politik uang gulung tikar dari Sulut. Ini menjadi keinginan dan harapan kami,” serunya.

Menurutnya, sesungguhnya sudah tercatat dalam sejarah dan tinta mas bahwa di Sulut sudah terjadi sejak lama dan tradisi sejak panjang soal berdemokrasi. “Ini menjadi keyakinan bagi kami dan modal untuk melaksanakan pilkada,” ucapnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Gelar Festival Anggaran

Manado - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan menggelar Festival anggaran yang akan menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Bertempat di hotel Aryaduta Manado, Rabu (29/1) Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, S.Kel mengungkapkan kegiatan ini untuk masyarakat.

“Tujuan festival anggaran ini untuk memberikan informasi dan seluas-luasnya kepada halayak masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang kami kelolah dan yang kami lakukan di penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, Jelasnya

Kemudian iya menambahkan akan banyak kegiatan yang akan dilombakan

“Jadi ada beberapa kegiatan yang akan di laksanakan ini guna untuk mengait para pemilih, seperti masamper mengait pemilih usia orang tua, dancer, yel-yel dan game online untuk mengait pemilih milenial, lomba

fotografer untuk komunitas fotografer dan ekspedisi moral untuk komunitas seni, Ucapnya.

Lanjutnya “Nanti kegiatan akan dipusatkan di lapangan basket megamas Manado pada hari Jumat mulai pukul 11.00 Wita. Akan ada 8 stand yang 7 antaranya dari kabupaten/ kota sebagai penyelenggara pilkada serentak ini dan 1 stand untuk KPU Provinsi.

Sementara itu, kegiatan ini akan melaunching maskot dan jinggel untuk Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan akan di meriahkan oleh Basgilanos sebagai penciptanya.

Kegiatan seperti ini baru di Sulawesi Utara dan ini memang inisiatif kami untuk memberikan sisi-sisi kegiatan yang berbeda untuk masyarakat Sulawesi Utara.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

Wabup RD: Warga Minahasa Berpartisipasi Ikut Pilkada 2020

MINAHASA -- Wakil Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten, Minahasa Ir. Ronald Sorongan, MSi menghadiri Opening Ceremoni Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020, bertempat di Lapangan Basket Megamas Manado, Jumat (31/01/20).

Dihadiri oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), DR. Alfitra Salam, APU, Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua KPU Sulut Ardiles M. R. Mewoh, mewakili Gubernur Sulut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulut, Evans Steven Liow, S.Sos serta tamu dan undangan.

KPU Sulawesi Utara menggelar launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Sulut agar meriah dan semarak. Ditandai dengan memukul tetengkoren, menandakan bahwa Pemilihan Gubernur



Sulut 2020 secara serius di dengungkan kepada masyarakat di Sulawesi Utara dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mengapresiasi KPU dengan harapan Masyarakat Minahasa akan memberikan kontribusi yang terbaik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020. (*)

Penulis: RYAN T

Sumber: *suluttimes.com*

Lakukan Pencegahan Covid, Tahapan Pilkada Tetap Jalan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini belum memiliki opsi penundaan tahapan Pilkada 2020. Menyusul meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia. Dari rilis yang dikeluarkan KPU RI, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan bahwa pihaknya memastikan akan laksanakan sesuai poin yang disampaikan KPU RI lewat rilis tersebut. "Kami pasti akan patuhi arahan. Nanti ada surat edaran, kemudian kami akan teruskan ke jajaran sampai di tingkat bawa.

Menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia, KPU RI telah melakukan rapat pleno dan memutuskan beberapa hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 tersebut. Sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilihan 2020.

Pertama, KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk Ketua dan Anggota KPU. Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja. Sebagian bekerja masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau Work from Home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi

maupun di ruang kerja. Sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.

Kedua, terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pemilihan 2020 yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini (bulan Maret-April 2020), KPU mengatur sebagai berikut:

1. Saat ini tahapan rekrutmen PPS sedang berlangsung, yaitu pengumuman PPS terpilih akan dilanjutkan dengan pelantikan PPS agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah (berpencar di 5 titik), apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang, pagi hingga sore, untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak.
2. Tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslون perseorangan dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat, jaga jarak dalam berkomunikasi, hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan.
3. Tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan bapaslون perseorangan.

Ketiga, KPU juga menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020, dan dijadwalkan ulang mulai 1 April 2020, seperti Bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan 2020.

"KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua minggu inipenanganannya berhasil dengan baik.



Sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik,” tutup Ardiles mengutip rilis KPU RI.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Tarsius, Sampiri dan Coelacanth Jadi Ikon Pilgub 2020

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut telah me-launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 pada Sabtu (01/2). Launching yang digelar di Lapangan Mega Mas, Kota Manado itu, sekaligus mengenalkan ikon atau maskot Pilgub 2020 yakni Tarsius, Sampiri dan Coelacanth.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, tiga maskot tersebut mempertimbangkan unsur kearifan lokal dan kultur budaya Minahasa. “Kearifan lokal menjadi inspirasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sulut,” ujar Mewoh didampingi empat komisioner lainnya, Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Yessy Momongan dan Lanny Ointu, serta Sekretaris KPU Pujiastuti.

Ia memaparkan, pemilihan Sampiri sebagai maskot merepresentasikan burung khas dari Kepulauan Talaud. “Kita pilih burung ini karena karakteristiknya. Paruh menggigit membawa surat suara. Menyiratkan kicauan atau tanda bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 telah berlangsung. Bulu sayapnya berjumlah 15 sebagai simbol pelaksanaan Pilgub Sulut berlangsung di 15 Kabupaten/Kota,” papar Ardiles.

Masih soal Sampiri, sayap kiri burung ini mengembang, mengepak dan sayap kanan mengatup, sebagai simbol pelaksanaan Pilkada diwarnai kemeriahan dengan berbagai dinamika demokrasi. “Mahkota Sampiri sebagai simbol jabatan tinggi yang diperebutkan adalah bagian tak terpisahkan dari satu tubuh Sulut yang harus tetap berdiri tegak memancarkan kilau

warna-warni keberagaman,” terangnya. Sementara itu, Tarsius yang menjadi maskot juga memiliki nilai kultural. “Tangan menggenggam paku coblos sebagai manifestasi pemberian suara setiap pemilih pada Pilgub 2020. Maskot Tarsius menggunakan pakaian adat Minahasa sebagai simbol identitas kultur. Membuka kedua tangan, menjenjang kedua kaki dan mengebas ekor sebagai pesan kemandirian dan kebebasan dalam setiap pilihan,” terang Salman Saelangi Komisioner divisi SDM dan sosialisasi.

Sedangkan maskot Coelacanth berkostum Mongondow, mengekspresikan kekayaan budaya Sulut. “Coelacanth berdiri dekat kotak suara sebagai simbol pelaksanaan Pilgub sebagai bagian sejarah Sulut sejak dulu kala sebagaimana Coelacanth tetap eksis sebagai makhluk yang hidup sejak purba kala,” paparnya.

Sebelum dilakukan launching, komisioner KPU RI Pramono Ubaid, anggota DKPP Alfitra Salamm, lima komisioner KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda bersama Forkopimda melakukan pemukulan Tetengkoren secara bersama. Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid menaruh harapan kepada KPU Sulut bisa menyelenggarakan Pilkada serentak yang berintegritas dan damai.

“KPU harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah nanti,” ujar Ubaid. Ketua KPU Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh mengaku akan transparan dalam semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pilkada 2020 mendatang.

“Anggaran Pilgub Sulut 2020 sebesar Rp 220 miliar. Kita akan transparan dengan anggaran Pilkada tersebut. Dengan anggaran yang sudah diberikan, maka outputnya terselenggara Pilgub Sulut 2020 hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Sementara outcome adalah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2020-2025 yang



berdedikasi, berakhlak mulia dan mampu mengemban amanah rakyat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku,” ujar Ardiles.

Dia pun menegaskan KPU Sulut berkomitmen menciptakan Pilkada Sulut yang berintegritas. “Kita hadir di kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas dan tentunya transparan untuk semua pihak. Mari kita jadikan Pilkada ini sebagai ajang memilih pimpinan daerah yang benar-benar sesuai dengan kemauan rakyat serta sesuai dengan aturan yang ada,” kata Mewoh seraya berharap semua pihak sepakat melawan hoax, kampanye hitam serta politik identitas.

“Sebagai catatan histori tentu sebagai masyarakat Sulut tidak boleh lupa bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung pertama di Indonesia itu diselenggarakan di Provinsi Sulut,” ujar Ardiles Mewoh. Ia menjelaskan, fakta sejarah periode demokrasi di Minahasa terjadi empat fase. Yakni periode Watu Pinawetengan 670/1000, tradisional/ Malesung/Minahasa 1428, periode tradisional Minahasa masa Kolonial 1824, Otonomisasi Minahasa Masa Kolonial 1919.

“Mari kita buktikan demokrasi substansial electoral telah menjadi kultur kita dan nilai-nilai demokrasi substansial akan terus kita kembangkan,” ajaknya.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentari*

KPU Sulut Sosialisasikan Tahapan Penyerahan Dukungan Paslon Perseorangan Pilgub 2020

MANADO - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Utara DR. Ardiles Mewoh menegaskan KPU Sulut telah siap melaksanakan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020.

Penegasan Ardiles tersebut disampaikan saat membawa sambutan pada pembukaan kegiatan sosialisasi

dan rapat koordinasi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 yang digelar di Aula KPU Sulut, Jumat (14/02/20) pagi.

Ardiles yang didampingi komisioner KPU Sulut lainnya seperti Salman Saelangi, Yessy Y. Momongan dan Lanny A. Ointu serta Meidy Y. Tinangon mengatakan, tahapan sosialisasi dilaksanakan sesuai PKPU No 16 tahun 2019 program terkait jadwal pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“KPU mulai menerima dokumen dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur mulai 15-20 februari 2020, dengan memasukan syarat dukungan untuk calon minimal 190 415 dukungan KTP yang tersebar di 15 Kabupaten Kota se-Sulut,” kata Ardiles. Lanjut, kata Ardiles, untuk tahapan sudah dimulai sejak Oktober 2019 lalu karena untuk kegiatan pencalonan perseorangan ini memang sudah terlebih dahulu dilakukan.

“Syarat minimal dukungan dan sebaran ini sudah kita sosialisasikan secara luas di semua stakeholder dimana harus memenuhi dukungan minimal di 8 kabupaten/kota yang ada,” ujarnya.

Maka dari itu, dirinya pula menandakan sosialisasi ini penting supaya diketahui oleh masyarakat luas. “Dalam proses penyerahan dokumen berkas paslon perseorangan harus diketahui oleh semua orang. Maka dari itu sebagai penyelenggara sudah harus siap dalam menerima penyerahan dokumen calon perseorangan,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Simulasi tata cara pendaftaran Paslon Perseorangan yang dipandu oleh komisiner KPU Sulut Yessy Y. Momongan.

Penulis: *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*



Sambangi KPU Sulut, PPUA PENCA Tuai Apresiasi

MANADO - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut DR. Ardiles Mewoh, beserta Komisioner KPU Sulut Meidy Yafet Tinangon dan Lanny Ointu menerima kunjungan dari Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Steven Kowaas, pada Senin (24/02/2020) kemarin.

KPU Sulut sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh organisasi yang dipimpin oleh Steven Kowaas tersebut.

“Steven adalah penyandang disabilitas, dia Tuna netra. Kami sudah bermitra dengannya sejak di Minahasa lalu, dan kami mengacungkan jempol dengan semangat tingginya untuk mengangkat kaum difabel, dia menguasai regulasi dan ini menunjukkan meskipun dia tuna netra tidak menyurutkan semangatnya untuk membaca,”katanya.

Lanjutnya, Tinangon mengakui bahwa mereka juga telah berbincang-bincang bagaimana nantinya Pilkada Sulut bisa ramah bagi kaum disabilitas.

“Kami telah bercakap-cakap bagaimana penyandang disabilitas nantinya bisa berpartisipasi dalam Pilgub 2020, bagaimana nantinya Pilkada ramah disabilitas dan makin aksesibel”, tutup Tinangon.

Dalam pertemuan tersebut Steven Kowaas turut menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus PPUA Penca Sulut kepada Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Penulis: *RAKA*

Sumber: *Elnusanews.com*

KPU Sulut dan Bank Mandiri Teken Kerja Sama

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut jalin kerja sama dengan Bank Mandiri Persero Tbk yang ditandai dengan tanda tangan MoU, Selasa (25/2) di salah satu hotel di Manado. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, hal ini dilakukan dalam

rangka melancarkan proses penyaluran dana hibah dalam Pilkada 2020.

“Dana hibah yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada 2020, harus kita tampung di rekening khusus penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Diterangkannya, awalnya pihaknya melakukan pemilihan bank dulu. Sebab, fasilitas yang disediakan pihak bank, diakui jadi salah satu penilaian penting untuk menentukan bank mana yang akan menampung dana hibah tersebut.

“Mana bank yang dapat menjamin kelancaran penyaluran dana sampai ke tingkat TPS, itu yang kita prioritaskan. Itulah yang menjadi pilihan dari KPU Sulut,” tandasnya. Ditambahkannya, ada mekanisme dalam penilaian untuk menentukan bank ini. Dan itu ada ketentuan dalam Peraturan KPU.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Publik Harus Pahami Produk Hukum Pilkada 2020

MANADO— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut merasa penting untuk menyebarluaskan produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut. Selasa (25/2) di Manado, KPU Sulut mengundang stakeholder dalam rangka penyuluhan sehubungan dengan produk hukum yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara.

“Kami berkeinginan kegiatan ini sedapat mungkin menjangkau stakeholder yang ada,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Menurutnya, hal ini adalah satu kewajiban pihaknya sebagai penyelenggara pemilu untuk menyampaikan, sebarluaskan, memastikan seluruh stakeholder memahami dan mengetahui produk-produk hukum dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur. “Terutama yang berkepentingan langsung



atau stakeholder utama dalam pilkada,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, stakeholder utama dimaksud yakni parpol yang nantinya akan presentasikan ke masing-masing calon yang akan diusung. “Selain itu juga, stakeholder utama yakni pemilih atau warga. Kita harap kehadiran dari stakeholder melalui tokoh-tokoh agama, masyarakat bisa presentasikan produk hukum ke masyarakat,” tuturnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Tak Paham Regulasi Bisa Timbulkan Konflik dan Kerawanan

MANADO—Kerawanan dan konflik sering muncul dalam pemilihan umum atau kepala daerah, salah satunya karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan regulasi. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut merasa penting menyebarluaskan aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini.

“Kita melaksanakan penyuluhan selain tujuan utamanya untuk menyebarluaskan informasi produk hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, juga supaya bisa meminimalisir potensi-potensi kerawanan dan konflik,” kata Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon, Kamis (27/2) usai menutup kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pilkada 2020 di salah satu hotel di Manado.

Menurutnya, konflik dan kerawanan dalam pemilu atau pilkada itu bisa juga terjadi kalau para pihak baik masyarakat atau stakeholder berbeda pemahaman terkait dengan regulasi. “Kalau kita sudah menyamakan persepsi terkait dengan aturan-aturan itu, maka kita berharap akan meminimalisir potensi-potensi kerawanan dan konflik itu,” terangnya.

Lebih jauh dikatakannya, namanya kontestasi, berarti ada konflik. Ketika ada perbedaan pendapat antara peserta

dengan penyelenggara, itu sudah potensi konflik. “Dan undang-undang memberikan wadah bagaimana konflik itu dilembagakan. Misalnya ajukan gugatan administrasi, sengketa, pidana atau etik juga,” tuturnya.

Jadi, lanjutnya, semua pihak itu berhak dan baiknya pahami produk hukum yang sudah disediakan. “Supaya tak salah persepsi dan terhindar dari konflik serta kerawanan dalam pilkada,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

8 KPU di Sulut ‘Banjir’ Duit

MANADO—Saat ini, tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Sulut mulai berjalan. Delapan daerah non penyelenggara turut dalam pelaksanaan Pilkada Sulut 2020. Pekan lalu, daerah non penyelenggara ini mendapatkan rencana anggaran biaya (RAB) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Dari delapan daerah tersebut, KPU Minahasa paling banyak mendapat RAB yakni sekira Rp 34,8 Miliar. Diikuti oleh KPU Bolmong Rp 24,3 Miliar dan KPU Sangihe Rp 21,6 Miliar (lihat grafis). Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan bahwa anggaran tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Pilkada Sulut 2020.

“Ada banyak item (peruntukannya). Sifatnya sudah di kabupaten/kota non penyelenggara,” kata Salaman kepada *Harian Manado*. Diterangkannya, KPU Minahasa paling besar mendapatkan anggaran karena badan ad hoc paling banyak. “Komposisi PPK dan PPS, nilai operasional honorinya besar. Jadi nilainya sebanding. Kemudian juga untuk sosialisasi, penataan pemilih. Misalnya rekap-rekap di level kabupaten/kota,” ujarnya. Selain itu juga, anggaran tersebut akan digunakan untuk pendataan pemilih, sosialisasi, badan ad hoc, honor, pelantikannya, logistik, bimtek dan lainnya. “Dan untuk pelantikan PPK, PPS dilakukan KPU kabupaten/



kota. Karena ada biaya pembentukan pelantikan, orientasi tugas dan lainnya,” terang Salaman. Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Lord Malonda menerangkan, setelah dirinya membaca singkat soal peruntukan RAB tersebut, ada sekira Rp 26 Miliar hanya untuk ad hoc.

“Kemudian nanti ada distribusinya. Memang paling banyak anggaran untuk ad hoc. Sebab ada 25 kecamatan, 270 desa. PPS saja 810. Itu hanya 3 orang. Belum juga ada sekretariat. Jadi 810 kali dua. Kemudian 7 KPPS dan 2 Linmas. Itu semua dibiayai oleh DIPA provinsi,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk distribusi perlengkapan logistik misalnya spidol, bantal dan lainnya. “Kalau surat suara biasanya dari (KPU) pusat dan formulir dari provinsi. Ada juga perekrutan PPK PPS, bimtek sampai KPPS sesuai dengan DIPA,” jelasnya sembari menambahkan bahwa untuk perekrutan PPK/PPS nanti dilakukan mulai Januari “Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal sampai pada pelantikannya,” tutup Malonda.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Mengangkat Tema “Bersama Media Sukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020”, KPU Sulut Gelar Media Gathering

MANADO--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), Rabu (29/01/2020) pagi, menggelar kegiatan media gathering yang mengangkat tema Bersama Media Sukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Kegiatan Media Gathering yang menghadirkan narasumber dari Dewan Pers Agus Sudibyo tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Dalam sambutannya, Mewoh mengatakan bahwa media sangat berperan penting dalam dalam mensukseskan pilkada di Sulut.

“Peran media dalam mensukseskan pilkada dinilai sangatlah penting dalam mensosialisasikan setiap tahapan pemilihan, oleh karena itu mengapa kegiatan media gathering ini kami laksanakan,” ungkapnya.

Dirinya berharap dengan digelarnya kegiatan media gathring tersebut dapat semakin mempererat hubungan komunikasi antar media dengan KPU Sulut.

“Kami berharap mungkin dalam kegiatan hari ini walaupun sesungguhnya sudah terbangun komunikas dan cara kerja tapi setelah dengan adanya kegiatan ini akan lebih baik lagi bagi cara kita bekerja melakukan kegiatan-kegiatan terkait tahapan tahapan pemilihan bersama media untuk bersama-sama di kegiatan Pilkada yang ada di Sulut.,” jelasnya.

Sementara itu, dari dewan pers sendiri Agus Sudibyo dalam paparannya mengatakan bahwa di era digitalisasi para jurnalis dituntut untuk meningkatkan kompetensi lewat uji kompetensi wartawan.

“Jurnalis dan media perlu memperhatikan kualifikasinya, ya tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pers. Tantangan media konvensional yaitu bukan berada di internal, melainkan pada Google, Facebook, Twitter dan lainnya. Kita perlu mewujudkan inovasi, karena kita kalah bersaing media jurnalistik ditinggalkan pembacanya,” jelasnya.

Penulis: *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*

Ini yang Dilakukan KPU Sulut kepada Jurnalis Sebelum Pilkada

MANADO—Sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menyusun Media Gathering di Hotel Aryaduta, Rabu (29/1/2020).

Kegiatan ini dibuka Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan dihadiri Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Salman



Saelangi, serta salah satu pembawa materi Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Ardiles menyatakan, peran media sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada di Sulut. Tahun 2019 Pemilihan Legislatif (Pileg) berjalan dengan baik, media telah memberikan pendidikan politik yang baik sehingga berjalan dengan lancar dan berkualitas.

“Bekali para awak media, hari ini kami hadirkan Pak Agus Sudibyo anggota Dewan Pers untuk berbagi informasi dan berdiskusi agar lebih independen dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dan mempertahankan kerjasama yang baik dengan media,” ungkapnya.

Ardiles pun berharap, dengan kegiatan ini para jurnalis yang ada dapat bekerja dan berkomunikasi lebih baik lagi dengan KPU, untuk pelaksanaan Pilkada nanti.

“Semoga independensi dari pers menjadi komitmen bersama sehingga Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas,” imbuhnya.

Sementara itu, Sudibyo menyatakan, ada tiga syarat peran media dalam menghadapi Pilkada di Sulut. Pertama, jangan menjadi media sosial dalam hal negatif dan jadilah jurnalistik yang baik.

Kedua, menjaga independensi dan imparialitas sehingga pesan yang ada jurnalis bukanlah juru kampanye. Dan ketiga, jangan membuat pagar api artinya media yang harus memisahkan urusan berita dengan urusan iklan. “Media harus independen memberitakan sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya. (*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

Pendampingan Hukum Pilkada 2020 KPU MoU Kejati Sulut

MANADO—Dalam pendampingan hukum bila terjadi sengketa termasuk proses, hasil,

dan sengketa Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut bersama KPU Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Kejati Sulut, Kamis (30/1/2020) yang dilaksanakan Hotel Arya Duta Manado.

Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kesediaan Kejaksaan Tinggi Sulut yang mau bekerjasama. “Pilkada merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses/tata usaha negara maupun sengketa hasil,” tegas Mewoh.

Mewoh mengakui KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sementara itu, Kejati Sulut, Andi Muh Iqbal Arief mengingatkan KPU baik Provinsi, Kabupaten/Kota tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kejati dan Kejari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.

Penandatanganan MoU ini juga dilakukan di tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 23 September 2020. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPUD Sulut Gelar Festival Pemilihan Berintegritas

MANADO—Sambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengadakan Festival Pemilihan Berintegritas, dalam rangka Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Lapangan Basket Megamas, Jumat (31/01/2020).

Ketua KPU Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh sampaikan, hari ini 7 pemerintah kabupaten/kota akan bertindak sebagai pengurus



Pilkada hadir saat ini, mengomunikasikan dan berkeinginan untuk melaunching Pilkada serentak di Sulut sebagai Pilkada yang berintegritas. “Kami percaya ini dan percaya apa yang kami selenggarakan hari ini menjadi bagian keterbukaan KPU untuk masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, festival ini dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Pilkada di masing-masing daerah termasuk di Sulut, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti.

Ardiles pun berharap, penyelenggaraan Pilkada di Sulut tahun 2020 adalah penyelenggaraan yang berintegritas. “Kami percaya, kampanye hitam, politik identitas, gulung tikar dari Sulawesi Utara,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Alfitra Salam mengapresiasi yang KPU se-Sulawesi Utara yang sudah menyatakan komitmen untuk berintegritas. “Kami sekarang sedang menunggu janji Anda. Kami berjanji menunggu. Saya mohon kepada teman-teman semuanya pesan dari DKPP adalah untuk selalu meminta izin dan netralitas,” ungkapnya seraya menambahkan, kiranya Pilkada di Sulut menjadi Pilkada terbaik di Indonesia.

Sementara itu, Komisaris KPU RI Pramono Ubaid Thantowi percaya KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara akan mampu menyelenggarakan Pilgub dan Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dengan baik, dan berintegritas secara demokratis dan damai.

Sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, melalui Kepala Badan Kesbangpolda Sulut, Steven Liow menyampaikan, kiranya melaksanakan Pilkada dapat dilaksanakan dengan aman dan damai. “Perbedaan itu memang ada, tapi kita semua tetap bersaudara sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa,” imbuhnya.

Launching ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh seluruh tamu undangan yang hadir sebanyak 23 kali ketukan. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda, Ketua KPU dari 7 Kabupaten/Kota, serta jajaran KPU Provinsi Sulut. (*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

KPU Sulut Beber Postur Anggaran di Launching Pilkada

MANADO—Hari ini, (31/1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut akan launching Pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulut. Kegiatan akan dipusatkan di Kawasan Mega Mas. Dalam launching tersebut, berbagai kegiatan telah dikemas. Salah satu yang menarik yakni KPU akan memamerkan postur anggaran lewat Festival Anggaran.

Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, Festival Anggaran adalah bagian dari paket kegiatan launching Pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulut. “Festival Anggaran ini akan menyajikan postur anggaran atau lebih dikenal dengan RKA oleh KPU kabupaten/kota yang gelar pilkada,” ujarnya.

Diterangkan Salman, dalam festival itu nantinya akan ditampilkan secara utuh postur anggaran dan penggunaannya. “Mereka 7 KPU kabupaten/kota sudah siapkan secara detail. Nanti disediakan stand. Inti yang disediakan adalah dokumen RKA,” jelasnya.

Selain Festival Anggaran, pihaknya juga telah mengatur sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat di launching Pilkada 2020. “Launching dari siang. Ada beberapa kegiatan lomba. Fun run malam hari start dari God Bless finis di Mega mas. Kemudian Lomba masamper, yel-yel dan dancer. Ini untuk menjangkau pemilih yang berusia di atas milenial,” kata Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi.

Di siang hari jelang sore, ada juga lomba fotografer dan game online di kompleks



Mega mas. “Lomba maskot dan jingle pilkada. Nanti akan diisi dengan Basgılanos,” paparnya. Yang menarik juga, lanjutnya, ada festival anggaran. “Nanti akan sajikan RKA masing-masing kabupaten/kota ke publik. Ada tenda-tenda disediakan. Kemudian ada demo moral pemilihan,” tuturnya.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menambahkan, Festival Anggaran tersebut dilakukan untuk transparansi. “Nanti dalam kegiatan tersebut masyarakat bisa melihat secara transparan anggaran yang sudah dan akan digunakan,” kata Ardiles. Terkait dengan anggaran, lanjutnya, memang banyak dipergunakan untuk Adhoc. “Nah, pokoknya KPU Sulut dan KPU se-Sulut akan melaporkan semuanya dengan transparan kepada seluruh masyarakat Sulut,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Perwakilan BPK Sulut Serahkan Hasil Pemeriksaan Kinerja KPU Sulut

MANADO—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara (Sulut), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Penyerahan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi kepada Ketua KPU, Sulut Ardiles Mewoh, Rabu (5/2/2020). Dan dihadiri Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti dan pejabat struktural BPK Perwakilan Sulut.

Karyadi mengemukakan, ada beberapa catatan yang diberikan untuk KPU Sulut. Kesimpulan catatan tersebut, akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, karena akan meningkatkan, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ardiles mengatakan, KPU akan menindaklanjuti tanggapan BPK dan memperbaiki kinerja untuk Pilkada 2020 dengan serentak.

“Memang ada beberapa catatan yang diberikan BPK, dan KPU akan menindaklanjutinya untuk diperbaiki,” ungkap Ardiles. (*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

KPU Sulut Sosialisasikan Tahapan Penyerahan Dukungan Paslon Perseorangan Pilgub 2020

MANADO - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Utara DR. Ardiles Mewoh menegaskan KPU Sulut telah siap melaksanakan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020.

Penegasan Ardiles tersebut disampaikan saat membawa sambutan pada pembukaan kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 yang digelar di Aula KPU Sulut, Jumat (14/02/20) pagi.

Ardiles yang didampingi komisioner KPU Sulut lainnya seperti Salman Saelangi, Yessy Y. Momongan dan Lanny A. Ointu serta Meidy Y. Tinangon mengatakan, tahapan sosialisasi dilaksanakan sesuai PKPU No 16 tahun 2019 program terkait jadwal pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“KPU mulai menerima dokumen dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur mulai 15-20 februari 2020, dengan memasukan syarat dukungan untuk calon minimal 190 415 dukungan KTP yang tersebar di 15 Kabupaten Kota se-Sulut,” kata Ardiles.

Lanjut, kata Ardiles, untuk tahapan sudah dimulai sejak Oktober 2019 lalu karena untuk kegiatan pencalonan perseorangan ini memang sudah terlebih dahulu dilakukan.

“Syarat minimal dukungan dan sebaran ini sudah kita sosialisasikan secara luas di



semua stakeholder dimana harus memenuhi dukungan minimal di 8 kabupaten/kota yang ada,” ujarnya.

Maka dari itu, dirinya pula menandakan sosialisasi ini penting supaya diketahui oleh masyarakat luas.

“Dalam proses penyerahan dokumen berkas paslon perseorangan harus diketahui oleh semua orang. Maka dari itu sebagai penyelenggara sudah harus siap dalam menerima penyerahan dokumen calon perseorangan,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Simulasi tata cara pendaftaran Paslon Perseorangan yang dipandu oleh komisiner KPU Sulut Yessy Y. Momongan.

Penulis: *RAKA*

Sumber: *Elnusanews.com*

Gelar Coffee Morning Bersama Media Massa. KPU Sulut Hadirkan Komisioner KPU-RI Ilham Saputra

SULUT — Guna mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, menggelar Coffee Morning bersama media massa, menghadirkan Komisioner KPU-RI, Ilham Saputra, Rabu (19/02/2020), bertempat di Kumpul Coffee & Eat Bahu Mall Manado.

Ketua KPU Sulut, Ardilles Mewoh, dalam diskusi menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2019 lalu tidak lepas dari peran pers. Begitu juga untuk menghadapi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, pers berperan penting untuk kesuksesan pelaksanaan pesta rakyat tersebut.

Sementara, Komisioner KPU-RI, Ilham Saputra, pada kesempatan itu menjelaskan, bahwa perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait syarat bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil

Bupati, sementara dalam pembahasan.

“KPU-RI saat ini sementara membahas dan mengkaji terkait regulasi, apakah mantan narapidana dapat diikutsertakan dalam Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang atau tidak. Itu sementara dibahas,” ujar Saputra.

Coffee Morning itu sendiri, dihadiri oleh Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan, Salman Sahelangi, Lanny Ointu, serta wartawan online, cetak dan elektronik. (*)

Penulis: *Ika*

Sumber: *portalsulutnews.com*

Paslon Harus Taat Protokol Kesehatan, Jangan Gunakan Masker Sebagai Formalitas

SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kesbangpol meminta para calon kepala daerah untuk tidak membuat kerumunan massa saat melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Para kandidat diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara.

“Di Pilkada ini kita berharap semua patuh. Jangan menggiring massa banyak. Ini berbahaya,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Steven Liow, hari ini.

Badan Kesbangpol Sulut menegaskan kembali kepada pasangan calon yang akan maju sebagai kepala daerah dapat mematuhi regulasi KPU RI tentang penerapan protokol Covid-19 di masa pilkada saat ini.

“Kemarin itu ada yang menggunakan masker sebagai formalitas saja. Habis itu langsung mencopot maskernya. Jangan salah sekarang ini semua pergerakan diawasi,” tegas Liow.

Dia menambahkan bahwa pencegahan penyebaran virus Corona ini dapat berjalan beriringan dengan tahapan Pilkada hingga pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang.



Diketahui, Mendagri Tito Karnavian menegur 72 kepala daerah petahana se-Indonesia yang dinilai melanggar protokol kesehatan saat deklarasi dan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dari 72 petahana, lima di antaranya berasal dari Sulut. (*)

Penulis: *Ronald Ginting*
Sumber: *suluttimes.com*

KPU Siap Libatkan PPUA Disabilitas di Pilkada 2020

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Senin (24/2) menerima audiens dari Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Sulut. PPUA tersebut adalah koalisi organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional dari berbagai ragam disabilitas yang mempunyai kesamaan tujuan demi terwujudnya pemilu yang luber, jujur, adil, aksesibel dan non diskriminasi.

Menurut Ketua PPUA Sulut Steven Kowaas, kepengurusan di Sulut baru terbentuk dan sudah ada surat keputusan (SK). "Setelah kami terima SK dari pusat, maka kami teruskan ke KPU Sulut agar supaya bisa melibatkan kami di kegiatan atau program tahapan yang terkait," kata Kowaas.

Dirinya memberi apresiasi KPU Sulut yang telah menyambut pihaknya dengan baik. "Selama ini memang PPUA belum ada. Dan sekarang sudah ada, KPU bisa terbantuan. Terlebih dalam sosialisasi untuk kaum disabilitas," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang didampingi Komisioner Lanny Ointu, Meidy Tinangon mengatakan bahwa KPU siap libatkan PPUA dalam setiap program kegiatan tahapan ke depan. "Ketika ada bimtek, tahapan, akan diundang. Termasuk simulasi, sosialisasi terkait dengan pemilu atau pilkada. Karena kita juga punya tahapan sosialisasi ke kaum disabilitas. Nah nantinya mereka yang akan bantu kami mensosialisasikan" terang

Ardiles.

Ditambahkan, penyandang disabilitas itu memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara pada umumnya. "Maka perlu dilibatkan dan menjadi bagian dalam sistem pemilu dengan segala tahapannya. Supaya bisa ada kemudahan bagi penyandang disabilitas baik sarana maupun prasarana dalam pemilu atau pilkada," tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Bahas Pilkada Ramah Disabilitas, KPU Sulut Terima Kunjungan PPUA

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara hari ini, Senin (24/02) terima kunjungan pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Steven Kowaas.

Kedatangan Pengurus PPUA ini di sambut Ketua KPU Ardiles Mewoh serta Komisioner KPU Meidy Yafet Tinangon, dan Lanny Ouitu.

"Steven adalah penyandang disabilitas (tuna netra), kami telah bermitra sejak di Minahasa. Steven adalah Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Minahasa," Kata Tinangon yang saat ini sebagai Ketua Divisi Hukum KPU Sulut. Dijelaskannya, KPU Sulut sangat mengapresiasi akan kekukuhan kaum disabilitas pimpinan Steven Kowaas terlebih semangat mereka yang tinggi dalam mengangkat kaum difabel.

"Ini patut diacungkan jempol, penguasaan terhadap regulasi menunjukkan meskipun dia tuna netra namun tak hilang semangat untuk membaca," terangnya.

"Kami bercakap cakap tentang bagaimana penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam Pilgub 2020. Bagaimana Pilkada makin ramah disabilitas, makin aksesibel," pungkasnya. Dalam pertemuan itu dilakukan Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengurus PPUA Penyandang Cacat Sulut kepada Ketua KPU Sulut.



Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/24/02/2020*

Bahas Pilkada Ramah Disabilitas, KPU Sulut Terima Kunjungan PPUA

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara hari ini, Senin (24/02) terima kunjungan pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Steven Kowaas.

Kedatangan Pengurus PPUA ini di sambut Ketua KPU Ardiles Mewoh serta Komisioner KPU Meidy Yafet Tinangon, dan Lanny Ouitu.

“Steven adalah penyandang disabilitas (tuna netra), kami telah bermitra sejak di Minahasa. Steven adalah Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Minahasa,” kata Tinangon yang saat ini sebagai ketua Divisi Hukum KPU Sulut.

Dijelaskannya, KPU Sulut sangat mengapresiasi akan kekukuhan kaum disabilitas pimpinan Steven Kowaas terlebih semangat mereka yang tinggi dalam mengangkat kaum difabel.

“Ini patut diacungkan jempol, Penguasaan terhadap regulasi menunjukkan meskipun dia tuna netra namun tak hilang semangat untuk membaca,” terangnya.

“Kami bercakap-cakap tentang bagaimana penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam Pilgub 2020. Bagaimana pilkada makin ramah disabilitas, makin aksesibel,” pungkasnya.

Dalam pertemuan itu dilakukan Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengurus PPUA Penyandang Cacat Sulut kepada Ketua KPU Sulut.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/24/02/2020*

KPU Tak Sembarang Sebarluaskan Informasi Pengajuan Harus Ikut Mekanisme

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut membuka ruang untuk publik untuk pengajuan informasi. Akan tetapi, harus mengikuti mekanisme yang ada.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menerangkan, untuk tahapan pencalonan biasanya ada masyarakat yang memohon informasi ke KPU misalnya ada calon menurut dugaan bermasalah. “Atau diduga sakit, tapi oleh kesehatan dinyatakan sehat. Nah, ada yang minta informasi hasil tes kesehatan,” ujar Ardiles.

Namun, kata dia, ada juga hal-hal yang tak bisa disebarluaskan. Dimisalkannya B1 KWK atau formulir dukungan untuk calon perseorangan.

“Ini sifatnya dikecualikan. Jadi kalau ada surat permohonan informasi soal itu, kami tak bisa sampaikan. Karena ini menyangkut dokumen milik orang perorangan yang harus kita lindungi. Tak boleh serta merta berikan informasi terkait hal itu,” tandasnya.

Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menerangkan permohonan mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui pusat komunikasi publik sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon).

“Permohonan informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Dan dicatat oleh petugas informasi KPU semua yang disebutkan oleh pemohon,” terangnya.

Pemohon informasi, lanjutnya, harus meminta tanda bukti kepada petugas bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

“PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak



memenuhi dengan disertai alasan dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja,” jelasnya. Ditambahkan Salman, khusus informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Akibat Covid-19, KPU Provinsi Sulut Tunda Tahapan Pilkada

MANADO - Menyikapi semakin masifnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut mengacu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL 02-Kpt/01IKPU/III/2020 serta Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020. Dimana KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU Provinsi, KPU kabupate/kota penyelenggara adhock serta masyarakat Sulawesi Utara umumnya.

Menurut Ketua KPU Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh, pelaksanaan pemilihan gubener dan wakil gubemur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota secara serentak bakal dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, dilakukan penundaan.

“Berdasarkan Keputusan Nomor : SO/PL 02 2Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka ditetapkan untuk ditunda,” kata Mewoh Minggu (22/03/2020).

Lanjut kata Mewoh, keputusan penundaan sebagaimana dimaksud hanya meliputi beberapa tahapan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur Sulawesi Utara Tahun 2020 , yakni pelantikan dan masa kerja PPS, yakni menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 15 kabupaten/kota.

“Masa kerja PPS akan diatur kemudian,” ujarnya. Tahapan penundaan, sambungnyapun juga mencakup pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“KPU juga menunda pembentukan PPDP pada 15 kabupaten/kota. Menunda pelaksanaan coklit data pemilih serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dimulai pada 23 Maret 2020 sampai 28 Mei 2020 ditunda pelaksanaannya ,” jelas Mewoh.

Selanjutnya, KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020, untuk tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan tanggal 26 Maret 2020 - 28 Mei 2020 pelaksanaannya ditunda.

Hal itu meliputi : penyampaian dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dan KPU kabupaten/kota ke PPS. Kemudian, verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan, rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten, pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU kabupaten/kota, pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan.

Selanjutnya, verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan, perbaikan penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon bupati, calon wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada PPS, verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi

dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota

“KPU Provinsi Sulawesi Utara berharap dengan penundaan tahapan ini, pencegahan penyebaran Covid-19 dapat ditangani dengan hasil baik, sambil terus berdoa kepada Tuhan yang kita imani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing semoga menjauhkan kita dan ancaman virus yang menakutkan ini, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(*)

Penulis: *Jellina Najoan*

Sumber: *sulutreview.com*

KPU Sulut Tunda Tahapan Pilkada

MANADO—Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulut menunda beberapa agenda tahapan Pilkada 2020. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Alasan penundaan ini untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Dijelaskan Mewoh penundaan tahapan Pilkada tersebut mengacu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL 02-Kpt/01IKPU/III/2020 serta Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020.

Sehingga KPU Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota penyelenggara adhoc serta masyarakat Sulawesi Utara umumnya.

Mewoh menjelaskan keputusan penundaan hanya meliputi beberapa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yakni pelantikan dan masa kerja PPS, serta menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 15 kabupaten/kota.

“Masa kerja PPS akan diatur kemudian. Tahapan penundaan, mencakup

pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). KPU juga menunda pembentukan PPDP pada 15 kabupaten/kota. Menunda pelaksanaan coklit data pemilih serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,” tegas Mewoh.

Lanjut Mewoh, tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dimulai pada 23 Maret 2020 sampai 28 Mei 2020 ditunda pelaksanaannya.

Mewoh menyatakan juga, KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020, untuk tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan tanggal 26 Maret 2020 sampai 28 Mei 2020 pelaksanaannya juga mengalami penundaan.

Yang meliputi penyampaian dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dan KPU kabupaten/kota ke PPS. Kemudian, verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan, rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten, pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU kabupaten/kota, pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan.

Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan, perbaikan penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon bupati, calon wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada PPS, verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota.

Dengan adanya penundaan tahapan ini, Mewoh menegaskan KPU Provinsi Sulawesi Utara berharap dengan penundaan tahapan



ini, pencegahan penyebaran Covid-19 dapat ditangani dengan hasil baik, sambil terus berdoa kepada Tuhan yang kita imani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing semoga menjauhkan kita dan ancaman virus yang menakutkan ini, sehingga tahapan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

KPU Sulut Keluarkan Edaran Penundaan Tiga Tahapan Pilkada 2020

MANADO – Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Keluarkan Edaran penundaan tiga tahapan dalam pemilihan kepala daerah 2020

Pernyataan tersebut dikatakan Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh, Minggu (22/03).

“Kami (KPU Sulut) sudah melaksanakan rapat pleno terkait SK KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada serentak serta Surat Edaran KPU Nornor 8 Tahun 2020. Keputusan sebagaimana dimaksud hanya meliputi beberapa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” Kata Ardiles

Dijelaskannya tiga tahapan pilgub yang mengalami penundaaan adalah Pelantikan dan masa kerja PPS, Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar pemilih.

“Menunda pelaksanaan pelantikan PPS pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang sedianya digelar Minggu 22 Maret hari ini. (kemarin-red). Masa kerja PPS akan diatur kemudian. Menunda pembentukan PPDP pada 15 Kabupaten dan Kota di Sulut,” Terang Ketua KPU Sulut

Adapun Penundaan rekrutmen PPDP ini berimbas dalam penyusunan daftar pemilih dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang seharusnya dimulai

23 Maret sampai 17 Mei 2020. “Bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 untuk tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan tanggal 26 Maret 2020 sampai 28 Mei 2020 pelaksanaannya ditunda. Penundaan itu dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan,” ujarnya

Alasan penundaan tahapan Pilkada Sulut 2020 menurut mewoh adalah upaya mencegah penyebaran Virus Corona. Meski demikian, dia belum bisa memastikan, apakah penundaan tiga tahapan tersebut akan berimbas pada tertundanya waktu pelaksanaan pencoblosan di bulan September mendatang.

“Itu jadi ranah pusat. Semunya kami tunggu intruksi pusat terkait apa yang menjadi keputusan,” tandasnya sembari berharap dengan penundaan tahapan ini, pencegahan penyebaran Covid-19 serta penanganannya berhasil dengan baik.

“Sambil terus berdoa kepada Tuhan yang kita imani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing semoga menjauhkan kita dari ancaman virus yang menakutkan ini, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/23/03/2020*

Cegah Penyebaran Covid-19, KPU Sulut Tunda Tahapan Pilkada

MANADO— Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh mengatakan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan Keputusan Komisi Pernilaian Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 serta Surat Edaran KPU Nornor 8 Tahun 2020, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan langkah pencegahan untuk meminimalisasi

penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupate/Kota, penyelenggara adhock serta masyarakat Sulawesi Utara umumnya.

“Pertama, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan {atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak pada tanggal 23 September 2020, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Keputusan Nomor 50/PL.02.2Kpt/71 / Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,” kata Ardiles dalam rilisnya Minggu (22/03/2020).

Kedua, lanjut Dr Ardiles Keputusan sebagaimana dimaksud hanya meliputi beberapa Tahapan Pernilaian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu :

- Pelantikan dan masa kerja PPS;
- a. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
- b. Masa kerja PPS akan diatur kemudian; Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ;
- a. Menunda pembentukan PPDP pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
- b. Menuda pelaksanaan coklit data pernilih; Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dimulai 23 Maret 2020 s.d 17 Mei 2020 ditunda pelaksanaannya

Ketiga, bagi KPIJ Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, untuk tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan tanggal 26 Maret 2020 s.d 28 Mei 2020 pelaksanaannya ditunda.

- Tahapan tersebut meliputi :
- a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/ Kota ke PPS
- b. verifikasi faktual di tingkat Desa/ Kelurahan
- c. rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan
- d. rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten
- e. pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Kota dan Wakil Wali Kota
- f. penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPI_J Kabupaten/Kota
- g. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan
- h. verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS verifakasi faktual perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan
- i. k. rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota

“KPU Provinsi Sulawesi Utara berharap dengan penundaan tahapan ini, pencegahan penyebaran Covid-19 serta penanganannya berhasil dengan baik, sambil terus berdoa kepada Tuhan yang kita imani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing semoga menjauhkan kita dari ancaman virus yang menakutkan ini, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Penulis: *Jeane Rondonuwu*

Sumber: *Sulutdaily.com 22 March 2020 7:27 PM*



KPU Sulut Mendukung Opsi Penundaan Pilkada 2020

MANADO - Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 23 September 2020, namun proses pelaksanaan dan tahapan terhambat akibat adanya wabah pandemic covid 19.

Melihat hal tersebut pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menggelar rapat dengar pendapat, dengan menghasilkan beberapa keputusan:

1. Melihat perkembangan pandemic Covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR.
3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 merealokasi dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemic Covid 19.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.I.P., M.Si membenarkan bahwa Senin (31/3) adanya pertemuan antara KPU RI, Pemerintah, dan Komisi II RI.

“KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sulut tentu menunggu instruksi resmi selanjutnya dari KPU RI, namun KPU Sulut sangat mendukung opsi penundaan yg disampaikan KPU RI sebagai arah kebijakan Pilkada

serentak 2020 karna pandemic Covid 19,” ungkapnya.

Lanjut menurut Mewoh, bahwa penundaan Pilkada tentu untuk alasan kemanusiaan yg jauh lebih penting.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

Bersiap Hadapi Pemilihan Serentak Lanjutan, KPU Sulut Gelar Rakor Online Secara Bersama Kabupaten Kota

MANADO - Dalam rangka konsolidasi persiapan pelaksanaan lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (2/6) menggelar Rapat Koordinasi Internal dengan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berbagai hal terkait kesiapan melanjutkan tahapan yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia dibahas dalam Rakor Daring yang dibuka oleh Ketua KPU Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh.

Turut hadir para komisioner KPU Provinsi masing-masing Yessy Momongan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Meidy Tinangon selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Salman Saelangi selaku Ketua Divisi SDM dan Parmas.

Selain jajaran komisioner Rakor Daring tersebut turut dihadiri jajaran sekretariat dibawah pimpinan Pujiastuti selaku Sekretaris KPU Provinsi bersama pejabat eselon III dan IV.

Ketua KPU Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh dalam sambutan pembukaan kegiatan berharap agar jajaran Penyelenggara Pemilihan tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2020 sekaligus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona



Virus Disease 2019 (COVID-19) pada semua tahapan pemilihan.

“Kita harus bersiap menjalankan tanggung jawab tahapan dengan prosedur yang berbeda dibanding pelaksanaan tahapan sebelum pandemi Covid-19,” ungkap Mewoh.

Sementara itu Yessy Momongan, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara mengatakan bahwa tahapan yang sangat dekat saat ini adalah Pengaktifan kembali dan Pelantikan Badan Penyelenggara Adhock (PPK dan PPS); Penyusunan Daftar Pemilih serta Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan.

“Dituntut kesiapan kita sebagai penyelenggara, dengan mengupayakan metode dan strategi baru,” ungkap Yessy.

Dalam kesempatan yang sama, komisioner lainnya, Salman Saelangi yang membidangi SDM, sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat menyebut perlunya KPU Kabupaten/Kota mendalami strategi terbaik dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan kepada pemilih maupun Bimbingan Teknis kepada jajaran penyelenggara baik dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

Hal yang sama dikatakan Komisioner Meidy Tinangon yang menggawangi Divisi Hukum dan Pengawasan mengharapkan agar KPU Kabupaten/Kota mulai mengkaji Keputusan ataupun rancangan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tahapan, Program, Jadwal Pemilihan Tahun 2020.

“Saat ini PKPU terkait Tahapan maupun teknis Pemilihan Lanjutan sementara digodok oleh KPU RI. segera setelah regulasi itu diundangkan kita harus langsung action untuk segera menyesuaikan dengan aturan baru, termasuk merevisi Keputusan-Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020,” papar Tinangon.

Sementara untuk dukungan logistik dan anggaran, Pujiastuti, Sekretaris KPU Provinsi Sulut mengharapkan agar KPU Kabupaten/Kota segera menyusun rancangan kebutuhan pemilihan terutama untuk mengakomodir kebutuhan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk Penyelenggara Pemilihan maupun Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya.

Sebagai Peserta rakor adalah 7 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 yang masing-masing dihadiri Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui, di Sulawesi Utara akan diadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 4 (empat) Kabupaten, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tiga kota, yakni Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

Sulut Pastikan Diri Gelar Pilkada

MANADO—Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang, bakal dilanjutkan kembali mulai 15 Juni 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19.

Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sendiri ada 7 daerah yang bakal melangsungkan pesta demokrasi plus Pemilihan Gubernur (Pilgub). 7 daerah tersebut adalah Pilwako Manado, Pilwako Bitung, Pilwako Tomohon, Pilbup Minut, Pilbup Minsel, Pilbup Boltim, serta Pilbup Bolsel. Saat diwawancarai, Jumat (5/6) kemarin, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw memastikan kesiapan Sulut menggelar Pilkada serentak.



“Kita telah rapat bersama Mendagri, KPU Pusat dan pihak penyelenggara Pilkada serta gubernur se Indonesia yang menyelenggarakan pilkada bahwa pilkada dipastikan tanggal 9 Desember 2020. Sulut melaksanakan Pilkada serentak sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Nanti akan diterapkan protokol covid-19, social distancing dan physical distancing, hand sanitizer, masker, serta biliknya juga akan diatur,” bebernya.

Terkait dengan anggaran Pilkada, Kandouw menuturkan bahwa Sulut sedang menangani Covid-19 sehingga ada penambahan anggaran. Kendati demikian, dalam pelaksanaan program kerja, ada anggaran yang diperuntukkan untuk pertemuan atau rapat yang tidak terpakai sehingga ketika dikompilasi antara anggaran yang tidak terpakai dengan rekonsiliasi anggaran dapat mencukupi kebutuhan anggaran Pilkada. “Jadi sesuai arahan dari mendagri dan Menkopolkam, Pilkada di Sulut tetap dijalankan Desember,” jelasnya.

Sebelumnya, ketika vidcon berlangsung, Mendagri Menteri Tito Karnavian mengatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan meski masih di tengah kondisi pandemi Covid-19. Kesepakatan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, lanjut Mendagri, juga berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Selain sebagai keputusan politik bersama, alasan Pilkada tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi yaitu sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Selain itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti hal negara-negara lain di dunia,” katanya.

Di samping itu ungkap Mendagri, alasan lainnya yakni bahwa di dunia internasional, keberlangsungan pemilu

secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi (democracy index) dari sebuah negara. “Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economist Intelligent Unit (EIU) dan selanjutnya indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional, negara serta investor dalam menilai sebuah negara,” jelasnya.

Oleh karenanya, Mendagri menginstruksikan agar pemda melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada sehingga seluruh tahapan dapat berjalan aman, sukses dan lancar. “Perlu diingat, Pilkada kali ini kita lakukan dalam kondisi yang berbeda karena harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan jalankan semua sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dan sudah ditetapkan,” tutupnya. (*)

Penulis: *Balladewa Setlight*
Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Siap Hadapi Pilkada

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) makin siap melaksanakan Pilkada 2020. Senin (31/8) KPU menggelar Penyuluhan Produk Hukum di Swisbell Hotel Manado. Ketua KPU Dr Ardiles Mewoh mengatakan produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Wali Kota, Wakil Wali Kota harus dipahami dan wajib diketahui publik.

“Produk Hukum yang kita hasilkan ini wajib diketahui Publik apalagi menghadapi Pilkada 2020,” katanya.

Disamping itu, Mewoh menjelaskan produk hukum ini harus dipersiapkan dengan benar sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi. “Kita harus dalami setiap produk hukum ini, agar tidak ada perbedaan persepsi lagi dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak KPU pada pemilihan kepala daerah,” jelas Mewoh yang didampingi, Komisioner KPU Meidy Tinangon, Yessy Momongan, Lanny Ointoe.

Di sisi lain, Mewoh ketika dimintai tanggapan mengenai kesiapan KPU



Sulut, dirinya menjelaskan terkait tahapan pendaftaran sudah tiga kali dilakukan rakoor dengan partai politik (Parpol). Rakoor pertama membahas terkait persyaratan yang harus dipenuhi. Rakoor kedua, melibatkan instansi terkait guna menjelaskan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. "Hal ini agar ketika parpol-parpol dapat menerima informasi yang utuh dan detail dari instansi terkait," kata dia.

Dan rakor yang ketiga kata dia adalah persiapan pendaftaran. Membahas terkait tata cara pendaftaran serta penerapan protokol Covid nantinya dalam setiap tahapan. "Jadi sampai saat ini sudah dilakukan tiga kali rakoor. Saya pun berharap dengan telah dijelaskannya peraturan dan pelaksanaan, semoga tidak ada persoalan lagi," pungkasnya.

Dalam penyuluhan turut dihadiri oleh, Perutusan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pegiat Pemilu, Kesbangpol, Pengurus Partai Politik, serta sejumlah media liputan KPU Sulut.(cw-01)

Penulis: *Lerby Tamuntuan*
Sumber: *Manado Post*

Dalam Rakor Daring, KPU Sulut Bahas Persiapan Kelanjutan Pilkada 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) gelar Rapat Koordinasi Internal dengan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 guna konsolidasi persiapan pelaksanaan lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dalam Rakor Daring yang dibuka oleh Ketua KPU Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh dan diikuti para komisioner KPU Provinsi Yessy Momongan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Meidy Tinangon, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Salman Saelangi, Ketua Divisi SDM dan Parmas ini membahas berbagai hal terkait kesiapan melanjutkan tahapan yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 yang

melanda seluruh Indonesia

Ardiles Mewoh berharap jajaran Penyelenggara Pemilihan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2020 sekaligus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada semua tahapan pemilihan.

"Kita harus bersiap menjalankan tanggung jawab tahapan dengan prosedur yang berbeda dibanding pelaksanaan tahapan sebelum pandemi Covid-19," ungkap Mewoh.

Sementara itu Yessy Momongan, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara mengatakan bahwa tahapan yang sangat dekat saat ini adalah Pengaktifan kembali dan Pelantikan Badan Penyelenggara Adhock (PPK dan PPS); Penyusunan Daftar Pemilih serta Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan.

"Dituntut kesiapan kita sebagai penyelenggara, dengan mengupayakan metode dan strategi baru," ungkap Yessy.

Dalam kesempatan yang sama, komisioner lainnya, Salman Saelangi yang membidangi SDM, sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat menyebut perlunya KPU Kabupaten/ Kota mendalami strategi terbaik dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan kepada pemilih maupun Bimbingan Teknis kepada jajaran penyelenggara baik dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

Komisioner yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon mengharapkan agar KPU Kabupaten/ Kota mulai mengkaji Keputusan ataupun rancangan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tahapan, Program, Jadwal Pemilihan Tahun 2020.

"Saat ini PKPU terkait Tahapan maupun teknis Pemilihan Lanjutan sementara digodok oleh KPU RI. segera setelah regulasi itu diundangkan kita harus langsung action untuk segera menyesuaikan dengan aturan baru, termasuk merevisi Keputusan-



Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020,” papar Tinangon.

Sementara untuk dukungan logistik dan anggaran, Pujiastuti, Sekretaris KPU Provinsi Sulut mengharapkan agar KPU Kabupaten/Kota segera menyusun rancangan kebutuhan pemilihan terutama untuk mengakomodir kebutuhan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk Penyelenggara Pemilihan maupun Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya.

Sebagai Peserta rakor adalah 7 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 yang masing-masing dihadiri Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui, di Sulawesi Utara akan diadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 4 (empat) Kabupaten, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tiga kota, yakni Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Selain jajaran komisioner Rakor Daring tersebut turut dihadiri jajaran sekretariat dibawah pimpinan Pujiastuti selaku Sekretaris KPU Provinsi bersama pejabat eselon III dan IV.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/02/06/2020*

Pilkada 9 Desember 2020, Ardiles Mewoh: KPU Sulut Siap

MANADO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap digelar 9 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

Keputusan ini direspon positif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara.

Kepada BeritaManado.com, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan pihaknya siap melaksanakan tugas.

“Jajaran KPU semua dalam posisi siap. Kita tentu harus menunggu perubahan PKPU tahapan Sumber. Begitu terbit, langsung kita laksanakan,” kata Ardiles, Rabu (27/5/2020) malam.

Lanjut Ardiles, salah satu tanda tahapan jalannya Pilkada Sulut 2020 adalah dengan pengaktifan 50-an ribu jajaran ad hoc se-Sulut yang sudah terbentuk sampai di tingkat PPS.

“Saat ini status (ad hoc) non aktif. Pengaktifan kembali akan diatur di perubahan PKPU Tahapan,” tambah Ardiles.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pilkada dipastikan akan berlangsung 9 Desember 2020.

Hal tersebut dipastikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Rabu (27/5/2020).

Menurut dia, desakan pilkada ditunda hingga 2021 pun tak menjamin virus corona berakhir.

“Ops diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin. Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini ending-nya. Kita waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman,” ujar Tito.

Penulis: *Finda Muhtar/Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Tunggu Instruksi Tunda Pilkada Sulut

MANADO—Wacana menunda Pilkada serentak 2020 menyeruak. Menyusul adanya pandemic Covid 19. Diketahui, virus ini terus meluas di beberapa daerah



di Indonesia hingga, termasuk wilayah Sulut. Pilkada serentak di 8 daerah termasuk Pilgub Sulut yang sedianya digelar September mendatang terancam dibatalkan akibat wabah Covid 19.

Terkait hal ini, Komisioner KPU Sulut Divisi SDM dan Sosialisasi, Salman Saelangi mengatakan, tahapan Pilkada Serentak terus berlanjut. Sedangkan perihal penundaan Pilkada, pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan dari KPU RI. "Kami tetap menjalankan tahapan sesuai jadwal. Akan tetapi kami menunggu instruksi dari KPU RI apakah akan dilakukan penundaan atau tetap dilanjutkan," kata Salman, Kamis (19/3).

Meski demikian kata Salman, sejumlah tahapan Pilkada sedikit terganggu akibat virus ini. Sejumlah kegiatan massal yang mengundang banyak orang seperti sosialisasi dan pendidikan pemilih, rakor, bimtek ditunda sementara waktu hingga 1 April. "Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI sebagai tindak lanjut kondisi meluasnya penularan virus corona. Kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti sosialisasi, rakor yang menghadirkan stakeholder, bimtek bersifat internal yang sedianya digelar pekan ini harus ditunda," ujar Salman.

Ia mengatakan, dalam surat Edaran KPU RI juga mengatur terkait pengaturan pola kerja pegawai. Terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung mulai akhir Maret-April 2020, Salman menegaskan tahapan rekrutmen petugas pemungutan suara (PPS) saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya, pengumuman PPS terpilih dan dilanjutkan dengan pelantikan PPS. "Untuk pelantikan dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan akan dilakukan di masing-masing kecamatan.

Selanjutnya mengenai tahapan verifikasi faktual dukungan bakal paslon perseorangan yang akan berlangsung

di empat daerah yakni Manado, Minsel, Minut dan Tomohon tetap berjalan. Namun dilaksanakan dengan proteksi diri ketat. Petugas harus jaga jarak komunikasi, hindari kontak langsung, dan bersihkan diri dengan sanitizer serta menggunakan masker. Sedangkan tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan petugas dengan proteksi diri ketat," ujarnya.

Diketahui, potensi penundaan Pilkada sangat besar akibat ancaman Covid 19. Status darurat nasional diberlakukan hingga 29 Mei mendatang. Jika wabah ini masih berlanjut, tidak menutup kemungkinan mengganggu agenda penting tahapan Pilkada Juli nanti yakni pendaftaran calon.

Pengamat politik Dr Ferry Liando menilai, penundaan Pilkada memang memungkinkan dilakukan. Sesuai Pasal 120 ayat (1) UU Pilkada. "Kasus Covid-19 bisa diinterpretasikan sebagai gangguan lainnya. Namun demikian, pasal ini hanya menjelaskan soal hambatan pemungutan suara. Sehingga hal yang paling tepat dilakukan adalah merevisi kembali Peraturan KPU 16/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020," tukasnya.

Karena, lanjutnya, tidak mungkin tahapan yang sudah ditetapkan bisa dipaksakan untuk dilaksanakan. Seperti tahapan dalam waktu dekat ini adalah pelantikan PPS. "Tidak mungkin KPU kumpul-kumpul banyak orang dalam satu tempat karena dilarang pemerintah," ungkapnya. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual calon perseorangan dan pencocokan serta penelitian daftar pemilih. Dua kegiatan itu, menurut dia bersifat interaktif dengan masyarakat. Ini sangat berdedikasi jika dipaksakan dilaksanakan dalam waktu dekat. "PKPU harus direvisi. Jadi bukan pemungutan suara yang ditunda, tapi tahapan saja yang perlu penyesuaian. Petugas ad hoc harus dilindungi," imbau dia.



Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentar*

Pilkada Serentak Ditunda, Mewoh: KPU Sulut Menunggu Instruksi Resmi KPU RI

MANADO—Adanya keputusan pemerintah bersama DPR RI untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak pada 23 September 2020, disebabkan Virus Corona (Covid-19), ditanggapi Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Kepada wartawan, Mewoh mengakui pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari KPU RI untuk melaksanakan putusan yang telah disepakati bersama.

“Tentunya KPU Sulut mendukung opsi penundaan yang disampaikan KPU RI sebagai arah kebijakan Pilkada serentak 2020 karena Pandemic covid 19,” jelas Mewoh.

Lanjut Mewoh, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU akan segera melaksanakan berbagai kebijakan terkait penundaan termasuk tahapan, apalagi terkait alasan kemanusiaan. Keselamatan rakyat jauh lebih penting, untuk dilakukan sekarang ini.

Mewoh mengaku dengan adanya keputusan penundaan Pilkada serentak, maka proses tahapan yang telah dilaksanakan akan diberhentikan.

“Kami akan tetap menunggu instruksi dari KPU-RI, terkait penundaan pilkada serentak,” tutup Mewoh. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Tunda Tahapan Pilkada Sulut

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda tahapan Pilkada 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona

yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh membenarkan penundaan ini.

“Berdasarkan surat keputusan KPU, ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Ardiles.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, langkah KPU menunda tahapan Pilkada sudah tepat. “Kalau kami menganggap itu langkah yang tepat, meski dalam pandangan kami agak cukup terlambat. Karena kami sejak awal mendorong KPU melakukan penyesuaian waktu tahapan,” kata Titi Anggraini, Minggu (22/3).

Titi mengatakan, langkah KPU tersebut memang sudah semestinya. Karena Covid-19 sudah menjadi pandemi global dan situasi darurat nasional. “Pandangan kami Pilkada tidak harus dikecualikan dari situasi darurat nasional. Sehingga mestinya semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pilkada itu patuh dan tunduk pada protokol penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah,” ujar Titi.

Titi menambahkan, tahapan Pilkada memang memiliki aktivitas yang mengharuskan berkumpul atau terjadi pertemuan tatap muka antara penyelenggara pemilu dengan pemilih. Interaksi juga terjadi antar penyelenggara pemilu maupun penyelenggara pemilu dengan peserta Pilkada. Untuk itu mesti diminimalisir dalam mencegah meluasnya Covid-19. “Jadi, justru aneh kalau di tengah



situasi darurat nasional seperti hari ini, KPU tetap memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pilkada seperti biasa,” ucapnya.

Penundaan Pilkada itu, kata dia, dimungkinkan oleh UU Pilkada. Meski UU Pilkada memang secara nomenklatur dan terminologi tidak eksplisit mengenal norma penundaan Pilkada. “Ada pengaturan soal pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan itu terdapat di dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU 1/2015 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota,” ujarnya. Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September mendatang. Sementara itu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, masa kampanye Pilkada tahun ini dijadwalkan mulai 11 Juli dan berakhir pada 19 September mendatang.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Corona Tak Hambat Pilkada

MANADO—Wacana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 muncul. Akibat virus corona sudah masuk di sebagian besar daerah di Indonesia. Hingga kemarin malam, menyentuh angka 172 kasus.

Diketahui Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu daerah peserta pilkada. Dengan tujuh kabupaten/kota penyelenggara pilkada bupati/wali kota dan wakilnya dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemungkinan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Pasal ini mengamanatkan,

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan

tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.” Pengamat politik Sulut Drs Max Rembang menilai virus corona bisa digolongkan gangguan lainnya. “Nah dasar yuridis penundaan harus dikaji agar tidak menimbulkan sengketa nantinya. Menurut saya, keselamatan manusia memang harus diutamakan,” ujar akademisi Unsrat ini.

Lanjut dia, sangat wajar jika ada masyarakat yang mulai ragu dengan pelaksanaan pilkada ini. Karena jika bicara pilkada maka akan bersentuhan dengan kampanye juga sosialisasi calon. “Kampanye ini berkaitan dengan mengumpulkan massa. Begitu juga sosialisasi calon. Jika pilkada tetap dilaksanakan maka penyelenggara harus memikirkan langkah tepat seperti apa untuk tetap memaksimalkan tahapan sosialisasi dan kampanye calon,” urainya.

Yang paling mungkin, kata Rembang, adalah memaksimalkan kampanye dan sosialisasi melalui media cetak. “Tatap muka nantikan akan sulit, jika memang kemungkinan terburuk kita masih harus lalui masa social distancing seperti sekarang. Jadi KPU harus membuat mitigasi tahapan-tahapan yang melibatkan banyak orang,” paparnya.

Peran media cetak, kata Rembang menjadi penting. “Bisa jadi jembatan penyelenggara dan para calon dengan masyarakat. Para calon tetap bisa sosialisasi tanpa perlu mengumpulkan massa. Penyelenggara juga tetap menyosialisasikan tahapan terlebih bila memang benar ada penundaan nantinya,” nilai dia.

Di sisi lain, pengamat politik Dr Ferry Liando menilai penundaan Pilkada memang memungkinkan dilakukan. Sesuai Pasal 120 ayat (1) UU Pilkada. “Kasus Covid-19 bisa diinterpretasikan sebagai gangguan lainnya. Namun demikian, pasal ini hanya menjelaskan soal hambatan pemungutan suara. Sehingga hal yang paling tepat dilakukan adalah merevisi kembali Peraturan KPU 16/2019 tentang Tahapan,



Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020,” tukasnya.

Karena tidak mungkin tahapan yg sudah ditetapkan bisa dipaksakan untuk dilaksanakan. Seperti tahapan dalam waktu dekat ini adalah pelantikan PPS.

“Tidak mungkin KPU kumpul-kumpul banyak orang dalam satu tempat karena dilarang pemerintah,” ungkapnya.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual calon perseorangan dan pencocokan serta penelitian daftar pemilih. Dua kegiatan itu, menurut dia bersifat interaktif dengan masyarakat. Ini sangat berdedikasi jika dipaksakan dilaksanakan dalam waktu dekat. “PKPU harus direvisi. Jadi bukan pemungutan suaranya yang ditunda tapi tahapan saja yang perlu penyesuaian. Petugas ad hoc harus dilindungi,” imbau dia.

Terkait hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, tahapan Pilkada tetap berlangsung sesuai agenda. “Sampai hari ini masih tetap berjalan sambil memperhatikan dengan serius protokol kesehatan penyelenggaraan pilkada dalam situasi pandemi Covid-19 sebagaimana arahan dan instruksi KPU RI,” ungkapnya.

Menurut dia, kewenangan penundaan ada di KPU pusat. Namun, hingga kini belum ada koordinasi ke sana. “Jika ada arahan lain kita jalankan. Karena memang semua masih melihat situasi yang ada. Termasuk kewenangan menunda tahapan ada di KPU RI,” tuturnya.

Edaran juga sudah dikeluarkan KPU RI ke semua jajaran di daerah. Isinya soal langkah antisipasi penyebaran virus corona. “Masih normatif hanya memang kita mengurangi social distance,” pungkasnya.(*)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Terapkan WFH

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut mulai menerapkan sistem work from home (WFH) atau bekerja di rumah bagi pegawai.

Hal ini dilakukan karena lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada ini tak mau ambil resiko terpapar virus corona (covid-19). Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, meski memakai sistem work from home, tapi pelayanan kepada masyarakat akan terjaga. “Termasuk kami juga tetap memperhatikan efektivitas kinerja dengan pembagian tugas pegawai melalui mekanisme work from home ini,” ungkapnya, Selasa (23/3).

Untuk berkoordinasi dengan pegawai yang menjalani WFH, pihaknya memakai video conference untuk sarana komunikasi dan memastikan berbagai tugas terlaksana. Sesuai protokol kesehatan dari otoritas yang berwenang, kata Salman, KPU memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) untuk pegawai dan tamu yang datang ke kantor sekretariat. “Setiap yang berkunjung ke KPU Sulut akan dicek suhu tubuh melalui alat thermal scanner serta mencuci tangan dengan hand sanitizer,” ungkapnya.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Lima Tahapan Pilkada yang Berisiko Jadi Penularan Corona

MANADO — Pilkada Serentak dijadwalkan 9 Desember 2020. Praktis enam bulan sebelumnya, penyelenggara sudah disibukkan tahapan padat. Menggelar pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19, tentu menjadi kekhawatiran berbagai pihak, termasuk jajaran pengawas pilkada di Sulut.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan jajarannya sedang mempersiapkan teknis pengawasan pilkada dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sedang digodok.



Apalagi kata Herwyn Malonda, jajaran adhoc bawaslu sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan/desa. “Pastinya kami berharap aturan nanti memberikan jaminan keselamatan baik kepada penyelenggara dan masyarakat,” jelas Herwyn pada webdiskusi yang mengangkat tema ‘Konsekuensi Pilkada di tengah COVID-19’, Sabtu (30/5/2020).

Malonda berharap tahapan pilkada nanti sebisa mungkin menghindari pertemuan. Jika dimungkinkan, pengawas menggunakan aplikasi daring dengan mengandalkan smartphone untuk pekerjaan yang bersifat umum.

“Namun pasti ada kegiatan yang mengumpulkan konsentrasi massa. Di sinilah protokol COVID-19 harus diperketat,” tegasnya.

Ia mencatat, ada lima tahapan pilkada berisiko menjadi sumber penularan virus corona. Pertama kata Malonda, agenda pemutakhiran data pemilih di mana petugas harus mendatangi calon pemilih dalam memastikan data.

Selanjutnya, verifikasi bakal pasangan calon perseorangan dan berlanjut pada kampanye. “Di sini akan terjadi interaksi antara penyelenggara, peserta pilkada dan calon,” teranginya.

Herwyn menambahkan, pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara mesti menjadi perhatian KPU, karena menjadi momen bertemunya banyak orang.

“Semoga aturan nanti bersahabat dengan kondisi terkini, karena bagaimana pun keselamatan publik di atas segalanya,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Akan Gelar Simulasi Pemilihan Menggunakan Protocol Covid-19

SULUT—Dalam rangka persiapan pemungutan dan perhitungan suara, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Sulut akan lakukan simulasi.

Hal ini dikatakan Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh dimana ini gunanya untuk memberikan pemahaman luas kepada masyarakat termasuk sosialisasi kepada stakeholder, bagaimana mekanisme cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

“Tentu ada beberapa penyesuaian. Sebab ini dilaksanakan di masa pandemi covid-19, jadi ada ketentuan yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya,” ungkap Mewoh

Lanjutnya, memang ada penyesuaian terkait dengan protap Covid-19 dan ini perlu disimulasikan supaya masyarakat tahu bagaimana menggunakan hak pilih di TPS.

“Kita lakukan simulasi di tingkat provinsi maupun di 8 kab/kota yang non penyelenggara pilkada, serta 7 kab kota yang selenggarakan,” tutur Mewoh

Mewoh juga berharap tentu setelah dilakukan simulasi, semua orang sudah semakin tahu, terutama warga yang menggunakan hak pilih bagaimana menerapkan protap covid-19 saat di TPS. Sambil kita menyesuaikan terus regulasi yang ada. (*)

Penulis: *Ika*

Sumber: *portalsulutnews.com*

Pelaksanaan Pemilihan Sesuai Protokol Kesehatan

MANADO—KPU tengah mempersiapkan draft Peraturan KPU (PKPU) terkait Pilkada Serentak 2020. KPU memastikan isi dari draf tersebut akan mengatur terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“KPU sudah menyusun draf peraturan KPU tentang Pilkada di tengah pandemic. Dan juga sudah melalui proses FGD serta uji publik,” kata Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Rabu (10/6). Ia memastikan, substansi dari PKPU ini sesuai dengan protokol kesehatan yang disusun Kementerian Kesehatan maupun Gugus Tugas. “Kemenkes dan Gugus Tugas selalu dilibatkan dalam forum diskusi,



uji publik, serta selalu dimintai pendapat terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada. Selain itu KPU RI juga sedang menyiapkan draf revisi peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Yang mana telah melewati uji publik. Saat ini tinggal menunggu diundangkan. Jadi sudah siap peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal itu sudah siap. Tinggal menunggu untuk diundangkan saja,” kata Mewoh. PKPU tersebut akan mengatur dua hal. Pertama terkait prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan Pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Kedua, mengatur teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Ia mengatakan, protokol kesehatan yang disusun tidak hanya mengatur pada hari pemungutan suara saja, melainkan juga disiapkan untuk saat kampanye. KPU akan mengatur ulang metode maupun jumlah peserta kampanye, termasuk jumlah pendukung hadir di debat Pilkada yang disiarkan di televisi.

“Misalnya dalam debat kandidat yang disiarkan di televisi, biasanya kan ada pasangan calon, penyelenggara, dan dihadiri pendukung. Dalam pengaturan baru, rencananya jumlah pengunjung dari masing-masing pendukung itu kita hilangkan atau dibatasi,” kata Mewoh. KPU juga akan memberi kelonggaran terkait jumlah alat peraga kampanye. Selain itu, Ia menyebut agar mencegah kerumunan, KPU akan mengatur daftar pemilih di tiap TPS paling banyak 500 orang.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Ardiles Mewoh: Produk Hukum Sangat Penting untuk Pemilihan Kepala Daerah

SULUT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan

Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut tahun 2020 di Swiss-Bell Hotel Manado, Senin (31/8/2020) sampai Rabu (2/09/2020) mendatang.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh ketua KPU Provinsi Sulut Ardiles Mewoh di dampingi Anggota KPU, Meidy Tinangon, Yessy Momongan dan Lanny A Ointu.

Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dimana kita bisa mendalami dan menyebarkan produk-produk hukum dan juga ini sangat penting untuk pemilihan kepala daerah nanti.

“Di satu sisi kami juga bertanggungjawab melakukan ini dalam rangka transparansi dan wajib memberikan pemahaman kesemua pihak tentang regulasi yang ada, tapi di satu sisi, kalau berbicara regulasi pemilihan tidak menjadi kebutuhan yang terbatas sudah semua pihak yang berkepentingan, yang membantu kepentingan dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah harusnya itu sudah mendalami dan memahami semua regulasi terkait pemilu kepala daerah, baik kita disisi penyelenggara maupun masyarakat itu sama-sama paham dan mengetahui secara utuh, komprehensif dalam semua regulasi kampanye. Bagi partai politik sudah tidak ada perbedaan persepsi lagi, baik penyediaan dana kampanye dan tahapannya. Begitupun dengan media agar kita bersama-sama mengikuti regulasi yang ada terkait pemilihan,” jelas Mewoh

Selain itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon mengungkapkan bahwa rekan-rekan media yang diundang dalam kegiatan ini bagian dari cara KPU untuk memaksimalkan fungsi media sebagai penyebarluas informasi dari produk-produk hukum yang dibuat KPU Provinsi Sulut

“Ini di undang Perutusan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pegiat Pemilu, Kesbangpol, Pengurus Parpol, serta media yang ada,” terang Tinangon. (*)



Penulis: Ika

Sumber: portalsulutnews.com

Produk Hukum Wajib Diketahui dan Dipahami Publik untuk Pilkada 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan Produk Hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota, Wakil Walikota harus dipahami dan wajib diketahui publik.

“Produk hukum yang kita hasilkan ini wajib diketahui publik apalagi menghadapi Pilkada 2020,” kata Ketua KPU Provinsi Dr Ardiles Mewoh dalam Kegiatan Penyuluhan Produk Hukum yang digelar KPI Sulut di Swisbell Hotel Senin (31/08).

Disamping itupun Mewoh menjelaskan produk hukum ini harus dipersiapkan dengan benar sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi.

“Kita harus dalam setia produk hukum ini, agar tidak ada perbedaan persepsi lagi dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak KPU pada pemilihan kepala daerah,” jelas Mewoh yang didampingi, Komisioner KPU Meidy Tinangon, Yessi Momongan, Lanny Ointu.

Kepada peserta yang terudang oleh KPU itu, Mewoh pun meminta dalam pilkada yang sementara berjalan, tahapannya harus diketahui dengan benar begitupun regulasi. “Terkait regulasi harus punya persiapan dan pemahaman yang sama, kita harus mengetahui setiap regulasinya,” cetusnya.

“Saya harap melalui sosialisasi ini, kita bisa sama-sama memahami aturan yang ada agar kita bisa tau bersama aturan dalam setiap tahapan yang berlangsung,” pungkasnya.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh, Perutusan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pegiat Pemilu, Kesbangpol, Pengurus Partai Politik,

serta Sejumlah Wartawan Liputan KPU Sulut.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: Sulutpos.com/31/08/2020

KPU SULUT Kunjungi Pemkab Mitra, PAW Pimpinan KPU Mitra Segera Dilantik

MANADO - Dalam Rangka Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Salman Saelangi dan Lanny Ointu, didampingi Komisioner KPU Mitra, Otniel Wawo, melakukan kunjungan langsung ke Pemerintah Kabupaten Mitra dan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda), David Lalandos, didampingi Kepala BKPSDM Mitra, Marie Makalow, Jumat (10/7/2020) untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat terhadap calon PAW.

“Kunjungan kami ini berkaitan dengan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat calon PAW. Sebabnya KPU RI telah memberikan ruang dan mendelegasikan proses verifikasi dan klarifikasi ini kepada kami KPU Sulut,” ungkap Ketua Divisi SDM, Sosialisasi, dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulut, Salman Saelangi.

Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2020, pasal 34B, dimana verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat calon PAW anggota KPU Kabupaten/Kota dapat didelegasikan ke KPU Provinsi dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota.

“Jadi kami melakukan pendalaman terkait verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat tersebut, khususnya rekomendasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selanjutnya hasil ini kami akan diplenokan. Jika sudah komplet dan cukup, akan dikirim ke KPU RI,”



pungkas Salman Saelangi.

Melalui verifikasi dan klarifikasi bertujuan agar nantinya tidak akan menimbulkan ruang terjadinya gugatan, jika hal ini tidak ditindaklanjuti juga sesuai aturan pasti akan timbul gugatan.

“Paling penting kami sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi sesuai prosedur, serta memastikan proses tersebut sesuai PKPU 4 Tahun 2020. Selanjutnya merupakan kewenangan KPU RI untuk mempertimbangkan dan memutuskannya,” tandasnya.

Di lain pihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra, David Lalandos membenarkan bahwa kunjungan KPU Sulut untuk klarifikasi PAW salah satu komisioner KPU yang telah meninggal, yakni almarhum Irvan Rabuka.

“Kami dimintai klarifikasi terkait beberapa dokumen, di antaranya rekomendasi dari Pemkab Mitra kepada salah satu calon Komisioner Tahun 2018 lalu yang berstatus ASN di Pemkab Mitra dan memang benar surat itu ada,” ujar David Lalandos.

Begitu juga dengan surat yang ditandatangani Sekda Mitra dan ditujukan kepada KPU RI dan KPU Sulut tanggal 24 Oktober 2018.

“Surat ini terkait penarikan surat rekomendasi yang sudah diberikan tersebut dan ini juga

memang ada dalam arsip. Penarikan surat rekomendasi bertujuan atau maksud dikarenakan Pemkab Mitra masih kekurangan dan membutuhkan tenaga ASN” tukasnya.

Dijelaskannya, ASN yang bersangkutan juga sudah menghadap dan menyampaikan surat dari KPU Provinsi dan KPU RI kepadadirinya terkait PAW.

“Sesuai surat tersebut dirinya diwajibkan melengkapi beberapa dokumen, salah satunya surat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati Mitra. Kami sudah sampaikan untuk buat

surat permohonan karena statusnya sebagai ASN,”katanya.

Adapun surat rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Bupati Mitra tanggal 23 Juni 2020, lewat BKPSDM. “Ini sudah ditindaklanjuti pihak BKPSDM dengan melakukan telaan staf kajian kepada Bupati Mitra.

Ini semua juga sudah didokumentasikan pihak KPU Sulut. Sampai dengan saat ini belum ada rekomendasi baru karena masih dalam kajian Pemkab Mitra dalam hal ini Bupati James Sumendap,” tutupnya.

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

KPU Gelar Penyuluhan Produk Hukum Terkait Pilgub Sulut

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar penyuluhan produk hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 di salah satu hotel di Kota Manado, Senin (31/8) hingga Rabu (2/9) mendatang.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan jika penyuluhan ini sangat penting, karena produk hukum ini wajib untuk diketahui dan dipahami saat akan menghadapi Pilkada pada Desember mendatang.

“Kegiatan ini merupakan cara untuk bisa mendalami produk-produk hukum yang dibuat KPU. Kegiatan ini juga sebagai salah satu kewajiban KPU untuk mensosialisasikan agar bersama memahami regulasi,” tutur Ardiles.

Lanjut menurut Ardiles, peserta yang diundang oleh KPU dalam kegiatan ini adalah perwakilan partai politik, tokoh masyarakat dan media. Hal ini agar tidak ada perbedaan persepsi lagi dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak KPU pada pemilihan kepala daerah.

Ardiles juga mengungkapkan, kegiatan ini nantinya akan memberikan pemahaman



tentang penyediaan dana kampanye, tahapan demi tahapan dalam Pilkada.

“Saya harap melalui sosialisasi ini, kita bisa sama-sama memahami aturan yang ada. Ini perlu, agar kita sama-sama tahu aturan dalam setiap tahapan yang berlangsung” ujar Ardiles kembali.

Sementara, Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon mengatakan, khusus untuk rekan-rekan media yang diundang dalam kegiatan ini, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan fungsi media sebagai penyebar luas informasi dari produk-produk hukum yang dibuat KPU.

“Selain stakeholder, parpol dan ormas kami mengundang teman-teman media agar informasi bisa tersebar luas sampai pada masyarakat,” ujar Tinangon.(*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*

Sumber: *kumparan.com*

KPU Sulut Sosialisasikan Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan sosialisasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Rabu (5/8/2020). Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kebijakan terkait regulasi KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilukada yaitu tahapan pencalonan dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus oleh Parpol yang mengusung calon. “Diharapkan lewat sosialisasi ini regulasi dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus Parpol dan diharapkan dalam hal pencalonan tidak ada sengketa dan KPU akan melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan,” kata Mewoh.

Pada kegiatan ini juga, Komisioner KPU Pusat, Ilham Saputra, menegaskan agar Sumber Daya Manusia dan integritas penyelenggara dapat memperlakukan semua calon sama, jika ada persoalan yang muncul (sengketa pemilu), pihak yang merasa dirugikan dapat berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara.

“Parpol diharapkan sebelum mendaftarkan calon dapat melihat syarat pencalonan yang telah disyaratkan berdasarkan PKPU,” tegas Ilham lewat media zoom.

Juga disampaikan Hasyim Ashari, Komisi KPU Pusat yang menjabarkan terkait tahapan Pilkada lanjutan ditengah pandemi Covid-19, dengan menekankan pada syarat pencalonan baik terkait tanggal pendaftaran, juga terkait calon yang pernah terpidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian dari Parpol agar dapat mengusung calon yang tidak bermasalah.” Parpol pengusung hendaknya dapat mengajukan calon yang tidak bermasalah hukum agar tidak menimbulkan persoalan,” untkap Ashari.

Terkait tahapan pendaftaran bakal calon akan dimulai tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020, Pendaftaran Paslon dan Verifikasi syarat pencalonan 4-6 September 2020, Pengumuman dokumen pasangan calon untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4-8 September 2020, dan pemeriksaan kesehatan Paslon 4-11 September 2020. (*)

Penulis: *Josh Tinungki*

Sumber: *Sulutnews.Com*

Ardiles Mewoh Buka Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020

MANADO—Bertempat di salah satu hotel di Manado, dilaksanakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020, Senin 31 Agustus-2 September.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengemukakan, setiap produk hukum yang



dibuat KPU akan disosialisasikan. Namun, itu saja tidak cukup sehingga pihaknya berkeinginan untuk duduk bersama dan mendalaminya. “Ini bagian dari pendekatan edukatif produk hukum yang dilahirkan KPU dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini sangat penting untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang.

“Semua pihak yang berkepentingan harus mendalami dan memahami regulasi PemiluKada nanti. Diharapkan dari kegiatan ini semua akan paham secara utuh, komprehensif dalam semua regulasi kampanye. Bagi partai politik sudah tidak ada perbedaan persepsi lagi, baik penyediaan dana kampanye dan tahapannya. Begitupun dengan media agar kita bersama-sama mengikuti regulasi yang ada terkait pemilihan,” ungkapnya.

Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon mengatakan, rekan-rekan media yang diundang dalam kegiatan ini bagian dari cara KPU untuk memaksimalkan fungsi media sebagai penyebar luas informasi dari produk-produk hukum yang dibuat KPU.

“Selain stakeholder, parpol dan ormas kami mengundang teman-teman media agar informasi bisa tersebar luas sampai pada masyarakat,” imbuhnya.*

Penulis: *Charencia Repie*

Sumber: *kawanuapost.com*

KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara menyelenggarakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 Senin, (31/08) di SwissBell Hotel Manado.

Ketua KPU Ardiles Mewoh membuka Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari (31 Agustus-2 September 2020).

Dalam sambutan Mewoh mengatakan, setiap produk hukum yang dibuat KPU akan disosialisasikan. Namun, itu saja tidak cukup sehingga pihaknya berkeinginan untuk duduk bersama dan mendalaminya.

“Ini bagian dari pendekatan edukatif produk hukum yang dilahirkan KPU dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” jelas Mewoh yang didampingi Komisioner KPU Meidy Tinangon, Yessi Momongan, Lanny Ointu.

“Semua pihak yang berkepentingan harus mendalami dan memahami regulasi PemiluKada nanti. Diharapkan dari kegiatan ini semua akan paham secara utuh, komprehensif dalam semua regulasi kampanye. Bagi partai politik sudah tidak ada perbedaan persepsi lagi, baik penyediaan dana kampanye dan tahapannya. Begitupun dengan media agar kita bersama-sama mengikuti regulasi yang ada terkait pemilihan,” ungkapnya.

Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon mengatakan, rekan-rekan media yang diundang dalam kegiatan ini bagian dari cara KPU untuk memaksimalkan fungsi media sebagai penyebar luas informasi dari produk-produk hukum yang dibuat KPU.

“Selain stakeholder, parpol dan ormas kami mengundang teman-teman media agar informasi bisa tersebar luas sampai pada masyarakat,” imbuhnya. Turut hadir Pengurus partai politik, Kesbangpol, Organisasi Masyarakat, dan Wartawan yang liputan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Penulis: *Olvi Kapojos*

Sumber: *manadoaktual.com*

KPU Sulut Sosialisasikan Produk Hukum Pilkada 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)



melaksanakan penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Pentingnya sosialisasi tersebut, mengacu PKPU RI nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kegiatan penyuluhan Produk Hukum KPU terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut itu digagas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut di Swiss-Bel Hotel Maleosan, Senin (31/8/2020) hingga Rabu (2/9/2020).

“Kami memang mengagendakan kegiatan penyuluhan seperti ini setiap ada produk hukum yang kita buat atau ditetapkan oleh KPU Provinsi maupun PKPU yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia (RI),” kata Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh.

Dalam kegiatan ini KPU Sulut ingin agar semua produk hukum KPU terkait pemilihan kepala daerah harus diketahui secara luas masyarakat Provinsi Sulut.

KPU Sulut bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Produk hukum ini tidak hanya disebarluaskan saja ke publik lewat media informasi cetak, media online atau website KPU tapi juga harus duduk bersama dalam kegiatan penyuluhan produk hukum seperti ini agar informasi yang di sampaikan tidak hanya di terima dari satu arah tapi dari dua arah juga.

Ia menjelaskan bahwa KPU Sulut sendiri memiliki portal yang dinamakan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), semua informasi dan pencarian produk hukum KPU, baik yang Sumber KPU RI dan KPU Provinsi bisa diakses oleh publik.

Di pihak lain Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy

Yafet Tinangon MSi, mengatakan bahwa dalam penyuluhan ini para peserta akan mendapatkan sejumlah materi seperti, Peraturan KPU dalam Hirarki Peraturan Perundangan-undangan serta Kebijakan Penyusunan Produk Hukum KPU, Pelaksanaan Tahapan di Masa Bencana Non Alam (PKPU 6/2020), Pedoman Teknis Kampanye, Pedoman Teknis Dana Kampanye.

“Ada materi tentang proses pengadaan APK dan bahan kampanye, iklan kampanye yang difasilitasi KPU serta pengadaan jasa KAP. Ada materi pengaturan iklan kampanye dan penyiaran kampanye, per Bawaslu tentang pengawasan kampanye dan pelaporan dana kampanye, ada juga materi tentang penanganan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Serentak, kebijakan Polri dalam pengamanan kampanye, sanksi administrasi dan pidana dalam tahapan kampanye dan dana kampanye,” sebut Tinangon.

“Ada juga materi tentang penanganan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Serentak, kebijakan Polri dalam pengamanan kampanye, sanksi administrasi dan pidana dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, sanksi administrasi dan pidana dalam tahapan kampanye dan dana kampanye,” tutur Tinangon. Diketahui materi-materi terkait kegiatan Penyuluhan Produk Hukum ini nantinya akan disampaikan oleh Komisioner KPU dan Sekretaris KPU Sulut, KPID Sulut, Bawaslu Sulut, Kajati Sulut dan Kapolda Sulut. (*)

Penulis: *Jellina Najoran*
Sumber: *sulutreview.com*

Malonda Paparkan Dasar Hukum Pendaftaran Paslon Kepala Daerah 2020

MANADO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) paparkan Dasar Hukum dalam Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) yang bakal digelar Komisi Pemilihan Umum



(KPU) dalam Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember Mendatang.

“KPU memperhatikan B1 KWK dlm proses pendaftaran bakal paslon, serta prosedur teknis dan protokol covid-19 berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2020,” kata Ketua Bawaslu Sulut DR. Herwyn Malonda, MH, M. Pd dalam Rapat Koordinasi persiapan pendaftaran paslon guberbur dan wakil gubernur yang digelar, Senin (31/08) di Swissbel Hotel Manado.

Ditegaskannya, KPU Sulut kiranya memperhatikan tanda terima kelengkapan berkas pendaftaran bakal pasangan calon agar tidak terjadi miss komunikasi antara KPU dan peserta.

Begitupun, terkait mendukung tugas-tugas pengawasan Bawaslu wajib menerima salinan BA hasil verifikasi berkas bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta KPU juga harus bisa menjaga informasi yg bersifat privat terhadap tes kesehatan bakal paslon dari covid-19

Sementara menyangkut kerawanan indikasi dan penanganan sengketa pelanggaran pemilu dalam pendaftaran Paslon ini, Malonda menekankan pihak Bawaslu terbuka dan siap menerima aduan tersebut.

“Dalam proses pendaftaran bakal paslon dan tindak lanjut Bawaslu apabila nantinya terjadi pelanggaran dalam tahapan yang akan dituangkan dlm form pengawasan Bawaslu untuk di proses lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku. Terkait penanganan sengketa menyampaikan bahwa permohonan dapat diterima oleh Bawaslu apabila peserta dirugikan secara langsung,” ungkapnya.

“KPU menyampaikan agar mengantisipasi pendaftaran di hari akhir batas pendaftaran pencalonan untuk dapat diatur dengan baik,” terangnya sembari meminta penyelenggara Pemilu terus menjaga netralitasnya

“Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU menjaga integritas dan

netralitas, serta menjaga konsistensi agar sesuai dengan regulasi dan protokol kesehatan covid-19,” pungkasnya.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/31/08/2020*

KPU Sulut Gelar Media Gathering dengan Insan Pers

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melaksanakan Media Gathering di Kantor KPU Sulut, Kamis (3/9/2020) dengan topik Peran Pers dalam Menciptakan Demokrasi Berkeadilan Sulut Tahun 2020.

Kegiatan ini dihadiri insan pers dari media elektronik, online maupun media cetak. Dan tampil sebagai pembicara Raymon Pasla (Komisi Informasi Publik), Amanda Komaling (IJTI) dan Erick Kawatu (KPID).

Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Sulut, Salman Saelangi saat membuka kegiatan mengemukakan, KPU sangat membutuhkan media untuk sosialisasi tahapan yang akan dilaksanakan pada Pilkada 9 September 2020 nanti.

Peran media sangat penting sehingga pihaknya dapat menerima berbagai masukan dan tanggapan masyarakat untuk kelangsungan pelaksanaan tahapan Pilkada agar berlangsung dengan baik, untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan di Sulut.

Dia menambahkan, Pilkada serentak bukan hanya milik KPU, namun milik bersama sehingga dibutuhkan kerja bersama untuk mengawal tahapan dapat terealisasi tepat waktu.

“Dalam tahapan Pilkada dibutuhkan ketelitian agar tidak menimbulkan persoalan, sehingga dibutuhkan pengawasan dan kerja bersama dari semua pihak dan tetap mengedepankan protokol Covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Raymon Pasla mengatakan dinamika yang terjadi dalam sebuah iven Pilkada pasti akan terjadi, karena itu



dibutuhkan sebuah konsep pemberitaan yang dapat mengedukasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik. (*)

Penulis: *Charencia Repie*

Sumber: *kawanuapost.com*

Gelar Media Gathering, KPU Dorong Pers Ciptakan Demokrasi Berkeadilan di Pilkada 2020

MANADO—Persiapan Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulut, Kamis (3/9/2020) menggelar Media Gathering bersama dengan insan Pers dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak. Dengan tema “Peran Pers dalam menciptakan demokrasi berkeadilan Sulawesi Utara 2020”.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Sulut Salman Saelangi.

Diakui Saelangi peran media sangat penting dalam tahapan Pilkada serentak, sehingga KPU Sulut dapat menerima berbagai masukan dan tanggapan masyarakat, untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan di Sulut.

“Pilkada serentak bukan hanya milik KPU, tapi milik bersama maka dibutuhkan kerja bersama untuk mengawal tahapan sehingga dapat terealisasi tepat waktu,” ucap Saelangi.

Lanjut Saelangi, dalam melaksanakan tahapan Pilkada dibutuhkan ketelitian agar tidak menimbulkan persoalan.

Sementara itu Raymon Pasla sebagai salah satu pembicara dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut mengakui, dinamika yang terjadi dalam sebuah event Pilkada pasti akan terjadi, untuk itu dibutuhkan sebuah konsep pemberitaan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi polemik.

Kegiatan Media Gathering KPU Sulut bersama insan pers yang menjadi

pembicara adalah Raymon Pasla (Komisi Informasi Publik), Amanda Komaling (IJTI) dan Erick Kawatu (KPID), serta para wartawan media baik cetak, elektronik dan media online. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Tinangon Tutup Kegiatan Penyuluhan Produk Hukum

MANADO—Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon menutup kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Hotel Swissbel, Selasa 1 September 2020.

Usai menutup kegiatan tersebut Meidy Tinangon saat ditemui dan diwawancarai menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada malam ini seperti nama kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu menyebarluaskan tentang pemahaman-pemahaman produk Hukum untuk pelaksanaan pemilihan serentak khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020.

“Dengan harapan akan ada terjadi penyamaan persepsi baik semua pihak, semua stakeholder terkait, termasuk juga pers, dimana pers akan berperan lebih menyebarluaskan kepada publik terkait akan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada baik peraturan KPU bahkan keputusan KPU dalam teknis pelaksanaan pemilihan ini,” terang Tinangon.

Lanjut Meidy Tinangon menyampaikan akan pemahaman yang baik terhadap aturan dengan harapan semua proses akan berjalan sesuai regulasi. “Karena prinsip kita melaksanakan pilkada itu tetap semua mengacu pada regulasi yang ada,” tutup Tinangon. (*)

Penulis: *Olvi Kapojos*

Sumber: *manadoaktual.com*



9 Hal Baru Diterapkan KPU Sulut Untuk Pilkada 9 Desember 2020

SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan menerapkan protap kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 09 Desember 2020 nanti dan ini memang sangat berbeda dengan pelaksanaan Pemilu tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh komisioner KPU Sulut Divisi Perencanaan dan Data Lanny Ointu, saat menyampaikan materi ‘Pelaksanaan Tahapan di Masa Bencana Non Alam (PKPU6/2020)’ pada kegiatan penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa (01/09/20) pagi.

Lanny Ointu mengungkapkan bahwa KPU Sulut akan menerapkan 9 hal yang baru untuk Pilkada 9 Desember 2020, yakni :

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 orang.
2. KPPS sehat covid-19.
3. Suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius.
4. Pengaturan kedatangan.
5. Area TPS bebas covid.
6. Sterilisasi paku.
7. wajib pakai Masker.
8. Sarung tangan plastik.
9. Tinta ditetes. (*)

Penulis : Ika

Sumber : portalsulutnews.com

Pelaksanaan Proses Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Segera Bergulir

MANADO - Sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) begitu ketat dalam menerapkan

protokol kesehatan khusus Covid-19 seperti menggunakan alat pelindung diri, masker, hand sanitizer serta social distancing dalam setiap proses tahapan.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) Yessy Momongan, S.Th, M.Si, yang mengatakan KPU Sulut sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Mulai besok dari tanggal 4-6 September 2020 tahapan pendaftaran mulai berlangsung, oleh sebab itu dalam masa pandemic Covid-19 ini kami membatasi banyak team yang akan melaksanakan pendaftaran,” ucap Momongan di Aula KPU Sulut, Kamis (3/9).

Lebih lanjut, KPU Sulut mengatur bahwa setiap pasangan calon hanya bisa membawa pendukung sebanyak 36 orang saat melakukan pendaftaran.

“36 orang itu sudah sesuai dengan kursi yang kami siapkan, kemudian yang bisa naik di tempat pendaftaran hanya calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya Partai yang bertanda tangan atau Partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi serta LO yang selalu melakukan komunikasi bersama KPU terkait kelengkapan berkas paslon,” ucap Yessy Momongan dalam kegiatan media gathering bersama awak media.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sukses Gelar Penyuluhan Produk Hukum Pilgub 2020. Tinangan: Semua Proses Akan Berjalan Sesuai Regulasi

SULUT – Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 yang di gelar sejak 31 Agustus – 2 September di Swiss-bell hotel Maleosan Manado, sukses digelar.

Komisioner KPU Sulut, Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangan,



kepada wartawan di sela penutupan kegiatan, mengatakan sebagaimana nama kegiatannya kita hendak menyebarluaskan penyamaan persepsi antara semua pihak, semua stakeholder terkait, termasuk juga dengan pers.

“Pers berperan menyebarluaskan kepada publik terkait dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan KPU, keputusan KPU, dalam teknis pelaksanaan pemilihan ini,” ungkapnya.

Tinangon juga berharap, dengan adanya pemahaman yang baik terhadap aturan, semua proses akan berjalan sesuai dengan regulasi.

“Karena prinsip kita melaksanakan Pilkada itu nsemua tetap mengacu pada regulasi yang ada,” tutupnya. (*)

Penulis: *Friska Tewu*

Sumber: *portalsulutnews.com*

KPU Larang Paslon Kepala Daerah Bawa Simpatisan di Tahapan Pengundian Nomor Urut

MANADO - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 akan melewati tahapan pengundian nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan aturan bagi Pasangan Calon (Paslon) yang sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada dimana tidak diperkenankan membawa serta pendukung atau simpatisan saat kegiatan berlangsung.

“Pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara masih dalam kondisi membahayakan sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 wajib menerapkan Protokol Kesehatan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Dalam kaitan pelaksanaan kegiatan pengundian nomor urut, setiap Paslon peserta Pilkada, hanya diwajibkan mengutus

• satu orang penghubung, juga menugaskan
• maksimal dua orang tim kampanye, dua
• orang saksi atau pengurus partai politik atau
• gabungan partai politik. “Semua ketentuan
• yang ditetapkan wajib diikuti, oleh pasangan
• calon peserta Pilkada,” tambah Mewoh.

• Standar protokol kesehatan akan
• diberlakukan dalam setiap tahapan Pilkada
• yakni bagi Paslon peserta Pilkada wajib
• menggunakan APD berupa Masker yang
• menutupi hidung hingga dagu, Sarung
• Tangan jika dibutuhkan, juga menghindari
• kerumunan massa. (*)

• Penulis: *Josh Tinungki*

• Sumber: *Sulutnews.Com*

Sulut Siap Gelar Pilkada, Kapolda: Utamakan Protokol Kesehatan Covid 19

• MANADO—Provinsi Sulawesi Utara
• (Sulut) dan sejumlah kabupaten/kota
• siap menggelar pemilihan kepala daerah
• (Pilkada) serentak 9 Desember 2020
• mendatang dengan memperhatikan dan
• mengutamakan protokol kesehatan Covid
• 19.

• Hal itu disampaikan Kapolda Irjen Pol
• Panca Putra Simajuntak kepada wartawan
• usai mengikuti rapat virtual yang digelar di
• Kantor Gubernur, Rabu (09/09) kemarin.

• Rapat virtual terkait pelaksanaan
• pilkada serentak bersama Menteri
• Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
• (Menkopolhukam) Mahfud MD turut
• dihadiri Wagub Sulut Steven OE Kandouw,
• Sekdaprov Edwin Silangen, jajaran
• Forkopimda dan sejumlah pejabat Pemprov
• Sulut. Kesempatan itu, Kapolda Panca juga
• menyampaikan pesan Menkopolhukam,
• agar pelaksanaan Pilkada berlangsung
• sehat dan demokratis.

• “Ya, arahan dan pesan Menteri Polhukam
• dengan menteri terkait, bagaimana
• kita menyelenggarakan Pilkada tahun
• 2020 dengan memperhatikan protokol
• kesehatan Covid 19. Sehingga Pilkada bisa
• berlangsung sehat dan demokratis,” kata



Kapolda yang didampingi Wagub Steven Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan jajaran Forkopimda.

Kapolda Panca mengingatkan supaya memperhatikan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. “Jadi, itu harus diperhatikan dan diutamakan,” imbuhnya. Saat rapat virtual, tambah Kapolda Panca, Menkopolhukam dan para menteri juga mengecek sejauh mana kesiapan pelaksanaan Pilkada di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2020.

“Insya Allah Provinsi Sulut siap melaksanakan Pilkada bersama dengan pihak penyelenggara. Dan, bagi peserta bila melanggar protokol kesehatan ada sanksinya. Itu ada di aturan KPU dan Bawaslu,” tutup Kapolda Panca.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Netralitas ASN dan Protokol Covid Syarat Utama Pilkada

MANADO—Memasuki tahapan kampanye, aparat keamanan maupun penyelenggara Pemilu makin memantapkan persiapan. Salah satu hal yang menjadi poin penting adalah kepatuhan para peserta Pilkada dalam aturan serta netralitas aparat keamanan. Hal ini diungkapkan Kapolda Sulut Irjen Pol Drs R.Z Panca Putra Simanjuntak MSi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kampanye Pemilihan di Hotel Four Points Manado, Kamis (17/9) yang diikuti para penyelenggara pemilu, partai politik, perwakilan bakal calon, dan perwakilan Forkopimda Sulut.

Kapolda dalam arahannya mengatakan, Polri mendorong semua pihak terutama para penyelenggara, peserta dan para pendukung dalam Pilkada Serentak 2020, untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19. Menurutnya, perlu disusun sebuah kesepakatan bersama, komitmen bersama agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman, sejuk, damai

dan sehat serta memperhatikan protokol kesehatan.

“Kenapa itu penting, karena apapun peraturan dibuat, tidak akan mampu mengakomodir semua hal secara utuh. Banyak permasalahan yang muncul di lapangan yang mungkin saja tidak tertuang dalam peraturan tersebut,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut jenderal bintang dua ini mengungkapkan, dalam rakor perlu disepakati melalui kesepakatan bersama untuk mengatasi persoalan yang berpeluang muncul saat tahapan kampanye dilaksanakan. “Selain mengatasi masalah yang timbul karena tidak ada aturan, kita juga memperkuat sanksinya, harapannya seperti itu,” tegasnya.

Di kesempatan itu juga Kapolda menegaskan bahwa Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Ia juga berharap, tidak hanya netralitas Polri yang dibutuhkan, tapi semua penyelenggara tetap menjaga netralitas sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bisa berjalan secara demokratis.

“Polri berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan Pilkada yang demokratis, diperlukan netralitas aparat keamanan. Polri sudah berkomitmen tidak ada tawar menawar, netralitas Polri itu menjadi prasyarat utama. Ini sudah kita sosialisasikan dan terus kita lakukan pengawasan, sejauh mana anggota di lapangan menunjukkan netralitas ini. Kalau ada anggota yang dianggap tidak memiliki netralitas silahkan berikan masukan. Dan teman-teman Bawaslu silahkan melakukan pengawasan terhadap masalah ini,” tegas mantan Direktur Penyidikan KPK ini.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Dandel Warning Penyebaran Covid-19 di Masa Kampanye Pilkada

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan Pemilihan



Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dan dipastikan akan ada masa kampanye yang akan melibatkan banyak orang maupun kerumunan.

Karenanya, untuk menghindarkan ancaman penyebaran Covid-19, juru bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Steven Dandel, MPH mengingatkan agar masyarakat dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru, tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

“Yang dimaksud dengan tatanan hidup baru yaitu bukan kembali pada kondisi kehidupan sebelum adanya Covid-19. Tatanan hidup baru yaitu beraktivitas tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Ini penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya saat menghadiri rapat koordinasi persiapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulut di Four Point Hotel, Kamis (17/9/2020).

Dandel berharap adanya sosialisasi yang dilakukan secara gencar kepada masyarakat tentang arti dari tatanan hidup baru (New Normal), bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Bahkan jumlah penyintas terus bertambah setiap hari.

“Perlu sekali dari Satgas Provinsi Sulut sampai ke kabupaten/kota untuk mensosialisasikan bahwa pandemi ini belum selesai, bahwa yang disebut tatanan hidup baru bukan kembali kepada kondisi kehidupan sebelum ada Covid, itu salah besar,” tegas Dandel.

Dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada ini akan terjadi dinamika dan situasi di mana ada potensi terjadi penyebaran Covid-19. “KPU dan stakeholder terkait dalam hal ini Satgas adalah menghasilkan aturan hukum untuk kendali transmisi. Jadi aturan hukumnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dampak dari covid-19,” tutup Dandel.

Diketahui, dalam rapat koordinasi ini dibahas beberapa hal yakni menjalankan

protokol kesehatan Covid-19 dalam kampanye dan landasan-landasan hukum dalam Pilkada. (*)

Penulis: *Jellina Najoan*

Sumber: *sulutreview.com*

KPU Sulut Gelar Media Gathering Terkait Peran Pers

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan kegiatan Media Gathering bertema ‘Pers dalam Menciptakan Demokrasi Berkeadilan Sulawesi Utara 2020’, Kamis (9/20) di KPU Sulut.

Kegiatan Media Gathering KPU Sulut telah dibuka oleh Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi, Parmas dan SDM Salman Saelang. Pembicara Media Gathering Raymon Paslah (Komisi Informasi Publik), Amanda Komaling (IJTI) dan Erick Kawatu (KPID), serta puluhan awak media baik cetak, elektronik, maupun media online lainnya yang dibagi menjadi 2 sesi.

Peran media sangat penting sehingga pihaknya dapat menerima berbagai masukan dan tanggapan masyarakat untuk kelangsungan pelaksanaan tahapan pilkada agar berlangsung dengan baik, untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan di Sulut.

Ditambahkannya, Pilkada Serentak bukan hanya milik KPU, namun milik bersama sehingga dibutuhkan kerja bersama untuk mengawal tahapan dapat terealisasi tepat waktu.

“Dalam tahapan Pilkada dibutuhkan ketelitian agar tidak menimbulkan persoalan, sehingga dibutuhkan pengawasan dan kerja bersama dari semua pihak dan tetap mengedepankan protokol Covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Raymon Pasla mengatakan, dinamika yang terjadi dalam sebuah iven pilkada pasti akan terjadi, karena itu dibutuhkan sebuah konsep pemberitaan



yang dapat mengedukasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik.(*)

Penulis: *Olvi Kapojos*

Sumber: *manadoaktual.com*

Para Lansia Dilarang Ikut Kampanye

MANADO – Dari pengalaman sebelumnya, pelaksanaan kampanye sering diikuti orang lanjut usia (lansia) termasuk ibu menyusui, anak-anak terkadang disertakan dalam acara, baik dalam gedung maupun di luar gedung.

Apalagi pelaksanaan kampanye sesuai tahapan Pilkada serentak terjadwal mulai dilaksanakan tanggal 26 September 2020.

Demikian sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam Covid-19, maka lansia, ibu menyusui bahkan anak-anak dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

“Bukan hanya lansia, namun balita/ anak-anak ataupun ibu menyusui dilarang mengikuti acara kampanye,” tegas Ketua KPU Minut Stella Runtu melalui

Komisioner KPU notabene Kadiv Sosparmas, Hendra Lumanauw MA dalam acara sosialisasi PKPU No 10 tahun 2020 di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Minggu (20/09/20).

Dihadapan puluhan wartawan, Lumanauw menjelaskan PKPU No.6 tahun 2020 yang Sumber bulan Juli 2020, terus disempurnakan dengan mengedepankan protap Covid-19 dari segi kesehatan dan keselamatan.

“Dengan berbagai pertimbangan segi kesehatan dan keselamatan menjadi terpenting di tengah covid-19, anak-anak, balita bahkan lansia dan ibu menyusui sangat rentan terpapar corona virus, itu sebabnya larangan ini kembali di pertegas dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 yang Sumber 14 September 2020. Itu sebabnya

perlu disosialisasikan sebagai edukasi untuk kepentingan publik, termasuk bagi para kontestan Pilkada, Parpol dan lainnya,” terang Lumanauw. (*)

Penulis: *DEWI S*

Sumber: *Sulut Times*

Rakor KPU Talaud Persiapan Kampanye dan Penetapan 153 Titik APK

TALAUD - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan kampanye bersama dengan berbagai elemen yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak, Selasa (22/9/2020).

Rakor yang digelar siang itu bertempat di aula KPU Kepulauan Talaud. Kegiatan ini digelar untuk membahas tentang persiapan pelaksanaan tahapan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU Talaud, Andri LJ Sumolang.

“Rakor ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan rakor persiapan kampanye,” ujar Sumolang.

Ia menambahkan, rakor ini membahas juga mengenai titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di 153 desa. “Dalam rakor ini kita sama-sama membahas terkait dengan titik lokasi APK, supaya kita sama persepsi demi lancarnya proses tahapan kampanye yang akan dimulai pada 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020,” tutur Sumolang.

Lanjutnya, dalam pemasangan APK di lokasi atau titik pemasangan, nantinya akan difasilitasi oleh KPU sesuai dengan regulasi yang ada. “Lokasi atau titik ini nantinya akan dipasang dengan APK yang difasilitasi KPU. Berdasarkan PKPU 10 Tahun 2020, bahwa dalam pelaksanaan kampanye ada



beberapa metode pelaksanaannya, salah satunya adalah APK. Oleh karena itu KPU menentukan titik/lokasi APK berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta lokasi-lokasi mana saja yang nantinya layak untuk dipasang APK tersebut,” terang Sumolang.

Dalam kegiatan rakor ini dihadiri juga Asisten Satu Bidang Pemerintahan Pemkab Talaud, Kepolisian, Bawaslu, Liaison Officer (LO) Partai Politik. (*)

Penulis: *Melky Bidu*

Sumber: *suluttimes.com*

Jika Pilkada Sukses, Bisa Jadi Sejarah

MANADO - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Senin (28/9/2020).

Kedatangan Agus Fatoni disambut hangat Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi jajaran komisioner KPU.

Kunker ini dalam rangka perkenalan, silaturahmi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas masing-masing demi menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Agus Fatoni menuturkan Pilkada tahun ini sangat berbeda dari sebelumnya.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua apakah pilkada kali ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau ini sukses bisa jadi sejarah dan akan menjadi cerita dunia bahwa dengan kondisi pandemi kita bisa melaksanakan Pilkada dan bisa mendapatkan apresiasi,” kata Fatoni.

Karena itu, Fatoni meminta seluruh stakeholder, Forkopimda, Pemda, KPU, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi mewujudkan pilkada berkualitas.

“Karena tugas kita cukup berat dengan kondisi yang sama-sama sulit. Oleh karena itu dengan koordinasi yang baik agar bisa

berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lanjut Fatoni, Pilkada juga sebagai momentum penanganan COVID-19 di Sulut.

“Yang terpenting bagaimana momentum ini bisa bermanfaat dengan baik sehingga masyarakat betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 ini,” bebernya.

Pjs Gubernur Sulut berharap besarnya partisipasi masyarakat dalam pilkada walaupun masih dalam masa pandemi.

“Menjadi tantangannya bagaimana Pilkada ini agar tidak menjadi cluster baru dan itu yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Pastikan Data Pribadi Pemilih Terlindungi

MANADO- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Dr Ardiles Mewoh menjamin semua data pribadi pemilih disimpan dan dilindungi kerahasiannya. “Menurut undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan (adminduk), itu wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya. Itu prinsip utamanya. Sehingga tidak semua pihak bisa mengakses,” ujarnya.

Menurut Ardilles, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilarang keras memberikan data pemilih. “PPDP dilarang menyimpan, menggandakan atau mengambil foto formulir A-KWK (berisi data pemilih), apalagi mengunggahnya ke media sosial. Kecuali, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data yang dibolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU),”ujarnya.

KPU menerbitkan surat keputusan KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A.KWK



yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan. "Dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut," katanya.

Data pemilih tersebut juga bisa dicek di website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. Atau bisa langsung menghubungi nomor hotline bebas pulsa 081143300700. "Ada daftar nama pemilih bisa jadi informasi publik di situ. Tapi NIKnya kita kunci 6 angka dibelakang supaya bisa menjaga data kerahasiaan data pemilih," ungkapnya.

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Sumber: *Sulutdaily.com*

Pjs Gubernur Siap Bersinergi dengan KPU

MANADO—Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni mengunjungi kantor KPU Provinsi Sulut, Senin (28/9). Fatoni diterima langsung Ketua KPU Ardiles Mewoh didampingi komisioner Salman Saelangi dan Meidy Tinangon.

Fatoni usai pertemuan pada wartawan mengatakan kunjungan ini terkait koordinasi tugas masing-masing sebagai pemerintah daerah maupun KPU. "Kami memperlancar komunikasi agar bisa menjalankannya sebaik-baiknya. Karena pilkada tugas kita semua," sebut Fatoni.

Dia melanjutkan pelaksanaan pilkada di Sulut harus berjalan lancar, sukses, aman, dan sehat. "Saya tadi berdiskusi dengan KPU soal tahapan pelaksanaan," tandasnya.

Di tempat yang sama, Mewoh mengatakan sangat mengapresiasi kunjungan Pjs Gubernur ini. "Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Di awal dipercayakan menjabat langsung berkoordinasi dengan kami. Kami menyampaikan kepada beliau, memohon mendukung tahapan pemilihan serentak di Sulut. Kalau ada hal-hal yang butuh dikoordinasikan akan kita koordinasikan," tandas Mewoh. (*)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Agus Fatoni Kunjungi KPU Sulut

MANADO—Memulai tugasnya di Sulawesi Utara, Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulut Agus Fatoni melakukan kunjungan kerja di Kantor KPU Sulut, Senin (28/9/2020).

Kunjungan Fatoni di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut berlangsung hampir satu jam melakukan rapat bersama dengan Komisioner KPU Sulut. Sebagai bentuk koordinasi dan membangun sinergitas.

Diakui Fatoni, kunjungan perdana selaku Pjs Gubernur di KPU Sulut untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara, terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi Komisioner KPU Salman Saelangi, Melidy Tinangon, Lanny Ointu mengakui, kedatangan Pjs Gubernur Agus Fatoni dalam rangka koordinasi serta silaturahmi sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Sulut Gandeng Kejati Laksanakan Tahapan

MANADO—Akhir Januari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut akan tanda tangan MoU dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Hal itu menindaklanjuti kunjungan KPU di Kejati Sulut beberapa waktu lalu.

"Rencananya akan MoU akhir Januari. Ini kerja sama di bidang hukum untuk pelaksanaan tahapan," kata Komisioner KPU Sulut, Meydi Tinangon.

Kejati, kata dia, statusnya juga pengacara negara khusus hal-hal yang berkaitan



dengan sengketa tata usaha negara. “Ini untuk pendampingan dalam menghadapi permasalahan hukum,” tandasnya.

Menurutnya, hal ini penting karena pilkada tak lepas dari produk hukum yang akan dihasilkan. Juga, lanjutnya, harus laksanakan sesuai koridor, aturan, regulasi yang ada.

“Makanya kami rasa penting kerja sama dengan Kejati,” ucapnya. Ditambahkan Tinangon, MoU ini nantinya akan diikuti KPU kabupaten/kota lain yang menyelenggarakan pilkada. “Akan ditandatangani serentak. Yang jelas kita bisa meminta pertimbangan hukum, pendampingan khusus kalau ada sengketa proses atau hasil atau sengketa tata usaha negara,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Terkait Pilkada, Agus Fatoni Tatap Muka dengan Pihak KPU Sulut

MANADO - Pj Gubernur Sulut Agus Fatoni didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen melakukan kunjungan kerja ke KPU Provinsi Sulut, Senin (28/9/2020).

Pjs Gubernur Sulut itu disambut oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan langsung menggelar diskusi bersama jajaran pihak KPU Sulut.

Usai melakukan pertemuan kepada awak media, Agus Fatoni mengatakan pilkada merupakan momentum pencegahan Covid-19.

Dengan dibagikannya APD dari para pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat maka akan dapat meningkatkan proses penanganan Covid-19.

Lanjut Fatoni, adapun tujuan tatap muka ini adalah untuk perkenalan, silaturahmi dan berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas masing-masing.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh berharap agar pilkada serentak di

daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menjadi cluster baru.

“Semoga pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan lancar serta tidak menjadi cluster baru. Intinya tetap mematuhi protap kesehatan covid 19 yang ada,” harapnya.

Penulis: *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*

Pilkada Momentum Memutus Mata Rantai COVID-19

MANADO — Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni bersama jajaran Forkopimda mengikuti Rakor Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak 2020 yang digelar Kemendagri.

Rakor diikuti secara virtual melalui video conference dari Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Jumat (16/10/2020).

Kegiatan turut diikuti Pjs Gubernur, Bupati/Walikota didampingi Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Usai rakor, Agus Fatoni menyampaikan poin penting.

“Rakor ini membahas tentang analisa dan evaluasi yang di dalamnya tentang penanganan Covid di daerah yang menggelar pilkada,” kata Fatoni.

Ia menyebut penanganan Covid-19 di daerah pilkada termasuk Sulut trennya menunjukkan ke arah lebih baik, ditandai semakin menurunnya kasus Covid-19.

“Karena lewat hasil rakor tadi, rata-rata daerah yang melaksanakan Pilkada itu Covidnya turun, ini dampak positif,” ujarnya.

Menurutnya, pilkada juga sebagai momentum penanganan Covid-19 di Sulut.

“Oleh karena itu, Pilkada ini dapat dijadikan momen mendorong agar penanganan Covid-19 lebih berhasil,” tegasnya.

“Dalam pilkada dan masa kampanye ini pasangan calon membagikan APD, masker,



alat peraga lain seperti handsanitizer. Jadikan momen kampanye ini juga sebagai ajang mendorong masyarakat memutus mata rantai penularan Covid-19 ini,” tambahny.

Fatoni mengimbau kepada para paslon, bupati, dan walikota, agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan Covid-19 dan penggunaan masker khususnya.

“Karena menggunakan masker dapat mencegah penularan sampai dengan 85% penularan Covid-19,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Pilkada Serentak, Mewoh: KPU Sulut Akan Mengikuti Protokol Kesehatan

MANADO—Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan mempersiapkan semua kesiapan dengan mengikuti protokol kesehatan. Mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang saat ini dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Kesiapan KPU Sulut antara lain memberikan alat pelindung diri (APD) baik penyelenggara maupun pemilih. APD yang akan diberikan yaitu masker, sarung tangan serta persiapan di lokasi pemungutan suara rencana pada lokasi akan diatur jarak,” jelas Mewoh.

Masih menurut Mewoh, pengaturan kursi di lokasi hanya 12 kursi dengan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) sesuai yang sudah diatur oleh penyelenggara. “Kami KPU Sulut akan mengatur kegiatan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan mengikuti protokol kesehatan sehingga pemilu ini akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Mewoh kepada wartawan, Senin (6/7/2020).(*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Sosialisasi Pilkada Berbasis Komunitas, KPU Sulut Gandeng GAMKI

MINAHASA -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) bersamaDPD GAMKI Sulawesi Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Lanjutan tahun 2020, di Tambala Hills Café & Resto Tanawangko, Minahasa, Rabu (04/11/2020).

Bertajuk “Pilkada Damai dan Sehat, Rakyat Selamat, Daerah Aman, Maju dan Sejahtera”, Sosialisasi Pilkada tersebut berbasis Komunitas, Kampus, Ormas, LSM, Lembaga Adat, dan Berbasis Keagamaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Dr. Goinpeace Tumbel, M.Si saat materi “Pemilihan Kepala Daerah yang Bermartabat dan Berintegritas mengatakan untuk mewujudkan Pilkada yang bermartabat dan berintegritas, tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. “Generasi muda juga ikut bertanggungjawab dan harus mengambil peran itu,” kata Tumbel

Tumbel juga mengingatkan generasi muda jangan terseret dengan praktik politik uang yang merusak dan mengancam proses demokrasi, karena dampak dari praktik kotor tersebut adalah memilih pemimpin yang tidak berkualitas.

Anggota KPU Sulawesi Utara Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Yafeth Tinangon S.Si., M.Si mendorong partisipasi anak muda di daerah nyiur melambai dalam menyukseskan Pilkada tahun 2020.

“Ada banyak hal yang bisa dilakukan anak-anak muda sebagai wujud partisipasinya di Pilkada Sulawesi Utara. Tidak hanya sekedar datang TPS untuk menyalurkan hak pilih tetapi harus menjadi pelopor Pilkada yang damai dan sehat,” ujar Meidi Tinangon

“Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara” sedangkan Meikel Lela tampil memberikan penguatan terhadap peran



pemuda dalam Pilkada dengan materi “Pemuda Tiang Informasi Politik dan Pilkada” dan moderator dalam giat tersebut dipercayakan kepada Douglas Pareta, S. Si., M. Si.

Ketua DPD GAMKI Sulut, Debby Suma menyebutkan Sosialisasi Pilkada yang digelar sangat penting, karena untuk mendukung generasi muda berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi melalui Pilkada.

“Menjadi sejarah besar bagi generasi muda dengan proses Pilkada yang demokratis. Karena dengan banyaknya generasi muda yang berpartisipasi dan peduli dengan Pilkada akan sangat menentukan arah Sulawesi Utara kedepannya,” tegasnya.

Kegiatan Sosialisasi Pilkada dihadiri oleh perwakilan organisasi kemahasiswaan, Pemuda Kristen, Komunitas Pemuda, Lembaga Adat dari Minahasa, Manado, Tomohon dan Minahasa Selatan.

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Sumber: *Sulutdaily.com*

Hari Ini Calon Pemimpin Sulut Adu Wawasan

KPU Ajak Warga Sulut Nonton Lewat Live Streaming

MANADO—Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulut, hari ini Kamis (5/11) akan mengikuti debat publik pertama yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Debat ini akan disiarkan langsung lewat streaming akun resmi KPU Sulut di Youtube dan Facebook.

Selain itu juga akan live di Kawanua TV Manado dan disiarkan di RRI. “Marilah masyarakat Sulut ikuti dan saksikan debat publik paslon gubernur dan wakil gubernur Sulut tanggal 5 November pukul 15.30 -17.30,” ajak Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi.

Menurutnya, ini penting untuk diikuti masyarakat Sulut. Supaya warga

mengetahui, mencermati visi misi, program dari paslon. Supaya 9 Desember nanti sudah punya gambaran pasti,” terang Salman. Ditambahkannya, dalam debat publik pertama, standar protap pencegahan covid tetap mengikuti Peraturan KPU.

“Di ring lokasi debat itu hanya bisa 25 orang tambah host satu. Yang lain kru panitia dan media yang siarkan live, jari sekitar 30 orang. Di ring dua hanya yang berkepentingan. Jadi dibatasi orang-orang di lokasi debat. Kan bisa nonton langsung di streaming atau live TV dan radio,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Sosialisasi KPU- GPII, Para Milenial Tunjukkan Undangan Memilih

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) gencar melakukan sosialisasi sistem pencoblosan dan ajakan datang ke TPS pada pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kali ini, KPU Sulut bersama DPW Gerakan Pemuda Islam (GPII) Sulut, KPU melakukan sosialisasi di kalangan milenial pemilih pemula di warung kopi Imaginer, kecamatan Singkil kota Manado, Selasa (08/12/2020).

Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 berbasis organisasi, masyarakat, dan kampus ini, menghadirkan pembicara Dr. dr. Hi Taufiq Pasiak, M.Pd.I, M.Kes (Akademisi), Masri Ikoni, SIP (Ketua Umum GPII), Lanny Anggriany Ointoe, SE (Komisioner KPU Sulut).

Menurut komisioner KPU Sulut Lanny Anggriany Ointoe bahwa penting dilakukan mengingat pemilihan serentak kali ini merupakan pilkada pertama kali ditengah situasi pandemi Covid-19.

“KPU menjamin seluruh petugas TPS telah melalui pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Jadi kalau ada yang reaktif langsung di



swab dan tidak diijinkan untuk menjalankan tugasnya,” jelas Lanny.

Dikatakan Lanny, KPU juga menjamin semua pemilih yang datang ke TPS, seperti memberikan sarung tangan plastik dll dan TPS yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Jadi kami mengajak pemilih untuk jangan takut datang ke TPS.

Narasumber Taufiq Pasiak mengingatkan kepada para peserta bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang hak kebebasan memilih adalah hak semua masyarakat termasuk kaum milenial. Ia pun berharap agar para milenial menentukan pilihan sebaik baiknya dan jangan menggadaikan hak menentukan pilihan diambil oleh siapapun dengan money politik.

“Jangan terpengaruh iming iming pemberian apapun, harus menggunakan penilaian dan pertimbangan yang baik untuk memilih calon pemimpin kepala daerah. Pilihlah calon pemimpin kepala daerah yang benar benar mampu bekerja melayani masyarakat dan membangun daerah dengan baik, dan bukan mengandalkan serangan fajar. Saya juga menganjurkan datang ke TPS dengan memakai masker dan ikuti ketentuan protap pencegahan Covid-19,” ujar dokter Taufiq.

Ketua Umum GPII, Masri Ikoni mengatakan bahwa pemilih pemula harus menggunakan kesempatan menentukan pilihan dan jangan takut walaupun ada yang menghalang halangi.

“Ini merupakan pengalaman yang harus digunakan sebaik mungkin. Datang ke TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ada hal menarik pada sosialisasi ini dimana peserta yang datang seluruhnya membawa surat undangan pemilih dari PPS. Undangan tersebut ditunjukkan para peserta kepada komisioner KPU Sulut.

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Diterbitka : *Sulutdaily.com*

Antisipasi Covid-19, KPU Talaud Gelar Media Gathering Jelang Pilgub Sulut 2020

TALAUD -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Talaud menyelenggarakan Media Gathering bersama sebagian wartawan, bertempat di Penginapan Permata 1 Melonguane, Rabu (11/11/2020).

Acara tersebut merupakan bagian dari sosialisasi dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020.

Acara dihadiri oleh perwakilan media Kabupaten Talaud dan juga 5 komisioner KPU yakni ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Aripatria Pandesingka, Ketua Divisi Tekmas, Jouwy R. Lukas, Ketua Divisi Program Perencanaan dan Data, Budirman, dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ramly Rauf.

Ketua KPU, Adipatria Pandesingka dalam membuka acara, menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pilgub Sulut 2020.

Hal ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Sulut, “Kami berharap agar media bisa bersinergi dengan KPU untuk menyosialisasikan Pilgub, agar partisipasi masyarakat terus meningkat,” kata Adipatria Pandesingka.

Ada pun, hal yang penting dalam kegiatan ini adalah memberikan materi tentang data, langkah-langkah dan kesiapan distribusi logistik pemilihan dan antisipasi terhadap ancaman Covid-19 dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang akan di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Ketua KPU, Aripatria Pandesingka juga menjelaskan tentang beberapa langkah protokol kesehatan yang akan diterapkan saat kegiatan demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, salah satunya dengan memperketat protokol kesehatan dan sanksi sebagaimana tertera dalam PKPU. “Berdasarkan PKPU 13 tahun 2020



pasal 88a di nyatakan bahwa penyelenggara berhak memberikan pernyataan tertulis dan sanksi dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kecamatan Kota/Desa memberikan pernyataan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran dan pemberhentian yang bersangkutan akan mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.

Pemberian materi dilanjutkan oleh beberapa Komisioner KPUD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Setelah kegiatan selesai, acara di lengkapi dengan pemberian door prize kepada teman-teman anggota jurnalis Kabupaten Talaud. Dan di akhiri dengan sesi foto bersama Komisioner KPUD bersama teman-teman media. (*)

Penulis: *Melky Bidu*

Sumber: *suluttimes.com*

KPU Sulut Bakal Sosialisasikan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada 9 Desember 2020

MANADO - Untuk memberikan pemahaman kepada pemilih dan pelaksana di tingkat bawah terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara, maka KPU Sulut dalam waktu dekat ini akan melaksanakan simulasi.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh Jumat, 16 Oktober 2020 mengatakan simulasi ini akan dilaksanakan baik di Kabupatenkota yang melaksanakan Pilgub maupun tidak, apalagi jelasnya pelaksanaan ini dilakukan dimasa Covid 19.

Untuk mematangkan pelaksanaan simulasi ini maka pantauan SION FM, Jumat siang Ketua KPU Ardiles Mewoh bersama Komisioner Bidang teknis Yessy Momongan menggelar rapat bersama tim teknis.

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

Meidy Tinangon Jelaskan 12 Hal Baru Saat di TPS Nanti

MANADO — Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Yafeth Tinangon menjelaskan 12 hal baru yang mesti diperhatikan warga saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020.

Hal ini dijelaskan Meidy Tinangon saat menjadi pembicara pada Diskusi Sosial Kemasyarakatan yang digagas Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) dengan topik ‘Kerawanan Sosial di Sulut pada Pilkada 2020’ via daring, Minggu malam (18/10/2020).

Di kesempatan itu, Meidy Tinangon mengatakan pada hari pencoblosan nanti, warga Sulut akan mendatangi 5.809 TPS yang tersebar di 1.839 desa dan kelurahan di Sulut.

Satu TPS kata Meidy, maksimal akan melayani 500 pemilih.

Ia pun membeberkan 12 hal penting yang mesti diperhatikan sebelum memasuki area pencoblosan. Terlebih dahulu kata Meidy, tentu saja adalah mencuci tangan.

Kemudian berlanjut dengan pengecekan suhu tubuh. “Jika diatas 37,3 derajat, tidak bisa masuk ke areat TPS. Nanti kami siapkan bilik khusus,” terangnya.

Selain pengaturan kedatangan dan kewajiban menggunakan masker, KPPS juga akan menggunakan sarung tangan, pelindung wajah serta fungsi desinfektan dimaksimalkan di TPS.

“Nanti akan menggunakan tinta tetes, tidak bersalaman dan dilarang berdekatan,” tegasnya.

KPU kata Tinangon, berupaya memastikan petugas KPPS sehat dari paparan Covid-19.

Ia menambahkan, sejauh ini KPU RI sudah melakukan dua kali simulasi memilih.

“Memang masih ada kekurangan, tapi akan ada simulasi lagi guna mempermantap



praktik pemungutan suara yang benar,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Terapkan 9 Langkah Wajib Saat di TPS di Hari Pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara pada pelaksanaan pencoblosan kertas suara di Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota, 9 Desember 2020 akan memberlakukan 9 langkah saat wajib pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Salman Sahelangi Komisioner KPU Sulut, pada hari pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 ini akan terlihat berbeda, dimana akan ada penerapan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid 19.

“Saat mendatangi TPS, wajib pilih, akan mengikuti semua protokol kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh petugas KPPS,” kata Saelangi.

Juga dijelaskan Sahelangi, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara, nantinya akan menyiapkan semua Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Hand Sanitizer dan sarung tangan plastik di semua TPS, agar wajib pilih dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan.

“Diharapkan seluruh wajib pilih dapat mendatangi TPS untuk menyalurkan hak suaranya guna menentukan pemimpin yang berkualitas dan diharapkan dapat memperhatikan anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid19,” ungkap Saelangi.

Untuk diketahui 9 langkah yang wajib diikuti saat berada di TPS yakni, kedatangan Wajib Pilih akan diatur oleh petugas KPPS yang bebas virus covid 19, wajib melakukan

pengukuran suhu tubuh 37,3, jumlah wajib pilih dibatasi paling banyak 500 orang, wajib menggunakan masker, wajib menggunakan sarung tangan yang sudah disiapkan di lokasi TPS, setelah selesai mencoblos kertas suara, tidak lagi mencelupkan jari kedalam botol tinta seperti biasa, tapi nantinya tinta akan tetes ke jari oleh petugas. (*)

Penulis: *Josh Tinungki*

Sumber: *sulutnews.com*

Simulasi Pemungutan Suara di Minahasa Diapresiasi

MINAHASA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 di Benteng Moraya, Kabupaten Minahasa, Senin (2/11/2020).

Penyelenggaraan simulasi tersebut dihadiri langsung oleh Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni, Komisioner KPU RI Ilham Saputra serta anggota DKPP RI Alfitra Salamm.

Agus Fatoni mengapresiasi simulasi dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Ini sebagai bentuk komitmen kita agar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan lancar, aman, damai dan juga sehat,” ujar Fatoni.

Dirinya juga mengingatkan Pilkada Serentak 2020 harus berlangsung sebagai sebuah komitmen pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Begitu halnya dengan kegiatan simulasi ini yang menurut Fatoni sebagai langkah tepat dalam menyukseskan pilkada nasional di tengah pandemi Covid-19. “Dengan demikian bisa diketahui kekurangan, kendala kemudian suasana yang perlu diperbaiki,” katanya Komisioner KPU RI Ilham Saputra menjelaskan, kegiatan hari ini merupakan simulasi bagi



masyarakat yang akan menggunakan hak pilih 9 Desember 2020. “Jadi ini bagian dari sosialisasi,” ujarnya.

Ia meminta keterlibatan dari semua pihak dalam mendukung penuh kegiatan yang dilangsungkan oleh KPU agar pilkada di Sulut berjalan baik.

Anggota DKPP RI Alfitra Salamm mengharapkan KPU memfasilitasi semua hak pilih termasuk kaum difabel.

Begitu juga masyarakat yang terdampak Covid-19 agar terakomodir sehingga hak pilih mereka dapat disalurkan.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Kajati Sulut Hadiri Simulasi Pemungutan Suara Oleh KPU Sulut

MINAHASA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) Andi Muh. Iqbal Arief, SH, MH, Senin (2/11) menghadiri simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS, di Benteng Moraya Tondano, Kabupaten Minahasa.

Simulasi ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) sebagai pengendalian Covid-19 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020,

Kajati Sulut Andi Muh. Iqbal Arief, mengatakan bahwa dalam Pilkada serentak 9 Desember untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Kepada seluruh Petugas PPS di TPS nantinya dapat memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada hari H nantinya sehingga tidak terjadi cluster baru penyebaran Covid 19,” ucap Kajati.

Lebih lanjut, ia pun berharap agar setiap stakeholder untuk mensosialisasikan pemungutan suara dalam masa pandemic Covid-19. “Perlu dilakukan sosialisasi

kepada pemilih tentang mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dengan penerapan protokol kesehatan, bisa dalam bentuk brosur atau video singkat yang dapat di upload ke berbagai media,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Dr. Ardiles Mewoh, SIP, M.Si mengungkapkan bahwa simulasi akan dilakukan di 15 kabupaten/kota.

“Harapannya simulasi ini akan memberikan informasi buat masyarakat luas terkait mekanisme ketika datang ke TPS, sebab pemilihan kali ini dilaksanakan di masa pandemic. Sehingga ada ketentuan yang harus dipatuhi,” ucap Mewoh.

Ia pun menambahkan bahwa seluruh petugas dan peralatan sudah berdasarkan protap Covid-19.

“Mulai petugas dan peralatan lainnya itu sudah sesuai prosedur Covid-19, oleh karena itu pemilih tak perlu khawatir,” tambah Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Turut hadir Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota DKPP RI Alfitra Salamm, Pjs. Gubernur Sulut Dr. Drs. Agus Fatoni, Kapolda Sulut Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, Ketua Bawaslu Sulut Dr. Herwyn J. Malonda, Komisioner KPU Sulut, Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring, dan Ketua KPU Kabupaten Minahasa Lord A.Ch.E. Malonda.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sulut Terus Beri Penyuluhan Produk Hukum

MINAHASA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut terus mensosialisasikan produk-produk hukum terkait Pilkada 2020 kepada stakeholder jelang pemungutan suara 9 Desember.

Sebab, Pilkada 2020 ini harus berintegritas dan sesuai regulasi. Senin (9/11), dilakukan penyuluhan di Tondano Kabupaten



Minahasa dengan narasumber Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, Komisioner Divisi Perencanaan dan Data Lanny Ointu dan KPU Minahasa.

Pada kesempatan itu Tinangon mengurai tentang penanganan pelanggaran di tahapan kampanye. "Pelanggaran administrasi terkait protokol covid-19 langsung dieksekusi Bawaslu. Sedangkan pelanggaran administrasi lainnya direkomendasi Bawaslu kepada KPU," kata Tinangon.

Khusus di Minahasa, dirinya berharap stakeholder turut mengawasi integritas penyelenggara pemilu. "Laporkan ke KPU jika ada PPK, PPS, KPPS yang terindikasi tidak netral," tegasnya.

Komisioner KPU Minahasa, Rendy Suawa menjelaskan terkait jenis produk hukum di lingkungan KPU dan konstruksi penegakan hukum pemilihan. Kegiatan tersebut dipandu oleh Ketua KPU Minahasa Lord Malonda dan dihadiri OKP dan Ormas adat, serta organisasi pers.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Benteng Moraya Tondano

TONDANO - KPU Sulut, Senin, 2 November 2020, menggelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS untuk Pilkada Sulut 2020, Senin di Benteng Moraya, Tondano Kabupaten Minahasa. TPS dibuka pukul 07.00.

Ketua KPU Sulut Doktor Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyatakan ini simulasi pertama di Sulut.

Dan KPU senang dan bangga karena bisa dihadiri KPU RI, DKPP RI serta Plt Gubernur Sulut untuk saksikan simulasi. Ini menunjukkan dukungan luar biasa untuk kesuksesan pilkada di Sulut.

Simulasi akan dilakukan di 15 kab/kota dengan harapan semakin dekat dengan masyarakat luas.

Pemilihan ini dilaksanakan di masa pandemi. Sehingga ada ketentuan yang harus dipatuhi.

Dikatakan, agenda ini akan dilakukan berulang supaya banyak orang yang tahu bagaimana mekanisme ketika datang ke TPS. Pemilih tak perlu khawatir. Sebab petugas dan peralatan sudah sesuai protap.

la menambahkan, simulasi ini ditayangkan lewat live streaming agar masyarakat luas bisa tahu kondisi di TPS 9 Desember nanti.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Doktor Agus Fahtoni memberi apresiasi kegiatan simulasi ini sebagai bentuk komitmen supaya pilkada lancar, aman damai dan sehat. Artinya terhindar dari covid 19. Pilkada tahun ini adalah pertama dalam keadaan pandemi covid. Ini tantangan bersama.

Di semua negara juga terdampak tanpa terkecuali. Sebab covid menyebar. Namun pilkada tetap berlangsung sebagai komitmen pemerintah dan stakholder. Ini tugas bersama.

Simulasi kata dia, sangat penting dan strategis. Supaya bisa diketahui kekurangan kendala, suasana yang perlu diperbaiki. Kalau semua daerah laksanakan simulasi, ini akan perkaya kita dalam rangka selesaikan persoalan yang terjadi di saat pencoblosan. "Mungkin ada persoalan ditemukan. Tapi kita tahu bagaimana mengatasinya," katanya.

Dirinya mengajak masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke TPS 9 Desember gunakan hak pilih dengan tetap memperhatikan protap. Masa depan daerah memilih pemimpin ada di tangan masyarakat.

KPU RI, Ilham Saputra dalam sambutannya menyatakan simulasi ini sangat penting agar memberikan edukasi sekaligus pemahaman



masyarakat terkat dengan protap covid di TPS saat pemungutan dan perhitungan suara.

Simulasi ini salah satunya selain membiasakan diri dengan protap covid, juga sekaligus sosialisasi ke masyarakat agar nantinya masyarakat bisa aman datang ke TPS dengan protap ini. Karena dari awal TPS dibuka, saat masuk warga cuci tangan, diberikan sarung tangan, kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, seluruh petugas KPPS gunakan APD yang sangat baik, kemudian di pintu keluar sudah ada tempat cuci tangan. Prosedur ini nanti akan diterapkan pada masa hari H pemungutan dan perhitungan suara 9 Desember.

Kegiatan ini dihadiri oleh KPU RI Ilham Saputra DKPP, Alfitra Salam, Plt Gubernur Sulut Agus Fatoni Kapolda Sulut, Kejati Sulut, Komisioner KPU Sulut (lengkap), Ketua Bawaslu Sulut, Bupati Minahasa, Wakil Bupati Minahasa, Komisioner KPU Minahasa.

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

KPU Sulut Gelar Penyuluhan di Minahasa Terkait Pilgub Berintegritas dan Sesuai Regulasi

MINAHASA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dan KPU Minahasa gelar penyuluhan produk hukum kepada stakeholder tentang, Pemilihan Serentak Tahun 2020 harus berintegritas dan sesuai regulasi, Senin (09/11/20). Kegiatan dilakukan 30 hari jelang pemungutan suara 9 Desember 2020, di Tondano.

Hadir dalam kegiatan ini narasumber Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, Kepala Divisi Perencanaan dan Data, Lanny Ointu dan Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Minahasa, Rendy Suawa.

Kepala Devisi Bidang Perencanaan dan Data, Lanny Ointu menjelaskan tentang

Regulasi Data Pemilih dan Hak Memilih. Dalam paparannya secara daring, dirinya pun menyebut 3 jenis data pemilih di TPS 9 Desember nanti yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPP) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“DPT sudah kita tetapkan. Sedangkan pemilih pindahan adalah mereka yang terdaftar dalam DPT tapi karena alasan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS dimana pemilih terdaftar,” terang Lanny yang juga mantan PPLN tersebut.

Lanjutnya, untuk Pemilih tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat di daftar sebagai pemilih. “Mereka dapat gunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP sesuai alamat TPS di desa atau kelurahan,” untkapnya

Sementara Kadiv Hukum KPU Sulut, Meidy Tinangon mengungkapkan tentang penanganan pelanggaran di tahapan kampanye. “Pelanggaran administrasi terkait protokol Covid-19 langsung di eksekusi Bawaslu. Sedangkan pelanggaran administrasi lainnya di rekomendasi Bawaslu kepada KPU,” untkap Tinangon.

Tinangon pun berharap stakeholder di Minahasa turut mengawasi integritas penyelenggara Pemilu. “Laporkan ke KPU minahasa jika ada PPK, PPS, KPPS yang terindikasi tidak netral,” tutur Tinangon.

Selain itu Ketua Divisi Hukum KPU Minahasa Rendy Suawa dalam kesempatan itupun menjelaskan terkait jenis produk hukum di lingkungan KPU dan konstruksi penegakan hukum pemilihan.

Dalam Sosialisasi Produk Hukum ini berlangsung juga diskusi yang di pandu Ketua KPU Minahasa Lord CH, Malonda dengan peserta dari OKP, Ormas, Mappilu PWI Minahasa juga Pers Minahasa. (*)

Penulis: *Ika*

Sumber: *portalsulutnews.com*



Bersama KPU Sulut, Kejati Pantau Langsung Proses Cetak Surat Suara di Jatim

MANADO—Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr. Ardiles M.R. Mewoh dan Pjs Gubernur Sulut,

DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Sabtu (07/11/2020) memantau pelaksanaan kegiatan Kick Off Pencetakan Surat Suara Pemilihan tahun 2020 oleh PT. Temprina Media Grafika, Jawa Timur. Rombongan diterima langsung oleh Agus Suryoatmojo selaku Branch Manager PT Temprina Media Grafika.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kepolisian Daerah Sulut Irjen. Pol. R. Z. Panca Putra Simanjuntak, Komandan Korem 131/ Santiago Brigjen TNI Prince M. Putong, Tim KPU Provinsi Sulut, dan Tim Bawaslu Provinsi Sulut.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulut mengingatkan kepada PT. Temprina Media Grafika agar pencetakan surat suara dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pula memperhatikan jadwal pengiriman logistik surat suara, agar bisa sampai di Manado tepat waktu sehingga pelaksanaan Pemilu pada tanggal 09 Desember 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Diketahui, dalam memantau proses pencetakan surat suara tersebut, Kejati Sulut dan rombongan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Penulis: *Jane Tungkagi*
Sumber: *cintasulut.com*

Kapolda Sulut Tinjau Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Kota Bitung

BITUNG—Kapolda Sulut Irjen Pol, RZ Panca Putra meninjau langsung simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS

dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020, yang digelar di lapangan parkir Stadion Dua Sudara, Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, Kamis (12/11/2020).

Tiba di Kota Bitung dengan menumpang helikopter jenis Bell 429 Global Ranger bernomor registrasi P-3203, Kapolda Sulut bersama Sekprov Sulut, Edwin Silangen, Kajati Sulut, Andi Muh Iqbal, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda dan Forkopimda Kota Bitung langsung meninjau simulasi TPS.

Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra menyampaikan, aparat keamanan sudah siap memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya selama pelaksanaan dalam pemungutan suara.

“Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi ketentuan pelaksanaan dari Pilkada ini, dengan memperhatikan protokol kesehatan, itu menjadi landasan kita untuk menyelenggarakan Pilkada dan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020,” ujar Irjen Pol RZ Panca Putra. (*)

Penulis: *Ryan Tinggogoy*
Sumber: *Sulut Times*

KPU Sulut Simulasi Pemungutan dan Penghitungan suara TPS di KK

KOTAMOBAGU - Kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dilaksanakan di Lapangan Aruman Motoboi Kecil, Kota Kotamobagu 12 November 2020. Kegiatan simulasi dimulai Pukul 07.00 Wita.

Turut hadir, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut Salman



Saelangi, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Kapolda Sulut Panca Putra Simanjuntak, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Kajati Sulut Andi Iqbal Arief, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Wakil Wali Kotamobagu Nayodo Koerniawan.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan kita melaksanakan simulasi di 15 kabupaten/kota karena pemilihan kali ini kita semua belum punya pengalaman, kita baru kali ini mengalami apalagi masyarakat tentunya.

“Jadi kita berkeinginan masyarakat itu betul-betul tahu karena kondisi hari pemungutan suara 9 Desember 2020 masyarakat sehingga tidak khawatir datang ke TPS, memperhatikan protokol covid yang sangat ketat yang kita lakukan mulai simulasi-simulasi ini,” katanya.

Kapolda Sulut Panca Putra Simanjuntak mengatakan, selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terkait dengan situasi pandemi covid KPU berdasarkan peraturan-peraturannya sudah membuat peraturan-peraturan yang menisyratkan ditaatinya protokol kesehatan selama tahapan pelaksanaan pilkada, mulai dari pendaftaran sampai nanti pemungutan suara untuk ketaatan kita menjalankan protokol kesehatan itu juga menjadi kewajiban kita semua masyarakat.

Secara teknis bagaimana menjaga protokol kesehatan itu melaksanakan membentuk gugus tugas yang bertugas untuk mengawasi protokol kesehatan selama tahapan itu. Jadi kalau ada yang tidak mentaati gugus tugaslah yang turun untuk menindaklanjuti dan memberi peringatan siapa saja yang melakukan dari pelaksanaan pilkada yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

Bersama Forkopimda, Kajati Sulut Ikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

SULUT -- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Andi Muh. Iqbal Arief, SH.MH bersama dengan Sekertaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen, SE, MA, mewakili Pjs. Gubernur Sulawesi Utara, melakukan kunjungan kerja bersama Forkopimda Sulut di Kota Kotamobagu dan Kota Bitung.

Kunjungan kerja ini diikuti juga Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Irjen Pol. R. Z. Panca Putra Simanjuntak, M.S, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ardiles M.R. Mewoh, SIP, M.Si, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Herwyn J. Malonda, SH, MH.

Dalam kunjungan kerja tersebut sehubungan dengan kegiatan, Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kunjungan Kerja pertama bertempat di Kotamobagu, dijemput langsung oleh Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara beserta jajaran Forkopimda dilanjutkan ke Stadion Dua Saudara, Kota Bitung. Turut hadir dalam kegiatan ini, Pjs. Walikota Bitung Drs. Edison Humiang M.Si, beserta jajaran Forkopimda Kota Bitung, Kamis (12/11/2020). (*)

Penulis: *RYAN T*

Sumber: *suluttimes.com*

KPU Sulut Gelar Workshop, Ardiles Mewoh: APD Menentukan Suksesnya Jalannya Pilkada

MANADO - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh menegaskan Alat Pelindung Diri (APD) menentukan suksesnya jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut Tahun 2020.



Ardiles menuturkan, disaat pandemi COVID-19 ada logistik tambahan yang perlu diperhatikan dari sisi kegunaan dan kemanfaatan setara dengan logistik seperti surat dan kotak suara.

“APD itu ada sekira 11 item, seperti masker, sarung tangan, hand sanitaser, baju hasmat dan lainnya. Itu lebih banyak dari alat kelengkapan TPS,” ucap Ardiles saat membuka kegiatan workshop dengan stakeholder dalam rangka penyusunan rancangan keputusan panduan pengelolaan dan distribusi logistik Pilgub Sulut, Kamis (19/11) malam, Mercure Beach Resort.

Ardiles mengatakan, meski TPS sudah memenuhi syarat, tapi petugas KPPS tidak dilengkapi dengan APD maka, pihak Bawaslu akan merekomendasikan untuk menunda proses pencoblosan di TPS tersebut

“Walaupun di TPS nanti sudah memenuhi syarat, tapi kalau tidak ada APD, pasti rekomendasi Bawaslu itu ditunda karena protokol kesehatan. Jadi nilai APD ini setara manfaatnya dengan logistik,” kata Ardiles.

Sama seperti apa yang dikatakan Ardiles, Komisioner Salman Saelangi mengatakan, APD itu sangat penting dalam pencoblosan suara nanti di TPS.

“Selain sarung tangan untuk tiap satu pemilih, di TPS juga disiapkan satu petugas yang mengenakan baju hasmat apabila ada pemilih yang suhu tubuhnya diatas. Selain itu juga, disiapkan alat bantu untuk kaum difable,” ujar Salman Saelangi.

Penulis: *RAKA*

Sumber: *Elnusanews.com*

Prince Meyer Putong: Kita Semua Berkesempatan Jadi Pahlawan Demokrasi

MANADO — Danrem 131/Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong mengajak warga Sulawesi Utara (Sulut) ikut serta menyukseskan Pilkada Serentak mulai dari

tahapan kampanye saat ini hingga proses pemungutan suara nanti.

“Kita semua berkesempatan menjadi pahlawan demokrasi jika hajatan ini berhasil dan berintegritas,” kata Prince Meyer Putong pada Coffee Morning KPU Sulut di aula Makorem 131/Santiago, Jumat (20/11/2020).

Menurut Danrem, mulai dari penyelenggara, aparat dan masyarakat masing-masing memiliki peran menciptakan pilkada aman dan sehat.

Olehnya, kata dia, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen harus dijalankan dengan tanggungjawab dan saling mendukung.

“TNI pun berupaya mengamankan pesta demokrasi di semua lini,” tegasnya.

Karena pilkada tahun ini digelar di tangan pandemi Covid-19, Danrem berpesan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Didukung Korem 131/Santiago, Coffee Morning KPU Sulut Bahas Pilkada Sehat

MANADO — Pemilihan Sehat dan Damai menjadi topik khusus yang dibahas santai pada Coffee Morning KPU Sulut di aula Makorem 131/Santiago, Jumat (20/11/2020).

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi saat membuka diskusi mengatakan protokol kesehatan wajib menjadi pondasi semua elemen yang terlibat di Pilkada Serentak.

“Mulai dari penyelenggara, peserta hingga masyarakat wajib mengedepankan protokol Covid-19 demi suksesnya hajatan demokrasi ini,” kata Salman Saelangi.

Frasa Pilkada Damai, juga turut dipaparkan Salman.

Ia mengajak peserta hadir menjadi pioner menyejukan suasana jelang pemungutan suara.



“Berikan pemahaman kepada lingkungan sekitar agar tidak mudah percaya dengan berita hoax. Ini adalah keterlibatan kita turut serta menciptakan pemilihan berintegritas,” tandasnya.

Coffee Morning turut dihadiri Danrem 131/ Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda, para dokter, akademisi dan media massa.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Coffee Morning dengan Korem 131/Santiago

MANADO—Didukung Korem 131/ Santiago Manado, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Coffee Morning Pemilihan Sehat dan Damai di Aula Makorem 131/ Santiago Manado, Jumat (20/11/2020).

Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menghadiri Coffee Morning Pemilihan Sehat dan Damai dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Saelangi yang membuka diskusi Coffee Morning, menyampaikan bahwa diskusi ini membahas tentang Pilkada sehat dan damai.

“Yang pertama sehat dulu untuk Pilkada baru selanjutnya damai. Dimana kalo bicara damai tidak akan dapat kalo kita semuanya belum sehat, atau kalo kita sakit, maka akan susah bicara damai. Maka kemudian di kedepankan sehatnya dulu,” kata Saelangi.

Saelangi mengatakan protokol kesehatan wajib menjadi pondasi semua elemen yang terlibat dari Pilkada Serentak. “Mulai dari penyelenggara, peserta hingga masyarakat wajib mengedepankan protokol Covid-19 demi suksesnya hajatan demokrasi ini,” kata Salman Saelangi.

Turut hadir Danrem 131/Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda, para dokter, Akademisi, pengamat politik dan media massa.(*)

Penulis: *Olvi Kapojos*
Sumber: *manadoaktual.com*

KPU Sulut Jamin Semua Tahapan Pilgub dengan Prokes Ketat

MANADO- KPU Sulut terus meyakinkan publik di Sulawesi Utara (Sulut) bahwa pelaksanaan Pemilihan Serentak di Sulawesi Utara (Sulut) berjalan sesuai protokol kesehatan (Prokes) ketat.

Demikian ditegaskan Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi di sela-sela coffee morning bersama jajaran Korem 131/ Santiago, Jumat (20/11/2020).

Menurut Salman Saelangi, penyelenggara pemilu sudah meramu sedetail mungkin agar semua tahapan tidak mengesampingkan prokes.

Mulai dari cokolit, perekrutan KPPS, sosialisasi hingga pemungutan dan rekapitulasi suara nanti. “Jadi skenario sudah sangat aman dan itu wajib di semua lini. Yang pasti, keselamatan warga menjadi prioritas KPU dan jajarannya,” terang Salman.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Besok, 200 Pemilih di TPS 001 Kelurahan Wawali Siap Memilih Gubernur

MITRA- Sejumlah 200 dari 300 pemilih di TPS 001 Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratahan, Minahasa Tenggara siap mencoblos Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pilihannya besok, Jumat (20/11/2020) dalam Simulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang digelar KPU Mitra.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara, Wolter Dotulong, SH di sela-sela persiapan TPS menyatakan kesiapan KPU Mitra untuk menggelar simulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.



” Persiapan TPS yang memenuhi standar protokol kesehatan sudah 90 persen rampung. Kami juga sudah mengundang 200 dari 300 pemilih di TPS 001 ini untuk mengikuti simulasi besok,” kata Dotulong kepada sulutdaily.com, Kamis (19/11/2020) malam.

Dikatakan Dotulong, 200 pemilih tersebut sudah diatur waktu kedatangannya.

” Sehingga diharapkan tidak terjadi kerumunan di TPS,” katanya.

Terlihat di lokasi TPS 001 peralatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sudah siap. Mulai dari cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, alat pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan handsanitizer, sarung tangan plastik, tinta tetes/ oles tanda setelah menggunakan hak pilih hingga bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat.

Rencananya acara ini akan disaksikan langsung oleh Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh, Bupati Mitra James Sumendap, Forkopimda, Bawaslu dan tokoh masyarakat Mitra.

Penulis: *Jeane Rondonuwu*

Sumber: *Sulutdaily.com*

Jalin Silaturahmi, Korem 131/Santiago Coffee Morning Bersama KPU dan Forkopimda

MANADO — Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Putong SH menggelar coffee morning bersama jajaran Forkopimda di Makorem 131/Santiago Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (20/11/2020).

Hal tersebut diselenggarakan untuk menjalin komunikasi kerja dan membangun kebersamaan antar unsur forkopimda Sulut agar tetap solid dan selalu siap melayani masyarakat.

Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince

Meyer Putong mengatakan, melalui kegiatan seperti ini, dirinya mengajak semua yang hadir untuk terus menjalin koordinasi yang baik.

“Dengan harapan, semua program pembangunan di provinsi sulut tetap berjalan lancar dan terus saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Seperti kegiatan kita saat ini yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Danrem.

Lanjutnya menjelaskan, digelarnya pertemuan tersebut yaitu dalam rangka menyamakan persepsi dan menyampaikan program-program yang harus dilaksanakan masing-masing instansi.

Tujuannya, supaya semua program bisa dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

“Mari kita sama-sama cegah /berantas wabah Covid-19 sampai ke akar-akarnya sebagaimana instruksi Presiden. Serta mari kita ciptakan sinergi dan kerjasama yang erat antar instansi, sehingga upaya menjaga situasi kamtibmas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan baik dan hasilnya maksimal,” kata Brigjen TNI Prince Putong.

Coffee morning tersebut juga merupakan ajang silaturahmi, saling mengenal, serta terus menjalin koordinasi agar semua program-program di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. “Itu tujuannya dan tentu hasilnya akan maksimal kalau semua melakukan koordinasi dengan baik,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Komisioner KPU Sulut Salman Sailangi, Perwakilan pimpinan Rumah Sakit Prov Sulut, Dekan Fakultas Umum Universitas Sam Ratulangi Dr Flora Kalalo, Plt Sekjen BARMAS sekaligus Direktur Tumbelaka Academic Center (TAC) Taufik Tumbelaka, para Kasirem 131/Santiago, akademisi dan



para awak media.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut dan Korem 131/Santiago Ciptakan Pilkada Damai

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara bersama Korem 131/Santiago menggelar Coffee Morning bertema Pembahasan Pemilihan Sehat dan Damai, di aula Makorem 131/ Santiago, Jumat (20/11/2020).

Komandan Korem 131/Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong yang juga sebagai Dansatgas Covid19 sebagai tuan rumah menyambut baik kegiatan coffee morning pagi tadi.

Di samping itu, Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi membuka kegiatan dengan diskusi santai terkait dengan tema Pemilihan Sehat dan Damai.

Salman mengatakan dalam Pilkada tahun ini yang berjalan dalam kondisi pandemi Covid-19, semua elemen yang terkait, baik itu dari penyelenggara, peserta, bahkan pemilih harus patuh pada protokol kesehatan Covid19. “Mulai dari penyelenggara, peserta, pemilih serta semua masyarakat harus patuh pada protokol kesehatan pada saat pemilihan,” kata Salman. (*)

Penulis: *Jellina Najoa*

Sumber: *sulutreview.com*

KPU Sulut Perkenalkan Sirekap, Uji Coba di 15 Daerah

MANADO — Pemilihan Serentak 2020 berlangsung pada masa pandemi Covid-19.

Kondisi ini membuat inovasi teknologi dalam proses rekapitulasi menjadi penting terlebih dalam menjamin masyarakat mendapatkan data terkini saat pencoblosan 9 Desember 2020.

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dirancang dan diperkenalkan KPU

untuk meramping hasil pemungutan suara dan menjadi alat bantu penghitungan suara pada Pilkada 2020.

KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama lima belas KPU kabupaten/kota telah menyelenggarakan uji coba nasional rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dimulai Selasa hingga Kamis (24-26/11/2020). Agenda tersebut mendapat apresiasi dari Pemprov Sulut.

Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni memberikan dukungan penuh kepada KPU Sulut beserta jajaran dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah korona. “Kesuksesan pesta demokrasi merupakan kebanggaan seluruh rakyat Sulawesi Utara,” kata Agus Fatoni yang hadir langsung di Kantor KPU Kota Kotamobagu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut, Yessy Momongan, menerangkan uji coba dimaksudkan agar jajaran penyelenggara di semua tingkatan memahami penggunaan Sirekap. Sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara diminimalisasi.

Secara teknis, lanjut Yessy Momongan, uji coba digelar bagi daerah yang melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota Wakil Wali Kota. “Masing-masing kabupaten/kota melakukan pada dua belas TPS dengan simulasi pengisian formulir model C Hasil-KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual. Kemudian dilanjutkan dengan proses foto dokumen sampai pengiriman hasil foto formulir model C,” terang Momongan.

Yessy menambahkan, hasil-KWK Simulasi ke server Sirekap Pemilihan 2020 menggunakan aplikasi Sirekap Mobile (versi Beta). Setelah proses itu, berlanjut dengan rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK.

Sementara level kabupaten/kota dan provinsi menggunakan aplikasi Sirekap Web. “Setiap proses ini dapat dipantau



langsung dalam perkembangan input data oleh KPU RI,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Sirekap: Yessy Momongan, Penyelenggara Pahami Penggunaan

SULUT - Perkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) adalah alat bantu cerdas merampungkan hasil pemungutan penghitungan suara pada Pilkada Sulawesi Utara pada 9 Desember 2020 nanti dan bekerjasama dengan 15 KPU Kabupaten/Kota bahkan telah melakukan uji coba nasional rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dimulai sejak, Selasa (24/11/2020) hingga hari ini, Kamis (26/11/2020).

Pemerintah Provinsi Sulut mengapresiasi upaya KPU Sulut sepanjang agenda di kabupaten dan kota.

Pjs Gubernur Sulut, Dr. Agus Fatoni mendukung penuh KPU Sulut dan jajaran saat memperkenalkan Sirekap, guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak Provinsi Sulawesi Utara, 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. “Kesuksesan pesta demokrasi merupakan kebanggaan seluruh rakyat Sulawesi Utara,” kata Agus Fatoni yang ikut hadir di Kantor KPU Kota Kotamobagu.

“Kami terus berupaya secara maksimal memberikan penjelasan kepada penyelenggara di semua tingkatan kabupaten maupun kota untuk memahami tentang uji coba penggunaan ‘Sirekap’,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut, Yessy Momongan saat memaparkan materinya pada workshop KPU bersama stakeholder dan pers di Mercure Hotel.

Hal tersebut mengantisipasi kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara. Lanjut Momongan, uji coba di gelar bagi daerah yang melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Masing-masing kabupaten/kota di 12 TPS dengan simulasi pengisian formulir model C Hasil-KWK, Simulasi oleh petugas KPPS secara manual. “Kemudian dilanjutkan dengan proses foto dokumen sampai pengiriman hasil foto formulir model C,” jelas Momongan.

Tambah Momongan, hasil KWK Simulasi ke server Sirekap Pemilihan 2020 menggunakan aplikasi Sirekap Mobile (versi Beta). Setelah proses itu, berlanjut dengan rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK.

Sementara level kabupaten/kota dan provinsi menggunakan aplikasi Sirekap Web. “Seluruh proses di setiap penyelenggara, ini dapat dipantau langsung menurut laporan perkembangan input data oleh KPU RI,” pungkas Momongan. (*)

Penulis: *Karel*

Sumber: *sulutlink.com*

KPU Sulut Gelar Bimtek, Siap Bentuk JDIH di 15 Kabupaten/Kota

MANADO – Komisi Pemelihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bekerja sama dengan Biro Hukum Republik Indonesia (RI) menggeler kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) bersama Komisioner Divisi Hukum dan Kasubag Hukum KPU di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara di Four Point Hotel, Selasa (27/10/2020) .

Kegiatan tersebut dibuka Anggota Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan JDIH KPU RI ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. JDIH KPU telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDIH terbaik.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU sulut, Meidy Tinangon menjelaskan bahwa JDIH merupakan upaya KPU untuk mengimplementasikan prinsip penyelenggara Pemilu yaitu keterbukaan



atau transparansi khususnya informasi terkait produk hukum.

Ikut hadir sebagai nara sumber Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI, Sigit Joyowardono, SH, MH dan tim dokumentasi dan informasi hukum.

Sigit Joyowardono dalam materinya mengatakan bahwa JDIH ini merupakan amanat dari ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menggantikan Perpres Nomor 91 Tahun 2009 dan juga didasarkan pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Sigit menjelaskan bahwa JDIH KPU RI ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. JDIH KPU telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDIH terbaik.

Setelah sebelumnya di tahun 2019 KPU Provinsi Sulut berhasil membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tahun ini JDIH sedianya dibangun juga di tingkat Kabupaten/Kota se

“JDIH KPU RI ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. JDIH KPU telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDIH terbaik,” kata Sigit.

Laman JDIH KPU sulut dapat diakses melalui url: <http://www.jdih.kpu.go.id/sulut>.(*)

Penulis: *Jellina Najoan*
Sumber: *sulutreview.com*

Meidy Tinangon: Pilkada Sehat Bukan Sekadar Memerangi Covid-19

MANADO — Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon menegaskan Pilkada Sehat tidak sekadar memerangi Covid-19.

Menurut Meidy Tinangon, banyak unsur yang harus dipenuhi dalam pengertian mewujudkan pesta demokrasi sehat.

“Seperti menciptakan kompetisi dengan nuansa keadilan, transparan, aman dan bertanggungjawab,” kata Meidy saat membuka diskusi pada Coffee Morning Forum Pemilihan Sehat di aula Sam Ratulangi Kantor Kejati Sulut, Jumat (27/11/2020).

Dikatakan, hal-hal memerangi pandemi Covid-19 sudah dilakukan KPU Sulut jauh hari sebelumnya, setelah mendapat instruksi KPU RI lewat PKPU.

Bahkan kata Tinangon, semua jajaran penyelenggara intens melakukan rapid tes demi menunjang tugas dan tanggung jawab pada tahapan pilkada.

“Kami juga sudah melakukan simulasi di TPS dengan skenario protokol kesehatan ketat. Dan semua berjalan sesuai rencana, ” tandasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sulut, para akademisi, perwakilan dokter dan media massa.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kepulauan Sitaro Menggunakan Protokol Kesehatan Berjalan Lancar

SITARO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS dengan Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada Desember 2020 di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Senin (30/11/20)

Tepatnya pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005, Kelurahan Aksembeka Lindongan II Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Simulasi diikuti 200 warga setempat dimulai tepat jam 7 pagi, diawali dengan penyemprotan disinfektan di seluruh area tempat pemungutan suara, selain itu ada 7 petugas KPPS yang wajib menggunakan



alat pelindung diri. Karena penerapan protokol kesehatan menjadi perhatian utama KPU dalam tahapan pencoblosan surat suara di TPS.

Dalam simulasi ini penerapan protokol kesehatan ketat di tempat pemungutan suara. Warga yang akan mencoblos wajib pakai masker, cuci tangan dan memeriksa suhu tubuh. Dalam tahapan pemungutan suara, pemilih juga diberikan sarung tangan sekali pakai, yang akan digunakan dalam proses pencoblosan.

Selain itu tata cara bagi pemilih dari kalangan disabilitas turut disimulasikan dalam kegiatan, penyelenggara juga menyediakan bilik khusus dan petugas yang dilengkapi dengan alat pelindung diri, untuk mengantisipasi warga pemilih yang suhu tubuhnya diatas normal.

Dalam sambutan Ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro mengungkapkan bahwa simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan gambaran pelaksanaan teknis pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 9 Desember nanti.

“Jadi gambaran tanggal 9 Desember itu sudah bisa terlihat di hari ini nanti setelah simulasi ini selesai kita akan evaluasi kalau ada hal-hal yang masih kurang. Jika ada hal-hal yang masih kurang nanti kita lengkapi,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap dan meminta kalau ada saran atau masukan baik dari pemerintah daerah, dari TNI POLRI, teman-teman insan pers dan semua stakeholder agar memberi masukan saran khusus mengenai protokol-protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam rangka pemungutan dan perhitungan suara.

“Tanggal 9 Desember nanti untuk semua warga yang mempunyai hak pilih jangan lupa datang di TPS karena KPU memastikan sekali lagi bahwa untuk Protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di tanggal 9 Desember kami pastikan

dilakukan secara ketat,” tuturnya.

Sambutan Wakil Bupati Sitaro, Jhon Palandung mengapresiasi Ketua dan komisaris KPU yang boleh menginisiatif pelaksanaan kegiatan simulasi ini.

“Saya harap seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung sukses dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai,” ucap Palandung.

Palandung juga menjelaskan bahwa Pemilu pada saat ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu yang tidak diperhadapkan dengan Covid-19.

“Setiap tahapan-tahapan Pilkada berbeda dengan sebelumnya karena wajib bagi kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi disamping sukses Pilkada, kita juga harus memastikan tidak ada membawa bencana bagi kita semua, tidak mendatangkan persoalan baru yaitu bahwa akan ada banyak Covid-19 di sekitar kita, kita harus berupaya mencegah agar kita bebas dari Covid-19,” jelas Palandung.

Turut hadir Komisioner KPU Sitaro, Wakil Bupati Sitaro, Jhon Palandung, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, dan Forkompinda Kabupaten Sitaro. Berikut 5 nama Komisioner KPU Sitaro yang hadir dalam kegiatan ini Stevanus Kaaro SH, Arther N Tamaka SiP MSi, Yoseph Salombe, Hendrik Kundimang, Vivian Palit. (*)

Penulis: Ika

Sumber : portalsulutnews.com

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Sitaro Berlangsung Aman

SITARO - Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dengan Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Senin (30/11/20).

Tepatnya pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di



TPS 005, Kelurahan Aksembeka lindungan II Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Simulasi diikuti 200 warga setempat dimulai tepat jam 7 pagi, diawali dengan penyemprotan disinfektan di seluruh area tempat pemungutan suara, selain itu seluruh petugas KPPS wajib menggunakan alat pelindung diri. Karena penerapan protokol kesehatan menjadi perhatian utama KPU dalam tahapan pencoblosan surat suara di TPS.

Dalam simulasi ini pun diperagakan penerapan protokol kesehatan ketat di tempat pemungutan suara. Warga yang akan mencoblos wajib bermasker, cuci tangan dan terlebih dahulu melalui pemeriksaan suhu tubuh. Dalam tahapan pemungutan suara, pemilih juga diberikan sarung tangan sekali pakai, yang akan digunakan dalam proses pencoblosan.

Selain itu tata cara bagi pemilih dari kalangan disabilitas turut disimulasikan dalam kegiatan, penyelenggara juga menyediakan bilik khusus dan petugas yang dilengkapi dengan alat pelindung diri, untuk mengantisipasi warga pemilih yang suhu tubuhnya diatas normal.

Wakil Bupati Sitaro Jhon Palandung turut memantau dan mengikuti Simulasi, didampingi ketua KPU Sitaro dan Forkompinda yang ada.

Dalam Sambutan Ketua KPU Sitaro Stevanus Kaaro mengungkapkan bahwa simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan gambaran pelaksanaan teknis pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 9 Desember nanti

Dirinya juga berharap dan meminta kalau ada saran atau masukan baik dari pemerintah daerah dari TNI POLRI, teman-teman insan pers dan semua stakeholder agar memberi masukan saran khusus mengenai protokol-protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran covid 19 dalam rangka pemungutan dan perhitungan suara.

Sambutan Wakil Bupati Sitaro Jhon Palandung mengapresiasi kepada Ketua dan komisaris KPU yang boleh menginisiatif pelaksanaan kegiatan simulasi ini.

Palandung berharap seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung sukses dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai.

Palandung juga menjelaskan bahwa Pemilu pada saat ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu yang tidak diperhadapkan dengan covid 19.

“Setiap tahapan-tahapan Pilkada berbeda dengan sebelumnya karena wajib bagi kita untuk menerapkan protokol kesehatan jadi samping sukses Pilkada, kita juga harus memastikan tidak ada membawa bencana bagi kita semua, tidak mendatangkan persoalan baru yaitu bahwa akan banyak covid-19 di sekitar kita, kita harus berupaya mencegah agar kita bebas dari covid-19,” imbaunya.

Dirinya pun percaya dalam upaya yang kita lakukan bersama akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut seperti halnya dilaksanakan oleh ketua dan komisaris KPU saat ini.

“Tugas kita adalah bagaimana menciptakan keadaan yang baik Pilkada yang berkualitas pesta demokrasi yang berkualitas, Pilkada yang aman dan damai kita juga mampu menciptakan masyarakat yang dewasa dalam berpolitik dewasa berdemokrasi dewasa dalam memahami perbedaan-perbedaan. Jangan menjadikan perbedaan sebagai sumber persoalan apalagi mencari-cari persoalan sumber konflik perpecahan di tengah kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah kita bangun bersama saat ini kita harus berupaya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun,” tandasnya.

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*



Amankan Pilkada di Kepulauan, Agus Fatoni Ingatkan Personel Ditpolairud Patuhi Protokes

MANADO — Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni memimpin apel keberangkatan personel Ditpolairud Polda Sulut dalam rangka pengamanan Pemilihan Serentak di Lapangan Mako Ditpolairud Polda Sulut, Kota Bitung, Selasa (1/12/2020).

Agus Fatoni mengatakan suksesnya Pilkada di Sulut bukan tergantung dari pihak penyelenggara, melainkan keterlibatan dari semua komponen masyarakat Sulut termasuk aparat kepolisian.

“Kita perlu bersama-sama, bersinergi, agar pilkada sesuai dengan harapan,” kata Fatoni.

Ia mengingatkan kepada personel Ditpolairud Polda Sulut tetap memperhatikan protokol kesehatan agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan baik.

Fatoni meminta semua personel menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.

“Dengan semangat tinggi dan penuh ketekunan,” pesannya.

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, aparat keamanan yang diutus telah siap mengamankan pesta demokrasi.

“Rekan-rekan Polairud siap membantu distribusi logistik dan pengamanan pilkada,” beber kapolda.

Personel Ditpolairud yang diberangkatkan akan bertugas di empat Polres di Sulut yakni Kepulauan Talaud 19 personel, Kepulauan Sangihe 10 personel, Polres Minut ada empat personel dan Kepulauan Sitaro empat personel.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Sulut Paling Minim Mengadu ke DKPP

MANADO— Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Muhammad mengakui Sulawesi Utara (Sulut) paling minim mengadu ke DKPP dan Mahkamah Konsitusi (MK) .

Muhammad berharap hal itu juga terjadi pada Pemilihan Serentak 2020 di Bumi Nyiur Melambai.

“Jangan sampai kepala daerah kita malah ditentukan sembilan hakim MK, bukan dari suara saat di TPS,” tegas Muhammad pada Seminar Nasional dengan Tema Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia, ” Sabtu (5/12/2020).

Menurut Muhammad, sengketa pilkada dapat diminimalisir dengan pemilihan demokratis.

Untuk mewujudkan itu, kata dia, diperlukan regulasi jelas dan tegas serta peserta pilkada yang taat aturan.

“Pemilih juga mesti cerdas dan partisipatif dibarengi birokrasi netral. Selain itu, penyelenggara wajib berkompeten dan berintegritas,” jelasnya.

Muhammad senang bisa ke Manado.

“Sebenarnya masih kurang sehat, tapi demi adik-adik mahasiswa saya bersemangat datang ke mari,” ujarnya.

Seminar kerjasama DKPP dan Unima Tondano ini turut menghadirkan sejumlah pemateri antara lain Rektor Unima Prof Dr Deitje Katuuk, Guru Besar FIS Unima Prof Dr Sjamsi Pasandaran, Dosen dan Peneliti Kepemiluan Unsrat Ferry Daud Liando, anggota KPU Sulut Meidy Tinangon dan dosen kebijakan publik Unima Dr Goingpeace Tumbel.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Ferry Liando, Muhammad dan Meidy Tinangon Bahas Etika Pilkada

MANADO — Instrumen Pilkada berkualitas adalah dilakukan beretika dan berintegritas.



Ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggara namun juga calon, tim sukses maupun pemilih itu sendiri.

Atas dasar tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja sama dengan Unima Tondano melaksanakan seminar nasional dengan topik 'Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia'.

Kegiatannya digelar siang ini Sabtu (5/12/2020) di Hotel Peninsula Manado.

Menurut Ketua Panitia, Dr Mayske Rinny Liando, sejumlah pembicara telah diundang diantaranya Ketua DKPP-RI Prof Dr Muhammad, Rektor Unima Prof Dr Deitje Katuuk, Guru Besar FIS Unima Prof Dr Sjamsi Pasandaran, Dosen dan Peneliti Kepemiluan Unsrat Ferry Daud Liando, anggota KPU Sulut Meidy Tinangon dan dosen kebijakan publik Unima Dr Goingspeace Tumbel.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Jelang Pemilukada, Kabid Humas: Tak Perlu Takut! Ayo Ke TPS

MANADO – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol R.Z. Panca Putra melalui Kepala Bidang (Kabid) Humas, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengimbau masyarakat tidak perlu takut datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020, Rabu (09/12/2020).

“Masyarakat jangan takut datang ke TPS. Karena di setiap TPS sudah pasti diberlakukan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, juga pengamanan ketat oleh pihak kepolisian bersama TNI dan Linmas. Jadi situasi di TPS pasti sehat dan damai,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin (07/12/2020) siang, di Mapolda.

Standar protokol kesehatan yang diterapkan di TPS, lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast, diantaranya tersedianya

tempat mencuci tangan atau hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, pengaturan jarak dan tetap diwajibkan memakai masker. Kemudian seluruh petugas pemilihan mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, face shield, dan sarung tangan.

“Masyarakat jangan terpengaruh isu segelintir oknum yang pesimis terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Standar protokol kesehatan diterapkan secara ketat, salah satunya tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menyalurkan hak pilihnya, dalam Pilkada 2020 ini diteteskan ke jari, tidak dicelup,” jelas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (*)

Penulis: *Ryan T*

Sumber: *suluttimes.com*

Di TPS Mana Kamu Terdaftar? Cari Tahu di Sini

MANADO — Besok, jutaan warga Sulawesi Utara (Sulut) akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota yang menggelar pilkada.

Jelang 9 Desember, mungkin masih ada yang bingung dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat memilih. Tidak perlu khawatir, karena KPU memberikan informasi akses bagi publik untuk mengetahui di TPS mana warga terdaftar.

Sebenarnya, ada tiga cara mengetahui status masyarakat. Pertama, melalui layanan digital yang disiapkan KPU. Masyarakat bisa mengunjungi website lindungihakpilihmu.kpu.go.id via gawai atau laptop.

Di link ini, pengunjung diminta memasukan identitas diri. Prosesnya dirancang lebih muda. Website ini kemudian akan memaparkan lokasi desa/kelurahan TPS anda.



Layanan kedua, dengan menghubungi call center KPU di nomor 081143300700. Nanti ada petugas memberikan keterangan. Meski demikian, KPU menyadari tidak semua wilayah di Sulut terjangkau jaringan internet dan telekomunikasi.

Khusus wilayah pedesaan dengan keterbatasan sarana teknologi, bisa langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Bagi anda yang tidak terdata dalam TPS, cara terakhir adalah memanfaatkan KTP. Syaratnya, tentu saja dengan KTP sesuai domisili dan masih berlaku.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Bagaimana Pasien Covid-19 Memilih, Begini Penjelasan KPU Sulut

MANADO -- Pemilihan Serentak 2020 digelar saat pandemi Covid-19 melanda. Tentu saja, menggelar pesta demokrasi di saat wabah virus bukan persoalan mudah.

KPU pun sudah mendesain berbagai regulasi agar tahapan ini berjalan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Lantas bagaimana dengan pasien positif Covid-19 yang akan menyalurkan hak pilihnya?

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menjelaskan ada ketentuan untuk itu. Penyelenggara kata Ardiles, sudah mengatur bagaimana warga yang terpapar corona bisa ikut mencoblos. “Yang jelas tidak datang ke TPS,” terang Ardiles.

Ardiles menerangkan, pasien covid-19 di rumah sakit atau yang isolasi mandiri di rumah akan didatangi KPPS. “Tentunya petugas dilengkapi dengan APD lengkap. Mereka adalah KPPS dari TPS terdekat,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (23/12) mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut. Itu diumumkan lewat pengumuman KPU Sulut

Nomor 607/PL.02.5.PU/71/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020. “Berdasarkan H hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP), maka pada hari ini (kemarin) KPU Sulut mengumumkan hasil audit dana kampanye,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Hasil audit tersebut diberikan kepada masing-masing paslon lewat LO. “Berdasarkan tanda terima dan berita acara hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 di KPU Sulut maka disampaikan terkait laporan audit tersebut kepada paslon secara terbuka,” pungkasnya.

HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

NO	NAMA PASANGAN CALON	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
1	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU-SEHAN S. LANDJAR, SH.	Rp.6.822.178.500,-	Rp.6.822.178.500,-	Rp.1.400.000,-	TIDAK PATUH
2	VONNIE ANNEKE PANAMBUN-DR. HENDRY CORNELES MANIENGO RUNTUWENE, S.Th.,M.Si.	Rp.1.538.740.000	Rp.50.000.000,-	Rp.1.488.740.000,-	TIDAK PATUH
3	OLLY DONDOKAMBAY, S.E-DRs. STEVEN O.E. KANDOUNI	Rp.4.803.440.000,-	Rp.4.799.594.000,-	Rp.3.846.000,-	TIDAK PATUH

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Sepakat Ciptakan Pilkada Sehat

MANADO—Pesta demokrasi di Sulut yang tinggal 6 hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut meningkatkan koordinasi dengan Polda Sulut, Rabu (2/12) kemarin.

Dalam agenda pertemuan tersebut, KPU dan Polda membahas terkait suksesi pengamananan serta penerapan protokol Covid-19 yang wajib diterapkan. “Ini penting. Maka dari itu kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Polda Sulut, dalam penanganan nanti di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Lanjut dia, dalam pertemuan tersebut Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra juga menekankan terkait protokol Covid-19 yang harus ditegaskan dalam Pilkada tahun ini. “Kami terus meminta dukungan aparat kepolisian. Tadi pak Kapolda titip pesan terkait protokol kesehatan. Di dalam TPS maupun di luar TPS protokol harus diterapkan ketat,” jelas dia.

Sementara, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra menyatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk sinergitas yang dijalin dalam mengamankan dan mensukseskan Pilkada 2020. “Kedatangan saya ke KPU ini bukan pertama kali. Kami harus membangun sinergitas dengan penyelenggara KPU guna memastikan Pilkada yang aman dan terbebas dari pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Lanjut dia, pihaknya bersama KPU Sulut juga bersinergi dalam penegakan prokes pada tahapan Pilkada. “Hal ini sesuai Maklumat Kapolri Nomor MAK/3/IX 2020 tanggal 21 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020,” kunci dia.*

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Apel Akbar Diikuti 15 Ribu Orang

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) memantapkan tahapan pilkada. Jumat (4/12) kemarin, digelar apel akbar. Menerapkan protokol kesehatan, maka peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan di Grand Kawanua

Convention Center itu dibatasi. Sisanya hadir melalui zoom meeting. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, apel akbar ini dirangkai dengan doa bersama. Dihadiri paslon gubernur. “Kemudian ada yang hadir melalui aplikasi zoom meeting. 15 ribu bergabung,” katanya. Mewoh menekankan, pilkada serentak yang sudah di depan mata siap disambut penyelenggara.

“Mulai dari SDM ada PPK, PPS dan KPPS. Penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan dengan total 8 orang setiap kecamatan. Kami membentuk di kelurahan/desa. Dan TPS itu ujung tombak. Di sana ada KPPS,” ujarnya.

Untuk kesiapan teknis, KPU telah lakukan bimtek secara berjenjang terkait pungut hitung di TPS. “Bimtek diutamakan soal penerapan protap Covid-19 di TPS. Sebab ini hal baru bagi jajaran. Bimtek ada satu kali lagi untuk memperkuat pemahaman. Kemudian simulasi sudah dilaksanakan untuk memperkokoh kerja dan pengetahuan jajaran kita,” jelasnya.

Sosialisasi masif, lanjut Mewoh, dilakukan di seluruh kecamatan. “Hari ini secara bersamaan dan serentak dilakukan sosialisasi di kelurahan/desa di sulut. Setiap desa ada 20 orang berkumpul dan kita sosialisasi,” tukasnya.

Soal logistik, kata Mewoh, sampai hari semuanya sudah ada di gudang logistik di kabupaten/kota. “Dipastikan pulau terluar, baik Marore dan Miangas, hari ini mulai digeser logistiknya. Dengan perhatikan kondisi cuaca ekstrem,” ujarnya. KPU juga, tambah Mewoh berterima kasih pada Kapolda Sulut yang sudah menyediakan kapal. “Mudah-mudahan sampai H minus 1 sudah berada di TPS. Terima kasih atas dukungan semua stakeholder. Mohon doa bersama. Masyarakat ayo datang ke TPS, jangan takut. Tetap terapkan protap, sehingga terhindar dari Covid-19, di sisi lain pilkada sukses digelar,” kuncinya.*



Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Apel Akbar KPU ‘Dihadiri’ 15 Ribu Orang

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) memantapkan tahapan pilkada. Jumat (4/12) kemarin, digelar apel akbar. Menerapkan protokol kesehatan, maka peserta dalam kegiatan yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center itu dibatasi. Sisanya hadir melalui zoom meeting. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, apel akbar ini dirangkai dengan doa bersama. Dihadiri paslon gubernur. “Kemudian ada yang hadir melalui aplikasi zoom meeting. 15 ribu bergabung,” katanya.

Dalam laporan KPU Sulut menghadapi pilkada, Mewoh menekankan, pilkada serentak yang sudah di depan mata siap disambut penyelenggara. Mewoh memulai dengan persiapan sumber daya manusia. Yakni penyelenggara adhoc yakni PPK, PPS, dan KPPS.

“Penyelenggara adhoc kita di tingkat kecamatan ada di 171, masing-masing 8 orang tiap kecamatan. Dengan total 1.368. Kita juga membentuk penyelenggaraan di tingkat kelurahan/desa. Di 1.839 desa/kelurahan ada 6 orang penyelenggara sehingga total 11.034,” bebernya.

Kemudian di tingkat TPS ujung tombak penyelenggaraan pemilihan, lanjut Mewoh, di 5.809 TPS masing-masing berjumlah 9 orang. “Jadi totalnya 52.281,” tukas Mewoh.

Selanjutnya mengenai teknis penyelenggaraan, KPU telah lakukan bimtek secara berjenjang terhadap penyelenggara adhoc yang berjumlah 64.683 orang terkait pungut hitung di TPS.

“Bimtek diutamakan soal penerapan protap Covid-19 di TPS. Sebab ini hal baru bagi jajaran kita. Bimtek ada satu kali lagi untuk memperkuat pemahaman. Kemudian simulasi sudah dilaksanakan untuk memperkuat kerja dan pengetahuan jajaran kita,” jelasnya.

Sosialisasi masif, lanjut Mewoh, dilakukan di seluruh kecamatan. “Hari ini secara bersamaan dan serentak dilakukan sosialisasi di kelurahan/desa di sulut. Setiap desa ada 20 orang berkumpul dan kita sosialisasi,” tukasnya.

Soal logistik, kata Mewoh, sampai kemarin seluruh kebutuhan logistik untuk pilgub dan pilkada serentak semuanya sudah ada di gudang logistik di kabupaten/kota. “Mulai hari ini (kemarin), logistik terutama di wilayah terluar, yaitu Marore dan Miangas, mulai digeser logistiknya. Dengan perhatikan kondisi cuaca ekstrem yang masih terjadi,” ujarnya.

KPU juga, tambah Mewoh berterima kasih pada Kapolda Sulut yang sudah menyediakan kapal ke kepulauan Marore. “Mudah-mudahan sampai H minus 1 penyelenggaraan pilkada, sudah berada di TPS. Terima kasih atas dukungan semua stakeholder. Mohon doa bersama, sehingga diharapkan 9 Desember nanti masyarakat datang ke TPS untuk gunakan hak pilih. Tidak takut. Tetap terapkan protap, sehingga terhindar dari Covid-19, di sisi lain pilkada sukses digelar,” kuncinya.(*)

Penulis *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Sesuai Protokol Kesehatan, Simulasi KPU Bolmong Berjalan Lancar

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow sejak pagi tadi sekira pukul 06:00 Wita mulai melakukan simulasi pemungutan suara dan penghitungan surat suara yang dilaksanakan di Lapangan Daagon Desa Motabang Kecamatan Lolak.

Terpantau oleh media ini, pelaksanaan simulasi tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Jarak diatur, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, pengukuran suhu tubuh.

Pengguna hak suara pun sebelum melakukan pencoblosan di bilik suara, oleh

KPPS diberikan sarung tangan sekali pakai yang sudah disiapkan KPU.

Ketua KPU Bolmong, Lilik Mahmudah saat diwawancara di sela kegiatan mengatakan bahwa simulasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat yaitu KPU sebagai penyelenggara telah siap untuk melaksanakan Pilgub 2020 sesuai protokol kesehatan pencegahan covid-19.

“Karena kita tahu bersama bahwa status pandemi covid-19 ini belum dicabut dari Provinsi Sulawesi Utara, ” ucap Mahmudah.

Selanjutnya disampaikan Mahmudah, simulasi sudah sesuai protap pencegahan covid-19.

“Jadi diharapkan masyarakat jangan takut untuk datang ke TPS,” tandas Mahmudah.

Adapun di simulasi tersebut diperlihatkan bagaimana cara pengguna hak suara menyalurkan hak suara.

Penulis: *Jane Tungkagi*
 Sumber: *ciintasulut.com*

Puluhan Ribu Penyelenggara Apel Akbar dan Doa Bersama Pilkada Sulut

MANADO—Jelang hari pemungutan suara 9 Desember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar apel akbar dan doa bersama penyelenggara Pilkada 2020, Jumat (4/12) di salah satu hotel di Manado.

Kegiatan tersebut dihadiri Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, Kapolda Sulut, Kajati, Ketua DPRD Sulut serta ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengatakan, apel akbar dan doa bersama tersebut, ada yang hadir atau mengikuti melalui aplikasi zoom meeting.

“Penyelenggara pemilihan yang ada di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan sampai di TPS, hadir melalui aplikasi zoom. Ada sekitar 15 ribu yang

bergabung dan terus bertambah untuk ikut kegiatan ini,” ujarnya. Pada kesempatan itu juga, Ardiles memaparkan kesiapan KPU Sulut untuk menuju hari H pemungutan dan perhitungan suara. Mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), logistik, sampai pada penerapan protap kesehatan di TPS. “Untuk penyelenggara ad hoc, di 171 kecamatan ada orang setiap kecamatan. Sehingga totalnya 1.368. Kemudian kita membentuk penyelenggara di 1.839 kelurahan/desa yakni 6 orang setiap kelurahan/desa dengan total 11.034. Di TPS yang jadi ujung tombak, ada 5.809 TPS, 9 petugas dengan total 52.281,” paparnya.

Terkait kesiapan teknis, lanjut Ardiles, pihaknya sudah lakukan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang untuk pungut hitung di TPS. “Bimtek diutamakan soal penerapan protap covid di TPS. Sebab ini hal baru bagi jajarannya. Bimtek tentunya untuk memperkuat pemahaman. Selain itu juga telah dilakukan simulasi di 15 kabupaten/kota untuk memperkokoh kerja, pengetahuan jajarannya,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, KPU Sulut telah lakukan sosialisasi secara masif di seluruh kecamatan. “Hari ini secara bersamaan dan serentak dilakukan sosialisasi di kelurahan/desa di Sulut. Setiap desa ada 20 orang berkumpul dan kita sosialisasikan,” ucapnya.

Soal logistik, ditambahkannya, sampai hari ini seluruh kebutuhan semuanya sudah ada di gudang logistik kab/kota. “Dipastikan Pulau terluar, Marore dan Miangas, hari ini mulai digeser logistiknya dengan perhatikan kondisi cuaca ekstrim. Mudah-mudahan sampai minus 1 hari H sudah berada di TPS,” tuturnya sembari berterima kasih atas dukungan semua stakeholder. “Mohon doa bersama supaya 9 Desember masyarakat datang TPS tidak takut dan tetap terapkan protap, sehingga terhindar virus. Dan di sisi lain sukses gelar pilkada,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
 Sumber: *Harian (Radar) Manado*



KPU Siapkan Langkah-langkah Hadapi Gugatan di MK

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi gugatan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Sulut sendiri, dua KPU digugat di MK. Yakni KPU Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim).

Untuk mempersiapkan berbagai langkah, KPU Sulut pekan lalu menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan bersama KPU Kota Manado dan KPU Boltim di salah satu hotel di Minahasa akhir pekan lalu. “Rakor ini dilaksanakan untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan di MK.

Khususnya untuk dua daerah yang ada gugatan di MK yakni KPU Kota Manado dan Bolaang Mongondouw Timur,” ujar Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum, Meidy Tinangon. Dikatakannya, sesuai jadwal umum dari MK, pemeriksaan pendahuluan dilakukan tanggal 26 Januari. “Sementara, registrasinya akan dituntaskan MK pada tanggal 18 Januari,” terang mantan Ketua KPU Minahasa itu.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Siap Hadapi Gugatan 3 Paslon

MANADO—Tiga pasangan calon (paslon) telah daftarkan gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/12). Mereka adalah paslon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Suhendro Boroma-Rusdi Gumalangit dengan Nomor AP3 114/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan Termohon adalah KPU Boltim.

Kemudian Paslon Wali dan Wakil Wali Kota Manado Julyeta PA Runtuwene-Harley Mangindaan, Nomor AP3: 117/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan Termohon KPU Kota Manado. Dan yang terakhir Nomor AP3 122/

PAN.MK/AP3/12/2020 PHP Bupati Boltim paslon Amalia Ramadhan Sehan Landjar-Uyun Kunaefi Pangalima. Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon mengatakan, pihaknya sudah siap menghadapi PHPU Pilkada 2020 di MK.

Menurutnya, KPU telah melakukan serangkaian rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bimtek) dalam persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada (PHPU) di MK.

“Rakor dilaksanakan secara internal dan eksternal. Rakor internal KPU RI dengan KPU Provinsi, Kab/Kota penyelenggara pilkada dan rakor eksternal KPU dengan MK. Untuk bimtek dilaksanakan secara internal dan eksternal. Keduanya dilakukan secara daring dan luring,” ujar Tinangon.

Materi-materi baik rakor dan bimtek meliputi hukum acara PHPU di MK, strategi advokasi dalam PHPU, metode persidangan dan pembuktian secara daring dan luring.

“Nah, dalam menghadapi PHPU di MK, KPU akan mengkoordinasikan dalam penyiapan jawaban dan penyerahan alat bukti ke MK. Supaya dapat berjalan satu pintu dan dapat dikendalikan oleh KPU Pusat,” terangnya. Untuk Advokat atau kuasa hukum disiapkan oleh masing-masing KPU Provinsi/Kab/Kota penyelenggara pilkada.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Kerja Profesional, THL di KPU Sulut Dapat Hadiah Natal

MANADO—Tenaga harian lepas (THL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut mendapat angin segar. Kontrak kerja mereka bakal diperpanjang. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan dalam sambutannya di Ibadah Perayaan Natal KPU Sulut bersama jajaran, Rabu (20/1) di salah satu hotel di Manado. “Sukacita Natal membawa sebuah perenungan, dimana akan berpisah dengan



teman-teman THL yang bekerja selama setahun,” kata Yessy. Menurutnya, akan jadi catatan bagi THL untuk diperpanjang kontrak kerja di KPU Sulut. “Mereka sudah menjadi catatan dalam bekerja dan mampu berpikir serta bijak. Mereka bersifat netral tak menerima sesuatu apapun itu,” ungkap Yessy.

Dia menceritakan pernah ada calon bawa “hadiah” tapi dengan semangat kerja yang tulus dan sadar, kemudian para THL tak menerima hadiah itu. “Sebab, jika diterima, KPU tak bekerja profesional. Terima kasih untuk teman-teman THL,” ucapnya.

Ditambahkannya, dia melihat bahwa di KPU Sulut terkait dengan pluralisme, saling menghargai satu sama lain itu sudah selesai.

“Di KPU mengurus pemilu, pemilihan. Soal agama, suku, RAS, jaringan, itu sudah selesai. Maka praktik itu mulai dari lembaga kita. Sehingga apa yang kita laksanakan, dikerjakan karena sebuah tanggung jawab segala aktivitas pada Tuhan. Bekerja dengan baik adalah ibadah sejati,” tutup Yessy.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Bantu PPK dan PPS Korban Bencana

MANADO—Peduli korban bencana banjir dan longsor di Manado, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menyerahkan bantuan bagi jajarannya yang terdampak bencana. Rabu (27/1), bantuan diserahkan langsung oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Sulut bagi anggota PPK dan PPS Kota Manado yang terdampak banjir dan longsor.

Dipimpin langsung Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh, bersama komisioner Yessy Momongan, Salman Saelangi, Lanni Ointu dan Meidy Tinangon serta jajaran Sekretariat turun langsung menyerahkan bantuan. Dikatakan Mewoh, bantuan ini diserahkan untuk anggota PPK dan PPS

Kota Manado yang terkena dampak banjir dan longsor. “Semoga bantuan ini dapat meringankan beban penyelenggara pilkada bersama keluarga,” ujarnya.

Ditambahkan Komisioner Lanni Oientu, bantuan ini diserahkan secara serentak di sejumlah titik yang ada anggota PPK dan PPS yang terdampak bencana.(*)

Penulis: *Rianthy Kalalo*
Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Kawal Sidang Sengketa Hasil Manado-Boltim di MK

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) konsisten melakukan tanggung jawabnya mengawal sidang sengketa hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi dengan Termohon KPU Manado dan Boltim.

Dipimpin Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Tim Fasilitasi PHP KPU Sulut mengawal langsung persiapan sidang hingga pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar, Jumat (29/1/2021).

Sidang untuk 2 perkara Pilbup Boltim dan 1 perkara Pilwako Manado dilaksanakan di Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.

MK membatasi peserta sidang yang hadir langsung (luring) di Gedung Konstitusi MK. Dari pihak termohon hanya 1 orang kuasa hukum dan 1 orang komisioner. Sisanya mengikuti sidang secara daring dari homebase KPU RI di Hotel Grand Mercure.

Mewoh dan anggota KPU Sulut lainnya, masing-masing Yessy Momongan, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon mengikuti sidang secara luring di hotel Grand Mercure.

Selain mengikuti dan menganalisa perkembangan sidang, keseriusan mengawal sengketa pilkada Boltim dan Manado ditunjukkan dengan digelarnya



koordinasi dan konsolidasi dengan fasilitasi KPU Sulut.

Dua kali rakor dilaksanakan yakni sebelum sidang dan sesudah sidang. Rapat dihadiri KPU Sulut, Boltim, Manado dengan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Eddy Gurning dan rekan.

Agenda sidang kedua bakal digelar 9 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pengesahan alat bukti termohon KPU Boltim dan Manado.

Karenanya, hari ini (30/01) tim langsung kembali ke Manado untuk menyiapkan alat bukti, diantaranya dengan mekanisme pembukaan kotak suara sesuai prosedur Peraturan KPU.

Pembukaan kotak suara untuk pengambilan alat bukti, diketahui dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan memperhatikan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020. (*)

Penulis: *Olvi Kapojos*

Sumber: *manadoaktual.com*

Hari Ini, KPU Boltim dan Manado ‘Diadili’

MANADO—Hari ini sengketa hasil pilkada di Manado dan Boltim akan mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Rabu (27/1), KPU Sulut menggelar Rakor Fasilitasi Sengketa dengan KPU Kota Manado dan Kabupaten Boltim. Rakor yang digelar di Rumah Pintar Pemilu KPU Sulut, dibuka Ketua KPU Sulut Ardilles Mewoh.

Mewoh mengingatkan, sejak MK meregister dalam BRPK sudah resmi Boltim dan Manado berperkara. “Perlu dipahami juga dengan adanya gugatan di MK, untuk Manado dan Boltim belum ada yang secara resmi sebagai pemenang Pilkada,” ungkap Mewoh.

Dia berharap semua pihak serius. “Jangan lalai dan terlambat,” tegas Mewoh yang pernah menggawangi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut periode sebelumnya.

Sejauh ini, KPU Manado dan KPU Boltim sudah menunjuk kuasa hukum. Karena itu, Mewoh tak lupa mengingatkan agar harus dioptimalkan koordinasi dalam penyusunan jawaban. “Mohon juga memerhatikan SOP fasilitasi sengketa dan memerhatikan tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan di MK,” pukas Mewoh.

Mewoh menyatakan akan full mensupport KPU Manado dan Boltim. “Kita akan pertahankan hasil kerja kita karena kita meyakini usaha kita telah prosedural dan berintegritas,” tegas Mewoh.

Hadir dan memberikan arahan seluruh Komisioner KPU Sulut masing-masing, Yessy Momongan, Salman Saelangi, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon. Juga nampak Kabag Hukum dan Tekmas, Nina Polii dan Kasubag Hukum Lidya Rompis. (***)

Penulis: *Rianthy Kalalo*

Sumber: *Manado Post*

Ilham Saputra Serahkan SK CPNS se-Indonesia dan Santunan kepada KPPS di Minahasa

MANADO—Ilham Saputra Plt Ketua KPU RI, Kamis (18/2/2021) melaksanakan kunjungan kerja dua agenda penting di Sulawesi Utara.

Agenda pertama di hotel Four Points Manado di hadapan Sekretaris dan Kabag SDM 34 Provinsi se Indonesia menyerahkan SK CPNS KPU Formasi 2019. Didampingi



Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Ilham menyerahkan secara simbolis SK untuk CPNS sejumlah 714 orang, dari jumlah tersebut 16 Satker KPU Se Sulut kebagian jatah sejumlah 22 orang.

SK tersebut secara simbolis diterima perwakilan sekretaris KPU masing-masing Sekretaris KPU Jatim, Sumut, Papua Barat dan sekretaris KPU Sulut, Pujiastuti.

Dalam kesempatan tersebut Ilham berpesan kepada CPNS KPU untuk meningkatkan kompetensi. "Pahami regulasi dan kerjalah penuh integritas," tegas Ilham.

Usai serahkan SK CPNS, sorenya Ilham didampingi Komisioner KPU Sulut dan KPU Minahasa, bertempat di Kelurahan Paleloan Tondano Selatan menyerahkan santunan kepada Milly Tatilu salah seorang KPPS yang menderita sakit stroke disaat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilgub Sulut 2020.

Ibu Milly (41 thn) saat dikunjungi terbaring tak berdaya akibat stroke. Ibu beranak 2 ini tak bisa bangun dari tempat tidurnya.

Dalam kesempatan tersebut, usai menyerahkan santunan sebesar Rp 30.800.000 rupiah secara simbolis, Ilham memberikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian sebagai penyelenggara Pilkada.

Santunan tidak diterima secara tunai, tetapi ditransfer ke rekening penerima santunan. Diserahkan juga dalam kesempatan tersebut santunan untuk 1 orang penyelenggara di Lembean Timur dan 1 orang di Bolaang Mongondow Utara.

Pada kesempatan itu, tak lupa Ilham dan rombongan mendoakan ibu Milly. Doa dipimpin Sym Meidy Malonda, Sekretaris KPU Minahasa. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Sulut Siap Bukukan Tulisan Insan Pers dalam Tahapan Pilkada Sulut 2020

MANADO—Bertempat di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara (Minut) dilaksanakan Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Selasa (23/02/2021).

Kegiatan dibuka Komisioner Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi didampingi Kasub Rudy Lalonsang.

Menurut Salman, kegiatan ini adalah evaluasi keterlibatan media dari awal sampai akhir Pilkada yang sudah dilaksanakan.

"Tahapan Pilkada sudah dilakukan, saatnya akan dilakukan evaluasi jejak berupa tulisan-tulisan apa yang menjadi penyelenggaraan.

Lapisan media yang pernah berinteraksi, pernah berkontribusi melahirkan artikel maupun pemberitaan dalam tahapan Pilkada. Peran media sangat besar sehingga partisipasi masyarakat sangat besar saat Pilkada berlangsung," urainya.

Dia pun berharap, rekam jejak para jurnalis yang sudah dipublikasikan akan dibuat sebuah buku, sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi media dalam tahapan Pilkada.

Peserta rapat ialah insan pers dari media elektronik dan media cetak.(*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

KPU Sulut Rancang Buku

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Selasa (23/02/21) di Hotel Sutanraja Minahasa Utara (Minut).



Didampingi Kasub Rudy Lalonsang, Komisioner Bidang Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Saelangi membuka Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. “Dengan mengucap Puji Syukur kepada Tuhan Rapat ini telah dibuka,” ucap Salman Saelangi.

Salman Saelangi mengungkapkan saat ini akan mengevaluasi ke media dari apa-apa yang telah diberitakan terkait tahapan dalam Pilkada 2020.

“Setiap awal tahapan sampai selesainya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena ini sangat penting akan dibuat satu buku agar tulisan-tulisan dari setiap media dari awal tahapan bisa dievaluasi dan bisa menjadi kritikan untuk kami,” pungkasnya.(*)

Penulis: *Olvi Kapojos*

Sumber: *manadoaktual.com*

Buku Pengalaman Pilkada 2020 Bakal Terbit

MINUT—Usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyusun buku tentang teknis pencalonan, Kamis (4/2). Sebelum penyusunan buku, KPU menggelar Focus Discussion Group di Kantor KPU Minahasa. Koordiv Teknis KPU Sulut Yessy Momongan dalam sambutannya mengatakan, penyusunan buku ini merupakan gagasan pihaknya akan menulis berbagai catatan-catatan, serta pengalaman yang dialami dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Sulut.

“Apa saja yang dialami seperti kendala atau masalah akan ditulis dalam buku untuk dijadikan kenangan bahkan bahan evaluasi pada pelaksanaan Pilkada mendatang,” ujar mantan Ketua KPU Sulut ini.

Lanjut Momongan, kegiatan serupa akan digelar sebanyak tiga kali untuk pemantapan penyusunan buku tentang teknis pencalonan

pada Pilkada tahun 2020.

Turut hadir menjadi narasumber, Koordiv Teknis KPU Sulut Yessy Momongan STH MSi, mantan Anggota KPU RI Dr Sry Nuryanti, mantan Ketua KPU Sulut juga akademisi Prof Dr Donal Rumokoy, staf ahli KPU RI Dr Fadil, diikuti Ketua KPU Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kota Tomohon dan Minahasa serta stakeholder.(*)

Penulis: *Rianthy Kalalo*

Sumber: *Manado Post*

Sukseskan Pilkada Serentak 2020, KPU Sulut Gelar Media Gathering Bersama Narasumber dan Pers

MANADO (lintassulut.com)—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan Media Gathering bersama dengan insan Pers dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020, Kamis (3/9/2020). Acara diselenggarakan di Kantor KPU Sulut.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Devisi Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Sulut, dengan tema “Peran Pers Dalam Menciptakan Demokrasi Berkeadilan Sulut Tahun 2020”.

Peran media sangat penting sehingga pihaknya dapat menerima berbagai masukan dan tanggapan masyarakat untuk kelangsungan pelaksanaan tahapan Pilkada agar berlangsung dengan baik, untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan di Sulut.

Ditambahkannya, Pilkada serentak bukan hanya milik KPU, namun milik bersama sehingga dibutuhkan kerja bersama untuk mengawal tahapan dapat terealisasi tepat waktu. “Dalam tahapan Pilkada dibutuhkan ketelitian agar tidak menimbulkan persoalan, sehingga dibutuhkan pengawasan dan kerja bersama dari semua pihak dan tetap mengedepankan protokol Covid-19,” ungkapnya.



Sementara itu, Raimon Paslah mengatakan, dinamika yang terjadi dalam sebuah event Pilkada pasti akan terjadi, karena itu dibutuhkan sebuah konsep pemberitaan yang dapat mengedukasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik.

Dari pantauan media turut hadir dalam kesempatan itu, Raymon Pasla (Komisi Informasi Publik), Amanda Komaling (IJTI) dan Erick Kawatu (KPID), serta puluhan awak media baik cetak, elektronik, maupun media online lainnya yang dibagi menjadi 2 sesi.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Komisioner KPUD Sulut, Salman Saelangi: “Setiap Tahapan Pilkada Harus Sesuai PKPU No.6 Tahun 2020”

MANADO (lintassulut.com)—Tahapan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Desember 2020 mendatang dipastikan mengikut protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu Anggota Komisioner KPUD Provinsi Sulut, Salman Saelangi S.Kel, Senin (13/7/2020) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan Protap tersebut karena sudah sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6. “Sesungguhnya sudah sejak awal karena hal ini sudah didahului dengan surat-surat edaran, jadi semua tahapan akan dilaksanakan sesuai Protokol Covid-19, dan itu sudah dikuatkan dengan PKPU VI yang sudah keluar,” ungkap Salman.

KPUD Provinsi Sulut sendiri pada saat ini sudah pada tahapan persiapan pelantikan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), dan semua tahapan yang sudah dilalui sesuai dengan Protokol kesehatan yang ada.

Sementara itu Perihal APD (Alat Pelindung Diri) yang dipersiapkan untuk

para PPDP saat melakukan tugas, Salman mengungkapkan bahwa semua hal terkait dengan itu sudah disiapkan. “Sampai hari ini APD untuk kebutuhan tahapan baik itu yang sudah terlaksana maupun kedepan nanti itu sudah tercukupi, begitu juga dengan PPDP yang akan melakukan pencoklitan dan ini semua sudah mencukupi sesuai dengan harapan Protokol Covid-19, dan untuk penghitungan suara nanti itu akan ada hitungan yang baru dan itu akan menunggu dana APBN”, tutup Anggota Komisioner KPUD Sulut Salman Saelangi.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Menjelang Pilkada KPU Daerah Sulut Gelar Media Gathering Yang Dihadiri Dewan Pers

MANADO (lintassulut.com)—Jelang Pilkada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah mengadakan Media Gathering dengan sejumlah Wartawan baik Media Online, Media TV dan cetak tentang pengawasan tahapan Pilkada di Sulut bertempat di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (29/1/2020).

Media gathering ini pihaknya ingin berdiskusi dengan wartawan terkait dengan pelaksanaan Pilkada maupun permasalahan dalam proses dan tahapan Pilkada di wilayah Provinsi Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyatakan, peran media sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada di Sulut. Tahun 2019 Pemilihan Legislatif (Pileg) berjalan dengan baik, media telah memberikan pendidikan politik yang baik sehingga berjalan dengan lancar dan berkualitas.

“Hari ini kami hadirkan pak Agus Sudibyo anggota Dewan Pers untuk berbagi informasi dan berdiskusi agar lebih independen dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dan mempertahankan kerjasama yang baik dengan media,” ungkapnya.



Harapan Ardiles, dengan kegiatan ini para jurnalis yang ada dapat bekerja dan berkomunikasi lebih baik lagi dengan KPU, untuk pelaksanaan Pilkada nanti.

“Semoga independensi dari pers menjadi komitmen bersama sehingga Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Agus Sudibyo selaku Dewan Pers mengatakan bahwa Dewan Pers tidak turut campur terkait hubungan kerjasama dalam hal iklan antara media dengan pihak instansi ataupun perusahaan. “Tidak masalah bila sertifikasi Dewan Pers digunakan untuk mencari iklan. Tetapi yang perlu diingat adalah sertifikasi yang diberikan ke media itu bukan syarat satu-satunya untuk mendapatkan iklan. Itu syarat minimal bukan syarat utama,” tutur Sudibyo.

Ditambahkannya juga, ada tiga syarat peran media dalam menghadapi Pilkada di Sulut. Pertama, jangan menjadi media sosial dalam hal negatif dan jadilah jurnalistik yang baik. Kedua, menjaga independensi dan imparialitas sehingga pesan yang ada jurnalis bukanlah juru kampanye. Dan ketiga, jangan membuat pagar api artinya media yang harus memisahkan urusan berita dengan urusan iklan. “Media harus independen memberitakan sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan Media Gathering dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Dan turut pula sebagai pemateri adalah Komisioner KPU Sulut lainnya yaitu, Meidy Tinangon, Yessy Momongan, Lanny.A Ointu, dan Salman Saelangi.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

KPU Sulut Konsisten Dampingi Sengketa Pilkada Boltim dan Manado di MK

MANADO, Mediamanado.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut konsisten melakukan tanggung jawabnya mengawal

sidang sengketa hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi dengan Termohon KPU Manado dan Boltim.

Dipimpin Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Tim Fasilitasi PHP KPU Sulut mengawal langsung persiapan sidang hingga pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar Jumat 29 Januari 2021.

Sidang untuk 2 perkara Pilbup Boltim dan 1 perkara Pilwako Manado dilaksanakan di Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.

MK membatasi peserta sidang yang hadir langsung (luring) di Gedung Konstitusi MK. Dari pihak termohon hanya 1 orang kuasa hukum dan 1 orang komisioner. Sisanya mengikuti sidang secara daring dari homebase KPU RI di Hotel Grand Mercure.

Mewoh dan anggota KPU Sulut lainnya, masing-masing Yessy Momongan, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon mengikuti sidang secara luring di hotel Grand Mercure.

Selain mengikuti dan menganalisa perkembangan sidang, keseriusan mengawal sengketa pilkada Boltim dan Manado ditunjukkan dengan digelarnya koordinasi dan konsolidasi dengan fasilitasi KPU Sulut.

Dua kali rakor dilaksanakan yakni sebelum sidang dan sesudah sidang. Rapat dihadiri KPU Sulut, Boltim, Manado dengan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Eddy Gurning dan rekan.

Agenda sidang kedua bakal digelar 9 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pengesahan alat bukti termohon KPU Boltim dan Manado.

Karenanya, Sabtu (30/01/2021), hari ini, tim langsung kembali ke Manado untuk menyiapkan alat bukti, diantaranya dengan mekanisme pembukaan kotak suara sesuai prosedur Peraturan KPU.



Pembukaan kotak suara untuk pengambilan alat bukti, diketahui dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan meperhatikan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Kunjungi Sulut, Ini Dua Agenda Penting Plt Ketua KPU RI

MANADO, MediaManado.com—Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra saat kunjungan ke Sulawesi Utara melaksanakan dua agenda penting, Kamis (18/02/2021).

Adapun agenda tersebut yakni pertama menyerahkan SK CPNS KPU Formasi 2019 yang dilakukan di hadapan Sekretaris dan Kabag SDM 34 Provinsi se Indonesia di hotel Four Point Manado. Sedangkan agenda kedua yakni, memberikan santunan kepada salah satu KPPS di Minahasa.

Didampingi Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Ilham menyerahkan secara simbolis SK untuk CPNS sejumlah 714 orang, dari jumlah tersebut 16 Satker KPU Se Sulut kebagian jatah sejumlah 22 orang.

SK tersebut secara simbolis diterima perwakilan sekretaris KPU masing-masing Sekretaris KPU Jatim, Sumut, Papua Barat dan sekretaris KPU Sulut, Pujiastuti.

Dalam kesempatan tersebut Ilham berpesan kepada CPNS KPU untuk meningkatkan kompetensi.

“Pahami regulasi dan kerjalah penuh integritas,” tegas Ilham.

Usai serahkan SK CPNS, sorenya Ilham didampingi Komisioner KPU Sulut dan KPU Minahasa, bertempat di Kelurahan Paleloan Tondano Selatan menyerahkan santunan kepada Milly Tatilu salah seorang KPPS yang menderita sakit stroke disaat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilgub Sulut 2020.

Ibu Milly (41 thn) saat dikunjungi terbaring tak berdaya akibat stroke. Ibu beranak 2 ini tak bisa bangun dari tempat tidurnya.

Dalam kesempatan tersebut, usai menyerahkan santunan sebesar 30.800.000 rupiah secara simbolis, Ilham memberikan apresiasi dan terimakasih atas pengabdian sebagai penyelenggara Pilkada.

Santunan tidak diterima secara tunai, tetapi ditransfer ke rekening penerima santunan. Diserahkan juga dalam kesempatan tersebut santunan untuk 1 orang penyelenggara di Lembean Timur dan 1 orang di Bolaang Mongondow Utara.

Pada kesempatan itu, tak lupa Ilham dan rombongan mendoakan ibu Milly. Doa dipimpin Sym Meidy Malonda, Sekretaris KPU Minahasa.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Libatkan Jurnalis, KPU Sulut Gelar Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

MANADO— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai 25 Februari 2021 di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara, dan dibuka langsung oleh Komisioner Bidang Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM



Salman Saelangi, di dampingi Kasub Rudy Lalonsang dan sebagai narasumber Ferry Majoa.

Menurut Salman Saelangi kegiatan ini merupakan evaluasi dengan para media dan jurnalis sebagai gerak bersama dalam keterbukaan informasi.

“Kami melakukan evaluasi dengan rekan-rekan media dan jurnalis di Sulawesi Utara untuk mengevaluasi apa yang menjadi gerak bersama baik penyelenggara maupun media, dari sisi penyelenggara bagaimana keterbukaan informasi pihak penyelenggara kepada publik dan media begitu juga hubungan pihak penyelenggara dengan rekan-rekan media apakah ini sudah baik atau masih kurang,” ungkap Salman Saelangi.

Saelangi menambahkan pihaknya ingin mengemas karya dari media dalam bentuk buku. “Kami punya target ingin mengemas apa yang menjadi karya-karya dari teman-teman media baik itu berita, artikel dikemas dalam bentuk buku yang kemudian otentik, jadi buku itu berisi berita yang otentik yang pernah termuat dan itu menjadi warisan bagi penyelenggara berikut, publik atau pun rekan-rekan media”, tutur salah satu Komisioner KPUD Sulut ini.

Harapannya agar senantiasa para Media dan Jurnalis selalu menjadi mitra kerja dari KPU yang selalu mensupport dalam setiap tahapan Pemilihan umum kedepannya nanti. (*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Pilkada 2020, KPU Sulut Bersama Kodam 131/Santiago Sosialisasikan Pemilihan Sehat dan Damai

MANADO (lintassulut.com)—KPU Provinsi Sulut bersama Kodam 131 Santiago menggelar kegiatan yang mengangkat tema Pemilihan Sehat dan Damai yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di Aula Kodam 131 Santiago,

Jumat (20/11/2020).

Salah satu Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengapresiasi Danrem 131 Santiago menggelar kegiatan Coffee Morning ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang bagaimana pemilihan sehat dan damai dalam kesiapan pelaksanaan Pilkada.

“Agenda seperti ini bukan FGD atau seminar. Jadi kita berdiskusi ringan tentang pemilihan sehat dan damai. Di mana pertama perlu mengedepankan dulu Pilkada Sehat baru damai,” ucap Salman.

“Yang pertama dimana kita sehat dulu untuk Pilkada baru selanjutnya damai. Dimana kalo bicara damai tidak akan dapat kalo kita semuanya belum sehat, atau kalo kita sakit, maka akan susah bicara damai. Maka kemudian di kedepankan sehatnya dulu,” tambah Saelangi.

Dari pantauan lintassulut.com turut hadir Danrem 131/Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda, perwakilan RSUP Prof Kandouw, Dekan Fakultas Hukum Unsrat Flora Kalalo, Pengamat Politik Taufik Tumbelaka dan sejumlah awak media dan yang lainnya. (*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Mantapkan Pengendalian Internal KPU Sulut Gelar Raker SPIP

MANADO -- Sebagai upaya melakukan penguatan pengendalian internal dalam rangka optimalisasi pelaporan keuangan dan kinerja tahapan Pemilihan 2020, KPU Sulut menggelar Rapat Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Raker yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut digelar di Manado dan di buka, Minggu (17/1) oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles MR Mewoh. Saat membuka kegiatan dalam sambutannya Mewoh mengharapkan agar implementasi SPIP di KPU Kabupaten/Kota makin ditingkatkan sampai akhir tahapan Pilkada bahkan sesudah Pilkada.



“Diharapkan dari pelaksanaan Raker ini dapat menyatukan persepsi tentang implementasi SPIP yang disampaikan langsung oleh terbilang istimewa karena Inspektorat KPU RI, Adiwijaya Bakti,” kata Mewoh.

Sementara itu dalam materinya Adiwijaya mengatakan SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus yang ditujukan untuk memberi jaminan untuk tercapainya tujuan organisasi.

“Ini layaknya sebuah proses mawas diri yang harus melekat pada setiap tindakan dan kegiatan dari pimpinan hingga staf,” ungkap Adiwijaya.

Disebutkan juga bahwa penanggung jawab utama pengendalian internal adalah Ketua KPU sedangkan penanggung jawab operasional sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan yang secara teknis dilaksanakan oleh sekretaris selaku Ketua Satgas /Pokja SPIP.

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon dalam arahnya berharap melalui Raker SPIP ini dapat dihasilkan output berupa identifikasi kendala dalam kegiatan pengendalian dan formulasi rencana penyelenggaraan SPIP di tahun 2021. Peserta kegiatan ini adalah Pokja/Satgas SPIP KPU Sulut, dan peserta utusan KPU Kabupaten/Kota meliputi Kadiv Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kasubag Hukum. (dv.Hukum KPU/*)

Penulis : Josh Tinungki

Diterbitkan : *sulutnews.com* (17/1/2021)

AIPI Cabang Manado Bersama KPUD Provinsi Sulut Edukasi Politik

MANADO -- Asosiasi Ilmu Politik Cabang Manado melakukan edukasi politik. Hal itu dilakukan untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kegiatan ini menggandeng KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dirangkaikan dengan menggelar diskusi serta sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan mengusung tema “Pemilu 2019 Issue, Problem dan Kesiapan Penyelenggara Pemilu”.

Kegiatan dibuka Wakil Ketua AIPI Cabang Manado, Dr Ferry Daud Liando yang mengajak semua stakeholder bersama-sama untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas.

Senada disampaikan Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles MR Mewoh MSi, juga mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi untuk suksesnya Pemilu dengan cara menjadi pemilih yang cerdas, anti politik uang dan SARA, tidak kalah pentingnya adalah memerangi *hoax*.

Turut hadir, narasumber utama, Dr Michael Mamentu yang dalam diskusi ini memaparkan sejumlah issue yang cukup sensitif, yang muncul dalam proses Pemilu tahun 2019 ini, di mana KPU harus mengantisipasi masalah yang akan muncul pasca Pemilu.

Yakni yang berkaitan dengan masuknya orang yang menderita sakit jiwa dalam DPT serta adanya 17,3 juta orang DPT yang memiliki tahun dan tanggal lahir yang sama, *hoax* tentang Pemilu maupun adanya berita yang menyerang pribadi penyelenggara pemilu.

Selain itu, menyangkut logistik Pemilu di mana regulasi tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan serta kondisi geografis dan Topografi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda serta Issue tentang WNA yang memiliki hak pilih.

Mamentu sendiri menilai KPU selaku Penyelenggara sudah cukup siap untuk menghadapi Proses Pemilu iali ini akan tetapi Mamentu Kembali mewarning agar KPU secara baik mempersiapkan berbagai kemungkinan pasca pemilu 17 April 2019 mendatang.(*)

Penulis : Jellina Najoran

Diterbitkan : *sulutreview.com*



Rakor KPU Talaud Persiapan Kampanye dan Penetapan 153 Titik APK

TALAUD -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan kampanye bersama dengan berbagai elemen yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak, Selasa (22/9/2020).

Rakor yang digelar siang itu bertempat di Aula KPU Kepulauan Talaud. Kegiatan ini digelar untuk membahas tentang persiapan pelaksanaan tahapan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, tahun 2020.

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU Talaud, Andri LJ Sumolang. "Rakor ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan rakor persiapan kampanye," ujar Sumolang.

Ia menambahkan, rakor ini membahas juga mengenai titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di 153 desa. "Dalam rakor ini kita sama-sama membahas terkait dengan titik lokasi APK, supaya kita sama persepsi demi lancarnya proses tahapan kampanye yang akan dimulai pada 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020," tutur Sumolang.

Lanjutnya, dalam pemasangan APK di lokasi atau titik pemasangan, nantinya akan difasilitasi oleh KPU sesuai dengan regulasi yang ada. "Lokasi atau titik ini nantinya akan dipasang dengan APK yang difasilitasi KPU. Berdasarkan PKPU 10 Tahun 2020, bahwa dalam pelaksanaan kampanye ada beberapa metode pelaksanaannya, salah satunya adalah APK. Oleh karena itu KPU menentukan titik/lokasi APK berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta lokasi-lokasi mana saja yang nantinya layak untuk dipasang APK tersebut," terang Sumolang.

Dalam kegiatan rakor ini dihadiri juga Asisten Satu Bidang Pemerintahan Pemkab

Talaud, Kepolisian, Bawaslu, Liaison Officer (LO) Partai Politik. (*)

Penulis : *Melky Bidu*

Sumber : *suluttimes.com*

KPU Sulut Gelar Evaluasi Tahapan Pemilu 2019

MANADO – Tahapan akhir dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 adalah evaluasi dan pelaporan.

Akan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar Rakor Evaluasi Tahapan Pemilu 2019, Senin-Rabu (26 – 28/2019) bertempat di Grand Kawanua Convention Center Kairagi-Manado.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU provinsi Sulawesi Utara, ArdilesMewoh. "Pemilu itu memiliki sebuah siklus dan evaluasi, yang merupakan akhir dari satu siklus dan akan memulai lagi siklus baru," ujar Mewoh dalam sambutannya.

Mewoh menjelaskan, tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai sejak 2017, dan semua tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan oleh semua jajaran penyelenggara.

"Saat ini kita telah menetapkan calon terpilih dan telah mengajukan usulan pelantikan. Jika ada persoalan pasca penetapan calon terpilih dan pengusulan pelantikan maka itu bukan wilayah KPU lagi," ungkap Mewoh.

Mewoh mengapresiasi kinerja seluruh divisi dengan capaian maksimal. Diantaranya, data pemilih tak ada masalah di rekapitulasi nasional.

"Pencalonan dan pemungutan suara terlaksana sesuai tahapan. Partisipasi pemilih se-Sulut melampaui target 77.5% dimana mencapai 83, 4% untuk Pileg dan 84% untuk Pilpres. Logistik di seluruh TPS terlayani dan Sengketa Hukum hingga sengketa hasil di MK mampu dituntaskan jajaran KPU," jelasnya seraya mengapresiasi support Pemerintah Provinsi, Forkompimda dan stakeholder di Sulut, yang



telah mendukung suksesnya Pemilu Tahun 2019.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol dan Linmas, DrsMecky Onibala, MSI. Mengapresiasi kepada penyelenggara Pemilu di Sulut, yang telah menggelar Pemilu dengan sukses.

“Hal ini tak lepas dari sinergitas penyelenggara Pemilu dengan setiap stakeholder dan komponen masyarakat,” ungkap Onibala.

Rakor evaluasi Pemilu 2019 tersebut, akan dirangkaian dengan kegiatan evaluasi bersama Peserta Pemilu terkait kampanye serta FGD. Bersama stakeholder terkait Evaluasi implementasi konstruksi penegakan hukum Pemilu.(*)

Penulis : *Friska Tewu*

Diterbitkan : *portalsulut.com*

Mantapkan Pengendalian Internal,KPU Sulut Gelar Raker SPIP Dengan Hadirkan Inspektur KPU RI

MANADO -- Sebagai upaya melakukan penguatan pengendalian internal dalam rangka optimalisasi pelaporan keuangan dan kinerja tahapan Pemilihan 2020, KPU Sulut menggelar Rapat Kerja Sistem.

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Raker yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut digelar di Manado dan dibuka, Minggu (17/1) oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles MR Mewoh.

ArdilesMewoh saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan agar implementasi SPIP di KPU Kabupaten/Kota makin ditingkatkan sampai akhir tahapan Pilkada bahkan sesudah Pilkada.

Raker kali ini terbilang istimewa karena dihadiri Inspektur Inspektorat KPU RI, Adiwijaya Bakti.

Dalam materinya inspektur Adiwijaya, yang memaparkan materi tentang implementasi SPIP di lingkungan KPU menyebutkan

bahwa SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus yang ditujukan untuk memberi jaminan untuk tercapainya tujuan organisasi.

“Ini layaknya sebuah proses mawas diri yang harus melekat pada setiap tindakan dan kegiatan dari pimpinan hingga staf,” ungkap Adiwijaya.

Disebutkan juga bahwa penanggung jawab utama pengendalian internal adalah Ketua KPU sedangkan penanggung jawab operasional sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan yang secara teknis dilaksanakan oleh sekretaris selaku Ketua Satgas / Pokja SPIP.

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon dalam arahannya berharap melalui Raker SPIP ini dapat dihasilkan output berupa identifikasi kendala dalam kegiatan pengendalian dan formulasi rencana penyelenggaraan SPIP di tahun 2021.

Peserta Kegiatan ini adalah Pokja/Satgas SPIP KPU Sulut, dan peserta utusan KPU Kab/Kota meliputi Kadiv Hukum dan Pengawasan, Sekretaris dan Kasubag Hukum.(*/ika)

Penulis : *Friska Tewu*

Diterbitkan:*portalsulutnews.com(18/1/2021)*

Wujudkan Akuntabilitas Keuangan, KPU Sulut Teken Perjanjian Kinerja

MANADO -- Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) tahun anggaran 2021.



Penandatanganan PK tersebut dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu Kantor KPU Sulawesi Utara, Rabu (27/01/2021).

Pihak yang menandatangani PK adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh dan Sekretaris KPU Provinsi Sulut, Pujiastuti.

PK yang ditandatangani merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja atau ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengungkapkan bahwa PK dan pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Mewoh menyebut bahwa penandatanganan PK didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Juga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

“Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Dibutuhkan komitmen kita bersama untuk

mewujudkan kinerja yang dibarengi dengan akuntabilitas penggunaan anggaran,” ungkap Mewoh yang juga merangkap Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.

Selain Mewoh dan Pujiastuti, hadir dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon serta pejabat sekretariat KPU Sulawesi Utara, diantaranya Kabag Datin dan SDM, Raymon Mamahit, Kasubag Program dan Data, Lanny Alou dan Kasubag Teknis dan Hupmas, Ruddy Lalonsang.*)

Penulis : *Jellina Najoa*

Diterbitkan : *sulutreview.com(27/1/2021)*





Epilog

Sosialisasi Pilkada: Panjang, Melelahkan Tapi Mengasyikan

MANADO - Bisa dibilang jadwal sosialisasi adalah tahapan paling lama dan melelahkan.

Tidak mudah menjalaninya, apalagi bersamaan dengan pandemi Covid-19. Tetapi, ini adalah pondasi agar Pemilihan Serentak aman dan sukses. Penyelenggara pun satu komitmen, fokus bekerja dengan penuh kehati-hatian.

Tahapan sosialisasi penuh warna. Sempat diperhadapkan dengan kabar penundaan pilkada, hingga para petugas penyelenggara yang terpapar corona. Namun semua tetap berjalan sesuai harapan. Sosialisasi ke berbagai pelosok Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Masyarakat mendapatkan edukasi politik serta pemahaman pentingnya menggunakan hak pilih pada 9 Desember 2020.

Pemilihan Serentak dilaunching KPU Sulut, pada 31 Januari 2021. Kala itu, KPU Sulut berkomitmen pesta demokrasi harus diketahui seluruh warga bumi nyiur melambai.

Semua jajaran KPU di kabupaten/kota dituntut mampu menyelenggarakan pilkada berintegritas. Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh bahkan menegaskan penyelenggara tak mengenal libur.

“Saya berharap kawan-kawan bisa bekerja, termasuk di hari raya keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru,” tegas Ardiles.

Sosialisasi dilakukan KPU Sulut dengan melibatkan banyak pihak. Hubungan antar lembaga dimaksimalkan. Termasuk menggandeng media massa dalam menyebarkan informasi terkini. Insan jurnalis diyakini adalah mitra penting membantu kerja-kerja penyelenggara. Alhasil, wartawan selalu menjadi kawan setia.

Pilkada di tengah pandemi, membuat KPU Sulut dan jajaran kerja ekstra. Banyak hal baru yang tertuang dalam aturan. PKPU menyesuaikan dengan wabah virus yang sedang melanda. Publik kemudian diberikan pemahaman tentang batasan dalam kampanye tatap muka. Bahkan saat berada di Tempat Pemungutan Suara, wajib melakukan serangkaian protokol kesehatan sebelum dan sesudah memberikan suara.

Menariknya di setiap tahapan sosialisasi, respons masyarakat selalu memuaskan. Aktifitas KPU Sulut di berbagai lini mendapat apresiasi positif. Banyak dukungan dan doa agar pilkada berjalan sesuai harapan. Bahkan, semangat TNI-Polri dalam membantu sosialisasi juga patut diacungi jempol. Semua sadar, bahkan pilkada merupakan kontestasi penting memperkuat proses demokrasi bangsa.

Sulut memang punya akar tradisi dan sejarah panjang akan nilai demokrasi dan perdamaian. Hal ini diakui Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Berbeda dengan daerah lain, warga Sulut kata Pramono, selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. “Meskipun hati sedang panas,” katanya.



Menurut Pramono, gejolak dan beda pendapat itu biasa. Yang pasti kata dia, musyawarah diutamakan. “Ketika masyarakat menggunakan hak suara di TPS dan menerima apapun hasilnya, itulah nilai musyawarah tertinggi. Karena kedaulatan ada di tangan pemilih. Siapapun yang menang maka harus dijunjung tinggi semua pihak. Itu tradisi yang sejak lama berakar kepada masyarakat Sulut,” ujar Pramono.

Keyakinan serupa disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salam. Menurut dia, sudah tercatat dalam sejarah dan tinta mas bahwa tradisi panjang berdemokrasi sudah terjadi sejak lama di Sulut. “Ini menjadi keyakinan bagi kami dan modal untuk melaksanakan pilkada,” tandasnya.

Benar memang. Tahapan sosialisasi yang melelahkan terasa mengasyikan saat berhasil dilaksanakan. Semua penyelenggara bekerja ekstra dan bahagia karena mencapai tujuan maksimal.

Penulis : *Alfrits Semen*
Sumber : *BeritaManado.com*



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab II

Penekrutan Badan Adhock Penyelenggara





Penekrutan Badan Adhoc Penyelenggara

Penyelenggara Diingatkan Tak Langgar Kode Etik Lagi

MANADO - Semenjak 2018-2019, 7 KPU kabupaten/kota di Sulut diadakan melakukan pelanggaran kode etik dan telah ditangani di DKPP.

Komisioner Divisi Hukum KPU Provinsi, Meydi Tinangon mengatakan, pihaknya telah berupaya agar supaya penyelenggara di tingkatan bawah dapat konsisten menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

“Diantaranya dengan melakukan penguatan kapasitas dan komitmen melalui Bimtek, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pencegahan perilaku yang bertentangan dengan kode etik,” ujar Tinangon, kemarin.

Diterangkannya, pengawasan internal dilakukan dengan menindaklanjuti hasil monitoring dan supervisi atau informasi ataupun laporan dugaan pelanggaran kode perilaku komisioner KPU kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diberikan PKPU 8/2019.

“Sejauh ini sudah ada 5 komisioner yang diproses melalui mekanisme klarifikasi dugaan pelanggaran kode perilaku di KPU provinsi yang berasal dari KPU Minut 1 orang dengan sanksi peringatan, KPU Manado 1 orang dengan sanksi peringatan dan KPU Bitung 3 orang dengan sanksi 1 orang diberikan peringatan,” paparnya.

Peringatan, lanjutnya, diberikan sebagai langkah pembinaan. “Diharapkan

penyelenggara tidak mengulangi perilaku yang melanggar kode perilaku, sumpah janji dan pakta integritas,” pungkasnya sembari menambahkan bahwa untuk pelanggaran kode etik badan ad hoc ditangani KPU kabupaten/kota.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Gelar Sosialisasi Pembentukan Badan Adhock, KPU Sulut: Kita Mulai Januari

MANADO – Sebagai tahapan pemilihan umum tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan sosialisasi pembentukan badan adhock pemilihan serentak tahun 2020, Jumat (27/12/2019) di Hotel Four Points Manado.

Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, dalam sambutan dan arahnya mengatakan tahun 2020 merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak, tang sudah mulai kita persiapkan mulai tahun 2019 ini.

“Sosialisasi ini merupakan suatu tahapan dalam pemilihan. Jadi walaupun hari kibur tetap kita laksanakan, karena jika satu hari terlewatkan maka bisa berantakan seluruh jadwal yang telah tersusun,” ungkap Ardiles.

Dikatakan Ardiles Mewoh, pembentukan badan adhock dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai di tingkat TPS.

“Penting bagi kami untuk menyebarkan sosialisasi. Terutama pembentukan badan



adhock di tingkat provinsi yang akan dimulai bulan Januari,” jelas Ardiles.

Komisioner KPU provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi dalam sosialisasi ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari kesemua badan adhock yang akan dibentuk.

“Tugas dan fungsi sebenarnya hampir sama, seperti sebelumnya. Untuk itu melalui sosialisasi ini kami mau semua yang akan menjadi petugas penyelenggara pemilu dapat mengerti dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing,” ucap Salman.

Salman mengungkapkan, bahwa KPU akan merekrut petugas penyelenggara pemilu yang akan bertugas pada pemilu serentak tahun 2002 nanti. “Tahap perekrutan PPK dan PPS rencana akan dimulai pada Januari sampai Februari 2020,” ungkap Salman.

Penerbit: *Milton Pantouw/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Rekrutmen Badan Adhoc Harus Profesional

MANADO - Rekrutan badan ad hoc di Sulut diminta harus profesional. Itu ditegaskan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan saat membawakan materi di sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Serentak 2020, Jumat (27/12) di Manado. “Harus benar-benar profesional. Tidak menetapkan oknum yang tidak terlibat masalah. Ini penting agar pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan tertentu,” kata Viryan.

Dirinya meminta agar proses penetapan badan ad hoc juga harus kedepankan karakter manusia yang berkomitmen. “Sebab, akar masalah yang terjadi selama ini karena dalam teknis pembentukan badan ad hoc selalu merekrut orang sama yang sudah jelas bermasalah,” ucapnya.

Dikatakannya, perlu ada pembatasan periode bagi mereka yang menjadi badan adhock. “Dengan catatan, bagi mereka yang tidak bermasalah,” tandasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Awal 2020, KPU Rekrut Puluhan Ribu Badan Adhoc

MANADO - Tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut sedang berjalan. Awal tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merekrut badan adhock. Hal itu disampaikan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh di kegiatan Sosialisasi Stakeholder Pembentukan Badan ad hoc Pemilihan Serentak 2020, Jumat (27/12) di Manado. Menurutnya, sebelum perekrutan dimulai, maka sosialisasi kepada stakeholder sangat penting dilakukan.

“Penting bagi kami untuk menyebarluaskan informasi bahkan sosialisasi terkait dengan produk hukum untuk pembentukan badan adhock,” kata Ardiles.

Perekrutan tersebut, kata dia, juga akan dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Namun sebelumnya dilakukan untuk semua stakeholder. “Pembentukan badan ad hoc ini dibentuk sampai pada penyelenggara tingkat bawah. Seperti PPK, PPS dan PPDP,” ucapnya.

Lanjutnya, merekrut badan adhock adalah sebuah pekerjaan yang besar dan perlu didukung semua pihak. “Jumlah adhock ada kurang lebih 72.478 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit. Makanya perlu peran dari semua pihak,” tuturnya. Ditambahkannya, sangat penting bagi pihaknya untuk kesiapan pilkada. “Karena sudah tersusun tahapannya sampai akhir. Satu hari saja terlewat maka akan mengganggu setiap tahapan,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Rekrutmen Badan Adhoc Mengacu Prinsip Penyelenggara Pemilu

MANADO - Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan mensosialisasikan pembentukan badan



adhoc. Para Komisioner KPU Sulut pun, Selasa (14/1) turun ke sejumlah daerah untuk lakukan sosialisasi. Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon menjelaskan, badan adhoc ini dimulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Masuk di dalamnya juga yakni petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). "Pembentukan kita akan mulai pengumuman 15 Januari (hari ini)," ujarnya.

Diterangkannya, dalam rekrutmen badan adhoc, pihaknya tetap mengacu pada prinsip penyelenggara pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas. Penerapan prinsip ini dalam tahapan rekrutmen ada implementasinya. "Misalnya prinsip mandiri.

Dalam setiap proses, KPU berkomitmen bekerja tanpa pengaruh dari pihak lain.

Bersikap mandiri dalam mengambil keputusan tanpa unsur intervensi dari pihak manapun," katanya.

Kemudian, prinsip jujur juga akan diterapkan. Dimisalkannya proses rekrutmen tanpa manipulasi. "Nanti ada 3 tahapan seleksi yakni administrasi, tertulis dan wawancara. Tolong diawasi supaya tak terjadi manipulasi. Kita berusaha mengatur secara teknis agar supaya tak terjadi hal demikian," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk melaksanakan rekrutmen secara adil. Setiap peserta memenuhi syarat diperlakukan sama baik syarat, ketentuan, proses, penilaiannya. "Karena itu, prinsip-prinsip penilaian harus diperhatikan oleh teman-teman KPU di kab/kota. Lakukan penilaian secara objektif," sarannya.

Pelaksanaan rekrutmen wajib hukumnya harus sesuai dasar hukum dan juga mengedepankan prinsip kepentingan umum. "Nanti ada dua tahap. Membuka ruang tanggapan publik terhadap calon yang

diumumkan. Jadi, sejak awal rekrutmen dilakukan secara terbuka mulai dari pendaftaran," pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Rekrutmen PPK, 5 Daerah Seleksi Manual

MANADO - Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sedang lakukan tahapan proses rekrutmen PPK. Proses tersebut diawasi sepenuhnya oleh Bawaslu dan secara terbuka. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu mengatakan, saat ini akan masuk pada seleksi. "Tanggal 30 Januari ada dua kabupaten/kota seleksi melalui CAT. Sisanya 5 kabupaten/kota seleksi manual," ujarnya, Selasa (28/1).

"Untuk dua daerah yang seleksi memakai CAT yakni Manado dan Tomohon. Dan sisanya itu masih dengan manual. "Hasilnya langsung diumumkan. Proses ini diawasi sepenuhnya oleh Bawaslu," tandasnya.

Dijelaskannya, 5 daerah yang masih seleksi manual karena kesiapan termasuk di dalamnya jaringan internet. Karena tidak semua memiliki kesiapan infrastruktur jaringan dan juga komputer belum bisa akomodir seleksi CAT.

"Kita memang verifikasi dulu kesiapan untuk keamanan soal yang dibuat. Itu dipertimbangkan. Kita jaga agar setelah itu tidak ada isu-isu tak enak soal CAT ini," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga membentuk tim khusus untuk pembuatan soal. Soal batasan umur calon PPK, dia mengaku bahwa tak ada batasan usia maksimal dalam rekrutmen.

"Yang ada minimal 17 tahun. Nanti semakin banyak orang muda terlibat penyelenggara pemilu," ucapnya. Terkait kesehatan, lanjutnya, sudah ada syarat administrasi. "Pendaftar juga harus menyatakan surat keterangan sehat dalam persyaratannya.



Kami sudah kerja sama dengan Dinas Kesehatan yang menunjuk Puskesmas untuk nanti memeriksa kesehatan calon ad hoc,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Tak Ada Nama di Pengumuman PPK, Berarti Itu TMS

MANADO - Hasil wawancara untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah diumumkan. Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan, jika nama peserta tak ada dalam pengumuman tersebut, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS). “Jika ada yang katakan kenapa namanya hilang, berarti itu TMS. Berarti tak muncul di pengumuman wawancara,” kata Salaman dalam coffee morning, Rabu (19/2) di Manado.

Menurutnya, TMS itu bisa saja karena tak hadir wawancara, atau saat diklarifikasi ternyata tim sukses/parpol atau sudah pernah 2 periode. Dirinya menerangkan, jika dikatakan ada poin peserta awalnya berada di atas kemudian selanjutnya turun, itu menurutnya memungkinkan.

Dirinya mencontohkan saat tes tertulis ada nilai peserta di atas, tapi kemudian selanjutnya turun. “Itu biasanya masalah etik. Seperti rekam jejak kita dapatkan ada postingan di medsos berpihak. Itu akan hilang penilaian rekam jejaknya. Sehingga presentase nilai wawancara akan jadi rendah,” terangnya.

Namun, lanjutnya, semua itu melewati proses klarifikasi. “Kalau mengelak, kita tak langsung ambil kesimpulan. Namun, kalau terbukti, itu bisa turun (nilai),” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Hati-hati Rekrut Badan Adhoc

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut akan terus berhati-hati dalam merekrut

badan adhoc. Apalagi Bawaslu RI telah keluaran rilis indikator kerawanan pilkada (IKP) 2020 yang menaruh posisi Sulut di peringkat pertama. “Kemarin sudah ada indikator kerawanan dari Bawaslu. Saya pelajari, nilai paling tinggi IKP tersebut ada di badan adhoc. Makanya itu menjadi alat ukur untuk kita benahi dalam rekrutmen badan adhoc sampai pada prosesnya,” kata Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Rabu (26/2).

Untuk itulah, dalam rekrutmen badan adhoc pihaknya sangat berhati-hati supaya tidak salah. “Apa lagi terkait netralitas. Jangan sampai calon badan adhoc terlibat dalam peserta pemilu atau tim kampanye,” ujarnya. Lebih jauh dikatakannya, rekrutmen badan adhoc ada regulasi dan KPU berwenang membuat pedoman teknis.

“Di dalamnya kami sudah atur seperti syarat, tanggapan masyarakat dan lainnya,” ucap Salman. Syarat secara umum penilaiannya adalah netralitas. Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Apa lagi jadi penekanan dari pimpinan di KPU RI yang terus mewanti-wanti bahwa harus kedepankan netralitas.

“Ketika kita salah dalam rekrutmen badan adhoc, itu sangat fatal dan bisa sampai pada pemberhentian jabatan komisioner. “Apa lagi tidak sesuai regulasi. Itu bisa dapat peringatan keras oleh DKPP. Makanya ada langkah hati-hati dari kami. Untuk itu, dalam semua tahapan termasuk di dalamnya rekrutmen badan adhoc, kita ikut regulasi yang ada,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Lantik Serentak 5.514 PPS

MANADO—Sejak Senin (25/6/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dan jajarannya mulai melaksanakan tahapan pemilihan Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat tertunda karena adanya Pandemi Covid-19.



Dari data yang dihimpun tahapan yang dilaksanakan secara serentak adalah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Tahun 2020.

Terkait dengan pelantikan PPS, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh mengatakan bahwa sudah menjadi komitmen KPU sebagai penyelenggara pemilihan tahun 2020 untuk berperan serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19 sehingga perlu dipastikan bahwa tahapan pemilihan akan menerapkan protokol Covid 19 secara ketat dan disiplin.

“Oleh karenanya sebagai penyelenggara kami berharap masyarakat sebagai subjek utama dari pemilihan bisa memaklumi dan turut menerapkan protokol covid 19 juga dalam menerima petugas kami di lapangan,” ungkap Mewoh.

Sementara itu, menurut Ketua Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi menyatakan, untuk pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak pada Senin (15/6/2020) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan cara virtual atau daring.

“Pelantikannya sukses walaupun ada beberapa Anggota PPS yang desanya masih terkendala dengan jaringan internet. Tapi berbagai upaya mereka lakukan ada yang naik ke gunung bahkan ada yang ke pinggir pantai hanya untuk mencari signal internet agar bisa ikut dalam pelantikan PPS,” ucap Saelangi. Seharusnya yang akan dilantik 5.517 tapi 3 calon PPS yang mengalami kendala sehingga yang dilantik hanya 5.514 PPS. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Ajak Warga Awasi Calon PPK

MANADO—Tahapan Pilkada 2020 sedang berlangsung. Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Sulut mengajak masyarakat ikut berpartisipasi di setiap tahapan. Salah satunya terkait rekrutmen calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang sementara berlangsung.

Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon pada wartawan mengatakan, untuk menghasilkan tenaga adhoc yang kredibel masyarakat bisa memberi masukan terkait rekam jejak calon PPK.

“Ini penting, agar kita bisa memastikan PPK yang akan bertugas nanti benar-benar kompeten,” beber Tinangon. Lebih jauh dikatakan mantan Ketua KPU Minahasa ini, pembentukan badan adhoc sangat penting dalam proses Pilkada. “Mereka adalah ujung tombak tugas KPU di lapangan. Jadi memang harus memiliki kemampuan,” tandas Tinangon.

Penulis *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Manoppo Kupas Perlindungan Hukum Bagi KPPS

MANADO – Digelar di Hotel Aston and Resort Bogor Jawa Barat, 13 – 16 November 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia gelar Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu.

Dalam kegiatan ini dipresentasi 45 artikel terpilih dari lebih 200 artikel atau paper yang dikirim dan diseleksi ke tim penilai artikel Call For Paper Tata Kelola Pemilu.

Jumat (15/11) makalah yang lolos seleksi dipresentasikan oleh para penulis.

Diantara penulis paper tersebut, salah satunya adalah Robby Manoppo, SH, MKn, Komisioner KPU Minut yang merupakan satu-satunya pemakalah asal Sulut.

Dengan mengangkat topik “Perlindungan Hukum bagi KPPS sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu”, Robby yang juga Divisi Hukum di KPU Minut memukau peserta termasuk reviewer Dr. Nur Hidayat



Sardini yang memberikan beberapa catatan berkelas namun dipaparkan dengan sederhana.

“Menyimak presentasi beliau, ada rasa bangga, haru, dan penghargaan. Satu-satunya pemakalah Sulut. Semoga memotivasi Komisioner KPU lainnya,” Kata Ketua Bidang Hukum KPU Sulawesi Utara Meidy Yafet Tinangon, S.Si M.Si.

Selain Manoppo, hadir dalam kegiatan tersebut DR Ferry Daud Liando, Koordinator Program Tata Kelola Pemilu UNSRAT.

Penulis: *Noldy Kaeng*
Sumber: *Sulutpos.com*

KPU Tunggu Kaum Millenial Masuk Penyelenggara Pilkada 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara tunggu keterlibatan kaum millenial masuk dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh saat membuka Kegiatan Publik Produk Hukum Rancangan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara AdHoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Senin (18/11) di Lion Hotel Manado.

“Dalam Pilkada mendatang penting adanya kaum Millenial yang jadi PPK, PPS dan KPPS. Ini perlu agar ada regenerasi yang baik,” kata Ardiles.

Alasan dilibatkannya kaum Millenial dalam struktur penyelenggara dijelaskannya karena adanya target para pemilih muda untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pemilu sangat diutamakan.

Disamping itu Ardiles pun meminta dalam pembentukan Badan Ad Hoc, akan ada saran, masukan, terobosan baru dalam menyusun pedoman teknis terkait tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Usulan ini begitu penting untuk meningkatkan peran dari PPK, PPS dan KPPS yang merupakan ujung tombak dari KPU,” kata Mewoh.

Adapun anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk KPU Sulut sebesar Rp230 miliar, dengan biaya badan AdHoc sekitar Rp 130 miliar untuk pembayaran honor PPK, PPS dan KPPS.

“Belajar dari pemilihan Tahun 2019, maka pembayaran honor untuk badan penyelenggara Adhoc akan mengalami kenaikan dari 20 persen sampai 80 persen,” pungkasnya.

Penulis: *Noldy Kaeng*
Sumber : *Sulutpos.com/19/11/2019*

KPU Sulut Bakal Rekrut 72.478 Badan Adhoc Penyelenggara Pemilukada 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal rekrut sedikitnya 72.478 badan adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah tahun 2020 yang tahapannya tengah berlangsung.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh saat membuka Sosialisasi Stakeholder Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Serentak tahun 2020 yang digelar Jumat, (27/12) siang ini di Four Point Hotel.

“Pembentukan Badan Adhock tahapannya akan dibuka pada bulan januari mendatang, dan jumlah bakal penyelenggara pemilu berjumlah 72 478 orang,” Kata Mewoh.

Adapun dari 72 .478 badan adhoc ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, (PPK) tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa dan Kelurahan, Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Panitia Pungutan Suara (KPPS) tingkat TPS.

“Dalam pemilihan ini paling banyak Anggarannya terserap dalam pembayaran honor badan adhock dengan jumlah 67 persen dari anggaran yang ada,” jelasnya.



Perekrutan badan adhoc ini pihak KPU Berharap peran serta Stakeholder sangat di butuhkan sehingga dapat terekrut pelaksana pemilu sesuai dengan aturan.

“Sangat penting melakukan sosialisasi terkait produk hukum pembentukan badan adhock ini, terlebih teman-teman pers kiranya sudah bisa memberitakan secara luas akan pembentukan badan adhock sehingga bisa tersebar secara luas,” jelasnya.

Menurut Mewoh, banyak mayarakat yang berkeinginan bergabung dalam penyelenggara pemilu namun terkendala dengan tidak mendapatkan informasi terkait tahapan dan jadwal pembentukannya.

“Karena pembentukan ini sampai pada penyelenggara paling bawah yakni TPS (Tempat Pemungutan Suara), kita berharap semua kalangan bisa mengetahui. apalagi banyak yang mungkin ingin terlibat namun kurang dapat informasi,” jelasnya sembari menegaskan perekrutannya bakal dilakukan secara terbuka dan bebas interfensi.

Proses perekrutan akan berlangsung secara terbuka dan transparan dan bebas interfensi, karena yang kita rindukan akan terbentuk badan adhock yang berintegritas dan profesional,” tambah Mewoh.

“Kita akan merekrut pelibatan kelompok muda, karena mereka sudah diberi ruang oleh undang-undang yang mengatur yakni berumur minimal 17 tahun, dan para Kaum muda ini sangat membatu dalam peningkatan berpartisipasi pemilu,” pungkasnya.

Sementara Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon, S.Si, M.Si dalam pemaparan materinya mengatakan pembentukan badan adhock tak lepas dari peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur terkait kode etik, perilaku, pakta integritas dan sumpah janji yang harus di pahami oleh badan adhoc.

“Tahapan pembentukan nanti kita menyiapkan waktu dan kesempatan

memberikan tanggapan masyarakat terkait perekrutan ini, jika ada yang terlibat dalam pengurus partai politik, belum cukup umur dan tidak memiliki integritas silakan dilaporkan,” kata Tinangon

“Peran dari semua Stakeholder dalam perekrutan maupun setelah perekrutan sangat penting. Kalau perlu diberikan tracking akan perekrutan ini apalagi ketidak netralan badan adhock. Mari bersama kita kawal,” cetusnya.

Salman Saelangi Komisioner yang membidangi Divisi SDM dan Parmas mengatakan tata kerja pembentukan badan adhock walaupun dibuka secara luas dalam perekrutan ini namun pihaknya sangat berhati-hati dalam pembentukan panitia penyelenggara ini.

“Kita memang sangat hati-hati dalam pembentukan badan adhock ini, apalagi terkait batasan umur, juga keterlibatan para calon di partai politik serta ketidak netralan mereka, namun setelah terbentuk nanti akan kita gelar Bimbingan Teknis terkait tugas dan kerja penyelenggara pemilu terkait tahapannya,” imbuhnya.

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/27/12/2019*

Pemda Diminta Longgarkan Pengurusan Suket Sehat Selama Rekrutmen Badan Adhoc

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mendorong KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengaku, setelah diidentifikasi ada beberapa daerah yang berlakukan PAD terhadap surat keterangan (suket) sehat yang dikeluarkan puskesmas.

“Ada daerah yang ternyata surat keterangan sehat PADnya sampai 65 ribu. Ambil berkas 10 ribu. Jadi total 75 ribu. Bayangkan kalau hanya ingin jadi KPPS, belum tentu jadi, sudah keluarkan 75 ribu.



Padahal honor misalnya hanya 800 ribu,” kata Salman.

Untuk itu pihaknya mendorong terus agar itu bisa digratiskan dalam rangka rekrutmen badan ad hoc. “Kasih kalau KPPS juga masih dibebankan seperti itu. Bisa saja peminatnya berkurang,” ucapnya.

Menurut Salman, hal itu, dilakukan karena surat keterangan sehat itu adalah produk baru pada rekrutmen badan ad hoc kali ini. “Memang sebelumnya belum ada. Ini karena meminimalisir kejadian yang terjadi sebelumnya,” tandasnya.

Dikatakannya lagi, KPU kabupaten/kota didorong mengkoordinasi sampai pada level bupati atau wali kota agar dapat kelonggaran di bagian pengurusan surat keterangan sehat. “Sebab ini akan memberatkan bakal calon badan ad hoc untuk mendaftar,” tuturnya.

Dia juga mengaku sudah koordinasi dengan Dinkes provinsi dan dijanjikan akan koordinasi dengan Dinkes di kab/kota untuk menekan anggaran di pemeriksaan kesehatan supaya dikecualikan saat perekrutan badan ad hoc untuk bisa digratiskan,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Antisipasi Masalah Kesehatan Adhoc, KPU Dorong Dinkes Buka Posko

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah mengantisipasi persoalan kesehatan dalam proses perekrutan badan adhoc. Menurut Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi, perekrutan badan adhoc saat ini berbeda dari yang sebelumnya. “Syarat awalnya ada surat keterangan sehat dari rumah sakit,” kata Salman.

Pihaknya juga, menurut Salman, telah mendorong KPU kabupaten/kota dan sudah diawali KPU Provinsi untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan.

“Dimana ketika badan ad hoc terbentuk,

Dinas Kesehatan bisa membuka posko. Kalau belum masuk tahapan padat, bisa lakukan pemeriksaan sebulan sekali. Kalau kegiatan padat, bisa dibuka posko sampai di level minimal tingkat PPS atau kelurahan/desa,” terangnya.

Ketika tahapan padat, lanjutnya, ada posko yang standby. “Saat hari H, posko itu bisa mobile. Itu lebih efektif ketika menangani permasalahan kesehatan yang sempat jadi masalah besar dalam penyelenggaraan pemilu,” jelasnya. Ini, kata dia, sifatnya inisiatif untuk meminimalisir dampak. “Kami harap juga Pemda bisa membantu lewat Dinkes dari sisi anggaran bagi petugas kesehatan yang berjaga di posko tersebut,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Minta Publik Ikut Pantau Rekam Jejak Calon PPK

MANADO - Tahapan perekrutan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sementara berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membuka ruang tanggapan masyarakat untuk melaporkan apabila ada calon PPK yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk menghasilkan PPK yang berkualitas.

Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangal kepada wartawan, (6/2).

Menurutnya, peran publik begitu penting pasca pengumuman calon PPK yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota yang ada di Sulut baru-baru ini.

“Publik perlu memantau rekam jejak para calon PPK, karena saat ini KPU Kabupaten/kota membuka tanggapan dari masyarakat, agar pembentukan Badan Adhoc tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan guna suksesnya Pilkada di Sulut,” ungkapnya.



Tinangon sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen melaksanakan Pilkada yang dengan sukses dan berintegritas. Dimana semua tahapan dilaksanakan sesuai aturan, dan para penyelenggara Pilkada, mulai dari tingkatan propinsi sampai yang terbawah benar-benar bekerja maksimal dan kompeten.

“Karena itu kami mengharapkan publik untuk ikut memantau dan memberikan tanggapan jika ada calon-calon PPK yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada,” tuturnya

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

Monitoring Tes Calon PPS di Daerah Bencana, KPU Sulut Beri Bantuan

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, pekan lalu mengunjungi Bolaang Mongondouw (Bolmong). Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu mengatakan, kedatangan KPU yang dipimpin Ketua Ardiles Mewoh bersama Komisioner Salman Saelangi dan dirinya, untuk monitoring jalannya tes tertulis PPS di sana. \

“Kami monitoring PPS yang ikut tes tertulis susulan. Karena ada 4 desa yang kasusnya kena bencana alam. Jadi tes tertulis diundur,” ujar Lanny kepada Harian Manado.

Dikatakannya, dalam tes susulan tersebut tidak ada yang berbeda. “Tesnya sama saja. Hanya waktu yang diundur. Karena mereka tak bisa hadir saat jadwal tes. Sebab akses jalan tertutup karena longsor,” terangnya.

Selain lakukan monitoring, KPU Sulut juga sempatkan untuk memberikan bantuan untuk korban banjir. Apa lagi lokasi tes itu hanya 1 kilo dengan tempat bencana. “KPU Sulut memberikan bantuan langsung ke posko bencana, termasuk juga kepada staf KPU Sulut di sana,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Tes Tertulis PPS di Daerah Bencana Lancar

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Kamis (12/3) mengunjungi Kabupaten Bolmong Utara. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, kunjungan tersebut untuk lakukan monitoring tes tertulis susulan.

“Kita ke Bolmut untuk memantau tes tertulis susulan,” ujar Ardiles didampingi Komisioner Salman Saelangi.

KPU Sulut, kata dia, dalam pembentukan PPS mengalami kendala karena beberapa waktu lalu di daerah Bolmong dan Bolmut bertepatan dengan tes tertulis, mengalami musibah banjir.

“Untuk dua kabupaten ini yang kecamatan terdampak bencana kita tunda pelaksanaan tes tertulisnya dan ada yang baru dilaksanakan hari ini (kemarin),” terangnya. Menurutnya, dari hasil supervisi, tes tertulis susulan berjalan lancar. “Kita supervisi dan syukur sudah berjalan. Semua calon PPS yang terdampak banjir, turut ambil bagian,” tuturnya. Bertepatan dengan itu, pihaknya juga turut ambil bagian menyerahkan bantuan. “Kita kumpul dari kab/kota lainnya dan diserahkan ke jajaran KPU yang terdampak banjir,” tutup Ardiles.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Lapor Jika Ada Calon PPK Bermasalah!

MANADO - Saat ini KPU sedang lakukan proses tahapan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dan sudah masuk dalam proses seleksi. Masyarakat pun diharapkan bisa berpartisipasi lewat pengawasan calon PPK tersebut dengan memantau rekam jejak calon PPK. Untuk itu, pihak KPU akan memberikan ruang ke publik lewat tanggapan.

“Tanggapan masyarakat dibuka dua kali. Setelah pengumuman seleksi administrasi, kemudian tahap kedua kita akan buka lagi setelah dilaksanakannya wawancara. Hasil



wawancara diumumkan dan kita buka lagi tanggapan masyarakat,” kata Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon.

Menurutnya, ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa berpartisipasi dalam menghasilkan badan ad hoc yang benar-benar sesuai ketentuan.

“Tanggapan masyarakat tersebut disampaikan di KPU kabupaten/kota bisa terkait dengan hal-hal yang menyangkut syarat seperti integritas, rekam jejak dari peserta dan lainnya,” terangnya. Masing-masing KPU kabupaten/kota, kata dia, telah menyiapkan kotak aduan. “Tentu masyarakat menyertakan foto copy KTP. Dan pihak KPU akan menjamin identitas pengadu untuk dirahasiakan,” tuturnya.

Senada dikatakan Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi. Pihaknya, kata dia, akan buka ruang tanggapan untuk masyarakat selama 7 hari. “Jika ada, maka akan dilakukan klarifikasi saat proses wawancara. Kemudian dari 10 peserta akan diumumkan 5 terpilih menjadi anggota PPK,” terangnya.

Tes untuk PPK, lanjutnya, dilakukan secara tertib, terbuka, transparan dan langsung diperiksa. “Hasil nilainya langsung diumumkan dan diawasi langsung ratusan Panwascam dan Bawaslu di 15 Kabupaten/Kota,” ujarnya. Tes yang menggunakan CAT langsung bisa diketahui hasil dan nilai. Dan itu, kata dia, berlaku untuk peserta yang tes gunakan metode manual.

Lanjutnya, setelah mendapatkan sepuluh besar, peserta akan masuk pada proses wawancara.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Terkait Perekrutan PPK, Publik Diajak Pantau Trackrecord PPK

MANADO- Tahapan perekrutan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Propinsi dan Kabupaten/kota tahun

2020 sementara berlangsung. Publik diminta ikut memantau rekam jejak para calon PPK.

Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).

Menurut dia, peran publik sangat penting pasca pengumuman calon PPK yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota yang ada di Sulut baru-baru ini.

“Publik perlu memantau rekam jejak para calon PPK, karena saat ini KPU Kabupaten/kota membuka tanggapan dari masyarakat, agar pembentukan Badan Adhoc tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan guna suksesnya Pilkada di Sulut,” ungkapnya.

Tinangon sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen melaksanakan Pilkada yang dengan sukses dan berintegritas. Dimana semua tahapan dilaksanakan sesuai aturan, dan para penyelenggara Pilkada, mulai dari tingkatan propinsi sampai yang terbawah benar-benar bekerja maksimal dan kompeten.

“Karena itu kami mengharapkan publik untuk ikut memantau dan memberikan tanggapan jika ada calon-calon PPK yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada,” tutup mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Penerbit: *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*

KPU Sulut Berharap Pemeriksaan Kesehatan dan Penerbitan Surat Sehat Calon Badan Adhoc Gratis

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik Kabupaten/Kota kini tengah buka perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang bertugas di tingkat desa maupun kelurahan.

Terkait perekrutan calon PPS, KPU Sulut berharap Pemerintah Sulawesi Utara menunjang tahapannya terlebih bagi



kabupaten dan kota yang punya instansi kesehatan baik rumah sakit juga puskesmas di setiap kecamatan dalam pemeriksaan kesehatan dan penerbitan Surat Keterangan Sehat bagi calon pelamar.

“Setiap daerah mempunyai nominal yang berbeda dalam pemungutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bahkan ada yang sampai Rp75 ribu. Padahal cuma surat keterangan berbadan sehat,” kata Koordinator Divisi SDM KPU Sulut Salman Saelangi.

Dijelaskannya, nominal yang diminta ini tidak sesuai dengan upah yang bakal diterima nanti saat masuk sebagai bagian dari badan adhoc.

“Inikan baru pendaftaran. Nah kalau sudah diminta sampai Rp75 ribu kan kasihan disamping itu belum tentu juga yang bersangkutan lolos sebagai PPS. Kalaupun berhasil lolos, berapa sih honor mereka,” terangnya sembari meminta pihak rumah sakit maupun puskesmas tidak pungut biaya akan pemeriksaaan kesehatan serta pengeluaran surat keterangan sehat.

“Kita mendorong pihak rumah sakit maupun puskesmas untuk menggratiskan akan pemeriksaan kesehatan dan pengeluaran surat keterangan bagi mereka yang mau mendaftar sebagai PPS maupun KPPS nanti,” pintanya.

Sementara terkait permasalahan ini, KPU Republik Indonesia telah menggelar kerja sama dengan kementerian kesehatan Republik Indonesia.

“Kita sudah melakukan kerja sama dengan pihak kementerian kesehatan, dan didalamnya terkait perekrutan badan adhoc mulai PPK, PPS dan KPPS. Di sana sepakati pemeriksaan kesehatan dan pengurusan berkas berupa surat keterangan sehat tidak dipungut biaya,” jelas Komisioner KPU RI Ilham yang memegang Divisi SDM dalam Coffe morning bersama wartawan, Selasa (12/02).

Adapun tahapan perekrutan PPS Pilkada 2020 ini sudah di buka sejak tanggal 15

februari yang lalu dan bakal berakhir 24 februari mendatang serta lamaran dan pemasukan berkas dibawah langsung calon pelamar ke KPU Kabupaten dan Kota dimana yang bersangkutan berdomisili.

Penulis: *Noldy Kaeng*
Sumber: *Sulutpos.com/21/02/2020*

Rekrutmen Badan Adhoc, KPU RI: Standarisasi Sudah Jelas!

MANADO - Dalam perekrutan badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menerangkan bahwa pihaknya memang harus punya standar yang berbeda dengan Bawaslu. “Kalau Bawaslu akumulasi. Kalau kita, sudah di bawah standar tidak kita luluskan,” kata Ilham dalam coffee morning, Rabu (19/2) di Manado.

Diterangkannya, jika di tahap selanjutnya tak muncul nama peserta tersebut, mungkin saja dalam wawancara atau ada rekomendasi Bawaslu terlibat dalam partai, timsus atau pernah ikut dua periode. “Atau dalam wawancara mungkin teman-teman di KPU kab/kota merasa belum mampu untuk jadi anggota PPK. Jadi standarisasi sudah jelas,” tegasnya.

Rekrutmen badan adhoc, lanjutnya, tak bisa dibandingkan dengan rekrutmen panwascam. Sebab punya aturan sendiri.

“Kita punya standar lain yang harus kemudian diberlakukan. Standarisasi sudah punya. Ada di PKPU dan juknis sudah ada,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey* Sumber: *Harian (Radar) Manado* Adhoc Diaktifkan, Tahapan Pilkada Dilanjutkan

MANADO—Kurang lebih tiga bulan tahapan pemilihan ditunda akibat Covid 19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut pun akhirnya membuka kembali tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur plus pemilihan 8 Kabupaten/Kota.



“Tahapan Pilkada lanjutan sudah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Terkait PKPU ini kami segera sosialisasikan,” ungkap Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewioh, Senin (15/6).

Sebelumnya, KPU, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Bawaslu dan DKPP dalam rapat dengar pendapat 27 Mei 2020 serta berdasarkan atas saran dan masukan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, memutuskan bahwa Pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020. “Mengingat ini telah menjadi keputusan di DPR, maka KPU sebagai pelaksana Undang-undang harus melaksanakan keputusan tersebut dengan syarat tetap menjalankan sesuai protokol Covid-19 pada setiap tahapan Pemilihan. Dan KPU Provinsi pada dasarnya tetap berkoordinasi, menunggu petunjuk selanjutnya dari KPU RI,” ujar Mewoh.

Mewoh menyampaikan, karena Pandemi Covid 19 masih berlangsung, maka jajaran KPU wajib menerapkan protokol kesehatan saat menjalani tahapan. “Kita harus bersiap menjalankan tanggung jawab tahapan dengan prosedur yang berbeda dibanding tahapan sebelum Covid 19,” ujarnya.

Menurut Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan beberapa tahapan akan dijalani. Mulai dari diaktifkan kembali badan ad hoc yakni PPK dan PPS. “Kemudian menyusun daftar pemilih, serta melakukan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan. Dalam tahapan Pilkada lanjutan ini dituntut kesiapan kita sebagai penyelenggara dengan mengupayakan metode dan strategi baru,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara itu.

Salman Saelangi, Ketua Divisi SDM, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan, sosialisasi pemilihan juga tak bisa dikesampingkan. Dilakukan bimtek kepada jajaran penyelenggara baik metode langsung maupun tidak langsung.

“Nantinya dilakukan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

masyarakat umum mengenai tahapan, program dan jadwal serta proses penyusunan data pemilih dalam pemilihan lanjutan 2020. Harapan, dengan semakin masif sosialisasi, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2020,” kata Salman.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentar*

Rakor KPU Sulut, Mewoh Ingatkan Kerja Sesuai Regulasi dan Kode Etik Penyelenggaraan

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020, selama 3 hari sejak 6-8 Agustus 2020 di Mercure Tateli Beach Hotel, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.

Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti Komisioner Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan dan Data serta Kasubag Hukum utusan 15 KPU Kabupaten/Kota tersebut.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, SIP, M.Si, pada hari Kamis 6 Agustus 2020.

Dalam sambutannya Ardiles Mewoh meminta jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sesuai regulasi dan kode etik penyelenggara pemilu.

“Wajib hukumnya, bagi setiap penyelenggara Pemilu menjalankan tugas berpedoman pada regulasi dan pedoman kode etik dan perilaku,” ucap Mewoh.

Lebih lanjut, Mewoh menambahkan terlebih dalam penanganan pelanggaran administrasi “Itu pun harus kita laksanakan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan,” ungkap Mewoh dalam sambutan pembukaan.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*



Pembentukan Badan Adhoc Pilkada 2020 Dievaluasi

MANADO - Pembentukan badan adhoc dievaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam rapat koordinasi (Rakor) selama 3 hari di Bogor dengan mengumpulkan Komisioner KPU yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, Anggota KPU RI Ilham Saputra menekankan pentingnyaantisipasi meminimalisir kesalahan badan adhoc dalam bertugas.

“Dengan adanya evaluasi, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dapat memiliki data base terkait keanggotaan badan adhoc.

Sehingga data base tersebut dapat digunakan untuk menjadi rekomendasi dalam pembentukannya di kemudian hari,” kata Ilham.

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi juga mengingatkan jika badan ad hoc khususnya KPPS, memiliki tambahan tugas baru yakni pengaplikasian Sistem Informasi Rekapitulasi Berbasis Elektronik (Sirekap).

“Oleh karena itu saya berpesan agar bekal pengetahuan melalui bimtek yang diberikan petugas KPPS bisa dilakukan lebih efektif.

Mengingat sempitnya waktu persiapan,” ujarnya.

Anggota KPU RI, Viryan mengusulkan jika bimtek yang dilakukan untuk KPPS dengan cara berkelanjutan dan masif. “Pra bimtek dapat dilaksanakan dengan cara sederhana dengan membuat grup WhatsApp anggota KPPS untuk proses penyebaran informasi yang lebih masif termasuk Sirekap dan juga menggunakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan,” tutur Viryan.

Sementara itu, KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, isu-isu penting yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah daftar inventaris masalah untuk pembentukan badan ad hoc dan penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc.

“Sebagaimana diketahui, KPU saat ini sedang dalam proses pembentukan KPPS bahkan ada beberapa kabupaten/

kota sedang melaksanakan rapid test bagi anggota KPPS terpilih,” ujarnya.

Terkait kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS yang telah diserahkan kepada KPU kabupaten/kota, Tinangon menyebutkan bahwa sedang diupayakan optimalisasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

“KPU provinsi diminta memantau dan mengasistensi penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc oleh KPU kabupaten/kota. Ini semua untuk mengawal pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Sebentar Lagi Honor PPDP Cair

MANADO — Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Sulut akan segera dibayarkan.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menuturkan pihaknya kini sedang menunggu laporan terkait hasil kinerja PPDP, setelah itu akan langsung memberikan hak para petugas pencocokan dan penelitian (Coklit) ini.

“Kalau semua sudah selesai dan laporan rampung, segera kami bayarkan. Yang pasti dalam waktu dekat ini,” kata Ardiles Mewoh kepada BeritaManado.com, Rabu (19/8/2020).

Menurut Ardiles, pembayaran honor kepada petugas PPDP di delapan daerah non penyelenggara pilkada sudah lebih dulu diberikan.

Ia pun berharap dalam proses pembayaran nanti, para komisioner KPU bisa langsung memantau. “Sebisa mungkin honor diberikan langsung kepada yang bersangkutan,” katanya.

Ardiles menambahkan, saat ini jajaran KPU sedang fokus melakukan kroscek dan membenahan perihal masalah hasil coklit yang menjadi temuan Bawaslu RI.



Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Tutup Rakor KPU Sulut, Salman Ingatkan Soal Kode Etik dan Sumpah Badan Adhoc

MANADO - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selama 3 hari sejak 6-8 Agustus 2020 resmi ditutup.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Rapat kordinasi (Rakor) ditutup oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Parmas Salman Saelangi, S.Kel pada, Sabtu 8 Agustus 2020.

Sebelumnya Salman Saelangi dalam materinya memantapkan pemahaman tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Badan Adhoc yang menjadi kewenangan KPU kabupaten/Kota.

“Kami berharap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan secara prosedural, serta di masa pandemic saat ini tetap memedomani dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dalam menjalankan tugas,” harap Salman yang selanjutnya menutup serangkaian kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

KPPS Ujung Tombak Pilkada di Tengah Pandemi Covid

MANADO - Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terus disemangati dan mendapat arahan sebelum laksanakan tugas. Sebab, di tempat pemungutan suara (TPS) nanti, suasana akan sedikit berbeda. Dikarenakan

adanya penerapan protap kesehatan untuk pencegahan virus covid 19.

Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, KPPS adalah ujung tombak Pilkada. “Mereka akan melayani pemilih menggunakan hak pilih sekalipun di masa pandemi,” ujarnya. Dijelaskan Tinangon, KPPS yang direkrut KPU wajib mengikuti rapid test. Jika hasilnya reaktif, maka dilanjutkan dengan uji SWAB. “Jika hasilnya ada yang positif Covid-19, mereka nantinya dilakukan penanganan oleh petugas dan tentu saja tidak bisa melaksanakan tugas sebagai KPPS. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari protokol pencegahan Covid 19,” terangnya.

Jika ada 1 atau 2 KPPS yang tiba-tiba di hari H tidak bisa melaksanakan tugas, dia menjelaskan, bilamana kondisi tersebut, terjadi maka Ketua KPPS melakukan pembagian tugas diantara anggota KPPS lainnya. “Jika lebih dari 2 KPPS yang tidak bisa melaksanakan tugas, maka akan dilakukan penggantian anggota KPPS,” tandasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Tinangon Ingatkan Ini di Rakor KPU Sulut

MANADO - Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si, menyebutkan rapat koordinasi kali ini banyak memberikan penekanan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sebagai tahapan yang sedang dijalankan oleh jajaran KPU hingga PPDP.

“Ada beberapa rekomendasi pelanggaran administrasi yang diterima PPK atau KPU kabupaten/Kota, karenanya KPU kabupaten/ Kota perlu dibekali dengan kompetensi



penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi jajaran Bawaslu,” ungkap Tinangon.

Lebih lanjut dalam materinya Tinangon memaparkan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan tugas, kewenangan di semua tahapan Pemilihan.

“Secara umum penanganannya harus melalui tahap, pencermatan isi rekomendasi, klarifikasi, penyusunan kronologis dan telaahan, penetapan keputusan hingga pengumuman dan pelaporan,” tutur Tinangon mantan Ketua KPU Kabupaten Minahasa.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sulut Ikut Sukseskan Pembentukan Badan Adhoc

BOGOR -- Anggota KPU dari 32 Provinsi yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), hadir dalam kegiatan rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan Adhoc yang digelar oleh KPU RI, di Hotel Aston, Bogor (10-11/11/2020). Rapat koordinasi bersama anggota KPU dari 32 Provinsi digelar untuk menyikapi telah berlangsungnya sejumlah tahapan pembentukan badan Adhoc. Kegiatan yang digelar selama tiga hari, dibuka langsung oleh anggota KPU RI Divisi SDM, Ilham Saputra.

Dalam pembukaannya Saputra menekankan pentingnya kegiatan di masa tahapan ini sebagai antisipasi dalam meminimalisir kesalahan badan Adhoc dalam bertugas, juga dapat menghimpun masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi badan Adhoc selama ini.

“Dengan adanya evaluasi, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dapat memiliki data base terkait keanggotaan badan Ad-Hoc, sehingga data base tersebut dapat digunakan untuk menjadi rekomendasi

dalam pembentukannya dikemudian hari,” kata Ilham.

KPU Sulut yang diwakili oleh Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Yafeth Tinangon, hadir dalam kegiatan bersama KPU RI.

Terkait evaluasi pembentukan badan Adhoc menurut Tinangon, isu-isu penting yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah daftar inventaris masalah untuk pembentukan badan Ad-Hoc dan penanganan pelanggaran kode etik badan Adhoc.

“Sebagaimana diketahui KPU saat ini sedang dalam proses pembentukan KPPS bahkan ada beberapa kabupaten/kota hari ini sedang melaksanakan rapid test bagi anggota KPPS terpilih,” jelas Tinangon

Sedangkan untuk kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, Tinangon menyebutkan bahwa sedang diupayakan optimalisasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. KPU provinsi diminta memantau dan mengasistensi penanganan pelanggaran kode etik badan Adhoc oleh KPU Kabupaten/Kota. “Ini semua untuk mengawal Pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” kata Tinangon.

Rakor ditutup oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Dalam arahannya Arif menegaskan bahwa dirinya optimis jika persoalan-persoalan dalam setiap tahapan bisa diselesaikan. (*)

Penulis: *Jellina Najoa*
Sumber: *sulutreview.com*

KPU Komitmen Tegakkan Kode Etik, 74 Badan Adhoc Diproses dan 26 Diberhentikan Tetap

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak Badan Adhoc baik PPK, PPS dan KPPS



yang keluar dari aturan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Ini disampaikan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy. Y. Tinangon lewat rilis group Whatsapp, Senin (7/12/2020).

Menurut salah satu Komisioner KPU Sulut ini, data yang dihimpun oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut sejak dibentuknya PPK, PPS dan KPPS sampai H-2 tanggal 6 Desember 2020, KPU Kabupaten/Kota telah menangani 74 dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pilkada khususnya Badan Adhoc.

“Dari 74 orang yang diproses, sebanyak 40 orang terbukti melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi, yaitu sebanyak 26 orang diberikan sanksi pemberhentian tetap dan 14 orang diberikan peringatan tertulis. Sedangkan 4 orang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan direhabilitasi,” sebut Tinangon.

Sementara itu lanjut Tinangon, masih ada 17 orang yang sementara diproses dan 13 kasus tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi.

“Dari 74 orang yang ditangani, Kabupaten Minsel paling banyak menangani dugaan pelanggaran yaitu sebanyak 36 orang yang sebagian besar yaitu 35 kasus ditangani dengan mekanisme pengawasan internal dan hanya 1 yang diproses berdasarkan laporan Pelapor.

“Menyusul Kabupaten Minsel, adalah Kota Tomohon dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang masing-masing menangani 9 kasus,” urai Tinangon.

Data yang dihimpun, nampak bahwa mekanisme pengawasan internal oleh KPU telah berjalan dengan efektif. Dari 74 kasus, ada 73 kasus hasil pengawasan internal termasuk di dalamnya tindak lanjut rekomendasi jajaran Bawaslu.

“Kami berharap kasus yang masih ditangani bisa segera dituntaskan. Dan

yang terpenting data-data ini menunjukkan bahwa KPU se-Sulut komitmen menegakkan integritas penyelenggara Pemilu,” tegas Tinangon lewat rilisnya di group Whatsapp.*

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *cintasulut.com*

26 Oknum Penyelenggara Pemilu Diberhentikan, KPU Komit Tegakkan Integritas

MANADO--Sanksi tegas tak tanggung-tanggung diberikan kepada penyelenggara pemilu tingkat bawa. Baik panitia pemungutan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sanksi tersebut diberikan karena melanggar kode etik dan kode perilaku badan ad hoc.

Menurut Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon, data yang dihimpun oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, sejak dibentuknya PPK, PPS dan KPPS sampai pada tanggal 6 Desember 2020, KPU kabupaten/kota telah menangani 74 dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada, khususnya badan ad hoc.

“Dari 74 orang yang diproses, sebanyak 40 terbukti melakukan pelanggaran. Dan diberikan sanksi yaitu sebanyak 26 orang diberhentikan tetap dan 14 orang diberikan peringatan tertulis. Sedangkan 4 orang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan direhabilitasi,” paparnya.

Sementara itu, masih ada 17 orang yang sementara diproses. Dan 13 kasus tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi.

“Dari 74 orang yang ditangani, Kabupaten Minsel paling banyak menangani dugaan pelanggaran, yaitu sebanyak 36 orang yang sebagian besar yaitu 35 kasus ditangani dengan mekanisme pengawasan internal dan hanya 1 yang diproses berdasarkan laporan pelapor,” bebernya.



Selain Minsel, Kota Tomohon dan Kabupaten Bolaang Mongondow masing-masing menangani 9 kasus. “Dari data yang dihimpun, nampak bahwa mekanisme pengawasan internal oleh KPU telah berjalan dengan efektif. Dari 74 kasus, ada 73 kasus hasil pengawasan internal termasuk di dalamnya tindak lanjut rekomendasi jajaran Bawaslu,” terangnya.

Dirinya berharap kasus yang masih ditangani bisa segera dituntaskan. “Dan yang terpenting data-data ini menunjukkan bahwa KPU se Sulut komitmen menegakkan integritas penyelenggara pemilu,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU RI Serahkan Santunan KPSS di Minahasa

MANADO - Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra, Kamis (18/2) dalam kunjungan ke Sulawesi Utara melaksanakan dua agenda penting. Pertama di hotel Four Point Manado, Ilham menyerahkan SK CPNS KPU Formasi 2019 dihadapan Sekretaris dan Kabag SDM 34 Provinsi se Indonesia.

Didampingi Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Ilham menyerahkan secara simbolis SK untuk CPNS sejumlah 714 orang, dari jumlah tersebut 16 Satker KPU Se Sulut kebagian jatah sejumlah 22 orang.

SK tersebut secara simbolis diterima perwakilan sekretaris KPU masing-masing Sekretaris KPU Jatim, Sumut, Papua Barat dan sekretaris KPU Sulut, Pujiastuti.

Dalam kesempatan tersebut Ilham berpesan kepada CPNS KPU untuk meningkatkan kompetensi.

“Pahami regulasi dan kerjalah penuh integritas,” tegas Ilham.

Usai serahkan SK CPNS, sorenya Ilham didampingi Komisioner KPU Sulut dan KPU Minahasa, bertempat di Kelurahan Paleloan Tondano Selatan menyerahkan

santunan kepada Milly Tatilu salah seorang KPSS yang menderita sakit stroke disaat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pilgub Sulut 2020.

Dalam kesempatan tersebut, usai menyerahkan santunan sebesar 30.800.000 rupiah secara simbolis, Ilham memberikan apresiasi dan terimakasih atas pengabdian sebagai penyelenggara Pilkada.

Santunan tidak diterima secara tunai, tetapi ditransfer ke rekening penerima santunan. Diserahkan juga dalam kesempatan tersebut santunan untuk 1 orang penyelenggara di Lembean Timur dan 1 orang di Bolaang Mongondow Utara.

Pada kesempatan itu, tak lupa Ilham dan rombongan mendoakan ibu Milly. Doa dipimpin Sym Meidy Malonda, Sekretaris KPU Minahasa.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

Ketua KPU RI Serahkan SK CPNS se-Indonesia dan Santunan Intuk KPSS di Minahasa

MANADO -- Kunjungan kerja Ilham Saputra Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Sulawesi Utara pada, Kamis (18/2/2021) mengikuti dua agenda penting yaitu menyerahkan SK CPNS Formasi 2019 kepada Sekretaris dan Kabag SDM di 34 Provinsi se Indonesia. Didampingi Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Ilham menyerahkan secara simbolis SK untuk 714 CPNS yang diwakili oleh perwakilan sekretaris KPU masing-masing Sekretaris KPU Jatim, Sumut, Papua Barat dan sekretaris KPU Sulut. Pujiastuti dimana KPU Sulut kebagian jatah 22 “Pahami regulasi dan dapat melaksanakan tugas dengan penuh integritas,” kata Saputra saat menyampaikan sambutannya,” tegas Ilham.

Dalam agenda kunjungan kerja ke Sulut kali ini, Saputra juga menyerahkan santunan sebesar Rp 30.800.000 kepada Melly



Tatilu salah seorang petugas KPPS yang terserang stroke saat melaksanakan tugas pada Pilkada Gubernur 2020 lalu sebagai penyelenggara di Kelurahan Paleloan Tondano Selatan.

Santunan tidak diterima secara tunai, tetapi ditransfer ke rekening penerima santunan. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan santunan untuk 1 orang penyelenggara di Lembean Timur dan 1 orang di Bolaang Mongondow Utara. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Diterbitkan : *sulutnews.com (18/2/2021)*

KPU Sulut Ikut Sukseskan Pembentukan Badan Ad-Hoc

BOGOR -- Anggota KPU dari 32 Provinsi yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), hadir dalam kegiatan rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan Ad-Hoc yang digelar oleh KPU RI, di Hotel Aston, Bogor (10-11/11/2020). Rapat koordinasi bersama anggota KPU dari 32 Provinsi digelar untuk menyikapi telah berlangsungnya sejumlah tahapan pembentukan badan Ad-Hoc. Kegiatan yang digelar selama tiga hari, dibuka langsung oleh anggota KPU RI Divisi SDM, Ilham Saputra.

Dalam pembukaannya Saputra menekankan pentingnya kegiatan di masa tahapan ini sebagai antisipasi dalam meminimalisir kesalahan badan Ad-Hoc dalam bertugas, juga dapat menghimpun masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi badan Ad-Hoc selama ini.

“Dengan adanya evaluasi, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dapat memiliki data base terkait keanggotaan badan Ad-Hoc, sehingga data base tersebut dapat digunakan untuk menjadi rekomendasi dalam pembentukannya dikemudian hari,” kata Ilham.

KPU Sulut yang diwakili oleh Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Yafeth Tinangon, hadir dalam kegiatan bersama KPU RI.

Terkait evaluasi pembentukan badan Ad-Hoc menurut Tinangon, isu-isu penting yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah daftar inventaris masalah untuk pembentukan badan Ad-Hoc dan penanganan pelanggaran kode etik badan Ad Hoc.

“Sebagaimana diketahui KPU saat ini sedang dalam proses pembentukan KPPS bahkan ada beberapa kabupaten/kota hari ini sedang melaksanakan rapid test bagi anggota KPPS terpilih,” jelas Tinangon

Sedangkan untuk kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, Tinangon menyebutkan bahwa sedang diupayakan optimalisasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. KPU provinsi diminta memantau dan mengasistensi penanganan pelanggaran kode etik badan Ad-Hoc oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Ini semua untuk mengawal Pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” kata Tinangon. Rakor ditutup oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Dalam arahannya Arif menegaskan bahwa dirinya optimis jika persoalan-persoalan dalam setiap tahapan bisa diselesaikan. (*)

Penulis : *Jellina Najooan*

Diterbitkan : *sulutreview.com*





Epilog

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Badan Penyelenggara Pemilu membentuk badan Ad-hoc, yang mana di dalamnya ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Badan Ad-hoc ini menjadi salah satu ujung tombak KPU, suksesnya pilkada serentak tahun 2020 di lapangan.

Oleh karena itu KPU Sulut, melakukan perekrutan dan pembentukan Badan Ad-hoc tersebut, mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota. 72.478 orang Ad-hoc yang dilantik pada Pilkada tahun 2020 ini.

KPU memfasilitasi dengan menggelar bimtek bagi para petugas Ad-hoc ini, sehingga yang akan bertugas nanti adalah orang-orang yang profesional, berkualitas dan memiliki track record yang baik. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020, digelar di tengah-tengah pandemi Covid-19, sehingga para anggota Ad-hoc harus di Rapid Test, di Swab dan harus memiliki surat keterangan terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan, yang artinya semua anggota Ad-hoc yang bertugas berbadan sehat dan bebas dari virus Covid-19.

Penulis : *Jellina Najoa*

Sumber : *sulutreview.com*



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab III

Mengolah Data Pemilih





Mengelolah Data Pemilih

Isu Data Pemilih Kalah Populer

MANADO—Isu daftar calon kepala daerah ternyata mengalahkan tahapan yang tak kalah penting yakni pemutakhiran data. Hal itu disampaikan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh di kegiatan Work Shop Diseminasi dan Uji Publik Juknis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Rangka Pilkada Sulut yang digelar 18-19 Desember 2019 di salah satu hotel di Manado.

Menurutnya, pemutakhiran data pemilih adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Namun kenyataannya, data pemilih ini kalah populer dengan isu daftar calon. Sebab daftar calon saat ini mulai beredar dan menjadi isu publik yang hangat,” ujarnya. Dikatakannya, isu data pemilih nantinya akan populer atau mulai jadi perhatian publik mendekati hari pemungutan suara.

“Karena bisa jadi ada ribut-ribut soal kenapa namanya (pemilih) tidak terdaftar. Padahal tahapan ini sudah dimulai jauh-jauh hari,” terang Ardiles. Pemutakhiran data pemilih adalah tahapan paling panjang dalam pemilihan. Makanya dari sekarang, kata dia, pihaknya punya keinginan dalam menyusun data pemilih agar sudah menjadi perhatian publik, sehingga tidak ada yang terlewatkan.

“Bagi kami, mau tidak mau, harus kami persiapkan untuk melaksanakan tahapan ini,” ucapnya. Dirinya berharap, dalam forum work shop itu bisa memberikan masukan ide, gagasan. “Sehingga sedapat mungkin

kami bisa tuangkan dalam kerangka evaluasi,” ucapnya.

Dibeberkan, banyak catatan terkait tahapan data pemilih yang selalu terjadi setiap pemilihan. “Dan mungkin saja nantinya ada persoalan baru yang muncul. Persoalan yang sering muncul yakni isu pemilih ganda, tak memenuhi syarat dan lainnya. Isu ini bisa saja akan muncul. Sedapat mungkin sejak dari sekarang kami akan meminimalisir potensi persoalan. Sehingga tahapan bisa terlaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Ditambahkan Ardiles, ada tiga hal prinsip data pemilih. “Pertama, daftar pemilih harus akurat. Apalagi menyangkut nama orang, tempat tinggal. Kemudian kedua, harus komprehensif. Maksudnya, yang punya hak pilih harus terdaftar. Sepanjang memenuhi syarat. Yang ketiga, mutakhir. Yang paling baru dan terupdate. Jadi harus mutakhirkan,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Memasukkan Nama di Sidalih Bukan Gampang

Bisa Diakses Masyarakat Melalui Aplikasi

MANADO—Memasukkan nama pemilih di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidaklah mudah. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus kerja keras untuk memastikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih.



“Soal Sidalih prosesnya tidak mudah. Ada proses mekanisme yang harus dilalui oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di tingkat paling bawa,” kata Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu.

Menurutnya, daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) sudah diserahkan dari Kemendagri kepada KPU RI 23 Januari. Setelah itu ada proses sinkronisasi oleh KPU RI.

“Kemudian DP4 akan diturunkan ke KPU provinsi dan kami akan serahkan ke kab/kota untuk pemeriksaan kembali/sinkronisasi antara DP4 dan data pemilih terakhir,” terangnya. Setelah sinkronisasi, diserahkan kembali ke kab/kota, kemudian ada proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. “Kami akan menunjuk PPDP yang akan turun ke rumah-rumah memastikan bahwa sudah masuk sebagai pemilih atau tidak. Data yang diterima PPDP akan diserahkan ke PPS,” paparnya.

Sebelum masuk DPS (daftar pemilih sementara), akan lalui rekapan di tingkat PPS. Setelah itu diserahkan ke PPK dan rekap lagi selanjutnya berjenjang sampai di provinsi.

“Sebelum pleno kita akan uji publik. Agar semua masyarakat tahu terdaftar atau tidak. Kemudian pleno tingkat berjenjang. Setelah daftar pemilih jadi, kita akan turunkan lagi jika ada tahapan pembetulan atau masukkan. Baru kemudian ditetapkan DPS,” jelasnya.

Proses menetapkan DPS sampai DPT ada pleno di bawahnya. Proses ini, kata dia, akan dihubungkan semua dan diserahkan ke stakeholder untuk memeriksa bersama daftar pemilih. “Baru kemudian dimasukkan ke Sidalih yang bisa diakses oleh masyarakat atau aplikasi dengan memasukkan nomor KTP untuk melihat terdaftar dimana dan TPS mana. Jadi proses Sidalih bisa diakses oleh masyarakat,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

18 April KPU Lakukan Coklit

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serentak se Indonesia akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pada 18 April. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu berharap agar tahapan tersebut bisa tersosialisasikan ke masyarakat sebelum ada tim yang turun ke lapangan. “Kami harap bisa tersosialisasikan mengenai pemutakhiran tahun ini,” ujarnya. Petugas coklit, kata dia, nantinya akan datang ke rumah masyarakat mendata satu persatu. “Jangan sampai nanti petugas diusir atau ditutupin pintu,” ucapnya. Dijelaskannya, pihaknya akan menunjuk PPDP yang nantinya turun ke rumah-rumah memastikan bahwa masyarakat di data tersebut sudah masuk sebagai pemilih atau tidak. “Data yang diterima PPDP akan diserahkan ke PPS,” kata Lanny.

Sebelum masuk DPS (daftar pemilih sementara), akan lalui rekapan di tingkat PPS. Setelah itu diserahkan ke PPK dan rekap lagi selanjutnya berjenjang sampai di provinsi.

“Sebelum pleno kita akan uji publik. Agar semua masyarakat tahu terdaftar atau tidak. Kemudian pleno tingkat berjenjang. Setelah daftar pemilih jadi, kita akan turunkan lagi jika ada tahapan pembetulan atau masukkan. Baru kemudian ditetapkan DPS,” paparnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Jelang Pilkada Serentak 2020, KPU Akan Lakukan Coklit Data Pemilih

MANADO—Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk memastikan data pemilih untuk memastikan data pemilih yang akurat.



Jadi, pastikan diri anda terdaftar sebagai pemilih.* (adv)

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *ciintasulut.com/ July 17, 2020*

15 Juli-13 Agustus KPU Coklit Data Pemilih

MANADO- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selang waktu selama 15 Juli-13 Agustus akan lakukan kunjungan secara langsung door to door akan door to door untuk dilakukannya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 nanti.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Lanny Ointu menjelaskan, sebelum PPDP turun lapangan, mereka sudah dilakukan rapid test.

“Petugas yang turun lapangan sudah rapid test serta telah dipastikan non reaktif, sebab seluruh petugas yang bekerja di lapangan kami jaga baik aspek kesehatan dan keselamatan,” ucapnya di ruang kerjanya.

Komisioner KPU Sulut itu pun mengimbau saat turun lapangan, jangan ada kekhawatiran lagi terhadap masyarakat. Apalagi berhadapan dengan stigma masyarakat.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ini, sebutnya telah dibekali dengan alat pelindung diri (APD) ketika datang ke masyarakat untuk lakukan coklit. Seperti masker, face shield, hand sanitizer, tisu alat tulis masuk dalam berkas.

“Terapkan dan ikuti protokol kesehatan Covid-19, semua itu tidak boleh tertukar. Masing-masing punya sendiri. Secara aspek sudah oke dan siap,” paparnya.

Dirinya berharap masyarakat bisa terima PPDP untuk sukseskan pilkada. Dan masyarakat juga bisa cek ke aplikasi www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id serta hotline nomor telkomsel di 081143300700, apakah sudah terdaftar atau tidak.

Lebih lanjut, menurutnya pihak KPU juga memastikan setiap tahapan akan dilakukan rapid test. “Baik dari KPU provinsi sampai di badan adhoc paling bawah,” imbuhnya.

Diketahui, jumlah PPDP sama seperti jumlah tempat pemungutan suara (TPS), yakni 5.790. Per TPS itu ada satu PPDP

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

Lanny Ointu:

Data 1,9 Juta Pemilih Sulut Perlu Diupdate

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak 1.987.876 pemilih.

Jumlah tersebut belum terintegrasi dengan baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sehingga perlu diupdate.

“KPU kini sedang melakukan perbaikan terkait dengan anomali-anomali dari status kependudukan yang ada dengan Disdukcapil agar data pemilih dapat tersinkronisasi dengan baik,” kata Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, dalam program Sekolah Baku Beking Pande, yang digagas Bawaslu Sulut, baru-baru ini.

Untuk pemilih baru sebagai pemilih akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) sampai pada tanggal 9 Desember 2020.

Adapun PPDP dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih harus sesuai dengan Pasal 25 PKPU Nomor 19 Tahun 2019.

Selanjutnya Surat Edaran KPU Nomor 20 Tahun 2020 menjelaskan terkait penerapan physical distancing saat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran KPU dalam melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2020.



“Pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, kita sebagai penyelenggara pemilu selain harus tertib dengan regulasi yang ada juga harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19, karena sebagai penyelenggara pemilu di tahapan cokolit data pemilih, pastinya akan bertemu dengan pemilih secara langsung,” jelas Lanny.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Mewoh:

Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Terbuka Untuk Publik

MANADO—Untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2029, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sangat terbuka dalam hal pemutakhiran data pemilih. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Mewoh menjelaskan, terkait dengan keterbukaan pemutakhiran daftar pemilih, prinsipnya KPU itu terbuka terhadap publik dan termasuk pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang.

“KPU menyiapkan website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. Di situ terdapat jumlah pemilih dalam daftar A.KWK yang akan dicoklit KPU melalui PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih),” jelas Mewoh, Kamis (23/7).

Sedangkan mengenai permintaan A.KWK, KPU sudah lakukan kajian internal dalam KPU, bahwa dalam dokumen tersebut terdapat informasi data pemilih yang di dalamnya ada unsur-unsur data pribadi penduduk.

“Menurut undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan (adminduk), itu wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya. Itu prinsip utamanya. Sehingga tidak semua pihak bisa mengakses,” ucapnya.

Bagi jajaran KPU saja baik PPS dan PPDP, dilarang untuk memfoto, meminda atau menggandakan, termasuk menyalin dalam bentuk soft file. Sebab, dalam formulir model A.KWK merupakan administrasi yang didalamnya terdapat informasi data pribadi penduduk yang menurut peraturan harus disimpan dan dilindungi.

“Sehingga KPU menerbitkan surat keputusan KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A.KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan,” tambah Mewoh.

Lanjut Mewoh, dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut.

“Tapi bukan berarti pengawasan tertutup. Pengawasan tentu bisa dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses cokolit. Itu maksudnya,” tandasnya.

Secara kelembagaan, lanjutnya, KPU punya kewajiban melindungi data pribadi dari pemilih. Kalaupun data tersebut bisa diambil, tentu dengan catatan dalam SK tersebut itu harus ada persetujuan Kementerian terkait.

“Bisa diambil, tapi harus ada izin, persetujuan dari kementerian yang mengelola terkait administrasi kependudukan,” ungkapnya.

Data pemilih tersebut juga bisa dicek di website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. Di situ merupakan tempat lakukan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum. “Ada daftar nama pemilih bisa jadi informasi publik di situ. Tapi NIKnya kita kunci 6 angka di belakang supaya bisa menjaga data kerahasiaan data pemilih,” tutupnya. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*



Progres Coklit Sudah 56 Persen

Pemekaran Wilayah Jadi Kendala

MANADO—Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sementara berlangsung. Dan akan berakhir 23 Agustus. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu mengatakan, dari laporan yang dihimpun di 15 kab/kota, progres coklit sudah mencapai 56 persen. “Tapi sudah ada satu daerah yang 100 persen selesai. Itu masuk peringkat 2 se Indonesia yang terlebih dulu tuntas coklit. Yakni Kabupaten Sitaro sudah selesai di seluruh TPS yang ada,” ujarnya.

Setelah coklit, lanjutnya, pihaknya akan lakukan penyusunan daftar pemilih di tingkat PPS. Kemudian akan lakukan rakor bersama KPU kabupaten/kota divisi data. “Kami juga akan mengundang Bawaslu.

Sebab dalam coklit ini masih banyak ditemukan masalah dan kendala. Yang paling utama soal pemekaran wilayah,” terangnya.

Dicontohkannya, ada warga yang memiliki dokumen datanya di desa A, namun sudah tinggal di desa pemekaran. Sehingga otomatis warga itu sebenarnya harus terdata di desa A. “Namun sesuai proses yang ada, mereka sudah tinggal di desa pemekaran.

Sehingga harus didorong warga tersebut agar lakukan perekaman KTP-el dan bekerja sama dengan capil supaya secepatnya dikeluarkan data kependudukan di desa pemekaran yang mereka tinggal,” jelasnya.

Yang masih bermasalah soal pemekaran yakni Bolsel, Bolmong dan Boltim. Daerah itu yang memang kasus angka pemekaran wilayahnya banyak. “Ada juga satu di Boltim soal permasalahan perbatasan antar Boltim dan Minsel. Makanya kami harus turun lapangan mengecek data supaya akurat. Di lapangan memang ditemui ada warga yang memiliki KTP di Minsel tapi punya kartu keluarga di Boltim. Ini yang harus diklarifikasi di Capil,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Pendukung Bakal Calon Harus Punya E-KTP

Syaratnya Wajib Terdaftar Dalam DPT Terakhir

MANADO—Bakal pasangan calon (bacalon) lewat jalur independen atau perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk memasukkan dokumen dukungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu mengatakan, sesuai dengan PKPU bahwa dukungan calon perseorangan hanya untuk satu orang. “Jadi, satu orang itu hanya bisa memberikan dukungan kepada satu bakal pasangan calon perseorangan,” ujarnya.

Kemudian, kata Lanny, pendukung bacalon perseorangan itu wajib terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu yang terakhir dan atau daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4). “DP4 ini akan kami terima akhir Maret. Setelah ditetapkan, langsung diberikan ke KPU kabupaten/kota. Yang akan kita gunakan sumber datanya adalah DPT yang terakhir,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam hal penduduk tidak tercantum di DPT/DP4, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan. “Jadi, surat keterangan dari Dukcapil ini dibutuhkan sekali jika masyarakat belum memiliki KTP elektronik. KTP elektronik menjadi salah satu syarat untuk mendukung salah satu calon perseorangan,” jelasnya.

Dirinya meminta ke jajaran KPU jika nanti di lapangan ada KTP ganda, segera berkoordinasi dengan KPU atau Dukcapil. “Kami juga sudah laporkan ke Dukcapil bahwa ada KTP lama masih disimpan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*



KPU Sulut Pastikan Data Pribadi Pemilih Terlindungi

MANADO- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Dr Ardiles Mewoh menjamin semua data pribadi pemilik disimpan dan dilindungi kerahasiaannya. "Menurut undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan (adminduk), itu wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya. Itu prinsip utamanya. Sehingga tidak semua pihak bisa mengakses," ujarnya.

Menurut Ardiles, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilarang keras memberikan data pemilih. "PPDP dilarang menyimpan, menggandakan atau mengambil foto formulir A-KWK (berisi data pemilih), apalagi mengunggahnya ke media sosial. Kecuali, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data yang dibolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU),"ujarnya.

KPU menerbitkan surat keputusan KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A.KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan. "Dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut,"katanya.

Data pemilih tersebut juga bisa dicek di website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. Atau bisa langsung menghubungi nomor hotline bebas pulsa 081143300700. "Ada daftar nama pemilih bisa jadi informasi publik di situ. Tapi NIKnya kita kunci 6 angka dibelakang supaya bisa menjaga data kerahasiaan data pemilih," ungkapny. (Jr)

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Sumber: *Sulutdaily.com July 2020*

KPU Sulut minta Bawaslu Sulut

Sampaikan Data Detail terkait 57.195 Rumah Tak Dicoklit

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mulai menindaklanjuti temuan Bawaslu RI terkait 2 Ratusan rumah yang tidak di Coklit Oleh PPDP.

Komisioner KPU Sulut Divisi Perencanaan Data dan informasi, Lanny Ointu, SE Rabu, 19 Agustus 2020, di sela sela acara Workshop dengan Stakeholder

Dalam Rangka Diseminasi dan Uji Publik Produk Hukum Rancangan Keputusan Tentang Pedoman Teknis Kampanye dan Dana Kampanye Serta Rakor Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020 Di GKIC Manado mengaku, telah mengumpulkan semua KPU Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Jelasnya temuan Bawaslu RI sudah dilengkapi data yang detail sehingga pihaknya bisa melakukan penelusuran.

Sementara untuk data Bawaslu Sulut yang menyatakan ada kurang lebih 57 Ribu rumah yang belum di coklit, tanpa menyebutkan data detail nama dan alamat belum bisa ditindaklanjuti.

Tegas Lanny, pihaknya agak sulit menindaklanjuti jika temuan Bawaslu Sulut tidak disertakan data by name by addressnya. Untuk itu jelasnya, melalui KPU Kabupaten Kota telah surat resmi kepada Bawaslu untuk meminta data lengkap.

Dalam kesempatan Workshop yang dihadiri pimpinan partai, akademisi, LSM pegiat Pemilu, dan wartawan Lanny meminta agar dapat berkontribusi menyampaikan jika ada anggota masyarakat yang belum didata untuk disampaikan kepada KPU sesuai tingkatannya.

Jelas Lani, masyarakat juga bisa menyampaikan kepada KPU jika belum terdata melalui call center 0811 4330 0700. (DESI)



Penulis: Desi
Disiarkan: Radio Sion Sulut

KPU Tindak Lanjut Temuan Yang Disertakan Data Detail

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut tak bisa tindaklanjuti temuan Bawaslu Sulut terkait 57.195 rumah yang tak dicoklit. Peralnya, apa yang disampaikan Bawaslu lewat media, tak disertakan dengan data detail. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu mengatakan, hal itu akan ditindaklanjuti namun Bawaslu harus sertakan dengan data secara detail. “Kami minta data by name by address kepada Bawaslu Sulut,” kata Lanny.

Menurutnya, pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan jajaran KPU kabupaten/kota agar menyurat ke Bawaslu meminta data detail. “Kami juga akan menyurat ke Bawaslu Sulut meminta data yang menjadi temuan tersebut,” sindirnya. Lebih jauh dikatakannya, pihaknya agak sulit menindaklanjuti jika temuan Bawaslu Sulut tidak disertakan data by name by addressnya.

“Kalau tidak ada data, otomatis kami kesulitan. Sebab harus detail data yang disampaikan ada temuan puluhan ribu itu. Tapi KPU kab/kota sudah menyurat ke Bawaslu,” ucapnya. Menurutnya, yang langsung ditindaklanjuti adalah hasil temuan Bawaslu RI. “Kami berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota menindaklanjuti temuan Bawaslu RI yang telah memberikan kami data by name by address secara lengkap,” jelasnya.

Menurutnya, data secara detail yang diberikan tersebut dari 15 kabupaten/kota di Sulut jumlahnya 282. “Itu langsung ditindaklanjuti,” tandasnya. Dikatakannya, dari hasil koordinasi bersama jajaran, sudah ada yang diselesaikan temuan tersebut. Seperti di Bolmong Selatan.

“Karena memang hanya dua pemilih yang jadi hasil temuan Bawaslu. Dan tapi ternyata tak jadi masalah karena sudah dicoklit,”

tuturnya. Yang dijadikan masalah Bawaslu, lanjutnya, yakni tidak ditempel stiker. Ketika Bawaslu datangi rumah warga yang jadi temuan tersebut, belum dicoklit.

“Memang yang tak ada stiker di foto. Tapi setelah dicoklit, PPDP sudah tempel stiker. Sebenarnya hanya bedah jadwal. Ketika pengawas datang, PPDP coklit di lain hari,” jelasnya. Terkait puluhan ribu masalah saat coklit, pihaknya meminta ada penjelasan dan data secara jelas. “itu seperti apa? Jangan memberi kami masukkan, tapi tak detail masalahnya apa. Berikan data pada kami,” pintanya. Pihaknya yakin petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah kerja maksimal. Dirinya pun menjelaskan, ketika proses pemetaan, data yang diterima di dalam A-KWK itu sumbernya dari DP4, DPT terakhir dan DPK. “Semua dimasukkan ke dalam A-KWK yang dibawa PPDP untuk lakukan pencoklitan,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Jamin Data Pemilih Terlindungi

MANADO—Data pribadi pemilih merupakan rahasia. KPU Sulut menjamin ini terlindungi.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menjelaskan Undang-undang mengatur soal administrasi kependudukan dan itu wajib dilindungi negara.

“Jadi petugas PPDP, PPS dan perangkat pemilu lainnya tidak boleh membocorkan itu,” tegas Ardiles.

Ia menambahkan, khusus warga yang ingin tahu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih, bisa mengecek di website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. atau menghubungi nomor hotline bebas pulsa 081143300700.

“Bisa juga mengecek di kantor desa dan kelurahan setempat,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*



KPU Sulut Menjamin Melindungi Data Pribadi dari Pemilih

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya kewajiban melindungi data pribadi dari pemilih. Namun, terkait dengan pengawasan, KPU bisa saja menyerahkan data tersebut ke lembaga berwenang. Akan tetapi harus seizin atau persetujuan kementerian terkait.

“Bisa diambil (datanya), tapi harus ada izin atau persetujuan dari kementerian yang mengelola terkait administrasi kependudukan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Jumat (24/7).

Diterangkan Mewoh, walaupun data itu bisa diambil, dengan catatan dalam surat keputusan KPU tersebut, itu bisa dengan persetujuan kementerian terkait.

“Dokumen (SK) itu tidak lagi berlaku, ketika dapat izin dari kementerian yang mengelola administrasi kependudukan,” tandasnya.

Dijelaskan Ardiles, formulir model A.KWK merupakan administrasi yang didalamnya terdapat informasi data pribadi penduduk yang menurut peraturan harus disimpan dan dilindungi.

“Sehingga KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A.KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan,” jelasnya.

Jadi, lanjut Ardiles, dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut.

“Tapi bukan berarti pengawasan tertutup. Pengawasan tentu bisa dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses coklit. Itu maksudnya,” tandasnya.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

Lanny Ointu Minta Parpol Hadirdalam Pleno DPHP dari Tingkat Kelurahan

MANADO—Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) sementara berlangsung. Saat ini sementara dilaksanakan rapat pleno untuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan dan Desa, ternyata tidak diminati partai politik.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu mengimbau untuk semua partai politik agar menghadiri rapat pleno DPHP di tingkat kelurahan.

Menurutnya, kehadiran partai politik di pleno DPHP tingkat kelurahan sangat penting sebagai muara untuk mendapatkan data yang akurat di tingkat bawah.

“Jumlah pemilih menentukan daftar pemilih. Parpol akan tahu jumlah pemilih bahkan persentase jumlah pemilih laki-laki maupun perempuan secara akurat,” ungkapnya, Selasa (1/08/2020).

Dia menambahkan, untuk parpol yang tidak menghadiri pleno ini akan mendapat kesulitan untuk mem-breakdown data yang akurat bahkan sampai data di setiap TPS.

“Setiap parpol hendaknya memiliki data dari tingkat paling bawah. Banyak sengketa yang ditemui ialah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga kehadiran parpol memang sangat penting dalam pleno DPHP untuk mendapatkan data yang akurat mulai dari setiap TPS. Saya mengimbau sekali lagi untuk parpol agar boleh ambil bagian dalam pleno ini yang akan dilaksanakan 31 Agustus-2 September nanti,” imbuhnya.(*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

Lanny Ointu Sebut Pleno DPHP di Tingkat PPS Tidak Diminati Parpol

MANADO—Ketua Divisi Program dan Data Lanny A. Ointu mengatakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil



Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan dan Desa, tidak diminati partai politik (Parpol).

"Ini sementara pleno DPHP dari tanggal 30 sampai 01 September dan pleno tingkat PPK akan berlangsung dari tanggal 02 September, tapi dalam pemantauan kami (KPU, red) rupanya tidak diminati teman-teman Parpol," kata Ointu, saat kegiatan Penyuluhan Produk hukum yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (01/09) di Swissbel Hotel Manado.

Ointu menambahkan, DPHP sangat penting diikuti pengurus parpol mengingat data pemilih ini merupakan pegangan parpol saat pemungutan suara nanti.

"Muara dari pemungutan suara nanti ada di daftar pemilih karena disana ada jumlah pemilih. Kalau tidak ada data maka tidak akan ditindak lanjuti," ujarnya. Lebih lanjut lagi dikatakan Ointu, parpol hanya bisa mendapatkan Daftar Pemilih ini hanya saat menghadiri Rapat Pleno di setiap tingkatan yang digelar KPU.

"Sebenarnya Parpol wajib mendapat salinan DPHP, namun itu hanya diberikan kepada partai politik saat menghadiri Rapat Pleno. Jadi kami berharap setiap parpol dapat mengikut sertakan perutusan atau perwakilan yang memiliki mandat. Sayang kalau momen ini dilewati oleh parpol," tandasnya.(*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*
Sumber: *kumparan.com*

KPU Sesalkan Pleno DPHP Tingkat PPS Kurang Diminati Parpol

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, menyayangkan sikap dari Partai Politik (Parpol) yang kurang peduli dengan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang digelar Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan dan Desa.

Padahal, Pleno DPHP ini penting untuk dipantau oleh Partai Politik (Parpol) sehingga diketahui apakah masih ada kesalahan atau pemilih yang tidak terdaftar.

"Pleno DPHP dari tanggal 30 Agustus hingga 1 September yang kami pantau, memang kurang diminati oleh partai politik. Padahal ini penting, agar supaya tidak ada lagi mis terkait pemilih nanti kedepannya," kata Komisioner KPU Sulut Divisi Program dan Data, Lanny A. Ointu.

Ointu menjelaskan, DPHP sangat penting diikuti pengurus parpol mengingat data pemilih ini merupakan pegangan parpol saat pemungutan suara nanti. Menurutnya, muara dari pemungutan suara nanti ada di daftar pemilih karena disana ada jumlah pemilih.

Dikatakan Ointu, Parpol memang wajib mendapat salinan DPHP, namun itu hanya diberikan kepada partai politik saat menghadiri Rapat Pleno. Walaupun dikatakannya masih ada rapat pleno di tingkat Kecamatan hingga ke Kabupaten dan Kota serta ke tingkat Provinsi, namun alangkah baiknya parpol mengikutinya sejak di tingkat kelurahan.

"Jadi kami berharap setiap parpol dapat mengikutsertakan utusan atau perwakilan yang memiliki mandat. Sayang kalau momen ini (Pleno DPHP) dilewati oleh parpol," katanya kembali.(*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*
Sumber: *kumparan.com*

Ardiles :

Akses Data Pemilih Harus Seizin Kementerian Terkait

MANADO -- Menjawab adanya permintaan terkait data pemilih oleh kelompok masyarakat atau lembaga tertentu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban melindungi data pribadi dari pemilih. Tetapi alasan permintaan terkait dengan pengawasan, itu bisa diberikan, namun harus seizin Kementerian terkait.



“Bisa diambil (datanya), tapi harus ada izin atau persetujuan dari kementerian yang mengelola terkait administrasi kependudukan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Jumat (24/7).

Diterangkannya, walaupun data itu bisa diambil, dengan catatan dalam surat keputusan KPU tersebut, itu bisa dengan persetujuan kementerian terkait. “Dokumen (SK) itu tidak lagi berlaku, ketika dapat izin dari kementerian yang mengelola administrasi kependudukan,” tandasnya.

Dijelaskan Ardiles, formulir model A. KWK merupakan administrasi yang didalamnya terdapat informasi data pribadi penduduk yang menurut peraturan harus disimpan dan dilindungi. “KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A. KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan,” jelasnya.

Ardiles juga mengatakan, dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut. “Bukan berarti menutup informasi terkait data pemilih, Pengawasan tetap bisa dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses coklit. Itu maksudnya,” ungkapnya. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Sumber : *sulutnews.com*

KPU Tetap Coklit Meski di Wilayah Zona Merah

Melalui Online Video Call atau Telepon

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut saat ini sedang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih lewat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Meski harus memasuki wilayah zona merah covid, PPDP tetap melakukan coklit demi menjamin hak pilih warga. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya tetap akan mencoklit

warga yang masuk dalam zona merah. Dan hal itu sempat terjadi di lapangan. “Karena ada beberapa titik kita temukan, itu dilakukan isolasi dalam sebuah wilayah,” ujarnya.

Diterangkannya, itu adalah kebijakan KPU tentu berkoordinasi dengan pengawas. “Kalau misalnya area tersebut zona merah atau ada yang isolasi, misalnya desa/kelurahan, tetap kita lakukan coklit,” ucapnya. Menurutnya, jika ditemukan di sebuah lingkungan atau area perumahan yang dikunci karena zona, pihaknya terapkan kebijakan bisa dilakukan melalui video call.

“Jadi kita lakukan coklit secara online. Tentu dikoordinasikan bersama Bawaslu baru kita lakukan coklit melalui telepon atau video call. Nanti data-datanya, formulir, dokumen bahwa sudah terdaftar, kita kirimkan ke rumah tersebut,” tutupnya. Pihaknya, ditambahkan Ardiles. Tetap akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau tim Satgas Covid agar bisa mengetahui perkembangan terkait wilayah yang zona merah.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Verifikasi Data JS-DLR

MITRA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) lakukan pencocokan data pemilih di kediaman Bupati Mitra James Sumendap, dengan menggunakan protokol Covid-19. Sumendap ikuti alur pendataan dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sumendap mengatakan, dengan angka nihil pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), pelaksanaan pemilihan umum (pemilih) bisa berjalan dengan baik.

“Dengan menerapkan protokol Covid-19 selama tahapan pendataan data pemilih, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) di Kabupaten Mitra bisa terlaksana dengan baik,” pungkas Sumendap.

Sementara itu, Ketua KPU Mitra Wolter Dotulong mengapresiasi Sumendap yang sangat mendukung apa yang menjadi program KPU.

“Saat melakukan pencocokan dan penelitian data pemilu tahun 2020 ini, kami mengapresiasi Pak Bupati James Sumendap yang mendukung,” ujar Dotulong, ditemani segenap komisioner, ikut mendampingi peserta pemutakhiran (PPDP).

Dikatakannya, coklit di kediaman orang nomor satu di Mitra ini, ditepatkan dengan hari coklit serentak se-Indonesia. “Meski begitu, tahapan coklit tetap dilaksanakan hingga 13 Agustus mendatang,” terangnya.

Pihaknya juga mengharapkan pemilihan gubernur bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Mitra. “Diharapkan masyarakat bisa menunjang jalannya pilkada 2020 dengan protokol Covid-19. Sehingga bisa berjalan sesuai aturan,” jelas Ketua KPU Mitra. (*)

Penulis: *Wolter Mumu*
Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Seriusi Pemutakhiran Daftar Pemilih

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut masih terus memutakhirkan data pemilih. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada dasarnya adalah tahapan untuk memastikan warga negara yang sudah punya hak pilih sudah terdaftar sebagai pemilih.

Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointoe mengatakan pihak KPU kini sudah memasuki tahapan rapat pleno terbuka di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) kelurahan. Rapat pleno ini merupakan pemaparan hasil penyusunan Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran (DPHP) yang sudah dilakukan KPU Sulut sejak 7 hingga 29 Agustus 2020.

Hasil rekap formulir A.B. 1 KWK yang berisi rincian data pemilih yang dicocokkan dan diteliti (coklit) akan diserahkan kepada parpol yang hadir, Bawaslu atau PKD/PPL di tingkatan kelurahan. Dalam tahapan ini, pihak KPU masih sangat luwes untuk menerima perubahan data yang kemungkinan akan terjadi, atau masukan dari pihak lain.

Komisioner Lanny berpesan agar data yang disampaikan berupa data otentik seperti nama, NIK, jenis kelamin, alamat pemilih, serta akan memilih di TPS mana. “Setelahnya juga akan ada rapat pleno berjenjang di tahap kecamatan. Setelah itu ke tingkat kabupaten/kota untuk menentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS-red), lalu nanti sampai ke tingkat provinsi juga,” ujarnya.

Setelah semua tahapan pleno dan penetapan DPS selesai, masih ada uji publik. Dalam uji publik akan melihat apakah masyarakat sudah masuk ke daftar pemilih atau belum. Atau nanti bisa saja setelah melakukan uji publik didapati pemilih yang sudah meninggal atau berubah status menjadi TNI/Polri yang sudah gugur suaranya. “Jika hal tersebut terjadi, pihaknya pun akan langsung mencoret nama yang bersangkutan dari daftar pemilih,” tutup Lanny. (* / Jr)

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Sumber: *Sulutdaily.com 8 September 2020*

KPU Langsung Tindaklanjuti Temuan Bawaslu RI

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara gerak cepat. Menindaklanjuti temuan Bawaslu RI terkait tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu membeberkan, terkait temuan tersebut KPU sedang berkoordinasi dengan jajaran di kabupaten/kota. “Kita tindak lanjuti temuan



Bawaslu RI yang telah memberikan kami data by name by address secara lengkap,” bebernya.

Dari data tersebut, lanjut Ointu, dari 15 kabupaten/kota di Sulut jumlahnya 282. “Itu langsung ditindaklanjuti,” tegasnya, sembari menambahkan, dari total temuan tersebut sudah ada koordinasi dengan jajaran. Dia mencontohkan di Bolmong Selatan. “Saat ditindaklanjuti ternyata tak jadi masalah. Karena sudah dicoklit,” tegasnya. Lebih jauh dia mengatakan mengenai tidak ditempelnya stiker setelah dicoklit PPDP sudah tempel stiker. “Sebenarnya hanya beda jadwal saja,” tambahnya.

Kemudian mengenai pemberitaan yang menyebut adanya 51 ribu temuan terkait coklit, Ointu meminta ada data detail. “Kami minta data by name by address kepada Bawaslu Sulut. Sudah kirimkan surat. Begitu juga di daerah. Kami menyurat ke Bawaslu meminta data menjadi temuan tersebut,” sebut Ointu. (*)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Hasil Coklit, KPU Sulut Kroscek Temuan Bawaslu RI, Malam Ini Tuntas

MANADO — Masalah pencocokan dan penelitian (coklit) di Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi temuan Bawaslu RI dikroscek satu per satu oleh KPU Sulut.

Setidaknya, 282 rumah warga yang belum terdata versi Bawaslu RI, langsung dikoordinasikan KPU Sulut bersama jajarannya di 15 Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU Sulut, Lanny Anggriany Ointu menegaskan, dari ratusan item temuan itu, kebanyakan adalah rumah yang tidak ditempelkan stiker.

Selain itu, adapula warga masih mengantongi KTP luar domisili hingga petugas PPDP yang belum melakukan coklit.

“Ini sudah disampaikan kepada kawan-kawan KPU di semua daerah lewat rakor via

teleconference. Kami berikan kesempatan sampai jam 7 malam ini agar diselesaikan,” tegas Lanny Anggriany Ointu kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/8/2020).

Menurut Lanny Ointu, beberapa daerah bahkan sudah merampungkan temuan itu.

Namun kata dia, untuk Kota Manado dan Minahasa jumlahnya cukup banyak sebanding dengan sebaran penduduk.

“Sebentar kami kembali rakor dan memastikan semua tuntas. Teman-teman komisioner di daerah sudah menyanggupi,” bebernya.

Perihal hasil pengawasan Bawaslu Sulut dengan 51 ribu pelanggaran, Lanny Ointu berharap data tersebut disandingkan sesuai nama dan alamat.

“Akan kita telusuri asalkan datanya jelas. Tolong sampaikan by name by address supaya lebih terarah melakukan cek di lapangan,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Gelar Rekapitulasi DPS untuk Pilkada Serentak 2020

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memastikan untuk melaksanakan semua tahapan tepat waktu, agar tidak ada penundaan tahapan.

Selasa (15/9) hari ini, memasuki tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan jadwal tahapan Pilkada, KPU sudah akan memulai tahapan rekapitulasi DPS yang sebelumnya sudah ditetapkan di 15 kabupaten/kota.

“Kita sudah siap. Kita sudah sampaikan seluruh undangan termasuk pada stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah, disdukcapil, TNI, Polri, semua yang berkepentingan daftar pemilih ini. Kita juga sudah sampaikan undangan ke Bawaslu



termasuk parpol yang bisa duduk dalam rapat pleno secara terbuka ini,” ujar Ardiles.

Namun demikian, KPU mengakui jika ada beberapa catatan dari Bawaslu, termasuk menyarankan melakukan penundaan, dimana pihak KPU mempertimbangkannya, walaupun pelaksanaan tahapan rekapitulasi DPS tetap sesuai jadwalnya pada Selasa hingga Rabu (15-16/9).

“KPU berkeinginan melaksanakannya sesuai jadwal. Pleno DPS sudah berlaku dari tingkat desa, kecamatan sampai di kabupaten dan sekarang kita tinggal melakukan rekapitulasi. Kita tidak berkeinginan tahapan ini terhambat atau tertunda oleh karena permintaan saran dari Bawaslu. Tapi kita akan membahasnya untuk menghargai saran itu,” ujar Ardiles.

“Jika ada satu tahapan tertunda, itu berdampak sampai di akhir. Untuk itu rencananya akan tetap dilaksanakan dimana akan berkoordinasi dengan Bawaslu,” katanya kembali.*

Penulis: *Oktaviana Mundung*
Sumber: *kumparan.com*

Nama Tak Tercatat di A-KWK, Bisa Jadi Pemilih Baru

Harus Tunjukkan Identitas Kependudukan ke Petugas

MANADO—Petugas pematangan data pemilih (PPDP) sedang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah warga. Coklit tersebut untuk memastikan bahwa warga tersebut tercatat sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember mendatang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Lanny Ointu mengatakan, jika nanti dalam coklit di lapangan kemudian didapati bahwa data warga yang dikunjungi tak ada di A-KWK, maka akan dimasukkan dalam daftar pemilih baru.

“Nah, akan dicatatkan dalam daftar pemilih baru. Kita cocokan data milik warga dan data di A-KWK itu,” ujar Lanny.

Menurutnya, warga harus menunjukkan identitas berupa KTP ketika petugas datang ke rumah untuk lakukan coklit. “Harus ada KTP dan KK (kartu keluarga) untuk cocokan data yang dicoklit. Kalau tak ada KTP tak bisa didata,” terangnya.

Namun menurut Lanny, bilamana warga tersebut belum punya KTP, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili. “Kalau surat keterangan (suket) domisili yang dikeluarkan Capil, itu bisa. Bagaimana kita akan mendata pemilih kalau orangnya tak ada datanya,” pungkas Lanny.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

DPS Pilgub Diuji Publik

MITRA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa (Mitra), melanjutkan tahapan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS), Kabupaten Minahasa (Mitra) untuk pilgub 2020. Sebelumnya, seperti yang dikatakan Ketua KPU Mitra Wolter Dotulong, untuk tahapan uji publik ini, KPU Mitra telah menyampaikan DPS kepada setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Mitra. “Dengan demikian, para wajib pilih ataupun masyarakat dan pihak lainnya, dapat memberikan tanggapan terhadap DPS tersebut,” untkap Dotulong.

Lanjut dikatakannya, jika kemudian ada masyarakat yang sudah masuk kategori wajib pilih namun belum tercatat dalam DPS maka bisa langsung diketahui. “Silahkan sampaikan ke PPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih,” ujar Dotulong.

Sementara itu, Wakil Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Mitra, Jhonly Pangemanan menjelaskan, uji publik DPS tersebut dilakukan dengan cara penyampaian melalui pengeras suara oleh PPS. Selain itu, penyampaian uji publik juga melalui pengumuman yang ditempel di Kantor Desa/Kelurahan dan tempat yang dianggap strategis.



“Tahapan uji publik ini di mulai hari ini hingga 28 September nanti. PPS akan mengumumkan DPS melalui pengeras suara maupun menempel pengumuman di kantor desa atau kelurahan,” jelas Pangemanan.

Lanjut ditambahkannya, berkaitan dengan perbaikan DPS akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari rekapitulasi di tingkat PPS. “Selanjutnya disampaikan ke PPK, kemudian PPK meneruskan ke KPU untuk nantinya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),” tutup Pangemanan. (*)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

DPS Sulut 1.828.285, Berikut Tiga Cara Mengetahui Apakah Anda Terdaftar atau Belum

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) baru saja menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirangkum dari semua kabupaten/kota.

Total keseluruhan mencapai 1.828.285 pemilih, dimana laki-laki berjumlah 924.369 dan perempuan 903.916 jiwa.

Dari 15 daerah di Sulut, Manado sebagai ibukota provinsi mencatat DPS terbanyak yakni 327.739.

Dalam upaya menghasilkan daftar pemilih akurat, komprehensif, dan mutakhir disertai proses transparan, KPU senantiasa bekerja memperbaiki data pemilih pada DPSHP dan DPT dengan melibatkan partisipasi publik.

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Sulut, Lanny Ointu mengharapkan keterlibatan masyarakat pada tahapan ini.

KPU, kata Lanny Ointu, berusaha agar warga negara tidak kehilangan hak pilih.

Olehnya, Lanny mengajak warga Sulut mengecek statusnya.

“Jika ada yang pindah domisili atau menemui kendala, silakan bertanya

kepada petugas kami,” kata Lanny kepada BeritaManado.com, Senin (21/9/2020).

Menurut Lanny, ada tiga cara mengetahui status masyarakat, apakah sudah terdaftar atau belum. Pertama, melalui layanan digital yang disiapkan KPU.

Warga kata Lanny, bisa mengunjungi website lindungihakpilihmu.kpu.go.id via gawai atau laptop. “Di link ini, pengunjung diminta memasukan identitas diri. Prosesnya dirancang lebih muda,” bebarnya.

Layanan kedua, dengan menghubungi call center KPU di nomor 081143300700. “Nanti ada petugas memberikan keterangan status kita,” jelasnya.

Meski demikian, KPU menyadari tidak semua wilayah di Sulut terjangkau jaringan internet dan telekomunikasi. Lanny menambahkan, khusus wilayah pedesaan dengan keterbatasan sarana teknologi, bisa langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat.

“Prinsipnya, kami berupaya agar semua WNI bisa menggunakan hak konstitusinya pada pemilihan serentak,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Bawaslu Sulut Ingatkan KPU Perhatikan Pemilih di Daerah Perbatasan

TONDANO – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn J Malonda, SH.M.Pd, Minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih memperhatikan pemilih yang berada di daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota demi mencegah timbulnya permasalahan pemilih yang memiliki identitas ganda.

“Harus diantisipasi agar pemilih jangan sampai menyalahgunakan hak pilihnya, tidak sesuai dengan daerah dimana pemilih tersebut berada. Ini karena mengingat permasalahan tentang penyalahgunaan hak pilih pada Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu kemarin di Provinsi Sulut,” tegas Malonda



saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara di SwissBel Maleosan Hotel (15/02)

Lebih lanjut kata Malonda, Bawaslu Provinsi Sulut beserta jajarannya akan melaksanakan pengawasan kepada Dinas Kependudukan dan Capil yang menjadi stakeholder Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Disamping itu pula, Bawaslu juga bakal intensif melakukan pengawasan tentang keberadaan penduduk sebagai pemilih dalam Pilkada Tahun 2020, apakah sesuai dengan domisili dimana pemilih itu tinggal dan dapat menggunakan hak pilihnya.

”Bawaslu melalui Panwas Kecamatan, saat ini sedang melaksanakan rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa. Karena itu disampaikan agar nantinya mereka dapat bersinergi dengan PPDP dan PPS serta nanti dapat bersama-sama melaksanakan cklit pemutakhiran data pemilih,” Jelasnya.

”Apabila nanti didapati ada Pengawas Kelurahan/Desa yang tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara profesional, maka jajaran KPU Provinsi Sulut dapat menyampaikan informasi ini kepada jajaran Bawaslu Provinsi Sulut untuk dapat ditindak tegas,” Pungkasnya.(Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/01/09/2020*

Pleno DPHP di Tingkat PPS Tidak Diminati Parpol

TONDANO – Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan dan Desa, ternyata tidak diminati partai politik.

Hal tersebut dikatakan Ketua Divisi Program dan Data Lanny A. Ointu SE,

dalam kegiatan Penyuluhan Produk hukum yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (01/09) di Swissbel Hotel Manado.

”Ini sementara pleno DPHP dari tanggal 30 sampai 01 September dan pleno tingkat PPK akan berlangsung dari tanggal 02 September, tapi dalam pemantauan kami rupanya tidak diminati teman- teman Parpol,” kata Ointu.

Dijelaskannya, DPHP sangat penting diikuti pengurus parpol mengingat data pemilih ini merupakan pegangan parpol saat pemungutan suara nanti. “Muara dari pemungutan suara nanti ada di daftar pemilih karena disana ada jumlah pemilih. Kalau tidak ada data maka tidak akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

Tegasnya, parpol hanya bisa mendapatkan Daftar Pemilih ini hanya saat menghadiri Rapat Pleno di setiap tingkatan yang digelar KPU.

”Sebenarnya Parpol wajib mendapat salinan DPHP, namun itu hanya diberikan kepada partai politik saat menghadiri Rapat Pleno.Jadi kami berharap setiap parpol dapat mengikut sertakan perutusan atau perwakilan yang memiliki mandat.Sayang kalau moment ini dilewati oleh parpol,” cetus Lanny.(Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/01/09/2020*

Hasilkan Data Pemilih Berkualitas, Begini Hambatan yang Ditemui KPU

MANADO — Sebentar lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan disahkan KPU Sulut.

Saat ini, pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sedang berlangsung di tingkat desa dan kelurahan.

Komisioner KPU Sulut, Lanny Anggriana Ointu mengatakan, upaya penyelenggara pilkada menghasilkan data pemilih akurat, dilakukan sekuat tenaga.

“Seperti tahapan uji publik yang sangat



membantu petugas dalam mendata warga agar mendapatkan hak pilih,” kata Lanny Ointu kepada BeritaManado.com, Kamis (8/10/2020).

Memang diakui Lanny, ada sejumlah hambatan dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Kebanyakan kata dia, adalah warga yang belum memiliki data kependudukan seperti KTP elektronik.

“Masalah seperti ini kami langsung koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, lagi-lagi ketersediaan blangko KTP menjadi penghambat,” katanya.

KPU tambah Lanny, terus berupaya agar tak ada seorangpun warga yang kehilangan hak pilih.

“Meski DPT sudah ditetapkan nanti, mereka yang memenuhi syarat tetap bisa didata dan masuk pada DPT hasil perbaikan,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Ikut Aturan, KPU Wajib Lindungi Data Pribadi Pemilih

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sangat terbuka dalam hal pemutakhiran data pemilih. Termasuk pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, terkait dengan permintaan A.KWK, pihaknya sudah lakukan kajian internal dalam KPU bahwa di dokumen tersebut terdapat informasi data pemilih yang di dalamnya ada unsur-unsur data pribadi penduduk. “Menurut undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan (adminduk), itu wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya. Itu prinsip utamanya. Sehingga tidak semua pihak bisa mengakses,” tegasnya, Kamis (23/7) saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Menurutnya, bagi jajaran KPU saja baik PPS dan PPDP, dilarang untuk memfoto,

memindah atau menggandakan, termasuk menyalin dalam bentuk soft file.

Sebab, di formulir model A.KWK merupakan administrasi yang didalamnya terdapat informasi data pribadi penduduk yang menurut peraturan harus disimpan dan dilindungi. “Sehingga KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A.KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan,” jelasnya.

Jadi, lanjut Ardiles, dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut. “Tapi bukan berarti pengawasan tertutup. Pengawasan tentu bisa dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses coklit. Itu maksudnya,” tandasnya.

Secara kelembagaan, lanjutnya, KPU punya kewajiban melindungi data pribadi dari pemilih. Kalaupun data tersebut bisa diambil, tentu dengan catatan dalam SK tersebut, itu harus ada persetujuan Kementerian terkait.

“Bisa diambil, tapi harus ada izin atau persetujuan dari kementerian yang mengelola terkait administrasi kependudukan,” ucapnya.

Terkait dengan pengawasan, KPU bisa saja menyerahkan data tersebut ke lembaga berwenang. Akan tetapi harus seizin atau persetujuan kementerian terkait.

“Bisa diambil (datanya), tapi harus ada izin atau persetujuan dari kementerian yang mengelola terkait administrasi kependudukan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Jumat (24/7).

Diterangkannya, kalaupun data itu bisa diambil, dengan catatan dalam surat keputusan KPU tersebut, itu bisa dengan persetujuan kementerian terkait.

“Dokumen (SK) itu tidak lagi berlaku, ketika dapat izin dari kementerian yang mengelola administrasi kependudukan,” tandasnya.



Dijelaskan Ardiles, formulir model A.KWK merupakan administrasi yang didalamnya terdapat informasi data pribadi penduduk yang menurut peraturan harus disimpan dan dilindungi. “Sehingga KPU menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 335 tentang penetapan informasi daftar pemilih pada formulir A.KWK yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, itu menjadi informasi yang dikecualikan,” jelasnya.

Jadi, lanjut Ardiles, dalam hal menjawab informasi publik, misalnya termasuk pengawasan, KPU tetap berpedoman pada SK KPU RI tersebut. “Tapi bukan berarti pengawasan tertutup. Pengawasan tentu bisa dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung proses coklit. Itu maksudnya,” tandasnya. Data pemilih tersebut juga bisa dicek di website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. Di situ merupakan tempat lakukan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum. “Ada daftar nama pemilih bisa jadi informasi publik di situ. Tapi NIKnya kita kunci 6 angka di belakang supaya bisa menjaga data kerahasiaan data pemilih,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Jamin Hak Pilih Pasien Positif Covid

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hak pilih pasien yang terkonfirmasi positif covid 19. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menerangkan, pasien positif covid itu ada dua metode yang ditangani gugus tugas. Ada yang di rawat di rumah sakit (RS) dan isolasi mandiri di rumah. “Kalau di RS, akan dilayani (hak pilih) dimana dia (pasien positif covid) dirawat. Tak mungkin pemilih yang terkonfirmasi positif datang ke TPS,” kata Ardiles saat diwawancarai. Hal itu, kata dia, diatur di Peraturan KPU Nomor 6/2020 terkait pemilihan di masa pandemi.

“Mekanismenya, satu hari sebelum nanti penyelenggara di daerah akan lakukan pendataan bersama gugus tugas meminta

nama-nama pemilih yang terkonfirmasi positif di RS. Nanti TPS terdekat dari RS akan lakukan pelayanan pada pasien positif yang dalam perawatan. Tentunya, jajaran KPU yang layani harus pakai APD lengkap,” jelasnya.

Soal PDP dan ODP yang dirawat di rumah, akan juga dilayani. “Nanti di TPS terdekat dimana pemilih itu terdaftar, bisa dilayani di rumah. Bersama Bawaslu atau Panwas,” tandasnya. Pihaknya juga telah mempersiapkan berbagai hal. Termasuk di TPS.

“Kalau misalnya orang datang ke TPS, ada juga penanganan khusus. Jika kedatangan suhu tubuhnya di atas, tetap akan dilayani hak pilihnya. Tapi ada khusus bilik sendiri.

Bukan di TPS,” terangnya. Lebih jauh dikatakannya, untuk, kertas suara pasien positif covid, itu akan disterilisasi, akan dihitung di tempat itu. “Pemilih kan pakai sarung tangan. Semua pemilih akan disediakan. Orang sehat datang ke TPS, KPU juga sediakan sarung tangan sekali pakai. Kemudian langsung di buang di tempat sampah yang disediakan,” paparnya. Ditambahkan Ardiles, pada waktu pemungutan suara akan koordinasi dengan Dinkes serta gugus tugas untuk kerja sama. Agar pengecekan rutin misalnya ada tensi secara berkala kepada petugas.

“Nanti akan ada MoU dengan gugus tugas provinsi, kabupaten dan kota bersama Dinkes. Supaya ketika ada informasi terkait zona, bisa kita ketahui. Kan itu berpengaruh kepada tahapan seperti kampanye,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut All Out Selesaikan 282 Temuan Bawaslu RI

MANADO – Hasil temuan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, yang menyebutkan adanya masalah Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang



terjadi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan langsung ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulut beserta jajarannya di 15 Kabupaten/Kota.

Dalam temuan Bawaslu RI terdapat 282 nama pemilih yang bermasalah datanya.

Menyikapi berbagai permasalahan itu, Komisioner KPU Provinsi Sulut, Lanny Anggriany Ointu yang didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Dr Ardiles Mewoh, berkomitmen untuk all out menuntaskannya.

Sebanyak 282 temuan tersebut, diketahui adalah mereka yang memiliki KTP luar domisili sehingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) belum melakukan coklit.

Selain itu ada juga rumah yang tidak ditempelkan stiker Model AA 2-KWK

“Ini sudah disampaikan kepada kawan-kawan KPU di semua daerah lewat rapat koordinasi via teleconference. Dan kami berikan kesempatan sampai jam 7 malam ini agar diselesaikan,” tegas Ointu kepada sejumlah media di ruang rapat KPU Provinsi (19/08/2020).

Lanjut Lanny, jumlah pemilih yang ada di Kota Manado dan Minahasa cukup banyak, sehingga tidak sebanding dengan sebaran penduduk.

Sementara itu, terkait 51 ribu pelanggaran temuan Bawaslu Sulut. Ointu akan menelusuri nama dan alamat pemilih sudah benar.

“Akan kita telusuri asalkan datanya jelas. Tolong sampaikan by name by address agar lebih terarah untuk melakukan cek di lapangan,” tutup Lanny.

Senada disampaikan Mewoh, akan lebih maksimal lagi ketika hasil temuan ada rinciannya. Artinya by name by address. Dengan demikian permasalahan dapat dituntaskan secepatnya.

Untuk proses verifikasi, sambung Mewoh secepatnya akan diselesaikan sehingga

proses Pemilukada dapat dilangsungkan dengan meminimalisasi berbagai kekurangan. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : *sulutreview.com*

Aman, Petugas Pemutakhiran Dilengkapi APD dan Rapid Test

MANADO—Turbin tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih berputar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menjamin petugas yang menjalankannya bebas dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebelum mereka turun lapangan telah melalui rapid test.

Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu menjelaskan terkait antisipasi penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan sebelum petugas turun coklit. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebelum mendatangi rumah warga telah menjalani rapid test terlebih dahulu.

“Teman-teman PPDP juga sudah selesai melakukan rapid test kepada mereka. Untuk itu masyarakat tidak perlu takut,” ungkap Ointu, baru-baru ini, saat diwawancarai.

Ia memastikan, para petugas ini terhindar dari Covid-19. Hal itu karena mereka yang melakukan coklit adalah yang memiliki hasil non reaktif.

“Petugas dijamin bebas dari Covid karena mereka sudah selesai dilakukan rapid test dengan hasil yang non reaktif,” ujarnya.

Selain itu, mereka yang ditugaskan sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri. Baik masker, face shield dan hand sanitizer.

“Mereka disediakan ATK (alat tulis kantor) yang tidak bisa ditukar dengan lainnya. Juga ada tisu basah, tisu kering,” ucapnya.

Para petugas juga sudah dibekali dengan protokol kesehatan Covid-19. Mereka sudah diberikan bimbingan, seperti harus menjaga jarak dengan yang didatangi.



“Minimal satu meter atau kalau ada kesempatan tidak terlalu dekat dengan masyarakat,” kuncinya

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sulut Agendakan Rapat Pleno Terbuka DPS

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), berkomitmen untuk melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tahapan selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, yang digelar di Four Points Hotel selama dua hari, mulai dari tanggal 15 September sampai 16 September 2020.

Ketua KPU Provinsi Sulut, Dr Ardiles Mewoh, SIP, MSi mengatakan KPU saat ini sudah memulai tahapan rekapitulasi DPS di 15 Kabupaten/Kota. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur jadwal tahapan Pilkada.

“Kegiatan pleno terbuka ini sudah disampaikan kepada seluruh undangan termasuk pada stakeholder dalam hal ini Pemerintah Daerah, Dukcapil, TNI, Polri, dan semua yang berkepentingan pada daftar pemilih ini,” ungkap Mewoh, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, Mewoh juga mengatakan telah memberikan undangan ke Bawaslu Sulut termasuk parpol yang dapat hadir mengikuti rapat pleno rekapitulasi DPS secara terbuka.

Di sisi lain, KPU Sulut mengakui adanya beberapa catatan penting dari Bawaslu Provinsi Sulut yakni saran untuk melakukan penundaan rekapitulasi DPS.

Menanggapi saran penundaan rekapitulasi DPS dari Bawaslu, Mewoh ingin agar jadwal semua tahapan dalam Pilkada 2020 ini

berjalan sesuai dengan rencana.

Menurut Mewoh jika ada satu tahapan yang tertunda maka itu akan berdampak sampai di akhir.

Untuk itu tahapan rekapitulasi DPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 akan tetap dilaksanakan dan akan berkoordinasi dengan Bawaslu.

“KPU berkeinginan melaksanakannya sesuai jadwal. Pleno DPS sudah berlaku dari tingkat desa, kecamatan sampai di Kabupaten/Kota dan sekarang kita tinggal melakukan rekapitulasi,” tandasnya.

“Kita tidak berkeinginan tahapan ini terhambat atau tertunda oleh karena permintaan saran dari Bawaslu. Tapi kita akan membahasnya untuk menghargai saran itu,” tutup Ardiles. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

KPU Sulut Plenokan DPS Pilkada Sulut

MANADO -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ardiles Mewoh menegaskan untuk pelaksanaan semua tahapan akan dilakukan tepat waktu, agar tidak ada penundaan tahapan, termasuk tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang akan digelar Selasa (15/9/2020).

Menurutnya sesuai peraturan KPU jadwal tahapan pemilihan kepala daerah akan dimulai tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan sudah ditetapkan di 15 kabupaten/kota dan di provinsi tinggal melakukan rekapitulasi.

“Undangan sudah disebar ke stakeholder pemerintah daerah, Dukcapil, TNI, Polri, semua yang berkepentingan. Kita juga sudah menyampaikan undangan ke Bawaslu termasuk parpol yang bisa duduk dalam rapat pleno secara terbuka ini,” jelas Mewoh.



Mewoh juga mengatakan KPU juga menerima beberapa catatan dari Bawaslu Sulut yang menyarankan agar melakukan penundaan, namun yang pasti pelaksanaan tetap sesuai jadwal uakni 15-16 September 2020 .

“KPU berkeinginan tetap melaksanakan sesuai jadwal. Pleno DPS sudah berlaku dari tingkat desa, kecamatan sampai di kabupaten dan sekarang kita tinggal melakukan rekapitulasi. Kita tidak berkeinginan tahapan ini terhambat atau tertunda oleh karena permintaan saran dari Bawaslu. Tapi kita akan membahasnya untuk menghargai saran itu, tentu kita putuskan besok apakah dilanjutkan atau tunda sesuai permintaan Bawaslu,” tegas Mewoh.

Tahapan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, jika terjadi penundaan dikuatirkan akan ada keberatan dari wajib pilih hanya karena tahapan tidak dilaksanakan tepat waktu.

“Jika tahapan tertunda Itu berdampak sampai di akhir pelaksanaan akan terjadi pergeseran waktu. Tahapan pleno Daftar Pemilih Sementara akan tetap dilaksanakan sambil tetap berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menyampaikan keinginan KPU agar melaksanakan tahapan sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan,” ungkapnya. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Sumber : *sulutnews.com*

KPU Sulut Tuntaskan Pleno DPS, Disaksikan Bawaslu

MANADO – Setelah melewati proses pemutakhiran dan validasi data, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada akhirnya menuntaskan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Selasa (15/9/2020).

Agenda yang dikemas dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 ini, KPU telah menetapkan jumlah DPS Provinsi Sulut dengan catatan angka 1.828.285.

Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh, SIP, MSi memanjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rapat pleno yang berjalan baik dan lancar.

“Puji Tuhan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS berjalan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berdasar pada ketentuan yang telah kita atur,” ucap Ardiles.

Dalam rapat pleno ini, Ardiles Mewoh memberikan kesempatan pada KPU di 15 kabupaten/kota untuk membacakan penetapan DPS di masing-masih daerah kemudian diberikan kesempatan bagi partai politik dan Bawaslu untuk memberikan tanggapan.

“Kita berikan kesempatan kepada 15 Kabupaten/Kota ini untuk membacakan hasil penetapan DPS di daerah masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi partai politik dan Bawaslu untuk menanggapi. Dengan demikian jika tidak ada persoalan akan kita sahkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada,” jelas Mewoh.

Mewoh memberikan apresiasi kepada Bawaslu Sulut yang telah hadir dan melakukan pengawasan.

Sementara itu, terkait beberapa catatan Bawaslu terkait jumlah DPS. Mewoh mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindak lanjutinya.

“Kami akan melakukan pencermatan terhadap DPS yang telah ditetapkan dan juga tanggapan dari masyarakat yang disampaikan ke KPU lewat kotak tanggapan masyarakat yang berada di kantor KPU,” tutup Ardiles.

Penetapan pleno DPS turut disaksikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut, Dr Herwyn JH Malonda. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : *sulutreview.com*



Hari Ini Tetap Gelar Rekapitulasi DPS

MANADO - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara tetap akan mengikuti jadwal tahapan pilkada yang sudah diatur dalam Peraturan KPU. Di mana pada 15-16 September dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ini ditegaskan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. "Sesuai Peraturan KPU terkait jadwal tahapan pemilihan kepala daerah, esok (hari ini), kita mulai melaksanakan tahapan rekapitulasi daftar pemilih sementara," sebutnya.

DPS ini kata Mewoh, sudah ditetapkan di 15 kabupaten/kota. KPU provinsi tinggal melakukan rekapitulasi. "Kita sudah siap dan telah sampaikan ke seluruh undangan termasuk stakeholder. Dalam hal ini pemerintah daerah, Dukcapil, TNI/Polri, dan semua yang berkepentingan dengan daftar pemilih ini. Kita juga sudah sampaikan surat pada Bawaslu, undangan ke partai politik. Nanti yang bisa duduk dalam rapat pleno ini," urainya.

Diakui Mewoh, KPU sudah menerima beberapa catatan dan surat dari Bawaslu terkait permintaan penundaan agenda ini. "Kita sedang membahasnya. Yang pasti kita harus laksanakan sesuai jadwal. Yakni 15 dan 16 September. Kami berkeinginan melaksanakan pleno ini sesuai jadwal. Karena DPS ini sudah berlangsung dari desa, kecamatan, kabupaten dan kini kita lakukan

rekapitulasi. Kita tidak ingin tahapan ini terhambat atau tertunda. Karena saran dari Bawaslu. Tapi kita tetap membahasnya untuk menghargai masukan dan saran Bawaslu. Putusannya esok (hari ini). Apa kita lanjutkan atau tunda sesuai dengan permintaan Bawaslu," jelasnya.

Mewoh menekankan, KPU akan membahas masukan tersebut secara komprehensif sesuai dengan aspek-aspek yang ada. "Kami tidak mau pemilihan ini tertunda. Kita memastikan tahapan yang

ada sesuai aturan dan tepat waktu. Supaya nanti jangan ada keberatan dari pihak lain bahwa KPU tidak melakukan tahapan sesuai undang-undang. Kan nanti juga berdampak sampai di akhir," kuncinya.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan, pihaknya menyarankan untuk ditunda karena masih ada masalah di kabupaten/kota, ada beberapa catatan. "Nanti kami akan koordinasi dengan KPU Sulut lagi. Kan di kabupaten/kota ada yang perlu diselesaikan, esok kami akan berikan masukan. Juga jadwalnya 15-16 September.

Mudah-mudahan esok selesai dan kita sama-sama lakukan," pungkas Malonda, tadi malam.(gel)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Tetapkan DPS Pilkada 2020 Berjumlah 1 Juta 828 Ribu 285 Pemilih

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, 15 September 2020 menetapkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) dalam rapat pleno rekapitulasi DPS Pilkada di Four Point Hotel.

Jumlah DPS yang ditetapkan sebanyak 1.828.285 pemilih. Jumlah DPS di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut sendiri, jika dibandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 silam terjadi penurunan. Dimana, pada tahun lalu tercatat ada 1.907.841 pemilih. Dari jumlah itu terjadi penurunan 79.556 pemilih.

Ketua KPU Sulut Doktor.Ardiles.Mewoh menyatakan bersyukur karna rapat pleno terbuka ini sudah berjalan lancar sesuai mekanisme dan aturan.

Pihaknya kata Ardiles memberikan apresiasi kepada Bawaslu Sulut yang hadir melakukan pengawasan meski ada beberapa catatan-catatan.

Tandasnya Karena untuk mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas harus



dengan peran yang strategis dari Bawaslu dan stakeholder lainnya.

Sementara dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu, terdapat beberapa kabupaten kota yang ditemukan bawaslu terdapat catatan saran perbaikan. Terkait hal ini menurut Ardiles akan ditindaklanjuti KPU.

Jelas Mewoh pihaknya sudah sepakat dalam rapat pleno, bahwa akan dicermati setelah penetapan DPS.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut, Herwyn Malonda sendiri mengatakan pihaknya diberikan kewenangan UU untuk mengawasi seluruh tahapan.

Jelasnya, dalam konteks pemutakhiran data pemilih, pengawasan bawaslu untuk memastikan apakah semua proses sudah sesuai prosedur. Sedangkan secara substansi bawaslu hanya memastikan apakah ada pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih ataupun sebaliknya.

Lebih lanjut kata Malonda, secara kasat mata tugas bawaslu sebetulnya membantu tugas KPU. KPU menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan Bawaslu mengoreksi apabila ada prosedur dan data yang tidak sesuai. Dan proses itu akhirnya kita mendapatkan hasil walaupun ada catatan-catatan.

Malonda pun berharap hasil catatan bawaslu ditindak lanjuti. Termasuk juga tambahnya, problematika dan dinamika yang terjadi, menjadi bahan evaluasi KPU terutama juga Bawaslu untuk selanjutnya bagaimana kita menjalankan tugas dan wewenang bersama. KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis penyelenggaraan pemilu dan Bawaslu menjalankan tugas pengawasan termasuk mengawasi apa yang dilakukan KPU apakah sudah sesuai peraturan atau tidak.

Dalam rapat pleno itu, terdapat dua Kabupaten yang diberikan catatan terkait

hasil pleno DPS yakni Kabupaten Minahasa dan Kotamobagu.

Untuk Minahasa terkait, melakukan validasi data lagi dan melakukan verifikasi faktual. Termasuk pengecekan ke dinas soal elemen data seperti NIK. Dalam temuan Bawaslu Minahasa ada sekitar 2000-an pemilih yang harus diverifikasi kembali karena diduga tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 1.828.285 pemilih yang direkapitulasi oleh KPU Provinsi yang merupakan DPS, sebagian besar berada di Kota Manado, sebanyak 327.729 pemilih (DESI)

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

KPU Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Sulut/

MANADO—Daftar pemilih sementara (DPS) Sulut berjumlah 1.828.285. Dengan jumlah laki-laki 924.369 dan perempuan 903.916. Itu ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Selasa (15/9).

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya sudah lakukan pleno rekapitulasi DPS sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan.

“Dalam pleno kita beri kesempatan KPU kabupaten/kota membaca penetapan DPS di masing-masing daerah. Kemudian memberi kesempatan partai politik menanggapi dan Bawaslu juga. Jika tak ada persoalan, kita sahkan. Itu mekanisme yang ditempuh,” kata Ardiles.

Terkait saran penundaan, pihaknya sudah jelaskan ke Bawaslu dan akhirnya bisa menerima. “Memang ada kabupaten/kota yang diberi catatan oleh Bawaslu untuk saran perbaikan. Kita sepakat dalam pleno bahwa data yang disampaikan Bawaslu akan dicermati setelah ditetapkan DPS. Setelah itu kan ada tanggapan masyarakat menuju pada perubahan DPS,” terangnya.



Catatan-catatan itu, lanjutnya, akan ditindaklanjuti bersama Bawaslu untuk memastikan kebenarannya. “Kita masukkan dalam berita acara supaya menjadi dasar untuk tindak lanjut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menerangkan bahwa sebenarnya Bawaslu diberikan kewenangan mengawasi seluruh tahapan. “Dalam konteks data pemilih kita memastikan apakah semua proses sudah secara prosedural. Bawaslu mengoreksi apabila ada prosedur dan data yang tak sesuai. Itu membantu proses,” terangnya. Akhirnya, menurut Malonda, pihaknya dapat hasil meski dengan catatan ada tindaklanjuti.

DPT Pilkada 2020	
Jumlah kecamatan	171
Jumlah desa/kelurahan	1838
Jumlah TPS	5809
Jumlah Pemilih Laki-laki	596184
Pemilih Perempuan	905684
Total pemilih	1.831.867

DPT Pileg 2019:	
Jumlah kecamatan	171,
Jumlah desa/kelurahan	1.838,
Jumlah TPS	7.825,
Jumlah Pemilih Laki-laki	965.308,
Pemilih Perempuan	942.533,
Total pemilih.	1.907.841

Data Pemilih Sementara Sulut:	
Jumlah Kecamatan	171
Jumlah desa/kelurahan	1839
TPS	5.807
Laki-laki	924.369
Perempuan	903.916
	1.828.285

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Masih Ada Catatan, DPS Pilkada 1,8 Juta
MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dengan total berjumlah 1.828.285. Laki-laki 924.369 dan perempuan 903.916.

DPS ini ditetapkan dalam rapat pleno terbuka, Selasa (15/9). Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya sudah lakukan pleno rekapitulasi DPS sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan.

“Dalam pleno kita beri kesempatan KPU kabupaten/kota membaca penetapan DPS di masing-masing daerah. Kemudian memberi kesempatan partai politik menanggapi dan Bawaslu juga. Jika tak ada persoalan, kita sahkan. Itu mekanisme yang ditempuh,” kata Ardiles.

Terkait saran penundaan, pihaknya sudah jelaskan ke Bawaslu dan akhirnya bisa menerima. “Memang ada kabupaten/kota yang diberi catatan oleh Bawaslu untuk saran perbaikan. Kita sepakat dalam pleno data yang disampaikan Bawaslu akan dicermati setelah ditetapkan DPS. Setelah itu kan ada tanggapan masyarakat menuju pada perubahan DPS,” terangnya.

Catatan-catatan itu, lanjutnya, akan ditindaklanjuti bersama Bawaslu untuk memastikan kebenarannya. “Kita masukkan dalam berita acara supaya menjadi dasar untuk tindak lanjut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menerangkan sebenarnya Bawaslu diberikan kewenangan mengawasi seluruh tahapan. “Dalam konteks data pemilih kita memastikan apakah semua proses sudah secara prosedural. Bawaslu mengoreksi apabila ada prosedur dan data yang tak sesuai. Itu membantu proses,” terangnya. Akhirnya, menurut Malonda, pihaknya dapat hasil meski dengan catatan ada tindaklanjuti.

“Karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan hasil ini akan ditindaklanjuti ke depan. Termasuk dinamika akan jadi bahan evaluasi untuk bersama melakukan tugas penyelenggaraan,” jelasnya.

Dirinya menegaskan dari 15 kabupaten/kota semua sudah selesai. Namun ada catatan 2 daerah yakni Minahasa dan



Kotamobagu harus lakukan validasi data lagi, verifikasi faktual termasuk cek ke dinas karena ada elemen data belum terkonfirmasi. "Tapi seluruhnya sudah disetujui Bawaslu dengan ada catatan. Kita sepakat juga KPU-Bawaslu di semua tingkatan harus koordinasi. Yang paling penting komunikasi dan koordinasi," pungkasnya. (*)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

DPS Ditetapkan, Jumlah Pemilih Sulut Berkurang

MANADO—KPU Provinsi Sulut akhirnya menetapkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) dalam rapat pleno rekapitulasi DPS Pilkada Sulut 2020, Selasa (15/9). Jumlah DPS yang ditetapkan sebanyak 1.828.285 pemilih.

Jumlah DPS ini jika dibandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 silam terjadi penurunan. Dimana, pada tahun lalu tercatat ada 1.907.841 pemilih. Dari jumlah itu terjadi pengurangan 79.556 pemilih.

"Kita bersyukur karena rapat pleno terbuka ini sudah berjalan sesuai mekanisme. Rapat pleno penetapan DPS berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Pihaknya, kata Ardiles, memberikan apresiasi kepada Bawaslu Sulut yang hadir melakukan pengawasan meski ada beberapa catatan-catatan. "Kita juga bersyukur karena teman-teman Bawaslu hadir langsung melakukan pengawasan. Karena untuk mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas harus dengan peran yang strategis dari Bawaslu dan stakeholder," ujarnya.

Ada beberapa kabupaten/kota yang ditemukan Bawaslu terdapat catatan saran perbaikan. Terkait hal ini menurut Ardiles, akan ditindaklanjuti KPU. "Kita sudah sepakat dalam rapat pleno, bahwa

akan dicermati setelah penetapan DPS. Setelah ini kan masih ada proses tahapan tanggapan masyarakat menuju DPS perbaikan. Dan, temuan-temuan Bawaslu itu akan kita tindak lanjuti bersama untuk memastikan kebenarannya," kata Ardiles.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 1.828.285 pemilih yang direkapitulasi oleh KPU provinsi yang merupakan DPS, sebagian besar berada di Kota Manado. Dimana, ibu kota Provinsi Sulut ini tercatat ada 327.729 pemilih.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan, Bawaslu diberikan kewenangan UU untuk mengawasi seluruh tahapan. "Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, pengawasan Bawaslu untuk memastikan apakah semua proses sudah sesuai prosedural. Sedangkan secara substansi Bawaslu hanya memastikan, apakah ada pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih ataupun sebaliknya," terang Malonda.

Lanjut Malonda, secara kasat mata tugas Bawaslu sebetulnya membantu tugas KPU. "KPU menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan Bawaslu mengoreksi apabila ada prosedur dan data yang tidak sesuai. Dan, proses itu akhirnya kita mendapatkan hasil walaupun ada catatan-catatan," ujarnya.

Pihaknya pun berharap hasil catatan Bawaslu ditindaklanjuti. "Termasuk juga problematika dan dinamika yang terjadi, menjadi bahan evaluasi KPU terutama juga Bawaslu untuk selanjutnya bagaimana kita menjalankan tugas dan wewenang bersama. KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis penyelenggaraan pemilu dan Bawaslu menjalankan tugas pengawasan termasuk mengawasi apa yang dilakukan KPU, apakah sudah sesuai peraturan atau tidak," jelas Malonda.

Dalam rapat pleno itu, ada dua kabupaten yang memberikan catatan meski menerima



hasil pleno DPS yakni Minahasa dan Kotamobagu. “Minahasa terkait, melakukan validasi data lagi dan melakukan verifikasi faktual. Termasuk pengecekan ke dinas terkait soal elemen data seperti NIK,” kata Malonda.

Dalam temuan Bawaslu Minahasa ada sekitar 2000-an pemilih yang harus diverifikasi kembali karena diduga tidak memenuhi syarat. “Tadi sudah disampaikan dalam forum pleno, agar KPU, Bawaslu di semua tingkatan harus saling koordinasi agar jangan sampai temuan Bawaslu ini dikesampingkan. Apalagi sudah terbukti data Bawaslu Minahasa setelah diteliti ada beberapa data pemilih yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

KPU dan Bawaslu Sulut Tindaklanjuti Validasi Data DPS

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, dapat menghasilkan validasi data akurat.

Karenanya, berbagai elemen data yang belum lengkap dapat ditindaklanjuti melalui validasi data.

“Sangat diharapkan agar elemen data yang belum lengkap dapat segera ditindaklanjuti, melalui validasi data DPS kemudian melakukan verifikasi faktual termasuk mengecek data-data yang belum terkonfirmasi elemen data yang terkait dengan NIK,” ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut, Dr Herwyn JH Malonda saat menghadiri rapat pleno terbuka yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulut di Four Points Hotel, Selasa (15/9/2020).

Secara substansi, sambungnya, Bawaslu akan memastikan apakah ada pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk dalam

data pemilih. Atau sebaliknya apakah ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam data pemilih.

“Yang paling penting KPU dan Bawaslu di semua tingkatan harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Jangan sampai terkait hal ini ada yang dikesampingkan,” kata Malonda.

Malonda menambahkan tugas Bawaslu adalah membantu tugas KPU.

“KPU menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan Bawaslu yang akan mengoreksi apabila ada prosedur dari data yang tidak sesuai,” ungkap Malonda.

Diketahui, dalam rapat pleno masih menyisakan adanya catatan, yang disebabkan oleh batasan waktu. Namun demikian, hasilnya akan ditindaklanjuti kemudian. Berikut berbagai dinamika yang mencuat, akan menjadi bahan evaluasi KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

Rapat pleno rekapitulasi turut dihadiri KPU dari 15 kabupaten/kota, diikuti dengan pembacaan hasil rekapitulasi DPS yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota.

Menariknya ada dua kabupaten/kota yang belum lengkap elemen data DPS yakni Kabupaten Minahasa dan Kota Kotamobagu.

Akan hal tersebut, Malonda kembali menyampaikan agar elemen data dapat ditindaklanjuti, untuk kemudian dilakukan pemutakhiran.*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : *sulutreview.com*

Pilkada 2020, DPT Berkurang 100.000

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Minggu (18/10) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 1.831.867. Ini bertambah dari daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU sebelumnya yakni berjumlah 1.828.285.



Namun, jika dibandingkan dengan DPT pemilihan legislatif (pileg) 2019, DPT Pilkada 2020 ada pengurangan. Sebab berkurang dari total DPT pileg yakni 1.907.841.

Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu mengakui bahwa DPT ini bertambah sekira 3.000an dari DPS lalu yang ditetapkan. Begitu juga dengan jumlah TPS.

“Karena ada penambahan di TPS Lapas yakni bertambah 2 di TPS seluruh Sulut untuk kabupaten/kota Sangihe dan Minahasa Selatan. Dulu saat penetapan DPS total TPS 5.807, sekarang bertambah 2 jadi 5.809 TPS total di Sulut,” kata Lanny.

Dalam penetapan DPT ini juga, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun.

Hanya beberapa catatan-catatan kecil saja. “Memang masih banyak data masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan sudah disampaikan langsung kepada capil sebagai stakeholder yang hadir,” terangnya.

Kemudian, kata dia, ada juga beberapa catatan dari tim kampanye, khususnya paslon nomor tiga yang menanyakan terkait jika masih ada pemilih belum terdaftar, bagaimana perlakuannya.

“Tentunya mereka akan tetap diakomodir dalam DPTB atau jika ada masyarakat pindah memilih,” ucapnya. Dirinya mengakui pihaknya sudah menerima rekomendasi Bawaslu jauh hari sebelumnya. Pasca penetapan DPS KPU menerima beberapa rekomendasi dari Bawaslu terkait data ganda, NIK yang tidak ada, pemilih di bawah 17 tahun, pemilih di atas 70 tahun dan sudah diselesaikan bersama-sama dengan Bawaslu baik PPK, Panwascam maupun di tingkat kelurahan PPS dan PKD.

“Kita sama-sama menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dan data-data langsung kami turun ke lapangan. Dan itu sudah selesai melakukan pencermatan detail secara bersama-sama. Sehingga hasil hari ini tidak ada menjadi catatan dari Bawaslu,” tuturnya.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengakui memberi semacam catatan bahwa masih ada pekerjaan rumah

dari beberapa hal terkait pemilih yang belum memenuhi syarat masuk dalam DPT. “Kami minta KPU untuk ditindaklanjuti. Karena salah satu pekerjaan penyelenggara dan pemerintah yakni memenuhi hak pilih warga.

Masalah tak masuknya pemilih dalam daftar pemilih, ada banyak karena tak ada dokumen data kependudukan,” tandasnya.

Kemudian, pihaknya memberi saran terkait dengan pemilih di Lapas. Ditemukan warga Sulut yang alami masalah hak pilih di lapas.

Termasuk antisipasi melalui koordinasi dengan Kemenkumham agar tidak terjadi distribusi warga lapas dalam waktu dekat pemilihan. “Sebab itu pengaruhi surat suara.

Selanjutnya saran kami adalah pemilih ganda antara kab/kota yang berdekatan. Itu yang disarankan,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Ditetapkan 1,8 Juta Jiwa, DPT Sulut Berkurang

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 1.831.867 jiwa lewat rapat pleno terbuka di NDC Resort Kota Manado, Minggu (18/10) kemarin.

Jumlah DPT yang ditetapkan itu terdiri dari 926.184 pemilih laki-laki dan 905.683 pemilih perempuan yang tersebar di 5.809 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dari 1.839 Desa dan Kelurahan di Sulut. Menariknya, jumlah DPT Pilkada 2020 berkurang dibandingkan dengan jumlah pemilih Sulut pada Pilpres 2019 yang ditetapkan 1.907.841 tersebar di 7.825 TPS.

“DPT yang ditetapkan ini merupakan hasil perbaikan daftar pemilih dalam DPS (daftar pemilih sementara) berdasarkan temuan dan rekomendasi dari sejumlah pihak termasuk Bawaslu, “ ujar Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Jumlah DPT ini diketahui bertambah dibanding dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya juga sudah di



rapat plenokan September lalu. Untuk DPS saat itu ada sebanyak 1.828.285 pemilih dan terjadi penambahan 3.582 pemilih pada DPT. Berdasarkan data DPT yang ditetapkan KPU, Kota Manado sebagai ibukota provinsi menjadi wilayah dengan jumlah DPT terbanyak yakni 328.539 pemilih.

Sementara DPT terkecil ada di Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah pemilih 47.383 orang.(Selengkapnya lihat grafis.)

“Terjadi penambahan sekitar 3 ribuan pemilih dari jumlah DPS. Penambahan setelah dicermati dan masukkan dari berbagai pihak termasuk rekomendasi Bawaslu. Juga ada perbaikan data dari lapas dan itu harus diakomodir untuk menjaga tak konstitusi warga negara, meski mereka berada di penjara, “ ungkap komisioner KPU Sulut divisi data, Lanny Ountu. Lanny mengatakan, warga yang belum masuk DPT masih memiliki peluang menggunakan hak suara. Mereka bisa datang ke TPS terdekat pukul 13.00-14.00 Wita. “Data pemilih akan terus bergerak hingga hari H pemilihan. Warga yang belum masuk dalam DPT akan diakomodir dalam DPT Tambahan,” kata Lanny.

Pleno DPT ikut di pantau Bawaslu Sulut, dan dihadiri utusan parpol dan tim pemenangan calon juga Dinas Dukcapil.

Penulis : *Billy Tambahani*
Sumber : *Harian Komentor*

KPU Tetapkan Pemilih Terdaftar di Sulut Sebanyak 1.831.867

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020. Lewat rapat pleno KPU Sulut yang dilaksanakan Minggu (18/10/2020), disahkan sebanyak 1.831.867 orang dengan perincian 926.184 pemilih laki-laki dan perempuan 905.683 pemilih.

Sebagaimana jumlah yang terdaftar dalam data Pemilih, Kota Manado, menjadi

wilayah dengan jumlah DPT terbanyak yakni 328.539 pemilih., sementara untuk wilayah dengan DPT terkecil yakni Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah pemilih 47.383 orang.

“Mereka yang namanya sudah terdaftar dalam DPT nantinya akan memberikan hak suaranya di 5.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.839 Desa dan Kelurahan di Sulut,” jelas Lani Ointu SE Komisioner KPU Sulut Divisi Perencanaan Data dan Informasi. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Sumber : *sulutnews.com*

KPU Tetapkan DPT Pilkada Sulut Berjumlah 1,8 Juta Pemilih

MANADO—KPU Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan pada pelaksanaan Pilkada Sulut 2020, berjumlah 1.831.867 yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Penetapan ini dilaksanakan pada rapat pleno terbuka yang digelar di Manado.

Dijelaskan Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, penetapan DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, dilakukan berjenjang dari tingkatan paling bawah yakni PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Kota dan terakhir di tingkat Provinsi.

“Tahapan penetapan DPT ini sudah dilaksanakan sejak 23 Januari 2020, saat menerima DP4 disinkronisasi, kemudian di Coklit dan seterusnya. Ini menjadi tahapan yang paling panjang dalam pemilihan kepala daerah yang tentu sudah menguras begitu banyak energi,” kata Ardiles.

Ardiles mengatakan, walaupun DPT telah ditetapkan, tetapi tahapan pemutakhiran tidak berhenti pada rapat pleno tersebut. Dikatakannya, jika memang masih ada catatan potensi adanya pemilih ganda atau ada pemilih tak terdaftar yang sesuai dengan aturan, pihaknya tetap akan mengakomodir hal tersebut.



Dicontohkannya seperti jika ada pemilih yang meninggal atau berubah status menjadi TNI/Polri saat sudah ditetapkan DPT, maka pihak KPU akan segera melakukan penghapusan data yang ada di DPT.

“Nanti ada Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan,” tutur Ardiles.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengucapkan terima kasih kepada KPU Sulut dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah bekerja keras dan tentu merespon apa yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu, sebelum melakukan penetapan DPT.

“Semoga dalam proses penyusunan daftar pemilih tambahan dan tentu pelayanan pemilih pindahan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan meneguhkan prinsip-prinsip imprasialitas dalam penyelenggaraan pilkada maupun dilakukan secara transparan,” ujar Poluan.

Turut hadir, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Yessy Momongan dan Lanny Ointu. Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan dan Supriyadi Pangelu, serta stakeholder dan LO Paslon nomor satu, dua dan tiga. Rapat pleno dilangsungkan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.*

Penulis: *Oktaviana Mundung*

Sumber: *kumparan.com*

Pemilih Sulut ‘Hilang’ 75.974

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (18/10) kemarin menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan gubernur Sulut tahun 2020 yang dipimpin Ketua KPU Ardiles Mewoh.

Di mana total pemilih 1.831.867. Jika menilik jumlah DPT pada pemilu 2019 lalu sebanyak 1.907.841, maka Sulut kehilangan 75.974. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointoe pada wartawan mengatakan, dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diplenokan

beberapa waktu lalu, terjadi ketambahan 3.000-an pemilih di DPT. “Begitu juga jumlah TPS. Karena ada penambahan di TPS Lapas. Jadi TPS bertambah 2 di seluruh Sulut. Di Kabupaten Sangihe dan Minahasa Selatan. Dulu saat penetapan DPS total TPS 5.807 sekarang bertambah 2 jadi 5.809 TPS,” urainya.

Dalam pleno ini dia menambahkan, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun. Hanya beberapa catatan-catatan kecil saja. “Memang masih banyak data masyarakat belum memiliki dokumen kependudukan dan sudah disampaikan langsung kepada Capil sebagai stakeholder yang hadir. Ada juga beberapa catatan dari tim kampanye khususnya paslon nomor tiga menanyakan terkait jika masih ada pemilih belum terdaftar bagaimana perlakuannya. Tentunya mereka akan tetap diakomodir dalam DPTb. Atau jika ada masyarakat pindah memilih,” jelasnya, sembari bersyukur karena bisa menetapkan DPT dengan lancar tanpa ada masalah apapun.

“Memang kami sudah menerima rekomendasi Bawaslu jauh hari sebelumnya.

Pasca penetapan DPS kami menerima beberapa rekomendasi dari Bawaslu terkait data ganda, NIK tidak ada, pemilih di bawah 17 tahun, pemilih di atas 70 tahun, itu sudah kami selesaikan. Kami lakukan pencermatan bersama Bawaslu. Baik PPK, Panwascam, maupun di tingkat kelurahan PPS dan PKD,” tuturnya. Menurut Ointoe, masalah-masalah tersebut diselesaikan sama-sama. “Kami langsung turun ke lapangan dan itu sudah selesai melakukan pencermatan detail secara bersama-sama. Sehingga hasil hari ini tidak ada yang menjadi catatan dari Bawaslu,” kuncinya.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan pihaknya mengapresiasi KPU Sulut dan kabupaten/kota dengan terselenggaranya rekap tingkat provinsi. “Kami memberi semacam catatan. Masih ada pekerjaan rumah dari beberapa hal terkait pemilih yang belum memenuhi



syarat masuk DPT. Kami meminta KPU dan semua pihak terkait dengan administrasi kependudukan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Karena, kata Poluan, salah satu pekerjaan dari penyelenggara adalah pemenuhan hak pilih negara. “Jadi kalau misalnya menemukan kendala masuk dalam daftar pemilih, harus dipenuhi hak-hak mereka. Baik dari KPU, Bawaslu, terutama Dukcapil.

Karena paling banyak tak masuk DPT adalah karena mereka tak memiliki dokumen kependudukan,” urainya.

Lebih jauh dia mengatakan, Bawaslu juga memberi saran terkait pemilih di Lapas. Beberapa ditemukan warga Sulut mengalami masalah hak pilihnya di Lapas.

Termasuk antisipasi melalui mekanisme koordinasi dengan Menkumham. Agar tak terjadi distribusi warga Lapas atau tahanan.

“Karena itu akan mempengaruhi surat suara. Misalnya warga binaan yang masuk lebih banyak daripada keluar. Ini harus diantisipasi. Kami sudah minta Menkumham upgrade warga binaan dan membatasi lapas atau rutan setidaknya dua minggu sebelum 9 Desember,” tukasnya.

Selanjutnya Poluan menyinggung mengenai pemilih ganda antar kabupaten/kota. “Tadi disetujui perlakuannya bisa dilakukan seperti pemilih meninggal dunia atau pindah daerah. Jadi langsung dihapus atau dihilangkan,” kuncinya.(gel)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Plenokan Daftar Pemilih Tetap

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut telah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, lewat rapat pleno yang dilaksanakan, Minggu (18/10/2020).

DPT Sulut yang disahkan sebanyak 1.831.867 dengan perincian 926.184 pemilih laki-laki dan perempuan 905.683 pemilih.

Untuk Kota Manado, jumlah DPT terbanyak 328.539 pemilih. DPT terkecil ada di Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah pemilih 47.383 orang. Ada 5.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.839 Desa dan Kelurahan.

Ini data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/Kota

1. Kota Manado 328.539
2. Kota Bitung 145.402
3. Kota Tomohon 73.633
4. Kabupaten Minahasa Selatan 160.908
5. Kabupaten Minahasa Utara 151.147
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 53.711
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 47.383
8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 52.710
9. Kabupaten Kepulauan Sangihe 106.168
10. Kabupaten Kepulauan Talaud 69.432
11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 57.671
12. Kabupaten Bolaang Mongondow 166.144
13. Kota Kotamobagu 85.639
14. Kabupaten Minahasa Tenggara 85.377
15. Kabupaten Minahasa 248.003. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

Kantongi KK dan KTP,2 Warga Filipina Masuk Daftar Pemilih di Pilkada Sulut

MANADO—Dua warga Filipina teridentifikasi bernama Jeane Bubak dan Robby Francisco masuk dalam daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Utara.

Data yang dihimpun dua WNA asal Filipina ini memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Jeane terdata di Desa Loyow, Kecamatan Nuangan. Sedangkan, Robby Francisco



di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.

Komisioner KPU Sulut Lanny Anggriany Ointu saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, sudah menerima informasi tersebut.

“Kedua warga tersebut masih masuk dalam daftar pemilih karena sumber data tersebut dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4),” ungkap Lanny.

Lanny mengakui bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang difaktualkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat itu memang mereka kantongi KK dan KTP.

“Kami sementara koordinasi dengan capil dan Kementerian Hukum dan HAM terkait nama-nama yang bersangkutan. Karena KTP tersebut tertulis jelas status kenegaraannya WNI,” ucap Lanny. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

PEMILIHAN SERENTAK: Ini Detail DPT per Kabupaten/Kota di Sulut

MANADO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut baru saja menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut, Minggu (18/10/2020).

DPT yang diketuk KPU Sulut berjumlah 1.831.867 pemilih, dengan perincian 926.184 laki-laki dan perempuan 905.683.

Penetapan rekapitulasi DPT dilakukan lewat rapat pleno yang dihadiri lima komisioner KPU dan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu Sulut.

Kota Manado sebagai ibukota provinsi menjadi wilayah dengan jumlah DPT terbanyak yakni 328.539 pemilih.

Sementara DPT terkecil ada di Bolaang Mongondow Selatan dengan 47.383 orang.

Berikut detail DPT Provinsi berdasarkan kabupaten/kota:

1. Kota Manado 328.539
2. Kota Bitung 145.402
3. Kota Tomohon 73.633
4. Kabupaten Minahasa Selatan 160.908
5. Kabupaten Minahasa Utara 151.147
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 53.711
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 47.383
8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 52.710
9. Kabupaten Kepulauan Sangihe 106.168
10. Kabupaten Kepulauan Talaud 69.432
11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 57.671
12. Kabupaten Bolaang Mongondow 166.144
13. Kota Kotamobagu 85.639
14. Kabupaten Minahasa Tenggara 85.377
15. Kabupaten Minahasa 248.003

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Plenokan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

SULUT -- Minggu (18/10/20), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut gelar rapat pleno di NDC Manado.

Dalam Rapat pleno ini, KPU Sulut telah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. DPT Sulut yang disahkan sebanyak 1.831.867 dengan perincian 926.184 pemilih laki-laki dan perempuan 905.683 pemilih.

Untuk Kota Manado, jumlah DPT terbanyak 328.539 pemilih. DPT terkecil ada di



Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah pemilih 47.383 orang. Ada 5.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.839 Desa dan Kelurahan.

Ini data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/Kota :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Warga	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Perempuan
					L	P	Jumlah	
1	Kota Manado	11	67	409	169.747	166.767	336.514	
2	Kota Bitung	4	36	584	75.217	72.160	147.377	
3	Kota Tomohon	3	46	220	56.858	56.858	113.716	
4	Kabupaten Minahasa Selatan	17	177	214	22.723	22.200	44.923	
5	Kabupaten Minahasa Utara	13	130	478	72.222	70.428	142.650	
6	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	7	34	387	37.866	36.888	74.754	
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	34	433	49.866	48.790	98.656	
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	33	33	148	36.171	36.500	72.671	
9	Kabupaten Kepulauan Sangihe	11	117	340	53.800	52.917	106.717	
10	Kabupaten Kepulauan Talaud	14	144	371	59.207	58.170	117.377	
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	6	103	171	39.480	38.200	77.680	
12	Kabupaten Bolaang Mongondow	10	100	170	83.366	82.190	165.556	
13	Kota Kotamobagu	4	38	308	43.220	42.410	85.630	
14	Kabupaten Minahasa Tenggara	10	144	390	62.227	61.200	123.427	
15	Kabupaten Minahasa	30	270	460	120.000	118.800	238.800	
TOTAL		173	1.839	5.809	1.000.000	980.000	1.980.000	

1. Kota Manado 328.539
2. Kota Bitung 145.402
3. Kota Tomohon 73.633
4. Kabupaten Minahasa Selatan 160.908
5. Kabupaten Minahasa Utara 151.147
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 53.711
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 47.383
8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 52.710
9. Kabupaten Kepulauan Sangihe 106.168
10. Kabupaten Kepulauan Talaud 69.432
11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 57.671
12. Kabupaten Bolaang Mongondow 166.144
13. Kota Kotamobagu 85.639
14. Kabupaten Minahasa Tenggara 85.377
15. Kabupaten Minahasa 248.003.(*)

Penulis : Friska Tewu
Sumber : portalsulutnews.com

Jamin Hak Warga, Fatoni Apresiasi KPU Sulut

MINUT—Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni memberi apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Hal itu diungkapkan Fatoni terkait dengan pelaksanaan launching Gerakan Nasional Dukung Rekam KTP Elektronik (KTP-EI) se-Provinsi Sulut yang digelar di Kantor Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Jumat (13/11) pekan lalu. Menurut Fatoni, kegiatan ini sangat baik karena untuk melindungi hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak 9 Desember 2020. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU yang membuat acara ini di Sulut. Kami memberikan apresiasi untuk terus mewujudkan pilkada yang sukses, damai, aman dan sehat,” kata Fatoni.

Ia pun mengingatkan bahwa pilkada yang akan diselenggarakan di Sulut merupakan tanggungjawab semua pihak. “Pelaksanaan pilkada menjadi tanggung jawab kita bersama, semua elemen masyarakat dan seluruh stakeholder,” tuturnya.

Fatoni mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Sulut untuk melakukan perekaman KTP-EI agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada. “Oleh karena itu, sekali lagi kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya yang belum terdaftar untuk bersama-sama merekam KTP elektronik,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Gelar Workshop

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (18/12/2019) menggelar kegiatan Workshop Diseminasi dan Uji Publik Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020, di salah satu ruang rapat di Hotel Four Point Manado.

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, SH dan menghadirkan narasumber handal yaitu, Dr. Sri Nuryanti, SIP, M.Si, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga mantan Komisioner KPU RI, Dr. Ferry Daud Liando, SIP, M.Si dari Program Tata Kelola Pemilu UNSRAT, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Dr. Hardjono, SH, MCL ini berlangsung menarik. Salah satu topik mencuat yakni tentang DPT dan Pemutakhiran Data.

Di awal workshop berlangsung, Ardiles mengatakan tentang partisipasi masyarakat mewujudkan data pemilih berkualitas.

Dilanjutkan dengan materi kedua oleh Dr. Sri Nuryanti, SIP, M.Si. Topik yang dibahas adalah, Problematika, Tantangan dan Upaya Strategis-Teknis Perlindungan Hak Pilih Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

“Tidak ada warga negara yang berhak dan tidak tercatat. Sumber data harus jelas,” tutur Sri sembari menambahkan bila mutasi kependudukan bisa membuat data invalid yang berpengaruh terhadap pemutakhiran data.

Dirinya pun memaparkan langkah yang harus diambil penyelenggara saat pemutakhiran data. “Pertama, petugas pemutakhiran dapat di-bimtek. Pembuatan alat bantu yang terkontrol, menggunakan waktu berkoordinasi dengan dukcapil, menggunakan metode konvensional dengan menggunakan media sosial seperti facebook, whatsapp, dan lainnya untuk memudahkan sosialisasi. Dan, materi sosialisasi beragam yaitu menggunakan bahasa lokal,” tutup pemateri Sri serta berharap Pilkada di Sulut nanti bisa berjalan lancar.

Sementara pemateri ketiga, Dr. Ferry Daud Liando, SIP, M.Si mengulas topik soal Mencari Best Practice Data Pemilih Berkualitas.

“Harus ada pemetaan masalah sehingga KPU tidak mengulang masalah-masalah yang sudah lewat. Mulai dari sekarang harus dibuat pemetaan, cara pencegahan dimulai dari sekarang,” ucap Liando yang juga adalah personil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sulut ini.

Dirinya pun mengungkapkan, ada masyarakat yang tidak terdaftar karena kelalaian petugas (pendata).

Pun pemateri terakhir, Ketua DKPP RI Dr. Hardjono, SH, MCL menyampaikan terkait Profesionalitas Penyelenggara dan Potensi Pelanggaran Kode Etik Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

“Siapa pun yang menemukan ada pelanggaran laporkan kepada kami tapi harus disertai dengan bukti-bukti. DKPP mengawasi dalam hal etika,” kata Hardjono seraya menegaskan bila kedaulatan ada di tangan rakyat.

Sedangkan terkait workshop yang digelar KPU Sulut ini, Komisioner KPU Provinsi Sulut, Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Yafeth Tinangon mengungkapkan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan 18 – 20 Desember 2019.

Di samping itu ditambahkan Tinangon, keterlibatan stakeholder sangat penting dalam kegiatan ini.

“Kita mengundang para stakeholder, sebagai bagian dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum,” kunci Tinangon.*(Jane)

Penulis: *Jane Tungkagi*
Sumber: *ciintasulut.com*

Hari Pencoblosan, Pemilih Tambahan Bisa Tunjukkan KTP

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mamastikan warga yang mempunyai hak pilih bisa gunakan haknya saat 9 Desember mendatang. Sebelumnya KPU telah menetapkan data pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Sulut. Meski begitu,



masih ada ruang bagi pemilih yang belum masuk DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih. Dijelaskan Komisioner KPU Sulut Divisi Perencanaan dan Data, Lanny Ointu, ada tiga jenis data pemilih di TPS 9 Desember nanti. Yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB).

“DPT sudah kita tetapkan. Sedangkan pemilih pindahan adalah mereka yang terdaftar dalam DPT, tapi karena alasan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS dimana pemilih terdaftar,” kata Lanny. Mantan PPLN juga menerangkan bahwa pemilih tambahan adalah pemilih

yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih. “Mereka dapat gunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP sesuai alamat TPS di desa atau kelurahan,” tambah mantan PPK di salah satu kecamatan di Manado.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*



Epilog

ZONA merah tetap disasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih lewat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Sayang, isu data pemilih kurang populer di awal-awal tahapan. ‘Puncak’ populer isu ini mendekati hari pemungutan suara. Padahal pemutakhiran data pemilih adalah tahapan paling panjang dalam pemilihan.

Berbagai hambatan ditemui. Di antaranya memasukkan nama di Sidalih yang tidak mudah. Ada proses mekanisme yang harus dilalui PPDP di tingkat paling bawah. Begitu juga tantangan petugas yang harus menjalani rapid tes sebelum turun ke masyarakat. Akibat pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia.

Keterbukaan pada publik terkait pemutakhiran data pemilih dilakukan KPU. Dengan menyiapkan website www.lindungihakpilihmu.kpu.co.id. Di situ terdapat jumlah pemilih dalam daftar A.KWK yang akan dicoklit KPU melalui PPDP. Proses coklit yang dilalui KPU juga bertemu dengan benturan pemekaran wilayah. Yang masih bermasalah soal pemekaran yakni Bolsel, Bolmong dan Boltim. Daerah itu yang memang kasus angka pemekaran wilayahnya banyak. Di samping itu, KPU memastikan jika semua data pribadi pemilik disimpan dan dilindungi kerahasiaannya. Kerja sama antar lembaga terkait pemutakhiran data pemilih juga intens dilakukan. KPU langsung menindaklanjuti temuan Bawaslu.



Kemudian proses pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak mendapat hambatan berarti. Meski ada beberapa catatan dari Bawaslu. Di mana ada kabupaten/kota yang diberi catatan oleh Bawaslu untuk saran perbaikan. Disepakati dalam pleno data yang disampaikan Bawaslu dicermati setelah ditetapkan DPS. Setelah itu ada tanggapan masyarakat menuju pada perubahan DPS. Jumlah DPS yang diplenokan 1.828.285.

Selanjutnya KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 1.831.867. Ini bertambah dari daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU sebelumnya yakni berjumlah 1.828.285. Namun, jika dibandingkan dengan DPT pemilihan legislatif (pileg) 2019, DPT Pilkada 2020 ada pengurangan. Sebab berkurang dari total DPT pileg yakni 1.907.841.

Ada yang menarik saat pemungutan suara. Dua warga Filipina teridentifikasi masuk dalam daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Utara. WNA asal Filipina ini memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Penulis : *Levrando Kambey*

Sumber : *Harian (Radar) Manado*



**komisi
pemilihan
umum**
Sulawesi Utara

Bab IV

Pendaftaran Pasangan Calon



Pendaftaran Pasangan Calon

KPU Sulut Sosialisasi Penyerahan Dukungan

Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur

MANADO—Sosialisasi dan rapat koordinasi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020, dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulut, Jumat (14/02/2020).

Kegiatan dibuka Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan dihadiri anggota KPU Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Lanny Ointu, dan Salman Saelangi. Dalam sambutannya, Ardiles mengemukakan, kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme penerimaan dokumen dukungan bakal calon perseorangan di provinsi maupun di 7 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Sosialisasi dilaksanakan sesuai PKPU nomor 16 tahun 2019 program terkait jadwal pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. “Kami akan menerima dokumen dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut mulai 16-20 Februari 2020,” ujarnya.

Sementara itu, Lanny menambahkan, untuk penerimaan dokumen bakal calon syarat dukungan untuk calon minimal 190.812 dukungan KTP yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Sulut. Dengan jumlah DPT 1.908.115 dari jumlah penduduk 2.645.118 di Sulut. Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulut, KPU Kabupaten/Kota se-Sulut, unsur Kepolisian, Kejaksaan, Dukcapil

ini.

Bahkan digelar juga simulasi penyerahan dokumen dukungan calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan yang melibatkan semua peserta termasuk para jurnalis.(*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

Verfak Calon Perseorangan Selama 14 hari

MANADO—Pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulut akan memasuki tahapan verifikasi faktual (verfak) calon perseorangan. Berdasarkan jadwal, tahapan verfak berlangsung selama 14 hari. Dimulai Senin (29/6) kemarin oleh KPU. Berdasarkan PKPU 5/2020, tahapan verifikasi faktual berkas dukungan bakal calon perseorangan sudah dimulai sejak 24 Juni dan berakhir 12 Juli.

“Untuk pemilihan gubernur (pilgub) tidak ada verifikasi calon perseorangan karena tak ada kandidat yang mendaftar. Di Sulut hanya ada tiga daerah yang memiliki calon perseorangan. Yaitu Manado, Minsel, dan Tomohon,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Salman Saelangi, kemarin.

Lanjut Salman, syarat minimal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan berbeda-beda tiap daerah. “Angka syarat minimal dukungan dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing wilayah,” ujarnya.

Khusus pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250.000,



syarat minimal dukungan sebesar 10 persen. Bagi daerah dengan jumlah DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 500.000 – 1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta.

Sementara itu, Bawaslu warning sejumlah potensi kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan ini. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin, Bawaslu Provinsi Sulut, Supriyadi Pangellu mengatakan, ada beberapa potensi pelanggaran terjadi dan menjadi pengawasan ketat dalam tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Diantaranya berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, adanya dukungan palsu serta pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

“Kami akan melakukan pengawasan ketat terkait tahapan verifikasi bakal calon perseorangan ini. Ada beberapa potensi kecurangan yang bisa terjadi dan konsekuensi hukumnya bisa dipidana penjara. Masalah hukum yang muncul bisa saja ada warga dengan sengaja memalsukan daftar dukungan. Atau ada yang memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas palsu untuk mendukung pasangan calon independen. Kemudian, Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap pasangan calon,” terang Pangellu.

Mantan personil Bawaslu Talaud dan Kota Manado ini menegaskan, konsekuensi hukum terhadap potensi pelanggaran itu yakni pidana penjara dan denda.

“Pasal 185 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Setiap warga yang memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan identitas palsu bisa dipenjarakan maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp 36 juta. Pasal 185a, setiap orang yang memalsukan daftar dukungan dipidana penjara minimal

3 tahun (46 bulan) dan denda maksimal Rp 72 juta. Sedangkan, anggota PPS dapat diduga melakukan pelanggaran etika, bisa dikenakan pidana penjara maksimal 72 bulan minimal 36 bulan dan denda maksimal 72 juta sebagaimana pasal 185 B dan 186 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” terang Pangellu.

Selain pengawasan terhadap potensi pelanggaran itu, Bawaslu juga mengawasi orang yang dilarang untuk memberikan dukungan, dalam verifikasi dukungan perseorangan seperti ASN, TNI, Polri.

“Tujuan pelaksanaan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran data pendukung. Karena itu, terdapat tiga hal nanti yang akan dipastikan selama verifikasi faktual berlangsung, yakni memastikan nama, alamat pendukung, dan kebenaran dukungan. Kami ingatkan pengawas, dalam proses verifikasi untuk memastikan akurasi keabsahan, kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar putra Bumi Porodisa ini.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentar*

KPU Sulut Sosialisasi Calon Perseorangan Untuk Pilgub 2020

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut jelang Pilkada 2020, mulai melakukan sosialisasi pencalonan perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Kegiatan sosialisasi calon perseorangan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Dalam sambutannya Mewoh mengatakan, pentingnya kegiatan sosialisasi ini dikarenakan dalam pilkada nanti ada dua jalur yang bisa diikuti pertama lewat jalur partai politik dan kedua lewat jalur perseorangan.

“Kami selaku penyelenggara pemilu perlu menggelar sosialisasi menyeluruh juga kepada semua pihak. Harus kita sampaikan terkait jalur perseorangan supaya tidak ada hambatan informasi untuk mengetahui



regulasi, ketentuan-ketentuan teknis, serta skema waktu tahapannya,” ungkap Mewoh.

Lanjut Mewoh, dalam proses verifikasi para peserta nantinya sudah disediakan aplikasi online guna mempermudah proses tersebut.

“KPU Provinsi sudah membuka layanan tersebut di hari kerja mulai kemarin tanggal 3 Desember,” jelasnya.

Masih menurut dia, tahapan sosialisasi pencalonan perseorangan ini sudah diumumkan baik lewat media cetak maupun media elektronik. “Waktunya masih panjang maka dapat dipersiapkan dengan baik oleh bakal calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen, pada tanggal 16 sampai dengan 20 Februari 2020,” ucap Mewoh, sembari menambahkan minimal dukungan jumlahnya 1.812.000 suara dan harus tersebar lebih dari 50% di 15 Kabupaten dan Kota.

Hadir sebagai pemateri yakni Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Yessy Momongan, Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Sulut, Salman Saelang dengan moderator Kasubag Teknis dan Parmas KPU Sulut Ruddy Laonsang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan KPU Sulut, Rabu (4/12/2019). (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Tak Layani Peserta Pemilu di Luar Kantor

MANADO—Guna menjaga integritas dan profesionalitas, setiap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak akan melayani peserta pemilu di luar kantor. Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh. Menurutnya ini dilakukan, untuk menjaga independensi dan marwah penyelenggara Pemilu.

“Memang sebagai penyelenggara Pemilu, melayani peserta adalah suatu kewajiban. Tapi kami tegas untuk tidak melayani mereka di luar kantor. ini untuk menghindari hubungan

yang terlalu dekat dengan peserta Pemilu, yang dapat merusak integritas,” tegasnya.

Mewoh mengatakan KPU Sulut, akan selalu melayani seluruh peserta yang datang di KPU untuk berkonsultasi. “Tapi jika ada yang ingin janji dan sebagainya untuk bertemu, secara tegas kita tolak. Sebab layanan konsultasi selalu tersedia di kantor KPU, bukan ditempat lain,” terang dia.

“Sehingga saya meminta kepada seluruh komisioner KPU di tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra kita sebagai penyelenggara,” kunci akademisi Unsrat tersebut. (*)

Penulis *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Tahapan Pendaftaran Calon Ditunda? Begini Penegasan Ketua KPU Sulut

MANADO—Sempat beredar isu tahapan pendaftaran calon pada pemilihan serentak diundur ke tanggal 6-9 September 2020.

Kabar tersebut buru-buru diklarifikasi oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Kamis (27/8/2020).

Kepada BeritaManado.com, Ardiles Mewoh menegaskan, masa pendaftaran untuk menjadi calon kepala daerah di kabupaten/kota yang menggelar pesta demokrasi, tetap sama sesuai tahapan awal.

“Berdasarkan jadwal 4-6 September 2020,” tegas Ardiles Mewoh. Menurut Ardiles, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Dikatakan, dihari pertama dan kedua pendaftaran KPU menerima berkas kandidat hingga pukul 16.00. “Dan pada hari terakhir di tanggal 6 September, KPU menunggu sampai jam 12 malam,” bebarnya.

Selanjutnya, kata Ardiles, setelah para kandidat mendaftar, akan diagendakan



pemeriksaan kesehatan pada 4-11 September 2020. Kemudian pengumuman hasil 11-12 September 2020. “Jika nanti ada keberatan dalam penetapan pasangan calon, KPU memberikan peluang mengajukan permohonan dan menyelesaikan sengketa pada 23 September hingga 9 November 2020,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Mulai Terima Dokumen Paslon Perseorangan

MANADO—Mendatangkan Bawaslu serta Komisioner KPU kabupaten/kota, KPU Sulut menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi tahapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, Jumat (14/2). Acara ini dilaksanakan digelar di Aula KPU Sulut.

Dalam pengantarnya, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menekankan, sebagai penyelenggara wajib memastikan Pilkada serentak berjalan sesuai aturan.

“Semua tahapan siap kita lakukan. Termasuk tahapan penerimaan dokumen dukungan calon perseorangan gubernur dan wagub,” bebernya.

Tahapan tersebut dimulai pada 15-20 Februari. Dengan jumlah syarat dukungan minimal 190.415 dukungan KTP. Tersebar di 15 kabupaten/kota se-Sulut. “Khusus tahapan pencalonan perseorangan sudah kita awali sejak Oktober 2019 lalu. Kita telah menyosialisasikan terkait minimal dukungan,” jelasnya.

Kemudian mengenai tahapan penyerahan dokumen berkas paslon, kata Mewoh, wajib diketahui masyarakat. “Penyelenggara pun diminta memperhatikan hal ini,” tegas Mewoh.

Di sisi lain, komisioner KPU Yessy Momongan menjelaskan mengenai tata cara penerimaan syarat dukungan. Termasuk

ikut memandu simulasi pendaftaran paslon. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara ini menjelaskan, sosialisasi tersebut sangat penting.

“Agar semua pihak berkepentingan memahami tahapan ini dan yang paling penting dijalankan dengan asas transparansi,” kata Momongan. Diapun menguraikan alasan mengapa memilih sosialisasi dengan melibatkan media massa dan stakeholder terkait. “Ini bagian dari komitmen kita, menjalankan tahapan Pilkada dengan transparan,” tegasnya.(gel)

Penulis *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Gelar Simulasi Penyerahan Dukungan BaLon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan tahapan dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 23 September 2020 nanti.

Saat ini, KPU Sulut menggelar kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon (BaLon) Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, di ruangan Aula Kantor KPU Sulut di Jalan Diponegoro Manado, Jumat (14/2/2020).

Dalam kegiatan ini dilakukan pula simulasi yang diawasi langsung oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh dan Komisioner KPU Sulut sekaligus Ketua Divisi Teknis, Yessy Momongan, serta Kepala Sub (Kasub) Bagian Teknis, Rudi Lalonsang.

Simulasi yang diawasi langsung oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh dan Komisioner sekaligus Ketua Divisi Teknis, Yessy Momongan juga Kasub Bagian Teknis, Rudi Lalonsang.

Sebelumnya, pada pembukaan kegiatan Sosialisasi dan Rakor, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh dalam sambutannya



menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut sesuai PKPU No 16 tahun 2019 program terkait jadwal pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“KPU mulai menerima dokumen dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur mulai 15-20 Februari 2020, dengan memasukkan syarat dukungan untuk calon minimal 190.415 dukungan KTP yang tersebar di 15 Kabupaten Kota se Sulut,” tutur Mewoh.

Kegiatan sosialisasi juga dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang sengketa dan pelanggaran dalam tahapan calon oleh Komisioner KPU Sulut yang juga Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon. Hadir pula di kegiatan ini yaitu Komisioner KPU Sulut lainnya yakni Yessy Momongan, Lanny. A Ointu, dan Salman Saelang; Bawaslu Sulut; KPU Kabupaten/ Kota se Sulut; utusan Kepolisian; Kejaksaan; dan Dukcapil.* (jane)

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *ciintasulut.com/February14, 2020*

Independen Nihil,VAP Cagub Perempuan Populer

MANADO—Kian sengit saja persaingan menuju kursi gubernur. Dipastikan, pertarungan nanti tak akan dihiasi calon dari independen. Karena tadi malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sudah menutup tahapan pemasukan berkas independen. Hasilnya hingga batas waktu yang ditentukan, 20 Februari pukul 24.00, tak ada satupun yang datang menyerahkan dokumen syarat dukungan.

“Dengan demikian dalam pilgub 2020 tak ada jalur perseorangan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi komisioner Yessy Momongan, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon. Proses tersebut diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut.

Dengan begitu, tersisa pertarungan antara partai politik. Jika PDI Perjuangan sudah jelas mengusung Olly Dondokambey-Steven Kandouw, partai lain masih menunggu

rekomendasi. Hanya saja sejumlah nama mulai mengerucut. Dari polling yang dilakukan Manado Post, masih menempatkan incumbent Olly Dondokambey sebagai calon gubernur paling populer di masyarakat. Hal tersebut tak bisa dibantah. Mengingat selain petahana, partai yang dipimpin Olly, PDI Perjuangan adalah pemenang di Pileg 2019.

Di bawah Olly, ada srikandi Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan (VAP). Dari beberapa nama kandidat perempuan yang masuk bursa calon gubernur dan calon wakil gubernur, VAP yang dinilai pembaca paling populer. Politikus NasDem ini mengaku sangat bersyukur. Mendapat apresiasi dari masyarakat Sulut. “Jika memang partai mengusung saya, tentu saya akan berusaha untuk menang dan siap mengawal kepentingan masyarakat Sulut,” kata Bupati Minahasa Utara ini.

Pengamat politik Sulut Josef Kairupan menilai peluang perempuan di Pilgub terbuka lebar. “Apalagi jika diusung partai besar dan pendampingnya punya basis massa,” kata Kairupan.

Namun dia mengingatkan, tak mudah mengalahkan incumbent yang memiliki modal mumpuni. Mulai dari solidnya mesin partai, finansial, hingga kekuatan birokrat. “Sejak sekarang wajib sosialisasi. Pendekatan dari kaum perempuan biasanya berbeda. Itu bisa jadi strategi tersendiri,” kunci akademisi Unsrat ini.(gel)

Penulis: *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

Nasib Mantan Terpidana Tunggu Aturan KPU

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut masih menunggu perubahan Peraturan KPU (PKPU) 18/2019 untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan terpidana. Terkait hal itu, Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan mengaku belum bisa memberikan statmen lebih.



“Sebab KPU RI harus merubah PKPU 18 dengan mengakomodir putusan MK terbaru terkait mantan narapidana korupsi,” kata Yessy kemarin.

Dia menegaskan bahwa KPU punya pemahaman terkait hal itu dari pilkada 2015. “Yang kami pahami sejak 2015 namanya bebas bersyarat, itu belum mantan. Yang disebut mantan, itu benar-benar sudah selesai,” tandasnya.

Senada dikatakan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Pihaknya masih menunggu PKPU. Dia menjelaskan, dalam putusan MK itu membatalkan ketentuan terkait dengan mantan terpidana yang mencalonkan diri harus menunggu 5 tahun terlebih dahulu. Sebelum ada keputusan MK, PKPU kata Ardiles, sudah mengatur bahwa kalau orang yang sudah selesai dalam pengertian selesai, sesuai dengan PKPU yang ada, bisa langsung calonkan diri sepanjang diumumkan ke publik. Dengan terbitnya putusan MK, maka harus tunggu 5 tahun.

“Itu inti dari putusan MK. Nah, sebelum ada putusan itu, PKPU sebenarnya sudah mengatur bahwa calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana, ada ketentuan persyaratannya. Dengan ketentuan ini kita sebenarnya sudah bisa mengetahui bagaimana yang dimaksudkan mantan terpidana bisa mencalonkan diri,” terangnya.

Di PKPU 28/2019 pasal 42 huruf F berbunyi, bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana wajib menyerahkan, pertama surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dengan disertai buktinya. Kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang di Kepolisian daerah.

Ketiga, surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, keempat surat keterangan

telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga

pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dan kelima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Ini sebelum ada putusan MK. Pemahaman KPU dalam PKPU yakni yang dimaksud mantan terpidana ini adalah termasuk orang yang sebelumnya terpidana tapi sudah harus selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kalapas dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat. Jadi, arah kebijakan KPU nanti walaupun saya tidak mendahului PKPU adalah yang dimaksud mantan terpidana sudah selesai menjalani pembebasan bersyarat/cuti bersyarat. Sudah selesai semua,” jelasnya.

Sekarang putusan MK terbit adalah 5 tahun. Berarti 5 tahun sejak selesai semua termasuk pembebasan bersyarat. Menurutnya, PKPU sekarang sudah lebih detail. Sebab belajar dari pilkada serentak 2015 di Sulut, masih ada kekosongan terkait pengaturan yang dimaksud mantan terpidana itu apakah sudah selesai semua atau sudah selesai di penjara, kemudian sudah bisa mencalonkan.

“Padahal masih ada kewajiban lain misalnya bebas bersyarat harus lapor ke Bapas dan lainnya. Itu bagian dari pidana penjara sebenarnya. Itu pemahaman KPU. Tapi saya tak ingin mendahului PKPU. Sebelum putusan MK, pemahaman KPU terkait mantan terpidana sudah seperti itu. Sekarang harus ada jeda 5 tahun. Seperti apa PKPU, itu yang masih kita tunggu,” tuturnya.

“Tapi bukan berarti memvonis yang ini atau itu tak boleh. Ini hanya pemahaman regulasi saja,” sambungnya sembari berharap PKPU terkait mantan terpidana segera Sumber agar pihaknya bisa segera lakukan sosialisasi, advokasi dan mengundang parpol untuk berikan penjelasan.



Berdasarkan UU Perasyarakatan, mantan terpidana dan mantan narapidana itu berbeda. Mantan narapidana itu orang yang sudah keluar dari penjara. Tapi belum tentu sudah selesai semua kewajiban pidananya. Biasanya di UU Perasyarakatan, 1/3 dari masa pidana penjara, yang bersangkutan sudah bisa mengajukan asimilasi. Kemudian 2/3 dari masa hukuman pidana penjara, yang bersangkutan sudah bisa mengajukan bebas bersyarat.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Tunggu Juknis

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut belum bisa memberikan penjelasan lebih soal Peraturan KPU 1/2020 terkait pencalonan mantan terpidana. Hal itu dikatakan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Menurut dia, pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan berdasarkan orang perorangan. Karena PKPU ini untuk semua calon dengan status mantan narapidana korupsi yang hendak maju di Pilkada.

“Juknis belum ada. Besok (hari ini, red) kami akan membahas hal itu” tegas Mewoh. Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi membenarkan bahwa PKPU 1/2020 telah Sumber dan mengatur soal mantan terpidana. “Iya. Harus 5 tahun jeda dari bebas murni,” ucapnya.

Menurutnya, itu salah satu syaratnya. “Untuk surat keterangan selesai bebas bersyarat, bukan surat keterangan bebas bersyarat. Dan jadi base hitungan jeda 5 tahun sampai mendarat, bukan ditetapkan,” terangnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Aturan KPU Untuk Eks Napi Sudah Jelas

MANADO—Aturan mantan terpidana bisa atau tidak ikut di Pilkada 2020, sudah jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 1/2020. Ketua KPU Sulut

Ardiles Mewoh menerangkan bahwa PKPU 1/2020 adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

“Memang ada beberapa poin yang ditindaklanjuti dalam PKPU 1/2020, terutama terkait dengan syarat pencalonan,” ujar Ardiles, Selasa (3/3). Dirinya pun menerangkan terkait aturan untuk mantan terpidana yang harus ada jeda waktu.

“Di aturan sebelumnya, seorang yang sudah jalani pidana, dapat langsung mencalonkan kepala daerah. Sepanjang dia mengumumkan kepada publik dan ketentuan yang lain dipenuhi,” tuturnya.

Namun, kata dia, setelah ada putusan MK, seorang yang telah selesai menjalani pidana itu harus jeda waktu terlebih dahulu 5 tahun baru bisa mencalonkan. “Itu poin substansi dari perubahan PKPU,” tandasnya.

Terkait dengan mantan terpidana, lanjutnya, sebenarnya pengaturan sudah jelas dari aturan sebelumnya bahwa yang dimaksud mantan terpidana itu adalah orang yang sudah selesai menjalani pidananya.

“Jadi, tak ada lagi kewajiban baik secara teknis atau pidananya itu sendiri, maupun secara administrasi dengan Kementerian yang mengurus hal tersebut. Dalam hal ini Kemenkumham. Jadi betul-betul sudah selesai,” tegasnya.

Pola ini, menurut Ardiles, sudah berlangsung sejak pemilihan sebelumnya. Namun sebelumnya bisa langsung mencalonkan diri setelah selesai pidana.

“Kalau sekarang, ada jeda 5 tahun setelah selesai (jalani pidana). Jadi, diskusi atau perdebatannya bukan sejak kapan. Kalau masih ada kewajiban secara teknis maupun administrasi dengan Kemenkumham, itu belum disebut sebagai mantan terpidana. Sehingga belum bisa mencalonkan kepala daerah. Itu ketentuannya,” pungkas Ardiles.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*



KPU: Siapa Saja Boleh Mencalonkan Kepala Daerah

MINAHASA—Di Indonesia, dalam hal pemilihan kepala daerah itu ada dua jalur pencalonannya. Yakni lewat partai politik dan perseorangan.

Itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh saat membuka sosialisasi pencalonan perseorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut, Sabtu (7/12) di Kantor KPU Minahasa.

“Siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, baik itu lewat partai politik maupun perseorangan. Tapi ada mekanismenya,” ujar Ardiles.

Sebenarnya, terkait dengan pilkada di Sulut, untuk jalur perseorangan sudah sejak tahun 2008.

“Untuk gelombang pilkada serentak, pada tahun 2010, kemudian 2012 dan 2015,” ungkapnya. Dijelaskannya, cara orang berdemokrasi untuk menduduki jabatan-jabatan politik, itu bukan hanya lewat jalur parpol saja. Tapi bisa juga lewat perseorangan.

Dikatakannya, ada ketentuan dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan. “Jadi tidak semata-mata dia suka jadi calon kepala daerah langsung masuk. Begitu juga dengan calon dari partai politik,” tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, penting bagi penyelenggara pemilu mensosialisasikan secara luas terkait pencalonan perseorangan.

“Kami berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Ormas, LSM, partai politik dan stakeholder dapat menjadi media meneruskan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkait pencalonan perseorangan untuk Pilgub di Sulut 2020 mendatang,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Siap Menerima Dokumen Bacalon Perseorangan

Dibuka Jam 8 Pagi Mulai 16-20 Februari

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi tahapan penyerahan dukungan bakal calon (bacalon) perseorangan gubernur dan wakil gubernur Sulut, Jumat (14/2) di aula KPU Sulut. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi penyerahan dokumen perseorangan. Kegiatan tersebut dilakukan, mengingat jadwal penyerahan dokumen dimulai Minggu (16/2) besok.

“KPU Sulut mulai akan menerima dokumen dukungan bakal calon perseorangan tanggal 16-20 Februari,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Diterangkannya, tahapan ini sebenarnya sudah mulai sejak Oktober 2019. Termasuk telah menetapkan syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan.

“Kami sudah lakukan sosialisasikan secara luas kepada masyarakat, stakeholder baik di provinsi maupun kabupaten/kota bahwa harus memenuhi minimal dukungan 190.813 yang tersebar minimal 8 kab/kota yang ada,” jelasnya.

Pihaknya mengajak bagi siapa saja orang per orang yang ingin maju lewat calon perseorangan, silahkan langsung memenuhi ketentuan dan diserahkan ke KPU Sulut. Ardiles juga berharap tahapan penyerahan dokumen berjalan lancar. “Kita juga akan supervisi dan monitoring di daerah yang ada calon perseorangannya. Jadi KPU sudah siap menerima dokumen,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*



Bacalon Pilgub Jalur Perseorangan Masih Ragu-ragu

Belum Ada Pemasukkan Surat Mandat di KPU Sulut

MANADO--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sampai saat ini belum menerima surat mandat dari bakal calon (bacalon) gubernur dan wakil gubernur Sulut yang akan maju lewat jalur perseorangan.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan. "Untuk provinsi bacalon perseorangan selalu datang di helpdesk. Tapi tak pernah serahkan surat mandat. Sehingga kami tidak memberikan password dan user untuk masuk ke aplikasi Silon," ujarnya.

Menurutnya, salah satu syarat itu adalah harus menyerahkan surat mandat yang di dalamnya menjelaskan siapa calonnya. Akan tetapi, kata dia, di beberapa daerah yang menggelar pilkada, sudah ada yang menerima password.

"Di Manado sudah ada 3, Boltim 1, Bitung 1, Minsel 1, Minut 1, Tomohon 1. Yang belum serahkan surat mandat adalah di provinsi dan di Bolsel," paparnya.

Diketahui, KPU Provinsi sudah mulai menerima penyerahan dokumen bacalon perseorangan sejak 16 Februari dan akan berakhir pada 20 Februari.

"Di buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di hari terakhir dibuka Pukul 08.00-24.00," ucapnya. Dirinya juga mengingatkan agar bacalon tidak memasukkan dokumen di hari terakhir.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Jalur Perseorangan Pilgub Sepi Peminat Hari Ini Batas Terakhir Penyerahan Dokumen

MANADO—Hari ini terakhir jadwal penyerahan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulut untuk jalur perseorangan. Namun, sampai dengan Rabu

(19/2) kemarin, belum ada satupun yang memasukkan dokumen.

"Belum ada. Kita tunggu sampai besok (hari ini) jam 24.00," kata Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan, kemarin.

Pihaknya, kata dia, sudah membuka dan memulai penyerahan dokumen sejak tanggal 16 dan akan sampai hari ini 20 Februari pukul 24.00. Untuk di 7 kabupaten/kota, sejak Rabu (19/2) telah dimulai/dibuka tahapan penyerahan dokumen calon perseorangan dan akan berakhir 23 Februari.

"Yang sudah fiks ada bakal calon perseorangan itu di Manado, Minsel, Tomohon. Bitung dan Boltim belum terinformasi. Kalau di Bolsel sampai saat ini belum ada. Sama dengan provinsi," paparnya.

Lebih jauh dijelaskan Yessy, yang berbeda antara pilkada 2015 dan sekarang adalah sensus. Sepanjang yang dimasukkan dokumen adalah 20 ribu, maka KPU sensus 20 ribu.

"Yang berbeda, pada masa pendaftaran 16-18 Juni 2020, maka sudah fiks dokumen calon perseorangan dan sudah memenuhi syarat atau tidak," terangnya. Jadi, lanjutnya, pada tahapan penyerahan ini pihaknya akan faktual, langsung masuk pada tahapan perbaikan.

"Kalau dulu tidak. Daftar dulu sama-sama dengan partai, baru KPU lakukan masa perbaikan. Sekarang tak lagi. Kita pastikan sudah fiks syarat pencalonan dari calon perseorangan, baru sama-sama," jelasnya. Menurutnya, KPU sekarang memperlakukan paslon perseorangan maupun yang diusung partai, itu adil setara.

"Artinya syarat pencalonan sudah fiks dan syarat calonnya juga. Itu yang berbeda pilkada 2020. Ini yang menjadi perubahan luar biasa," tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*



Penyerahan Syarat Dukungan Ditutup/Pilgub Sulut Tak Ada Bacalon Perseorangan

MANADO—Jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulut jalur perseorangan, telah ditutup Kamis (20/2) tepat pukul 24.00. Setelah resmi ditutup, KPU Sulut pun melakukan pleno yang disaksikan Bawaslu Sulut.

“Pleno menetapkan bahwa penyerahan/penerimaan syarat dukungan bacalon yang dibuka sejak 16-20 Februari Pukul 08.00-16.00 dan hari terakhir sampai 24.00, tidak ada bakal paslon perseorangan yang serahkan dokumen syarat dukungan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang didampingi Komisioner Yessy Momongan, Lanny Ointu, Meidy Tinangon dan Sekretaris KPU Sulut.

Dikatakan Ardiles, pihaknya telah lewati tahapan tersebut yang dilaksanakan selama 5 hari dengan pengawasan Bawaslu yang setiap hari ada.

“Selama itu, tidak ada bacalon yang serahkan dokumen. Dengan demikian dalam pilgub 2020 tak ada jalur perseorangan,” katanya lagi sembari menambahkan dalam hal pencalonan, pihaknya tunggu tahapan selanjutnya lewat jalur parpol dengan mengikuti aturan KPU yang ada.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan, secara prosedural pihaknya terlibat awasi tahapan ini.

“Sejauh ini kami lihat prosedur yang dilakukan KPU sudah sesuai ketentuan. Dan memang tak ada yang serahkan dokumen,” tuturnya. Dirinya berharap di kabupaten/kota yang ada bacalon perseorangan, KPU bisa berikan akses terkait silon dan penggandaan dokumen perseorangan agar pihaknya bisa awasi menyeluruh.

“Kalau kami tak punya user name, kami tak bisa lihat secara detail. Selama ini kami harus melalui staf KPU. Yang kami inginkan password diberikan ke kami. Terutama di kab/kota,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Hingga 24.00 Wita, Pilgub 2020 Tak Ada Calon Perseorangan

MANADO—Hingga pukul 24.00 wita tanggal (21/02) Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftarkan diri di jalur perorangan tidak ada. Dengan ketidak adaannya Bacalon Perseorangan itu, dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hanya akan menerima Balon dari Jalur Partai Politik.

Hal tersebut dikatakan DR.Ardiles Mewoh saat memimpin rapat pleno di hari dan jam terakhir pendaftaran calon pereorangan,Jumat (21/02) di ruang sidang KPU Sulut,

“Kami pastikan tak ada Paslon perseorangan yang akan ikut Pilgub Sulut,” kata Mewoh.

Dijelaskannya, sejak dibuka pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perorangan pada 16 Januari sampai 20 Februari ini KPU Sulut tidak menerima dokumen dari peserta calon perseorangan, “Kita melakukan pleno syarat dukungan calon pereorangan, Kita menetapkan penyerahan yang dibuka 16 januari sampai 20 february pukul 00.00 wita bertempat di KPU Sulut tidak ada bakal calon perorangan,” jelasnya.

Sementara selama proses tahapan pendaftaran calon persorangan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara terus mengawasi sampai batas waktu yang ditentukan. “Secara prosedural, kami terlibat awasi tahapan ini. Dan sejauh ini kami lihat prosedur yang dilakukan KPU sudah sesuai ketentuan,” ujar Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan.

Adapun calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bakal maju dalam jalur perorangan harus memasukan jumlah minimal dukungan calon dan sebaran dukungan yakni formulir dukungan dilampiri fotokopi KTP Elektronik dengan jumlah minimal dukungan yang ditetapkan 10 persen dari jumlah Daftar



Pemilih Tetap Pemilu 2019.

Untuk DPT Pemilu 2019 sebanyak 1.908.115. Berdasarkan jumlah DPT, minimum syarat dukungan bakal calon pilgub sebanyak 190.812 dan harus tersebar di 8 Kabupaten dan kota se Sulut. (Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/21/02/2020*

Bawaslu Sulut Minta Akses Aplikasi Silon Calon Perorangan Kabupaten dan Kota

MANADO—Meski tak ada yang mendaftar dalam calon perseorangan Pilgub 2020 yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, namun terdapat Kabupaten dan Kota penyelenggara yang calon perorangnya.

Terkait verifikasi data calon perseorangan itu, Badan Pengawas Pemilu, (Bawaslu) Sulut minta KPU Sulut bisa memberikan ruang bagi Bawaslu dalam Verifikasi bersama. " Kami berharap KPU dapat memberikan waktu kepada kami dalam memverifikasi data di aplikasi Silon sehingga kami bisa mengawasi secara menyeluruh. Memang untuk pendaftaran calon perseorangan pilgub tidak ada namun untuk kabupaten dan kota pendaftarannya ada," Kata Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan usai pleno pendaftaran calon perorangan di KPU Sulut, Jumat (21/02)

Untuk pengisian calon perseorangan saat ini masih berada di lingkup Komisi Pemilihan Umum, untuk itu Poluan juga meminta User dan Password dalam verifikasi silon dapat diberikan kepada Bawaslu," Saat ini akses ke silon masih dari KPU dan Staf. Kami berharap KPU juga dapat memberikan User dan Password kepada kami terutama Kabupaten dan Kota yang ada calon perseorangan, Kita akan melihat langsung dokumen Silon, dokumen terkait KTP dan Administrasi lain," Pungkasnya. (Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/21/02/2020*

Eks Napi Belum Bebas Murni Tak Bisa Nyalon

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta partai politik (parpol) untuk memperhatikan syarat calon dan pencalonan saat melakukan pendaftaran 4-6 September nanti.

"Kita meminta parpol saat pendaftaran 4-6 September itu datang dengan membawa dokumen yang seharusnya dan sudah lengkap. Sehingga tidak ada lagi dikembalikan untuk diperbaiki dan koreksi," kata Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan usai lakukan rapat koordinasi bersama KPU Manado, Kamis (6/8). Menurutnya, dalam rakor tersebut salah satu yang ditanyakan soal mantan terpidana yang mencalonkan diri. "Ada beberapa yang kami tegaskan termasuk yang marak di Kota Manado yakni mantan terpidana. Nah, PKPU mengatur semua mantan terpidana itu bebas murni ada jedah 5 tahun dihitung mundur.

"Sekali lagi harus bebas murni, bukan bebas bersyarat," tegasnya. Dicontohkannya, kalau calon mendaftar tanggal 4, berarti hitung mundurnya 5 tahun itu dari 4 September. Atau kalau daftar 6 September, hitung mundurnya 5 tahun dari 6 September. Dasar hukumnya adalah putusan MK yang wajib ditindaklanjuti KPU," jelasnya.

Ditambahkannya, jika ada mantan terpidana yang mencalonkan diri, itu wajib mengumumkan kepada publik melalui media massa. "Bukan bentuk berita. Namun iklan pengumuman," tandasnya. Jadi, lanjutnya, yang menjadi catatan dalam rakor, pihaknya ingatkan kepada parpol dalam proses rekrutmen demokratis yang partai lakukan untuk memilih siapa bakal calon yang diusung.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*



Peserta Pemilu Harus Pahami Syarat Pencalonan dan Calon

MANADO—Bulan depan, tepatnya 4 September, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran calon kepala daerah. Tahapan tersebut dinilai penting. Sebab ada berbagai persyaratan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan dan calon.

“Tahapan pencalonan adalah yang krusial. Sebab ada beberapa hal yang perlu jadi catatan bersama,” kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra dalam rapat koordinasi dan sosialisasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam Pilgub Sulut 2020, Rabu (5/8) di salah satu hotel di Minahasa.

Dirinya mencontohkan dalam pendaftaran ada temuan persoalan kepengurusan partai atau dualisme. “Selain itu, ada satu partai berikan dukungan kepada dua orang calon. Nah, ini nanti kami akan cek di Sipol untuk kepengurusan parpol dari tingkat DPP sampai kab/kota. Karena AD/ART parpol berbeda-beda. Ini tentu kami akan koordinasi dengan Kemenkumham,” terangnya.

Menurutnya, di tahapan pencalonan, pengurus DPP masing-masing parpol akan mengusung LO di KPU RI. Jika ada persoalan, KPU provinsi dan kab/kota terkait dukungan parpol, akan dikoordinasikan dengan LO DPP yang ada di KPU selama masa pendaftaran.

“Kemudian juga, jika temukan kejanggalan, silahkan melaporkan ke Bawaslu atau kalau dianggap sebagai kode etik, lapor ke DKPP Komunikasi yang baik menentukan kesuksesan pilkada. Kami memastikan penyelenggara sudah siap gelar pilkada. Saya harap jika ada informasi yang ingin diketahui terkait pencalonan, silahkan berkoordinasi dengan KPU,” tuturnya. Komisioner KPU RI Hasyim Ashari menambahkan,

tahapan pencalonan pada dasarnya ada bermacam syarat dan prosedur. “Ada dua jalur yakni perseorangan dan parpol. Perseorangan sudah dimulai sejak Februari

lalu. Untuk jalur parpol, yang bisa ikut pencalonan hanya parpol peserta pemilu terakhir di pemilu 2019. Kemudian yang memiliki kursi di DPRD dan yang bisa mengusung yakni parpol peroleh kursi jumlahnya 20 persen dari jumlah kursi di DPRD,” jelasnya.

Dijelaskannya, syarat calon adalah syarat yang harus dipenuhi masing-masing calon. “Pada dasarnya parpol itu hanya bisa mendaftarkan 1 paslon. Dan itu berdasarkan SK DPP tentang siapa nama bakal calon yang diusung atau didaftarkan. Kemudian apabila parpol sudah daftarkan ke KPU, maka tak bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya sudah lakukan rakor bersama parpol dan stakeholder yang memiliki kepentingan untuk pilkada. Dirinya berharap, apa yang jadi kebijakan, regulasi KPU, ketentuan pelaksanaan tahapan pemilihan dilaksanakan peserta pemilu.

“Dalam waktu 4-6 September kami akan mulai terima pendaftaran untuk pencalonan dari parpol atau gabungan parpol. Untuk itu kami sangat ingin menyebarluaskan ketentuan yang ada terkait tahapan ini. Parpol sudah mengetahui mekanisme dan regulasi pencalonan. Kami ingin semua tahu terkait peraturan pencalonan,” harapnya.

Dirinya juga berharap ketika regulasi diketahui masyarakat luas terutama parpol, dalam hal pencalonan, ke depan tak ada persoalan atau sengketa. “Tentu harus diketahui secara detail ketentuan-ketentuan peraturan baik dari peserta, parpol maupun masyarakat luas. Yang pasti kami sebagai penyelenggara pemilihan akan melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan yang ada. Tegak lurus pada aturan dan yang jadi syarat harus dipatuhi,” ungkapnya.

“Ini bagian dari transparansi KPU dan akuntabilitas dalam melaksanakan tahapan pencalonan. Supaya semua masyarakat tahu apa yang menjadi persyaratan, siapa-siapa calon dan sebagainya. Dan juga supaya



parpol mempersiapkan apa yang jadi syarat,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Buka Pendaftaran Calon 4 September

MANADO—KPU Provinsi Sulut telah siap melaksanakan tahapan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 meski di tengah pandemi covid-19. Sebanyak 5.517 personel Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilantik. Termasuk diaktifkan kembali tugas-tugas PPK, Senin (15/6).

“KPU dalam posisi siap untuk melaksanakan tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19,” ujar Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Ia mengatakan, pelaksanaan pemilihan tahun ini sangat berbeda dari sebelumnya. Karena KPU akan bekerja di tengah pandemi corona virus. “Namun kami telah berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak ini dengan baik dengan mengedepankan protokol kesehatan covid 19. Seluruh petugas nantinya akan dibekali alat pelindung diri (APD) Covid 19 untuk melaksanakan setiap tahapan. Sehingga diharapkan masyarakat juga dapat menyambut positif lanjutan tahapan Pilkada 2020 ini,” bebernya.

Lanjut Mewoh, setelah badan ad hoc diaktifkan, agenda paling dekat yang dihadapi KPU pada 24 Juni yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan khusus di empat daerah yakni Manado, Tomohon, Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.

“Tahapan itu sempat tertunda akibat pandemi Covid 19. Verfak calon perseorangan juga dilakukan dengan protokol kesehatan Covid 19. Saat ini petugas kami (PPS) sedang mendapatkan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini tidak hanya terkait teknis. Namun di bimtek soal bagaimana mereka nantinya akan bertugas di tengah pandem,” kata Mewoh seraya menambahkan, tahapan-tahapan Pilkada lainnya yang akan dijalankan

kembali seperti pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sementara itu, komisioner KPU Sulut Divisi Teknis, Yessy Momongan membeberkan, berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2020, KPU menetapkan masa pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Juni-6 Desember 2020. Sedangkan pada 4-6 September KPU Sulut akan resmi membuka tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah (gubernur-wakil gubernur). Setelah itu, KPU akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Nantinya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga 9 Desember 2020.

“Tahapan kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari,” kata Yessy.

KPU membagi masa kampanye calon kepala daerah ini dengan tiga fase. Fase pertama yakni kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain. Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik/terbuka antar pasangan calon.

“Fase pertama dan kedua masa kampanye itu akan digelar 26 September hingga 5 Desember 2020,” ujarnya.

Fase ketiga, KPU akan membuka kampanye calon kepala daerah melalui media massa, cetak, dan elektronik, 22 November hingga 5 Desember 2020. “Masa tenang dan pembersihan alat peraga sendiri akan dilakukan pada 6-8 Desember. Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara pada 9 Desember 2020.

Setelah itu, penghitungan suara secara berjenjang dilakukan. Penghitungan suara di tingkat kecamatan akan digelar pada 10-14 Desember, penghitungan suara di kabupaten/kota 13-17 Desember. Penghitungan suara



di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16-20 Desember,” beber Yessy.

Meski demikian, dalam PKPU 5, KPU belum mencantumkan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilkada. KPU baru memutuskan akan menetapkan calon kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama lima hari setelah MK resmi memberitahukan permohonan yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Syarat Pencalonan Minimal 20 Persen Kursi

MANADO—Bursa calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Sulut 2020 saat ini mulai memanas. Sejumlah partai politik (parpol) maupun figur mulai terang-terangan mendeklarasikan diri maju berebut kursi Sulut 1. Namun demikian, terdapat sejumlah syarat bagi parpol dan gabungan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk mengikuti Pilkada 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut tengah membahas syarat pencalonan melalui jalur partai politik dan gabungan partai politik pada Pilkada. Tahapan pendaftaran pasangan calon diagendakan pada 4-6 September 2020 mendatang.

Syarat pencalonan jalur parpol ini nantinya diatur lewat Peraturan KPU yang akan diplenokan dalam waktu dekat. Namun, merujuk draf aturan KPU itu, syarat pencalonan adalah didukung partai politik atau gabungan parpol dengan minimal 20 persen kursi di DPRD Provinsi. Atau, parpol dengan jumlah 25 persen suara sah Pemilu DPRD terakhir (pemilu 2019).

“Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulut atau akumulasi 25 persen perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD Provinsi tahun 2019,” ujar komisioner divisi Teknis, KPU Sulut, Yessy Momongan saat rapat dalam kantor penyusunan persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk Parpol dan gabungan Parpol, di Kantor KPU Sulut, Kamis (09/7) kemarin.

Jika dikonversi 20 persen kursi DPRD, maka partai atau gabungan partai bisa mengusung calon minimal memiliki 9 kursi di lembaga dewan. Total kursi DPRD Sulut saat ini sebanyak 45 kursi. Dilihat dari hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Sulut, jumlah kursi tertinggi di DPRD Sulut diraih oleh PDIP sebanyak 18 kursi.

Kemudian Nasdem 9 kursi, Golkar sebanyak 7 kursi, Demokrat 4 kursi. Partai lainnya yakni Gerindra 2 Kursi, PAN 2 Kursi, PKB 1 Kursi, PKS 1 Kursi, PSI 1 Kursi. Melihat jumlah kursi tersebut, hanya dua parpol yakni PDIP dan Nasdem yang dapat mengusung calonnya sendiri tanpa bergabung dengan parpol lain.

Partai lain yang ingin mengusung calon Gubernur harus berkualitas memenuhi syarat minimal 9 kursi. Dari persyaratan KPU itu, ada jalur lain bagi parpol yang tidak memenuhi syarat 9 kursi untuk mengusung calon. Yakni, memakai format 25 persen perolehan suara sah. Jika dikonversi dengan rumus KPU, total suara sah parpol di pemilu 2019 sebanyak 1.496.236 : 25 persen X 100, maka gabungan parpol hanya membutuhkan 374.059 suara bagi gabungan parpol untuk bisa mengusung calon gubernur.

Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan mengatakan, syarat pencalonan itu menjadi dasar bagi KPU saat tahapan pendaftaran pasangan calon.

“Ini memang baru draf nantinya persyaratan pencalonan untuk Parpol dan gabungan Parpol secepatnya diplenokan. Dalam ketentuan peraturan KPU paling lambat



satu bulan sebelum dimulainya pendaftaran pasangan calon KPU sudah ditetapkan terkait persyaratan pencalonan. Setelah diplenokan, nantinya persyaratan pencalonan itu akan disosialisasikan ke semua pihak, termasuk masyarakat termasuk pleno syarat calon Gubernur dan Wakil. Misalnya apakah mantan korupsi bisa atau tidak dan seperti apa syarat-syaratnya,” ujar Yessy.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Herwy Malonda menegaskan, ada dua formula bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon.

“Bisa pakai formula 20 persen kursi dan 25 suara sah. Nanti tergantung mana yang memungkinkan digunakan. Jika tidak memenuhi syarat 20 persen kursi, bisa gunakan formula 25 persen suara sah. Jadi parpol jangan terfokus di satu formula persyaratan,” ujarnya.

Rapat KPU Sulut sendiri dibuka Ketua KPU, Ardiles Mewoh, komisioner Salman Saelangi, Lany Ointu, Ketua Bawalsu Sulut, Herwyn Malonda dan perwakilan Polda Sulut.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DI SULUT:

No	Partai	Suara Sah
1	PKB	40.16
2	GERINDRA	95.042
3	PDI	550.919
4	GOLKAR	220.706
5	5. NASDEM	194.751
6	GARUDA	7.924
7	BERKARYA	33.709
8	PKS	31.297
9	PERINDO	39.916
10	PPP	22.292
11	SOLIDARITAS	27.656
12	PAN	66.28
13	HANURA	29.875
14	DEMOKRAT	118.275
15	PBB	5.489
16	PKPI	11.954
	TOTAL SUARA SAH :	1.496.236

Penulis :
Sumber :

KPU Sulut : Pendaftaran Cagub Hanya Tiga Hari

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi segera membuka tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil untuk berlaga di Pilkada 9 Desember 2020.

Pendaftaran akan dibuka pada 4 September hingga 6 September 2020. “Sesuai jadwal pada tahapan Pilkada lanjutan, KPU akan mulai menerima pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada Sulut 2020. Pendaftaran hanya tiga hari. Sehingga diharapkan partai politik pengusung calon harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan mendaftar di menit-menit akhir. Untuk tanggal 4 dan 6 pendaftaran dimulai Pukul 08.00 - 16.00 WITA. Sedangkan hari terakhir pendaftaran tanggal 6 September 2020 dimulai jam 08.00 - 24.00 WITA,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Sulut Yessy Momongan, Kamis (27/8).

Ia mengatakan, jadwal pendaftaran mengacu pada Peraturan KPU 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan tahapan Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, hingga proses verifikasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

“Pasangan calon yang mendaftar akan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada 4-11 September. Pasangan calon yang lolos verifikasi administrasi akan ditetapkan pada 23 September 2020. Pengundian nomor urut dilakukan pada 24 September.

Kata Yessy, liaison officer (LO) partai diharapkan bisa berkoordinasi dengan KPU lewat layanan help desk (meja bantuan). Diungkapkan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, terkait syarat pencalonan KPU telah



rapat bersama parpol. Mengenai persyaratan.

“4-6 September kami mulai buka pendaftaran pencalonan parpol atau gabungan parpol. Ini perlu disosialisasikan agar parpol mempersiapkan persyaratan,” beber Mewoh.

Jika mekanismenya telah diketahui dan dipahami, Mewoh berharap nantinya tak ada persoalan atau sengketa. “Sebagai penyelenggara, kami akan melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan. Prinsip kami, tegak lurus pada aturan,” tegasnya.

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

Pendaftaran Calon Gubernur Sulut Dibuka 4-6 September, Ini Syarat dan Formulir

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) akan membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 4 sampai 6 September 2020 mendatang. Seluruh bakal calon diharapkan bisa memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.

KPU Sulut sendiri telah menerbitkan pengumuman dengan Nomor: 326/PL.02.2-Pu/71/Prov/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, persiapan terus dilakukan oleh KPU untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan pelayanan maksimal.

Dijelaskan oleh Ardiles, seluruh calon kepala daerah maupun Partai Politik yang akan mengusung calon, wajib untuk mengetahui syarat-syarat serta menyertakan semua formulir yang berkaitan dengan persyaratan yang ada.

“Seluruh calon kepala daerah maupun partai politik pengusung, harus mengetahui semua syarat dan mengisi semua formulir sesuai

dengan aturan yang berlaku,” kata Ardiles.

Berikut adalah dokumen resmi Pengumuman yang Sumber oleh KPU Sulut terkait dengan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 beserta dengan syarat dan seluruh formulir yang harus dilengkapi. (*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*

Sumber: *kumparan.com*

Persilahkan Paslon Pilih Waktu Pendaftaran, KPU Sulut: Kami Tak Membatasi

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan kepada pasangan calon kepala daerah maupun partai politik pengusung, untuk memilih sendiri waktu pendaftaran di KPU, selama tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan yakni pada Jumat hingga Minggu (4-6/9).

Dikatakan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, paslon maupun parpol yang akan mendaftar, bisa menyesuaikan waktu terbaik mereka untuk datang menyerahkan berkas pendaftaran yang wajib untuk dimasukkan ke KPU.

“Jadi tidak ada pembatasan. Seluruh paslon dan parpol pengusung diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk memilih waktu pendaftaran. Tapi ingat, selama itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Mewoh kepada manadobacirita.

Mewoh mengatakan, untuk waktu pendaftaran di hari terakhir, dalam hal ini Minggu (6/9), KPU akan memberikan waktu kepada paslon dan parpol hingga tengah malam, atau sebelum pergantian tanggal.

“Ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sekali lagi, kami memberikan seluas-luasnya untuk waktu pendaftaran. Tidak boleh dibatasi. KPU hanya bisa mengatur agar tidak bertabrakan. Kapanpun peserta datang, KPU akan terima selama masih di jam yang ditentukan,” tutur Mewoh kembali.



Sekadar diinformasikan, ada wacana yang diembuskan sejumlah pihak, jika waktu pendaftaran pasangan calon dan partai pengusung di KPU, akan dicabut undi untuk penentuan hari peserta untuk mendaftarkan diri di KPU. Wacana ini disebutkan agar kondisi saat pendaftaran tidak menyebabkan penumpukan massa.

Penulis: *Oktaviana Mundung*

Sumber: *kumparan.com*

September, KPU Buka Pendaftaran Calon

MANADO—Tahapan Pilkada serentak terus bergulir. Dijadwalkan awal September mendatang memasuki tahap pendaftaran calon. Rabu (5/8) kemarin, KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam Pilgub Sulut 2020, melibatkan media massa.

Diungkapkan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, terkait syarat pencalonan KPU telah rapat bersama parpol. Mengenai persyaratan.

“4-6 September kami mulai buka pendaftaran pencalonan parpol atau gabungan parpol. Ini perlu disosialisasikan agar parpol mempersiapkan persyaratan,” beber Mewoh. Jika mekanismenya telah diketahui dan dipahami, Mewoh berharap nantinya tak ada persoalan atau sengketa. “Sebagai penyelenggara, kami akan melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan. Prinsip kami, tegak lurus pada aturan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Ilham Saputra memaparkan berbagai persyaratan terkait pencalonan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). “Misalnya mengenai dualisme pengurus partai. Ini tentu harus ditelusuri dengan benar,” tuturnya.

Di sisi lain, komisioner KPU RI Hasyim Ashari mengatakan tahapan pencalonan pada dasarnya ada bermacam syarat dan prosedur.

“Parpol hanya bisa mendaftarkan satu

paslon. Itu berdasarkan SK DPP tentang siapa nama bakal calon yang diusung atau didaftarkan. Kemudian apabila parpol sudah daftarkan ke KPU, maka tak bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Pada acara sosialisasi itu, para pemateri adalah para komisioner KPU. Yakni Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Lanny Ointu.(*)

Penulis *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

KPU Sulut Sosialisasi Syarat Pencalonan Pilgub dan Wagub

MANADO—Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (5/8/2020) melaksanakan sosialisasi persyaratan pencalonan dan Syarat calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Sosialisasi ini dilakukan, diakui Mewoh bertujuan agar setiap kebijakan terkait regulasi KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilukada dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus oleh Parpol yang mengusung calon.

“Dengan dilakukannya sosialisasi regulasi dapat diketahui oleh masyarakat terlebih khusus Parpol dan diharapkan dalam hal pencalonan tidak ada sengketa,” ungkap Mewoh.

Sementara itu, Ilham Saputra Komisioner KPU RI yang menjadi salah satu pembicara lewat virtual mengingatkan penyelenggara agar

dapat memperlakukan semua calon sama, jika ada persoalan yang muncul (sengketa pemilu), pihak yang merasa dirugikan dapat berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara.

”Semua Parpol sebelum mendaftarkan calon harus melihat syarat pencalonan yang telah disyaratkan berdasarkan PKPU,” tegas Ilham.



Sedangkan Hasyim Ashari Komisi KPU RI yang juga sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut lewat media zoom menjabarkan soal tahapan pilkada lanjutan di tengah pandemi Covid 19.

Hasyim menekankan soal syarat pencalonan baik terkait tanggal pendaftaran, juga terkait calon yang pernah terpidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian dari Parpol agar dapat mengusung calon yang tidak bermasalah.

“Sebaiknya Parpol dapat mengusung atau mengajukan calon yang tidak bermasalah hukum agar tidak menimbulkan persoalan,” papar Hasyim.

Sementara itu pendaftaran bakal calon akan dimulai tanggal 28 Agustus s/d 3 September 2020.

Pendaftaran Paslon dan Verifikasi syarat pencalonan 4-6 September 2020, Pengumuman dokumen pasangan calon untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4-8 September 2020, dan pemeriksaan kesehatan Paslon 4-11 September 2020. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

Bawaslu Sulut Ingatkan KPU Sulut Untuk Perhatikan Peraturan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020 , di Swis-bell Hotel Manado, Senin (31/08/20).

Dalam Rapat Bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menyampaikan beberapa hal terkait dengan dasar-dasar hukum pendaftaran bakal Paslon Pilkada Sulut Tahun 2020.

Malonda menegaskan agar KPU Harus memperhatikan B1 KWK dalam proses

pendaftaran bakal paslon, serta prosedur teknis dan protokol covid-19 berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2020.

“KPU memperhatikan tanda terima kelengkapan berkas pendaftaran bakal pasangan calon agar tdk terjadi miss komunikasi antara KPU dan peserta, selain itu Ketua Bawaslu menegaskan utk mendukung tugas-tugas pengawasan Bawaslu wajib menerima salinan BA hasil verifikasi berkas bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU harus bisa menjaga informasi yang bersifat pribadi terhadap tes kesehatan bakal paslon dari covid-19,” tegas Malonda.

Selanjutnya, Malonda menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerawanan indikasi pelanggaran dalam proses pendaftaran Bakal paslon dan tindak lanjut Bawaslu.

“Apabila nantinya terjadi pelanggaran dalam tahapan yang akan dituangkan dalam form pengawasan Bawaslu untuk diproses lebih lanjut sesuai regulasi yg berlaku. Terkait penanganan sengketa Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa permohonan dapat diterima oleh Bawaslu apabila peserta dirugikan secara langsung,” jelas Malonda

Ketua Bawaslu Sulut ini juga menyampaikan agar mengantisipasi pendaftaran di hari akhir batas pendaftaran pencalonan untuk dapat diatur dengan baik.

“Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU menjaga integritas dan netralitas, serta menjaga konsistensi agar sesuai dg regulasi dan protokol kesehatan Covid-19,” tutup Malonda. (*)

Penulis : *Friska Tewu*
Sumber : *portalsulutnews.com*

KPU Batasi Rombongan Paslon, Bawaslu Warning ASN

MANADO—Jelang pendaftaran calon kepala daerah, berbagai warning disampaikan penyelenggara Pilkada.



Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Herwyn Malonda memastikan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota membahas potensi masalah dan tata cara pengawasan pendaftaran.

Meski begitu, dia mengimbau parpol pengusung dan bakal paslon hendaknya memperhatikan protokol kesehatan saat mendaftar. "Tidak ada arak-arakan dan konvoi kendaraan, tidak ada atraksi tari-tarian ketika mendaftar," tuturnya.

Selain itu, ASN dilarang terlibat dalam proses pendaftaran. Istri maupun suami bakal calon yang berstatus ASN wajib cuti, bersikap pasif dan tidak memakai pakaian yang menampilkan atribut bakal paslon. "Ini demi menjaga independensi dari para ASN," ungkap dia.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, pihaknya bakal menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Salah satunya dengan pembatasan orang dalam pendaftaran nanti.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penumpukan massa yang biasanya terjadi saat pendaftaran bakal calon. Lanjut dia, setiap bakal paslon hanya diizinkan membawa rombongan 36 orang termasuk yang bersangkutan.

"Yang masuk dalam ruang pendaftaran hanya 13 orang, bakal calon, ketua dan sekretaris partai pengusung," ungkapnya.

Hingga tadi malam, KPU Sulut melakukan koordinasi dengan berbagai pihak demi memastikan proses pendaftaran berjalan baik. Menurut Mewoh, pihaknya membebaskan paslon datang mendaftar kapan saja selama masa pendaftaran. "Silahkan kapan saja selama jam kerja dan di tiga hari masa pendaftaran. Baiknya memang sebelum datang berkoordinasi dulu. Agar tidak datang di waktu bersamaan," pintanya.

Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, paslon mendaftar bersama partai pengusung.

la menjelaskan ada perbedaan antara partai pengusung dan partai pendukung.

Partai pengusung memiliki kursi di DPRD Sulut, perolehan suara maupun jumlah kursi akan dijadikan tiket untuk mendaftar sebagai calon.

Sementara parpol tidak memiliki kursi di DPRD dikategorikan sebagai partai pendukung. "Yang masuk di ruang pendaftaran partai pengusung," jelasnya. "Hanya partai pengusung yang memasukan formulir di pendaftaran, semisal B1 KWK, tidak untuk partai pendukung," tutupnya. (*)

Penulis *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Pendaftaran Digelar Jumat Besok Ini Batasan Yang Harus Diperhatikan Paslon

MANADO—Persiapan Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Jumat (04-06/09) besok terus dimatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

"Pembukaan Pendaftaran jam 8.00 Wita sampai jam 16.00 wita untuk hari pertama dan kedua, sementara hari ke 3 jam 8.00 wita sampai 24.00 Wita," Kata Ketua Divisi teknis KPU Sulut Yessy Momongan, dalam Media Gethering bersama Sejumlah Pers, Kamis (03/09).

Dijelaskannya, hari ketiga merupakan waktu terlama yang bakal dilalui Pihak Pelaksana dan Pasangan Calon saat kegiatan pendaftaran tersebut karena disamping waktunya sampai pukul 24.00 wita, KPU juga bakal menginput Data setiap Calon dalam aplikasi Silon," Akan langsung di Input datanya di aplikasi Silon, jadi bisa saja sampai waktu larut malam," ujar Momongan.

Lebih lanjut kata Momongan, hari terakhir pendaftaran bakal terlihat Bakal calon yang Memenuhi Syarat (MS) maupun Bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat, (TMS)

"Bisa saya akan ada calon yang di TMS kan, misalnya tidak capai dukungan partai pendukung," Lanjutnya.



Ketentuan lain jelas Momongan, para Bacalon ini wajib memasukan hasil Swab diri sendiri kepada pihak KPU,” Mereka (Bacalon Red) wajib memasukan hasil swab mandiri, namun jika didapati ada Bacalon yang kedapatan hasil swab tersebut Positif tertular maka tidak diizinkan datang mendaftar di Kantor KPU namun bukan berarti mereka tidak lolos, Paslon ini harus berada di rumah masing – masing dan yang membawa berkasnya hanya Parpol, juga parpol pendukung serta LO.dan berdasarkan data tersebut kami pihak KPU akan menghubungi lewat telepon berupa Video call,” paparnya.

Sementara Ketua KPU Ardiles Mewoh berharap semua Paslon yang mendaftar ini memenuhi semua persyaratan yang diminta sesuai Undang-Undang,”Kita berharap calon yang diusulkan sudah bagus dan memenuhi persyaratan,” Kata Mewoh.

Terkait Protokol Kesehatan, Mewoh meminta baik Paslon, Parpol maupun parpol pendukung dapat mengikuti aturan yang sudah diatur KPU Sulut,” Kita menjalankan tahapan dalam situasi berbeda, baru kali ini diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, kalau melihat pandemi belum berakhir dan kita masih di rong- rong, padahal pilkada ini melibatkan banyak orang.Kita masih di Rong- rong jadi mari kita aturi aturan yang sudah diatur,” Pinta Ketua.

” 1 bakal pasangan Calon 36 orang tidak boleh lebih, sudah termasuk pasangan calon, kita sudah melihat ruang pendaftaran dan kita hanya menyediakan ID Card sebanyak 36 orang.Kita berharap mereka patuh tata tertib sesuai kesepakatan 36 inipun tidak semua bisa masuk hanya dikhususkan calon,Pengurus Partai Politik yakni Ketua,Sekretaris, Partai pendukung dan penghubung.Untuk Media hanya 15 media,” cetusnya.(Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/03/09/2020*

Calon Kepala Daerah Diwajibkan Swab Test Covid 19

MANADO—Calon Kepala daerah diwajibkan melakukan tes usap atau swab test Covid 19. Kewajiban itu akan diakomodir di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru.

Saat ini, KPU tengah mengajukan revisi atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

“Di dalam perjalanan, KPU melakukan pembahasan dengan stakeholder termasuk IDI (Ikatan Dokter Indonesia), kemudian dapat masukan perlunya dan pentingnya melakukan swab test kepada bakal pasangan calon,” kata Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan, Senin (24/8) kemarin.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap bakal calon kepala daerah yang hendak mengikuti Pilkada dalam keadaan sehat. Selain itu juga untuk meminimalisir potensi terjadinya penularan virus corona pada saat tahapan Pilkada diselenggarakan.

“Aturan ini untuk menjaga penyebaran virus,” ujarnya.

Sebelumnya, di dalam PKPU tersebut belum diatur kewajiban swab test bagi calon kepala daerah. Kewajiban itu baru sebatas diikuti oleh anggota dan Sekretaris Jenderal KPU baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b beleid tersebut, kewajiban untuk melaksanakan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) harus dilaksanakan secara berkala.

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentar*



Salman Tegaskan Mendaftar Sebagai BaLon di KPU Sulut Wajib Sertakan Hasil PCR Swab

Manado - Pendaftaran sebagai Bakal Calon (BaLon,red) Gubernur/Wakil Gubernur di KPU Sulawesi Utara (Sulut) akan dibuka pada tanggal 4 hingga 6 September 2020. Mengingat, Pilkada tahun ini beda dengan pilkada sebelumnya yakni di masa pandemi covid-19, diharuskan sesuai dengan protokol kesehatan.

Untuk itu, dalam tahapan pendaftaran tersebut diwajibkan para BaLon saat mendaftar nanti menyertakan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab bahwa bebas covid.

Hal ini ditegaskan oleh Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi saat diwawancarai sejumlah awak media usai kegiatan Media Gatering bertemakan "Peran Pers Dalam Menciptakan Demokrasi Berkeadilan Sulawesi Utara Tahun 2020".

"Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 sudah diatur. Bagi bakal calon yang akan mendaftar, dia harus membawa hasil PCR," tutur Salman, Kamis (3/9/2020) di halaman kantor KPU Sulut.

Lanjut dikatakan Komisioner Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM ini kepada wartawan, jika kemudian ditemukan hasilnya adalah positif akan diberikan kesempatan mendaftar secara daring. "Namun bila hasilnya negatif harus mendaftar secara langsung," tutup Salman.* (jane)

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *ciintasulut.com/September 3, 2020*

Tahapan Pendaftaran Dimulai, Salman Saelangi Ingatkan Protokol Kesehatan Dikedepankan

MANADO -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Salman Saelangi, mengatakan pendaftaran calon gubernur dan wakil

gubernur tahun 2020 yang mulai dilaksanakan Jumat 4-6 September 2020 tetap sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid19.

Itu disampaikan Salman saat membuka kegiatan kegiatan Media Gathering yang bertajuk Peran Media Dalam Menciptakan Demokrasi Berkeadilan Sulawesi Utara tahun 2020.

Salman mengatakan KPU sangat menghormati kebebasan pers. "Kami sangat menghormati kebebasan pers, tapi karena saat ini masih dalam pandemi Covid, jadi tetap harus mentaati protokol kesehatan. Ketika pendaftaran besok, akan ada pembatasan orang yang masuk, maupun pers yang melakukan peliputan," kata dia.

Adanya kerjasama yang baik semua pihak kata Salman, agar supaya pelaksanaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dapat berlangsung dengan baik.

Salman juga mengingatkan pada tahapan pendaftaran nanti, agar para calon harus menyertakan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab bahwa bebas covid.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPID Erick Kawatu, Komisioner KIP Raymond Pasla dan Ketua IJTI Amanda Komaling.

Penulis: *RAKA*

Sumber: *Elnusanews.com*

Pantau Kesiapan Pendaftaran, Kapolda Pastikan Back Up Penuh KPU

MANADO—Mulai hari ini, Jumat, 4 September 2020, hingga Minggu, 6 September 2020, akan dilaksanakan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020.

Untuk memantau dan memastikan situasi aman dan terkendali maka, Jumat pagi, Kurang lebih pukul 9.25 Menit Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra, mengunjungi kantor KPU Sulut .



Kepada Wartawan Kapolda mengatakan, pihaknya ingin memastikan proses atau tahapan pendaftaran berjalan aman dan lancar. Tegasnya, jajaran Kepolisian Daerah Sulut siap membackup penuh semua tahapan pelaksanaan Pilkada hingga tuntas.

Ketua KPU Sulut Doktor Ardiles Mewoh memberi apreseasi atas kunjungan Kapolda Sulut. Jelasnya dengan kunjungan ini pihaknya makin memberi rasa aman dan nyaman terhadap semua proses dan tahapan Pilkada.

Pantauan SION FM. Penjagaan Kantor KPU mulai dari depan gerbang tepatnya Jalan Diponegoro Teling diperketat, aparat Kepolisian dari Brimob Polda Sulut berjaga jaga dan memeriksa setiap tamu termasuk media yang meliput. Arus lalu lintas juga direkayasa sehingga hanya 1 yang bisa dilewati. Demikian bagi media yang meliput hanya di mungkinkan 15 Orang dan secara berganti meliput.(Desi).

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

Tahapan Pendaftaran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Resmi Dibuka

MANADO—Tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara resmi dibuka. Kegiatan yang pelaksanaannya dipusatkan di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

“Hari ini KPU Sulut telah membuka tahapan pendaftaran dan ini juga memberikan kesempatan bagi setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendaftarkan diri sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan,” kata Mewoh.

Juga Mewoh menyampaikan dalam tahapan pendaftaran Panitia berharap rombongan pasangan calon wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.” Prinsipnya pelayanan namun harus proposional dan

sesuai aturan dan dilakukan secara merata,” kata Mewoh.

Pembukaan acara tahapan pendaftaran digelar tepat pukul 8:19 pagi dan dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Sulut. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber : *sulutnews.com*

Dijaga Ketat Polisi, Begini Prosedur Masuk ke Kantor KPU Sulut

MANADO — KPU Sulawesi Utara (Sulut) terus dijaga ketat kepolisian. Pantauan BeritaManado.com, pintu masuk kantor penyelenggara pemilu ini dikawal pengamanan berlapis.

Tamu yang masuk pun harus memiliki tanda pengenalan khusus. Kemudian, aparat akan memeriksa lewat sensor, mengantisipasi adanya barang berbahaya yang dibawa masuk ke dalam.

Tidak berhenti di sini, pengukuran suhu tubuh diwajibkan. Jika normal, tahap terakhir petugas akan mempersilahkan mencuci tangan. Hari ini adalah jadwal terakhir pendaftaran kandidat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Sulut. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 24.00 WITA..

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Jelang Pendaftaran Hari Pertama, Suasana Depan Kantor KPU Sulut Masih Lengang

MANADO — Jumat (4/9/2020) hari ini merupakan hari pertama pendaftaran Pasangan Bakal Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di KPU Sulut.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 terjadwal pendaftaran dimulai sejak 4 hingga 6 September 2020.



Dari pantauan BeritaManado.com di sekitaran Kantor KPU Sulut, Jalan Diponegoro, Teling Atas, sekitar pukul 08.50 pagi ini, suasana masih lengang.

Pemeriksaan ketat bahkan dilakukan petugas kepolisian bagi setiap orang yang akan memasuki kantor KPU Sulut.

Terpantau, sejumlah petugas Kepolisian bersenjata lengkap dengan sejumlah kendaraan keamanan tertata rapi di depan kantor Sekretariat KPU.

Sebagaimana informasi yang diperoleh, di hari pertama ini bakal mendaftar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.

Penulis: *Anggawiryamega/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Ketua KPU Sulut Buka Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020

MANADO—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Jumat, (4/9/2020) pukul 08.00 di kantor KPU Sulut.

Sebelum kegiatan ini dibuka, didahului dengan doa bersama serta dilanjutkan pengumuman-pengumuman yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulut Ardiles Mewoh.

Terpantau oleh awak media proses sterilisasi semua pengunjung yang datang termasuk proses Protokol pencegahan Covid-19 yang diterapkan oleh panitia dan bekerja sama dengan instansi kesehatan, kepolisian daerah untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan semua pihak.(*)

Penulis: *Olvi Kapojos*
Sumber: *manadoaktual.com*

KPU Buka Pendaftaran, Ardiles Mewoh Ingatkan Parpol Patuhi Protap Covid 19

MANADO - Hari ini Jumat (4/9/2020) KPU Sulut membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri sebagai kandidat Gubernur, Bupati, dan walikota.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan proses tahapan dari KPU sudah mulai berjalan hari ini.

“Hari ini kami memulai tahapan pendaftaran pasangan calon. Selamat datang kepada bapak bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur serta para partai pengusung. Saya harap dapat mengikuti proses tahapan pendaftaran sesuai aturan dari pihak KPU sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang,” ujar Ardiles Mewoh saat bawakan sambutan pada proses pendaftaran pasangan Olly-Steven di kantor KPU Sulut tepatnya di Jalan Diponegoro Manado.

Ardiles Mewoh selaku Ketua KPU Sulut menyebutkan pembukaan pendaftaran hari ini resmi dibuka sesuai aturan dan undang-undang yang ada. Dirinya sangat memperhatikan protap kesehatan covid19.

“Prosedur ini kami lakukan dalam upaya pencegahan dan penyebaran covid 19. Untuk itu saya harap kepada partai politik (Parpol) yang akan mendaftar untuk tetap mematuhi aturan ini, sepanjang berada dalam lokasi kantor KPU,” tandas Ardiles Mewoh.

Penulis: *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*

Ardiles Mewoh Resmi Buka Tahapan Pendaftaran Cagub dan Cawagub Tahun 2020

MANADO--Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh secara resmi membuka tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.



“Hari ini KPU Sulut telah membuka tahapan pendaftaran dan ini juga memberikan kesempatan bagi setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendaftarkan diri sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan,” kata Mewoh, di Kantor Sekretariat KPU, Jumat (4/09/20) pagi.

Dikatakan Mewoh, dalam tahapan pendaftaran, panitia berharap rombongan pasangan calon wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Prinsipnya pelayanan namun harus proposional dan sesuai aturan dan dilakukan secara merata,” ungkapny.

Diketahui pendaftaran digelar tepat pukul 8:19 pagi dan dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Sulut.

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

Tepat Pukul 08.00 Wita Ketua KPU Sulut Buka Pendaftaran Balon Pilkada 2020

MANADO – Tepat Pukul 08.00 (Wita) hari ini, Jumat (04/09) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut DR. Ardiles Mewoh membuka dengan resmi tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020

” Dengan Memanfaatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 ini saya buka,” Kata Mewoh.

Lebih lanjut kata Mewoh, Pihaknya sudah sangat siap dalam penyelenggaraan pendaftaran tersebut,” Sesuai peraturan KPU kegiatan dimulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 wita untuk hari pertama dan hari kedua sementara hari ketiga pukul 08.00 wita sampai pukul 24.00 wita. Kita mulai tepat waktu, hari ini sesuai info ada bakal calon yang akan mendaftar dan kita sudah siap menerima begitupun dengan tugas masing-masing sudah dibagi. kita berusaha sebaik mungkin tidak ada kesalahan,” Jelas Ketua Mewoh.

Sementara kepada pihak pengamanan Mewoh berharap dapat memberikan rasa nyaman selama jalannya kegiatan pendaftaran ini,” Terimakasih kepada Kepolisian, kami mohon berikan rasa nyaman bagi kami. Kita sudah sepakat dengan partai politik dan paling banyak hanya 36 orang yang bisa masuk dan mereka dilengkapi ID Card. Jadi kami harap Petugas pengamanan bisa bertindak tegas siapa saja yang bisa masuk namun berikan penjelasan dengan santun sambil mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat, ini dalam rangka penerapan protokol covid,” Pinta Mewoh.

”Kepada Petugas penerima para calon, berikan pelayanan yang sama, kalau partai satu kita layani dengan senyum begitupun hal yang sama untuk partai lain,” ingatnya.

Adapun jalannya pendaftaran para bakal calon ini akan ditayangkan secara luas oleh KPU Sulut,” Kita menyiarkan secara langsung jalannya pendaftaran ini. Baik dari akun resmi KPU maupun Lewat sosial media Facebook maupun Tweeter,” Pungkasnya. (Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/04/09/2020*

Sah! Olly-Steven Resmi Daftar Cagub dan Cawagub di KPU Sulut

MANADO-Pasangan Olly Dondokambey - Steven Kandouw secara resmi mendaftar sebagai Cagub- Cawagub di kantor KPU Sulut, Jumat (4/9/2020).

Pasangan Olly-Steven, tiba di kantor KPU Sulut menggunakan sepeda. Proses tahapan Pemilu Kada Sulut hari ini yang ditetapkan KPU sudah berjalan sesuai aturan yang ada.

Pendaftaran di KPUD Sulut, Olly- Steven memilih hari pertama pembukaan pendaftaran di Sekretariat KPU Sulut di Jalan Diponegoro, Kota Manado.

Pasangan Olly-Steven diantar oleh para partai pendukung yakni Partai Gerindra, PKB, PSI, Partai Perindo serta PPP.



Bakal calon gubernur Sulut Olly Dondokambey didampingi bakal calon wakil gubernur Steven Kandouw ketika memberikan keterangan kepada media mengatakan, hari ini kami pasangan Olly-Steven sudah memenuhi tahapan yakni mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur sesuai ketentuan dari pihak KPU sebagai penyelenggara Pilgub Sulut.

“Kami datang menggunakan sepeda. Dan langsung mengikuti tahapan pendaftaran sesuai aturan dan undang-undang yang ada. Ini pendaftaran yang dibuka pihak KPU hari pertama. Dan kami selaku calon gubernur dan wakil gubernur sudah memenuhi salah satu persyaratan dari KPU. Sekali lagi saya dan pak Steven berharap kepada masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) untuk dapat mendoakan dan mendukung pasangan kami (OD-SK) dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 9 Desember mendatang,” imbuh Olly Dondokambey.

Selain itu, dirinya mengucapkan banyak terimakasih kepada KPU yang benar-benar teliti dalam proses pendaftaran setiap bakal calon yang akan mendaftar.

“Saya apresiasi kepada pihak KPU yang benar - benar teliti dalam bekerja. Saya harap kinerja KPU terus ditingkatkan,” tandas Olly Dondokambey.

Diketahui dokumen persyaratan pendaftaran cagub dan cawagub dari pasangan Olly-Steven sudah diterima oleh pihak KPU Sulut, pada Jumat tanggal 4 September 2020.

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

OD-SK Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Pertama Serahkan Pendaftaran di KPU

MANADO—Pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pertama yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) setelah hari

ini, Jumat (04/09) resmi membawa formulir pendaftarannya.

Kedatangan rombongan yang akrab disebut OD-SK ini disambut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan Komisioner Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Lanny Ointu dan Yessy Momongan.

Berdasarkan Kesepakatan antara pengurus partai politik dan KPU Sulut, rombongan OD – SK yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) hanya bisa membawa sejumlah pengurus yakni ketua dan sekretaris serta paslon masuk kedalam ruangan pendaftaran tersebut dengan Prosedur Protokol Kesehatan covid-19.

Dalam ruangan, Para calon ini menyerahkan formulir Pendaftaran Pencalonan Gubernur/ Wakil Gubernur 2020 kepada Komisioner KPU lewat Staf Penghubungnya dan dilangsungkan dengan pemeriksaan Kelengkapan berkas. (Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/04/09/2020*

OD-SK Awali Pendaftaran Calon Gubernur/Wakil Gubernur di KPU Sulut

MANADO—Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (4/9/2020) di Jalan Diponegoro Manado pada pukul 09:98 Wita.

DengandiantarpengurusintiPDI-Perjuangan sebagai partai pengusung bersama partai pendukung yakni Partai Gerindra, Perindo, PSI, PKB, dan PPP, Pasangan Bakal Calon ini tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Terpantau oleh media ini, Pasangan OD-SK datang bersama istri tercinta yaitu Rita Tamuntuan dan dr. Devi Tanod. OD-SK lakukan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di KPU Sulut, Jumat (4/9/2020).

Hingga berita ini diturunkan, Pasangan Bakal Calon ini masih mengikuti proses pendaftaran di KPU Sulut.* (jane)



Penulis: Jane Tungkgi

Sumber: ciintasulut.com/September4, 2020

OD-SK Pasangan Pertama yang Mendaftar di KPU Sulut

MANADO—Menggunakan sepeda pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK) tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dengan menggunakan kemeja putih dan celana jeans dan didampingi kedua istri yang tercinta, Jumat (4/9/2020). OD-SK diantar pengurus PDI Perjuangan (PDIP) dan partai pendukung Partai Gerindra, PKB, PSI, Perindo, dan PPP. Sejumlah pimpinan partai pendukung juga hadir dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.(*)

Penulis: *Charencia Repie*

Sumber: kawanuapost.com

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan tiba di kantor KPU Sulut pukul 09.58 Wita dengan Bersepeda

MANADO—Dengan Menggunakan kemeja putih , celana jeans dan sepatu kets merah Bakal.Calon Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Drs. Steven O.E Kandow tiba di Kantor KPU Sulut pukul 09.58 Wita.

Prosedur Covid diberlakukan dimana Kedua Paslon ini wajib mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh sebelum masuk halaman kantor KPU, serta pemeriksaan alat Deteksi oleh Jajaran Kepolisian.

Menariknya, saat ke KPU, baik Olly maupun Steven memilih gowes (mengayuh sepeda) sejauh 20 kilometer untuk mendatangi Kantor KPU Sulawesi Utara (Sulut) di Jalan Diponegoro Teling.

Terinformasi, ODSK berangkat dari kediaman pribadi Olly Dondokambey di Kolongan Minut. Jarak yang lumayan jauh itu dijalani ODSK dengan santai. Meski begitu, keduanya terlihat sempat berkeringat ketika sampai di Kantor KPU Sulut.

ODSK yang mengenakan kemeja putih itu sebelum bertolak ke Kantor KPU, bersama tim pemenangan dan partai koalisi pendukung, berdoa bersama di Kolongan yang dipimpin Pdt Dr Hein Arina

Kedua Paslon ini didampingi oleh Istri masing masing dengan menggunakan warna senada

Selain pasangan bakal calon ini, juga pimpinan Partai Pengusung diantaranya dari PSI, Gerindra , PKB juga partai pendukung, PPP, dan Perindo. Nampak hadir juga Yasti Suprejo, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Bupati dan Wakil Bupati Bolmut serta sejumlah petinggi DPD PDI Perjuangan Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyambut kedatangan kedua paslon ini dan menekankan semua Protokol Covid tetap diberlakukan dan semua tahapan pendaftaran mengacu dari Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya LO dan Paslon menyerahkan semua berkas pendaftaran untuk diperiksa namun sebelumnya dilakukan disinfeksi terhadap semua berkas.

5 Komisioner KPU menerima berkas syarat paslon untuk kemudian diteliti. Nampak juga mengawasi jalan pendaftaran Ketua Bawaslu Sulut dan staf Bawaslu. (DESI)

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

Bersepeda, Olly Dondokambey-Steven Kandouw Tiba di KPU Sulut

MANADO—Kehadiran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dari PDIP Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK) menyita perhatian publik.

Pasalnya, pasangan petahana ini hadir di KPU Sulut sekitar pukul 09.50 pagi ini dengan menggunakan sepeda.

Kedua pasangan tersebut dikawal sejumlah pimpinan partai pendukung, tim pemenangan, simpatisan dan relawan tiba di Kantor KPU Sulut.



Tampak hadir mendampingi pasangan OD-SK, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagouw, Ketua PSI Sulut Melky Jakhin Pangemanan, Ketua PPP Sulut Depri Pontoh, Ketua DPD Gerindra Sulut Melky Suawah, Wakil Ketua DPW Perindo Sulut Jhon Dumais, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor dan sejumlah anggota DPRD Sulut PDIP.

Melky Suawah, Ketua DPD Gerindra Sulut yang ikut mendampingi serta menjemput OD-SK di lokasi kepada BeritaManado.com mengatakan, Gerindra Sulut siap memberikan 100 persen kekuatannya untuk pasangan OD-SK. “Kami mengawal dan mengamankan pasangan OD-SK untuk kemenangan,” tuturnya.

Penulis: *Anggawiryamega/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Resmi Terdaftar, Olly Dondokambey- Steven Kandouw Puji Kinerja KPU Sulut

MANADO—Pasca resmi terdaftar sebagai Pasang Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dalam Pemilihan Serentak 2020, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw memuji kinerja KPU Sulut.

Kinerja yang dimaksud pasangan petahana ini terkait ketelitian pihak penyelenggara dalam memeriksa berkas-berkas dia dan pasangannya.

“Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada KPU Sulut yang sudah menerima kami mendaftar sebagai Gubernur dan Wagub periode kedua,” jelas Olly Dondokambey didampingi Steven Kandouw dan sejumlah pimpinan partai pengusung, di Kantor KPU Sulut.

Dilanjutkan Dondokambey, proses pendaftaran dan penerimaan berita acara berjalan dengan lancar dan mantap.

“Samua dorang cek satu-persatu. Mudah-mudahan calon laeng leh dorang cek bae-bae rupa tadi. Karena sudah harus menjadi komitmen penyelenggara harus betul-betul teliti,” ungkap Dondokambey.

Dia menjelaskan, jika tugas KPU adalah menyeleksi pimpinan daerah.

“Kalau salah seleksi, KPU yang salah, KPU yang harus bertanggung jawab kalau pemimpin daerah salah,” ujarnya disambut tepuk tangan pendukung.

Diketahui, berkas paslon yang diusung PDIP serta didukung Gerindra, PKB, PSI, PPP dan Perindo ini telah memenuhi syarat dan ditetapkan sah oleh KPU Sulut.

Penulis: *Anggawiryamega/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Pendaftar Pertama, Olly-Steven ke KPU Gunakan Sepeda

MANADO—Pasangan calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE dan Calon wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven Kandouw resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Jumat (4/9) pagi.

Kedatangan petahana Gubernur Sulut itu tampak berbeda, pasalnya orang nomor satu di tanah Nyiur Melambai ini menggunakan sepeda dari kediaman Olly Dondokambey di Kolongan Minahasa Utara hingga ke Kantor KPU Sulut di Jln. Mahkeret timur Manado.

Dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh, pasangan ini turut dikawal sejumlah simpatisan, kader PDI-Perjuangan sampai Partai pendukung.

Olly Dondokambey menyebutkan bahwa dirinya bersama Steven Kandouw begitu siap dalam pemilihan Gubernur Sulut.

“Kami siap bersama seluruh partai pendukung,” singkat OD di dampingi Wakilnya Steven Kandouw.

Ikut mendampingi pendaftaran pasangan calon OD-SK, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagouw, Ketua DPW PSI Sulut Melky Jakhin Pangemanan, Ketua DPD PPP Sulut Depri Pontoh, Ketua DPD Gerindra Sulut Melky Suawah, Wakil Ketua



DPW Perindo Sulut Jhon Dumais, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor dan sejumlah anggota DPRD Sulut dan Manado.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

Olly Dondokambey Apresiasi Pelayanan KPU Sulut

MANADO—Olly Dondokambey saat melakukan pendaftaran sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) periode 2020-2025, memuji proses pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Luar biasa pelayanan dari KPU Sulut, perlu diapresiasi,” ucap Dondokambey yang meminta seluruh yang hadir memberikan aplouse.

Pemberian apresiasi dari Gubernur Sulut itu bukan tanpa alasan, menurut Dondokambey bahwa KPU memiliki peran penting yang akan menyeleksi calon Pemimpin Sulawesi Utara.

“Sebab KPU Sulut waktu pemeriksaan benar-benar sangat teliti dalam memeriksa semua berkas secara satu per satu seperti ijazah, dukungan setiap partai politik serta team,” ucapnya.

Tak hanya itu, komitmen bersama untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 itu juga dijalankan KPU Sulut dengan sangat baik.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

Tujuh Kepala Daerah di Sisi Olly-Steven

MANADO—Kekuatan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw di pemilihan gubernur (pilgub) kian mantap. Ada tujuh kepala daerah kabupaten/kota full topang. Belum lagi, beberapa wakil kepala daerah kini berada di sisi pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri di KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kemarin.

Pemenangan Olly-Steven akan dikawal penuh Bupati dan Wakil Bupati Bolmong Yasti Soepredjo-Yanny Tuuk, Bupati dan Wakil Bupati Bolmong Utara Depri Pontoh-Amin Lasena, Bupati dan Wakil Bupati Bolmong Selatan Iskandar Kamaru-Deddi Hamid, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara-Nayodo Kurniawan, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Royke Roring-Robby Dondokambey, Bupati dan Wakil Bupati Sitaro Evangelian Sasingen-John Palandung, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap-Joke Legi.

Kemudian Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit, Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong, Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar, Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, dan terakhir Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan. Nyaris paripurna dukungan yang akan didapatkan Olly-Steven.

Ini diakui Olly jadi keuntungan sendiri. “Mereka sadar harus bekerja bersama untuk memajukan dan mensejahterakan Sulut,” kata Olly. Usai pendaftaran di KPU Sulut kemarin, Olly mengatakan hampir semua kepala daerah di Sulut mendukung dia dan Steven kembali memimpin Sulut. “Terima kasih untuk kepercayaan ini,” tuturnya.

Lebih jauh Olly menyatakan, di wilayah Bolmong Raya, dari lima daerah, empat kepala daerah satu suara mendukung Olly-Steven. “Saya di BMR didukung empat kepala daerah. Harus menang di sana,” kata Olly, saat mendaftar di KPU, kemarin.

Di tempat yang sama, Yasti Soepredjo ketika diwawancarai mengatakan target kemenangan di wilayahnya di Bolmong sebanyak-banyaknya. “Realistis 80 persen,” kata Yasti. Untuk mencapai target ini, dia melanjutkan ada formula khusus. Dia mengungkapkan, banyak alasan Olly-Steven harus melanjutkan kepemimpinan.

“Perhatian Olly-Steven di BMR sangat besar. Mereka mampu memetakan kebutuhan di Sulut. Misalnya di BMR apa, Minahasa Raya, dan Nusa Utara,” tukasnya.



Di BMR Yasti menilai Olly memberi perhatian pada sektor infrastruktur. “Olly-Steven sudah merancang kalau di Bitung ada KEK, di Minut KEK Pariwisata, dan di BMR Kimong,” urai Yasti. Proyek ini kata Yasti, sudah menyedot 2.000 investor.

Anggota DPRD Sulut dari wilayah BMR Rocky Wowor mengatakan, dengan adanya tambahan kekuatan dari kepala daerah di BMR maka akan lebih memperkuat Olly-Steven.

“Kami juga legislator dari BMR akan bekerja maksimal di BMR. Jika Bolmong, Bolmut, Bolsel, dan Kotamobagu ada kepala daerahnya, saya pasti akan kerja keras di Boltim,” kunci Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Bupati Minahasa Royke Roring yang ikut damping Olly-Steven mendaftar di KPU mengatakan, dirinya bersama Wabup Robby Dondokambey siap mengawal kemenangan hingga 80 persen. “Target kita Olly-Steven menang 80 persen,” kata Roring.

Diketahui Olly-Steven menjadi pasangan calon pertama yang daftarkan diri di KPU. Pasangan incumbent ini tiba di KPU Sulut pukul 10.00 Wita. Jika 2015 lalu keduanya menggunakan mobil ke kantor KPU, kali ini kompak bersepeda dari Kolongan, Minahasa Utara, atau sejauh lebih dari 20 Km. Sementara sang istri yang mendampingi, Rita Dondokambey-Tamuntuan dan Devi Kandouw-Tanos, terlihat mengendarai mobil jeep. Ikut mengawal sang suami dari belakang.

Kedatangan keduanya disambut dengan protokol kesehatan ketat dari KPU Sulut. Komisioner KPU yang dipimpin Ardiles Mewoh, selama satu jam meneliti berkas persyaratan Olly-Steven. Oleh komisioner Lanny Ointu menyatakan persyaratan pencalonan Olly-Steven sudah lengkap dan mereka resmi terdaftar sebagai bakal calon.

Ketika melayani pertanyaan wartawan, Olly yang didampingi ketua partai pendukung yakni PSI Melky Pangemanan, Gerindra

Melky Suawah, PPP Depri Pontoh, PKB Gretty Tielman, dan Perindo John Dumais, memaparkan keinginannya kembali memimpin Sulut lima tahun ke depan.

Kesempatan itu Olly memuji penyelenggara pilkada KPU. “Sangat teliti. Mereka lihat baik-baik. Termasuk ijazah lengkap. Mudah-mudahan semua diselenggarakan seperti ini. Supaya cek betul-betul. Karena komitmen KPU harus betul-betul teliti. Bagus betul KPU kita. Kita beri tepuk tangan dulu pada KPU,” tukasnya.

Olly juga mengapresiasi usaha KPU Sulut yang menerapkan protokol kesehatan ketat dalam pencegahan Covid-19. Karena dia mengatakan, Olly-Steven sangat komitmen pada pencegahan penularan Covid-19.

Di hadapan wartawan Olly memaparkan program yang sudah dia dan Kandouw laksanakan selama dia memimpin. Beberapa program disebut Olly. “Seperti infrastruktur. Kemudian pariwisata, yang mau bilang tidak berhasil siapa? Presiden bolak-balik datang lihat pariwisata. Makanya kita dapat KEK pariwisata,” sebutnya. Kemudian pertanian. Di saat Covid-19 dilakukan ekspor, apalagi ketika tak ada Covid-19. “Di bidang perikanan, Menteri Susi tak tanda tangan izin, saya yang tanda tangan semua. Bisa tanya ke nelayan,” tambahnya.

Selanjutnya program sosial. “Program kita jaminan Perkasa bagi pekerja sosial di Sulut. Kita satu-satunya di Indonesia. Makanya kita dapat hadiah juara 1 dari pak presiden,” tukasnya.

Karena ada yang belum selesai, maka tak cukup satu periode. “Jadi harus dukung lima tahun berikut tuntas semua. Infrastruktur semua beres. Pertama penanganan banjir di Manado tak hanya cukup dengan satu bendungan. Kita akan buat bendungan Kali Tikala atau kuala Sawangan. Ini boleh jadi, kalau ada sinergitas dari pusat, gubernur, dan wali kota,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan ini.

Dia melanjutkan mereka bercita-cita membangun tol Airmadidi sampai Amurang.



“Harus tuntas. Jadi butuh lima tahun lagi. Kemudian kawasan ekonomi khusus (KEK) harus direalisasikan. Termasuk kawasan industri Mongondow atau Kimong,” urai Olly.

Terkait politik uang, Olly menantang untuk memeriksa LHKPN calon apakah bayar pajak atau tidak. “KPU juga harus tegas jangan plin plan. Kalau ada politik uang tangkap. Nanti saya juga bantu koordinasikan ke kapolda dan kapolres,” kuncinya.*)

Penulis *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

Olly-Steven Bersepeda Mendaftar ke KPU Sulut

MANADO – Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur, Steven Kandouw (Olly-Steven) mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Jumat (4/9/2020).

Olly-Steven tiba pukul 10.00 Wita di Kantor KPU Sulut dengan bersepeda. Hal itu dilakukan sejak pukul 08.00 Wita, start dari kediaman di Kolongan Minahasa Utara (Minut).

Sebagai pendaftar pertama, Olly-Steven yang mengenakan kostum putih-putih dan bermasker langsung memasuki halaman dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan. Mulai dari cuci tangan dengan air yang mengalir hingga pengukuran suhu tubuh.

Diketahui, Olly-Steven hadir tanpa iring-iringan besar. Karena memang telah ditetapkan oleh KPU yang melarang adanya konvoi, mengingat pelaksanaan Pilkada digelar di tengah pandemi.

Dalam pantauan, untuk kelangsungan dan keamanan pendaftaran, Polda Sulut menurunkan pasukan untuk melakukan penjagaan ketat. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*

Sumber : *sulutreview.com*

Santai Bersepeda 20 KM Olly-Steven Daftar ke KPU

MINUT—Bakal Cawagub PDI Perjuangan Olly Dondokambey SE dan Cawagub Drs Steven Kandouw dipastikan mendaftar pertama di KPU Sulut, Jumat (04/09/2020) pagi ini.

Menarik pasangan incumbent ini datang ke KPU Sulut yang berlokasi di Jalan Diponegoro Mahakeret Timur itu, dengan menggunakan sepeda gunung.

“Lumayan, 20 Kilo naik sepeda,” canda Cagub Olly pada sejumlah wartawan. Olly-Steven santai bersepeda dari kediaman Cagub Olly di Desa Kolongan Minahasa Utara, yang jaraknya ke KPU Sulut kurang lebih 20 Km. Sebelum ke KPU Sulut, Olly-Steven mengikuti ibadah dan doa bersama di kediaman Cagub Olly.

OD memberikan apresiasi terhadap proses pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Pelayanan dari KPU Sulut, perlu diapresiasi,” kata Dondokambey kemudian seluruh yang hadir memberikan aplouse.

OD didampingi pimpinan Partai Pengusung diantaranya dari PSI, Gerindra , PKB juga partai pendukung, PPP, dan Perindo. Nampak hadir juga Yasti Suprejo, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Bupati dan Wakil Bupati Bolmut serta sejumlah petinggi DPD PDI Perjuangan Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyambut kedatangan kedua paslon ini dan menekankan semua Protol Covid tetap diberlakukan dan semua tahapan pendaftaran mengacu dari Peraturan Perundang-undangan. Kemudian LO dan Pasangan Calon menyerahkan semua berkas pendaftaran untuk diperiksa namun sebelumnya dilakukan disinfektan terhadap semua berkas. Komisioner KPU menerima berkas syarat bersama Ketua Bawaslu Sulut yang ikut mengawasi>(*Jr)

Penulis: *Jeane Rondonuwu*

Sumber: *Sulutdaily.com*



Mendaftar ke KPU Sulut, Olly-Steven Naik Sepeda

MANADO—Jumat (4/9/2020) pasangan calon Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut.

Ketika datang ke KPU Sulut yang berlokasi di Jalan Diponegoro Mahakeret Timur, pasangan incumbent ini datang dengan menggunakan sepeda gunung dari rumah kediaman Cagub Olly di Desa Kolongan Minahasa Utara.

Dengan menggunakan setelan kemeja putih dipadu dengan celana warna hitam, pasangan OD-SK tiba di KPU Sulut pukul 08.40 Wita. “Lumayan, 20 Kilo naik sepeda,” ucap Cagub Olly pada sejumlah wartawan. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

CEP-Landjar Resmi Mendaftar di KPU Sulut

MANADO—Sekira pukul 15.30 wita pasangan Bakal Calon Gubernur Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan Calon Wakil Gubernur Sehan Landjar mendaftar di KPU Sulut, Minggu (6/9/2020).

Keduanya datang di KPU Sulut dengan menggunakan kemeja putih didampingi pengurus partai pengusung lainnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Golkar.

Pasangan ini merupakan pendaftar kedua di hari pendaftaran terakhir. Terpantau di lapangan massa pendukungnya juga ikut mengantar, namun yang hanya diizinkan masuk ialah mereka yang memiliki ID card.

Sementara itu, protokol kesehatan tetap dilaksanakan ialah menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan pihak kepolisian tersebar di lokasi pendaftaran untuk pengamanan. (*)

Penulis : *Charensia Repie*
Sumber : *kawanuapost.com*

CEP-SSL Daftar ke KPU Sulut

MANADO—Pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Christiany Eugenia Paruntu-Salim Sehan Landjar (CEP-SSL) mendaftar ke KPU Sulut.

Kedua bakal Paslon diterima langsung tim pendaftaran KPU. Terlihat paslon beserta timnya lakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol Covid-19.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh yang didampingi komisioner lainnya mengucapkan, selamat datang kepada CEP-SSL sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Saat ini paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut CEP dan SSL masih dalam tahap verifikasi dan masih berjalan.

Diketahui turut mendampingi CEP-SSL yakni, James Arthur Kojongian Ketua I DPW Partai Golkar, Sekretaris Golkar Sulut Raski Mokodompit, Anggota DPRD Sulut Partai Golkar Yongkie Limen, Anggota DPRD sulut Inggried Sondakh dan seluruh Pengurus Partai Golkar Sulut, Ketua DPD Partai Golkar Manado, Ketua DPD Demokrat Manado, Nortje Van Bone, Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok, beserta Pengurus partai Demokrat, serta Ketua DPD PAN Manado Bobby Daud dan pengurus PAN Kota Manado, serta ribuan pendukung dan simpatisan pasangan CEP-SSL. (*)

Penulis: *Olvi Kapojos*
Sumber: *manadoaktual.com*

Target Pilkada Sulut, Sehan: Lebih Satu Suara dari Lawan

MANADO—Target Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Bakal Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan Sehan Salim Landjar (SSL) “Lebih satu suara dari lawan”.

Pasangan CEP dan SSL mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Minggu (6/9/2020) sekitar pukul 15:45 Wita di antar langsung



para Kader Partai Golkar, pengurus PAN dan Demokrat juga ratusan massa.

Hampir 4 jam proses pendaftaran tersebut yang akhirnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi oleh Komisioner KPU Sulut.

Pada sesi wawancara, Sehan Landjar mengatakan bahwa target menang di Pilgub harus dicapai.

“Saya ingin menang lebih satu suara dari lawan. Cuma talebeh (hanya lebih) satu suara atau satu juta suara tetap kami yang menang. Itu yang kami kejar. Kemenangan akan kami upayakan, ada di pihak CEP dan Sehan. Soal berapa persen pokoknya menang. Insya Allah target itu kami akan upayakan kemenangan setelah ditetapkan 70 hari kampanye,” ucap Landjar setelah sebelumnya CEP juga sudah menyampaikan visi-misi.

Lebih lanjut disampaikan Landjar, akan berikan edukasi kepada masyarakat.

“Karena yang kuat adalah rakyat bukan calon, kami tidak lebih dari pengemis. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hati rakyat sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika dihitung kami lah sang juaranya,” ucap Bupati Boltim dua periode ini.

Selain itu, Landjar pun mengatakan bila pembangunan visi misi infrastruktur itu masalah keniscayaan.

“Jalan tol dan sebagainya merupakan target yang harus dilakukan guna memudahkan masyarakat mengakses kantong-kantong produksi. Tapi kami akan buat lompatan kuantum. Masalah rumah, menjadikan rakyat sulut tinggal di tanah sendiri dan rumah sendiri, bersertifikat sendiri. Itu yang menjadi impian saya dan CEP,” seru Landjar.

Selain itu perhatian terhadap kesejahteraan para petani, nelayan dan lapangan kerja pun tetap menjadi prioritas.*)

Penulis: *Olvi Kapojos*
Sumber: *manadoaktual.com*

Resmi Mendaftar ke KPUD, CEP-SSL Tawarkan Perubahan bagi Warga Sulut

MANADO—Pasangan calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu (CEP) bersama Calon wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sehan S. Landjar (SSL), Minggu (6/9) sore resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Terpantau, diantar ribuan pendukung dari Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat pendukung dan militan CEP-SSL memadati kantor KPU Provinsi Sulut.

Setelah diperiksa beberapa jam, berkas CEP-SSL dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh KPU Sulut.

Saat konferensi pers, CEP sapaan akrabnya bersama Sehan mengucapkan terima kasih buat masyarakat Sulawesi Utara yang selalu mendoakan dan mendukung CEP-SSL.

“Terima kasih for masyarakat, kami hadir untuk memberikan perubahan di Sulawesi Utara, oleh karena itu kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat untuk berjuang bersama untuk Sulut,” ucap CEP didampingi Ketua Harian Golkar Sulut James Arthur Kojongian (JAK).

Kami pasangan CEP-SSL berkomitmen untuk memajukan perekonomian masyarakat, membantu menaikkan harga cengkih dan hasil pertanian Sulut dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Itu komitmen kami, bukan sebuah janji tapi kami berjanji untuk melaksanakannya apabila di percayakan masyarakat Sulut,” tambah Bupati Cantik Minahasa Selatan itu.

Penulis: *Andre Siwi*
Sumber: *VoxSulut.com*

Gunakan Bendi ke Kantor Nasdem, VAP Mendaftar Bacalub 2020

MANADO—Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonny Anneke Panambunan (VAP) secara



resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Sulawesi Utara (Sulut) di Partai Nasdem, Senin (9/11/2019). Kedatangan bupati perempuan ini unik dan menarik, karena menggunakan andong atau lebih dikenal dengan bendi. Dan diantar oleh para pendukungnya.

Setibanya di Kantor Nasdem VAP disambut oleh Tim Penjaringan Bacagub 2020 antara lain, Victor Mailangkay, Nico Tampi, Peggy Rumami dan Edwin Assa.

Di depan para jurnalis, VAP mengatakan, dirinya berkeinginan menyejahterakan masyarakat yang ada di Sulut, dengan menitikberatkan pada hasil pertanian dan perkebunan meliputi, kopra, cengkih, dan pala. "Kita tahu bersama harga kopra dan cengkih yang masih memprihatinkan. Saya akan berdoa dan berusaha supaya harga komoditi ini dapat menyejahterakan masyarakat yang ada di Sulut," ungkap Ketua DPC Nasdem Minut.

Ditanyakan, apakah VAP akan mendaftar ke partai lain? Dengan tegas dirinya mengatakan, dia tidak akan mendaftar di partai lain hanya di Nasdem.

"Saya tidak mendaftar di partai lain, namun jika ada partai lain yang ingin berkoalisi atau mengusung tidak apa-apa," kata VAP yang optimis dirinya akan diusung Partai Nasdem sebagai calon gubernur. Di akhir pembicaraan, VAP mengucapkan terima kasih untuk Partai Nasdem yang sudah mempercayakan dirinya sebagai bakal calon gubernur.(*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

VAP-HR Resmi Daftar ke KPU Sulut

MANADO—Hari terakhir pendaftaran pilkada 2020, Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (DR) HC Vonnie Anneke Panambunan STh dan Pdt. Hendry Corneles Mamengko Runtuwene MTh yang diusung partai NasDem dan partai PKS, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi

Sulawesi Utara. Minggu, (06/09/2020) untuk mendaftar.

Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur VAP-HR, masuk ke tempat pendaftaran di dampingi oleh ketua DPW Partai NasDem Sulut Maximilian Lomban, Pimpinan dan Kader Partai NasDem serta Ketua PKS Sulut.

Setelah melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas syarat calon, KPU Sulut menyatakan bahwa pasangan DR (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP) dan Hendry Corneles Mamengko Runtuwene MTh MSi (HR) sudah lengkap dan diterima.

"Puji Syukur kepada Tuhan, semua karena Anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan sehingga berkas pendaftaran di terima, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara yang sudah menerima pendaftaran kami", kata VAP didampingi Calon Wakil Gubernur Hendry Corneles Mamengko Runtuwene.

VAP juga mengatakan jika dipercayakan memimpin Sulawesi Utara, dalam upaya kami mensejahterakan petani dan nelayan, mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara, menjadikan Provinsi Sulawesi Utara yang diberkati.(**/Jr)

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Sumber: *Sulutdaily.com*

VAP-HR Mendaftar ke KPU Sulut Pukul 22.35

MANADO—Pasangan calon Gubernur Vonny A Panambunan (VAP) bersama calon Wakil Gubernur Hendry Runtuwene (HR) yang diusung Partai NasDem dan PKS datang mendaftar ke KPU Sulut, Minggu (6/9/2020) sekira pukul 22.35 Wita.

Meskipun sudah larut malam, pasangan VAP-HR tetap semangat. Sebelum ditetapkan sebagai cagub dan cawagub, berkas kedua Paslon ini diteliti ketat oleh KPU Provinsi Sulut (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
 Sumber: *manadoline.com*

Usai Daftar di KPUD, Ini VAP - HR Buat Warga Sulut

MANADO—Dipastikan pasangan calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dan Calon wakil Gubernur Sulut Hendry Runtuwene (HR) yang diusung Partai Nasdem dan PKS, menjadi kontestan terakhir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Terpantau, Minggu (6/9) rombongan VAP-HR tiba pada pukul 22.36 malam yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 16.00 sore. Kedatangan VAP-HR sontak disambut dengan histeris dan ucapan syukur oleh pendukung setianya, dimana ribuan militan dan pendukungnya telah hadir sejak sore hari untuk menunggu Bupati cantik Minahasa Utara itu.

Setelah diverifikasi selama 2 jam oleh KPU Sulut, berkas dan dokumen persyaratan pasangan calon VAP-HR dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Cagub Vonnie Anneke Panambunan (VAP) didampingi Cawagub Hendry Runtuwene (HR) mengucapkan terima kasih buat seluruh masyarakat yang masih setia hingga malam hari.

“Ini semua karena anugerah dan kita harus mengucapkan syukur sehingga proses pelaksanaan pendaftaran berjalan lancar dan semua dokumen persyaratan telah diterima,” ucap VAP didampingi Cawagub Hendry Runtuwene dan sejumlah ketua Partai.

Lebih lanjut, ia berjanji meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Sulut di sektor Pertanian seperti harga cengkih dan kopra serta sektor peternakan dan Pariwisata.

“Tanah Sulawesi Utara sangat kaya dan sangat diberkati oleh karena itu apabila diijinkan Tuhan VAP-HR siap tingkatkan

kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucapnya.

Sementara itu, Cawagub Hendry Runtuwene (HR) turut berterima kasih buat masyarakat dan KPU Sulut yang telah menjalankan proses tahapan dengan baik.

“Semua dokumen dan syarat terpenuhi. Satu langkah kita maju untuk Sulawesi Utara yang maju dan diberkati,” ucap Mantan Sekum Sinode GMIM itu.

Penulis: *Andre Siwi*
 Sumber: *VoxSulut.com*

Injury Time, VAP-HR Mendaftar di KPU Sulut.

MANADO—Tepat pukul 22.35 Wita, pasangan calon yang dijagokan Partai NasDem, Vonnie Anneke Panambunan dan Henry Runtuwene (VAP-HR) tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (6/9/2020).

Kedatangan paslon Gubernur Sulut dan Wakil Gubernur Sulut di KPU ini, berada di penghujung waktu penutupan pendaftaran atau injury time.

VAP-HR yang diiringi para pendukungnya itu kemudian melakukan tahapan pendaftaran, berikut prosesi pemberkasan dokumen yang ditetapkan KPU.

Sejumlah pimpinan partai politik nampak hadir pada tahap pendaftaran VAP-HR, Ketua DPW NasDem Sulut Maximilian Lomban, Sekretaris DPW Victor Mailangkay, Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut, Nick Lomban, maupun sejumlah anggota Fraksi masing masing Stella Runtuwene, Braien Waworuntu, I Nyoman Sarwa, Alfian Bara dan Muhamand Wongso.

Seperti yang diberlakukan pada calon sebelumnya, berkas maupun dokumen syarat pencalonan selanjutnya di teliti KPU. Hal itu sebagai ketentuan persyaratan.(*)

Penulis : *Jellina Najoo*
 Sumber : *sulutreview.com*



KPU Sulut Resmi Buka Pendaftaran Pilkada 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak 2020.

Pendaftaran Calon Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dibuka mulai Jumat (4/9/2020) hingga Minggu (6/9/2020).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Masa kampanye akan dilangsungkan mulai 26 September 2020 dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Pada tahapan pendaftaran, secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut, Dr. Ardiles Mewoh, pada pukul 08.00 Wita.

“Saya membuka tahapan pendaftaran pasangan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan memanjatkan nama Tuhan yang Maha Esa, kiranya pendaftaran bakal calon hari ini berjalan dengan aman, sukses dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Tuhan senantiasa menolong kita semua,” ucap Mewoh sambil mengetuk palu tiga kali.

Mewoh juga menjelaskan teknis-teknis yang akan berlangsung dalam proses jalannya pendaftaran bakal calon hari ini. Antara lain berapa jumlah pendukung dari masing-masing calon yang akan mendampingi untuk masuk ke dalam dan pers yang masuk diatur secara bergantian.

“Yang berhak masuk ke dalam kantor yakni mereka yang memiliki ID card khusus yang dikeluarkan oleh KPU. Pemimpin daerah sekalipun yang tidak memiliki ID card tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor, pers juga akan dibatasi jumlah yang akan masuk meliputi ke dalam kantor, pers nantinya akan di undi,” tegas Mewoh.

Dari pantauan media ini, protokol kesehatan Covid-19 tetap menjadi acuan. Setiap bakal

calon yang masuk area KPU untuk mendaftar diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan dan diukur suhu tubuhnya.

Pada pendaftaran awal ini, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven) merupakan pasangan pertama yang diterima langsung oleh ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*

Sumber : *sulutreview.com*

CEP-Sehan Resmi Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

MANADO—Pasangan calon Gubernur Christiany E Paruntu (CEP) dan Calon Wakil Gubernur Sehan Landjar mendaftar di hari terakhir di KPU Sulut.

Pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar, Demokrat dan Partai Amanat Nasional tersebut datang di Kantor KPU tepat jam 15:30 wita dengan didampingi pengurus partai Pengusung.

Mengenakan pakaian warna putih, dipadu bawahan hitam CEP-Sehan terlihat didampingi pengurus parpol pengusung juga sejumlah pengurus partai pengusung. CEP-Sehan meeupakan pendaftar kedua bakal calon yang mendaftarkan diri di KPU. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber : *sulutnews.com*

PILGUB SULUT: Christiany Eugenia Paruntu Janji Perbaiki Harga Cengkeh dan Kopra

MANADO –.Bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu (CEP) berjanji memperbaiki harga cengkeh dan kopra.

Menurut Christiany Eugenia Paruntu, perhatian kepada petani menjadi program prioritas jika mendapat restu memimpin Sulut.

“BUMD akan kami maksimalkan membeli hasil bumi. Kopra, Cengkeh dan lainnya



harus punya harga jual yang ideal bagi petani, ” tegas Christiany Eugenia Paruntu pada sesi konferensi pers di Kantor KPU Sulut, Minggu (6/9/2020).

CEP mengaku akan memberikan yang terbaik bagi rakyat bumi nyiur melambai.

Menurut Paruntu, keberhasilan dirinya bersama Salim Sehan Landjar saat menjadi bupati di daerah masing-masing akan diperluas jika mendapat amanah dari masyarakat. “Pembangunan Sulut harus ditingkatkan. Jika kami menang, kesejahteraan rakyat menjadi utama, ” katanya.

Dengan tekad tersebut, Paruntu berjanji sekuat tenaga berjuang untuk memenangkan kompetisi. “Ini menjadi awal perjuangan kami. Semoga perkenaan Tuhan bisa mengantarkan kami memimpin Sulawesi Utara, ” kata Paruntu.

Bakal Calon Gubernur, Sehan Salim Landjar (SSL) mengatakan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat adalah agenda utama CEP-SSL. “Yang sudah baik akan kami lanjutkan. Kalau belum bersama kita benahi, ” tandas Sehan.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Pendukung Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar Setia Menunggu di Depan KPU Sulut

MANADO — Ratusan pendukung Kandidat Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu (CEP)-Sehan Salim Landjar (SSL) setia menunggu proses pendaftaran jagoannya di kantor KPU Sulut, Minggu sore (6/9/2020).

Didominasi pakaian kuning, massa yang terdiri dari pengurus partai politik dan simpatisan ini tumpah ruah di Jalan Jalan Diponegoro, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wenang.

Pengamanan ketat yang diberlakukan KPU Sulut, membuat hanya beberapa perwakilan saja yang bisa masuk.

Meski demikian, suasana di KPU Sulut terpantau tertib. Arus lalu lintas di Jalan Diponegoro lancar dengan pengawasan polisi.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Tak Banyak Kata, Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene Tiba di KPU Sulut

MANADO—Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene tiba di KPU Sulut sekitar pukul 22.45 WITA, Minggu (6/9/2020).

Disambut ratusan pendukung, Vonnie Anneke Panambunan tak banyak berkata-kata. Vonnie hanya melambaikan tangan dan memberikan senyuman manis kepada para simpatisan.

Saat ini berkas pendaftaran milik Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene sedang diperiksa KPU.

Ratusan massa pendukung tetap setiap menunggu di depan kantor KPU dengan pengawalan ketat aparat.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Tiga Jam Jelang Pendaftaran Ditutup, Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene Belum Tiba di KPU

MANADO — Tiga jam jelang penutupan pendaftaran, Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene belum mendatangi kantor KPU Sulut, Minggu (6/9/2020).

Diketahui, hari ini adalah jadwal terakhir pendaftaran kandidat dan KPU masih akan menunggu hingga pukul 24.00 WITA.



Pantauan BeritaManado.com, puluhan pendukung Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene sejak sore sudah menunggu di depan KPU Sulut.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Vonnie Anneke Panambunan: Saya Tak Mau Dipenjara Lagi

MANADO—Bakal Calon (Balon) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Vonnie Anneke Panambunan mengaku tak ingin masuk penjara lagi.

Niatnya bersaing pada kontestasi Pemilihan Gubernur Sulut adalah ingin membangun daerah semakin maju dan bersaing dengan wilayah lain. “Dengan perkenaan Tuhan, saya tidak ingin masuk di penjara lagi. Izinkan kami bekerja untuk Sulut yang lebih baik,” kata Vonnie Anneke Panambunan pada sesi jumpa pers di Kantor KPU Sulut, Senin dini hari (7/9/2020).

Ia menegaskan, jika mendapat restu dari warga Sulut menjadi gubernur, kekuasaan itu tidak akan digunakan memperkaya diri sendiri. “Saya tidak ingin banyak tanah, banyak pompa bensin. Tujuan kami hanya bekerja bagi rakyat,” tegasnya.

Menurut Vonnie, fokus program dirinya bersama Hendry Runtuwene adalah meningkatkan sektor pertanian, perikanan, kelautan dan bidang lainnya yang bisa mendongkrak perekonomian Sulut. “Jadi dukung kami agar itu bisa tercapai,” harapnya.

Sementara Balon Wakil Gubernur Hendry Runtuwene mengamini visi-misi yang dipaparkan Vonnie. Ia menambahkan, jika kelak diberi amanah memimpin Sulut, keduanya akan menjadikan bumi nyiur melambai sebagai daerah yang makin diberkati.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

PILGUB SULUT: Tiga Pasangan Bakal Calon Resmi Terdaftar di KPU

MANADO — Bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftarkan ke KPU Sulut dipastikan hanya tiga pasangan.

Hal ini setelah diterimanya berkas pendaftaran Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene oleh KPU, Senin dini hari (7/9/2020).

Hingga pukul 24.00 WITA tadi, hanya Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene yang datang dan otomatis menjadi pendaftar terakhir.

Dengan demikian, tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual terhadap berkas pendaftaran para balon.

Diketahui, pendaftar pertama pada 4 September 2020 adalah pasangan balon Oilly Dondokambey dan Steven Kandouw.

Kemudian 6 September 2020, juga datang Christiany Eugenia Paruntu dan Salim Sehan Landjar, dimana berkas mereka juga telah diterima oleh penyelenggara pilkada.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Oilly-Steven, CEP-SSL dan VAP-HR Resmi Jadi Peserta Pilgub Sulut

MANADO — Tiga Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Sulut.

Dengan demikian pasangan Oilly Dondokambey – Steven Kandouw (Oilly-Steven), Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) dan Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) resmi menjadi peserta pada Pemilihan Gubernur (Pligub) Sulut.

Penetapan pasangan calon tersebut resmi diumumkan melalui konferensi pers yang digelar di halaman kantor KPU Sulut, Rabu (23/9/2020).



Pengumuman ini juga disiarkan secara langsung melalui aplikasi zoom dan youtube.

Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh diikuti oleh empat orang komisioner.

Sebelum penetapan calon, para komisioner membacakan pengumuman berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan bakal calon ketiga pasangan.

Hasil penelitian perbaikan berkas Olly Dondokambey-Steven Kandouw dibacakan oleh Anggota Salman Saelangi dan menyatakan MS.

Selanjutnya, berkas perbaikan Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar dikatakan MS oleh komisioner Lanny Ointu.

Dan berkas Vonnie Anneke Panambunan (VAP) beserta Hendry Runtuwene dinyatakan MS oleh Yessy Momongan.

Ketua KPU Ardiles Mewoh menegaskan tahapan penetapan paslon dilakukan tanpa melakukan pengumpulan orang. “Dan itu berlaku untuk jenjang berikutnya,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Pengundian Nomor Urut, Paslon Diminta Taat Prokes

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengingatkan kepada para bakal pasangan calon (paslon) untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang sudah disepakati bersama.

Begitu juga pada tahapan pengundian nomor urut nanti.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menegaskan, semua kandidat yang telah mendaftar wajib mendukung program pemerintah meminimalisasi penyebaran virus korona.

Salah satunya, kata Ardiles dengan mencegah konsentrasi massa di momen pengundian nomor urut pada 24 September 2020.

“Paslon hanya mengutus satu orang penghubung saja dan dua orang tim kampanye dan saksi. Jangan membawa massa apapun bentuknya,” imbau Mewoh.

Mewoh menambahkan, kerjasama calon peserta pilkada sangat berperan mewujudkan pilkada aman dan sehat.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Nomor Urut Pilgub Diumumkan, CEP-SSL 1, VAP-HR 2, Olly-Steven 3

MANADO — Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya mendapat nomor urut sebagai peserta pemilihan serentak 2020.

Nomor urut ini nantinya akan digunakan pada setiap aktivitas kampanye dan dicetak pada kertas suara sebagai identitas masing-masing paslon.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon yang digelar KPU Sulut, Kamis (24/9/2020), nomor 1 diperoleh oleh paslon Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL).

Sementara nomor urut 2 jatuh kepada paslon Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) dan pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven) akan menggunakan nomor 3.

Pengundian dan penetapan nomor urut dihadiri oleh semua peserta pemilihan gubernur.

Sepanjang rapat, dilakukan standar protokol COVID-19 dengan pembatasan tamu undangan.

Selain lima komisioner KPU dan paslon, dalam area pleno hanya dihadiri perwakilan dua anggota Bawaslu dan LO.

Proses pleno disiarkan langsung melalui chanel youtube dan laman facebook KPU Sulut.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*



Tiba Di KPU Pukul 22:35, VAP-HR Tetap Semangat

SULUT—Pukul 22:35 Pasangan Calon Gubernur Vonny A Panambunan (VAP) bersama calon Wakil Gubernur Hendri Runtuwene (HR) yang diusung

Partai NasDem dan PKS datang mendaftar ke KPU Sulut, Minggu (6/9/2020).VAP-HR merupakan pendaftar terakhir di KPU Sulu

Dari pantauan yang ada Kedatangan VAP-HR ke KPU Sulut didampingi pengurus Parpol kedua partai dan juga diantar ratusan pendukung simpatisen dari masyarakat Sulut yang ada.

Meskipun sudah larut malam, pasangan VAP-HR tetap semangat. Sebelum ditetapkan sebagai cagub dan cawagub, berkas kedua Paslon ini diteliti ketat oleh KPU Provinsi Sulut. (*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber : *portalsulutnews.com*

VAP-HR Mendaftar di Injury Time

MANADO—Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Utara, Vonny Aneke Panambunan dan Calon Wakil Gubernur, Hendry Runtuwene menjadi pendaftar ke 3 setelah KPU membuka pendaftaran calon mulai 4-6 September 2020 dan menjadi pendaftar terakhir.

Dengan menggunakan paduan warna Putih hitam dan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai syarat pendaftar ditengah pandemi Covid Pasangan WAP - HR menyerahkan berkas pendaftaran di KPU Sulut.

Setelah dilakukan penelitian berkas Pasangan yang diusung Partai Nasional Demokrat tersebut dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan, persyaratan dan menuangkan hasil penelitian dalam formulir model BI KWK dan keabsahannya memenuhi syarat dan diterima. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber : *sulutnews.com*

Tiga Paslon Mendaftar Pilgub Sulut

MANADO—Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut hampir dipastikan diikuti tiga pasangan calon. Ketiganya dari jalur partai politik. Pasangan Christiany Eugenia Paruntu- Sehan Salim Landjar (CEP/SSL) dan Vonny Panambunan-Henry Runtuwene (PAR) mendaftar di KPU Provinsi Sulut, di hari terakhir pendaftaran Minggu (06/09) kemarin.

Sebelumnya, paslon petahana, Oilly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) mendaftar Jumat (04/09) siang. CEP/SSL dan ODSK datang ke kantor KPU Sulut diantar pendukung. Setelah melakukan proses pendaftaran dan penelitian dokumen, kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Termasuk dokumen bebas Covid 19 yang jadi salah satu syarat utama pencalonan.

Sementara itu, pasangan PAR hingga pukul 21.55 Wita, Minggu (6/9) kemarin, belum ribs di kantor KPU Sulut. Diketahui, Minggu (6/9) adalah jadwal terakhir pendaftaran dan KPU menunggu hingga pukul 24.00 WITA. Pantauan harian ini, puluhan pendukung PAR sejak sore sudah menunggu di depan KPU Sulut.

“Dua pasangan sudah mendaftar semua dan kami nyatakan telah diterima. Untuk persyaratan pencalonan, kedua pasangan memenuhi syarat termasuk hasil swab test Covid-19.Tapi masih akan diverifikasi keabsahan berkas persyaratan calon, seperti ijazah dan SKCK-nya dan lainnya. Kami masih menunggu pasangan Vonny-Hendry yang sudah menginformasikan untuk mendaftar,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Setelah itu, KPU akan melakukan tahapan selanjutnya, yakni penetapan calon. “Setelah verifikasi dan memenuhi syarat, paslon akan ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Penetapan calon tanggal 23 September,” terangnya.

Pantauan harian ini, ada hal berbeda dalam pendaftaran calon kepala daerah di



KPU tahun ini. Hal itu dikarenakan protokol kesehatan Covid 19 yang harus diterapkan.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Tahapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Resmi Ditutup

MANADO—Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ardiles Mewoh didampingi Lanie Ointu secara resmi menutup tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tepat pukul 00:00 Wita.

Turut disaksikan Komisioner Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangelu, penandatanganan berita acara pendaftaran ditandai dengan penandatanganan buku pendaftaran calon.

Sampai batas waktu, bakal calon yang mendaftarkan yakni Pasangan Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw (PDIP) bersama partai pengusung Perindo, PSI, PKB, PPP dan Gerindra. Pasangan Calon Christiany E Paruntu (CEP) dan Sehan Salim Landjar yang diusung oleh Partai Golkar, PAN dan Demokrat dan Pasangan Calon Vonny Aneke Panambunan (VAP) dan Hendry Runtuwene yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan PKS. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Sumber : *sulutnews.com*

Tuntas, Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Sulut Resmi Ditutup

MANADO—Setelah tiga hari berturut-turut yakni dari tanggal 4 hingga 6 September Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membuka pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Minggu (6/9/2020) pukul 00:00 Wita pendaftaran resmi ditutup Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh didampingi salah satu komisioner, Lanny Ointu.

Penutupan pendaftaran ini dipertegas dengan ditandatanganinya berita acara dan penandatanganan buku pendaftaran

calon, disaksikan Komisioner Bawaslu Sulut Supriyadi Pangelu.

Sampai batas waktu, bakal calon yang mendaftar yakni pasangan calon Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw, Christinia Euqinia Paruntu (CEP) dan Sehan Salim Lanjar, serta Vonny Aneke Panambunan (VAP) dan Hendry Runtuwene.

Pasangan calon Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw diusung Partai PDIP, Perindo, PSI, PKB, PPP dan Gerindra. Pasangan Christinia Euqinia Paruntu (CEP) dan Sehan Salim Landjar diusung oleh Partai Golkar, PAN dan Demokrat. Sedangkan Pasangan Calon Vonny Aneke Panambunan (VAP) dan Hendry Runtuwene diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan PKS.* (jane)

Penulis: *Jane Tungkagi*
Sumber: *ciintasulut.com/September 7, 2020*

KPU Sulut Resmi Tutup Pendaftaran Bakal Cagub dan Cawagub

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menutup pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pukul 24:00 WITA.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, sesuai peraturan yang ada, pembukaan pendaftaran tanggal 4-6 September, dan secara keseluruhan ada tiga pasangan bakal calon yang mendaftar dari hari pertama.

Jelas Mewoh, KPU sudah selesai membuka pendaftaran sesuai peraturan yang ada tanggal 4-6. Minggu, 6 September 2020 kita tutup pukul 24:00 WITA, ada tiga bakal calon yang mendaftar, yang paling terakhir tadi pukul 23:00 WITA melakukan registrasi.

Mewoh menuturkan, selanjutnya KPU akan melakukan penelitian terhadap seluruh dokumen syarat calon yang dimasukkan.

Jelasnya, Sesuai dengan tahapan yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 12.



Ditambahkan Mewoh, untuk tanggapan masyarakat sudah dibuka dan diumumkan lewat website KPU Sulut.

Tambahnya, KPU akan membuka seluas-luasnya tanggapan masyarakat. Bahkan sudah umumkan melalui website KPU siapa saja yang menjadi calon dan siapa saja yang menjadi bakal calon dalam pemilihan kepala daerah serentak, dan selanjutnya silahkan ditanggapi oleh masyarakat luas. Ditanggapi terkait persyaratan-persyaratan calon. (DESI)

Penulis: *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

VAP-HR Resmi Mendaftar di KPU Sulut

MANADO—Bakal calon gubernur DR (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh bersama pendampingnya calon wakil gubernur Pdt Hendry Runtuwene (PAR) resmi mendaftar di KPU Sulut, Minggu (06/09/20).

Pendukung VAP dengan setia telah menunggu sejak siang hari sebagaimana jadwal yang disampaikan ke publik jagoan Partai NasDem Sulut akan daftar pukul 16.00 Wita.

Bergesernya waktu, dimaklumi VAP notabene ketua DPD NasDem Minut bersamaan mendampingi putrinya, Shintia Gelly Rumumpe dan Netty Agnes Pantow (SGR-NAP) yang mendaftarkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati di KPU Minut sejak pukul 15.30 Wita.

Pdt Hendry Runtuwene lebih awal tiba di kantor KPU sekitar pukul 22.25 Wita.

Kepada sejumlah wartawan, Runtuwene mengakui ibu VAP akan datang, usai dari KPU Minut. “Kami sudah koordinasikan dengan pihak KPU. Mereka akan menunggu hingga jadwal yang ditentukan pukul 24.00 Wita,” terang calon wagub Sulut.

Namun begitu VAP dengan pengawalan ketat muncul sekitar pukul 22.40 Wita, sekitar 1 jam lebih sebelum pendaftaran ditutup.

Langsung saja, areal KPU Sulut yang telah dipadati massa tepat berada tepat di ruas

jalan Diponegoro, Teling, berubah hingar bingar dengan teriakan ini gubernur Sulut.. ini gubernur Sulut.

Dengan mengenakan pakaian bercorak putih, duet andalan Partai NasDem dengan jargon PAR (Panambunan-Runtuwene) serta rombongan petinggi NasDem Sulut yakni ketua DPW MJ Lomban, Victor Mailangkai diterima komisioner KPU Sulut, ketua Ardiles Mewoh anggota Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Lanny Ointu serta Salman Saelangi. (*)

Penulis : *Dewi S*

Sumber : *suluttimes.com*

Resmi Ketua KPU Sulut Tutup Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2020

MANADO—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh menutup secara resmi tahapan pendaftaran pasangan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pukul 24.00 Wita, Minggu (6/9/2020).

Sebagai bentuk legalitas, penutupan diikuti penandatanganan berita acara di buku pendaftaran calon, dengan disaksikan komisioner Bawaslu Supriyadi Pangelu. “Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur resmi ditutup,” sebut Mewoh.

Data dari KPU Sulut menyebutkan, pada akhir masa pendaftaran tercatat ada tiga pasangan calon yang mendaftar, yakni Oilly Dondokambey-Steven Kandouw, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene.

Diketahui, tahapan pendaftaran bagi bakal pasangan calon kepala daerah, dibuka sejak Jumat (4/9/2020) hingga Minggu (6/9/2020) pukul 24.00 Wita. Selanjutnya, usai penutupan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya. (*)



Penulis: *Olvi Kapojos*
Sumber: *manadoaktual.com*

Pleno KPU Sulut, Tiga Bapaslon Belum Memenuhi Syarat

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara pemilihan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) 2020, telah memasuki tahapan verifikasi.

Kali ini KPU melakukan tahapan, yakni rapat pleno verifikasi persyaratan pendaftaran dan syarat calon di kantor KPU Sulut yang dilakukan secara live lewat youtube, Minggu (13/9/2020).

Dari hasil verifikasi KPU Sulut dalam rapat pleno, ketiga bakal pasangan calon yang mengikuti tahapan pendaftaran masih didapati sejumlah kekurangan, alias belum memenuhi persyaratan.

Yakni pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven) yang diusung oleh partai PDIP, Gerindra, PKB dan PSI dan di dukung oleh PPP dan Perindo.

Selanjutnya, Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) di usung oleh partai Golkar dan didukung oleh Demokrat dan PAN.

Berikut, Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) yang diusung oleh partai NasDem.

“Hari ini kita memberitahukan hasil penelitian verifikasi syarat calon, yang sudah dihadiri oleh partai pengusul. Ada juga bakal calonnya yang hadir. Terhadap hasil verifikasi itu, ketiga bapaslon yang mendaftar pertama, kedua dan ketiga kita masih memberikan status belum memenuhi syarat,” ungkap Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Senin (14/9/2020).

Lanjut Mewoh, KPU Sulut akan memberikan waktu bagi ketiga bapaslon untuk melengkapi dan memperbaiki semua dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam PKPU.

“Selanjutnya kami akan membuka perbaikan syarat calon mulai besok. Yakni pada tanggal 14-15 September, hingga Pukul 16.00 Wita dan pada 16 September sampai pukul 24.00 Wita. Diharapkan bapaslon bisa melakukan perbaikan segera seluruh dokumen-dokumen yang kita nyatakan belum memenuhi syarat, sehingga waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik,” jelas Mewoh

Turut hadir dalam rapat pleno Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan dan staff, hadir juga anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi, sekretaris, kabag dan staf. (*)

Penulis : *Jellina Najooan*
Sumber : *sulutreview.com*

Pleno KPU Sulut, Tiga Bapaslon Belum Memenuhi Syarat

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara pemilihan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) 2020, telah memasuki tahapan verifikasi.

Kali ini KPU melakukan tahapan, yakni rapat pleno verifikasi persyaratan pendaftaran dan syarat calon di kantor KPU Sulut yang dilakukan secara live lewat youtube, Minggu (13/9/2020).

Dari hasil verifikasi KPU Sulut dalam rapat pleno, ketiga bakal pasangan calon yang mengikuti tahapan pendaftaran masih didapati sejumlah kekurangan, alias belum memenuhi persyaratan.

Yakni pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven) yang diusung oleh partai PDIP, Gerindra, PKB dan PSI dan di dukung oleh PPP dan Perindo.

Selanjutnya, Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) di usung oleh partai Golkar dan didukung oleh Demokrat dan PAN.

Berikut, Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) yang diusung oleh partai NasDem.



“Hari ini kita memberitahukan hasil penelitian verifikasi syarat calon, yang sudah dihadiri oleh partai pengusul. Ada juga bakal calonnya yang hadir. Terhadap hasil verifikasi itu, ketiga bapason yang mendaftar pertama, kedua dan ketiga kita masih memberikan status belum memenuhi syarat,” ungkap Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Senin (14/9/2020).

Lanjut Mewoh, KPU Sulut akan memberikan waktu bagi ketiga bapason untuk melengkapi dan memperbaiki semua dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam PKPU.

“Selanjutnya kami akan membuka perbaikan syarat calon mulai besok. Yakni pada tanggal 14-15 September, hingga Pukul 16.00 Wita dan pada 16 September sampai pukul 24.00 Wita. Diharapkan bapason bisa melakukan perbaikan segera seluruh dokumen-dokumen yang kita nyatakan belum memenuhi syarat, sehingga waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik,” jelas Mewoh

Turut hadir dalam rapat pleno Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan dan staff, hadir juga anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelang, sekretaris, kabag dan staf. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

Hasil Verfak KPU Sulut, Tiga Paslon Belum Memenuhi Syarat

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut telah mengumumkan hasil penelitian atau verifikasi keabsahan dokumen syarat pencalonan 3 (tiga) bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur.

Dari hasil penelitian dokumen tiga pasang calon masing-masing Olly Dondokambey-Steven Kandouw, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Landjar dan Vonny Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene belum memenuhi syarat berkas pencalonan. Hasil verifikasi berkas syarat calon selanjutnya diserahkan ke LO dan perwakilan partai politik pengusung.

“Terhadap hasil verifikasi itu, ketiga bakal paslon yang mendaftar pertama, kedua dan ketiga kami memberikan status belum memenuhi syarat,” ungkap Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh kepada wartawan, Senin (14/9) kemarin.

Lanjut Mewoh, pihaknya memberikan waktu bagi ketiga bakal paslon untuk melengkapi dan memperbaiki semua dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam PKPU.

Sejak Senin 14 September 2020 hingga Selasa 15 September 2020 sampai pukul 16.00 Wita. Sedangkan pada hari ketiga 16 September 2020 nanti sampai pukul 24.00 Wita.

“Kami berharap, bakal paslon bisa melakukan perbaikan seluruh dokumen-dokumen yang kita nyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik, “ ujarnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda menganjurkan tiga paslon untuk segera melengkapi dokumen. “Ditunggu sampai Rabu besok. Karena tanggal 16-22 ada tahapan verifikasi setelah perbaikan, “ kata Malonda.

Ia mengungkap dokumen yang belum lengkap ini bagian besar dokumen administrasi seperti DB1KWK. Ada juga berkas yang ditandatangani tidak ada nama calon. Kemudian ada alamat tidak sesuai di KTP, perbedaan satu huruf di penulisan nama. Ada perbedaan tulisan lulus di formulir DB2. Ada juga ijazah S2 tidak dilegalisir. Bawaslu juga menemukan ada satu nama di dua tim kampanye. Sementara anggota Bawaslu Sulut, Kenly Poluan menyarankan KPU Sulut untuk menegaskan visi dan misi bakal paslon agar bisa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Selama ini kerja verifikasi KPU hanya fokus pada administrasi syarat dan itu sangat teknis. KPU Sulut bisa menegaskan indikator-indikator dari kesesuaian program



visi dan misi paslon dengan program RPJMD itu,” tegas Poluan.

Menurut dia, selama ini dari periode ke periode pemilihan itu luput dari perbincangan publik yang selama ini kita lihat terkait verifikasi yang sangat teknis yakni, ijazah, surat-surat pengadilan, kepolisian dan sebagainya tetapi penguatan pada visi-misi program paslon itu tidak menjadi perhatian.

“Kami menginginkan pada Pilkada kali ini KPU dan paslon memberi perhatian terhadap itu, agar kepentingan kita melakukan Pilkada tidak saja mengganti orang, tapi menghasilkan output yang diinginkan serta perbaikan yang substansial,” harap dia.

Lanjut dia, apakah di RPJMD itu ada target-target terkait pertumbuhan perekonomian, peningkatan indeks pembangunan manusia, akses terhadap kesehatan, kemiskinan seperti apa itu harus di link dengan visi-misi program paslon.

“Supaya nanti diperbincangkan publik mana yang berkaitan kuat dengan RPJMD, dan diantara mereka mana yang terlihat paling serius dalam melakukan program-program yang mereka sampaikan itu,” pungkask dia.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

KPU Imbau Paslon Tak Kumpul Massa Saat Ditetapkan Jadi Peserta Pilkada

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengimbau kepada seluruh Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti kontestasi pada Pilkada Sulut, tidak mengumpulkan massa saat penetapan calon tetap kepala daerah yang akan dilaksanakan Rabu (23/9) hari ini.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya mengingatkan agar tidak ada pengumpulan massa yang terjadi, setelah penetapan calon tetap kepala daerah yang akan ikut dalam Pilkada.

“Mari kita jaga bersama, kita lindungi bersama dan kita hentikan penyebaran virus

corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan, termasuk tidak mengumpulkan massa saat sudah ditetapkan sebagai calon tetap kepala daerah pada Pilkada 2020 ini,” kata Ardiles.

Terkait dengan pengumuman calon tetap ini sendiri, Ardiles mengatakan KPU berpegang pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana tahapannya dilakukan pada Rabu (23/9) dan berlaku di seluruh daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Dijelaskan Ardiles, dalam penetapan ini, akan melakukan Pleno secara internal, pencermatan terhadap hasil verifikasi yang sudah dilakukan sepanjang tahapan yang berjalan.

Dikatakannya, jika hasil verifikasi memenuhi ketentuan persyaratan, baik pencalonan syarat calon, maka akan ditetapkan sebagai calon peserta di Pilkada. Begitu juga sebaliknya, jika persyaratan tidak memenuhi ketentuan, KPU tidak akan menetapkan sebagai calon atau dengan kata lain statusnya tidak memenuhi syarat.

“Jadi pleno dilakukan secara internal, setelah itu ditetapkan. Nantinya, hasil pleno penetapan akan diumumkan secara luas melalui website KPU Sulawesi Utara, maupun juga melalui papan pengumuman di KPU Sulawesi Utara dan melalui media,” tutur Ardiles.

“Kami juga tentunya meminta kepada Bakal Pasangan Calon yang sudah mengikuti proses tahapan dari awal, agar dapat menerima hasil yang akan ditetapkan oleh KPU nantinya,” ujar Ardiles kembali.

Diketahui, ada tiga Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang terdaftar di KPU Sulawesi Utara untuk bertarung pada Pilkada Sulut 2020 ini. Ketiganya adalah Oilly Dondokambey-Steven Kandouw, calon petahana, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar dan Vonnie Anneke Panambunan-Henry Runtuwene.(*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*
Sumber: *kumparan.com*



KPU Lakukan Penelitian Dokumen Calon Kada

Masih Diberi Waktu Lakukan Perbaikan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah menerima 3 bakal pasangan calon kepala daerah (kada) untuk Pilkada Sulut 9 Desember mendatang. Ketiga paslon tersebut dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran pencalonan dan calon oleh KPU. Setelah memenuhi syarat pendaftaran, KPU akan melanjutkan tahap berikut.

“Ada 3 bakal calon yang mendaftar. Nah, selanjutnya kita lakukan penelitian terhadap seluruh dokumen bakal calon yang dimasukkan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Sesuai tahapan, lanjutnya, ini akan berlangsung sampai dengan 12 September.

“Kemudian hasil penelitian akan disampaikan ke bakal calon, dan kemudian dilakukan perbaikan,” terangnya.

Ditambahkan Mewoh, pasca pendaftaran ditutup, pihaknya langsung membuka tanggapan masyarakat.

“Sudah dibuka seluas-luasnya. Sudah diumumkan juga lewat webside KPU siapa saja yang menjadi bakal calon. Dan selanjutnya silahkan ditanggapi oleh masyarakat luas terkait persyaratan calon yang dimasukkan pada KPU,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Calon dan Pencalonan Ketat 3 Cagub Apresiasi Kinerja KPU Sulut

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah sukses melewati tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Hal ini mendapat apresiasi dari para calon. Sebab, dalam teknisnya mulai dari memperhatikan protap covid, sampai pada pemeriksaan berkas administrasi, KPU melakukannya dengan baik.

Seperti diakui calon gubernur Olly Dondokambey (OD) usai daftar. “Semua

(berkas) dicek satu persatu. Itulah komitmen KPU,” kata OD. Menurutnya, memang KPU harus teliti dalam melakukan seleksi kepala daerah.

“Karena mereka seleksi pemimpin. Kalau salah seleksi, berarti yang salah KPU. Makanya mereka sangat teliti sekali saat memeriksa. Bagus KPU. Harus beri apresiasi,” ucapnya.

Sama halnya dengan cagub Christiany Eugenia Paruntu (CEP). “Kami sudah masukkan dokumen, berkas administrasi persyaratan. Diterima dengan baik oleh KPU,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengaku bahwa pihaknya melakukan sesuai aturan yang berlaku. “Ini berproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kami lakukan penelitian dokumen syarat calon dan pencalonan dengan teliti,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

OD-CEP-VAP

Belum Memenuhi Syarat di KPU

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) mengumumkan hasil verifikasi persyaratan calon untuk Pilkada Sulut, Minggu (13/9).

Hasil tersebut disampaikan lewat rapat pleno terbuka yang dihadiri partai pengusung dan bakal calon. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan bahwa pihaknya telah memberitahukan hasil penelitian verifikasi syarat.

“Terhadap hasil verifikasi itu, ketiga bakal pasangan calon yang mendaftar baik pertama, kedua dan ketiga, kita masih memberikan status belum memenuhi syarat,” kata Ardiles.

Sebab, lanjutnya, masih ada dokumen-dokumen yang harus diperbaiki. “Harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur



oleh perundang-undangan,” ucapnya.

Pihaknya, kata Ardiles, memberikan waktu kepada ketiga bakal pasangan calon untuk lakukan perbaikan.

“Kami akan membuka perbaikan syarat calon mulai besok (hari ini). 14-15 September hingga Pukul 16.00 Wita. Dan pada 16 September, sampai pukul 24.00 Wita,” paparnya.

Dirinya berharap bakal pasangan calon bisa melakukan perbaikan segera mungkin terhadap seluruh dokumen-dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

“Supaya waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

VAP-HR Lengkapi Berkas ke KPU Sulut

MANADO—Setelah KPU Provinsi Sulut dalam rapat pleno sebelumnya menetapkan hasil verifikasi persyaratan administrasi dari tiga bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur OD-SK, CEP-SSL dan VAP-HR yang telah mendaftar, hasilnya dinyatakan belum memenuhi syarat.

Rabu (16/9/2020) Vonny A Panambunan (VAP) calon gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem, mendatangi Kantor KPU Sulut bersama calon Wakil Gubernur Hendry Runtuwene (HR) untuk melengkapi berkas terkait dengan pencalonan.

Kepada wartawan, VAP membenarkan kedatangannya untuk melengkapi berkas yang masih kurang. “Hari ini bersama dengan Pak Hendry, kami datang untuk melengkapi berkas dan sudah rampung dan lengkap,”ungkap VAP didampingi Sekretaris DPD Nasdem Sulut Victor Mailangkay. Sambil mengakui keduanya tinggal menunggu tahapan selanjutnya yaitu penetapan calon pada 23 September 2020.(*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Calon Kepala Daerah Masuk Tahapan Pemeriksaan

MANADO - Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember, memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan setiap bakal calon Gubernur, Walikota dan Bupati.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Salman Saelang kepada awak media menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan kabupaten/kota memasuki pemeriksaan kesehatan.

“Setelah dilaksanakan tahapan pendaftaran, KPU selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sulut dan 7 kabupaten/kota sekarang memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan, dimana tahapan ini akan bersama dengan Rumah sakit yang telah dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi sehingga rumah sakit terpilih untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan telah diputuskan KPU serta berkoordinasi dengan pihak terkait,” ucap Salman di Lobby RSUP Prof Kandou Manado, Senin (7/9).

Lebih lanjut, menurut Salman hari ini dilaksanakan sosialisasi yang kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap bakal calon.

Sesuai informasi, proses tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah akan dilaksanakan di RSUP Prof Kandou Manado dari tanggal 7-11 September 2020.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

5 Jam, VAP - HR Jalani Test di RSUP Kandou

MANADO—Bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dan Cawagub Sulawesi Utara (Sulut) Hendry Runtuwene (HR) mengikuti test kesehatan sebagai tahapan KPU Sulut sebagai bakal calon Gubernur, pada Senin (7/9) di RSUP Prof Kandou Manado.



Terpantau hampir 5 jam mengikuti tes bersama seluruh bakal calon kepala daerah lainnya, bapason VAP-HR selesai di tes pada pukul 17.45 sore.

VAP bersama HR sapaan akrabnya menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan hari ini meliputi psikotes, wawancara dan tes urine. “Puji Tuhan seluruh test berdasarkan tahapan KPU Sulut, VAP-HR aman dan sehat-sehat,” ucap Srikandi Partai Nasdem itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa semua ini berkat anugerah Tuhan dan doa dari seluruh warga Sulawesi Utara.

“Ini semua karena anugerah Tuhan, sebagai manusia patut kita syukuri bersama dan terima kasih juga atas doa dari masyarakat, meski proses pendaftaran tadi malam sampai subuh namun itu karena berkat Tuhan sampai hari ini kita semua sehat,” jelas VAP sembari mengatakan slogannya Diberkati untuk Memberkati.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Tetapkan 3 Paslon Pilgub, Hari Ini Undi Nomor Urut

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan maju di pemilihan gubernur. Ketiganya dinyatakan memenuhi syarat dan siap bertarung pada 9 Desember 2020.

Ketiga pasangan yang ditetapkan KPU adalah Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven), Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR).

“Setelah melakukan penelitian atas perbaikan berkas tiga pasangan bakal calon semuanya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur” ujar Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh saat

pleno penetapan yang digelar di halaman kantor KPU Sulut, Rabu (23/9) kemarin.

Pleno penetapan dihadiri lengkap lima komisioner KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Yessy Momongan, Salman Saelangi, Meidy Tunangan dan Lanny Ointu dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tanpa dihadiri massa pendukung dan pasangan calon.

“Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen ketiga paslon dinyatakan telah memenuhi syarat dan sudah ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Sulut,” tukasnya. Tahapan selanjutnya, KPU akan menetapkan nomor urut pasangan calon, Kamis (24/09) siang di kantor KPU Sulut.

Komisioner KPU divisi sosialisasi, Salman Saelangi mengatakan, pada acara pencabutan nomor urut akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Pihaknya mengimbau bagi paslon untuk tidak membawa masa dan melakukan konvoi saat pencabutan nomor urut. Termasuk membatasi kehadiran orang yang akan mengikuti proses pengundian nomor urut itu sendiri.

“Sesuai petunjuk terbaru KPU RI pola penerapan protokol kesehatan ditingkatkan. Undang yang hadir kita batasi. Ini dilakukan untuk memperhitungkan kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan. Termasuk peserta yang hadir dari unsur paslon dibatasi. Yang diundang 1 orang LO atau penghubung, 1 orang tim kampanye, 1 orang utusan dari masing-masing partai pengusung dan pendukung dan pasangan calon. Di area acara juga dibatasi orang hadir, termasuk media tidak ada yang meliput secara langsung,” kata Salman.

Menurut dia, masyarakat atau media tidak perlu datang menyaksikan langsung pengundian nomor urut karena KPU menyediakan fasilitas live streaming. “Jadi semua prosesnya bisa disaksikan dari rumah lewat aplikasi zoom, Youtube dan Facebook. Kami siarkan langsung,” tandasnya.



Sementara itu, dengan ditetapkan pasangan calon dan nomor urut maka tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur langsung mendapatkan hal-hak diantaranya pengamanan dari kepolisian.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Besok KPU Sulut Undi Nomor Urut, Hanya Ini Undangan yang Boleh Masuk

MANADO — KPU Sulawesi Utara (Sulut) kembali mengingatkan kepada pasangan calon (paslon) dan partai pengusul agar tidak melakukan pengumpulan massa di rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Kamis besok (24/9/2020).

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi mengatakan penetapan nomor urut kepada empat paslon lebih diperketat sesuai petunjuk terbaru dari KPU-RI.

“Awalnya sesuai PKPU Nomor 10 tahun 2020, namun terkait pengamanan lebih dipertegas,” ujar Salman Saelangi kepada BeritaManado, Rabu (23/9/2020).

Selain pasangan calon, lanjut Salman, undangan yang akan disilakan masuk adalah Liaison Officer (LO) dan satu orang dari masing-masing parpol pengusung.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menegaskan pihaknya telah berkoordinasi bersama kepolisian dan Bawaslu agar semua tahapan sesuai rencana.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu datang menyaksikan langsung pengundian nomor urut karena KPU menyediakan fasilitas live streaming. “Jadi semua prosesnya bisa disaksikan dari rumah lewat aplikasi zoom, youtube dan facebook. Kami siarkan langsung,” tandasnya.

Diketahui, tadi siang KPU telah menetapkan tiga paslon peserta Pilgub Sulut.

Mereka adalah Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven), Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL)

dan Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR).

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Di Rumah Aja, Live Streaming Pengundian Nomor Urut Pilgub Pukul 13.00 WITA

MANADO — Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) akan digelar siang ini, Kamis (24/9/2020).

Sesuai jadwal yang ditulis KPU Sulut di laman facebooknya, pleno dimulai pukul 13.00 WITA.

Sekali lagi, masyarakat diimbau menyaksikan acara ini dari rumah karena KPU memfasilitasi siaran langsung lewat aplikasi zoom, youtube dan facebook milik KPU Sulut.

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi menuturkan rapat akan digelar di halaman Kantor KPU dengan pengamanan ketat aparat.

Kata Salman Saelangi, undangan yang disilahkan masuk adalah pasangan calon, liaison officer (LO), dua orang perwakilan Bawaslu dan lima komisioner KPU.

Ia menjelaskan, sesuai PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati dan atau Wali kota dan Wakil Wali kota serentak dalam kondisi bencana non alam COVID-19, melarang keras melakukan pengumpulan massa.

“Sebagaimana dalam Pasal 88C, melarang parpol atau gabungan parpol, paslon dan tim kampanye atau pihak lain menggelar rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, konser musik, agenda olahraga, bahkan HUT parpol,” tegas Salman.



Diketahui, peserta Pilgub yang akan melakukan pengundian nomor urut siang ini adalah Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven), Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) dan Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR).

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Pilkada Sulut: Olly Dondokambey Nomor Urut 3, Tetty Paruntu 1, VAP 2

MANADO--Calon Petahana Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey yang berpasangan dengan Steven Kandouw mendapatkan nomor urut tiga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut.

Sementara, Christiany Eugenia Paruntu atau akrab disapa Tetty Paruntu yang berpasangan dengan Sehan Salim Landjar mendapatkan nomor urut satu. Pasangan calon lainnya, Vonnie Anneke Panambunan-Henri Runtuwene mendapat nomor urut dua.

Kamis (24/9) hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menggelar pencabutan nomor urut pada Pilkada Sulut. Disiarkan secara langsung via live streaming ini, pengambilan nomor urut dilakukan langsung oleh pasangan calon dengan tetap menerapkan protokol Covid-19 yakni jaga jarak.

Bahkan saat membuka nomor urut yang mereka ambil dari wadah pengundian, baru kali ini pasangan calon harus tetap menjaga jarak, karena KPU Sulut sudah menandai tempat berdiri dari masing-masing pasangan calon.

Tetty Paruntu dalam kesempatan tersebut mengatakan jika angka satu adalah angka kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Sementara, Sehan mengatakan jika yang akan terpilih hanya satu saja.

“Angka satu adalah angka yang diberikan oleh Tuhan untuk pasangan calon Tetty Paruntu dan Sehan Landjar,” tutur Tetty.

Vonnie Anneke Panambunan sendiri mengatakan jika dirinya subuh dini hari tadi, dirinya sempat berdoa kepada Tuhan agar memberikan angka dua, karena selama ini angka dua memiliki sejarah yang baik dengannya.

“Saya tadi pagi jam dua meminta kepada Tuhan, jika memang mau dimenangkan tolong berikan nomor urut dua. Dan siang ini saya mendapatkan nomor urut dua. Puji Tuhan ini adalah tanda kemenangan,” kata Vonnie.

Sementara itu, Olly Dondokambey menyentil sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Selain itu, menurutnya jika dikaitkan dengan kepercayaan, Olly mengaitkan dengan ajaran Tritunggal dalam Kristen. “Dan untuk PDI Perjuangan angka tiga ini adalah Metal, Menang telak,” kata Olly.

Sementara, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan jika nomor urut adalah final dan mengikat sehingga tidak bisa digugat dimanapun. “Silakan digunakan untuk seluruh tahapan hingga pada perhitungan suara di TPS,” kata Mewoh kembali.(*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*

Sumber: *kumparan.com*

Pilkada Sulut: Olly Dondokambey Nomor Urut 3, Tetty Paruntu 1, VAP 2

MANADO—Calon Petahana Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey yang berpasangan dengan Steven Kandouw mendapatkan nomor urut tiga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut.

Sementara, Christiany Eugenia Paruntu atau akrab disapa Tetty Paruntu yang berpasangan dengan Sehan Salim Landjar mendapatkan nomor urut satu. Pasangan calon lainnya, Vonnie Anneke Panambunan-Henri Runtuwene mendapat nomor urut dua.

Kamis (24/9) hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menggelar pencabutan nomor urut pada Pilkada Sulut.



Disiarkan secara langsung via live streaming ini, pengambilan nomor urut dilakukan langsung oleh pasangan calon dengan tetap menerapkan protokol COVID-19 yakni jaga jarak.

Bahkan saat membuka nomor urut yang mereka ambil dari wadah pengundian, baru kali ini pasangan calon harus tetap menjaga jarak, karena KPU Sulut sudah menandai tempat berdiri dari masing-masing pasangan calon.

Tetty Paruntu dalam kesempatan tersebut mengatakan jika angka satu adalah angka kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Sementara, Sehan mengatakan jika yang akan terpilih hanya satu saja. "Angka satu adalah angka yang diberikan oleh Tuhan untuk pasangan calon Tetty Paruntu dan Sehan Landjar," tutur Tetty.

Vonnie Anneke Panambunan sendiri mengatakan jika dirinya subuh dini hari tadi, dirinya sempat berdoa kepada Tuhan agar memberikan angka dua, karena selama ini angka dua memiliki sejarah yang baik dengannya. "Saya tadi pagi jam dua meminta kepada Tuhan, jika memang mau dimenangkan tolong berikan nomor urut dua. Dan siang ini saya mendapatkan nomor urut dua. Puji Tuhan ini adalah tanda kemenangan," kata Vonnie.

Sementara itu, Olly Dondokambey menyentil sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Selain itu, menurutnya jika dikaitkan dengan kepercayaan, Olly mengaitkan dengan ajaran Tritunggal dalam Kristen. "Dan untuk PDI Perjuangan angka tiga ini adalah Metal, Menang telak," kata Olly.

Sementara, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan jika nomor urut adalah final dan mengikat sehingga tidak bisa digugat dimanapun.

"Silakan digunakan untuk seluruh tahapan hingga pada perhitungan suara di TPS," kata Mewoh kembali.

Penulis: *Oktaviana Mundung*
Sumber: *kumparan.com*

Sah! Ini Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

MANADO—Bertempat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur, Kamis (24/09/2020).

Kegiatan ini dihadiri pasangan calon, Olly Dondokambey-Steven Kandouw, Vonnie Panambunan-Hendri Runtuwene, dan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Landjar.

Dalam rapat pleno ini penjagaan sangat ketat yang dilakukan petugas keamanan dan mengedepankan protokol kesehatan, sehingga jumlah yang masuk pun hanya terbatas.

Dalam rapat pleno ini pasangan yang datang lebih awal ialah pasangan CEP-Sehan, sehingga mereka diberikan kesempatan pertama untuk mengambil nomor, dan mendapat nomor urut 1.

Sedangkan pasangan Vonnie Anneke Panambunan dan Hendri Runtuwene mendapat nomor urut 2, dan pasangan Olly Dondokambey mendapatkan angka 3.(*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

OD, SB, MM, FDW, Mor Nomor 3

MANADO—Pasangan calon yang ikut pilkada di 7 kabupaten/kota hingga provinsi resmi menggenggam nomor urut. Salah satu tahapan penting ini dilakukan KPU Kamis (24/5) kemarin, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Semua paslon optimis saat diwawancarai. Nomor urut dikatakan para paslon merupakan lambang dari kemenangan. Mulai dari cagub dan cawagub. Pasangan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-Sehan) mendapat nomor urut 1. Diberi kesempatan kedua mencabut nomor urut, pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK) mendapat angka 3. Sementara pasangan



Vonnie Anneke Panambunan dan Hendry Runtuwene (VAP-HR) mendapat nomor urut 2.

Pasangan CEP yang mendapat nomor urut pertama mengaku, punya makna tersendiri. "Makna nomor 1 bagi pasangan calon CEP-Sehan ini adalah kemenangan bagi kita. Angka yang diberikan oleh Tuhan adalah pertanda kita berjuang untuk satu kemenangan," kata CEP. "Memang nomor cuma tiga, kami dapat berkat nomor 1. Yang terpilih nanti hanya satu pasang," sambung Sehan.

Begitu juga dengan paslon VAP-HR. "Tadi pagi (kemarin) jam 2 saya bangun. Saya berdoa pada Tuhan untuk beri tanda kemenangan pada saya dengan angka dua. Puji Tuhan saya dapat tanda dua, berarti dua adalah kemenangan bagi saya," kata VAP. "Saya berdoa pada Tuhan memberi angka yang terbaik. Tuhan memberi angka 2, artinya Tuhan beri kesempatan, Tuhan memberi victory (kemenangan)," sambung HR.

Bagaimana tanggapan OD-SK? "Puji syukur Olly-Steven dapat nomor 3. Dalam Pancasila sila Persatuan Indonesia," kata OD. Tak sampai di situ, angka 3 kata OD, juga menunjukkan rahmat Tuhan yakni Tri Tunggal (Allah Bapa, Anak, Roh Kudus). "Kita diajarkan Tri Tunggal. Di Muslim juga angka 3 ada artinya ya Pak Sehan. Cuci muka tiga kali. Jadi 3 artinya berkat," sambungnya. Kemudian angka 3 di PDI Perjuangan punya makna tersendiri. "3 bagi PDI Perjuangan yakni menang telak," katanya. Ditambahkan SK, dalam setiap pertandingan selalu dihitung 1, 2, dan 3.

"Jadi selalu diakhiri angka 3," tandasnya. Dari provinsi, beralih ke Kota Manado. Empat paslon telah mendapatkan nomor urut peserta hasil dari pengundian dan penetapan yang dilakukan KPU Kota Manado, Kamis (24/9).(*)

Penulis : *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Tiga Paslon Cagub Klaim Angka Kemenangan

MANADO—Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut sudah mendapatkan nomor urut untuk bertarung Pilkada 9 Desember lewat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut oleh KPU Provinsi, Kamis (24/9).

Ketiga pasangan yakni, Olly Dondokambey- Steven Kandouw (ODSK), Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) sama-sama puas dan saling klaim mendapat nomor urut keberuntungan dan kemenangan.

Mekanisme awal sebelum pengambilan nomor urut pasangan, calon terlebih dahulu dilakukan pengambilan pengundian nomor urut siapa yang dahulu untuk mengambil nomor urut berdasarkan kehadiran atau kedatangan registrasi, dipandu oleh komisioner KPU Provinsi Yessy Momongan Teknis dan disaksikan Ketua Bawaslu Provinsi Herman Malonda dan Awaludin Umbola.

Kemudian para calon wakil gubernur dipersilahkan mengambil angka untuk menentukan urutan pengambilan nomor urut. Sehan Landjar mendapat kesempatan pertama dan mendapat angka 1, kemudian Steven Kandouw pada kesempatan kedua dapat angka 2 dan Hendry Runtuwene mencabut angka 3. Berdasarkan aturan angka terkecil maka urutannya Sehan, Steven, Hendry.

Kemudian para calon gubernur mengambil undian nomor urut. Pasangan Sehan yakni CEP-Sehan mengambil nomor urut lebih dahulu. Disusul ODSK dan pasangan VAP-HR. Selanjutnya dalam hitungan mundur 3,2,1 tiga calon gubernur secara bersamaan membuka kertas yang diambil dengan tulisan angka.

Pasangan Christiany Eugenia Paruntu - Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) dapat angka 1, pasangan petahana Olly Dondokambey-



Steven Kandouw (ODSK) dapat angka 3 dan Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) dapat angka 2 Usai pengundian, para paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan makna angka masing-masing. Christiany Eugenia Paruntu yang memegang mic pertama kali mengatakan jika angka 1 adalah kemenangan bagi mereka. “Nomor satu bagi pasangan calon Christiany Eugenia Paruntu – Sehan S. Lanjar, bermakna kemenangan bagi kita. Angka yang diberikan Tuhan, kita berjuang untuk satu kemenangan,” kata Paruntu. “Pertama, puji syukur kepada Tuhan Maha Rahim. Nomor memang cuma tiga, tapi kami mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dapat nomor 1. Insya Allah, memang yang akan terpilih itu cuma satu pasang. Tidak mungkin dua atau tiga pasang,” sambung Sehan Landjar.

Sementara, nomor 2 bagi Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Corneles Mamengko Runtuwene juga dimaknai sebagai angka 2 sebagai angka kemenangan ‘victory’ dari Sang Khalik.

“Terima kasih sama Tuhan, tadi pagi jam dua subuh saya bangun, saya bilang, ‘Tuhan beri saya tanda. Kalau Tuhan beri kemenangan, berikan saya tanda angka dua’. Puji Tuhan, Haleluya, saya dapat tanda nomor dua. Dua adalah tanda kemenangan kami bersama, Saya dan Hendry Runtuwene,” ucap Panambunan.

“Saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan angka yang terbaik. Sebab semua angka milih Tuhan. Ketika Tuhan memberikan angka dua, maka Tuhan memberi kesempatan lewat angka dua ini kami mau berjuang untuk meraih victory, kemenangan,” tandas Hendry Runtuwene.

Sementara bagi pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw mensyukuri mendapat angka tiga. Ia mengaitkan angka tiga dengan filosofi pancasila sila ketiga persatuan Indonesia.

“Puji syukur, Olly dan Steven mendapat nomor urut tiga, yang artinya dalam Pancasila itu ‘Persatuan Indonesia’. Juga dalam rahmat Tuhan, kita diajarkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tri Tunggal. Di Budha juga ada Tri Dharma. Pak Sehan kalau di Islam juga ada ya? Makanya kalau orang cuci muka itu tiga kali. Jadi angka tiga berkat memang,” kata Olly.

Menurutnya, buat PDI Perjuangan angka 3 itu simbol kemenangan telak. “Ini memang metal, menang telak. Jadi bersyukur apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mengajak semua calon untuk bergandengan tangan membawa pesta demokrasi di Sulut lebih baik, lebih bermartabat. Sehingga masyarakat Sulut mendapatkan pemimpin yang benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tegas Olly.

“Singkat dari saya, setiap perlombaan selalu (hitungan dimulai) dari satu, dua dan diakhiri dengan tiga sebagai pemenang. Jadi angka tiga betul-betul adalah angka keberuntungan buat kami,” kunci Steven Kandouw. Usai pencabutan nomor urut, tiga paslon menandatangani berita acara pengambilan nomor urut.

“Selamat Bapak dan Ibu pasangan calon, atas telah didapatkannya nomor urut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Perlu saya sampaikan, sesuai pasal 72 Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, sudah diubah terakhir Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020, nomor urut ini final dan mengikat,” kata Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh. Tahapan selanjutnya mulai 26 September tiga paslon dipersilahkan berkampanye.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda berharap pada tahapan kampanye tiga pasangan calon gubernur dan wakil melakukan kampanye yang edukasi ke masyarakat.

“Harapannya seperti itu kampanye yang mendidik dan edukasi. Kiranya tahapan kampanye bisa berjalan damai dan ramah



lingkungan, ujarnya. Ia juga berharap partai politik sama-sama ikut mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“ KPU sudah melakukan pleno DPS dan sementara lagi menuju DPT (daftar pemilih tetap). Sebagaimana tugas Bawaslu maka saat ini kita sedang lakukan pencerahan terhadap DPS tersebut. Kami berharap parpol juga ikut mencermati agar supaya saat penetapan DPT tidak ada lagi persoalan terkait data pemilih karena ini hal penting dalam tahapan Pilkada. Kami juga berharap KPU tetap konsisten terhadap regulasi. Dan kami Bawaslu akan tetap bertugas sesuai tupoksi,” tegas Malonda.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentar*

Pencabutan Nomor Urut, OD-SK M3TAL

MANADO—Tiga pasangan calon gubernur, Kamis (24/09/2020) melakukan pencabutan nomor urut yang dilaksanakan oleh KPU Sulut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2020.

Dalam live KPU Sulut itu, terlihat pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw mendapatkan nomor urut 3, sedangkan paslon Cristian Tetty Paruntu - Sehan Lanjar nomor urut 1, paslon Vonny Aneke Panambunan mendapatkan nomor urut 2.

Pada kesempatan tersebut KPU memberikan kesempatan kepada masing - masing calon untuk memaparkan makna nomor urut mereka.

Dimulai,dari CEP - SSL dengan nomor urut 1 yaitu nomor satu menandakan bahwa yang akan menang hanya satu pasang.

Sementara menurut paslon VAP bahwa nomor urut 2, adalah kemenangan bagi mereka. Paslon ODSK memaknai bahwa angka 3 bagi mereka jika di Pancasila artinya persatuan indonesia di agama jua tritunggal dan tridarma, angka 3 berkat bagi kami, 3 Metal artinya menang telak.

Penulis: *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*

Bawaslu Sulut Ingatkan KPU Sulut Untuk Perhatikan Peraturan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

SULUT--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020 , di Swis-bell Hotel Manado, Senin (31/08/20).

Dalam rapat bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menyampaikan beberapa hal terkait dengan dasar-dasar hukum pendaftaran bakal Paslon Pilkada Sulut Tahun 2020. Malonda menegaskan agar KPU Harus memperhatikan B1 KWK dalam proses pendaftaran bakal paslon, serta prosedur teknis dan protokol Covid-19 berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2020.

”KPU memperhatikan tanda terima kelengkapan berkas pendaftaran bakal pasangan calon agar tdk terjadi miss komunikasi antara KPU dan peserta, selain itu Ketua Bawaslu menegaskan utk mendukung tugas-tugas pengawasan Bawaslu wajib menerima salinan BA hasil verifikasi berkas bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU harus bisa menjaga informasi yang bersifat privat terhadap tes kesehatan bakal paslon dari Covid-19,” tegas Malonda.

Selanjutnya, Malonda menyampaikan beberapa hal terkait dengann kerawanan indikasi pelanggaran dalam proses pendaftaran Bakal Paslon dan tindaklanjut Bawaslu.

“Apabila nantinya terjadi pelanggaran dalam tahapan yang akan dituangkan dalam form pengawasan Bawaslu untuk di proses lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku. Terkait penanganan sengketa Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa permohonan dapat diterima oleh Bawaslu apabila peserta dirugikan secara langsung,” jelas Malonda



Ketua Bawaslu Sulut ini juga menyampaikan agar mengantisipasi pendaftaran di hari akhir batas pendaftaran pencalonan untuk dapat diatur dengan baik.

“Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU menjaga integritas dan netralitas, serta menjaga konsistensi agar sesuai dengan regulasi dan protokol kesehatan Covid-19,” tutup Malonda.(ika)

Penulis : *Friska Tewu*

Diterbitkan : *portalsulut.com (31/8/2020)*

Pleno KPU Sulut, Tiga Bapaslon Belum Memenuhi Syarat

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara pemilihan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) 2020, telah memasuki tahapan verifikasi.

Kali ini KPU melakukan tahapan, yakni rapat pleno verifikasi persyaratan pendaftaran dan syarat calon di kantor KPU Sulut yang dilakukan secara live lewat youtube, Minggu (13/9/2020).

Dari hasil verifikasi KPU Sulut dalam rapat pleno, ketiga bakal pasangan calon yang mengikuti tahapan pendaftaran masih didapati sejumlah kekurangan, alias belum memenuhi persyaratan.

Yakni pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven) yang diusung oleh partai PDIP, Gerindra, PKB dan PSI dan di dukung oleh PPP dan Perindo.

Selanjutnya, Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) di usung oleh partai Golkar dan di dukung oleh Demokrat dan PAN.

Berikut, Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) yang diusung oleh partai NasDem.

“Hari ini kita memberitahukan hasil penelitian verifikasi syarat calon, yang sudah dihadiri oleh partai pengusul. Ada juga bakal calonnya

yang hadir. Terhadap hasil verifikasi itu, ketiga bapaslon yang mendaftar pertama, kedua dan ketiga kita masih memberikan status belum memenuhi syarat,” ungkap Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Senin (14/9/2020).

Lanjut Mewoh, KPU Sulut akan memberikan waktu bagi ketiga bapaslon untuk melengkapi dan memperbaiki semua dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam PKPU.

“Selanjutnya kami akan membuka perbaikan syarat calon mulai besok. Yakni pada tanggal 14-15 September, hingga Pukul 16.00 Wita dan pada 16 September sampai pukul 24.00 Wita. Diharapkan bapaslon bisa melakukan perbaikan segera seluruh dokumen-dokumen yang kita nyatakan belum memenuhi syarat, sehingga waktu yang tersedia bisa di dimanfaatkan dengan baik,” jelas Mewoh.

Turur hadir dalam rapat pleno Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan dan staff, hadir juga anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi, sekretaris, kabag dan staf. (*)

Penulis : *Jellina Najoran*

Diterbitkan : *sulutreview.com*

Olly-Steven Bersepeda Mendaftar ke KPU Sulut

MANADO – Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur, Steven Kandouw (Olly-Steven) mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Jumat (4/9/2020).

Olly-Steven tiba pukul 10.00 Wita di Kantor KPU Sulut dengan bersepeda. Hal itu dilakukan sejak pukul 08.00 Wita, start dari kediaman di Kolongan Minahasa Utara (Minut).

Sebagai pendaftar pertama, Olly-Steven yang mengenakan kostum putih-putih dan bermasker langsung memasuki halaman dengan mengikuti protokol kesehatan



Covid-19 yang telah ditetapkan. Mulai dari cuci tangan dengan air yang mengalir hingga pengukuran suhu tubuh.

Diketahui, Olly-Steven hadir tanpa iring-iringan besar. Karena memang telah ditetapkan oleh KPU yang melarang adanya konvoi, mengingat pelaksanaan Pilkada digelar di tengah pandemi.

Dalam pantauan, untuk kelangsungan dan keamanan pendaftaran, Polda Sulut menurunkan pasukan untuk melakukan penjagaan ketat. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Diterbitkan : *sulutreview.com*

Tahapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Resmi di Tutup

MANADO -- Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ardiles Mewoh didampingi Lanie Ointu secara resmi menutup tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tepat pukul 00:00 Wita. Turut disaksikan Komisioner Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangelu, penandatanganan berita acara pendaftaran ditandai dengan penandatanganan buku pendaftaran calon. Sampai batas waktu, bakal calon yang mendaftar yakni Pasangan Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw (PDIP) bersama partai pengusung Perindo, PSI, PKB, PPP dan Gerindra. Pasangan Calon Christinia Euqinia Paruntu (CEP) dan Sehan Salim Lanjar yang diusung oleh Partai Golkar, PAN dan Demokrat dan Pasangan Calon Vonny Aneke Panambunan (VAP) dan Hendry Runtuwene yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan PKS. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Diterbitkan: *sulutnews.com*

CEP - Sehan Resmi Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

MANADO -- Pasangan calon Gubernur Christinia Euqinia Paruntu (CEP) dan Calon Wakil Gubernur Sehan Landjar mendaftar di hari terakhir di KPU Sulut.

Pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar, Demokrat dan Partai Amanat Nasional tersebut datang di Kantor KPU tepat jam 15:30 wita dengan didampingi pengurus partai Pengusung. Mengenakan pakaian warna putih, dipadu bawahan hitam CEP-Sehan terlihat didampingi pengurus parpol pengusung juga sejumlah pengurus partai pengusung. CEP-Sehan merupakan pendaftar kedua bakal calon yang mendaftarkan diri di KPU. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Diterbitkan : *sulutnews.com*

Tahapan Pendaftaran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Resmi Dibuka

MANADO -- Tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara resmi dibuka. Kegiatan yang pelaksanaannya dipusatkan di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

“Hari ini KPU Sulut telah membuka tahapan pendaftaran dan ini juga memberikan kesempatan bagi setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendaftarkan diri sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan,” kata Mewoh.

Juga Mewoh menyampaikan dalam tahapan pendaftaran Panitia berharap rombongan pasangan calon wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.” Prinsipnya pelayanan namun harus proposional dan sesuai aturan dan dilakukan secara merata,” kata Mewoh. Pembukaan acara tahapan pendaftaran digelar tepat pukul 8:19 pagi dan dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Sulut. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*
Diterbitkan : *sulutnews.com*





Epilog

TAHAPAN pendaftaran calon diawali dengan sosialisasi terkait pencalonan perseorangan. Dalam pilkada 2020 syarat minimal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan berbeda-beda tiap daerah. Angka syarat minimal dukungan dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing wilayah. Khusus pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250.000, syarat minimal dukungan sebesar 10 persen. Bagi daerah dengan jumlah DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 500.000 – 1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta. Meski dibuka tahapan penerimaan dokumen dukungan calon perseorangan gubernur dan wagub dibuka cukup panjang yakni 15-20 Februari, dengan jumlah syarat dukungan minimal 190.415 dukungan KTP, pendaftarannya nihil. Hingga batas waktu yang ditentukan, 20 Februari pukul 24.00, tak ada satupun yang datang menyerahkan dokumen syarat dukungan.

Terkait pendaftaran calon, KPU membuka ruang bagi siapa saja. Baik lewat partai politik maupun perseorangan. Di tahapan ini yang cukup menyita perhatian adalah terkait bisa tidaknya eks narapidana mencalonkan diri. KPU pun membuka pendaftaran untuk calon jalur partai politik pada 4-6 September. Dengan syarat pencalonan minimal 20 persen kursi.

Tiga calon yang datang bergantian yakni Olly Dondokambey-Steven Kandouw, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar, dan jurukunci Vonnie Anneke Panambunan-Hendrik Runtuwene. Menghadapi tahapan ini, KPU memilih lokasi kantor sendiri sebagai tempat pendaftaran. Dengan dijaga ketat pihak kepolisian. Karena dilakukan pembatasan ketat bagi para peserta pendaftar. Tak ada konvoi untuk menghindari kerumunan. Namun ada pendukung calon yang tetap kekeh ikut mengawal pendaftaran.

Tahapan pendaftaran dan penetapan calon berjalan baik. Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 membuat semua kegiatan dihadiri oleh sangat sedikit peserta. Sebagai penyelenggara, KPU Provinsi Sulawesi Utara yang terus bertindak hati-hati mampu melewati tahapan ini.

KPU kemudian memvalidasi berkas para kandidat dan melanjutkan tahapan dengan penetapan calon yang tetap menggunakan prokes Covid-19. Begitu juga dengan pengundian nomor urut.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon, nomor 1 diperoleh Christiany Eugenia Paruntu -Sehan Salim Landjar (CEP-SSL), nomor urut 2 jatuh kepada paslon Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR), dan pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven) menggunakan nomor 3.

Penulis : *Levrando Kambey*
Sumber : *Harian (Radar) Manado*



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab V Kampanye





Kampanye

KPU Sulut Fasilitasi Evaluasi Kampanye Pemilu Serentak

MANADO—Evaluasi terhadap Kampanye peserta pemilu dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Senin (26/8/2019).

Banyak usulan yang disampaikan dalam evaluasi tersebut yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, media dan Parpol. Diantaranya peserta pemilu meminta untuk ke depan khusus Alat Peraga Kampanye (APK) bisa difasilitasi dari cetak, pemasangan hingga perawatan.

“Beberapa usulan dari peserta pemilu akan kami teruskan ke KPU-RI,” ungkap Salman Saelangi salah satu Komisioner KPU Sulut di GKIC Manado.

Diakui Salman, kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap peserta pemilu baik calon anggota DPD-RI, Parpol maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Difasilitasi sejak tahun 2018 adalah APK seperti baliho spanduk untuk peserta pemilu, iklan kampanye. Sedangkan KPU Provinsi hanya terbatas pada calon anggota DPD-RI, sedangkan untuk Parpol dan Calon Presiden dan Wakil Presiden ada di KPU RI,” ungkap Salman.

“Semua yang kami fasilitasi, maka agenda hari ini bagaimana mengevaluasi penyerapan masukan dari terutama peserta pemilu yang sebagai pengguna. Jika ada yang masih kurang dan apa-apa yang akan disempurnakan ke depan, itu yang coba serap dalam pertemuan ini,” tambahnya. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

KPU Sulut Terima Usulan, Sediakan Masker Warna Netral Saat Pilkada

MANADO—Pilkada secara serentak akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang meskipun masih dihadapi dengan pandemi Covid-19.

Namun, KPU Provinsi Sulut terus melakukan pembenahan demi suksesnya perhelatan demokrasi Pilkada nanti, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun terus ditampung dan akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian, KPU tetap melakukan usaha penyempurnaan dan terus menerima masukan dari tiap pihak demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang.

Dalam kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dilaksanakan sejak Senin (31/8/2020) di salah satu hotel berbintang di Manado, ada usulan yang diterima dari peserta saat pelaksanaan hari kedua Selasa (1/08/2020), yaitu menyediakan masker dengan warna yang netral saat pelaksanaan Pilkada nanti.

Menanggapi hal ini Komisioner Yessy Momongan angkat bicara. Menurutnya, ide ini akan ditampung dan direalisasikan. Pihaknya akan berupaya agar warna masker yang akan disediakan KPU tidak akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.



“Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dan bapak juga ibu belum pernah melaksanakan Pilkada di masa pandemi, belum pernah. Nah, sekarang kami belajar, bapak ibu juga belajar,” ungkapnya.

Yessy yang juga menangani Divisi Teknis Penyelenggara ini menambahkan, terkait usulan-usulan termasuk pengadaan APD yang bagus, ada aturan anggaran yang harus KPU siapkan.

“Kami akan menyiapkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang kami miliki.

Namun demikian terkait usulan tersebut akan menjadi catatan bagi KPU Sulut. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik dan kita sama-sama saling suport,” imbuhnya. (*)

Penulis: *Charencia Repie*
Sumber: *kawanuapost.com*

KPU Sulut Akui Kampanye Calon Kepala Daerah Masih Dibutuhkan dalam Pemilihan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengatakan jika pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih dibutuhkan dan perlu untuk dilaksanakan.

Dikatakan Komisioner Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Saelangi, kampanye dibutuhkan untuk menjabarkan visi dan misi calon ke masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan kampanye tetap akan menjadi salah satu tahapan pada Pilkada serentak 2020 ini.

“Kampanye calon sangat penting dilakukan, karena masyarakat akan melihat langsung penyampaian visi dan misi calon, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wali Kota, agar memperlihatkan keunggulan untuk dipilih masyarakat,” ujar Saelangi.

Menurut Saelangi, pihak KPU yang merupakan lembaga penyelenggara, akan

mengatur secara teknis terkait dengan pelaksanaan kampanye calon, mengingat saat ini, situasi dalam kondisi tidak normal karena berada di masa pandemi Covid-19.

“Tentunya pada pelaksanaan nanti akan ada aturan yang mengatur terkait kampanye seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2020. Nantinya juga akan ada turunan PKPU nomor 6 2020 terkait pelaksanaan kampanye yang mengikuti protokol Covid-19,” ujar Saelangi kembali.

Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan apakah akan ada kampanye yang dilakukan pada pemilihan di masa pandemi seperti saat ini. Menurut mereka, kampanye masih menjadi hal yang efektif untuk menyampaikan visi dan misi dari calon kepada para pemilih. (*)

Penulis: *Oktaviana Mundung*
Sumber: *kumparan.com*

Di Kampanye Masyarakat Dapat Menilai Calon Apa Layak Jadi Pemimpin Atau Tidak

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali minta masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 09 Desember Mendatang.

“Kita berharap target warga memilih 77.5 persen kalau bisa lebih dari itu, makanya perlu bantuan dan peran aktif dari Masyarakat guna mensukseskan pilkada ini,” Kata Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Saelangi, Selasa (01/09)

Disamping masyarakat, peran Pers serta stakeholder pemilu juga dibutuhkan guna keberhasilan pemilihan kepala daerah tersebut.

Sementara dalam kampanye pasangan calon, warga diminta menilai terkait visi misi calon.

“Di kampanye ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat pula, masyarakat mampu melihat/menilai visi misi bakal calon



apakah mereka layak, apakah mereka cocok jadi pemimpin atau tidak. Tahapan kampanye jadi wadah yang sangat terbuka luas untuk calon ini,” paparnya.

Dijelaskannya pula Komisi Pemilihan Umum bakal memfasilitasi jalannya kampanye pilkada serentak tahun ini. “Ada Fasilitas kampanye berupa Debat publik pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, percetakan alat peraga kampanye (APK) juga iklan di media massa baik media cetak, media online, maupun media elektronik,” jelas Salman.

Sementara terkait desain APK ini sendiri bakal menunjuk pada 4 unsur citra diri. “Kita akan pilih mana yang berbentuk foto serta mana yang APK. Kalau APK harus memenuhi 4 unsur citra diri yakni, ada foto, nama, visi misi, serta program. Kalaupun hanya ada 2 unsur citra diri itu kita kategorikan APK,” pungkasnya.(Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*
Sumber: *Sulutpos.com/01/09/2020*

Setiap Paslon Punya Hak, Kesempatan dan Perlakuan Adil Dalam Kampanye

Sulutpos.com,Manado—Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda tegaskan metode Kampanya Pasangan Calon (Paslon) yang jadwalkan KPU dan diawasi Bawaslu serta jajarannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terlebih selama pelaksanaan kampanye dan usai kampanye.

“Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu dan KPU memastikan kepada setiap paslon memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye, begitu juga dengan keadilan dan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran prosedur dan tahapan kampanye,” jelasnya.

“Ada berbagai macam bentuk kampanye bisa saja dilaksanakan, dengan melakukan pertemuan yang bisa kontak langsung maupun tidak. Metode kampanye rapat umum, yang berlaku kegiatannya sudah dibatasi. Provinsi 2 Kali dan 1 kali

kabupaten/kota juga ada pertemuan terbatas, dalam ruangan dan tatap muka dialog,” jelasnya.

Sementara bentuk kampanye dengan menghindari kontak langsung lanjut Malonda berupa pemasangan iklan di media masa baik media cetak, media online dan media elektronik serta penyebaran bahan kampanye.

“Kalau penyebaran kampanye dilarang di ruang publik, yaitu fasilitas pemerintah, sekolah juga tempat-tempat ibadah. Kalau ruang private ya tidak masalah,” tandasnya. (Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*
Sumber: *Sulutpos.com/02/09/2020*

KPU RI Gelar Rakor Evaluasi SIPOL dan Pelayanan Dana Kampanye

MANADO—Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan termasuk Sistem Informasi Parpol (SIPOL) dan Pelaporan Dana Kampanye dalam menghadapi Pilkada 2020. Untuk itu, KPU RI melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Sipol dan Pelayanan Dana Kampanye, yang digelar di Hotel Holiday Inn Resort Baruna, Denpasar, Bali pada 17-19 September 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Dalam sambutan Arief menyebutkan bahwa SIPOL membuat sistem Pemilu lebih kredibel, demikian juga pelaporan dana kampanye membuat sistem Pemilu lebih transparan sehingga publik dapat mengakses penggunaan dan hasil audit dana kampanye.

Rakor ini pun diikuti KPUD Provinsi Sulawesi Utara. Adapun KPU Sulut diwakili Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, Kasubag Hukum Novri Ranti dan operator Sidakam, Steifi Latuserimala.

Sekedar diketahui, peserta disambut langsung oleh Ketua KPU Bali, I Dewa



Agung Gede Lartawan.

Dan, sebagai pemateri yaitu Hasyim Asyari (Komisioner KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan), Ahsin Tohari (Kasubdit Partai Politik Bagian Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM), Titi Anggraeni (Perludem). Juga narasumber dari ICW, PPATK, IAI dan Bawaslu. (*)

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *ciintasulut.com/ September 18, 2019*

KPU Berani Batalkan Pasangan Calon Yang Tak Laporkan Dana Kampanye

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tegas akan membatalkan pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil bupati yang tidak melaporkan dana kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2017.

Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU Sulawesi Utara, Yessy Momongan pada kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Selasa (19/2020) siang.

Tegasnya, ada sanksi yang jelas jika dana kampanye tidak dilaporkan ke KPU. Kalau ditanya apakah KPU berani atau tidak, jelas kami berani membatalkan pasangan calon yang maju di Pilkada, meski pasangan calon tersebut sudah berkampanye.

Ia mencontohkan, pada Pilkada sebelumnya, ada pasangan calon di Pilkada Kota Bitung yang dibatalkan pencalonannya karena tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Jelas Momongan, setelah mendaftar sebagai pasangan calon pada 4-6 September, pasangan calon segera membuat rekening khusus, dan saldonya dilaporkan ke KPU selambat-lambatnya 25 September 2020 pukul 18.00 WITA. Termasuk dengan rincian dana sebelum

membuat rekening.

Selain itu, Yessy juga meminta pasangan calon untuk melaporkan pengeluaran dan sumbangan dana kampanye.

Wajib dibukukan dan dimasukkan ke KPU selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2020.

Adapun bentuk-bentuk sumbangan dana kampanye, di antaranya uang, barang dan jasa. Bentuk uang dan barang digunakan untuk kampanye online, tatap muka dan rapat umum.

Sedangkan untuk jasa jelasnya adalah pekerjaan ataupun pelayanan yang dilakukan pihak lain, yang manfaatnya dirasakan oleh pasangan calon. Dimana jasa tersebut bisa dinilai dengan uang.

Harus dilaporkannya dana kampanye pasangan calon, baik sumbangan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai, atau pribadi, sesuai PKPU juga diatur dan dibatasi. Parpol atau gabungan parpol dibatasi Rp 750 juta, pribadi Rp75 juta dan kelompok Rp750 juta, serta Badan Hukum Rp 750 juta. (DESI)

Penulis : *Deasy Holung*

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

KPU Sulut Matangkan Persiapan Kampanye Pilkada 2020

MANADO—Mekanisme pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tengah pandemi menjadi agenda yang diseriusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, juga dihadiri utusan partai-partai politik, pendukung bakal pasangan calon, Polda dan Kesbangpol Sulut. poin pentingnya adalah membahas berbagai teknis pelaksanaan kampanye pada Pilkada.

Ketua Bawaslu Sulut, Dr Herwyn Malonda pada kesempatan itu, menguraikan



mekanisme pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, harus memperhatikan jumlah peserta.

“Kapasitas jumlah peserta yang mengikuti pertemuan atau rapat tertutup, wajib memperhatikan protokol Covid-19,” katanya saat menghadiri rakor yang membahas ‘Persiapan Kampanye Pilkada Sulut’ di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Manado, Kamis (17/9/2020).

Metode pengawasan Bawaslu dalam kampanye, sebut Malonda diharuskan memperhatikan kapasitas ruangan, jumlah peserta kampanye dan penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK).

“Bawaslu juga meningkatkan pengawasan kampanye lewat iklan atau media sosial (medsos). Meningkatkan pengawasan terkait pidana dalam pemilihan,” ujarnya.

Bahkan yang tak kalah pentingnya, sebut Malonda adalah koordinasi dengan TNI dan Polri.

“Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran Covid-19 di setiap proses kampanye yang dilakukan pasangan calon (Paslon),” tukas Malonda.

Malonda juga mengingatkan agar Kepala Daerah yang menjabat dapat menerapkan protokol kesehatan secara masif.

Hal itu harus didukung juga oleh seluruh tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.

“Selain kualitas pengawasan protokol Covid-19, Bawaslu juga meningkatkan kualitas pengawasan tahapan kampanye berdasarkan kepastian hukum dan asas Pemilu yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : sulutreview.com

Tanpa Rapat Akbar, Kampanye Via ‘Dunia Maya

MANADO—Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi dan SDM Salman Saelangi mengatakan, pihaknya tengah merancang regulasi pelaksanaan kampanye tanpa rapat akbar. Kampanye calon kepala daerah nantinya memanfaatkan media sosial alias ‘dunia maya’.

“Sepertinya, memang tidak ada kampanye akbar. Sedang diatur kampanye memanfaatkan media sosial. Kampanye dengan metode medsos memang sudah diterapkan sejak Pilkada dan pemilu sebelumnya. Namun, di tengah masa pandemi saat ini akan lebih dimaksimalkan via online. “Memang sudah diatur di UU 10/2016 dan di masa pandemi seperti ini akan lebih diefektifkan via medsos,” kata Salman.

Tapi, lanjut Salman, pihaknya masih menunggu perubahan PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang kampanye. “Perubahan PKPU itu nantinya memuat teknis dan metode pelaksanaan kampanye dalam kondisi bencana non-alam, Covid 19 ,” ujar Salman. D

iketahui, berdasarkan peraturan KPU (PKPU) Nomor 5/2020 yang merevisi PKPU 15/2019 terikat tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali dan Wakil Wali Kota. Jadwal pendaftaran calon kepala daerah mulai tanggal 4-6 September 2020. Dan masa kampanye mulai 26 September sampai 5 Desember 2020. Berdasarkan PKPU tersebut, kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dilaksanakan dengan beberapa metode. Di antaranya, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka, pemasangan APK.

Terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, Kenly Poluan kembali mengingatkan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak tahun 2020 ini.



Poluan ingatkan supaya tidak terlibat politik praktis dan tetap netral dalam ajang Pilkada meski mempunyai hak pilih. “Mereka memang punya hak pilih, tetapi tidak boleh terang-terangan memihak kepada siapapun calonnya,” ujar koordinator divisi pengawasan dan sosialisasi ini. Dikatakan Kenly, kampanye pemilihan calon kepala daerah nantinya bakal dilakukan salah satunya metode via online atau media sosial (medsos). “Nah, salah satu tugas pokok Bawaslu adalah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas ASN di masa kampanye. Pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi kan di media sosial. Perilaku ASN mengunggah kegiatan kampanye calon kepala daerah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas lantaran ASN menyatakan dukungannya ke calon kandidat Pilkada,” terang Kenly.

Bahkan, menurut Kenly, memberi “like” atau “menyukai” unggahan kampanye calon kepala daerah juga bisa disebut sebagai pelanggaran netralitas. “ASN memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa online, saya kira ini yang terbanyak. Misalnya mengupload atau menampilkan di media sosialnya kegiatan kampanye pasangan calon atau memberikan “like” itu bagian dari bentuk dukungan,” tutur mantan staf ahli di Sekretariat DPR RI ini.

Lanjutnya, banyak ASN yang masih menganggap aktivitas tersebut bukan pelanggaran netralitas. Padahal, mengunggah atau “menyukai” konten kampanye calon kepala daerah secara substansi sudah menunjukkan keberpihakan. “Larangan tentang keberpihakan ASN secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang ASN. Oleh karenanya, kami mengingatkan supaya seluruh ASN lebih berhati-hati dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

Kami mengingatkan kepada jajaran

ASN agar betul-betul secara bijak dalam menggunakan fasilitas media sosial,” ujarnya.

Lanjut diungkapkan Kenly, berdasarkan data Bawaslu sejak tahapan Pilkada serentak 2020 di Sulut, sudah ada sekitar 81 laporan hasil pengawasan dugaan pelanggaran Pilkada. Dari data itu mayoritas dilakukan ASN. “LHP itu ada yang sudah sampai pada penindakan termasuk rekomendasi ke KASN dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang pasti Bawaslu tidak kompromi terkait pelanggaran netralitas ASN ini,” tegasnya. (*)

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

KPU Sulut Serahkan APK dan Bahan Kampanye ke Paslon

MANADO—Untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut melaksanakan rapat koordinasi dengan tiga paslon, yang dihadiri langsung oleh Liaison Officer, Kamis (16/10/2020).

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengingatkan bagaimana pentingnya pasangan calon yang telah resmi sebagai peserta Pilkada untuk mengikuti semua ketentuan dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Sebagai penyelenggara kami mengingatkan agar selalu taat aturan, baik dalam pelaksanaan kampanye maupun pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan,” ungkap Mewoh.

Pada kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Kepala Daerah saat menggelar kampanye terbatas khususnya terkait protokol kesehatan.

“Persoalan kepatuhan paslon dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi temuan Bawaslu. Jika tidak diindahkan



Bawaslu akan mengambil tindakan sesuai kewenangan dengan membubarkan pertemuan dan akan menjatuhkan sanksi selama 3 kali tidak memberikan ijin melaksanakan kampanye,” tegas Umbola.

Lanjut Umbola agar tidak dijatuhkan sanksi kami berharap semua paslon dapat melaksanakan komitmen sesuai fakta integritas.

Dalam Rakor ini, KPU Sulut menyerahkan APK dan bahan kampanye kepada masing-masing pasangan calon yang diterima oleh LO masing-masing. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Monitoring Protap Pencegahan Covid Saat Kampanye

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sampai pada jajaran tingkat bawah melakukan monitoring. Menurut Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, monitoring tersebut dilakukan jajaran KPU bukan untuk mengecek pelanggaran.

“Namun untuk cek apakah pasangan calon (paslon) ini sudah melakukan protap pencegahan covid di dalam agenda kampanye,” ujarnya.

Dalam monitoring tersebut juga, pihaknya kata Salman, mengukur apakah regulasi yang dikeluarkan bisa dilakukan paslon. “Nah, di situ kita lihat apakah paslon bisa lakukan atau masih kesulitan untuk menerapkan,” ucapnya.

Monitoring yang dilakukan itu, lanjutnya, berdasarkan surat instruksi dari KPU RI. “Memang ini juga instruksi KPU RI untuk monitoring. Hasilnya memang ada beberapa belum sepenuhnya melakukan itu,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Jangan Pasang APK di Tempat Terlarang

MANADO—Kamis (15/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menyerahkan

alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye ke pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulut. Itu diterima oleh petugas penghubung masing-masing paslon di rapat koordinasi di Kompleks Kantor KPU Sulut. Dari pantauan, rakor tersebut hanya diikuti oleh perwakilan paslon 1-2 orang. Sebab mengikuti protap pencegahan Covid 19.

Dikatakan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, selain metode kampanye, ada juga kampanye yang difasilitasi KPU yakni alat peraga dan bahan.

“Itu kami serahkan ke paslon. KPU sudah siapkan dan diserahkan secara simbolis,” ujar Mewoh. APK dan bahan yang diberikan KPU seperti spanduk, baliho dan lainnya.

Pihaknya, lanjut Ardiles, berharap setiap paslon lewat tim penghubung agar memperhatikan lagi terkait keputusan titik-titik pemasangan APK.

“Tentu dilarang pasang di tempat yang di luar ketentuan. Jadi, setiap kabupaten/kota sudah ada titik yang ditentukan. Nah, setelah terima APK dan bahan kampanye ini, supaya tak ada persoalan baru, jangan pasang di tempat terlarang,” pungkasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KAMPANYE PILGUB:

Nantikan Kejutan CEP-SSL!

MANADO—Misi berjaya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) menjadi mutlak bagi tim kampanye pasangan Cristiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar (CEP-SSL).

Kerja keras pun telah dilakukan sejak tahapan kampanye dimulai. Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga informasi perihal visi-misi dari paslon CEP-SSL. “Tim militan sampai ke akar rumput. Sekarang terus bergerak dan memberikan pendidikan politik kepada publik, sekaligus memaparkan program CEP-SSL jika mendapat amanah rakyat,” kata Sekretaris Tim Pemenangan CEP-SSL, Feryando



'Yoyo' Lamaluta kepada BeritaManado.com, Rabu (21/10/2020).

Feryando Lamaluta enggan berbicara banyak soal strategi pemenangan CEP-SSL. Karena selain merupakan konsumsi internal, lanjut Yoyo, tim pemenangan tidak ingin terlalu mengumbar dukungan dari berbagai relawan dan simpatisan

Menurut Yoyo, CEP-SSL ingin meraih kemenangan dengan elegan dan murni dari pilihan rakyat.

"Bukan karena ada ini dan ada itu. Yang pasti semua bekerja dengan rendah hati dan totalitas agar tujuan tercapai. Tunggu saja, kami siap berikan kejutan," tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Bijak Bersosmed, Kampanye Hitam Bisa Masuk Penjara

MANADO — 'Saling serang' di media sosial (medsos) ramai saat tahapan kampanye Pemilihan Serentak dimulai.

Di Sulut, sejumlah media sosial digunakan sebagai sarana mempublikasikan keunggulan pasangan calon.

Namun, tidak jarang juga ditemui postingan yang mendiskreditkan calon tertentu.

Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando berpendapat kampanye di media sosial memang terbuka namun tetap mengikuti etika yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Ferry Liando, jika ada postingan menyerang pribadi calon, itu pertanda masyarakat belum dewasa berpolitik. Liando menuturkan, sangat keliru jika beda pilihan dianggap sebagai musuh.

"Ini justru anugerah yang harus dihormati. Ciri khas demokrasi adalah perbedaan dalam pilihan. Jangan pernah paksakan pilihan kita kepada pilihan orang lain," tegasnya. Ia mengimbau para tim sukses dan pemenangan mengontrol diri. Jangan sampai terjebak dengan peristiwa yang diskenariokan secara masif dan terstruktur.

"Masyarakat tidak boleh diadu domba hanya karena ingin berkuasa. Bawaslu mesti bertindak tegas pelaku yang diduga melakukan penyerangan antar pihak," harapnya.

Ferry menegaskan, kinerja bawaslu akan efektif jika masyarakat aktif melapor. Olehnya kata dia, siapa saja bisa membuat laporan jika ada oknum menghasut, melakukan provokasi, menyebarkan kebencian dengan pendekatan SARA, hoax dan sebagainya.

"Itu ditegaskan pada Pasal 69 huruf b UU Pilkada yang menyebutkan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon kepala daerah dan atau partai politik. Juga Pasal 69 huruf c, melarang kampanye menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat.

Liando menambahkan, jika kemudian terbukti secara sah melakukan itu, sanksinya diatur dalam Pasal 187 ayat 2.

"Bisa dipidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6.000.000," tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Serahkan APK dan Bahan Kampanye Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pilkada

MANADO—Guna sukses pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Kamis (15/10/2020) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama tiga Paslon Kepala Daerah peserta Pilkada.

Pada kegiatan yang dihadiri Liaison Officer (LO) mewakili Paslon tersebut, dalam sambutannya Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan bagaimana pentingnya pasangan calon yang telah resmi sebagai peserta Pilkada untuk mengikuti semua ketentuan dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada.



“Selaku penyelenggara kami mengingatkan agar dalam pelaksanaan kampanye bagi Paslon untuk taat aturan sehingga tidak melanggar, juga dalam hal pemasangan APK dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU juga dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan,” tegas Mewoh.

Pada Rakor yang juga dihadiri Awaluddin Ambola Bawaslu Sulut disampaikan temuan Bawaslu terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Kepala Daerah saat menggelar kampanye terbatas khususnya terkait protokol kesehatan.

“Persoalan kepatuhan paslon dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi temuan Bawaslu. Jika tidak diindahkan Bawaslu akan mengambil tindakan sesuai kewenangan dengan membubarkan pertemuan dan akan menjatuhkan sanksi selama 3 kali tidak memberikan ijin melaksanakan kampanye. Agar tidak dijatuhkan sanksi kami berharap semua paslon dapat melaksanakan komitmen sesuai fakta integritas,” tegas Umbola.

Pada kesempatan tersebut KPU telah menyerahkan APK dan bahan kampanye kepada masing-masing pasangan calon yang diterima oleh LO masing-masing Paslon. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber : *sulutnews.com*

Lansia, Balita dan Ibu Hamil Dilarang Ikut Kampanye

MANADO—Balita, anak, ibu hamil atau menyusui dan lanjut usia dilarang ikut dalam kampanye calon kepala daerah. Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan, larangan tersebut telah diatur dalam PKPU 13/2020, Pasal 88 E.

“Pasal tersebut berbunyi, paslon dan tim kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau ibu menyusui dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung,” ujar Salman. Selain itu juga, kata Salman, perlu diperhatikan terkait penyebaran bahan kampanye

harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid 19.

Dijelaskannya, pada ketentuan tertera bahwa sebelum dibagikan, bahan kampanye itu harus bersih dan steril.

“Petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian jangan sampai menimbulkan kerumunan,” pungkasnya.

“Jadi, pasangan calon maupun tim harus perhatikan dan taati hal tersebut,” sambung Salman.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Rocky Wowor Daftarkan 250 Relawan Olly-Steven ke KPU Sulut

MANADO—Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw untuk Pilkada pada 9 Desember menargetkan menang 80 persen. Dan semakin mendekati pelaksanaan Pilkada, Olly- Steven terus mendapat dukungan.

Hal ini dibuktikan, selain ditopang enam partai politik, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PSI, PKB, Perindo, dan PPP, pasangan nomor urut 3 ini juga mendapat topangan dari 250 relawan.

Dari data yang didapat jumlah anggota dari 250 relawan ini beragam. Ratusan hingga ribuan. Koordinator Tim Relawan Olly-Steven, Rocky Wowor (RW), sudah menyerahkan 250 formulir relawan BC3KWK. Lengkap dengan formulir yang sudah diisi, pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, yang diterima Komisioner KPU Yessy Momongan.

“Sesuai aturan, nama-nama relawan yang memberi dukungan pada paslon harus didaftarkan di KPU. Kami mematuhi aturan tersebut. Sebanyak 250 formulir relawan sudah kita masukkan ke KPU,” ungkap Wowor.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sulut menjelaskan, dalam formulir masing-masing



relawan telah mengisinya sesuai data masing-masing.

“Saya yakin, dengan diperkuat relawan, sosialisasi program dan visi misi Olly-Steven akan makin masif di masyarakat. Relawan-relawan ini juga akan ikut bergerak solid mengawal kemenangan Olly-Steven,” jelas Wowor.

Lanjut Wowor, relawan-relawan ini datang dari berbagai latar belakang profesi dan usia.

“Semua elemen masyarakat berbondong menjadi relawan Olly-Steven. Tua-muda ikut terlibat dari berbagai latar belakang. Ini menandakan jika Olly-Steven masih dicintai warga Sulut untuk memimpin bumi Nyiur Melambai periode kedua,” ujarnya.

Wowor pun berkomitmen akan terus berkoordinasi dengan tim relawan, untuk mengatur strategi pemenangan dan sosialisasi program Olly-Steven.

“Semua relawan juga sudah dibekali bagaimana berkampanye yang benar dan tidak melanggar aturan. Paslon Olly-Steven terus meminta pesta demokrasi tak diisi dengan black campaign atau menjelekkan paslon lain. Kita kerja saja, menyosialisasikan apa yang sudah dilakukan Olly-Steven dan program ke depannya,” ucap Wowor. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

Siapa Saja yang Dilarang Ikut Kampanye, Begini Penjelasan Komisioner Salman Saelangi

MANADO—Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 mengatur soal larangan kampanye bagi pihak tertentu. Selain anak-anak dan balita, masa pandemi Covid-19 juga melarang ibu hamil dan lanjut usia terlibat dalam kampanye paslon.

“Jadi khusus kampanye tatap muka memang dibatasi. Mereka yang rentan tidak dibolehkan terlihat,” terang Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi.

Tahapan kampanye, lanjut Salman, wajib menerapkan protokol kesehatan ketat.

Jika ada unsur pelanggaran atau berpotensi terjadi kerumunan, bisa saja dibatalkan. “Bahan kampanye harus steril. Petugas yang ada wajib dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan,” tandasnya. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Semua Sepakat, Wujudkan Pilkada Berkualitas, Anti Politik Uang dan Perangi Hoax

MANADO—Tahapan Pemilihan Serentak sudah bergulir. Meskipun sempat dirundung ketidakpastian karena pandemi Covid-19 melanda, namun pemerintah akhirnya bersikukuh 9 Desember 2020 tetap dilakukan voting day. Di Sulut, kampanye mewujudkan pesta demokrasi bermartabat terus disosialisasi para penyelenggara pilkada.

Hari ini Jumat (9/10/2020), giliran Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Deklarasi Anti Politik Uang, Hoax dan Politisasi SARA.

Kegiatan yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Manado ini tidak hanya dihadiri para kandidat kepala daerah. Pjs Gubernur Agus Fatoni, Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra, Kejati Andi Muh Iqbal Arief dan unsur forkopimda lainnya terlihat memenuhi undangan.

Semua pun sepakat menjadikan Pilkada di Sulut berkualitas dengan bukti tanda-tangan pada lembaran putih besar yang disediakan panitia. Ketua Bawaslu RI, Abhan, juga ada.

Abhan berharap kesepakatan anti politik uang benar-benar diterapkan di semua lini dan tidak memberikan ruang sekecilpun bagi praktik politisasi SARA. “Bulatkan tekad sampai di penghujung tahapan. Kita kawal bersama kontestasi ini,” ajak Abhan.

Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni dalam sambutannya mengapresiasi jajaran Bawaslu Sulut. Agus Fatoni menerangkan, deklarasi itu bertujuan mewujudkan pilkada



damai, sukses, aman dan sehat. “Dan mari bersama-sama tetap disiplin menerapkan protokol Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada ini,” pesannya.

Sementara Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda menegaskan pihaknya terus menggalang kekuatan demi mewujudkan pilkada berintegritas. “Mari ciptakan pesta demokrasi tanpa politik uang agar masyarakat leluasa memilih,” ajak Herwyn Malonda.

Malonda menuturkan, publik membutuhkan informasi akurat agar mendapat pemahaman perihal perkembangan tahapan pilkada. Ia pun meminta semua undangan yang hadir bersama-sama memerangi berita hoax demi mewujudkan pilkada berkualitas.

“Mari berikan pendidikan politik yang baik. Rakyat wajib mengawal semua tahapan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran. Ingat, sukses hajatan ini membutuhkan partisipasi positif kita semua,” bebarnya. Apresiasi kepada Bawaslu Sulut disampaikan beberapa kandidat kepala daerah.

Calon Wali kota Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene menilai deklarasi ini merupakan penguatan komitmen semua stakeholder dalam menciptakan pesta demokrasi yang sesuai harapan.

“Ini juga menjadi instruksi bahwa suksesi pilkada adalah tanggungjawab semua elemen masyarakat,” tegas Julyeta Runtuwene kepada BeritaManado.com usai deklarasi berlangsung.

Ia pun mengajak semua pihak satu visi mewujudkan pilkada harmonis dan bebas dari berita bohong. “Kompetisi sehat adalah kunci pilkada berkualitas,” kata dia.

Senada dengan Julyeta Runtuwene, pujian juga datang dari Calon Bupati Minahasa Selatan, Michaela Elsiana Paruntu. Michaela mendukung penuh semua program bawaslu, karena menurutnya relevan dengan kondisi terkini. Dikatakan, peran bawaslu pada pilkada sangat vital, sehingga perlu mendapat apresiasi publik. “Selamat bekerja dan mengawasi. Kami selalu mendukung,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Dana Awal Kampanye, VAP Terbanyak, CEP-SL Cuma 100 Ribu

MANADO—Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut. Dari LADK tersebut, pasangan Vonnie A Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene (VAP-HR) punya saldo awal rekening dana kampanye paling banyak. Sedangkan pasangan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan S. Landjar, melaporkan saldo dana awal cuma Rp 100 ribu.

“Sesuai PKPU 12 tahun 2020, satu hari sebelum masa kampanye, setiap calon diwajibkan menyetorkan laporan dana awal kampanye. Jadi saat ini tiga pasangan calon telah menyetor laporan dana awal kampanye (LADK). Yang dilaporkan itu merupakan saldo awal pembukaan rekening dana kampanye, “ kata Komisioner divisi hukum KPU Sulut, Meidy Tinangon, Minggu (27/09).

Tidak hanya LADK, setiap masing-masing calon juga harus menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Penerimaan sumbangan itu dilaporkan ke KPU paling lambat pada 30 Oktober 2020.

“Untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) nanti juga harus disampaikan. LPPDK harus diserahkan 1 hari berakhirnya masa kampanye pada tanggal 6 Desember nanti,” ujarnya. Diketahui, masa kampanye telah dimulai, dengan masa waktu selama 71 hari kedepan sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember.

Sementara itu, lewat surat pengumuman KPU Sulut nomor 391/PL.02.5.-PU/PROV/IX/2020 tertera bahwa pasangan nomor urut 2 VAP-HR melaporkan saldo awal kampanye sebesar Rp 5.000.000.

Sementara pasangan nomor urut 3 Olly



Dondokambey, SE- Drs Steven Kandouw (ODSK) memiliki saldo awal dana kampanye Rp 1.000.000. Sedangkan pasangan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan S. Landjar, SH melaporkan saldo dana awal di rekening sebesar Rp. 100.000. Dana awal tiga paslon itu semuanya tercatat berasal dari sumber penerimaan sumbangan pasangan calon.

Surat LADK KPU Sulut tersebut juga menampilkan waktu pelaporan dana awal olah para pasangan calon. Pasangan CEP-SL menyampaikan Jumat (26/09) pukul 16.30 WITA, pasangan VAP-HR pukul 17.08 WITA sedangkan pasangan ODSK dalam keterangan terlambat waktu penyerahan dan diserahkan dalam bentuk manual bukan melalui aplikasi sidakam online. Tercatat pasangan petahana ini menyampaikan LADK pukul 19.17 WITA.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pilkada gubernur dan wakil gubernur ditetapkan maksimal Rp 28.459.324.800.

“Telah disepakati bahwa nominal dana kampanye maksimal kurang lebih Rp 28 miliar,” kata Mewoh. I

a menjelaskan, sumber dana kampanye itu diizinkan dari lima item, yakni dari pasangan calon, dari partai politik atau gabungan parpol, sumbangan perorangan, sumbangan pihak lain kelompok, sumbangan pihak lain badan hukum swasta, “

Jumlah tiap sumber dana itu juga ada yang dibatasi. Batas sumbangan dari calon tidak ada batas. Semua dana kampanye itu dikumpulkan dalam satu rekening khusus masing-masing pasangan calon,” ujarnya.(*)

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Yessy Momongan: Dana Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Harus Sesuai Aturan

SULUT—Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Yessy Momongan mengatakan,

terkait dana kampanye pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Ada tahapan penggunaan dana kampanye dalam ketentuan yang ada lewat partai pengusul, ketentuan maksimal dana kampanye 750 juta sumbangannya.

“Tapi sumbangan ini tidak untuk diberikan satu kali tapi ini bisa setiap minggunya sampai akumulasi semua 750 juta itu sama dengan badan usaha,” terang Momongan saat media gathering di KPU Sulut, Kamis (08/10/20)

Lanjutnya, untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diatur berapa jumlah sumbangannya, yang diatur itu sumbangan dari perseorangan maksimal 75 juta,

“Walaupun mereka kaya tidak boleh melebihi batas maksimal, kalau sumbangannya lebih, itu jangan di gunakan nanti dikembalikan 14 hari setelah kampanye selesai,” tutur Momongan,

Selain itu, KPU Sulut telah memberikan warning kepada tiga pasangan calon untuk dana kampanye sesuai aturan. Dana kampanye paslon sebesar Rp. 28.459,324,800.

Disamping itu, KPU juga telah mengingatkan kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Untuk memasukkan LPPDK ke KPU Sulut paling lambat tanggal 6 Desember, sesudah mengakhiri jadwal kampanye. Paslon harus memasukkan LPPDK laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke KPU Sulut,” ungkapnya

Jika paslon tidak memasukkan maka KPU Sulut pada tanggal 7 Desember akan memanggil Paslon meminta klarifikasi.

“Sesudah minta klarifikasi akan membuat surat edaran untuk dibatalkan paslon tersebut karena Paslon tidak masukkan LPPDK di KPU Sulut.” tutupnya. (*)

Penulis : *Friska Tewu*
Sumber : *portalsulutnews.com*



Dana Kampanye Wajib Ditempatkan Dalam Rekening Khusus

SULUT—Dana Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Pasangan Calon (Paslon) yang bersangkutan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau sesuai dengan tingkatnya, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, uangnya bisa dari mereka kemudian dari partai politik pendukung pengusul itu bisa memberikan sumbangan dalam bentuk uang.

Hal ini dijelaskan Komisioner KPU Provinsi Divisi Teknis Penyelenggara Sulut Yessy Momongan, pada kegiatan penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa (01/09/20).

Yessy Momongan mengungkapkan bahwa, pada prinsipnya Dana Kampanye ini akan dimasukkan sebagai sumbangan perseorangan atau dikategorikan sumbangan-sumbangan kelompok atau sumbangan-sumbangan badan usaha. yang wajib ditempatkan pada Rekening Khusus di dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

“Kegiatan kampanye dimulai tanggal 26 september-5 Desember, hanya 71 hari. Maka kami meminta bahwa setelah mereka mendaftar itu ada proses membuka rekening khusus dalam kegiatan ini bawah semua uang yang akan digunakan untuk digunakan kampanye,” jelas Momongan

Lanjutnya, untuk dana kampanye ini juga ada pembatasan sumbangan dana kampanye dan itu harus dipatuhi semua bakal calon,

”Batasan sumbangan bakal calon itu tidak diatur berapa banyaknya tapi kalau partai politik atau gabungan maksimalnya Rp750 juta, kemudian perseorangannya secara pribadi maksimalnya Rp 75 juta, dan kelompok itu Rp 750 juta dan badan hukum, Rp 750 juta kemudian pasangan calon perseorangan kemudian kebetulan di provinsi tidak ada bakal calon perseorangan.

Namun di Minahasa Selatan dan Kita Tomohon ada calon perseorangan. maka diinformasikan bahwa pasangan calon tidak di atur batas sumbangan dananya, namun perseorangan diatur sama seperti dengan di partai politik,” pungkask Momongan

Selain itu juga Dana Kampanye harus ada pelaporan karena bagi KPU ada peraturannya, jika tidak dilakukan maka KPU punya sanksi yang jelas yaitu pembatalan sebagai Pasangan Calon,

”Ini diatur dan menjadi keharusan dikeluarkan bakal calon yaitu laporannya ke dana kampanye. Laporan dana awal kampanye yang pada saat kami menetapkan tanggal 23 September cabut nomor urut tanggal 24 September maka tanggal 25 September sudah ada pelaporan ke KPU yaitu mereka sudah membuat rekening khusus dana kampanye saldonya sudah ada berapa, kemudian ada rincian penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukaan rekening khusus dan penerimaan sumbangan yang ada. Batas waktu ke KPU pukul 18.00, kemudian di provinsi ada 4 bakal calon maka kewajiban untuk melaporkan ke KPU,” pungkask Momongan

Kemudian penerimaan sumber dana kampanye, laporan pengeluaran sumbangan dana kampanye maka seluruh penerimaan sumbangan itu wajib di LADK itu wajib di masukan ke KPU 31 Oktober pukul 18:00

“Terkait dengan laporan penerimaan dana kampanye itu nantinya disampaikan setelah kampanye tanggal 6 Desember sudah diserahkan ke KPU pukul 18.00.kalau tidak diserahkan sesuai jadwal maka KPU akan memberikan sanksi pembatalan pasangan calon,” tutur Momongan

Selain itu untuk Mekanisme jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU provinsi dan kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik atau petugas yang diberikan mandat untuk mengurus.

“Pembatalan dana kampanye ditetapkan keputusan KPU Provinsi atau kabupaten



kota dengan sama-sama kita saling batasi, namun batasan pengeluaran dana kampanye itu kita atur dan KPU juga akan melakukan perhitungan pembatasan dana kampanye,” tukas Momongan. (*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber : *portalsulutnews.com*

Yessy Momongan Ralat Soal Uang Transport Peserta Kampanye

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara meralat terkait pemberian uang transport bagi peserta kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Uang yang dimaksud tidak diberikan cash money atau tunai, tapi dalam bentuk makanan dan minuman, serta transportasi oleh pasangan calon atau panitia kampanye.

Menurut Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut, Yessy Momongan, hal ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) 4 tahun 2017 pasal 71 ayat 3. Dimana, pada berita sebelumnya, Yessy menjelaskan hanya sampai pada ayat 2, yang menuliskan bahwa pasangan calon/ tim kampanye wajib memberikan uang transport.

“Jadi penjelasannya ada di ayat 3, diterangkan adalah biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilarang diberikan dalam bentuk uang,” ungkap Yessy, Minggu (11/10/2020). Ia mengakui miss komunikasi dalam pemberian materi pada Media Gathering yang digelar KPU Sulut pada, Kamis (8/10/2020), serta wawancara oleh wartawan.

“Karena memang di simulasi itu ada uang transport. Tapi saya kurang menjelaskan bahwa uang transport itu tidak diserahkan dalam bentuk uang. Saya berpikir sudah dijelaskan oleh pak Salman Saelangi (Komisioner KPU Sulut Divisi Humas dan SDM, red), karena saya hanya menjelaskan soal dana kampanye saja,” terang Yessy. “Karena saya yang kurang menjelaskan, maka saya harus mengklarifikasi ke teman-teman wartawan,” tambah Yessy.

Ia menegaskan lagi, uang transport yang dimaksud tidak diberikan cash oleh paslon. “Paslon atau tim kampanye menyediakan snack atau makanan dan menyediakan transportasi sesuai dengan standar biaya daerah,” tandas Yessy. Hal yang sama dijelaskan oleh Salman. Ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan paslon yang akan maju di Pilkada tidak melakukan politik uang. “Ini menjadi tanggung jawab semua elemen. Tidak terlepas juga bagi kalangan media,” tambahnya.

Sebelumnya pada media gathering yang digelar oleh KPU Sulut, Yessy menjelaskan bahwa KPU tidak melarang adanya pemberian uang transport kepada peserta kampanye Pilkada.

Ia mengatakan, besaran uang transport tersebut maksimal Rp 250.000. “Pemberian uang transport kepada peserta kampanye bukan merupakan pelanggaran tetapi kewajiban bagi pasangan calon karena ada dalam ketentuan,” kata Yessy. Hanya saja, kata Yessy, jumlah peserta dalam kampanye dibatasi hanya 50 orang.

“Bukan hanya uang transport saja, mereka juga wajib mendapatkan konsumsi, souvenir. Tapi uang transportasi disesuaikan dengan kemampuan paslon. Tapi, maksimal Rp 250.000 untuk tingkat propinsi, karena untuk kabupaten dan kota beda,” kata Yessy. (*)

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

KPU Sulut Bahas Pemasangan Iklan dan Debat Paslon

MANADO—Rapat Koordinasi yang membahas rencana pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan debat publik Pemilihan Gubernur Sulut digelar KPU Sulut, Kamis (15/10/2020).

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengimbau pemasangan APK tidak dilakukan di sembarangan tempat. Menurut Ardiles, ada titik yang telah disiapkan, sehingga paslon diharapkan mematuhi ketentuan itu. Sementara untuk debat kandidat, lanjut Ardiles, KPU



menjadwalkan digelar tiga kali.

“Selanjutnya terkait waktu dan tempat akan kami bahas lebih detail bersama paslon dan tim kampanye,” terangnya.

Dikatakan, skenario debat kandidat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Undangan kemungkinan dibatasi, hanya beberapa perwakilan saja yang hadir,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Pilkada Desember, Kampanye Digital, Boleh, Tapi..

MANADO—Kampanye digital menjadi konsep baru yang diwacanakan pada Pilkada Serentak.

Terlebih jika kontestasi lima tahunan tersebut digelar Desember 2020, dimana belum menjamin pandemi berakhir. “Sah-sah saja, selama ini kampanye di media sosial juga bukan hal baru,” ujar Dosen Kepemiluan Fisip Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Liando, Selasa (26/5/2020).

Tetapi lanjut Ferry Liando, kampanye via daring ini tidak boleh menjadi satu-satunya cara. Penyelenggara pilkada harus mempunyai alternatif lain karena tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan sarana pendukung memadai. “Meski demikian, saya setuju jika kemudian ada instrumen lain yang bisa menjadi sarana komunikasi politik antara calon dan masyarakat, tanpa harus berinteraksi langsung,” jelasnya.

Dikatakan, sejauh ini aturan undang-undang masih mengatur kampanye model lama dengan mempertemukan calon dan publik. Menurut Liando, di tengah pandemi COVID-19, cara-cara itu rentan dilakukan karena berisiko. Ia pun berpendapat kampanye untuk gelaran pilkada akhir tahun tidak harus menjadi kewajiban.

“Sebab fungsi kampanye hanyalah memperkenalkan calon kepada publik, kemudian diikuti dengan tawaran program. Jika calon sudah populer, sebetulnya kampanye tidak diperlukan lagi,” terangnya.

Liando menambahkan, cara mempopulerkan calon tidak harus dengan kampanye. Katanya, jika calon tersebut telah memiliki dedikasi, reputasi dan sering memperjuangkan kepentingan publik sebelum menjadi calon, hal tersebut telah menjadi modal besar.

“Masalahnya banyak calon belum pernah berbuat apa-apa. Mereka inilah akan memanfaatkan kampanye mempopulerkan diri secara instan. Bahkan dengan cara-cara terlarang, termasuk menyogok masyarakat dengan politik uang. Apalagi saat ini sebagian masyarakat terkesan pragmatis yakni pilihan politik dipengaruhi oleh uang, atau kesamaan identitas,” tegasnya.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, menjelaskan sampai sekarang belum ada aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya, KPU lebih dulu harus membuat PKPU yang nantinya menjadi pedoman bagi penyelenggara melaksanakan tahapan. “Dengan aturan tersebut juga menjadi pegangan kami dari Bawaslu perihal program pengawasan, termasuk penindakan dalam pelanggaran kampanye dan sebagainya,” terang Afifuddin, pada webdiskusi yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado, belum lama ini.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Agus Fatoni: Pilkada Damai dan Sehat Tanggung Jawab Kita

MANADO—Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni menghadiri coffee morning bersama jajaran Forkopimda, KPU dan Bawaslu Sulut di Gubernuran Bumi Beringin, Jumat (13/11/2020).

Kegiatan yang mengangkat tema Forum



Pemilihan Damai dan Sehat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Agus Fatoni dalam kesempatan tersebut mengatakan pilkada 9 Desember 2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu tetapi semua masyarakat.

Olehnya, menurut Fatoni, forum-forum seperti ini akan terus dilakukan setiap jumat pagi jelang pilkada serentak. Sementara terkait dengan tema pembahasan, ia melihat ada dua hal yang menjadi perhatian dalam diskusi pagi ini.

Fatoni meyakini dengan adanya sinergi dari semua lapisan masyarakat serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu maka pilkada di Sulut dapat berjalan dengan semestinya.

“Pilkada sehat dapat berlangsung di Sulawesi Utara. Tentunya, dengan kerja sama kita membudayakan memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan,” ajaknya.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menjelaskan coffee morning bertujuan mendiskusikan tentang kesiapan pelaksanaan pilkada. “Setiap minggu kita duduk bersama-sama, kita berdiskusi, kita bicarakan soal pemilihan kita yang sebentar lagi akan berlangsung,” katanya.

Dia juga berharap dengan adanya pertemuan seperti ini dapat memperoleh masukan kesuksesan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Kasih Pohon Ini, Dipaku Hanya untuk APK

MANADO—Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masih banyak di Kota Manado. Salah satunya di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

Pantauan BeritaManado.com, Senin (5/10/2020), APK dalam bentuk poster banyak di pajang di pepohonan.

Caranya dengan dipaku dan terlihat di sepanjang jalan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga.

Frank Pesik warga Kelurahan Malalayang Satu Timur, menyayangkan masih ada tim kampanye belum mengerti dengan aturan. Padahal kata Frank Pesik, standar pemasangan APK sudah berulang kali disosialisasikan penyelenggara pilkada. “Kasih pohonnya dipaku begini. Apalagi dalam waktu lama,” beber Frank.

Menurutnya, APK di pohon sama saja mengurangi estetika dan fungsi dari tanaman.

“Ini sampah visual namanya. Saya pribadi terganggu,” tegas Pesik. Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado, Marwan Kawinda mengatakan lokasi pemasangan APK sudah ditetapkan KPU. Menurut Marwan Kawinda, yang menjadi area publik memang dilarang.

“Kecuali wilayah privat seperti pekarangan rumah, itu boleh,” jelasnya. Ia mengimbau paslon dan tim kampanye mematuhi semua ketentuan tersebut.

Pasalnya, Bawaslu tidak akan segan-segan menindak terhadap semua pelanggaran yang ditemukan.

Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih menambahkan, penertiban APK dilakukan Bawaslu Manado siang dan malam. Ini karena ada beberapa titik harus menunggu waktu tepat. Contohnya kata Taufik, pencabutan APK jenis billboard dengan ukuran besar sehingga harusnya dilakukan dini hari.

Memang terang Taufik, hampir semua APK di Kota Manado melanggar. APK sah bila telah mendapat konfirmasi dari KPU. “Sesuai PKPU, APK akan difasilitasi penyelenggara (KPU). Dan saat ini itu belum jadwalnya,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Kampanye Paslon Juga Diawasi KPU



MANADO—Bukan hanya Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut turut intens memantau aktivitas tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur sebagai peserta pilkada 2020.

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Salman Saelangi mengatakan, penyelenggara di semua tingkatan selalu melihat pergerakan para calon saat melakukan kampanye. “Fokusnya pada praktik protokol kesehatan selama melakukan aktivitas. Kami selalu imbau agar paslon memperhatikan ini,” tegas Salman. Ia menambahkan, peran ini dilakukan KPU sesuai surat edaran dari KPU RI.

“Dan harus diakui, masih ada beberapa yang melanggar dan itu langsung kami peringatkan,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Sembilan Lembaga Survei dan Hitung Cepat Daftar di KPU Sulut, Berikut Namanya

MANADO—Ada sembilan lembaga survei dan hitung cepat yang sudah mendaftar di KPU Sulawesi Utara (Sulut). Jika telah melewati pleno KPU dan dinyatakan bersyarat, maka beberapa lembaga ini bisa melakukan fungsinya di tahapan Pemilihan Gubernur Sulut. “Kami akan plenokan dulu. Karena ada juga yang mesti melengkapi dokumen,” kata Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi kepada BeritaManado.com, Senin (9/11/2020).

KPU Sulut, lanjut Salman Saelangi, akan memastikan lembaga survei dan hitung cepat ini tidak terafiliasi dengan peserta pilkada manapun. “Pasti dicek kredibilitas dan independensinya,” kata Salman.

Ia menjelaskan, lembaga survei dan polling memang diwajibkan mendaftarkan diri ke KPU jika ingin berpartisipasi di Pilkada Serentak. Ketentuan itu, tambah dia, diatur lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota.

“Yang tidak terdaftar di KPU, aktivitasnya dianggap ilegal,” tandasnya.

Berikut daftar lembaga survei dan hitung cepat yang mendaftar di KPU Sulut:

1. Jaringan Suara Indonesia
2. Populi Center
3. Konsultan Citra Indonesia
4. Politracking
5. Charta Politika
6. Indobarometer
7. Indikator Politik Indonesia
8. Lembaga Survei Indonesia
9. Saiful Mujani Research and Consulting.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Regulasi Kampanye Tahun 2020 Berbeda, Saelangi: Ini Sudah Diatur Dalam PKPU 13 Tahun 2020

SULUT -- Regulasi kampanye di tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana, saat ini dengan menggunakan pembatasan-pembatasan sesuai Protokol Kesehatan Covid 19.

Komisioner Bidang Devisi Sosialisasi Parmas dan SDM KPU SULUT Salman Saelangi, mengungkapkan bahwa kampanye sebelumnya kalau melihat regulasi kita bahwa kampanye itu sendiri ada pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di Peraturan KPU (PKPU) 13 2020,

” Kalau dilihat dari konsep ke belakang memang orang sering bertanya kenapa PKPU 11 tahun 2020 berbeda dengan PKPU 13 atau PKPU 6 menjadi PKPU 13 tahun 2020.”Ungkap Saelangi, Kamis (08/10) dalam Media Gethering KPU SULUT,

Lanjutnya, memang mungkin hanya di PKPU pilkada serentak di tahun 2020, dengan menggunakan konsep protokol



kesehatan covid 19,

“Memang PKPU itu dijangkau 3 bulan lebih, dan dua kali diubah. Satu program PKPU bisa berubah 2 kali, dna perlu diketahui PKPU ini disusun diatur menyerap aspirasi semua permintaan dari publik yang meminta menggunakan protokol kesehatan,” tutur Saelangi.

Selain itu untuk teknis kampanye di masa pandemi covid 19, tetap dengan menggunakan PKPU 13 tahun 2020 ada pembatasan orang yang terlibat.

“Untuk rapat pleno hanya dibatasi berapa orang, metode pertemuan dibatasi 50 orang dan memperhatikan standar covid 19 dan hanya di dalam ruangan atau gedung saja dan ini membedakan dengan yang normal. Dan juga kampanye ini harus dilakukan dengan menggunakan media sosial.” Pungkasnya. (*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber : *portalsulutnews.com*

KPU Monitoring Aktivitas Tiga Paslon Gubernur dan Wagub Sulut

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) intens mengawasi aktivitas tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pilkada 2020.

Salah satu anggota komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Salman Saelangi mengatakan, pihaknya terus mengawasi jalannya kampanye dari masing-masing paslon di sejumlah titik lokasi kampanye.

“Kami terus mengawasi jalannya kampanye di sejumlah titik lokasi kampanye,” kata Saelangi kepada sejumlah wartawan saat berada di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, Saelangi juga menambahkan bahwa pemantauan yang di lakukan oleh KPU Sulut ini terkait dengan pengawasan paslon dan tim nya akan protokol

kesehatan Covid-19 dalam kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing paslon dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona Virus Disease 2019.

“Apakah tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut ini benar-benar mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam kampanye yang di gelar atau tidak sama sekali mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye,” ujarnya.

Diakui Saelangi, monitoring terkait kampanye tiga paslon calon gubernur dan wakil gubernur Sulut dari sisi pengawasan adalah tupoksi dari Bawaslu, namun KPU juga sesuai surat edaran dari KPU RI untuk melakukan monitoring kepada tiga paslon saat melakukan kampanye, apakah mengikuti protokol kesehatan atau tidak.

Secara terang-terangan Saelangi juga mengakui bahwa masih ada paslon saat kampanye tidak mengikuti protokol kesehatan.

“Dari hasil pantauan ada paslon yang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid19 dalam berkampanye. Namun hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi kami sekaligus data yang diterima oleh KPU Sulut saat melakukan monitoring lapangan,” tutup Saelangi. (*)

Penulis : *Jellina Najoran*

Sumber : *sulutreview.com*

KPU Sulut Monitoring Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

SULUT—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah melakukan monitoring pelaksanaan kampanye dari tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut) di sejumlah lokasi kampanye.

Kepada wartawan, Selasa (20/10/20) di ruang kerjanya, komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi mengungkapkan bahwa monitoring yang dilakukan oleh KPU



Sulut terkait protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

“Apakah protokol ini benar-benar dilakukan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur saat kampanye atau tidak,” tuturnya

Lanjutnya, monitoring terkait kampanye tiga paslon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dari sisi pengawasan adalah tupoksi dari Bawaslu,

“Namun KPU juga sesuai surat edaran dari KPU RI untuk melakukan monitoring kepada tiga paslon saat melakukan kampanye, apakah mengikuti protokol kesehatan atau tidak,” ungkap Saelangi.

Menurut Saelangi ada paslon saat kampanye tidak mengikuti protokol kesehatan. Namun hal ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus data yang diterima oleh KPU Sulut saat melakukan monitoring lapangan.

Selain itu terkait masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya bisa mencapai 77,5 %. Optimisme KPU terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya didasarkan atas animo peserta seleksi KPPS yang membludak, serta jamin KPU dalam upaya mengantisipasi penyebaran Virus dengan menyiapkan APD bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS .

”Bagi masyarakat yang datang menyalurkan hak pilihnya tetap mengikuti protokol kesehatan dengan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) yang disiapkan oleh KPU, Semua petugas KPPS yang bertugas di TPS telah melakukan Swab dan difasilitasi APD lengkap,” jelas Saelangi.

Saelangi juga mengatakan dalam upaya mensukseskan tahapan Pilkada serentak 2020, KPU juga akan melakukan simulasi cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, agar masyarakat lebih memahami seperti apa tata cara pemungutan suara disaat pandemi.(*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber: *portalsulutnews.com*

KPU Sulut Siapkan Pemasangan Iklan Kampanye dan Debat Publik Untuk 3 Paslon Gubernur Sulut

SULUT—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara(Sulut) menggelar rapat koordinasi fasilitasi iklan kampanye dan debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh,Kamis (15/10/20) Ketua KPU mengungkapkan bahwa saat ini akan menyiapkan pemasangan iklan dan debat publik bagi tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

”Pemasangan iklan kampanye paslon akan disampaikan kepada paslon dalam pemasangan APK tidak bisa di sembarangan tempat, disamping KPU akan memfasilitasi debat publik,” jelas Mewoh.

Lanjutnya,debat ini akan dibicarakan bersama dengan tim kampanye paslon untuk menetapkan waktu yang tepat.

“KPU sendiri akan menetapkan sekaligus menjadwalkan tiga kali debat publik dengan semua paslon sebagai puncak kampanye. Penyelenggara juga mengingatkan kepada pasangan calon untuk pemasangan APK harus ditempat yang tidak terlarang penayangan iklan kampanye,” tutur Mewoh

Sementara itu anggota Bawaslu Sulut Awaluddin Umbola mengatakan, terkait APK dan bahan kampanye pemilu serta kampanye paslon. Setelah hampir 20 hari tiga paslon kampanye sudah banyak yang dilanggar oleh paslon tersebut.

“Pertama dalam melaksanakan kampanye paslon tidak menaati protokol kesehatan, di samping kampanye paslon di sejumlah titik dengan aturan 50 orang dalam ruang kampanye,” ungkap Awaluddin.

Selain itu Bawaslu mau mengingatkan kepada paslon untuk kembali kepada komitmen awal pada pakta integritas yang sudah disepakati bersama sejak awal dengan tiga paslon.



“Kita sudah ada komitmen bersama dan sudah disepakati harusnya kita ingat apa yang menjadi keputusan bersama ini,” pungkasnya. (*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber : *portalsulutnews.com*

Bakal Live di TV Nasional, Begini Rencana KPU Sulut untuk Debat Kandidat

MANADO—Debat kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) sebentar lagi digelar.

Meskipun belum final, namun KPU Sulut sudah mengatur rencana desain acara sesuai petunjuk teknis (Juknis) KPU RI. Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi mengatakan pihaknya mengupayakan debat kandidat pilgub dilakukan dengan tiga metode, dimana dalam satu kesempatan bisa disiarkan langsung Televisi (TV) Nasional.

Berikutnya, di TV nasional tapi tunda dan siaran langsung di TV Lokal.

“Nanti pengaturannya dirampungkan lagi. Yang jelas dalam tiga kali debat, ada yang live nasional, tunda nasional dan live lokal,” kata Salman kepada BeritaManado.com, Kamis (15/10/2020). Sementara untuk jadwal, Salman belum bisa memastikan tanggalnya. Namun kata dia, kemungkinan besar digelar November 2020.

Salman menegaskan, keputusan akhir soal waktu, tempat hingga proses debat masih akan dibicarakan bersama pasangan calon. “Nanti kita rapat dulu bahas soal ini,” bebernya.

Salman menambahkan, pada keputusan KPU RI Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, durasi debat adalah dua jam, dengan rincian 90 menit segmen debat itu sendiri dan 30 menit jeda iklan. Dalam waktu tersebut, dibagi sebanyak enam segmen. Pada juknis itu juga, tambah Salman, debat publik mengharuskan penerapan protokol

kehatan ketat sesuai standar pemerintah daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Catat! Ini Jadwal Debat Kandidat Pilgub Sulut

MANADO—Pemaparan visi-misi dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) melalui debat kandidat sebentar lagi digelar. Di tahapan ini, publik bisa menyaksikan para pasangan calon (paslon) adu keunggulan.

KPU Sulut sudah menetapkan jadwal debat tersebut. Ketiga paslon dipastikan bertemu sebanyak tiga kali. Komisioner KPU Sulut Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Sosialisasi, Salman Saelangi menuturkan, debat pertama dilaksanakan 5 November dan digelar siang hari. Berikutnya, lanjut Salman, 11 dan 17 November untuk debat kedua dan ketiga.

“Sesuai rapat pertama disepakati akan disiarkan secara langsung oleh TV lokal, Lembaga Penyiaran Publik dan di TV swasta nasional,” terang Salman kepada BeritaManado.com, Minggu (25/10/2020).

Ia menerangkan, pada keputusan KPU RI Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, durasi debat adalah dua jam, dengan rincian 90 menit segmen debat itu sendiri dan 30 menit iklan layanan masyarakat. Dalam waktu tersebut, dibagi sebanyak enam segmen.

Pada juknis itu juga, tambah Salman, debat publik mengharuskan penerapan protokol kesehatan ketat sesuai standar pemerintah daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Nanti masih akan ada rapat lagi untuk membahas konsep teknisnya,” tandasnya. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut Siapkan Materi Debat Publik



Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), minggu (1/11) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan agenda bersama Tim Penyusun Materi Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Media Penyelenggara dan Stakeholder terkait (Metode Panel), di Hotel NDC Resort Manado.

Dalam rapat koordinasi ini mempersiapkan seluruh mekanisme hingga proses penyusunan materi untuk debat terbuka pasangan Calon Gubernur Sulawesi Utara.

Sementara, Tim Penyusun Materi Debat diantaranya Ellen Kumaat, Johanis Ohoitumur dan Hamdi Muluk akan meramu soal debat kandidat sesi pertama pada tanggal 5 November 2020 nanti.

Ketua Divisi SDM dan Parmas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Salman Saelangi, S.Kel, mengatakan bahwa konsep yang disiapkan pendekatan outdoor.

“Ini sesuatu yang baru dengan pendekatan outdoor karena tema yang diangkat adalah tema lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan Covid-19, kesehatan masyarakat, pengembangan wilayah dan infrastruktur, itu menjadi poin-poin yang akan kita angkat dalam debat publik antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 5 November nanti,” ucap Salman.

Lebih lanjut, dalam rangkaian kegiatan Rakor ini sebut Salman bahwa KPU telah siapkan semua mekanismenya.

“Baik secara sesi teknis, sesi pertanyaan-pertanyaannya bahkan ada pelibatan publik dalam hal menyusun pertanyaan dimana kami mengundang dalam setiap sesi FGD para pakar, praktisi dan para pelaku utama dalam bidangnya untuk membahas dan merumuskan yang akan menjadi pertanyaan kepada setiap pasangan calon,” jelas Salman Saelangi.

Selesai menuntun proses rakor bersama penyelenggara dan stakeholder terkait,

kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari kemudian di tutup oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Salman Saelangi, S.Kel didampingi Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Sulut Rudy Lalongsang, S.Sos.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sulut Sukses Gelar Debat Publik Pertama

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) sukses menggelar debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Sulut 2020, sesi pertama di Makatete Hills, Minahasa, Kamis (5/11/2020).

KPU Sulut, Ardiles Mewoh membuka kegiatan debat calon sesi pertama. Dia meminta kepada ketiga pasangan calon (paslon) untuk melakukan debat secara santun.

“Kepada para paslon silahkan untuk berdebat terkait tema. Dalam berdebat bukan berarti menjelek-jelekan, berdebat bukan untuk menebar kebohongan, berdebat bukan untuk menyebarkan kebencian. Tapi berdebatlah dengan santun untuk kemajuan daerah kita Sulawesi Utara,” kata Ardiles

Debat calon ini dimulai pada pukul 15.30 WITA sampai pukul 17.30 WITA dan ditayangkan lewat kanal youtube dan facebook resmi milik KPU Sulut.

Pada debat pertama ini, KPU Sulut berhasil menuntaskan lima segmen tema, sebagai materi yang didebatkan oleh tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sulut yakni, kesehatan masyarakat,

pengecahan bencana alam, pengembangan wilayah, infrastruktur daerah serta penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Tiga pasangan calon, Christiany Eugenia



Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL), Vonny Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR), Oilly Dondokambey-Steven Kandow (OD-SK), masing-masing paslon ini saling menunjukkan wawasan dalam memberikan dan menjawab pertanyaan dari paslon yang lain.

Dalam debat calon ini, KPU Sulut tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 (3M), yakni mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

“Ini debat publik pertama yang memang terbatas dan menggunakan protokol Covid-19,” tegas Yessy Momongan

Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara mempercayakan Founder Mata Bicara, Reidy Sumual sebagai moderator dalam Debat Calon sesi pertama.

Turut hadir dalam debat calon hari ini, para komisioner KPU Provinsi Sulut, Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelang, Yessy Yatty Momongan dan Lanny Anggriany Ointu, Bawaslu Sulut, serta para pendamping dari masing-masing paslon.

Dari informasi yang ada bahwa debat publik antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara akan dilakukan sebanyak 3 segmen, yaitu segmen I, Kamis (5/11/2020), dengan tema debat, kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, infrastruktur daerah serta penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Untuk segmen II, bakal digelar Rabu (11/11/2020), dengan tema debat, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan, ekonomi, industri, pendidikan dan teknologi, UMKM dan koperasi serta gender, disabilitas dan anak.

Segmen III, akan dilaksanakan Selasa (17/11/2020), tema debat, menuju Sulawesi Utara aman, tertib yang berkeadilan dalam bingkai NKRI (pemerintahan daerah, supremasi hukum, politik, keamanan, dan koperasi). (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

KPU Sulut Bahas Teknis Debat Terbuka dengan Tim Penyusun Materi

MANADO—Rapat Koordinasi digelar KPU Sulut terkait persiapan Debat Terbuka Pilgub Sulut, Minggu (1/11/2020). Kegiatan yang digelar bersama Lembaga Penyiaran Publik dan perwakilan media ini, turut menghadirkan Tim Penyusun Materi Debat diantaranya Ellen Kumaat, Johanis Ohoitumur dan Hamdi Muluk.

Rakor sendiri membahas teknis dan jalannya debat serta model pertanyaan yang akan disusun.

Baik tim penyusun dan KPU saling bertukar pikiran demi memantapkan rencana debat pertama yang dijadwalkan 5 November 2020. Disepakati, tim penyusun akan meramu soal debat kandidat sesi pertama disesuaikan dengan tema.

Semua pertanyaan akan siap paling lambat 4 November 2020. Tim penyusun berjumlah sembilan orang dan akan membuat materi pada tiga kali debat kandidat yang dijadwalkan.

Rakor yang dibuka oleh Komisioner KPU Lanny Ointu dan dipandu Salman Saelang ini, berjalan sesuai protokol kesehatan. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Rakor Debat Kandidat: KPU Sulut Libatkan Pekerja Media, di Minut Jurnalis ‘Diusir’

MANADO—KPU Sulawesi Utara (Sulut) melibatkan pekerja media dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Debat Terbuka Pilgub Sulut, Minggu (1/11/2020). Rakor yang menghadirkan Tim Penyusun Materi Debat diantaranya Ellen Kumaat, Johanis Ohoitumur dan Hamdi Muluk turut dihadiri beberapa perwakilan pekerja media.

Rakor sendiri membahas teknis dan



jalannya debat serta model pertanyaan yang disusun.

Baik tim penyusun, KPU dan pekerja media saling bertukar pikiran demi memantapkan rencana debat pertama yang dijadwalkan 5 November 2020. Kondisi berbeda terjadi di Minahasa Utara (Minut).

KPU Minut yang menggelar Rakor Persiapan Penyusunan Soal pada Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minut di Hotel Sutan Raja, Senin (2/11/2020), justru tidak mengundang keberadaan para jurnalis. Tiga orang wartawan yang bermaksud ingin mempublikasikan rakor itu dipersilakan keluar.

“Maaf pak pers tidak diundang. Jadi kalau bisa jangan di sini,” ujar seorang staf KPU Minut. Staf tersebut mengaku jika dirinya diperintahkan oleh Komsisiner KPU Minut. “Hanya menyampaikan perintah komisioner pak,” katanya lagi. Memang dalam rakor itu, tidak ada undangan resmi bagi wartawan.

Namun karena konten rakor dianggap layak menjadi konsumsi publik, beberapa jurnalis sempat mengabadikan jalannya rapat.*

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Berikut Isu dan Sembilan Nama Tim Ahli Penyusun Materi Debat Pilgub 2020

MANADO—Debat terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut digelar tiga putaran.

Seperti diketahui, debat pertama digelar 5 November 2020 dan dimulai pukul 15.30 WITA. Karena digelar sore hari dan direncanakan di luar ruangan, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi berharap kerjasama dari semua pasangan calon hadir tepat waktu. Menurut Salman Saelangi, di setiap putaran debat, ada tiga orang tim ahli penyusun materi.

Untuk debat pertama kata dia, kesempatan diberikan kepada tiga orang profesor yaitu Ellen Kumaat, Hamdi Muluk dan Johanis Ohoitumur.

“Tema debat pertama yakni Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Bencana Alam, Pengembangan Wilayah, Infrastruktur Daerah serta Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” terangnya. Selanjutnya, debat kedua dijadwalkan 11 November.

Temanya, seputar Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan (Ekonomi, Industri, Pendidikan, Perdagangan, Teknologi, UMKM dan Koperasi, Gender, Disabilitas dan Anak). Berikut, tim penyusun materi terdiri dari Prof Deitje Adolfien Katuuk, Sri Nuryanti dan Steven Kowaas. Menuju Sulawesi Utara Aman, Tertib yang Berkeadilan dalam Bingkai NKRI akan menjadi tema di debat terakhir 17 November 2020.

Beberapa isu yang bakal dibahas seputar Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan dan Korupsi. “Di putaran ketiga ini, materi disusun Prof Valina Singka Subekti, Delmus Puneri dan Audi WMR Wuisang,” tandas Salman.*

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Jelang Debat Kandidat Pilgub, Herwyn Malonda Pertegas Soal Ini

MANADO—Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Penentuan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Gubernur Sulut 2020 lewat aplikasi zoom meeting, Selasa (3/11/2020). Herwyn Malonda banyak menyampaikan pesan penting diantaranya kepastian suksesnya debat yang mesti dipenuhi KPU Sulut.

“Tujuan debat adalah menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Kedua, memberikan informasi menyeluruh sebagai salah satu pertimbangan publik menentukan pilihannya. Ketiga, menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat. Semua ini mesti dicapai



dalam debat nanti,” pesannya. Malonda mengingatkan KPU Sulut serta seluruh stakeholder memperhatikan seluruh protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama jalannya debat kandidat.

Selain itu, kata dia, potensi kerawanan dalam debat publik adalah jadwal dan lokasi berbeda dengan penentuan sebelumnya. “Potensi kerawanan paling tinggi diantaranya materi debat bocor sebelum dilaksanakan. Ini harus diperhatikan,” imbaunya.

Terakhir, Herwyn Malonda mengingatkan bahwa paslon dilarang menolak mengikuti debat publik.

“Sebagaimana tertulis dalam pasal 22 ayat 1 PKPU 11 tahun 2020, paslon dikenai sanksi yaitu diumumkan oleh KPU bahwa yang bersangkutan menolak mengikuti debat. Dan sisa iklan kampanye paslon itu tidak lagi ditayangkan sejak paslon tidak mengikuti debat publik,” tandasnya. Narasumber dalam rapat ini diantaranya Prof Ellen Kumaat, Prof Hamdi Muluk dan Prof Johanis Ohoitumur.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Jangan Lupa! Sore Ini Debat Kandidat Pertama Pilgub Sulut

MANADO—Warga Sulawesi Utara (Sulut) diingatkan kembali jadwal putaran pertama Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang digelar sore ini. KPU Sulut menyediakan beberapa pilihan siaran yang bisa dipilih publik sesuai dengan letak dan geografis tempat tinggal.

Debat sebentar dimulai pukul 15.30 WITA. Kawanua TV menjadi Lembaga Penyiaran Swasta yang menayangkan jalannya debat. Selain itu, Radio Republik Indonesia (RRI) turut memancarkan sehingga bisa diakses hingga wilayah pedesaan.

Penyelenggara pilkada turut memfasilitasi melalui media sosial, sehingga warga bisa menyaksikan lewat channel Youtube

dan akun Facebook KPU Sulut. Tema di debat pertama mengangkat isu Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Bencana Alam, Pengembangan Wilayah, Infrastruktur Daerah serta Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Komisioner KPU Salman Saelangi menerangkan, karena digelar sore hari dan direncanakan di luar ruangan, pihaknya berharap kerjasama dari semua pasangan calon hadir tepat waktu. “Undangan dalam debat kami batasi. Ini demi menjunjung protokol kesehatan sesuai arahan KPU RI dan Satgas Covid-19,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Paslon Pilgub Tiga Kali Adu Gagasan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut akan melaksanakan tiga kali debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pertarungan gagasan itu akan menjadi rangkaian proses kampanye menjelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Debat putaran pertama nantinya siap dilaksanakan Kamis 5 November di wilayah Manado.

Debat putaran kedua digelar 11 November dan debat ketika digelar 17 November.

“Debat publik pasangan calon gubernur dan wakil sudah siap dilaksanakan. Debat pertama siap digelar Kamis mendatang. Nanti Selasa (03/11) ada gladi resik debat dengan pasangan calon sebagai rakor final persiapan debat putaran pertama,” ujar Komisioner KPU Sulut divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas, Salman Saelangi Minggu (01/11) saat rakor tim penyusun materi debat dengan stakeholder di MDC Hotel.

Ia menuturkan, pelaksanaan debat kandidat yang rencananya digelar pada 5 November mendatang akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk, akan membatasi peserta yang akan Hadir.

Para peserta yang diperbolehkan hadir, kata Salman, yakni tiga pasangan calon, dua orang urusan Bawaslu Sulut, empat



orang tim dari masing-masing paslon, lima orang komisioner KPU dan dua orang dari Bawaslu. “Kita mengacu pada protocol kesehatan, kita akan batasi juga orang yang hadir. Jumlah peserta termasuk undangan 17 orang belum termasuk penyelenggara dan kru televisi,” kata Salman.

Menurut Salman, rencananya acara debat calon tersebut akan ditayangkan secara langsung di stasiun televisi lokal Kawanua TV dan dipancarkan RRI. “Debat kedua melalui TV nasional TVRI/RRI. Debat tiga TV nasional Kompas TV dan dipancarkan RRI. Juga disiarkan live di media sosial resmi Youtube dan Facebook KPU Sulut,” ujarnya.

Lanjut dipaparkan Salman, materi debat paslon gubernur dan wakil disusun oleh 9 tokoh yang terdiri dari akademisi dan mantan komisioner KPU RI, yakni Elen Kumaat, Hamdi Muluk, Johan is Ohoitimur, Deitje Katuuk, Sri Nuryanti, Steven Kowaas. Vilina Singkat Subekti, Delmus Puneri Salim, Audy Wuisang.

“Tema debat perdana ini adalah kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, infrastruktur daerah. Materi debat perdana ini juga membahas penahanan, pencegahan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 19 (covid-19),” ungkapnya.

KPU Sulut menunjuk satu orang moderator dan tiga orang panelis dalam memandu debat ini.

Nantinya kata Salman, mekanisme debat putaran pertama ini sendiri terbagi menjadi lima segmen. Pada segmen pertama merupakan penyampaian visi misi. “Di segmen ini, tiga pasangan calon akan memaparkan visi misi masing-masing secara bergantian sesuai dengan nomor urut. Total durasi pada segmen pertama debat adalah 2 menit,” ujarnya.

Segmen kedua moderator melontarkan pernyataan sesuai tema dan meminta paslon menanggapi. Durasi jawaban masing-masing calon selama tiga menit.

“Nanti paslon akan mengambil amplop yang berisi pertanyaan dan paslon menjawab soal yang disusun tim. Ada tiga soal. Nilai soal mewakili topik yang ada, kata Salman. Kemudian, segmen tiga, moderator mempersilahkan calon wakil menanggapi kembali dan atau mengajukan pertanyaan pendalaman kepada calon wakil gubernur lainnya. Calon wakil gubernur nomor urut tiga bertanya kepada cawagub nomor urut 1 dan 2. Kemudian cawagub nomor urut 1 bertanya kepada cawagub nomor urut 2 dan 3. Kemudian selanjutnya.

Sementara segmen empat, nantinya moderator mempersilahkan kepada calon gubernur menanggapi kembali atau mengajukan pertanyaan pendalaman kepada calon gubernur yang lain. Cagub nomor urut 3 bertanya kepada Cagub nomor urut 1 dan 2. Kemudian masing-masing calon menjawab. Selanjutnya cagub urut 1 bertanya kepada Cagub urut 2,3. Kemudian cagub urut 3 bertanya kepada cagub urut 3 dan 1 dan masing-masing menjawab selama dua menit. Kemudian segmen lima masing-masing paslon dipersilahkan membuat pernyataan penutup. KPU Sulut sendiri telah menggelar Rakor membahas teknis dan jalannya debat serta model pertanyaan yang akan disusun. Baik tim penyusun dan KPU saling bertukar pikiran demi memantapkan rencana debat pertama yang dijadwalkan 5 November 2020. Disepakati, tim penyusun akan meramu soal debat kandidat sesi pertama disesuaikan dengan tema. “Materi materi debat akan dibedah oleh 9 orang tim penyusun. Semua pertanyaan akan siap paling lambat 4 November 2020,” terang Salman. (*)

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

Calon Berkualitas Terlihat di Debat

MANADO—Debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, Selasa (17/11) kemarin adalah yang terakhir. Didebat ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut ini, mengusung tema ‘Menuju



Sulut Aman dan Tertib yang Berkeadilan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya membicarakan terkait Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan dan Bebas Korupsi.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menerangkan, debat publik ketiga atau yang terakhir dalam rangkaian debat pilgub, pihaknya sebagai penyelenggara pemilihan memberikan apresiasi pada paslon yang telah menyampaikan visi dan misi. "Debat publik menjadi salah satu cara masyarakat mengenali calon mendengar visi dan misi serta program dari calon. Serta memutuskan pilihannya," ujar Ardiles. Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat Sulut yang menyaksikan debat tersebut diminta untuk datang ke TPS pada 9 Desember.

"Paslon sudah meyakinkan visi misi dan programnya. Masyarakatlah yang menentukan pilihannya," imbaunya. Ardiles juga meminta masyarakat tidak usah khawatir atau takut datang ke TPS. Oleh karena covid-19. "KPU telah mengatur regulasi pemungutan dan perhitungan suara yang ramah terhadap protokol pencegahan penyebaran covid-19," tuturnya. Seperti debat sebelumnya, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misi dan program di awal debat. Kemudian, moderator mengarahkan dengan mengambil pertanyaan yang telah disiapkan. Di sesi selanjutnya, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk saling tanya jawab.

Di akhir segmen, paslon nomor urut 1 CEP-SSL menyampaikan bahwa mereka datang untuk jadi solusi dan tak membawa masalah serta derita untuk warga. "Kami telah menyusun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan visi misi, komitmen kami tetap satu bagaimana menaikkan komoditi yang merupakan lambang kebanggaan jati diri Sulut yakni cengkih, kopra dan pala yang sepanjang sejarah," ungkap CEP-SSL sembari meminta maaf kepada paslon dan pendukung jika selama debat ada kata-

kata yang menyinggung atau tak berkenan. "Ini sebuah proses demokrasi dan politik sebagai tahapan pilkada yang harus sukseskan bersama," tambahnya.

Sementara, paslon nomor urut 2 VAP-HR mengatakan, akan berusaha agar bisa pimpin Sulut supaya maju sejahtera, diberkati untuk memberkati. "Saya akan jaga keamanan untuk investor yang datang di Sulut. Tetap berdoa kepada Tuhan," ungkap VAP. Dikatakan HR, Siapa pun yang akan pimpin Sulut merupakan tugas berat di tengah ancaman covid. "Kami tak miliki emas dan perak, kami punya kekurangan dan kelemahan sebagai manusia biasa. Tapi kami memiliki hati yang mau melayani masyarakat. Izinkanlah kami pimpin warga Sulut memasuki era baik menuju Sulut lebih baik," ucapnya.

Di akhir, paslon nomor urut 3, ODSK menyampaikan bahwa percepatan pembangunan selama 5 tahun sudah nyata. "Buahnya sudah terasa. Rasa nyaman dan aman, wujud nyata cerminan kerukunan," ujar OD. Strategi pemberantasan korupsi terus diadopsi, penegakan hukum terus menuai kagum. "Kami bekerja tanpa pandang bulu, bedakan apa lagi menganaktirikan. "Kami sadar rumah besar berdiri di atas fondasi keberagaman dan menyatu dalam ikatan komitmen Torang Samua Basudara Karena Torang Ciptaan Tuhan," tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Debat Perdana, Tiga Paslon Pamer Visi Misi

MANADO—Tiga pasangan calon Gubernur dan wakil telah melaksanakan debat publik perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, di Makatete Hill, Warembugan, Minahasa Kamis (05/11) sore.

Tiga paslon, yakni Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL), Vonny Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) serta



Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven) memaparkan visi dan misi, serta berdebat sesuai tema yang diusung KPU Sulut. Adapun tema yang diperdebatkan, yaitu Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, serta Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Masyarakat, Pencegahan Bencana Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Daerah.

Pada pemaparan tiga menit yang disediakan oleh moderator Reidy Sumual, pasangan CEP-SSL yang diusung Partai Golkar-PAN menyampaikan visi dan misi mereka adalah menciptakan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan.

“Selain itu, kualitas koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan ditingkatkan. Karena kedudukan gubernur dan wakil gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat. Harus jadi mediator, inisiator dan supervisor yang baik untuk daerah,” ungkap SSL.

Sementara pasangan VAP-HR yang diusung oleh Partai Nasdem menyampaikan gambaran visi dan misi mereka untuk mewujudkan kehidupan beriman dan takwa.

“Teori apapun yang dipakai untuk pembangunan, jika kehilangan jati diri dan iman, cita-cita itu tidak akan terpakai. Kami tegaskan, jika Tuhan kehendaki kami memimpin, walaupun latar belakang kami Kristiani, kami akan berdiri di atas kepentingan semua golongan agama,” tegas HR.

Pasangan Olly-Steven tampil berbeda. Tak hanya menyampaikan visi dan misi, paslon yang diusung PDIP ini ‘pamer’ kesuksesan mereka sebagai paslon incumbent. “Lima tahun pemimpin, banyak lompatan besar yang diambil. Cita-cita Trisakti terealisasi, kemiskinan berkurang, inflasi berkurang, pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi naik, pintu gerbang Asia Pasifik dibuka,” kata Olly bersemangat.

Ia mengajak masyarakat untuk memilih dirinya dan Steven untuk memimpin Sulut

periode yang kedua. “Mari sama-sama dukung Olly-Steven. Karena di era revolusi industri 4.0, kita punya sinergitas besar dengan pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin. Maka Sulut menjadi etalase Indonesia di kawasan Pasifik,” kata Olly lagi. Bahkan menurut dia, ke depan, pemerintahannya akan membangun human capital sebagai modal bersaing di era perdagangan bebas. Sekaligus mengembangkan karakter manusia yang unggul dan beriman.

“Di antaranya membangun Islamic dan Christian Center, serta agama lainnya. Mendorong sektor pertanian, perikanan, pembangunan bendungan kuil, pelabuhan laut di pulau-pulau, KEK, jalan lingkar, perluasan bandara dan pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh saat membawakan sambutan, mengingatkan para paslon agar dalam berdebat adalah sesuai tema yang diusung KPU.

“Silahkan berdebat sesuai tema. Bukan menjelek-jelekan, bukan menebar kebohongan atau berujar kebencian,” tandas Ardiles.(*)

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

PILGUB SULUT: Debat Kandidat Pertama Tepat Waktu, Ini Temanya

MANADO—Debat terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut akan digelar 5 November 2020. Kini, semua persiapan hampir rampung termasuk teknis dan skenario pelaksanaannya.

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi menuturkan debat kandidat pertama dimulai tepat waktu yakni pukul 15.30 WITA. Menurut Salman Saelangi, karena digelar pada sore hari dan direncanakan di luar ruangan, pihaknya berharap kerjasama dari semua pasangan calon hadir tepat waktu. “Sebab jika ada salah satu paslon belum hadir, kami tidak menunggu dan acara langsung dimulai,” terang Salman pada



Rapat Koordinasi KPU Sulut di NDC Hotel, Minggu (1/11/2020).

Dikatakan, debat pertama disiarkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Swasta Kawanua TV dan Radio Republik Indonesia (RRI). Selain itu, channel Youtube dan akun Facebook KPU Sulut ikut menyebarkan.

Sementara terkait tema debat adalah isu Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Bencana Alam, Pengembangan Wilayah, Infrastruktur Daerah serta Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Nanti di debat kedua dan ketiga temanya beda lagi,” katanya.

Untuk undangan, KPU Sulut mengikuti arahan pusat di mana debat memprioritaskan protokol kesehatan. Selain tiga paslon, dihadiri dua orang perwakilan Bawaslu, empat orang tim kampanye dan lima komisioner KPU.

“Durasi debat 120 menit. 30 menit untuk iklan layanan masyarakat,” tandasnya.*

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Kritik KPU Sulut, Sandra Rondonuwu Disarankan Baca Aturan, Jangan Asbun

MANADO—KPU Sulut menyayangkan kritik yang disampaikan Sandra Rondonuwu terhadap pelaksanaan Debat Kandidat Pemilihan Gubernur Sulut, Kamis (5/11/2020). Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi menyarankan Sandra Rondonuwu meluangkan waktu melihat aturan karena semua tahapan yang dilakukan KPU Sulut sesuai perintah Undang-undang. Sebagai tim kampanye kata Salman Saelangi, Sandra seharusnya mengerti dengan semua regulasi, khususnya pedoman teknis debat terbuka antar pasangan calon.

Pasalnya, kata Salman, sebelum debat kandidat KPU telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi (rakor) dengan mengundang pihak pasangan calon. Dalam rakor itu ada forum untuk menyepakati

hal-hal yang dilaksanakan dalam debat.

“Baik mekanisme, tata tertib dan rundown itu sudah dibicarakan di rakor bersama perwakilan paslon hadir. Masalahnya, setiap rakor orang yang dikirim paslon selalu berganti-ganti. Atau bisa jadi, perwakilan paslon atau LO tidak pernah menyampaikan hasil rakor kepada tim kampanyenya,” tegas Salman kepada BeritaManado.com, Jumat (6/1/2020).

Salman menilai statemen Sandra Rondonuwu tidak berdasar dan bias.

Apalagi sebagai pejabat publik, komentar Sandra dinilai kaku dan terkesan melemahkan penyelenggara pilkada.

“Debat kandidat ini bukan kemauan KPU, harus begini dan begitu. Sekali lagi, itu sudah disetujui dalam rakor. Otomatis menjadi keinginan paslon juga. Jadi jangan asbun (asal bunyi),” jelas Salman.

Selanjutnya, kata Salman, model pertanyaan antara calon gubernur maupun wakil gubernur, justru menjadi permintaan perwakilan paslon. Begitu pun dengan penentuan tema. “Dan berita acaranya ada. Skema debat sudah kami mufakatkan bersama,” katanya.

Soal jumlah undangan dalam debat, Salman kembali meminta Sandra membaca PKPU Nomor 13 tahun 2020 yang mengatur siapa saja bisa hadir dan instruksi memprioritaskan protokol kesehatan. “Sedikit membacalah, apalagi pejabat. Ini bukan kondisi normal, semua sudah ada payung hukumnya. Siapa saja mesti taat dengan Undang-undang,” tandasnya. Sekadar diketahui, Sandra Rondonuwu kini menjabat sebagai Koordinator Bidang Debat Paslon Nomor 3, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Selain sebagai legislator di DPRD Sulut, Sandra adalah Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, Bidang Hukum dan Politik.*

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*



Cek Fakta: CEP Janji Pelayanan Publik Terbaik, Tetapi Pernah Dapat Rapor Merah

MANADO—Christiany Eugenia Paruntu (CEP) akan mewujudkan kepemimpinan strategis hingga manajemen terbaik dalam pelayanan publik.

Misi itu disampaikan Christiany Paruntu pada debat Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Gubernur Sulut di Makatete Hills, Kabupaten Minahasa, Kamis (5/11/2020).

Debat ini diikuti tiga pasangan calon yakni Chistiany E Paruntu-Sehan Salim Landjar, Vonny Panambunan-Hendry Runtuwene dan Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Sayang, janji Paruntu ini sedikit berbeda dengan capaiannya saat menjadi Bupati Minahasa Selatan.

Data yang diperoleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulut, saat Tetty menjabat bupati, pelayanan publik di daerahnya pernah mendapat rapor merah dari Ombudsman RI Perwakilan Sulut pada Februari 2020.

Penilaian Ombudsman ini berasal dari 52 produk layanan. Minsel sendiri mendapat skor 31,14 alias tidak memuaskan. Bahkan ada SKPD hanya mendapat poin 5.*

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Ditanya Soal Stunting, VAP Tidak Tahu, Malah Jawab Covid-19

MANADO—Vonnie Anneke Panambunan (VAP) tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dalam Debat Kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut, Kamis (5/11/2020).

Christiany Paruntu bertanya soal penanganan stunting kepada dua pasangan calon lainnya jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun Vonnie Panambunan blak-blakan mengaku tidak mengerti.

“Apa itu stunting, saya tidak tahu,” tegas Vonnie. VAP malah mengalihkan jawaban

perihal penanganan Covid-19. “Pokoknya kita prioritaskan ini Covid, itu penting. Rakyat butuh itu,” kata VAP. Berbeda dengan VAP, Olly Dondokambey justru mantap menjawab pertanyaan ini. Olly menjelaskan stunting adalah persoalan panjang yang terus diperhatikan pemerintah.

Adapun program yang dilakukan diantaranya menyediakan makanan bergizi mulai dari sekolah, hingga pembangunan fasilitas kesehatan mumpuni hingga ke pedesaan. “Gizi kepada ibu dan anak adalah dasar pembangunan manusia. Sehingga ini mutlak dilakukan,” tandas Olly.*

Penerbit: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Debat Kedua, KPU Sulut Undang Perwakilan Disabilitas

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar debat publik tahap kedua, Kamis (11/11) di salah satu hotel di Minahasa. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, debat publik yang kedua ini mengambil tema kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.

“Di dalamnya berbicara ekonomi, industri, perdagangan dan teknologi, UMKM dan koperasi, gender, disabilitas dan anak,” ujarnya.

Dikatakan Mewoh, untuk mempertajam tema, KPU telah lakukan penyusunan materi yang disusun para ahli dan pakar di bidang masing-masing. “Kami juga mengundang perwakilan kelompok disabilitas. Sehubungan dengan tema kita,” tandasnya. Pihaknya berharap bahwa rakyat bisa saksikan visi misi program paslon yang dapat beri keyakinan bahwa pemimpin yang dipilih dapat membawa kesejahteraan.

“Silahkan berdebat dengan mengikuti segmen. Kami harap muncul dialektika politik dan bukan saja hanya seremonial kegiatan debat yang sifatnya formalitas. Masyarakat menantikan visi misi program untuk pastikan pilihan mereka pada 9



Desember mendatang,” tutupnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Debat Pilgub Kedua,

KPU Sulut Tampil Maksimal

MANADO—Debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung sukses. Digelar di Mercure Hotel Tateli, debat kali ini disiarkan TVRI nasional dan berlangsung pukul 20.00 Wita hingga 22.00 Wita. KPU juga merancang konsep debat kali ini sedikit berbeda dengan debat perdana.

“Kalau perdana di outdoor yang menonjolkan alam Sulut, debat kedua kita gelar di indoor. Kami pun merancangnya sedemikian rupa dan tampil elegan,” tutur komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, yang ditemui di lokasi debat. Yang tidak berbeda, lanjutnya, protokol kesehatan Covid-19 tetap diutamakan. Di mana penyelenggara membatasi peserta yang hadir di lokasi debat.

“Protokol kesehatan Covid-19 tetap menjadi yang utama. Kita menggelar debat sesuai dengan PKPU,” tegasnya.

Kemudian ketika membuka kegiatan ini, Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh memaparkan, debat yang dilaksanakan KPU mengambil tema kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan, (ekonomi, industri, perdagangan dan teknologi, UMKM dan koperasi, gender, disabilitas dan anak). “Untuk mempertajam tema yang kita tetapkan ini, KPU Sulut melakukan penyusunan materi oleh ahli dan pakar di bidang masing-masing. Terkait tema malam ini juga, kita mengundang perwakilan kelompok disabilitas,” ujar Mewoh.

Dia berharap, masyarakat Sulut bisa disajikan visi dan misi calon untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, bahwa calon yang dipilih membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulut. “Kami berharap muncul dialektika positif bukan

sekadar seremonial di debat calon. Karena masyarakat Sulut menantikan visi dan misi untuk memastikan mereka datang ke TPS pada 9 Desember mendatang,” kuncinya.(*)

Penulis: *Angel Rumeen*

Sumber: *ManadoPost*

Sukses Pimpin Debat Pilgub Sulut, Tengok Prestasi Debby Ribkah Wulur di Dunia Televisi

MANADO—Berhasilnya suatu acara, bergantung dari kepiawaian seorang presenter mengatur ritme suasana agar bisa dinikmati siapa saja. Jurus tersebut sepertinya sudah mantap dikuasai pembaca acara senior Debby Ribkah Wulur. Tadi malam Rabu (11/11/2020), Debby turut menjadi pilar penting suksesnya debat kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut putaran kedua.

Tenang dan adil, terlihat saat Debby menahkodai jalannya debat yang berlangsung sekitar dua jam itu.

Pengalaman menjadi moderator di debat kandidat sebenarnya bukanlah kali pertama.

Perempuan kelahiran 12 Desember 1975 ini juga pernah dipercaya dengan tugas serupa pada Pilkada Minut 2010 dan 2015. “Jadi tadi malam sudah ketiga kalinya,” ujar Debby kepada BeritaManado, Kamis (12/11/2020).

Bahagia, sudah pasti kata Debby. apalagi bisa berada diantara tokoh-tokoh penting dan berkesempatan mengontrol adu program diantara mereka.

“Pengalaman semakin bertambah dan pasti bahagia dengan kepercayaan ini,” ujarnya. Pengalaman Debby di dunia televisi patut diacungi jempol. Itu dimulai pada 1995 saat dirinya bergabung bersama TVRI Sulut.

Debby pun langsung mendapat kesempatan menempuh pendidikan sebagai pembawa acara televisi.

Prestasi yang pernah ditorehkan Debby Ribkah Wulur.



Tetapi, Ribka tidak sekadar berbakat sebagai pembawa acara. Singkat cerita, pada 2013 ia kembali dikirim TVRI mengenyam pengetahuan di bidang Program Director. Alhasil, kepintarannya menyusun suatu program TV membawa harum nama TVRI Sulut karena berhasil juara pertama pada program film anak.

“Jadi lomba internal yang dibuat TVRI Nasional itu dimenangi oleh kami TVRI Sulut. Dan kebetulan acara yang dilombakan saya sutradaranya,” kenangnya.

Modal itu membuat Debby dipercayakan TVRI Nasional ikut Asia Broadcasting Union (ABU). Suatu kompetisi internasional yang sangat bergengsi. “Semuanya karena kemurahan Tuhan, dan pastinya dukungan keluarga dan tim kerja,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

CEK FAKTA: Vonnie Panambunan Sebut Sulut Peringkat 32 Bidang Pendidikan, Apa Benar?

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar debat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahap kedua di Hotel Mecure, Tateli, Minahasa, Sulut, Rabu (11/11/2020). Tiga paslon yang tampil adalah Cristiany E Paruntu-Sehan S Landjar, Vonnie A Panambunan-Hendry Runtuwene dan Olly Dondokambey-Steven O Kandouw.

Dalam sesi debat itu, Vonnie mengatakan, Sulut berada di peringkat 32 untuk kualitas pendidikan di Indonesia.

Atau berada di nomor dua terbelakang dari 34 provinsi di Indonesia. “Sulut berada di nomor dua dari belakang untuk kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Vonnie. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, hasil Ujian Nasional (UN) SMA/SMK tahun 2019, Sulawesi Utara berada di deretan terbawah nasional.

Untuk SMA di urutan 32 dari 34 provinsi, sementara SMK di peringkat 31 atau ketiga terbawah nasional.

Menanggapi pernyataan Vonnie, Cagub Steven O Kandouw mengatakan, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari nilai lulusan siswa SMA dan SMK. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

“Apalagi saat ini UN sudah dihapus,” ujar Kandouw.

Menanggapi hal ini, akademisi dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Manado (Unima) di Tondano Dr Aldjon Dapa mengatakan, tingkat pendidikan artinya indikator penilaian mutu pendidikan berlaku bagi semua jenjang mulai dari Pendidikan Anau Usia Dini (PAUD) hingga SMA dan SMK.

“Ada 8 indikator penilaian kualitas atau mutu pendidikan,” ujar Aldjon.

Delapan indikator pendidikan itu adalah kompetensi lulusan, isi pendidikan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan serta pembiayaan pendidikan.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

CEP-SSL Singgung Harga Kopra, VAP-HR Ingin Sejahterakan 15 Daerah, Olly-Steven Pamer Capaian

MANADO—Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Cristiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) menyinggung besaran harga kopra di sesi pertama Debat Kandidat Pilgub putaran kedua, Rabu (11/11/2020). Dalam visi-misi CEP-SSL yang diawali lewat video, pasangan nomor 1 ini menggambarkan anjloknya harga kopra sehingga membuat petani mengeluh.

Di sesi ini, CEP-SSL menyampaikan beberapa keinginan antara lain mengentaskan kemiskinan, pembangunan infrastruktur adil dan menciptakan pemerintahan semakin baik.

Sementara Paslon Nomor 2 Vonnie



Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) berkerinduan menyejahterakan 15 kabupaten/kota dengan konsep kebersamaan. “Mari jadikan daerah ini diberkati untuk memberkati,” kata Vonnie Anneke Panambunan.

Paslon nomor 3 Olly Dondokambey-Steven Kandouw memaparkan keunggulan selama menjabat. Berbagai capaian disampaikan Olly Dondokambey berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Olly juga menyebut harga kopra kini menyentuh angka Rp 10.100 per kilogram.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Malam Ini Debat Pilgub Kedua, Siapa Bakal Unggul? Begini Jawaban Pengamat

MANADO—Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut putaran dua digelar malam ini. Sesuai jadwal dari KPU Sulut, adu program ketiga pasangan calon (paslon) dimulai pada Pukul 20.00 Wita.

Berbeda dengan sebelumnya, debat kali ini akan dipancarluaskan oleh TVRI Nasional dan tentu saja RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Channel Youtube dan akun Facebook KPU Sulut ikut menyiarkan sehingga warga bisa menyaksikan asal bermodalkan telepon pintar.

Di debat kedua, tema yang diambil adalah Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Industri, Pendidikan, Perdagangan dan Teknologi, UMKM dan Koperasi, Gender, Disabilitas dan Anak. Selain itu, jalannya debat dipandu moderator cantik Debby Ribkah Wullur.

Lantas siapa bakal menonjol dengan tema tersebut?

Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando mengatakan publik tidak akan menilai mana yang unggul. Menurut Ferry Liando, yang mampu memberikan alternatif dan solusi rasional,

dialah berpotensi mendapat apresiasi.

“Terkecuali jika pertanyaannya bersifat matematis atau benar-salah. Paslon betul pasti unggul. Tapi pertanyaan dalam debat bukan soal itu, melainkan isu-isu pemerintahan dan kemasyarakatan,” kata Liando kepada BeritaManado.com, Rabu (11/11/2020). Ferry menegaskan, berbagai persoalan di masyarakat harus dicarikan jalan keluar. “Dan sekali lagi harus logis bukan tiruan atau copy paste,” tegasnya.

Liando berharap jawaban dalam debat sebentar tidak mengawang apalagi berasumsi. “Harus ada inovasi dan kreasi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu,” tandasnya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Steven Kandouw: Tidak Ada Anak Emas, Semua Sama

MANADO—Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw membantah jika ada daerah yang dispesialkan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Steven Kandouw pada Debat Kandidat Pilgub Sulut, Selasa malam (17/11/2020). “Tidak ada yang dianakemaskan. Semua sama,” tegas Kandouw.

Ia mencontohkan bantuan Covid-19 dan jejaring pengaman sosial yang sudah teridentifikasi dengan baik.

“Kami menyalurkan sesuai data di lapangan, by name by address,” ujarnya. Dikatakan, selama memimpin bersama Olly Dondokambey, Pemprov Sulut memang lebih memprioritaskan bantuan bagi daerah membutuhkan di wilayah terluar. Sayang, tambah Steven, justru ada kabupaten/kota kurang serius memanfaatkan bantuan bahkan tidak jelas dalam proses pertanggungjawabannya.(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Christiany Paruntu-Sehan Landjar



Janjikan Ini kepada Nelayan

MANADO—Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) akan memberikan perhatian penuh kepada masyarakat nelayan jika terpilih memimpin Sulut. Pada Debat Kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut, Selasa malam (17/11/2020), pasangan nomor urut 1 ini berkomitmen memberikan kemudahan bagi nelayan dalam pengurusan surat izin.

“Tidak perlu lari ke provinsi, di kabupaten/kota akan kita buka proses perizinan untuk jenis tangkapan ikan tertentu,” kata Sehan Landjar.

Selain itu, memberdayakan masyarakat agar fokus menjaga mangrove menjadi agenda CEP-SSL jika mendapat amanah rakyat. “Bahkan kami sudah menyusun program terkait pembangunan rumah layak huni bagi semua warga di pesisir pantai,” tandasnya.*

Penerbit: Alfrits Semen

Sumber: *BeritaManado.com*

CEK FAKTA: Vonnie Panambunan Terapkan ‘The Right Man on The Right Job’

MANADO—Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut putaran tiga, Selasa (17/11/2020) kembali mempertemukan para paslon yaitu Christiany Paruntu-Sehan Landjar, Vonnie Panambunan-Hendry Runtuwene, serta Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Pada sesi kedua, Calon Gubernur Vonnie Panambunan mengatakan akan menempatkan pejabat sesuai latar belakang keahliannya (The Right Man on The Right Job).

“Jadi saya jadi gubernur nanti tentunya saya harus awasi benar-benar. Kalau buat saya itu tidak mungkin saya ambil orang yang notabene adalah saudara saya ataupun keponakan ataupun sepupu saya sayang. Harus orang yang benar-benar

bertanggung jawab misalnya saya kasih Kepala Dinas Pendidikan dia harus dari asalnya seorang misalnya kepala sekolah ataupun yang memang dia berasal dari pendidikan,” ujar Vonnie.

CEK FAKTA: Kepemimpinan Vonnie Panambunan sebagai Bupati Minut (periode 2015-2020), mencatat sejumlah pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ini Sejumlah Latar Belakang Pejabat Pemkab Minut

Diantaranya:

Sekretaris DPRD Minut: dr Harley Sompotan (2017 -2018)

Kepala Dinas Kesehatan: Robby Parengkuan SH (menjabat selama 2 minggu tahun 2019)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum: Drs Yosi Kawengian (2017-2018)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum: Bobby Nayoan SH (2020 – skrg)

Kepala Dinas Pariwisata: dr Sandra Rotty (2019-mundur)

Kepala Dinas Pendidikan: dr Lily Lengkong (Jan 2017 – Oktober 2017)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum: Royke Kodoati SIP (2018).

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

CEK FAKTA: Vonnie Panambunan Klaim Tidak Angkat Keluarga Jadi Pejabat, Faktanya..

MANADO—Calon Gubernur nomor urut 2 Vonnie Anneke Panambunan mengklaim tidak mengangkat keluarga sebagai pejabat di daerah. “Tidak mungkin saya ambil orang yang notabene adalah saudara saya ataupun keponakan ataupun sepupu saya sayang. Harus orang yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar Vonnie dalam Debat Publik putaran ketiga yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Selasa (17/11/2020).



CEK FAKTA: Ternyata, beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) merupakan kerabat dekat Vonnie Panambunan selaku bupati setempat. Diantaranya, Estrella Tacoh, sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (PUD) Klabat berstatus menantu dari Vonnie Panambunan, Roy Wenas sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Robin Panambunan selalu Kabid Aset, berstatus keponakan Bupati Vonnie.

Ketiga pejabat tersebut hingga kini berstatus aktif dalam jabatannya. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

CEP-SSL Ingin Perkuat Ekonomi, VAP-HR Wujudkan Iman dan Taqwa, ODSK Butuh 10 Tahun

MANADO—Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) akan mewujudkan masyarakat sehat, berkarakter dan berdaya saing.

Visi ini disampaikan pasangan CEP-SSL pada sesi pertama Debat Kandidat Pilgub ketiga malam ini, Selasa (17/11/2020). Christiany Paruntu juga berjanji memperkuat ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan di semua kabupaten/kota di Sulut.

“Kami akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi,” kata Paruntu.

Selain itu, paslon nomor 1 berkomitmen membuat pemerintahan jujur, profesional dan transparan.

Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) ingin membuat Sulut semakin maju dan sejahtera.

Untuk mewujudkan itu, Hendry Runtuwene mengatakan perlu satu misi dan kerja sama semua pihak.

VAP – HR memiliki keinginan menciptakan

masyarakat beriman dan bertaqwa.

“Tanpa iman dan taqwa, cita-cita menjadi mustahil,” katanya.

Paslon nomor 2 ini turut berjanji melahirkan pemimpin berintegritas dan membawa tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk. Sementara Paslon nomor 3 Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) mengatakan perlu waktu 10 tahun menuntaskan pembangunan yang sudah dilakukan di berbagai sektor.

“Makanya kami berdua memberanikan diri maju kembali. Perlu lima tahun lagi agar bisa merampungkan semuanya,” kata Olly Dondokambey. Selama memimpin Sulut, Olly mengklaim telah membuat lompatan besar karena telah merealisasikan berbagai fasilitas publik yang diperlukan masyarakat.

“Dan ini akan dilakukan berkelanjutan jika diberikan kesempatan sekali lagi,” tandasnya. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Debat Pilgub Terakhir, KPU Lebih Siap

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hari ini akan menggelar debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, pukul 20.00-22.00 Wita, dengan tema ‘Menuju Sulut Aman dan Tertib yang Berkeadilan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan dan Bebas Korupsi. Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi memastikan sebagai penyelenggara KPU Sulut sangat siap menggelar salah satu tahapan pilkada ini. “Ada beberapa evaluasi dari pelaksanaan debat sesi satu dan dua yang menjadi perhatian khusus kami. Pasti akan ditindaklanjuti,” tegas Saelangi.

Dia melanjutkan, protokol Covid-19 tetap akan diberlakukan. Di antaranya pembatasan peserta debat di ruangan, serta pemakaian alat pelindung diri, di antaranya masker. Diapun berharap pelaksanaan



debat hari ini menyajikan dialektika politik. “Karena masyarakat menantikan visi, misi, dan program untuk pastikan pilihan 9 Desember mendatang,” tuturnya. Diri mengajak masyarakat Sulut menyaksikan visi dan misi program paslon untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan siapa yang akan dipilih nanti.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menuturkan, sejauh ini debat sesi I dan sesi II sudah berjalan lancar. Namun ada beberapa sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. “Terutama mengenai siapa yang hadir di debat. Karenakan yang hadir pasangan calon dan tim kampanye. Karena debat ini bagian dari kampanye,” tukasnya. Dia mencontohkan kehadiran bupati/wali kota, dan anggota DPRD yang hadir. “Asal dalam posisi izin cuti kampanye, tidak masalah. Kami harapkan KPU melakukan verifikasi administrasi,” sebut Malonda. Bawaslu juga memberikan rekomendasi terkait ruang transit. “Harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan ada yang bergerombol,” tegasnya. Diapun mengingatkan mengenai ruangan yang harus disemprot disinfektan. “Memastikan

protokol kesehatan untuk memberikan kenyamanan pada peserta debat,” tambahnya.

Terkait teknis debat, Malonda meminta masing-masing paslon diberikan porsi yang sama. “Kalau 3 menit, ya 3 menit semua. Jangan ada yang 3 menit lewat berapa detik,” imbaunya. Malonda berharap tujuan debat dalam menyebarkan visi dan misi serta program kerja pasangan calon. “Memberikan informasi pada pemilih dan menggali visi dan misi paslon lain yang dikaitkan dengan tema debat,” tandas Malonda.*

Penulis: *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

Debat Pamungkas, Olly-Steven Singgung Masalah Hukum di Minut dan Minsel

MANADO—Masalah Pemerintahan, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan

dan Bebas Korupsi., menjadi tema pada pelaksanaan debat publik ‘pamungkas’ tahap III yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, di Grand Kawanua Hotel, Selasa (17/11) kemarin.

Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Landjar (1), Vonny Panambunan-Hendry Runtuwene (2) dan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (3) dengan lugas memberikan pandangan-pandangan terkait visi misi dalam tema debat tersebut.

Dalam debat terakhir yang disiarkan secara langsung Kompas TV dan dipandu Liviana Chelisa itu semakin seru ketika sesi tanya jawab berlangsung. Masing-masing paslon pun saling melemparkan pertanyaan kepada paslon lainnya.

Pasangan nomor urut tiga Olly Dondokambey-Steven Kandouw mempertanyakan komitmen pasangan nomor urut 1 dan 2 terkait supremasi hukum. Pertanyaan yang disampaikan calon wakil Gubernur Steven Kandouw menyinggung soal masalah hukum sejumlah pejabat di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan .

“Dalam tahapan Pilkada masing-masing paslon sudah melakukan penandatanganan pakta integritas. Sementara kita tahu persis di Minsel dan Minut lima tahun belakangan ada kepala dinas SKPD yang tersangkut masalah hukum. Di Minsel ada 8 kepala SKPD yang terjerat hukum dan dipenjara. Apa jaminan agar kejadian di Minsel dan Minut tidak terulang lagi?

Pertanyaan yang dilontarkan itu diklarifikasi calon gubernur CEP yang kebetulan mendapatkan kesempatan pertama menjawab pertanyaan paslon Olly-Steven. Menurut Bupati Minsel itu, yang menjadi penyebab kasus korupsi sejumlah pejabat di Minsel karena masalah manajemen SKPD yang berjalan tidak baik.

“Ada beberapa pejabat di masa 10 tahun terakhir berurusan dengan hukum, Persoalan itu karena manajemen SKPD itu



yang tidak baik dan persoalan hukum itu jadi tanggung jawab mereka (kepala dinas),” kata CEP.

Kasus sejumlah pejabat itu seolah jadi tantangan bagi paslon CEP-Sehan untuk jadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan pencegah korupsi dan siap memilih atau mengangkat calon kepala dinas (SKPD) melalui merit sistem.

“Nantinya jika terpilih saya memprioritaskan bagaimana melakukan kerja sama dengan KPK dalam hal penanganan korupsi pada setiap ASN. Ada mekanisme merit sistem dan perekrutmen dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan taat aturan. Itu yang akan kami lakukan untuk mencegah korupsi ke depan. Khusus Minsel persoalan hukum sudah selesai dan sudah menyerahkan persoalan itu ke aparat hukum dan saat ini tidak ada lagi pejabat yang terseret hukum karena mereka sudah taat aturan,” kata CEP.

Sementara itu, terkait sejumlah kepala dinas di Minahasa Utara yang di jeblos ke penjara karena kasus korupsi. Menurut Vonny Panambunan itu karena kebodohan ‘sang’ kepala SKPD tersebut. “Itu karena kadis pe bodok sendiri. Itu kan uang APBN. Saya bupati hanya mengawasi. Uang keluar masuk itu urusan Kepala dinas. Kenapa hal itu terjadi karena mereka menginginkan saya juga masuk penjara padahal beliau (Kepala Badan Bencana Alam) yang pakai itu uang. Padahal saya waktu itu sudah kasih tahu, hati-hati karena uang masuk langsung ke rekening sendiri di badan pengelolaan bencana. Tapi itu juga karena politik mereka ingin saja juga masuk penjara. Namun Tuhan itu baik,” jawab VAP.

Ia pun berjanji jika terpilih jadi Gubernur tidak akan melakukan korupsi dan siap mengawasi kepala SKDP. “Saya janji tidak akan korupsi. Saya tulus memimpin daerah ini untuk rakyat. Tidak ada pilih kasih,” kata VAP. “Kami mencita-citakan Sulut yang bebas KKN. Dalam kepemimpinan kami akan mengedepankan transparansi, meningkatkan dan mengandalkan birokrat yang bersih dan berwibawa dan siap

menerapkan reward and punishment,” tambah Cawagub Hendry Runtuwene.

Tuntas mengklarifikasi, paslon Cawagub Steven Kandouw diberikan kesempatan menanggapi pernyataan jawaban dari dua paslon tersebut. “Intinya ini soal integritas kepala daerah,” kata Steven.

Debat publik ini dimulai dengan pembacaan visi dan misi terkait tema debat, paslon nomor urut 1 CEP-Sehan siap meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, profesional dan transparan. “Visi kami bagaimana mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, berkarakter dan berdaya saing.

Membangun ekonomi kerakyatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi berlandaskan pemerataan pembangunan,” kata Paruntu, saat menyampaikan visi dan misinya. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, VAP-Hendry menekankan membangun Sulut lebih baru, aman, dan sejahtera. “Untuk mencapai visi ini, maka diperlukan suatu misi untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, misi kami bagaimana mencapai Sulut baru, aman dan sejahtera, Modal dasar utama adalah, mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Mewujudkan kehidupan masyarakat dan pemimpin yang berintegritas.

Kemudian paslon nomor urut 3 Olly-Steven dalam penyampaian visi misinya tidak lepas dari visi misi mereka 5 tahun lalu, yakni berkari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. “Lima tahun pemerintahan Olly-Steven sudah lakukan banyak hal dan masih ada hal-hal yang belum tuntas. Lima tahun sangat singkat dan perlu 10 tahun lagi, agar masyarakat mendapatkan pembangunan yang seutuhnya. Kami terus berupaya membuat lompatan besar dalam lima tahun ke depan,” ucap Olly.

Dalam sesi menjawab pertanyaan pasangan nomor urut 3 (Olly-Steven) berjanji tetap menjaga kerukunan antar umat beragama di Sulut. Bahkan pasangan ini



telah menjadikan Sulut sebagai laboratorium kerukunan.(*)

Penulis: *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

Luangkan Waktu Anda, Lihat Program Calon Pemimpinmu di Debat Pilgub Sulut Malam Ini

MANADO—Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara putaran tiga digelar sebentar malam. Ini adalah agenda terakhir debat kandidat di masa kampanye sebelum memasuki minggu tenang. Warga Sulut berkesempatan menyaksikan kembali program-program para calon pemimpinnya sebelum mantap menjatuhkan pilihan pada 9 Desember nanti.

Dijadwalkan, debat kandidat dimulai pukul 20.00 Wita. Giliran Kompas TV berkesempatan menyiarkan secara nasional jalannya debat sekitar dua jam tersebut. Sementara Presenter cantik Liviana Cherlisa dipastikan memandu adu visi antara tiga pasangan calon.

Warga yang sedang beraktivitas, juga bisa meluangkan waktu melihat debat lewat telepon pintar berbasis android. Debat kandidat juga disebarluaskan lewat akun Facebook dan channel Youtube milik KPU Sulut.

Bagi masyarakat pedesaan dengan keterbatasan sarana, dapat mengakses melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Debat Pilgub ketiga mengambil tema ‘Menuju Sulawesi Utara Aman dan Tertib yang Berkeadilan Dalam Bingkai NKRI (Pemerintah Daerah, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan dan Bebas Korupsi).(*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Masyarakat Bolmong Raya Tambah Solid Dukung Olly Dondokambey-Steven Kandouw

BOLMONG—Dukungan masyarakat

Bolaang Mongondouw (Bolmong) Raya untuk pasangan nomor urut 3, Olly Dondokambey-Steven Kandouw semakin solid mendekati hari pencoblosan Pilkada Sulawesi Utara pada 9 Desember 2020. Bahkan, dalam dua hari di Bolmong Raya, Olly-Steven selalu didampingi oleh para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pimpinan daerah.

Ini menunjukkan adanya keselarasan visi-misi dalam membangun Sulawesi Utara dan Bolaang Mongondow Raya ke depan. “Saya dan Steven merasa sangat bahagia, karena didampingi oleh tokoh-tokoh Bolaang Mongondow Raya,” ujar Olly saat pelantikan serentak seluruh relawan Olly-Steven Dumoga Raya Hebat di Kelurahan Imandi, Dumoga Timur, Kamis (26/11/2020)

Selama dua hari blusukan di Bolmong, warga tampak berjubel di sejumlah lokasi yang didatangi Olly dan Steven. Kedatangan mereka memang selalu didampingi para tokoh, diantaranya Bupati Bolaang Mongondow Yasti S. Mokoagow, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanny Ronny Tuuk, Anggota DPR Herson Mayulu, Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor, para tokoh Bolmong, Firasat Mokodompit, Hamdi Papatungan serta pemuka agama, dan aktivis LSM.

“Kita semua sudah bersatu, semua bahu-bahu bae. Cuma ada satu tujuan bagaimana membawa masyarakat Bolaang Mongondow Raya ini tambah hebat, tambah maju, dan tambah sejahtera,” kata Olly.

Pada kesempatan itu, Olly menyinggung wacana pemekaran daerah Bolaang Mongondouw Raya menjadi provinsi. Bahkan dukungan dari masyarakat Bolmong Raya kepada Olly-Steven juga dalam rangka mempersiapkan Bolaang Mongondow Raya menjadi provinsi yang posisi saat ini masih menunggu dicabutnya moratorium pemekaran wilayah oleh Presiden.

Olly juga mengingatkan bahwa Bolaang Mongondow akan menjadi wilayah ekonomi maju dengan dibukanya Kawasan Industri



Mongondow, yang dapat menyerap lebih dari 200 ribu orang tenaga kerja.

“Semua ini boleh terjadi kalau kita semua bersatu. Maka pada tanggal 9 Desember memilih nomor 3. Sebaliknya, hal tersebut tidak akan terlaksana jika tanggal 9 Desember tidak memilih nomor 3, inilah kesempatan berikan dukungan bagi kami,” jelas Olly.

Bahkan Olly berharap dapat menang dengan perolehan suara yang besar, sehingga pemerintah pusat semakin percaya bahwa masyarakat Sulawesi Utara kompak mendukung Pemerintahannya.

Tugas pemimpin, kata Olly, haruslah terus berupaya agar seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan.

Karena itu, pemerintahan Olly Steven kedepan akan bekerja agar tidak boleh ada satupun anak yang lahir stunting.

Tidak ada satupun orang yang tidak terlayani pendidikannya, dan tidak ada satupun masyarakat tidak terlayani kesehatannya, serta tidak ada satupun yang tidak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan layak.

“Inilah kewajiban dasar dari pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Torang Samua Ciptaan Tuhan,” tandas Olly. Pada hari kedua di Bolmong Raya, Olly Steven juga bertemu dengan para petani di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur.

Kemudian bersilahturahmi dengan Kepala Desa dan Warga Masyarakat di Desa Insil di Passi Timur.

Pertemuan dengan petani dan perangkat desa itu dilakukan setelah pengukuhan Tim Independen Pemenangan ODSK Bolaang Mongondow di Resto Lembah Bening, Kotamobagu, dan Laskar OD Bolaang Mongondow Raya di Kotabangon, Kotamobagu. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KAMPANYE PILGUB: Sambutan Kemenangan Olly Dondokambey di Tanah Minsel

MINSEL—Pendukung Olly Steven- Steven Kandouw membludak menyambut kedatangan Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey saat menghadiri undangan gereja maupun kunjungan ke sejumlah desa dan posko pemenangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Diketahui, Olly Dondokambey secara maraton mengunjungi Minsel selama tiga hari, Jumat-Minggu, (20-22/11/2020).

Olly datang ke Minsel menggunakan helikopter dan dijemput semangat oleh warga. Sambutan laksana selebrasi kemenangan itu mengakibatkan kemacetan di sejumlah jalan utama. Masyarakat terlihat rindu dengan kehadiran sosok Olly yang dikenal sebagai pemimpin rakyat. “ODSK Menang, Olly Steven metal, menang total di Minsel, torang solid menang,” teriak sejumlah anak muda berkaos Olly-Steven.

“Terima kasih, terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf karena protokol covid dan sudah diatur oleh KPU torang nda boleh kampanye mengumpulkan massa. Jadi saya kemari hanya menghadiri undangan gereja dan pelantikan tim pemenangan mohon pengertian samua neh,” kata Olly menjawab sambutan masyarakat.

Pada hari pertama di Minsel, Olly dan rombongan mendarat di Desa Makaaruyen, Kecamatan Modoinding.

Ia meresmikan Posko Pemenangan ODSK FDY PYR Makaaruyen. Setelah itu, Olly menghadiri peresmian dan pentahbisan rumah pastori Jemaat GMIM Kalvari Kinaweruan Wilayah Tompasobaru Dua.

Selanjutnya, pentahbisan Kantor Jemaat GMIM Musafir Tumani dan Peletakan Batu Pertama Menara Gereja.

Saat keluar dari gereja massa sudah meluber di hampir semua sisi jalan sehingga butuh waktu bagi Olly dan rombongan untuk bergerak.



Olly juga hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penghijauan Gunung Lolombulan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dirangkaikan peresmian rumah pemenang ODSK-PYR dan pengukuhan tim di Pakuure, Kecamatan Tenga. Pada Sabtu, massa semakin bertambah ketika Olly hadir di Desa Wangra, dan Kelurahan Tumpaan 1, Kecamatan Tumpaan.

Olly hadir pada ibadah syukur HUT ke-20 Jemaat GMIM Kalvari Wangra Wilayah Motoling Timur. Usai itu, tampak kumpulan massa mengenakan baju merah tak terbendung melakukan konvoi di sepanjang jalan, lengkap dengan atribut dan bendera PDI Perjuangan. Uniknya, saat Olly berpindah tempat menggunakan kendaraan mobil, tampak yang menjadi sopir adalah bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap yang juga politisi PDI Perjuangan.

“Kita tahu jalan dan tahu persis harapan dan keinginan rakyat Minsel, makanya kita yang jadi sopir jo hehe,” tutur James yang dikenal sebagai putra Modounding.

Kunjungan pada hari ketiga, masyarakat Minahasa terus berdatangan dan bertemu Olly Dondokambey.

Olly hadir pada ibadah syukur di Jemaat GMIM Kanaan, Boyong Atas, Tenga, dilanjutkan di Jemaat GMIM Exodus, Ongkaw 3.

Ikut mendampingi anggota DPRD Provinsi dari PDI Perjuangan, Rocky Wowor dan Sandra Rondonuwu serta pasangan capung Minsel dari PDIP yakni Frangky D Wongkar dan Petra Y Rembang.

“Kita bersyukur karena di tengah pandemi Covid-19, kita diberikan Kesehatan yang baik. Kita berdoa semoga pandemi ini berlalu,” ungkap Olly.

Calon Gubernur petahana Sulawesi Utara ini juga mengajak masyarakat tetap disiplin menaati protokol kesehatan.

“Torang masih mo melanjutkan pembangunan lima tahun ke depan agar Sulut tambah hebat lagi,” beber Olly.

Menariknya saat berada di Gereja GMIM Exodus Ongkaw, ada persembahan lagu yang dilantunkan oleh sejumlah ibu-ibu muslimah.

Lagu bertema toleransi ‘Alangkah Bahagiannya hidup rukun dan damai’ mengalun merdu dan membuat Olly terkesima dan spontan langsung mengabadikan lewat kamera ponselnya.

“Ini adalah wujud nyata kerukunan dan toleransi kita di Sulut, mari torang terus rawat kebersamaan ini,” kata Olly. Sementara Koordinator Tim Pemenangan Olly-Steven Wilayah Minahasa Selatan dan Minahasa Utara, Sandra Rondonuwu menuturkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Olly adalah bukti nyata bahwa dukungan masyarakat Minahasa Selatan terhadap Olly-Steven semakin besar.

“Seiring pemahaman masyarakat bahwa Olly-Steven adalah pemimpin yang sudah banyak memberi bukti sehingga tinggal melanjutkan lebih hebat,” jelas Sandra.

Wanita yang akrab disapa Saron ini menjelaskan, dukungan untuk Olly-Steven hampir merata di semua kecamatan di Minahasa Selatan. Saron yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik DPD PDI Perjuangan menilai ada ikatan emosional yang kuat ketika pemimpin merakyat bertemu dengan pendukungnya.

“Maka terpancar semacam optimisme dan rasa kebersamaan dalam memajukan Sulawesi Utara. Maka kita semua bersama masyarakat solid mendukung Olly-Steven nomor urut 3 pada 9 Desember nanti,” tandasnya. (*)

Penerbit: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Milenial MPV Ranomuut Komit Dukung VAP-Hendry di Pilkada Sulut 2020

MANADO—Pasangan calon (paslon) gubener dan wakil gubener Sulut, Vonnie Anneke Panambunan dan Hendry Runtuwene (VAP-Hendry) berlangsung lancar di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan

Paal Dua, Manado, Jumat (23/10/20).

Pasangan nomor urut 2 disambut yel-yel kemenangan saat bertandang di markas MPV.

Dikeempatan itu, VAP -Hendry ikut melantik kepengurusan MPV diwarnai dengan penandatanganan baliho tertera lambang MPV yang terpampang di Posko pemenangan.

Ketua milenial MPV Junius Kaligis didampingi Korwil Amang Sanggasi serta Koordinator umum Irvan Tang sepakat memberikan dukungan penuh untuk kemenangan VAP-Hendry dalam Pilkada Sulut 9 Desember 2020.

Tak heran VAP-Hendry mengapresiasi sikap dan kepedulian kelompok milenial



Epilog

MASA kampanye di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 tampil beda. Jarang (tetap ada) konvoi kendaraan membawa panji partai atau gambar diri calon. Kampanye yang melibatkan banyak peserta ditiadakan. Namun tetap saja ada calon yang kumabal.

Kampanye di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 memaksa para calon berkreasi.

Menggunakan teknologi digital untuk menggaet pemilih. Alasan utama kenapa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 berbeda adalah untuk menghindari atau meminimalisasi kluster pilkada. Sebagai penyelenggara, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama stakeholder mendorong peserta memanfaatkan media sosial. Untuk mengenalkan diri dan menjual program serta visi juga misi.

KPU Sulut mengakui jika kampanye dibutuhkan untuk menjabarkan visi dan misi calon ke masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan kampanye tetap akan menjadi salah satu tahapan pada Pilkada serentak 2020 ini.

Meski begitu dilakukan pembatasan peserta yang mengikuti pertemuan atau rapat tertutup. Balita, anak, ibu hamil atau menyusui dan lanjut usia dilarang ikut dalam kampanye calon kepala daerah. Termasuk wajib memperhatikan protokol Covid-19.

Kampanye calon kepala daerah juga memanfaatkan media sosial alias 'dunia maya'. Sayangnya, banyak juga APK dalam bentuk poster dipajang di tempat tak semestinya. Di antaranya di pepohonan. Caranya dengan dipaku dan terlihat di sepanjang jalan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan warga.



Bagaimana dana kampanye? Walaupun ada begitu pembatasan, KPU tetap tegas dengan laporan dana kampanye. Di mana ada sanksi yang jelas jika dana kampanye tidak dilaporkan ke KPU. Bahkan KPU dengan berani mengeluarkan pernyataan siap membatalkan pasangan calon yang maju di Pilkada, meski pasangan calon tersebut sudah berkampanye, jika tak laporkan dana kampanye.

KPU sebagai penyelenggara pun berusaha memanfaatkan teknologi dalam menggelar debat calon. Tiga kali pelaksanaan debat, membuat penyelenggara putar otak. Bagaimana masyarakat tetap bisa mengenal calon, mengetahui visi dan misi serta program, di sisi lain tetap mengutamakan protokol kesehatan. Karena prinsipnya, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 tetap berjalan, namun kesehatan juga diutamakan.

Memang masyarakat hingga para calon, termasuk penyelenggara belum terbiasa dengan sistem kampanye ala Covid-19. Semua serba hati-hati. Karena penyelenggara dibayangkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020. Maka disiapkan sanksi-sanksi, jika ada calon yang berani-berani melaksanakan kampanye tatap muka melibatkan banyak orang. Meski pada realisasinya tetap ada saja kegiatan pesertanya melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan penyelenggara, namun tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 di bawah pengawalan KPU Provinsi Sulawesi Utara tetap berjalan baik. Tanpa ada intrik berarti. (*)

Penulis : *Anita Angel*
Diterbitkan : *Manado Post*



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab VI

Distribusi Logistik





Distribusi Logistik

MPV dalam memberikan dukungan bagi pasangan nomor urut 2. “Saya salut dengan keputusan kalian. Teruslah bekerja memperjuangkan kemenangan VAP-Hendry. Kemenangan VAP-Hendry adalah kemenangan untuk masyarakat Sulut,” ujar VAP usai membeberkan visi-misi di hadapan masyarakat setempat.

Dalam kampanye terbatas, VAP-Hendry turut menerapkan protokol covid-19. “Kami imbau kita semua tetap menerapkan protap kesehatan dalam setiap aktivitas. Hal ini penting bagi kita semua dalam rangka mewaspadaai terjangkitnya virus corona,” tambah Cawagub Hendry Runtuwene.

“Kami kelompok anak muda, siap bertarung menjadikan VAP-Hendry pemimpin Sulut periode mendatang,” terang Junius Kaligis diiyakan Amang Sanggasi maupun Irvan Tang. (*)

Penulis : Dewi S

Sumber : *Sulut Times*

VAP Ajak Pedagang di Bolmut Jalankan Prokes

BOROKO – Usai menggelar agenda kampanye terbatas bersama konstituen di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Jumat (16/10/10).

Di hari yang sama, calon gubernur Sulut dari Partai NasDem menyempatkan diri berbelanja sekaligus menyapa para pedagang di pasar tradisional Sangkub dan Posigadan, Bolmut.

Selain mendengar aspirasi pedagang, VAP sapaan ketua KBPP Polri Sulut mengajak para pedagang tetap mengikuti anjuran

pemerintah perihal mengedepankan protap kesehatan pencegahan covid-19. “Saya imbau untuk pakai masker dalam beraktivitas. Mari kita sama-sama mengikuti anjuran pemerintah dalam hal pencegahan covid-19. Juga sokong dalam doa agar virus corona cepat berlalu di Sulut, termasuk di Bolmut, agar aktifitas bisa kembali normal,” ujar VAP kala berbincang dengan pedagang.

VAP dengan seksama mendengar keluh kesah para pedagang, terlebih dalam meningkatkan pendapatan petani melalui putaran ekonomi yang mereka geluti saat ini.

“Aspirasi masyarakat termasuk para pedagang merupakan catatan penting dalam peningkatan roda perekonomian daerah. Ada yang perlu dibenahi, jika yang sudah baik akan dipertahankan atau lebih di tingkatkan,” sebut bupati Minut dua periode.

Para pedagang sangat merespons kehadiran Srikandi Tumatenden, dan menyatakan siap memberi dukungan terhadap VAP-HENDRY dalam Pilkada Sulut Desember mendatang. “Kami doakan cita-cita ibu VAP dan pak Hendry dalam suksesi Pilgub mendatang. Kami siap memberi dukungan,” terang sejumlah pedagang. (*)

Penulis : Dewi S

Sumber : *Sulut Times*



KPU Sulut Gelar Workshop Rancangan Panduan Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (19/11) melaksanakan Workshop Dengan Stakeholder Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Keputusan Panduan Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang akan dilaksanakan 19-21 November 2020, di Mercure Hotels, Minahasa, Sulut.

Kegiatan workshop dibuka langsung ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Dr. Ardiles R. M. Mewoh, SIP, M.Si, didampingi Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si, Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisas, Parmas dan SDM Salman Saelang, S.Kel dan Bagian Hukum KPU Sulut Febry Langkung.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dalam sambutannya saat membuka workshop mengungkapkan pentingnya persiapan dalam pendistribusian logistik KPU Sulut.

“Pilkada tahun ini dalam masa pandemic Covid-19 KPU Sulut melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan dan mengikuti perundang-undangan,” ucap Mewoh.

Lanjut, Ardiles Mewoh mengatakan beberapa kendala dan tantangan penyelenggara di masa pandemic.

“Pada masa pandemic seperti ini ada kendala yang berbeda dari Pilkada sebelumnya lalu, karena adanya wabah pandemic yang mengakibatkan waktu harus tersita kemudian petugas penyelenggara harus kami siapkan berdasarkan protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap keterlibatan seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan rancangan keputusan panduan pengelolaan dan distribusi logistik.

“Keterlibatan semua stakeholder akan mewujudkan harapan kita semua agar

pilkada serentak berjalan dengan sukses, jadi mari kita diskusikan bersama dalam menyusun rancangan pengelolaan dan pendistribusian logistik,” tutur Ardiles Mewoh.

Untuk target pendistribusian logistik, sebut Ardiles Mewoh bahwa H-1 semua logistik sudah berada di setiap TPS.

“Itu target kami 1 hari sebelum pemungutan suara, untuk tindak lanjutnya kami akan lakukan koordinasi bersama seluruh stakeholder baik Bawaslu dan pihak pengamanan TNI/Polri agar seluruh dapat berjalan dengan baik dan semua dapat tercapai, kami berusaha dan berupaya agar supaya semua di maksimalkan agar tidak ada penundaan dalam pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut terkait pemilihan serentak dalam masa pandemic Covid-19, KPU Sulut siapkan alat perlengkapan TPS dan juga APD untuk petugas.

“Jadi selain logistik yang kita siapkan, alat pelindung diri (APD) wajib disiapkan, itu sudah kewajiban ketersediaan APD dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, hazmat, tempat cucian, thermogun dan beberapa item lainnya dalam menunjang penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat pemungutan suara dan KPU juga tetap menjaga sterilisasi semua logistik mulai dari didistribusikan hingga kembali ke KPU untuk tetap steril,” tutup Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Kegiatan Workshop diikuti, Tim pengamanan Wadir PAM OVIT Polda Sulut AKBP F. J. Ginting, Akademisi, LSM dan Media massa.

Penulis: *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sulut Mulai Cetak Surat Suara Pilgub

MANADO—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh menyatakan Surat Suara Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020



mulai dicetak. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara telah melakukan approval desain surat suara, Sabtu 7 November 2020. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia,” jelas Mewoh.

Lanjut Mewoh, Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota di Sulawesi Utara.

“Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara,” ungkap Mewoh.

KPU bersama Bawaslu serta Forkopimda saat mengecek langsung Surat Suara dicetak di PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur.

Diketahui Approval dilakukan oleh Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, didampingi anggota KPU Sulawesi Utara Lanny A. Ointu, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Pujiastuti, di depan perwakilan penyedia.

Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulawesi Utara Kenly Poluan, Pjs. Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong.

Sementara itu, General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari. Selanjutnya akan dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu untuk distribusi surat suara akan tiba di KPU

Kabupaten/kota pada 10 November 2020.

Terkait pengerjaan ini, Ketua KPU Sulawesi Utara mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan. Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 7 kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni meminta pihak penyedia mendahulukan pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, Wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara juga meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personel kepolisian untuk mengamankan surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar ke KPU kabupaten/kota.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. Ada sejumlah personel yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Senada dengan itu, Sekretaris KPU Sulawesi Utara juga menyatakan pihaknya telah menugaskan staff untuk mengawasi selama proses cetak hingga distribusi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Ardiles Mewoh: Surat Suara Untuk



Pilgub 2020 Mulai Dicetak

MANADO—Surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (SULUT) tahun 2020, mulai dicetak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara telah melakukan approval desain surat suara tersebut, Sabtu 7 November 2020. Pengerjaannya dilakukan oleh PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Sulawesi Utara.

Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara.

Approval dilakukan oleh Ketua KPU Sulawesi Utara DR. Ardiles Mewoh, didampingi anggota KPU Sulawesi Utara Lanny A. Ointu, SE, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Pujiastuti, SE, AK di depan perwakilan penyedia. Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulawesi Utara Kenly Poluan, S.Pd, M.Si, Pjs. Gubernur Sulawesi Utara DR. Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong.

General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi.

Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari. Selanjutnya akan dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu untuk distribusi surat suara akan tiba di KPU Kabupaten/kota pada 10 November 2020.

Terkait pengerjaan ini, Ketua KPU Sulut DR. Ardiles Mewoh mengingatkan pihak

penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan. Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 7 kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni juga meminta pihak penyedia mendahulukan pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, Wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulut juga meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personil kepolisian untuk mengamankan surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar ke KPU kabupaten/Kota.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. Ada sejumlah personil yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Senada dengan itu, Sekretaris KPU Sulut juga menyatakan pihaknya telah menugaskan staff untuk mengawasi selama proses cetak hingga distribusi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur.(*)

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Mulai Dicetak

MANADO—Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi



Utara (Sulut) tahun 2020, mulai dicetak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara telah melakukan approval desain surat suara tersebut, Sabtu 7 November 2020.

Pengerjaannya dilakukan oleh PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Sulawesi Utara.

Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara.

Approval dilakukan oleh Ketua KPU Sulawesi Utara DR. Ardiles Mewoh, didampingi anggota KPU Sulawesi Utara Lanny A. Ointu, SE, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Pujiastuti, SE, AK di depan perwakilan penyedia. Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulawesi Utara Kenly Poluan, S.Pd, M.Si, Pjs. Gubernur Sulawesi Utara DR. Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong.

General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari.

Selanjutnya akan dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu untuk distribusi surat suara akan tiba di KPU Kabupaten/kota pada 10 November 2020.

Terkait pengerjaan ini, Ketua KPU Sulawesi Utara mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan. Dia juga

meminta surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 7 kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, didistribusikan bersamaan dengan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pjs Gubernur Sulawesi Utara juga meminta pihak penyedia mendahulukan pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, Wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara juga meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personil kepolisian untuk mengamankan surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar ke KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. Ada sejumlah personil yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Senada dengan itu, Sekretaris KPU Sulawesi Utara juga menyatakan pihaknya telah menugaskan staff untuk mengawasi selama proses cetak hingga distribusi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur.(Feicy)

Penulis: *Feicy Tatilu*

Sumber : *Swarakawaua.com*

Surat Suara Pilgub Mulai Dicitak

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),



pekan lalu bertolak ke Surabaya. Untuk melihat langsung proses pencetakan surat suara yang akan digunakan di pemilihan gubernur (pilgub) 9 Desember mendatang. Dikatakan Ketua KPU Ardiles Mewoh, surat suara mulai dicetak. Menurutnya KPU Sulut telah melakukan approval desain surat suara, Sabtu (7/11) lalu.

Di mana pengerjaannya dilakukan PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. "Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Sulawesi Utara," bebernya.

Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, lanjut Mewoh, sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara," tukasnya.

Approval ini dilakukan Ardiles Mewoh selaku ketua KPU, didampingi anggota KPU Sulawesi Utara Lanny Ointu, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti SE Ak, di depan perwakilan penyedia. Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulawesi Utara Kenly Poluan SPd MSi, Pjs Gubernur Sulawesi Utara Dr Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief SH MH, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong.

General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari. Selanjutnya dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu distribusi surat suara tiba di KPU kabupaten/kota 10 November 2020.

Terkait pengerjaan ini, Mewoh mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten

sesuai desain yang diserahkan. Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota 7 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pjs Gubernur Sulawesi Utara meminta pihak penyedia mendahulukan pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara juga meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personil kepolisian untuk mengamankan surat suara di pelabuhan hingga diantar ke KPU kabupaten/Kota.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. Ada sejumlah personil yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Senada dengan itu, Sekretaris KPU Sulawesi Utara juga menyatakan pihaknya telah menugaskan staff untuk mengawasi selama proses cetak hingga distribusi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur.(*)

Penulis: *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

1.880.495 Lembar Surat Suara Pilgub Sulut Dicetak

GRESIK—Surat suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Provinsi



Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020 mulai dicetak.

Untuk memastikan proses pencetakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, DR. Ardiles Mewoh melakukan approval desain surat suara, Sabtu (7/11/2020).

PT. Temprina Media Grafika, Jawa Timur sebagai penyedia jasa yang mencetak surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Sulawesi Utara.

Sebanyak 1.880.495 surat suara yang akan dicetak pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Total jumlah surat suara yang dicetak adalah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditambah cadangan 2,5% dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi surat suara. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari. Selanjutnya akan dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu untuk distribusi surat suara akan tiba di KPU Kabupaten/kota pada 10 November 2020.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh melakukan pantauan pencetakan surat suara

Terkait pengerjaan ini, Ketua KPU Sulawesi Utara mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan. Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 7 kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pejabat sementara (PJS) Gubernur Sulawesi Utara, DR. Agus Fatoni juga meminta pihak penyedia mendahulukan

pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, Wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simajuntak juga meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personil kepolisian untuk mengamankan surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar ke KPU kabupaten/Kota.

Kapolda juga menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. Ada sejumlah personil yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Senada dengan itu, Sekretaris KPU Sulawesi Utara, Pujiastuti, SE, AK juga menyatakan pihaknya telah menugaskan staff untuk mengawasi selama proses cetak hingga pendistribusiannya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur.

Anggota KPU Sulawesi Utara, Lanny A. Ointu, SE dan sekretaris KPU Sulawesi Utara, Pujiastuti, SE, AK mendampingi ketua KPU Sulawesi Utara dalam melakukan approval di depan perwakilan penyedia.

Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulawesi Utara Kenly Poluan, S.Pd, M.Si, Pjs. Gubernur Sulawesi Utara DR. Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*

Sumber : *sulutreview.com*



Bersama KPU Sulut, Kajati Pantau Langsung Proses Cetak Surat Suara di Jatim

MANADO - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr. Ardiles M.R. Mewoh dan Pjs Gubernur Sulut,

DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Sabtu (07/11/2020) memantau pelaksanaan kegiatan Kick Off Pencetakan Surat Suara Pemilihan tahun 2020 oleh PT. Temprina Media Grafika, Jawa Timur.

Rombongan diterima langsung oleh Agus Suryoatmojo selaku Branch Manager PT Temprina Media Grafika.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kepolisian Daerah Sulut Irjen. Pol. R. Z. Panca Putra Simanjuntak, Komandan Korem 131/ Santiago Brigjen TNI Prince M. Putong, Tim KPU Provinsi Sulut, dan Tim Bawaslu Provinsi Sulut.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sulut mengingatkan kepada PT. Temprina Media Grafika agar pencetakan surat suara dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. Demikian pula memperhatikan jadwal pengiriman logistik surat suara, agar bisa sampai di Manado tepat waktu sehingga pelaksanaan Pemilu pada tanggal 09 Desember 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Diketahui, dalam memantau proses pencetakan surat suara tersebut, Kejati Sulut dan rombongan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.(*)

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *ciintasulut.com/ November 10, 2020*

Fatoni Pantau Proses Produksi Surat Suara Pilkada Sulut

GRESIK—Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni bersama jajaran Forkopimda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan kunjungan kerja ke PT Temprina Media Grafika Gresik, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2020).

Nampak hadir Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulut Andi Iqbal Arief, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Kunker ini dilakukan dalam rangka meninjau tempat produksi (pencetakan) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 di Sulut. Usai meninjau dilanjutkan dengan kick off pencetakan surat suara.

Pjs Gubernur Fatoni bersama rombongan juga menggelar tatap muka dan sharing dengan Branch manager PT Temprina Media Grafika, Agus Suryo Atmojo membahas proses pencetakan surat suara agar dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan hingga proses pengiriman surat suara ke Sulut.

“Dengan melihat langsung, maka dapat diketahui kualitas maupun kesiapan penyelesaian pencetakan surat suara, yang akan digunakan pada 9 Desember 2020,” tandasnya. (*)

Penulis : Jellina Najooan

Sumber : *sulutreview.com*

KPU Sulut Cetak 1,8 Juta Lebih Kertas Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

MANADO—Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, mulai dicetak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara telah melakukan approval desain surat suara tersebut, Sabtu 7 November 2020. Pengerjaannya dilakukan oleh PT. Temprina



Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Sulawesi Utara.

Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara.

Approval dilakukan oleh Ketua KPU Sulawesi Utara Dr Ardiles Mewoh, didampingi anggota KPU Sulawesi Utara Lanny A. Ointu, SE, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Pujiastuti, SE, AK di depan perwakilan penyedia. Kegiatan ini juga dihadiri Bawaslu Sulawesi Utara Kenly Poluan, S.Pd, M.Si, Pjs. Gubernur Sulawesi Utara DR. Agus Fatoni, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulawesi Utara Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH, Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong.

General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari. Selanjutnya akan dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu untuk distribusi surat suara akan tiba di KPU Kabupaten/ kota pada 10 November 2020.

Terkait pengerjaan ini, Ketua KPU Sulawesi Utara mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan. Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 7 kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pjs Gubernur Sulawesi Utara juga meminta pihak penyedia mendahulukan

pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, Wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara juga meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personil kepolisian untuk mengamankan surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar ke KPU kabupaten/Kota.

Selain itu, Kapolda juga menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. Ada sejumlah personil yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Senada dengan itu, Sekretaris KPU Sulawesi Utara juga menyatakan pihaknya telah menugaskan staff untuk mengawasi selama proses cetak hingga distribusi.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur.(*)

Penulis : *Deasy Holung*

Sumber : *Radio Sion*

Surat Suara Pilkada di Sulut Dicitak, Kapolda Jamin Keamanan Distribusi

JAKARTA—Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) 2020 mulai dicetak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah melakukan approval desain surat suara tersebut, Sabtu (7/11/2020).

Pengerjaannya dipercayakan kepada PT Temprina Media Grafika Gresik di Jawa Timur.

Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati



dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Sulut.

Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Totalnya 1.880.495 lembar surat suara.

Approval dilakukan Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, didampingi anggota KPU Lanny A. Ointu, Sekretaris Pujiastuti di depan perwakilan penyedia.

General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek, menjelaskan tentang proses cetak, sortir dan distribusi. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tuntas dalam waktu dua hari.

Selanjutnya dilakukan pengesetan dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu distribusi tiba di KPU kabupaten/kota pada 10 November 2020. Ardiles Mewoh mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan.

Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tujuh kabupaten/kota didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara turut meminta penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung.

Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni juga berharap penyedia mendahulukan pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dari daerah lain. Alasannya, Wilayah Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.

Ia menegaskan, pihaknya menyiapkan personel kepolisian mengamankan surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar

ke KPU kabupaten/kota.

Kapolda menegaskan pihaknya melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara.

Ada sejumlah personil yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyaksikan proses cetak, cara penyortiran dan pengepakan surat suara yang dilakukan PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur. (*)

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

KPU Sulut-Pjs Gubernur Kick Off Cetak Surat Suara

MANADO—Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni bersama jajaran Forkopimda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Temprina Media Grafika Gresik, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2020).

Kunker dilakukan dalam rangka meninjau tempat produksi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 di Sulut.

Usai meninjau dilanjutkan dengan kick off pencetakan surat suara. Agus Fatoni bersama rombongan juga menggelar tatap muka dan sharing dengan Branch manager PT Temprina Media Grafika, Agus Suryo Atmojo seputar pencetakan surat suara agar berjalan lancar sesuai jadwal.

Nampak hadir Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulut Andi Iqbal Arief, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. (*)

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*



KPU Sulut Segera Validasi Surat Suara Bersama Paslon

MANADO—Surat suara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut baru selesai dikonsultasikan ke helpdesk KPU RI.

Menurut Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi bersama pasangan calon (paslon).

“Agenda ini penting sebelum pengesahan final nantinya,” kata Ardiles Mewoh kepada BeritaManado, Senin (12/10/2020).

Ardiles menerangkan, validasi adalah proses mengecek kebenaran nama dan foto paslon di surat suara.

“Harus mendapat persetujuan kemudian pengesahan,” terang Ardiles.

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi menambahkan, setelah desain foto dan nama disetujui dan ditandatangani paslon, kemudian akan dilaporkan ke KPU RI untuk berlanjut pada proses cetak.

“Semoga prosesnya lancar sehingga bisa dilakukan pelipatan dan pengepakan sesuai jadwal,” tandas Salman Saelangi.*

Penulis *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Surat Suara Pilgub Sulut Dicitak 1.880.495 Lembar

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah melakukan approval desain surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut 9 Desember mendatang, Sabtu akhir pekan lalu. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur sebagai penyedia.

“Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali dan wakil wali kota di Sulut,” kata Mewoh. Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak jumlah pemilih

yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Jadi total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara,” ucapnya. Approval tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Sulut didampingi Anggota Komisioner Lanny Ointu, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, di depan perwakilan penyedia.

“Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, Gubernur Sulut Agus Fatoni, Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, dan Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Prince Mayer Putong. Menurut Mewoh, General Manager PT Temprina Media Grafika didampingi kepala produksi serta pimpinan proyek memberikan sedikit penjelasan tentang proses cetak, sortir dan distribusi. Pihak penyedia menargetkan pengerjaan surat suara tersebut akan tuntas dalam waktu 2 hari.

“Selanjutnya akan dilakukan set dan distribusi menggunakan kapal laut. Estimasi waktu untuk distribusi surat suara akan tiba di KPU kabupaten/kota pada 10 November 2020,” tuturnya. Mewoh juga mengingatkan pihak penyedia tentang kualitas surat suara harus konsisten sesuai desain yang diserahkan. Dia juga meminta surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali dan wakil wali kota 7 kabupaten/kota di Sulut, didistribusikan bersamaan dengan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sementara itu, Pjs Gubernur Sulut meminta pihak penyedia mendahulukan pendistribusian surat suara di KPU kabupaten/kota se-Sulut dari daerah lain. “Alasannya, wilayah Sulut memiliki tiga kabupaten yang lokasinya jauh yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud,” pinta Fatoni. Tak hanya itu saja, Kapolda Sulut pun meminta pihak penyedia menginformasikan secepatnya apabila surat suara telah tiba di Pelabuhan Bitung. “Kami tentunya menyiapkan personel kepolisian untuk mengamankan



surat suara yang ada di pelabuhan hingga diantar ke KPU kabupaten/Kota,” tandasnya. Selain itu juga, Kapolda menegaskan bahwa akan melakukan pengamanan di lokasi percetakan surat suara. “Ada sejumlah personel yang ditugaskan untuk memastikan surat suara dicetak sesuai ketentuan dalam PKPU,” ucapnya. Selama proses cetak dan distribusi akan turut serta mengawasi dari pihak sekretariat KPU Sulut.(*)

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Fatoni Tinjau Kertas Suara Pilkada

MANADO—Demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut, Pjs Gubernur Agus Fatoni bersama jajaran Forkopimda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan langsung ke PT Temprina Media Grafika yang merupakan tempat percetakan surat suara di Gresik Jawa Timur, Sabtu (7/11).

Hadir Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sulut Andi Iqbal Arief, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

“Kunker ini dilakukan untuk meninjau tempat produksi surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 di Sulut,” untkap Fatoni.

Usai meninjau dilanjutkan dengan kick off pencetakan surat suara. Pjs Gubernur Fatoni bersama rombongan juga menggelar tatap muka dan sharing dengan Branch manager PT Temprina Media Grafika Agus Suryo Atmojo, membahas proses pencetakan surat suara agar dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan hingga proses pengiriman surat suara ke Sulut.(*)

Penulis: *Angel Rumeen*

Sumber: *Manado Post*

Penjagaan Penjempuran Surat Suara Ketat

MANADO—Surat suara untuk Pilkada se Sulut telah tiba, Sabtu (21/11) di Pelabuhan Peti Kemas Kota Bitung. Kedatangan surat suara tersebut dijemput oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh bersama komisioner KPU Sulut Lanny Ointu, diawasi Bawaslu dan dipantau Kapolda Sulut, Kajati serta Forkopimda.

Nampak pengawalan ketat oleh Tim Brimob Polda Sulut dengan menggunakan KM Dorolonda. Mereka menyaksikan langsung pembukaan segel kontainer yang dalamnya berisi surat suara, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Kita menerima pengiriman surat suara dari perusahaan. Kemudian ini akan didistribusikan ke kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Surat suara tersebut diteruskan ke kabupaten/kota dengan kendaraan yang dikawal ketat.

“Ini surat suara untuk wilayah darat. Sebab tahap pertama di kepulauan sudah dikirim terlebih dahulu, sudah disortir dan dilipat. Jadi ini untuk tahap dua,” terangnya. Menurut Mewoh, semua sudah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan. “Untuk jumlahnya tentu sisa daripada yang telah terlebih dahulu di kepulauan. Jadi untuk surat suara pilgub sesuai dengan DPT ditambah 2,5 persen. Begitu juga kabupaten/kota,” jelasnya.

Ditambahkannya, surat suara ini diproduksi di Surabaya. Kemudian dikirim dan sortir di masing-masing kabupaten/kota. Baru diketahui jika ada yang kurang atau kurang. “Targetnya sesuai kesepakatan awal bahwa tanggal 22 November sudah ada di kabupaten/kota. Jadi ini sudah sesuai batas waktu,” tuturnya.

Pihaknya, lanjut Mewoh, tetap berkoordinasi dengan aparat agar surat

suara ini harus diamankan mulai dari produksi, percetakan distribusi sampai tiba di kab/kota. “Kemudian sampai pada sortir, lipat mapping. Memang harus ada penjagaan ketat. Setiap kabupaten/kota ada sediakan pengamanan. Jadi kita apresiasi pihak aparat,” tutupnya.(*)

Penulis: *LivrAndo Kambey*
 Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Dikawal Ketat, Surat Suara Pilgub Sulut Didistribusikan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mulai mendistribusikan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Minggu (15/11). Pendistribusian awal ini dimulai dari Kepulauan Sitaro. Menurut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, daerah yang diprioritaskan untuk didahulukan pendistribusian surat suara yakni kepulauan.

“Apalagi memasuki keadaan cuaca tidak menentu di bulan-bulan ini yang kondisi geografisnya di daerah kepulauan itu lebih sulit,” ujar Mewoh. Dikatakan Mewoh, pihaknya serius dalam mendistribusikan logistik pemilihan, terutama logistik surat suara pada tepat waktu. “Gelombang pertama kita dahulukan kepulauan. Gelombang kedua nanti untuk 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah darat,” terangnya. Dirinya mengaku menargetkan 21 November 2020 surat suara sudah ada di Manado dan seterusnya diteruskan ke kabupaten/kota. “Kita targetkan 22 November 2020 surat suara itu sudah ada di kabupaten/kota. Sejauh ini masih dengan tahapan dan waktu yang kita susun.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, untuk distribusi surat suara dari provinsi ke kabupaten/kota, dari aparat kepolisian menjamin sebagaimana proses pendistribusian itu aman.

“Untuk itu, setiap kali proses pengiriman mulai dari percetakan sampai dengan kita mengirim ke kabupaten/kota, dilakukan pengamanan dan pengawalan dari pihak

kepolisian. Itu mekanisme yang sudah kita buat dan disepakati bersama,” tegasnya.(*)

Penulis: *LivrAndo Kambey*
 Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Dikawal Ketat, KPU Distribusi Kertas Suara ke Kabupaten/Kota

BITUNG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menerima kedatangan kertas suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Pelabuhan Peti Kemas Samudra kota Bitung, Sabtu (21/11/2020).

Kedatangan kertas suara di Pelabuhan Bitung dipantau langsung oleh Bawaslu Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen, SE MA dan Forkopimda Sulut.

Logistik kertas suara yang tiba di pelabuhan Samudra Bitung dikawal ketat oleh Tim Brimob Polda Sulut menggunakan KM. Dorolonda.

Di sisi lain, ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, SIP, MSi menjelaskan kepada sejumlah wartawan bahwa kedatangan kertas suara tahap II akan di distribusikan ke 12 Kabupaten/Kota di wilayah darat dan akan di fasilitasi oleh KPU Sulut serta penyaluran kertas suara ke kabupaten/kota akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian.

“Jadi KPU telah menerima kertas suara dari perusahaan penyedia yaitu PT. Temprina di Surabaya, Gresik. KPU memfasilitasi bongkar kontainer kemudian kertas suara ini akan siap di distribusikan ke 12 Kabupaten/Kota lewat kendaraan kecil dan pendistribusian kertas suara akan dikawal ketat pihak Kepolisian,” jelas Mewoh.

Selain itu Mewoh juga mengatakan, tahap awal kertas suara sudah di kirim ke tiga wilayah kepulauan.

Ketika di tanya soal jumlah kertas suara pada pendistribusian tahap II ini, Mewoh mengatakan jumlah kertas suara sudah



terpenuhi.

“Kertas suara sudah terpenuhi jumlahnya sebagaimana yang dibutuhkan dalam pemilihan Gubernur, bupati dan wali kota di 12 Kabupaten/Kota. Kertas suara Pilgub tentu sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5%, begitu juga di kabupaten/kota,” kata Mewoh.

Lebih lanjut Mewoh menjelaskan terkait adanya kertas suara yang rusak, akan di pilah dan di sortir di Kabupaten/Kota.

“Kertas suara akan di pilah dan di sortir di Kabupaten/Kota, maka akan terlihat jika ada kertas suara yang rusak,” terang Mewoh.

Turut hadir dalam pemantauan pembukaan segel kontainer yang berisi kertas suara dan pengecekan kelengkapan logistik kertas suara, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Bitung, Drs. Edison Humiang MSi, Ketua KPU Kota Bitung Deasly Sumampouw, SE, Ketua Bawaslu Kota Bitung Deiby Londok dan Forkopimda Kota Bitung.

Dalam kegiatan pemantauan dan pengecekan kertas suara ini semua yang hadir mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid19. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

Distribusi Surat Suara, KPU Prioritaskan Wilayah Kepulauan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai melakukan distribusi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, untuk distribusi surat suara diprioritaskan pada wilayah kepulauan.

“Untuk distribusi perdana kita mulai dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Karena prioritas kita adalah mendahulukan daerah, guna mengantisipasi keadaan cuaca yang tidak menentu. Di mana bulan-bulan seperti ini, kondisi geografis wilayah kepulauan itu lebih sulit,” kata Mewoh di Kantor KPU

Sulut, Minggu (15/11/2020).

Mewoh menambahkan, KPU telah menargetkan sejak awal, untuk menyasar wilayah Kepulauan.

“Kita menargetkan sejak awal wilayah kepulauan itu didahulukan. Dan itu sudah kita lakukan, kita memang serius sungguh-sungguh mendistribusikan logistik pemilihan terutama logistik surat suara tepat waktu,” katanya kembali.

Usai gelombang pertama, distribusi akan kembali dilakukan. Yakni wilayah daratan yang ada di 12 kabupaten/kota.

“Untuk gelombang pertama kita dahulukan kepulauan, gelombang kedua nanti untuk 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah darat,” ujarnya sembari menambahkan pada 21 November 2020 mendatang surat suara sudah ada di Manado.

“Kita targetkan 21 November 2020 surat suara sudah ada di Manado dan selanjutnya akan diteruskan ke kabupaten/kota. Dengan demikian 22 November 2020 surat suara itu sudah ada di kabupaten/kota,” sebut Mewoh.

Sementara itu, untuk tahapan dan waktu pelaksanaan pilkada, sebut Mewoh semuanya on schedule. Dalam artian semuanya mengacu tahapan yang ditetapkan.

Turut hadir dalam distribusi surat suara perdana Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Untuk distribusi surat suara dari provinsi ke kabupaten/kota, menurut Kapolda, sesuai dengan ketentuannya, aparat kepolisian menjamin proses pendistribusian aman.

“Untuk itu setiap kali proses pengiriman mulai dari percetakan sampai dengan kita mengirim ke kabupaten/kota dilakukan pengamanan dan pengawalan dari pihak kepolisian. Itu mekanisme yang sudah kita buat dan disepakati bersama,” tandasnya.

Diketahui, pengerjaannya pencetakan surat suara dilakukan oleh PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi



penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Sulut.

Turut hadir, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti dan jajaran, Bawaslu Sulut dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Rincian Distribusi Surat Suara

1. Kabupaten Kepulauan Talaud
 - a. jumlah kertas suara 71.266 lembar kertas suara
 - b. jumlah keseluruhan 36 box (35 box terisi @2000 kertas suara)
 - c. terdapat 1box yang isinya 1266 lembar kertas suara
2. Kabupaten Kepulauan sangihe
 - a. jumlah kertas suara 108.992 lembar kertas suara
 - b. jumlah keseluruhan 55box (34 box terisi @2000 kertas suara)
 - c. terdapat 1box yang isinya 992 lembar kertas suara
3. Kabupaten Kepulauan Sitaro
 - a. jumlah kertas suara 54.122 lembar kertas suara
 - b. jumlah keseluruhan 28 box (27 box terisi @2000 kertas suara)
 - c. terdapat 1box yang isinya 122 lembar kertas suara. (*) Sumber : KPU Sulut

Penulis: *Jellina Najoran*
Sumber: *sulutreview.com*

PILGUB SULUT: Surat Suara Mulai Didistribusi, Wilayah Kepulauan Prioritas

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai mendistribusikan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Pengiriman perdana digelar dari Kantor KPU Sulut, Minggu (15/11/2020). Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro (Sitaro), Sangihe dan Talaud menjadi tujuan pertama. “Ke Sitaro dan Talaud sudah siap di kapal. Talaud dikirim besok,” terang Ardiles Mewoh.

Menurut Mewoh, daerah kepulauan menjadi prioritas pengiriman karena pertimbangan cuaca di akhir tahun.

“Iklim tidak menentu di bulan ini, selain itu kondisi geografis kepulauan lebih sulit,” bebernya. Gelombang kedua, lanjut Ardiles, dikirim ke 12 kabupaten/kota wilayah darat. “Kita targetkan 21 November 2020 surat suara sudah ada di Manado dan ke kabupaten/kota,” terangya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolda Sulut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Panca Putra menjamin pendistribusian aman karena akan dikawal kepolisian.

Rincian Surat Suara yang Didistribusi:

1. Kabupaten Kepulauan Talaud
 - a. Kertas Suara 71.266 lembar
 - b. Jumlah keseluruhan 36 box (5 box terisi 2000 kertas suara)
 - c. Terdapat 1 box isinya 1266 lembar kertas suara
2. Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - a. Jumlah kertas Suara 108.992 lembar
 - b. Jumlah keseluruhan 55box (34 box terisi 2000 kertas suara)
 - c. Terdapat 1 box isinya 992 lembar kertas suara
3. Kabupaten Kepulauan Sitaro
 - a. Jumlah Kertas Suara 54.122 lembar
 - b. Jumlah keseluruhan 28 box (27 box 2000 kertas suara)
 - c. Terdapat 1 box isinya 122 lembar kertas suara.(*)

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*



Sitaro Perdana, KPU Sulut Distribusi Kertas Suara

MANADO—Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Minggu (15/11/2020) di Kantor KPU Sulut.

Hadir dalam acara ini, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan jajaran, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti dan jajaran, Bawaslu Sulut, KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyatakan, distribusi surat suara perdana ini kita mulai dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

“Kita memang menyusun prioritas daerah yang kita dahulukan apalagi memasuki keadaan cuaca tidak menentu di bulan-bulan ini kondisi geografisnya di daerah kepulauan itu lebih sulit,” ucap Mewoh.

Lanjut Mewoh, KPU menargetkan sejak awal wilayah kepulauan itu didahulukan dan itu sudah dilakukan.

“Kita memang serius sungguh-sungguh mendistribusikan logistik pemilihan terutama logistik surat suara tepat waktu. Gelombang pertama kita dahulukan kepulauan, gelombang kedua nanti untuk 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah darat. KPU targetkan 21 November 2020 surat suara sudah ada di Manado dan seterusnya diteruskan ke kabupaten/kota,” jelas Mewoh.

Mewoh juga menjelaskan, target 22 November 2020 surat suara itu sudah ada di kabupaten/kota. Sejauh ini masih dengan tahapan dan waktu yang kita susun.

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, untuk distribusi surat suara dari provinsi ke kabupaten/kota bagaimana ketentuannya kita dari

aparat kepolisian menjamin sebagaimana proses pendistribusian itu aman. “Untuk itu setiap kali proses pengiriman mulai dari percetakan sampai dengan kita mengirim ke kabupaten/kota dilakukan pengamanan dan pengawalan dari pihak kepolisian. Itu mekanisme yang sudah kita buat dan disepakati bersama,” ungkap Simanjuntak.

Diketahui, pengerjaannya dilakukan oleh PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota di Sulut. (*)

Rincian Jumlah Kertas Suara

A. Kabupaten Kepulauan Talaud

- 1) jumlah kertas suara 71.266 lembar kertas suara
- 2) jumlah keseluruhan 36 box (35 box terisi @2000 kertas suara)
- 3) terdapat 1box yang isinya 1266 lembar kertas suara

B. Kabupaten Kepulauan Sangihe

- 1) jumlah kertas suara 108.992 lembar kertas suara
- 2) jumlah keseluruhan 55box (34 box terisi @2000 kertas suara)
- 3) terdapat 1box yang isinya 992 lembar kertas suara

C. Kabupaten Kepulauan Sitaro

- 1) jumlah kertas suara 54.122 lembar kertas suara
- 2) jumlah keseluruhan 28 box (27 box terisi @2000 kertas suara)
- 3) terdapat 1box yang isinya 122 lembar kertas suara

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*



Wilayah Kepulauan Jadi Prioritas Pendistribusian Surat Suara Pilgub Sulut Oleh KPU

MANADO—Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut secara resmi didistribusikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor KPU, Minggu (15/11/20) siang tersebut dihadiri oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan jajaran, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti dan jajaran, Bawaslu Sulut, KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, kesempatan distribusi perdana ini kita mulai dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

“Kita memang menyusun prioritas daerah yang kita dahulukan apalagi memasuki keadaan cuaca tidak menentu di bulan-bulan ini kondisi geografisnya di daerah kepulauan itu lebih sulit,” ujar Mewoh.

Mewoh pun bersama tim menargetkan sejak awal wilayah kepulauan itu didahulukan dan itu sudah kita lakukan.

“Kita memang serius sungguh-sungguh mendistribusikan logistik pemilihan terutama logistik surat suara tepat waktu,” ungkap Mewoh

Lebih lanjut kata Mewoh, untuk Gelombang pertama kita dahulukan kepulauan, gelombang kedua nanti untuk 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah darat.

“Kita targetkan 21 November 2020 surat suara sudah ada di Manado dan seterusnya diteruskan ke kabupaten/kota. Dan di targetkan 22 November 2020 surat suara itu sudah ada di kabupaten/kota. Sejauh ini masih dengan tahapan dan waktu yang kita susun,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan,

untuk distribusi surat suara dari provinsi ke kabupaten/kota bagaimana ketentuannya dari aparat kepolisian menjamin sebagaimana proses pendistribusian itu aman.

“Untuk itu setiap kali proses pengiriman mulai dari percetakan sampai dengan kita mengirim ke kabupaten/kota dilakukan pengamanan dan pengawalan dari pihak kepolisian. Itu mekanisme yang sudah kita buat dan disepakati bersama,” tandasnya.

Diketahui, pengerjaannya dilakukan oleh PT. Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Sulut.(*)

Rincian jumlah kertas suara sbb:

Kab. Kep Talaud

jumlah kertas suara 71.266 lembar kertas suara

jumlah keseluruhan 36 box (35 box terisi @2000 kertas suara)

terdapat 1box yang isinya 1266 lembar kertas suara

Kab. Kep sangihe

jumlah kertas suara 108.992 lembar kertas suara

jumlah keseluruhan 55box (34 box terisi @2000 kertas suara)

terdapat 1box yang isinya 992 lembar kertas suara c.Kabupaten Kep. Sitaro

jumlah kertas suara 54.122 lembar kertas suara

jumlah keseluruhan 28 box (27 box terisi @2000 kertas suara)

terdapat 1box yang isinya 122 lembar kertas suara\

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*



KPU Kirim Surat Suara ke Kepulauan

Rincian Surat Suara Wilayah Kepulauan

Kabupaten Kepulauan Talaud

Jumlah surat suara 71.266 lembar.

Jumlah keseluruhan 36 box (35 box terisi @2.000 surat suara).

Terdapat 1 box yang isinya 1.266 lembar surat suara.

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Jumlah surat suara 108.992 lembar.

Jumlah keseluruhan 55 box (34 box terisi @2.000 surat suara).

Terdapat 1 box isinya 992 lembar surat suara.

Kabupaten Kepulauan Sitaro

Jumlah surat suara 54.122 lembar.

Jumlah keseluruhan 28 box (27 box terisi @2.000 surat suara)

Terdapat 1 box isinya 122 lembar surat suara.

MANADO—Komitmen penyelenggara pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprioritaskan distribusi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut ke wilayah kepulauan, dilakukan. Minggu (15/11) kemarin, KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai mengirimkan surat suara ke tiga daerah kepulauan. Yakni Talaud, Sangihe, dan Sitaro. “Sangihe dan Sitaro sudah loading di kapal. Talaud telah tiba di Manado, esok (hari ini) dikirim,” sebut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Dia melanjutkan, surat suara Sitaro sudah dilepas perdana. “Sangihe punya baru tiba pesawat tadi sore (kemarin), langsung dikirim ke pelabuhan Manado,” jelasnya.

Dimulainya pendistribusian surat suara ini dilakukan di Kantor KPU Provinsi Sulut. Oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, dan jajaran. Disaksikan langsung Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan jajaran, Bawaslu Sulut, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro.

“Kesempatan distribusi perdana ini kita mulai dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kita memang menyusun prioritas daerah



yang kita dahulukan apalagi memasuki keadaan cuaca tidak menentu di bulan-bulan ini. Kondisi geografisnya di daerah kepulauan itu lebih sulit,” jelas Mewoh. Dia mengatakan, sejak awal KPU menargetkan wilayah kepulauan didahulukan. “Itu sudah kita lakukan. Kita memang serius dan sungguh-sungguh mendistribusikan logistik pemilihan terutama logistik surat suara tepat waktu,” tukasnya. Lebih jauh dia menguraikan, gelombang pertama pendistribusian surat suara adalah wilayah kepulauan. Gelombang kedua nanti untuk 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah darat.

“Kita targetkan 21 November 2020 surat suara sudah ada di Manado dan seterusnya diteruskan ke kabupaten/kota. Targetnya 22 November 2020 surat suara sudah ada di kabupaten/kota. Sejauh ini masih dengan tahapan dan waktu yang kita susun,” tandas Mewoh.

Di tempat yang sama, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, untuk distribusi surat suara dari provinsi ke kabupaten/kota bagaimana ketentuannya, aparat kepolisian menjamin sebagaimana proses pendistribusian aman. “Untuk itu setiap kali proses pengiriman mulai dari percetakan sampai dengan kita mengirim ke kabupaten/kota dilakukan pengamanan dan pengawasan dari pihak kepolisian. Itu mekanisme yang sudah kita buat dan disepakati bersama,” jelasnya.

Diketahui, pengerjaannya dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia. Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Sulut.(*)

Penulis: *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Logistik Surat Suara Untuk Pilkada 2020 Tahap Dua Masuk Bitung, Pengawasan Ketat Diberlakukan

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, terus memantapkan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (SULUT) tahun 2020.

Teranyar, Sabtu (21/11/2020) kemarin, KPU Sulut dibawa kepemimpinan Ardiles Mewoh menerima langsung logistik Surat Suara Pilkada 2020 di Pelabuhan Peti Kemas Samudera Kota Bitung tahap dua. Kedatangan logistik Surat Suara Pilgub tiba di pelabuhan Samudera Bitung dengan pengawasan ketat oleh Tim Brimob Polda Sulut menggunakan KM Dorolonda.

Kedatangan Logistik Surat Suara dipantau langsung oleh Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh I, kepada wartawan menjelaskan, jika KPU Provinsi Sulut telah menerima pengiriman surat suara dari perusahaan penyedia yang dimuat dalam satu kontainer.

“Jadi kita memfasilitasi pembongkaran kontainer ke kendaraan lebih kecil, kertas suara ini akan disalurkan ke 12 Kabupaten/ Kota wilayah darat. Untuk tiga daerah kepulauan telah dilakukan tahap pertama dan kertas suara telah selesai sortir dan dilipat,” kata Mewoh.

Mewoh mengakui penyaluran kertas suara ke Kabupaten/Kota dilakukan pengawasan ketat pihak kepolisian.

“Memilah dan menyortir kertas suara nanti di Kabupaten/Kota. Maka akan terlihat jika ada kertas suara ada yang rusak,” jelas Mewoh.

Turut hadir dalam pemantauan tersebut Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra, M.Si, Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, SIP, MSi, Kabinda Sulut Kolonel Laut (P) Adriansyah, SE.



Kedatangan Forkopimda Sulut dengan menggunakan Heli Bell-429/Polairud Polda Sulut disambut langsung oleh Pjs. Walikota Bitung Drs. Edison Humiang, M.Si, beserta Forkopimda Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung.

Selanjutnya Forkopimda dan Baswaslu Sulut bersama Pjs. Walikota Bitung dan forkopimda Kota Bitung menyaksikan langsung pembukaan segel Kontainer yang didalamnya berisi logistik Pilkada 2020 untuk dilakukan pengecekan atas kelengkapan logistik surat suara tersebut.

Kegiatan Pemantauan ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.(*)

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

KPU Sulut Terima Logistik Surat Suara Tahap Dua di Pelabuhan Peti Kemas Samudera Kota Bitung

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima langsung logistik Surat Suara Pilkada 2020 di Pelabuhan Peti Kemas Samudera Kota Bitung tahap dua, Sabtu (21/11/2020).

Kedatangan Logistik Surat Suara dipantau langsung oleh Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara.

Logistik Surat Suara ini tiba di pelabuhan Samudera Bitung dengan pengawalan ketat oleh Tim Brimob Polda Sulut menggunakan KM. Dorolonda.

Turut hadir dalam pemantauan tersebut Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra, M.Si, Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, SIP, MSi, Kabinda Sulut Kolonel Laut (P) Adriansyah, SE.

Kedatangan Forkopimda Sulut dengan menggunakan Heli Bell-429/Polairud Polda Sulut disambut langsung oleh Pjs. Wali Kota Bitung Drs. Edison Humiang, M.Si, beserta Forkopimda Kota Bitung dan Bawaslu Kota

Bitung.

Selanjutnya Forkopimda dan Bawaslu Sulut bersama Pjs. Walikota Bitung dan forkopimda Kota Bitung menyaksikan langsung pembukaan segel Kontainer yang didalamnya berisi logistik Pilkada 2020 untuk dilakukan pengecekan atas kelengkapan logistik surat suara tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh kepada wartawan menjelaskan, jika KPU Provinsi Sulut telah menerima pengiriman surat suara dari perusahaan penyedia yang dimuat dalam satu kontainer.

“Jadi kita memfasilitasi pembongkaran kontainer ke kendaraan lebih kecil, kertas suara ini akan disalurkan ke 12 Kabupaten/ Kota wilayah darat. Untuk tiga daerah kepulauan telah dilakukan tahap pertama dan kertas suara telah selesai sortir dan dilipat,” ungkap Mewoh.

Mewoh mengakui penyaluran kertas suara ke Kabupaten/Kota dilakukan pengawalan ketat pihak kepolisian.

Kegiatan Pemantauan ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.(*)

Penulis: Olvi Kapojos

Sumber: *manadoaktual.com*

Persiapan Pendistribusian Logistik Pilkada Penting

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut matangkan persiapan distribusi logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut 9 Desember mendatang. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan bahwa persiapan pendistribusian logistik oleh pihaknya, sangatlah penting. Sebab, pilkada tahun ini dilaksanakan di masa pandemi covid. Untuk itu harus mengikuti perundang-undangan.

“Memang ada beberapa kendala dan tantangan penyelenggara di masa pandemi yang mengakibatkan waktu harus tersita. Kemudian petugas penyelenggara harus kami siapkan berdasarkan protokol



kesehatan Covid-19,” kata Mewoh saat membuka Workshop dalam rangka Penyusunan Rancangan Keputusan Panduan Pengelolaan Distribusi Logistik Pilkada Sulut, pekan lalu.

Mewoh berharap adanya keterlibatan stakeholder dalam rangka penyusunan rancangan keputusan panduan pengelolaan dan distribusi logistik. “Ini akan mewujudkan harapan kita semua agar pilkada serentak berjalan dengan sukses,” harapnya. Ditambahkannya, target pendistribusian logistik H-1 semua sudah berada di setiap TPS. “Tentu kita akan koordinasi bersama seluruh stakeholder baik Bawaslu dan pihak pengamanan TNI/Polri agar seluruh dapat berjalan dengan baik dan semua dapat tercapai. Kami berusaha dan berupaya agar semua dimaksimalkan dan tidak ada penundaan,” tuturnya.

Selain itu juga, pihaknya menyiapkan perlengkapan TPS serta APD untuk petugas. “Sudah kewajiban ketersediaan APD, masker, hand sanitizer, sarung tangan, tempat cucian, thermo gun dan beberapa item lainnya. Ini dalam menunjang penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat pemungutan suara. KPU juga menjaga sterilisasi semua logistik mulai saat distribusi hingga kembali ke KPU,” tutupnya.*)

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Logistik Pilkada Mulai Didistribusikan ke TPS

MANADO—Logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut sudah mulai didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS), Minggu (6/12). Logistik ini merupakan salah satu faktor vital yang menentukan sukses tidaknya pemilihan serentak 9 Desember mendatang.

Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, dalam empat hari terakhir dirinya menyempatkan diri mengecek kesiapan logistik di wilayah Manado, Minahasa dan Boltim, plus mengunjungi

KPU Kotamobagu. “Dari pantauan, keempat daerah tersebut telah dan sedang menyiapkan logistik untuk keperluan Pemilihan 9 Desember nanti,” ujarnya.

Di KPU Minahasa dan Kota Manado, kata dia, Minggu 6 Desember 2020 mulai mendistribusikan logistik. “Minahasa dan Manado merupakan daerah dengan jumlah badan ad hoc dan TPS terbanyak,” katanya.

Menurutnya, soal logistik, Manado memang menjadi perhatian. Mengingat pengalaman Pilkada 2015 dan Pemilu 2019, ada problem keterlambatan logistik. “Namun saat ini, jika tidak ada faktor yang menghambat secara tiba-tiba, bisa dipastikan paling lambat H-1 8 Desember 2020 logistik KPU Manado dan kabupaten/kota lainnya telah sampai di PPS/TPS. Untuk Kepulauan Bunaken telah dikirim. Akan menyusul nanti 10 kecamatan lain di daratan pada tanggal 7-8 Desember,” terangnya.

Di Manado ada 11 kecamatan, 87 kelurahan dan 979 TPS. Jumlah kotak suara 2 x 979 ditambah kotak untuk rekapitulasi di PPK 2 x 11. Sehingga jumlah kotak yang didistribusikan merupakan terbanyak di Sulut. Yakni 1.980 kotak. Untuk KPU Minahasa, yang mengawal 25 kecamatan dan 270 desa. Kemarin mendistribusikan logistik untuk 10 kecamatan. Tanggal 7 hari ini 11 kecamatan dan tanggal 8 untuk 4 kecamatan di Kota Tondano. Boltim dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang lebih kecil yaitu 7 kecamatan, 81 desa, 207 TPS. Diyakini akan tuntas distribusi dalam sehari. “Untuk diketahui, logistik kali ini beda. Dimana ada penambahan APD untuk protokol pencegahan Covid 19,” tutupnya.*)

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Pilgub 2020, Hingga Kini Logistik KPU Bolmong Capai 75 Persen

MANADO—Dalam menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember 2020 khususnya Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi



Sulawesi Utara, pemenuhan logistik untuk Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga saat ini sudah mencapai 75 persen. Ini disampaikan Ketua KPU Bolmong, Lilik Mahmudah saat diwawancarai awak media di sela pemantauan persiapan simulasi, Selasa (1/12/2020) malam di Kantor KPU Bolmong Kecamatan Lolak.

“Untuk kebutuhan logistik kita (KPU Bolmong, red) 75 persen sudah siap. Ada beberapa logistik yang belum sampai, kita menunggu distribusi dari KPU Provinsi tapi logistik yang sudah ada di gudang KPU Bolmong sudah di-packing,” tutur Mahmudah.

Masih oleh Mahmudah, surat suara yang berjumlah 175.548 ditargetkan tanggal 2 Desember 2020 selesai dilipat.

“Untuk surat suara karena berjumlah banyak kita menargetkan tujuh hari, besok (hari ini, red) adalah hari terakhir dan saya boleh pastikan selesai,” ucap Ketua KPU Bolmong ini.

Disampaikan pula, untuk pendistribusian logistik di 15 Kecamatan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020.

“Kita utamakan kecamatan yang ada desa terjauh. Ada Kecamatan Poigar di Desa Pomongan, Kecamatan Bilalang di Desa Polingangan, Kecamatan Lolayan di Desa Mengkang. Sementara di Kecamatan Dumoga ada dua desa yaitu Kanaan dan Desa Serasik dan Kecamatan Dumoga Barat ada di Desa Matayang,” urai Mahmudah. Diketahui, untuk Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terdapat 15 Kecamatan, 200 Desa dan 2 Kelurahan.(*)

Penulis: *Jane Tungkagi*

Sumber: *ciintasulut.com/ December 2, 2020*

KPU Minahasa Distribusikan Logistik Pilgub Sulut 2020

TONDANO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Minggu (6/12/2020) mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020.

Demikian disampaikan Ketua KPU Minahasa Lord Malonda kepada BeritaManado.com di sela-sela kesibukan mengawal proses distribusi logistik Pilgub Sulut 2020.

“Pendistribusian ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan juga didampingi langsung PPK dari setiap Kecamatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ungkap Malonda.

Pada bagian lain, pantauan pendistribusian logistik Pilgub Sulut 2020 berjalan baik, sebagaimana terlihat sejumlah desa di Kecamatan Langowan Selatan.

Salah satunya di Desa Winebetan, dimana sebelum logistik Pilgub Sulut 2020 diturunkan dari kendaraan pengangkut, Ketua PPK Kecamatan Langowan Selatan Stenly Kayuwatu mengundang Panwascam Langowan Selatan, Camat Langowan Selatan, Hukum Tua Desa Winebetan, aparat TNI/Polri serta Pers untuk menyaksikan penyerahan logistik.

“Desa Winebetan adalah yang pertama menerima logistik Pilgub Sulut. Selanjutnya dengan prosedur yang sama, kami akan melanjutkan ke 9 desa lainnya. Kami berharap proses distribusi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini terhindari hal-hal yang tidak diinginkan,” harap Kayuwatu.

Terkait hal ini, Camat Langowan Selatan Donald Lumingkewas yang turun langsung memantau proses distribusi logistik Pilgub Sulut 2020, mengatakan bahwa pihaknya berharap masyarakat dapat berpartisipasi memberikan hak suara pada 9 Desember 2020 nanti.(*)

Penulis: *Frangki Wullur/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*



Ini Jadwal Distribusi Logistik Pilgub Sulut 2020 di Minahasa

TONDANO—Hari pertama masa tenang dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Minahasa akan dilakukan distribusi logistik surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa.

Ketua KPU Minahasa Lord Malonda kepada BeritaManado.com mengatakan bahwa distribusi akan dimulai pada Minggu (6/12/2020) pukul 13.00 WITA – 18.00 WITA sebagaimana jadwal terlampir dalam informasi ini.

“Untuk distribusinya, akan ada pengawalan oleh pihak kepolisian. Demikian juga PPK wajib mendampingi penjemputan logistik sampai pada distribusi di desa dan kelurahan di wilayah masing-masing,” jelas Malonda.*)

Penulis: *Frangki Wullur/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

CEP-SSL Resmi Mendaftar di KPU, Sehan: Yakin Menang

MANADO (lintassulut.com)—Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan Sehan Salim Landjar (SSL) pada Minggu (6/9/2020) resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan wakil Gubernur.

Kedua pasangan usungan dari Partai Golkar, Demokrat dan PAN ini bersama rombongan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para relawan langsung menuju KPU. Kedua Pasangan Calon tersebut diterima langsung tim pendaftaran KPU. Terlihat paslon beserta timnya lakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol Covid-19.

Ardiles Mewoh selaku Ketua KPU Sulut yang didampingi komisioner lainnya mengucapkan, selamat datang kepada

CEP-SSL sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

CEP-SSL sesampai di KPU langsung di undang masuk ke dalam ruangan KPU. Tampak di dalam ruangan, CEP-SSL di periksa para anggota KPU tentang kelengkapan berkasnya.

Pasangan CEP-SSL usai pendaftaran menggelar Conference Press, Sehan Landjar mengatakan bahwa target menang di Pilgub harus dicapai. “Saya ingin menang lebih satu suara dari lawan. Cuma talebeh (hanya lebih) satu suara atau satu juta suara tetap kami yang menang. Itu yang kami kejar. Kemenangan akan kami upayakan, ada di pihak CEP dan SEHAN. Soal berapa persen pokoknya menang. Insya Allah target itu kami akan upayakan kemenangan setelah ditetapkan 70 hari kampanye,” ucap Landjar setelah sebelumnya CEP juga sudah menyampaikan visi-misi.

Lebih lanjut disampaikan Landjar, akan berikan edukasi kepada masyarakat. “Karena yang kuat adalah rakyat bukan calon, kami tidak lebih dari penggemar. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hati rakyat sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika dihitung kami lah sang juaranya,” ucap Bupati Boltim dua periode ini.

Selain itu, Landjar pun mengatakan bila pembangunan visi misi infrastruktur itu masalah keniscayaan. “Jalan tol dan sebagainya merupakan target yang harus dilakukan guna memudahkan masyarakat mengakses kantong-kantong produksi. Tapi kami akan buat lompatan kuantum. Masalah rumah, menjadikan rakyat sulut tinggal di tanah sendiri dan rumah sendiri, bersertifikat sendiri. Itu yang menjadi impian saya dan CEP,” tutup Landjar.

Selain itu pasangan Paslon ini akan memberi perhatian terhadap kesejahteraan para petani, nelayan dan lapangan kerja pun tetap menjadi prioritas. Dalam pantauan sejumlah awak media rombongan terlihat yang turut mendampingi CEP-SSL yakni, James Arthur Kojongian Ketua Harian Partai Golkar, Sekretaris Golkar Sulut Raski



Mokodompit, Anggota DPRD Sulut Partai Golkar Yongky Limen, Anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh dan seluruh Pengurus Partai Golkar Sulut, Ketua DPD Partai Golkar Manado, Ketua DPD Demokrat Manado, Nortje Van Bone, Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok beserta Pengurus partai Demokrat, serta Ketua DPD PAN Manado Bobby Daud dan pengurus PAN Kota Manado, serta pendukung dan simpatisan pasangan CEP-SSL. (*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

OD-SK Paslon Pertama Daftarkan Diri di KPUD Sulut

MANADO (lintassulut.com)—Calon petahana Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Cawagub Steven Kandouw resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulut pada Jumat (4/9/2020), pagi.

Olly Dondokambey selaku Cagub andalan PDI-Perjuangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPUD Sulut se usai berkas pendaftarannya diterima. Seperti diketahui pendaftaran kali ini adalah yang kedua kalinya bagi pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw setelah 2014 lalu. “KPU ini memang mantap, semua mereka cek satu per satu dengan teliti karena memang itu komitmen KPU penyelenggara pesta demokrasi, memang harus begitu. Harus betul-betul teliti, karena mereka menyeleksi pemimpin-pemimpin di daerah. Kalau mereka salah pilih, teliti, salah seleksi, nah berarti yang salah KPU,” kata Dondokambey selaku Calon Petahanana ini.

Olly juga turut mengucapkan terima kasih buat para hamba Tuhan yang sudah mendoakan mereka sesaat sebelum perjalanan menuju Kantor KPUD Sulut dengan mengendarai sepeda.

Dalam kesempatan pendaftaran itu Olly Dondokambey dan Steven Kandouw turut di dampingi oleh para pimpinan

Partai pengusung. Seperti diketahui OD-SK ini diusung oleh PDI-Perjuangan, PKB, Gerindra, Perindo, dan PPP. Lewat pantauan media pendaftaran serta berita acara berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan di Kantor KPUD Sulut. (*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Olly Dondokambey : Angka 3, Metal, Menang Total

MANADO (lintassulut.com)—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melakukan pencabutan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada 2020 dalam rapat pleno terbuka yang digelar di KPU Provinsi Sulut, Kamis (24/9/2020).

Usai pengundian berlangsung, Calon Gubernur Olly Dondokambey mendapatkan nomor urut 3 dan mengatakan jika angka 3 adalah metal dan berkat bagi pasangan ini.

“Bersyukur hari ini kita sudah melakukan satu tahapan, dalam rangka pencabutan nomor urut. Puji syukur, Olly dan Steven mendapat nomor urut 3, yang artinya dalam Pancasila itu Persatuan Indonesia,” kata Olly.

Menurutnya, buat PDI Perjuangan angka 3 itu simbol kemenangan telak. “Ini memang metal, menang telak. Jadi bersyukur apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mengajak semua calon untuk bergandeng tangan, membawa pesta demokrasi di Sulut lebih baik, lebih bermartabat. Sehingga masyarakat Sulut mendapatkan pemimpin yang benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tegas Dondokambey.

Ditambahkan juga Calon Wakil Gubernur Steven Kandouw, “Singkat dari saya, setiap perlombaan selalu (hitungan dimulai) dari satu, dua dan diakhiri dengan tiga sebagai pemenang. Jadi angka tiga betul-betul adalah angka keberuntungan buat kami,” tutup Steven Kandouw.



Terlihat juga Olly-Steven serasi menggunakan pakaian berwarna putih dan tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

VAP-HR: Angka 2 Adalah Angka Kemenangan

MANADO (*lintassulut.com*)—Akhirnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan nomor urut masing-masing. Kamis (24/9/2020) di Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Sulut.

Pasangan Calon VAP-HR mendapatkan nomor urut 2. Dalam sambutan calon

Gubernur Sulawesi Utara Vonnie Anneke Panambunan (VAP) mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas nomor yang diberikan. “Tadi malam saya berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan yang terbaik untuk kami (VAP-HR), dan puji Tuhan saya bersyukur mendapatkan nomor urut dua” ucap VAP.

Sementara itu pada kesempatan yang sama calon Wakil Gubernur Hendry Runtuwene (HR) mengatakan angka 2 adalah angka kemenangan. “Jika kami diberikan angka dua itu berarti Tuhan memberikan kesempatan berjuang untuk meraih kemenangan,” tutup Runtuwene.(*)

Penulis: *Dian*

Sumber: *lintassulut.com*

Epilog

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memastikan jika pendistribusian logistik tak lari dari jadwal tahapan. Proses pencetakan hingga pendistribusian aktif disosialisasikan. Untuk target pendistribusian logistik, H-1 sudah berada di setiap TPS.

KPU terus koordinasi dengan stakeholder baik Bawaslu dan pihak pengamanan TNI/Polri agar dapat berjalan dengan baik. Item logistik di pilkada kali ini juga bertambah. Akibat pandemi Covid-19, KPU Sulut tak hanya menyiapkan perlengkapan TPS. Namun juga alat pelindung diri (APD) untuk petugas. Dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, hazmat, tempat cucian, thermogun dan beberapa item lainnya dalam menunjang penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat pemungutan suara.

Pencetakan surat suara juga tepat waktu. KPU melakukan approval desain surat suara sejak Sabtu 7 November 2020. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur, sebagai penyedia.

Perusahaan jasa ini juga menjadi penyedia yang mencetak surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota di Sulawesi Utara.

Jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total yang akan dicetak sebanyak 1.880.495 lembar surat suara. Validasi surat suara melibatkan pasangan calon.

Usai dicetak dan divalidasi, pendistribusian surat suara dimulai dari Kepulauan Sitaro. Daerah yang diprioritaskan untuk didahulukan pendistribusian surat suara yakni kepulauan. Pengawasan ketat pihak kepolisian juga dilakukan.(*)

Penulis : *Anita Angel*

Diterbitkan : *Manado Post*



**komisi
pemilihan
umum**
Sulawesi Utara

Bab VII

Pemungutan Suara





Pemungutan Suara

KPU Sulut Siap Layani Pasien Positif Covid-19 Gunakan Hak Pilih

SULUT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, siap melayani pasien positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, 9 Desember 2020 nanti.

Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh menjelaskan, untuk pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, akan dilayani di tempat dimana ia dirawat.

Jelas Ardiles, Kamis, 16 Juli 2020 sore, Tidak mungkin pemilih yang terkonfirmasi positif dia datang ke TPS. Dalam PKPU Nomor 6 2020 terkait pemilihan di masa pandemi, dia dilayani di rumah sakit.

Menurut Ardiles, sesuai mekanisme, satu hari sebelum pemungutan suara, penyelenggara di daerah di rumah sakit itu ada, baik PPS dan PPK akan meminta nama-nama yang terkonfirmasi positif yang dirawat. Bahkan, kata Ardiles, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/ Kota untuk pendataan bersama Gugus Tugas.

Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) yang diisolasi di rumah, kata Ardiles akan dilayani oleh petugas dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan tempat ia tinggal.

Tambahnya, Nanti bersama Bawaslu dan Panwas Kelurahan/Desa didampingi oleh PPS.

Kertas suara di TPS juga terang Ardiles akan disterilisasi. Tapi yang pasti, di setiap TPS, KPU menyediakan sarung tangan untuk digunakan saat menyalurkan hak suara. Jadi tak hanya yang positif atau ODP saja, tapi juga setiap warga yang datang ke TPS. Sarung tangannya sekali pakai dan langsung dibuang di tempat sampah yang disediakan.

Terkait hal ini juga, ia menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan Gugus Tugas, termasuk di dalamnya Dinas Kesehatan, Puskesmas di setiap kecamatan.

Yang pasti, tegasnya KPU siap melayani pasien positif Covid-19, orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) pada Pilkada nanti. Petugas-petugas kesehatan juga akan disiagakan bagi para penyelenggara di setiap TPS. (DESI)

Penulis: Desi Holung

Disiarkan: Radio Sion Sulut

KPU Terapkan 9 Langkah Wajib Saat di TPS di Hari Pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara pada pelaksanaan pencoblosan kertas suara di Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota, 9 Desember 2020 akan memberlakukan 9 langkah saat wajib pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Salman Sahelangi Komisioner KPU Sulut, pada hari pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 ini akan terlihat berbeda, dimana akan ada penerapan protokol kesehatan sebagai

antisipasi penyebaran virus Covid-19.

Jelas Saelangi dalam Rakor, Rabu, 5 Agustus 2020. Saat mendatangi TPS, wajib pilih akan mengikuti semua protokol kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh petugas KPPS.

Juga ditegaskan Saelangi, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara, nantinya akan menyiapkan semua Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Handsanitizer dan sarung tangan plastik di semua TPS, agar wajib pilih dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan.

Tambahnya diharapkan seluruh wajib pilih dapat mendatangi TPS, untuk menyalurkan hak suaranya guna menentukan pemimpin yang berkualitas dan diharapkan dapat memperhatikan anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Untuk diketahui 9 langkah yang wajib diikuti saat berada di TPS yakni, Kedatangan Wajib Pilih akan diatur oleh petugas KPPS yang bebas virus Covid-19, Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh 37,3, Jumlah wajib pilih dibatasi paling banyak 500 orang, Wajib menggunakan Masker, wajib menggunakan sarung tangan yang sudah disiapkan di lokasi TPS. Setelah selesai mencoblos kertas suara, tidak lagi mencelupkan jari kedalam botol tinta seperti biasa, tapi nantinya tinta akan tetes ke jari oleh petugas.(DESI)

Penulis: DesiHolung

Disiarkan: Radio Sion Sulut

Pilkada Dimasa Pandemi covid-19 KPU Sulut Terima Usulan Sediakan Masker Warna Netral

MANADO - Tanggal 9 Desember 2020 nanti akan dilaksanakan Pilkada Serentak. Segela persiapan baik yang sudah dilakukan maupun masih pada tahap perencanaan di antisipasi KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan mengacu pada Undang-Undang dan PKPU.

Namun demikian, KPU tetap melakukan usaha penyempurnaan dan terus menerima masukan dari tiap pihak demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang.

Seperti saat kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dilaksanakan sejak kemarin, Senin (31/8/2020) di salah satu hotel berbintang di Manado. Hari ini, Selasa (1/9/2020) KPU Sulut menerima usulan agar saat pencoblosan 9 Desember 2020 nanti menyediakan masker untuk para pemilih dengan warna tidak terkesan keberpihakan pada salah satu partai politik.

“Ya, itu masker netral. Biar waktu ke TPS nanti tidak menimbulkan polemik-polemik ,” ucap salah satu undangan.

Menanggapi itu, Yessy Momongan salah satu Komisioner KPU Sulut langsung berujar bila baru kali ini akan melaksanakan Pilkada di masa Pandemi Covid-19.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dan bapak juga ibu belum pernah melaksanakan pilkada di masa pandemi, belum pernah. Nah, sekarang kami belajar, bapak ibu juga belajar,” tutur Yessy.

Lanjut Divisi Teknis Penyelenggara ini, terkait usulan-usulan termasuk pengadaan APD yang bagus, ada aturan anggaran yang harus KPU siapkan.

“Kami akan siapkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang kami miliki,” kata Momongan yang pernah menjadi Ketua KPU Sulut ini.

Namun demikian terkait usulan tersebut dikatakan Yessy akan menjadi catatan bagi KPU Sulut.

“Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik dan kita sama-sama saling suport,” tandas Yessy. (jane)

Penulis: Jane Tungkagi

Diterbitkan: ciintasulut.com



Pemungutan Suara Ditengah Pandemi Covid, Ini 9 Hal Baru Yang Dikeluarkan KPU Sulut

MANADO – Menghadapi Pemilihan 09 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum keluaran 9 hal baru untuk pemungutan suara ditengah pandemi Covid-19.

Adapun kesembilan hal tersebut diuraikan Ketua Divisi Program dan Data KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lanny A. Ointu, SE., Selasa (01/08) dalam Rakor penyuluhan produk hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.

”Mulai dari Penyelenggara Pemilu di tingkatan KPU sampai PPDP kita wajib menerapkan Protokol Covid-19, dan menghadapi Pilkada kita keluaran 9 hal baru untuk yakni Jumlah pemilih 500 pemilih, KPPS sehat Covid-19, Suhu tubuh 37.3 derajat, kalau didapati ada diatas 37.3 mereka tetap dilayani karena ada TPS Kusus, Pengaturan Kedatangan, Area TPS bebas Covid-19, Sterelilisasi paku, Wajib Pakai Masker, Sarung tangan sekali pakai, tinta ditetes,” Urainya.(Ody)

Penulis: Noldy Kaeng

Diterbitkan: Sulutpos.com

Lanny Ointu Paparkan 9 Hal Baru Pemilihan Serentak 9 Desember 2020

MANADO — Di tengah pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa (1/9/2020).

Menghadapi Pemilihan serentak (9/10/2020), ada 9 hal baru dipaparkan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Divisi Perencanaan dan Data, Lanny Ointu SE. Lanny Ointu mengungkapkan bahwa KPU Sulut akan menerapkan 9 hal yang baru untuk Pilkada 9 Desember 2020, yakni :

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 orang.

2. KPPS sehat Covid-19.
3. Suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius.
4. Pengaturan kedatangan.
5. Area TPS bebas covid.
6. Sterilisasi paku.
7. Wajib pakai masker.
8. Sarung tangan plastik.
9. Tinta ditetes.

Penulis: Olvi Kapojos

Diterbitkan: manadoaktual.com

KPU Sulut Bakal Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di 8 Kabupaten

MANADO -- Guna lebih memantapkan tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, berencana akan menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara.

Terkait hal ini Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan tujuan dari simulasi adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas termasuk sosialisasi kepada stekholder, tim kampanye partai politik, Bawaslu, bagaimana mekanisme dan tata cara pemungutan suara di TPS.

”Akan ada beberapa penyesuaian mengingat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan berbeda karena disaat pandemi Covid-19,” jelas Mewoh. Juga kata Mewoh ada beberapa ketentuan mendasar yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya sehingga perlu disimulasikan. “Masyarakat perlu memahami secara detail bagaimana menggunakan hak suaranya ketika berada di TPS,” ungkap Mewoh.

Sementara terkait rencana simulasi tersebut Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan, Divisi Teknis Penyelenggara menjelaskan untuk pelaksanaan simulasi akan digelar langsung di Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan. “Untuk regulasi tidak



berubah, namun ada beberapa penyesuaian sehubungan dengan pandemi Covid-19,” ungkap Momongan.

Simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS akan digelar di Tingkat Provinsi serta di 8 Kabupaten Kota yang tidak melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Mitra, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Bolsel, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud.(*)

Penulis : Josh Tinungki
Diterbitkan : sulutnews.com

KPU Sulut Gelar Simulasi Pelaksanaan Pilkada, 9 Desember 2020

MANADO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, fokus pada pelaksanaan simulasi persiapan menuju 9 Desember 2020 nanti, yang akan dimulai, Senin (2/11/2020) di Minahasa dan akan berkelanjutan di Kabupaten/Kota yang lain.

Kepada wartawan, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menjelaskan sesuai rencana yang disusun, simulasi ini dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota.

“Tak hanya pilgub saja, tapi daerah penyelenggara pilkada juga akan diatur pelaksanaannya tentu dalam beberapa waktu ke depan sebelum pemungutan,” jelas Mewoh.

Mewoh mengakui memang rumit karena ada bertepatan dengan agenda lain yang juga termasuk padat.

“Simulasi ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan oleh karena pemilihan di masa pandemic Covid-19. Tentu ada aturan terkait pemungutan di TPS, tidak seperti biasanya karena ada tambahan terkait protap pencegahan Covid-19. Kondisi ini yang membuat kita berpikir simulasi sangat perlu dilakukan,” ungkap Mewoh.

Mewoh mengakui bahwa biasanya, di pemilihan sebelumnya memang ada simulasi. Tapi hanya sekali saja.

“Kali ini kita inginkan simulasi dilakukan di

15 Kabupaten/Kota. Ini sangat penting dan jadi sarana untuk sosialisasi pelaksanaan di TPS 9 Desember. Dalam simulasi, tetap kita akan siarkan secara luas lewat live di Facebook dan lainnya,” papar Mewoh. Sambil mempertegas jika simulasi ini setidaknya diketahui masyarakat luas sebelum mereka ke TPS.

“Kami harap dukungan stakeholder. Bawaslu bisa berikan masukan potensi persoalan, setelah nanti kita lakukan simulasi. Simulasi ini kita akan bentuk sedapat mungkin seperti hari pemungutan suara 9 Desember 2020, nanti. Hadirkan pemilih, saksi setiap parpol dan pengawas TPS, supaya situasinya persis,” ucapnya.

“Kami juga ingatkan ke KPU Minahasa agar dipersiapkan baik-baik. Termasuk soal imbauan protap agar ketua KPPS mengumumkan terus di lokasi. Kita khawatirkan antrian tak tertib. Apalagi jika hujan. Jangan sampai simulasi tak ikut protap Covid-19. Ini jadi perhatian masyarakat. Apalagi akan live. Jadi mesti diterapkan. Pelajari baik-baik. Termasuk di acara seremonial,” tutup Mewoh.(*)

Penulis: Mekar Salindeho
Diterbitkan: manadoline.com

KPU Sitaro Sukses Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

SITARO — Pelaksanaan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di TPS 005 Kelurahan Akesembeka Lindongan Dua, Kabupaten Sitaro sukses dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sitaro, Senin (30/11/2020).

Meskipun diguyur hujan saat pelaksanaan simulasi, 200 warga pengguna hak pilih yang ada di Kelurahan Aksembeka tetap antusias hadir di TPS.

Dan saat simulasi berlangsung KPU Sitaro tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai Covid-19.

Petugas KPPS berjumlah 7 orang yang ditugaskan di TPS 005 menggunakan APD



lengkap, begitu juga warga yang datang memilih tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Sebelum masuk ke bilik pencoblosan diwajibkan cuci tangan dan diukur suhu tubuh.

Saat pelaksanaan berlangsung, salah satu warga harus mencoblos di bilik khusus karena suhu tubuhnya 37,3, didampingi petugas menggunakan baju hazmat. Begitu juga pemilih Disabilitas juga didampingi petugas.

Sementara itu, ketua KPU Sitaro, Stevanus Kaaro, saat membuka kegiatan simulasi mengatakan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan gambaran pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

“Jadi gambaran tanggal 9 Desember itu sudah bisa terlihat di hari ini. Nanti, setelah simulasi ini selesai kita akan evaluasi kalau ada hal-hal yang masih kurang kita akan perbaiki,” ungkapnya.

Wakil Bupati Sitaro, Jhon Palandung turut memantau kegiatan ini serta memberikan apresiasi kepada KPU Sitaro yang boleh menginisiatif pelaksanaan kegiatan simulasi ini.

“Saya harap seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung sukses dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai,” ucap Palandung.

“Setiap tahapan pada Pilkada berbeda dengan sebelumnya karena wajib bagi kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi samping sukses Pilkada, kita juga harus memastikan tidak ada yang membawa bencana bagi kita semua, tidak mendatangkan persoalan baru yaitu bahwa akan banyak Covid-19 di sekitar kita. Kita harus berupaya mencegah agar kita bebas dari Covid-19,” jelas Palandung.

Hadir dalam kegiatan ini 5 Komisioner KPU Sitaro Stevanus Kaaro SH, Arther N Tamala SiP MSi, Yoseph Salombe, Hendrik Kundimang dan Vivian Palit. Turut hadir, Wakil Bupati Sitaro Jhon Palandung serta

Forkopimda. (mom)

Penulis: Mekar Salindeho

Diterbitkan: manadoline.com

9 Hal Baru yang Akan Anda Temui di TPS saat Pilkada Serentak 2020

MANADO — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Rabu (9/12/2020) mendatang, akan menjadi Pilkada pertama yang dilaksanakan dalam kondisi yang tidak normal karena berada dalam situasi pandemi COVID-19.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan protokol dan ketentuan yang berbeda dan tak biasa saat pemungutan suara nantinya. Semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

Disampaikan Komisioner KPU Sulawesi Utara, Lanny Ointu, ada sembilan hal baru yang akan ditemui oleh masyarakat saat datang ke TPS. Kesembilan hal baru tersebut, merupakan standar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Adapun hal-hal tersebut antara lain, :

1. Jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lebih dari 500 orang
2. KPPS sehat Covid-19
3. Suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius
4. Pengaturan kedatangan (Masuk dan keluar)
5. Area TPS bebas covid
6. Sterilisasi paku
7. Masker
8. Sarung tangan plastik
9. Tinta ditetes

Ointu juga mengatakan, di setiap TPS juga akan ada tempat cuci tangan, agar masyarakat yang datang bisa juga tetap menjaga kebersihan.

“Tak hanya itu mulai dari anggota PPS, KPPS akan dilengkapi faceshield, masker,



dan sarung tangan,” ujar Ointu.

Selanjutnya, Ointu meminta kepada masyarakat agar bisa menyalurkan hak pilih mereka, karena seluruh prosedur protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran virus Corona sudah diterapkan oleh KPU.

“Karena Pilkada merupakan penentu jalannya pemerintahan lima tahun ke depan, saya imbau dan saya ajak agar masyarakat menyalurkan hak pilihnya,” kata Ointu kembali. (*)

*Penulis: Oktaviana Mundung
Diterbitkan: kumparan.com*

KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara, Terapkan Protokol Kesehatan Cegah Corona

LOLAK — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (2/12) hari ini, menggelar simulasi pemungutan suara dan penghitungan surat suara pada Pilkada Sulut di Lapangan Daagon Desa Motabang, Kecamatan Lolak.

Pantauan manadobacirita, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menguji penerapan protokol kesehatan ketat untuk mencegah Virus Corona, seperti mengatur jarak pemilih, kewajiban memakai masker, melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke TPS, serta pengukuran suhu tubuh.

Ketua KPU Bolmong, Lilik Mahmudah mengatakan jika simulasi ini untuk memberikan contoh penerapan protokol kesehatan untuk para petugas TPS selama pencoblosan berlangsung. Selain itu, mereka juga memetakan waktu yang akan digunakan selama pencoblosan.

“Karena pelaksanaan Pilkada kali ini berada di tengah pandemi Corona, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan, terutama tentang penerapan protokol kesehatan. Kita tidak ingin ada kesalahan prosedur nantinya, sehingga simulasi ini penting untuk dicermati,” kata Mahmudah.

Selain untuk para petugas TPS, simulasi ini menurut Mahmudah juga untuk menunjukkan kepada warga jika pelaksanaan pencoblosan nantinya di TPS, akan mengikuti protokol kesehatan yang memberikan rasa aman untuk masyarakat nantinya di tengah pandemi Corona.

“Jadinya warga tidak bertanya-tanya bagaimana cara mencoblos dan keamanan mereka saat di TPS. Seperti tadi, masyarakat akhirnya mengetahui jika nanti mereka mendapatkan sarung tangan yang akan diberikan KPPS sebelum mencoblos,” kata Mahmudah.

“Untuk itu, kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa upaya perlindungan dari Virus Corona benar-benar diterapkan pada Pilkada kali ini,” ujar Mahmudah kembali. (*)

*Penulis: Oktaviana Mundung
Diterbitkan: kumparan.com*

Lanny Ointu Paparkan 9 Hal Baru Pemilihan Serentak 9 Desember 2020

Aman Nyoblos di 9 Desember 2020

MANADO — 9 Desember 2020, Pilkada serentak digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara gencar melakukan sosialisasi. Bahkan mengadakan simulasi pemungutan suara di 15 Kabupaten/Kota. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dr Ardiles Mewoh saat turun memantau simulasi di Minahasa Tenggara menegaskan pemilih agar tidak takut datang ke TPS pada 9 Desember.

“Prinsipnya semua protokol kesehatan itu kita terapkan di TPS. Jadi pada masyarakat saya sampaikan tidak perlu khawatir, tidak usah takut, kita akan menjaga kesehatan dan keselamatan Bapak/Ibu ketika datang ke TPS supaya tidak berpotensi terinfeksi Covid-19,” tegas Mewoh, saat melihat langsung simulasi pemungutan suara di Kabupaten Minahasa Tenggara, pekan lalu.

Senada disampaikan Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointoe. “Kami menjadwalkan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk 9 Desember. Memang ini



Pilkada pertama Indonesia, Pilkada di tengah masa pandemi Covid-19. Jadi sangat penting dilakukan simulasi, karena ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Baik petugas maupun pemilih yang akan datang ke TPS,” urainya.

Lanny mengatakan, banyak hal-hal baru yang bisa dilihat. “Ketika datang masyarakat akan dicek suhu tubuhnya, kemudian diberikan sarung tangan plastik ketika menggunakan hak pilih. Duduk pun sudah kita tata, ada jarak sekira satu meter. Sehingga tidak ada penumpukan massa,” tambahnya.

Begitu juga di C-Pemberitahuan yang disampaikan ke masyarakat, sudah dilengkapi jam. “Telah dihitung jamnya. Ini yang harus diperhatikan dan mohon disampaikan ke masyarakat,” tukasnya. Tiap TPS, disemprotkan disinfektan rutin. “Setelah mencoblos, tidak lagi mencelupkan jari dalam botol tinta. Sekarang tintanya ditetes ke salah satu jari. Yang kami ingin pastikan lagi, mohon pemilih yang datang membawa KTP elektronik atau suket, sekarang sedang digalakkan gerakan perekaman KTP elektronik,” jelasnya.

Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan yang juga hadir di simulasi ini ikut memberi pengarahan pada petugas yang bekerja di TPS. Dia berharap, KPPS sangat siap menjalankan tugasnya di 9 Desember. “Saya minta kita semua siap dengan hal-hal baru pada pilkada 9 Desember mendatang. Apa yang kurang dalam simulasi ini menjadi bahan evaluasi,” kata Momongan.

Diketahui, 9 Desember mendatang Pilkada serentak digelar. Di Sulut, terdapat 7 Kabupaten/Kota sebagai peserta dan akan juga dilaksanakan pemilihan gubernur. Berbagai hal baru akan diberlakukan. Ketika simulasi pemungutan suara di Kabupaten Minahasa Tenggara pekan lalu, dari pantauan penyelenggara berusaha menerapkan hal-hal baru tersebut. Terlihat lokasi TPS khususnya tempat duduk untuk antri diatur berjarak.

Kemudian pemilih yang datang diminta untuk cuci tangan lebih dahulu dan diperiksa

suhu tubuh. Penyelenggara pun menyiapkan satu TPS khusus, digunakan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas normal. Selanjutnya, pemilih akan diberikan sarung tangan plastik, sebelum kemudian mendapatkan surat suara yang wajib dibuka di hadapan petugas. Usai mencoblos, surat suara dimasukkan dalam kotak suara. Pemilih tak lagi mencelupkan tangan ke tinta. Namun petugas yang meneteskan tinta ke jari pemilih. Petugas di TPS juga dilengkapi dengan pakaian hazmat. Lokasi TPS di disinfektan rutin untuk melakukan langkah antisipasi.(*)

Penulis: Angel Rumeen

Diterbitkan: Manado Post

Hal Baru di Pemungutan Suara 9 Desember

Pemilih di TPS maksimal 500.

Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya.

Pemilih yang antri diatur jaraknya.

Dilarang bersalaman.

Ada perlengkapan cuci tangan portabel di TPS.

Petugas KPPS mengenakan masker. Pemilih diharapkan membawa masker dari rumah.

Petugas KPPS mengenakan sarung tangan karet selama bertugas. Pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS.

Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah (*Face Shield*).

Pemilih membawa alat tulis sendiri dari rumah.

Di setiap TPS disediakan tissue kering.

Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus dilakukan Rapid Tes/Tes Swab sebelum bertugas.

Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dilakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS.



Lingkungan TPS dilakukan desinfeksi sebelum, di tengah, maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara.

Selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan.

Jika ada pemilih bersuhu tubuh di atas standar, mencoblos di bilik suara khusus terletak di luar TPS.

Debat Pilgub Dongkrak Partisipasi Pemilih, Mewoh: Jangan Takut ke TPS

MANADO — Tahapan debat publik pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur telah tuntas. Tiga sesi sukses digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dalam debat terakhir, Selasa (17/11), Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengajak masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos pilihan paslon. “Ayo datang ke TPS pada 9 Desember. Jangan khawatir atau takut datang ke TPS oleh karena Covid-19. KPU telah mengatur regulasi pemungutan dan perhitungan suara yang ramah terhadap protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” ajak Mewoh. Dia berharap tiga sesi debat publik yang melibatkan tiga paslon, kian memantapkan pilihan masyarakat pada 9 Desember mendatang.

Kemudian terkait tiga sesi debat yang dilaksanakan KPU ini, pengamat politik Sulut memberikan apresiasi. “Pesta demokrasi yang dilaksanakan di tengah pandemi memberikan tantangan besar bagi penyelenggara dalam menggalang pemilih ke TPS. Pelaksanaan debat publik ini salah satu cara mengundang masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang,” sebut Dr Stefanus Sampe. Materi dan mekanisme debat yang dirancang KPU Sulut, nilainya, bisa memberi pengaruh besar pada pemilih untuk memanfaatkan hak pilihnya. “Artinya paslon sudah menyajikan visi dan misi mereka masing-masing. Masyarakat telah

menilai dan jika ingin program paslon ini terlaksana, masyarakat wajib datang ke TPS untuk coblos paslon yang mereka nilai layak,” tukasnya.

Pelaksanaan debat yang mewajibkan menggunakan protokol kesehatan, dikatakan Sampe, tak lantas membuat jumlah penikmat atau penonton debat berkurang. “Karena ada tayangan langsung TV swasta. Juga ada media massa yang ikut menayangkan melalui media sosial. Masyarakat mudah mengaksesnya,” tambahnya.

Ke depan Sampe berharap, dalam tahapan debat di pilkada masyarakat sebenarnya diberi ruang untuk bertanya kepada paslon. “Yang paling penting masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para kandidat,” kata Sampe.

Dikatakan dia, dengan digelarnya debat animo masyarakat untuk memilih dipastikan meningkat. “Antara semua metode kampanye kelihatannya debat kandidat yang paling menarik perhatian dan lebih efektif untuk menyosialisasikan program-program dari para pasangan calon,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda juga mengakui jika KPU sudah tampil maksimal menyajikan tahapan debat sesuai PKPU. “Kami ikut awasi dan sudah berjalan baik. Sejumlah rekomendasi ditindaklanjuti penyelenggara,” tukas Malonda.*

Penulis: Angel Rumeen

Diterbitkan: Manado Post

Persiapan Simulasi TPS, KPU Kabupaten Bolmong Capai 80 Persen

MANADO -Persiapan simulasi pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hampir rampung. Ini disampaikan Ketua KPU Bolmong, Lilik Mahmudah saat diwawancarai sejumlah awak media, Selasa(1/12/2020) malam di Lapangan Daagon Lolak Kabupaten Bomong.

“Sudah 80 persen,” ujar Mahmudah.

tempat para undangan, bilik suara pemilih dengan suhu tubuh diatas batas normal.

Lanjut disampaikan Mahmudah, jarak tiap bagian pun sesuai dengan protokol kesehatan.

“Jarak dari tempat para undangan dan tempat pemungutan suara 20 meter, begitu pun jarak para undangan, semua sesuai protokol kesehatan,” jelas Mahmudah.

TPS.Tempat pelipatan surat suara.

Dikatakan Ketua KPU Bolmong ini, kegiatan simulasi pemungutan suara akan dilaksanakan besok, Rabu (2/12/2020).

“Pukul 6 pagi sudah mulai,” tandas dia.

Terpantau oleh media ini, disediakan pula TPS bagi pemilih yang suhu tubuh di atas batas normal.* (jane)

Penulis: Jane Tungkagi
Diterbitkan: cintasulut.com

KPU Perketat Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Nyoblos

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2020 memperketat protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada hari H pencoblosan, 9 Desember 2020 nanti. Dimana ada sembilan hal baru yang penting diperhatikan.

Hal ini diungkapkan anggota KPU Sulut, Lanny Ointoe pada kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (1/9/2020) pagi.

Pertama, jumlah pemilih dalam satu Tempat Pemilihan Suara (TPS) maksimal 500 orang.

Ungkap Lanny, Pada PKPU 19 tahun 2019, maksimal jumlah pemilih dalam satu TPS adalah 900 orang. Namun dengan kondisi pandemi ini, kami mengatur maksimal 500 orang. Sedangkan untuk daerah Kabupaten/ Kota yang juga melaksanakan Pilkada,

maksimal 400 orang. Ini untuk mencegah terjadinya penumpukkan orang di TPS.

Yang kedua, lanjut dia, adalah seluruh KPPS sehat dari Covid-19. Namun untuk pemeriksaan, menurut Lanny sementara menunggu petunjuk, apakah di-rapid test atau di-swab.

Yang ketiga, pemilih yang datang, maksimal suhu tubuh 37,3 derajat. Keempat, akan ada peraturan kedatangan. Kelima, TPS bebas Covid .

Keenam, KPU akan melakukan sterilisasi paku. Ketujuh, pemilih wajib memakai masker.

Kedelapan adalah memakai sarung tangan sekali pakai.

Tandas Lanny untuk pemakain masker, semua wajib pilih pasti punya masker. Tapi KPU akan menyediakan masker di TPS untuk jaga-jaga jika ada pemilih yang datang tapi lupa membawa masker.

Dan yang terakhir adalah untuk tinta tanda sudah menggunakan hak pilih, tidak dicelup tapi akan ditetes oleh petugas. (DESI)

Penulis: DesiHolung
Disiarkan: Radio Sion Sulut

KPU Sulut Akan Simulasi Pilkada di 8 Titik

MANADO — KPU Sulut berencana melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di 8 titik. Agenda simulasi dimulai pekan depan itu dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. “Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas termasuk sosialisasi kepada stakeholder, tim kampanye partai politik dan Bawaslu, bagaimana mekanisme dan tata cara pemungutan suara di TPS,” kata Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Apalagi kata Ardiles, ada beberapa penyesuaian terkait protokol Covid-19 yang perlu disosialisasikan dan berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya.



“Karena pemilihan ini digelar di masa pandemi sehingga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Ada beberapa penyesuaian terkait protokol Covid dan ini perlu disosialisasikan agar masyarakat tahu bagaimana menggunakan hak suara di TPS dengan menerapkan protokol Covid-19 yang ketat,” jelas Mewoh. Terkait rencana simulasi tersebut, Komisioner Divisi Teknis KPU Sulut, Yessy Momongan, menjelaskan untuk pelaksanaan simulasi akan digelar langsung di wilayah atau kabupaten yang sudah ditetapkan, dimulai dari Kabupaten Minahasa.

“Simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS akan digelar di 8 titik di tingkat provinsi maupun di 8 Kabupaten/ Kota non penyelenggara Pilkada dan 7 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Wali/Wakil Wali Kota di Sulut. 8 Kabupaten Kota yang tidak melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Mitra, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Bolsel, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud. Harapan setelah dilakukan simulasi ini masyarakat bisa tahu bagaimana harus menerapkan protokol Covid-19 yang ketat saat di TPS nantinya,” kata Yessy.

*Penulis: Billy Tambahani
Diterbitkan: Harian Komentar*

KPU Sulut Gelar Simulasi Pemungutan Suara Mengacu Prokes Covid-19

TONDANO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Kelurahan Roong-Benteng MorayaTondano Barat, Kabupaten Minahasa, Senin (2/11/2020).

Simulasi digelar di TPS 1 yang telah dibuka pada Pukul 07.00 Wita. Dalam simulasi pemilihan dan pemungutan suara ini mengacu pada protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19, sebagaimana yang

dikedepankan KPU Sulut.

Sejumlah tahapan, seperti posisi duduk warga yang menunggu giliran diatur dengan menjaga jarak dan harus mencuci tangan serta mengetes suhu badan oleh petugas.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, simulasi ini diagendakan dalam persiapan menuju pilkada 9 Desember 2020 nanti.

“Sesuai rencana yang disusun, kegiatan ini dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota. Tak hanya Pilgub saja, tetapi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Hal ini akan diatur pelaksanaannya,” ujar Mewoh.

Menurut Mewoh, simulasi merupakan bagian yang sangat penting dan strategis, mengingat pilkada dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Tentu ada aturan terkait pemungutan di TPS. Tidak seperti biasanya, karena ada tambahan terkait protap pencegahan Covid-19.

“Kondisi pandemi virus Covid-19 ini yang membuat kita berpikir untuk perlu melakukan simulasi seperti ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Mewoh mengatakan bahwa pada pemilihan-pemilihan sebelumnya memang ada simulasi tapi hanya sekali saja.

“Kali ini kita inginkan simulasi dilakukan di 15 Kabupaten/Kota. Ini sangat penting dan jadi sarana untuk sosialisasi pelaksanaan di TPS 9 Desember 2020,” ucapnya.

Simulasi ini juga disiarkan secara luas lewat live di media sosial seperti Facebook dan Youtube agar diketahui masyarakat luas sebelum mereka ke TPS pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Simulasi ini kita bentuk sedapat mungkin seperti hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Makanya dihadirkan pemilih, saksi setiap tim kampanye/parpol dan pengawas TPS. Supaya situasinya persis hari pemungutan suara,” tutup Mewoh. **(Lina)**

*Penulis : Jellina Najoan
Diterbitkan : sulutreview.com)*



Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Gelar Simulasi PPS.

TONDANO – Pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan di tengah masa pandemi Covid-19, disikapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dengan menggelar simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (PPS).

Simulasi PPS itu, dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020.

Pjs. Gubernur Sulut turut hadir dan mengikuti prosesi yang digelar di Benteng Moraya Minawana, Tondano, Senin (02/11/20).

Kegiatan simulasi ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulut dalam tatanan protokol kesehatan di mana nantinya akan diberlakukan dalam pilkada 9 Desember 2020. Nantinya, sebelum masuk area pemilihan, nama dipanggil, ada pengukuran suhu tubuh, kemudian mencuci tangan, dan menerima kertas suara dan sarung tangan sambil duduk berjarak menunggu giliran. Setelah itu menuju tempat kotak suara dan selesai pencoblosan, sarung tangan diletakkan di tempat sampah.

Ketua KPU Provinsi Dr. Ardiles M.R. Mewoh Sip, M.Si melaporkan simulasi merupakan yang pertama digelar di Provinsi Sulut yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI.

Acara ini dilaksanakan di TPS Melati Kelurahan Roong Kabupaten Minahasa dengan 200 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan dimulai sejak pukul 07.00 Wita.

Menurut Ardiles, simulasi ini akan dilaksanakan di semua kabupaten/kota, agar semakin banyak orang tahu dan tidak khawatir karena dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu Sulut mengatakan ada 5.809 TPS di Provinsi Sulut dan dibutuhkan lokasi yang luas untuk TPS.

Selanjutnya, Pjs. Gubernur Sulut, Fatoni memberi apresiasi atas kegiatan ini.

“Ini adalah bentuk komitmen kita agar pelaksanaan Pilkada berlangsung dengan lancar, aman, damai dan juga sehat, artinya terhindar dari Covid-19”, kata Fatoni.

Menurut Pjs. Gubernur Agus Fatoni, simulasi hari ini sangat penting dan strategis untuk dapat mengetahui kekurangan, kendala dan suasana yang perlu diperbaiki. Sehingga membantu dalam menghadapi segala macam persoalan yang terjadi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Fatoni juga mengingatkan agar distribusi logistik dapat sampai di lokasi tepat waktu yang tentu dikawal secara ketat oleh petugas dan aparat keamanan.

“Mudah-mudahan dengan adanya simulasi, Pilkada di Sulawesi Utara bukan hanya lancar, bukan hanya sehat tetapi menjadi Pilkada yang berkualitas,” harap Fatoni.

“Mari kita berbondong-bondong ke TPS pada tanggal 9 Desember nanti, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena masa depan daerah provinsi, masa depan kabupaten kota dalam rangka memilih pemimpin itu di tangan masyarakat Sulawesi Utara. Dan semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan Pilkada ini dengan sebaik-baiknya,” pungkash Fatoni.

Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. H. Alfitra Salamm, APU, pemungutan suara ini adalah puncak dari pelaksanaan Pilkada. Untuk itu Alfitra berpesan agar KPU dapat menjaga akurasi DPT.

“Jangan sampai ada hak warga negara yang berhak memilih, tidak bisa memilih,” ucapnya.

“Saya berharap Pilkada di Sulut adalah Pilkada yang terbaik di seluruh Indonesia,” pungkashnya.



Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa simulasi ini adalah bagian dari sosialisasi. Mensosialisasikan agar masyarakat merasa aman datang ke TPS. Sehingga dapat mencapai target pemilih 77,5%.

Lebih lanjut Ilham menyatakan siap untuk diawasi, dipantau dan diberikan masukan dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan Pilkada dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada,” tandasnya dilanjutkan dengan membuka kegiatan simulasi ini secara resmi.

Diketahui, dalam simulasi ini juga dilakukan simulasi atas kejadian-kejadian khusus, seperti adanya pemilih yang memiliki suhu badan lebih dari 37,3°C, diberlakukan protokol kesehatan ketat yaitu didampingi oleh petugas yang mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, dan disediakan bilik khusus untuk tempat pencoblosan kertas suara. Selesai memilih, petugas tersebut dan bilik khusus langsung diberikan semprotan disinfektan.

Dan di setiap tempat ada pengingat kata wajib pakai masker dan jaga jarak, setiap 1 jam dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan.

Acara yang juga disiarkan secara live streaming ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Ketua KPU Minahasa Lord. A. Ch. E. Malonda, S.Pd.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Sulut, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Forkopimda Minahasa, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Satgas COVID-19 serta jajaran Pemkab Minahasa. (Lina)

*Penulis : Jellina Najoran
Diterbitkan:sulutreview.com*

Simulasi Pemungutan Suara di TPS 001 Sangihe Kurang Siap.

TAHUNA-- Gelar Kegiatan Simulasi pemungutan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kabupaten Sangihe kurang siap. Ini terlihat saat simulasi yang dilaksanakan di kompleks Gor Manente, Kecamatan Tahuna, Jumat (20/11/202), dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

Sejumlah hal menarik yang terkesan asal jadi yakni saat acara dimulai petugas KPPS tidak melengkapi diri dengan APD sesuai Protokol Kesehatan karena tidak mengenakan sarung tangan, bahkan lebih miris lagi tidak terlihat petugas khusus Covid yang mengenakan pakaian HASMAD.

Meskipun pelaksanaan dibuka tepat waktu, namun harus ditunda kembali selama 30 menit karena tidak ada petugas Panwas dan Limas dan saksi baru satu orang, sementara diluar TPS masih melakukan persiapan yang seharusnya sesuai ketentuan persiapan sudah tuntas tinggal menunggu masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih.

Juga yang mendapatkan catatan Komisioner KPU Kabupaten Sangihe tidak satupun hadir pada saat acara pembukaan. (*)

*Penulis : Josh Tinungki
Diterbitkan :sulutnews.com*

KPU Sulut Gelar Simulasi, Ini Hal Baru di TPS

MITRA - Pilkada serentak 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari. Merancang sukses untuk pesta demokrasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada terus melakukan sosialisasi, termasuk, Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di 15 Kabupaten dan Kota.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dr Ardiles Mewoh ketika turun langsung memantau simulasi di Minahasa Tenggara (Mitra) mengatakan tujuan simulasi digelar



agar pemilih tidak takut datang ke TPS pada 9 Desember karena kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

“Simulasi ini menerapkan semua protokol kesehatan di TPS. Kami berharap pemilih tidak khawatir dan takut ketika mencoblos pada 9 Desember nanti,” kata Ardiles usai memantau Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Wawali Kecamatan Ratahan, Mitra, Jumat (20/11/2020).

Senada dengan Dr Ardilles, Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointoe dalam sambutannya menegaskan Pilkada 9 Desember merupakan pilkada pertama Indonesia di tengah pandemi Covid-19. “Simulasi hari ini sangat penting karena protokol kesehatan yang ditaati oleh petugas maupun pemilih yang akan datang ke TPS,” jelasnya.

Dalam C-pemberitahuan yang disampaikan ke masyarakat, sudah dilengkapi waktu yang disarankan KPU terkait pukul berapa, pemilih datang ke TPS. “Jika semua mengikuti waktu yang di tetapkan, sangat di pastikan tidak akan terjadi kerumunan di TPS,” ujarnya.

Dari pemantauan sulutdaily.com di lokasi simulasi, terhadap hal baru yang terlihat yakni:

Pertama, Pemilih per-TPS maksimal 500 dan kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya sehingga tidak terjadi kerumunan. Untuk TPS 001 Kelurahan Ratahan berjumlah 300 pemilih, yang diundang saat simulasi berjumlah 200 pemilih dengan membawa pulpen dan masker sendiri dari rumah.

Kedua, untuk Lokasi TPS dan seluruh peralatan dilakukan desinfeksi sebelum, di tengah, maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ketiga, Pemilih yang datang harus mencuci tangan, menggunakan sarung tangan plastik dan masuk dalam antrian yang diatur jaraknya serta dilarang bersalaman. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dilakukan pengecekan suhu tubuh. Jika suhunya di

bawah 37,3 dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS.

Keempat, Petugas KPPS mengenakan masker/pelindung wajah (face shield), sarung tangan karet dan sebelumnya sudah dipastikan sehat dan bebas dari Covid-19 melalui Rapid Test/SWAB Test.

Kelima, Pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3 akan mencoblos di TPS khusus dan dilayani oleh KPPS 6 yang menggunakan APD lengkap.

Keenam, Di setiap TPS disediakan hand sanitizer, tissue kering dan usai mencoblos pemilih tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulut Yessy Yatty Momongan, S.Th., M.Si. Devisi Teknis Penyelenggara, usai simulasi melakukan evaluasi bersama dengan komisioner KPU Mitra dan seluruh petugas yang terkait di TPS.

Menurut Momongan, TPS 001 Kelurahan Wawali Kecamatan Ratahan seharusnya akan menjadi TPS yang paling siap saat 9 Desember nanti karena mendapat kesempatan untuk melakukan simulasi hari ini. “Hasil simulasi ini akan menjadi bahan evaluasi kami KPU untuk melakukan yang terbaik. Saya berharap semua siap dengan hal-hal baru pada pilkada 9 Desember mendatang,” kata Momongan.

Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong berharap tingkat partisipasi masyarakat untuk Pilkada minimal sama seperti Pemilu tahun 2019. “Kita sudah menyaksikan langsung bahwa dalam simulasi perhatian kami tentang penanganan Covid-19 ini cukup maksimal. Tapi kami juga berharap, jika ditemukan adanya kekurangan agar dapat dijadikan masukan. Sebab, simulasi ini untuk meyakinkan masyarakat yang mana pelaksanaan tanggal 9 Desember nanti KPU benar-benar memperhatikan penerapan protokol Covid-19,” ujarnya di dampingi Jhonly Pangemanan, Otnie Tamod, Hensly Peleng dan Otnie Wawo.

Dotulong yakin, pers sebagai mitra kerja



dapat terus memberikan support kepada KPU dengan mengajak masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS.(Jr)

Penulis: Jeane Rondonuwu

Diterbitkan: Sulutdaily.com

Pasien Positif Covid di RSUD Noongan Salurkan Hak Pilih

MANADO — Sebanyak 2 pasien positif Covid-19 yang sementara menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan, menyalurkan hak pilihnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (09/12) kemarin. Mereka dilayani oleh petugas PPS dan KPPS Desa Noongan, Kecamatan Langowan Barat, yang datang ke rumah sakit dengan menggunakan pakaian hazmat dan alat pelindung diri lengkap. Ketua PPS Desa Noongan, Veni Lomboan, mengatakan total ada 18 pasien di RSUD Noongan yang namanya tercantum dalam daftar pemilih. Namun yang melakukan pencoblosan surat suara hanya 15 pasien. “Dari 15 pasien yang kami layani, dua diantaranya pasien terkonfirmasi positif Covid, lima pasien suspek dan delapan lainnya pasien umum yang sementara menjalani rawat inap di RSUD Noongan,” kata Lomboan yang ikut mendampingi petugas KPPS di RSUD Noongan.

Selain petugas PPS dan KPPS, ada juga Pengawas TPS, saksi parpol dan aparat kepolisian yang turut mengawal proses pencoblosan di RSUD Noongan. Sementara dalam proses pencoblosan surat suara, menurut Lomboan, petugas KPPS tidak melakukan kontak langsung dengan pasien positif Covid.

“Karena beresiko, sebelumnya kita melakukan komunikasi dengan pihak pasien dan akhirnya ada perawat khusus di sana yang membantu, juga dari pihak keluarga pasien. Petugas KPPS yang menggunakan pakaian hazmat tugasnya membawa surat suara dan alat mencoblos, sementara PTPS memantau dari jarak sekitar 3 meter. Jadi

tidak ada kontak langsung dengan pasien positif,” papar Lomboan.

Usai melakukan pencoblosan, surat suara dari para pasien di RSUD Noongan, kemudian dibawa ke TPS untuk dilakukan penghitungan suara. “Meski tidak melakukan kontak langsung, tapi surat suara dari rumah sakit tetap kita lakukan sterilisasi dengan desinfektan sebelum dibawa ke TPS untuk dihitung,” tandasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa, Lord Malonda, saat dihubungi, mengatakan bahwa di wilayah Minahasa ada 3 rumah sakit rujukan pasien positif Covid, yakni RSUD Noongan, RS Siloam Sonder dan RSUD Sam Ratulangi Tondano. Dia pun memastikan bahwa semua pasien yang bersedia menyalurkan hak pilih dilayani oleh petugas PPS dan KPPS.

“Termasuk pasien positif yang punya hak pilih dilayani, makanya kita menyiapkan alat-alat pelindung diri khusus bagi petugas di lokasi rumah sakit,” ujar Malonda.

Penulis: Billy Tambahani

Diterbitkan: Harian Komentar

KPU Sulut Sukses Simulasi Pilgub di Tahuna

MANADO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menggelar simulasi proses pencoblosan dan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Simulasi dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam melaksanakan Pilkada. Pelaksanaan simulasi Pilkada digelar KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten Sangihe dilakukan di TPS 1, kelurahan Manente, Tahuna, Kabupaten Sangihe, Jumat (20/11) dimulai pukul 07.00 WITA.

Pelaksanaan simulasi yang dihadiri Forkopimda dilakukan sebagaimana kondisi riil pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan suara saat 9 Desember



nanti. Ada beberapa hal berbeda dalam pelaksanaan pemungutan suara hal ini terkait dengan kondisi pandemi dimana setiap wajib pilih dan petugas KPPS wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal berbeda diantaranya, setiap pemilih wajib pakai masker dan memakai sarung tangan saat berada di TPS. Ketua KPU Kabupaten Sangihe, Elysee Sinadian mengatakan, pelaksanaan simulasi bertujuan untuk bagaimana dapat membayangkan situasi TPS ketika Pilkada dilangsungkan di tengah Covid-19.

“Selain itu tujuan pelaksanaan simulasi kali ini agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pilgub 9 Desember dimana pilgub kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Ada 15 hal baru yang harus terjadi ketika pemungutan suara dilaksanakan. Aturan baru tersebut mengatur hal-hal yang harus dipatuhi pemilih dan petugas penyelenggara pemungutan suara. Dan ini sementara disimulasikan KPU. Tujuan berikutnya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada sudah siap dijalankan dengan tetap pada ketentuan protap Covid-19,” ujar Sinadian.

Adapun 15 hal baru di TPS saat pilkada serentak pertama, jumlah pemilih dikurangi maksimal 500 pemilih per-TPS.

Kedua, pengaturan jam kehadiran pemilih ke TPS setiap jam untuk sekian pemilih.

Ketiga, pengaturan jaga jarak bagi pemilih saat antri atau berada dalam TPS.

Keempat, dilarang bersalaman, terutama antara petugas KPPS dengan pemilih juga termasuk bersalaman sesama pemilih.

Kelima dipaparkan Sinadian, nantinya disediakan perlengkapan cuci tangan portable di TPS. Keenam, petugas KPPS menggunakan masker selama bertugas pemilih juga wajib menggunakan masker

Ketujuh, petugas KPPS menggunakan sarung tangan selama bertugas. Pemilih disediakan sarung tangan plastik sekali

pakai di TPS,” ujar Sinadian.

Hal baru kedelapan, petugas KPPS mengenakan face shield selama bertugas.

Kemudian sembilan, setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir.

Sepuluh, disediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos di TPS.

Sebelas, petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani rapid test sebelum bertugas.

Dua belas, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya.

Tiga belas, lokasi TPS di desinfektan sebelum dan sesudah proses pemungutan dan perhitungan suara.

Empat belas, setiap pemilih yang selesai mencoblos tak lagi celupkan jari ke dalam botol tinta. Tinta akan diteteskan oleh petugas.

Lima belas, jika ada pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius, maka dipersilakan mencoblos di bilik suara khusus yang ada di lingkungan TPS tersebut.

“15 hal penting ini yang harus dipatuhi dan saat ini sementara disimulasikan KPU. Kami KPU Sangihe sudah siap melaksanakan pilkada dengan kepatuhan protap kesehatan,” paparnya. Pilkada 2020 dikatakannya pula, bahwa KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih harus 77,5 persen walaupun ada masyarakat yang sangsi dengan persentase tersebut.

“Oleh karena itu suksesnya pilkada tidak cuman hasil kinerja dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, akan tetapi bagaimana peran kita untuk sosialisasi ke masyarakat dalam memilih tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Penulis: Billy Tambahani

Diterbitkan: Harian Komentar



Layani Pasien Covid, Baju ‘Astronot’ untuk KPPS Disiapkan

MANADO — Hingga kini, ada 80-an pasien Covid-19 dirawat RSUP Prof Kandou Manado.

Hal tersebut menjadi pertimbangan pihak rumah sakit dalam memenuhi hak konstitusi para pasien Covid-19, pada 9 Desember 2020 nanti.

Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Kandou Manado Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B, KBD mengaku sedang membicarakan formulasi terbaik bersama KPU Sulut terkait prosedur pasien Covid-19 menyalurkan suaranya.

Pasalnya, tidak ada tawar-menawar keluar dari ruang isolasi sebelum dinyatakan sembuh.

“Khusus pasien Covid-19 memang tidak bisa ke mana-mana, jadi harus didatangi ke dalam ruang isolasi,” kata Jimmy Panelewen pada Coffee Morning bersama KPU Sulut dan unsur Forkopimda, Jumat (27/11/2020).

Jimmy mengimbau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditugaskan tidak khawatir.

Pihaknya akan mempersiapkan kelengkapan khusus didampingi tenaga kesehatan ahli.

“Kami sediakan proteksi diri level tiga. Kalau teman-teman wartawan sering lihat perawat dengan baju seperti astronot, kira-kira seperti itu APD yang kami pakaikan kepada KPPS,” kata Panelewen.

Di kegiatan yang sama, Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon menegaskan Pilkada Sehat tidak sekadar memerangi Covid-19.

Menurut Meidy Tinangon, banyak unsur yang harus dipenuhi dalam pengertian mewujudkan pesta demokrasi sehat.

“Seperti menciptakan kompetisi dengan nuansa keadilan, transparan, aman dan bertanggungjawab,” kata Meidy.

Dikatakan, hal-hal memerangi pandemi Covid-19 sudah dilakukan KPU Sulut jauh

hari sebelumnya, setelah mendapat instruksi KPU RI lewat PKPU.

Bahkan kata Tinangon, semua jajaran penyelenggara intens melakukan rapid tes demi menunjang tugas dan tanggung jawab pada tahapan pilkada.

“Kami juga sudah melakukan simulasi di TPS dengan skenario protokol kesehatan ketat. Dan semua berjalan sesuai rencana,” tandasnya.

Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sulut, para akademisi, perwakilan dokter dan media massa.

Penerbit: Alfrits Semen

Sumber: BeritaManado.com

PILGUB SULUT: Di TPS Ollot Satu, Pemilih Bersuhu di Atas 37,3 Pilih Pulang

BOROKO – Pemeriksaan suhu tubuh pemilih menjadi salah satu hal penting yang wajib dilakukan petugas dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020.

Terpantau BeritaManado.com, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa Ollot Satu, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolmut, pemeriksaan suhu tubuh kepada wajib pilih terus dilakukan dengan ketat oleh para petugas KPPS.

Setiap pemilih tak satu pun luput dari pantauan penyelenggara untuk dilakukan pemeriksaan, dan penerapan protokol kesehatan lainnya.

Informasi yang diterima, di TPS I ini, terdapat 276 wajib pilih. Dari total wajib pilih itu ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan suhu terdapat pemilih yang bersuhu 37,3 derajat celsius ke atas.

Mereka pemilih dengan suhu 37,3 derajat celsius ke atas itu pun diarahkan petugas untuk beristirahat terlebih dahulu sesuai protap yang berlaku, beberapa menit kemudian dilakukan kembali pemeriksaan oleh para petugas, namun hasil menunjukkan masih di atas 37,3 derajat celsius ke atas.



Hal itu pun kemudian membuat pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias pulang, meski penyelenggara telah meyakinkan dan menyediakan bilik khusus bagi mereka pemilih dengan suhu 37,3 derajat celsius keatas.

Dari hasil pantauan sudah terdapat 2 pemilih dengan suhu 37,3 derajat celsius yang memilih pulang. Hingga pukul 12:00 WITA pemilih yang memilih pulang itu pun tak kunjung datang untuk memberikan hak pilihnya.

Penerbit: Nofriandi Van Gobel/Alfrits Semen

Sumber: BeritaManado.com

Voting Day Usai, Tunggu Hasil Resmi KPU

MANADO -- Semarak selesainya pemungutan suara 9 Desember 2020 ditunjukkan berbagai pendukung di kabupaten/kota, di Sulut.

Terlebih bagi mereka yang jagoannya memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil hitung cepat.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ardiles Mewoh meminta masyarakat bersabar.

Hasil resmi Pemilihan Serentak 2020 adalah produk dari KPU.

“Semua mengikuti tahapan. Pleno di kecamatan dan kabupaten/kota sebelum memasuki penetapan,” kata Ardiles, Rabu (10/12/2020).

Ardiles meminta kerjasama semua pihak dalam proses pleno perhitungan di wilayah masing-masing.

“Pemungutan suara berlangsung baik, mari kawal itu hingga penetapan nanti,” ajak Mewoh.

Ia memberikan apresiasi kepada warga Sulut karena sudah memenuhi hak konstitusinya sebagai warga negara.

“Begitu juga dengan paslon yang tetap

menjaga kondisifitas sampai hari ini,” tandasnya.

Penerbit: Alfrits Semen

Sumber: BeritaManado.com

Bawaslu Rekomendasi Coblos Ulang di Dua TPS

MANADO — Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni 1 TPS di Kota Kotamobagu dan 1 TPS di Kota Bitung. “Berdasarkan hasil kajian tim Bawaslu, di dua TPS tersebut terjadi pelanggaran administrasi. Jajaran kami di lapangan menemukan dugaan pelanggaran administrasi di TPS 03 Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu dan di TPS 01 Kelurahan Dudasudara, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Dari hasil kajian, kasus di dua TPS itu direkomendasikan ke KPU dan jajaran untuk pungut hitung ulang,” ungkap koordinator divisi hukum, humas, data dan informasi Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu SH MH, Minggu (13/12).

Menurut mantan ketua Panwaslu Kepulauan Talaud ini, bahwa dua kasus ini adalah hasil kerja pengawasan jajaran pengawas pemilu di tingkat TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, yang dengan penuh dedikasi bagi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

“Selaku pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara, tentunya kami beri apresiasi jajaran pengawas di lapangan yang telah bekerja dengan baik, sehingga secara preventif meminimalisir potensi pelanggaran, tapi juga secara cermat bisa menemukan pelanggaran,” ujar putra Porodisa ini.

Selain TPS di Kota Kotamobagu dan Bitung Bawaslu sebetulnya sedang mengkaji dugaan pelanggaran yang bisa berujung PSU di sejumlah TPS di Minut, Minahasa, Boltim.



“Namun laporan dugaan pelanggaran di daerah-daerah itu berdasarkan hasil kajian ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 112. Selain itu laporan pelanggaran yang sudah kadaluarsa. Sebetulnya juga Bawaslu sampai hari Kamis atau sehari sesudah pencoblosan menunggu laporan dugaan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistem Masif dan Masif) namun hingga hari ini (kemarin-red) tidak ada pelapor,” tambah koordinator Divisi Penindakan, Mustarin Humagi.

Selain rekomendasi pungut hitung ulang di Dua TPS, kata Mustarin, pihaknya juga tengah mengkaji dugaan pelanggaran Pidana Pemilu di salah satu TPS di Bolmong Timur.

Sementara itu, komisioner KPU Sulut Dr Salman Saelangi mengatakan, jika pihaknya sudah menindak lanjuti pelaksanaan PSU di TPS 3 Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur dan TPS 01 Duasaudara Kota Bitung. “Untuk PSU di dua titik itu sudah dilaksanakan Sabtu kemarin dan pelaksanaan coblos ulang berjalan lancar,” kata Salman dikonfirmasi kemarin.

Komisioner Divisi Hukum KPU Sulut, Meidy Tinangon menambahkan, adapun dasar hukum dan alasan pelaksanaan PSU adalah pasal 112 Undang-undang Pilkada Juncto Pasal 52 ayat 2 huruf e PKPU 8/2018 sebagaimana diubah dengan PKPU 18/2020. “Disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan termasuk di dalamnya jika ditemukan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS,” katanya.

Di TPS 03 Moyag Tampoan terdapat 2 pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut menggunakan hak pilih tanpa formulir pindah memilih. Sedangkan di TPS 01 Duasaudara terdapat 8 pemilih terdaftar dalam DPT Pilgub di luar Kota Bitung tanpa Form A5 diberikan kesempatan memilih untuk Pilgub.

Penulis: Billy Tambahani

Diterbitkan: Harian Komentor

Lansia, Disabilitas dan Ibu Hamil Prioritas di TPS

MANADO - Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) menjadi prioritas di tempat pemungutan suara 9 Desember mendatang. Hal itu ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Meidy Tinangon dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) berbasis komunitas, kampus, ormas, LSM, lembaga adat dan basis keagamaan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020, pekan lalu. Menurutnya, pihak KPU akan memperhatikan secara serius. “Untuk lansia dan penyandang difabel dan bahkan ibu-ibu hamil diprioritaskan di TPS nanti,” ujar Tinangon. Untuk pemilih yang masih muda, kata dia, ketika sudah ada di TPS, kemudian melihat ada lansia maka berikanlah kesempatan lebih dahulu kepada lansia untuk menggunakan hak pilih. Selain itu juga, KPU memperbolehkan ada pendampingan terhadap lansia yang sudah tak bisa lakukan pencoblosan secara mandiri.

“Pendamping pemilih akan menandatangani formulir C-Pendamping,” ucapnya. Untuk penyandang difabel, KPU mewajibkan semua TPS harus ramah penyandang difabel. Mulai dari lokasi TPS yang tidak merugikan penyandang difabel. Tidak perlu membuat TPS di gunung atau di tempat yang harus melewati tangga-tangga. “Kalau toh melewati tangga, maka harus ada tempat akses untuk kursi roda. Pintu masuknya harus lebih lebar dari pada lebar kursi roda, meja untuk mencoblos, bukan meja yang rendah. Tetapi harus lebih tinggi. Kalau dia pakai kursi roda, maka meja itu harus tinggi dari kursi roda. Itu adalah kriteria untuk TPS yang ramah untuk kaum difabel,” papar Tinangon.

Penulis: LivrAndo Kambey

Diterbitkan: Harian (Radar) Manado



Epilog

PEMUNGUTAN suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, meskipun digelar di tengah-tengah masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), tak menyurutkan niat dan semangat dari badan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, KPU di 15 Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terkait di dalamnya, untuk tetap menggelar pemungutan suara. Komitmen KPU untuk melakukan pemungutan suara, terlihat jelas dari berbagai persiapan-persiapan yang dilakukan, terutama dalam mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU bekerja keras agar pemungutan suara di TPS, di 15 Kabupaten/Kota berjalan lancar dan sukses. Para komisioner KPU Sulut, juga turun langsung ke TPS di berbagai tempat, di wilayah Sulut untuk menyosialisasikan 9 hal baru yang perlu diperhatikan dalam pilkada serta memantau simulasi di TPS.

Adapun ke 9 hal baru tersebut, adalah :

1. Jumlah pemilih di setiap TPS tidak lebih dari 500 orang.
2. KPPS sehat Covid-19.
3. Suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius.
4. Pengaturan kedatangan (masuk dan keluar).
5. Area TPS bebas Covid-19.
6. Sterilisasi paku.
7. Wajib pakai masker.
8. Sarung tangan plastik.
9. Tinta di tetes.

Hal inilah yang membuat masyarakat Sulut tidak takut dan ragu untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilih dalam pemungutan suara. Ini terlihat jelas dari meningkatnya persentase pemilih yang ikut memilih. Masyarakat Sulut mengapresiasi kinerja KPU Sulut dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada Pemilukada tahun 2020 yang berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

“Pemilih Sehat, Pilkada Sukses.”

Penulis: *Jellina Najoa*

Sumber: *sulutreview.com*



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab VIII

Penghitungan Suara





Penghitungan Suara

Cermat dan Teliti, KPU Sulut Mulai Rekapitulasi dan Perhitungan Suara

MANADO -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh bersama Komisioner Yessy Momongan, Salman Saelangi, Lanny Ointoe dan Meidy Tinangon membuka secara resmi Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulut, Senin (06/05/2019) di Ballroom Sintesa Peninsula Hotel.

"KPU Sulut secara cermat dan teliti akan menghitung perolehan suara se Provinsi Sulut. Kami berharap ini akan berlangsung dengan lancar dan bisa terselesaikan dengan baik," kata Dr Ardiles.

Usai dibuka, Komisioner Salman Saelangi membacakan Tatib Pleno diantaranya jumlah saksi untuk setiap peserta pemilu paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang sebagai peserta rapat.

Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi 1 (satu) peserta Pemilu. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani. "Peserta rapat menjaga ketertiban bersama selama pelaksanaan rapat rekapitulasi," kata Salman.

Sekretaris KPU Sulut, Dewi Pujiastuti saat memberikan laporan mengatakan rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Provinsi Sulut akan berlangsung Senin-Rabu (6-8/5/2019).

Sementara itu, pembukaan Pleno KPU diwarnai dengan penghormatan bagi para

pahlawan demokrasi yang berpulang karena kelelahan dalam proses Pemilu Serentak 2019 di Sulut. Hadir dalam acara pembukaan yakni Wagub Sulut Steven Kandouw, Kapolda Sulut Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Hardjanto, KPU se-Provinsi Sulut, Bawaslu se-Provinsi Sulut, saksi Parpol dan Calon DPD. (Jr)

Penulis: Jeane Rondonuwu

Diterbitkan: Sulutdaily

KPU Ujicoba Sirekap

MANADO — Penyelenggara Pilkada 2020 terus berinovasi dalam melangsungkan pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19. Inovasi di bidang teknologi informasi misalnya. Penyelenggara ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat saat pemilihan 9 Desember 2020 mendatang. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dirancang dan diperkenalkan KPU untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020. Ini menjadi alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara.

Penyelenggaraan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penggunaan Aplikasi Rekapitulasi Penghitungan secara Elektronik (SIREKAP) pada pilkada 2020, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama 15 KPU kabupaten/kota menyelenggarakan Uji Coba Nasional Rekapitulasi Perolehan Suara secara berjenjang.

Mulai Selasa (24/11) sampai Kamis (26/11). "Kami bersama jajaran KPU Kabupaten/



Kota serta beberapa PPK, PPS dan KPPS menyelenggarakan ujicoba rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Dari TPS sampai provinsi,” ungkap Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh.

Kegiatan ujicoba ini mendapat dukungan Pemerintah Sulawesi Utara. “Sebagai pemerintah daerah kami memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara pilkada 2020, dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya. Kami berharap pilkada pada masa pandemi ini, sukses. Itu juga merupakan kebanggaan seluruh rakyat Sulawesi Utara,” kata Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, yang hadir langsung di Kantor KPU Kota Kotamobagu menyaksikan pelaksanaan simulasi Rabu (25/11).

Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessy Momongan, kegiatan uji coba ini dimaksudkan agar jajaran penyelenggara khususnya di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara mulai dari Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan petugas di TPS dapat memahami penggunaan Sirekap sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diminimalisasi. “Secara teknis kegiatan uji coba ini dilakukan bagi daerah yang melakukan Pilgub/Pilkada/Pilwako. Simulasi dilaksanakan untuk semua jenis pemilihan,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini masing-masing Kabupaten/Kota melakukan ujicoba pada 12 TPS dengan mekanisme simulasi pengisian Formulir Model C Hasil-KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual. Dilanjutkan proses foto dokumen sampai proses pengiriman hasil foto Formulir Model C Hasil-KWK Simulasi ke Server Sirekap Pemilihan 2020 menggunakan Aplikasi Sirekap Mobile (versi Beta). Setelah proses Sirekap Mobile oleh yang bertugas sebagai KPPS dilanjutkan proses rekapitulasi tingkat kecamatan oleh yang bertugas sebagai PPK, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi dengan menggunakan Aplikasi Sirekap Web.

Adapun setiap tahapan proses rekapitulasi menggunakan Sirekap Mobile dan Sirekap Web sebagai alat bantu. Dapat dipantau langsung perkembangan proses input data oleh KPU RI.(*)

Penulis: Angel Rumeen

Diterbitkan: Manado Post

SiRekap akan Diterapkan di Pilkada 2020

MANADO - Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) tetap akan diterapkan dalam Pilkada 2020. Itu disepakati dalam rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI. Menurut Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon, SiRekap itu hanya sebagai alat bantu publikasi dan alat bantu rekapitulasi manual.

“Sekalipun hanya sebagai alat bantu, namun peran SiRekap untuk memenuhi prinsip transparansi dan efektivitas proses rekapitulasi serta langkah menuju pemilihan elektronik, patut diapresiasi,” ujar Tinangon. Dikatakannya, hasil penerapan aplikasi SiRekap memang bukan menjadi acuan hasil resmi pilkada. Dimana hasil akhir rekapitulasi tetap mengikuti “cara manual” dengan dibantu aplikasi SiRekap.

“Berbagai hal mutakhir dalam proses di TPS hingga rekapitulasi secara berjenjang dengan bantuan SiRekap, dielaborasi selama 4 hari di Bandung (14-17 November 2020) dalam forum Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Aplikasi Sirekap Gelombang ke IV,” tutupnya.

Penulis: LivrAndo Kambey

Diterbitkan: Harian (Radar) Manado

KPU se Sulut Ujicoba Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik

MANADO - Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) dirancang dan diperkenalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020. Ini menjadi alat bantu penghitungan dan



rekapitulasi suara pada Pilkada 2020.

Dalam rangka penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pilkada 2020, KPU Sulut bersama-sama dengan 15 KPU kabupaten/kota se-Sulut menyelenggarakan ujicoba nasional rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.

Ujar Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menyatakan, dilakukan mulai Selasa sampai dengan Kamis tanggal 24-26 November 2020.

Pihaknya, kata dia, bersama semua jajaran KPU Kabupaten/Kota serta beberapa PPK, PPS dan KPPS menyelenggarakan kegiatan ujicoba rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Yessy, Momongan menjelaskan, kegiatan ujicoba ini dimaksudkan agar jajaran penyelenggara khususnya di wilayah kerja KPU Sulut mulai dari tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS dan petugas di TPS, dapat memahami penggunaan SIREKAP.

Jelasnya, Sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diminimalisasi.

Secara teknis, kegiatan uji coba ini dilakukan bagi daerah yang melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali dan wakil wali kota.

Masing-masing kabupaten/kota melakukan ujicoba pada 12 TPS dengan mekanisme simulasi pengisian Formulir Model C Hasil-KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual.

Dilanjutkan dengan proses foto dokumen sampai dengan proses pengiriman hasil foto Formulir Model C.

Terangnya, Hasil-KWK simulasi ke server SIREKAP pemilihan 2020 menggunakan Aplikasi SIREKAP Mobile (versi Beta).

Setelah proses SIREKAP Mobile oleh yang bertugas sebagai KPPS, dilanjutkan dengan proses rekapitulasi tingkat kecamatan oleh yang bertugas sebagai PPK, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Dengan menggunakan Aplikasi SiRekap Web.

Setiap tahapan proses rekapitulasi menggunakan SiRekap Mobile dan SiRekap Web sebagai alat bantu. Dan dapat dipantau secara langsung perkembangan proses input data oleh KPU RI. (DESI)

Penulis: Desi Hulong

Disiarkan: Radio Sion Sulut

KPU Uji Coba Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pakai SIREKAP

MANADO - Pilkada tahun ini digelar di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, inovasi penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi sangat penting untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi secara lebih cepat saat pemilihan 9 Desember mendatang. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) dirancang dan diperkenalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020. Ini menjadi alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020.

Dalam rangka penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pilkada 2020, KPU Sulut bersama-sama dengan 15 KPU kabupaten/kota se-Sulut menyelenggarakan ujicoba nasional rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. "Dilakukan mulai Selasa sampai dengan Kamis tanggal 24-26 November 2020," ujar Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Pihaknya, kata dia, bersama semua jajaran KPU kabupaten/kota serta beberapa PPK, PPS dan KPPS menyelenggarakan kegiatan ujicoba rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. "Mulai dari tingkat TPS sampai tingkat provinsi," tandasnya.



Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Yessy Momongan menjelaskan, kegiatan ujicoba ini dimaksudkan agar jajaran penyelenggara khususnya di wilayah kerja KPU Sulut mulai dari tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS dan petugas di TPS, dapat memahami penggunaan SIREKAP. “Sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diminimalisasi,” ucapnya.

Secara teknis, kegiatan uji coba ini dilakukan bagi daerah yang melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali dan wakil wali kota.

“Simulasi dilaksanakan untuk semua jenis pemilihan,” sambungnya.

Masing-masing kabupaten/kota melakukan ujicoba pada 12 TPS dengan mekanisme simulasi pengisian Formulir Model C Hasil-KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual. Dilanjutkan dengan proses foto dokumen sampai dengan proses pengiriman hasil foto Formulir Model C. “Hasil-KWK simulasi ke server SIREKAP pemilihan 2020 menggunakan Aplikasi SIREKAP Mobile (versi Beta),” terangnya.

Setelah proses SIREKAP Mobile oleh yang bertugas sebagai KPPS, dilanjutkan dengan proses rekapitulasi tingkat kecamatan oleh yang bertugas sebagai PPK, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Dengan menggunakan Aplikasi SIREKAP Web.

Setiap tahapan proses rekapitulasi menggunakan SIREKAP Mobile dan SIREKAP Web sebagai alat bantu. Dan dapat dipantau secara langsung perkembangan proses input data oleh KPU RI.

Kegiatan ujicoba ini, lanjutnya, mendapat dukungan dari Pemprov. Menurut Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, sebagai pemerintah daerah tentu pihaknya memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Sulut beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 pada masa pandemi ini. “Sehingga

kesuksesan dari pemilihan tahun ini adalah juga merupakan kebanggaan seluruh rakyat Sulut,” ungkap Fatoni.

Penulis: LivrAndo Kambey

Diterbitkan: Harian (Radar) Manado

Masa Pandemic Virus Covid-19, KPU Siapkan “Sirekap” Untuk Publik

MANADO --Pilkada Serentak yang sudah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti merupakan tantangan bagi penyelenggara. Ini dikarenakan dunia sedang dilanda bencana non alam yakni Covid-19.

Namun demikian, tak mematahkan semangat para penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Berbagai upaya berupa program pun digalakkan demi memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan program baru yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Wale Pemilu- Pemilihan Tahun 2020 yang berlangsung pada masa pandemic Covid-19 saat ini membutuhkan inovasi penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi sangat penting untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat saat pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dirancang dan diperkenalkan KPU untuk merekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020 menjadi alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020.

Dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penggunaan Aplikasi Rekapitulasi Penghitungan secara Elektronik (SIREKAP) pada Pemilihan Tahun 2020, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan 15 (lima belas) KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara menyelenggarakan



Uji Coba Nasional Rekapitulasi Perolehan Suara secara berjenjang

Mulai Selasa sampai dengan Kamis tanggal 24-26 November 2020 kami bersama semua jajaran KPU kabupaten/kota serta beberapa PPK, PPS, dan KPPS menyelenggarakan kegiatan ujicoba rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dari Tingkat TPS sampai Tingkat Provinsi, demikian diungkap Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh

Kegiatan uji coba ini mendapat dukungan dari Pemerintah Sulawesi Utara.

“Sebagai Pemerintah Daerah tentunya kami memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 pada masa pandemi ini, sehingga kesuksesan dari pemilihan tahun ini adalah juga merupakan kebanggaan seluruh rakyat Sulawesi Utara,” demikian disampaikan Pjs. Gubernur Sulawesi Utara Dr. Drs. Agus Fatoni MSi. yang hadir langsung di Kantor KPU Kota Kotamobagu menyaksikan pelaksanaan simulasi pada hari Rabu, 25 November 2020.

Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessy, Momongan MSi bahwa kegiatan uji coba ini dimaksudkan agar jajaran penyelenggara khususnya di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan petugas di TPS dapat memahami penggunaan Sirekap sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diminimalisasi. Secara teknis kegiatan uji coba ini dilakukan bagi daerah yang melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota Wakil Wali Kota simulasi dilaksanakan untuk semua jenis pemilihan

Dalam ujicoba ini masing-masing Kabupaten/Kota melakukan ujicoba pada 12 (dua belas) TPS dengan mekanisme simulasi pengisian Formulir Model C Hasil-

KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual, dilanjutkan dengan proses Foto Dokumen sampai dengan proses pengiriman hasil foto Formulir Model C. Hasil-KWK Simulasi ke Server Sirekap Pemilihan 2020 menggunakan Aplikasi Sirekap Mobile (versi Beta). Setelah Proses Sirekap Mobile oleh yang bertugas sebagai KPPS dilanjutkan dengan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh yang bertugas sebagai PPK, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi dengan menggunakan Aplikasi Sirekap Web.

Adapun setiap tahapan proses rekapitulasi menggunakan Sirekap Mobile dan Sirekap Web sebagai alat bantu, dapat dipantau secara langsung perkembangan proses input data oleh KPU RI.* (jane)

Penulis: Jane Tungkagi

Diterbitkan: ciintasulut.com

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub 2020 Tingkat Provinsi Dimulai

SULUT -- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 telah resmi dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut pada Kamis (17/12/2020).

Mengawali proses rekapitulasi, Ketua KPU Manado Ardiles Mewoh mengatakan rekapitulasi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena saat ini Sulut sedang dilanda pandemi Covid-19, sehingga beberapa stakeholder terkait harus mengikuti rekapitulasi secara daring menggunakan zoom meeting.

“Karena kita tentu berupaya memutuskan rantai penularan dan patuh menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 selama kegiatan pleno ini,” ujarnya saat membuka rekapitulasi di Mercure Manado Tateli Beach Resort yang dihadiri langsung secara terbatas oleh Bawaslu Sulut, saksi paslon dan KPU Kabupaten/Kota.

Dirinya pun memanjatkan syukur kepada



Tuhan Yang Maha Esa karena semua yang hadir masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan seluruh tugas dan pekerjaan, terutama melaksanakan tahapan-tahapan dalam Pilgub Sulut 2020.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon yang sudah mengikuti sejak awal proses rekapitulasi yang kami lakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK, Kabupaten/Kota, dan tibalah kita di tingkat Provinsi, yang sejalan dengan pengawasan yang terus dilakukan oleh Bawaslu Sulut,” tukasnya.

“Rapat pleno terbuka ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 perubahan pada PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Dimana dalam ketentuan bahwa pelaksanaan pleno terbuka di tingkat Provinsi dilaksanakan dari tanggal 16-20 Desember 2020,” terang dia, didampingi Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan, Lanny Ointu, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti.

Ia berharap agar rekapitulasi dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya sebelum dengan waktu yang telah ditentukan, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh 15 Kabupaten/Kota se-Sulut bisa diselesaikan. Rekapitulasi hari pertama sendiri diawali oleh KPU Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang membacakan hasil rekapitulasinya.

Turut hadir dari ruangan terpisah yakni Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut. Forkopimda mengikuti rekapitulasi melalui sambungan zoom. Rekapitulasi kali ini pun disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial resmi KPU Sulut, agar bisa disaksikan seluruh masyarakat Bumi Nyiur Melambai.

Penulis: Olvi Kapojos

Diterbitkan: manadoaktual.com

Hari Ini, KPU Sulut Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub

MANADO — Sesuai agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (17/12/2020) akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ada di 15 Kabupaten/Kota, di Hotel Mercure, Tateli, Minahasa.

Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Salman Saelangi menyatakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut 2020 dengan mengutamakan protokol kesehatan.

“Pelaksanaan rapat pleno berlangsung tiga hari mulai tanggal 17-20 Desember 2020,” jelas, Saelangi, saat membuka acara media gathering mewujudkan transparansi pemilihan yang sehat, damai dan martabat, Rabu (15/12/2020).

Sedangkan Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggara Yessy Momongan pada kesempatan itu juga menjelaskan, jika dalam rapat pleno terbuka hanya menetapkan hasil rekapitulasi suara dan belum menetapkan pasangan terpilih.

“Untuk pleno hari ini bukan pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, hanya penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara,”ucap Momongan, sambil mengakui jika setelah rapat pleno, KPU membuka ruang jika ada pasangan calon akan menempuh jalur hukum, jika merasa keberatan dengan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara.

Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon mengatakan, terkait penetapan, berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal disebutkan bahwa jika ada gugatan maka, penetapan akan ditetapkan paling lambat lima hari setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).



“Jika tak ada gugatan, maka paling lambat lima hari setelah teregister di MK, baru kemudian KPU akan menetapkan hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih,” tutup Tinangon.*)

Penulis: Mekar Salindeho

Diterbitkan: manadoline.com

KPU: Tunggu Hasil Resmi

MANADO — Pemungutan suara pilkada serentak 2020 sudah berlangsung Rabu (9/12). Hasil hitung cepat lembaga survei hingga media centre paslon berseliweran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menunggu hasil pleno KPU di semua tingkatan.

“Mohon menunggu perhitungan resmi KPU yang dilakukan rekapitulasi secara berjenjang,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh pada Manado Post.

Lebih jauh dikatakan Mewoh, hari ini akan langsung digelar rekapitulasi di kecamatan. “KPU akan menjalankan tahapan demi tahapan rekapitulasi hingga pleno dengan baik dan sesuai aturan. Mohon dukungan dari stakeholder untuk ikut mengawasi,” tukasnya. Di samping itu, KPU berterimakasih pada masyarakat yang antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. “Terima kasih untuk antusiasme masyarakat yang ke TPS apalagi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” tandasnya.

Di sisi lain, prestasi ditorehkan penyelenggara pemilu. Digelar di tengah pandemi, ternyata partisipasi politik di Sulut tetap tinggi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Konsultan Citra Indonesia (KCI) merilis hasil quick count. Di mana suara yang sudah masuk 96,45%. “Partisipasi politik di Sulut untuk pilgub sangat tinggi. Yakni capai 79,82%,” tutur Supervisi LSI Denny JA Firman, dalam konferensi pers di Swisbel Hotel, Manado, Rabu (9/12).*)

Penulis: Angel Rumeen

Diterbitkan: Manado Post

Kandouw Ajak Tunjukkan Kedewasaan Berdemokrasi

MANADO — Pilkada serentak di Sulut memasuki tahap akhir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bahkan Minggu (20/12) KPU Sulut telah menuntaskan Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Sulut.

Pada pleno terbuka tersebut total suara sah mencapai 1.438.587. Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Nomor 3, Olly Dondokambey-Steven Kandouw memperoleh suara terbanyak dengan total 821.503.

Kemudian Paslon nomor 1, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Lanjdar 491.457 suara dan berada di posisi kedua. Juru kunci dengan 125.627 suara adalah paslon nomor 2, Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene.

Rekapitulasi tersebut turut diikuti dengan hasil kabupaten/kota penyelenggara Pilkada. Dengan telah diumumkan jumlah suara, Wakil Gubernur Steven Kandouw Sulut mengajak seluruh elemen menunjukkan gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional. Kandouw yang juga Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Sulut mendorong agar pasangan calon dan tim kampanye/tim pemenang jika merasa tak puas dengan hasil dapat melaporkan dan tempuh jalur hukum.

“Saya mengapresiasi jika ada paslon atau tim pemenang yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada, kemudian menggugat. Ini contoh demokrasi,” kata Kandouw.

Menurut dia, tindakan tersebut merupakan cara menghargai mekanisme hukum yang telah tersedia dalam Konstitusi dan UU Pemilu di Indonesia.

“Apabila berkeberatan atau tidak menerima hasil Pilkada, dapat menempuh jalur sengketa PHPU ke MK dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang selama ini terwacanakan,” sebut dia.



Selain itu dia juga mengajak semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif menjelang dan setelah penetapan hasil Pilkada.

“Saya mengajak agar kita dapat menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, dengan tidak melakukan provokasi, ancaman kekerasan dan seruan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional,” tutupnya.*)

*Penulis: Angel Rumeen
Diterbitkan: Manado Post)*

Hasil Rekapitulasi Suara KPU Sulut, ODSK Raih Suara Terbanyak

MANADO --Penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut berakhir.

Pelaksanaan rekapitulasi suara tersebut dilaksanakan di Hotel Mercure Tateli sejak tanggal 17 hingga 20 Desember 2020.

Dalam rekapitulasi suara tersebut, KPU Sulut menetapkan bahwa pasangan calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur Sulut, OllyDondokambey-Steven Kandouw (ODSK) memperoleh suara terbanyak yakni 831.503.

Adapun perolehan suara yang dicapai kedua Paslon lainnya adalah, Christiany Euginia Paruntu-Sehan Salim Landjar sebanyak 491.457 dan Paslon Vonnie Anneke Panambunan-Henry Corneles Mamengko Runtuwene peroleh 125.627 suara.

Sementara jumlah surat suara sah 1.438.587, jumlah surat suara tidak sah 24.012, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 1.462.605.(jane)

*Penulis: Jane Tungkagi
Diterbitkan: cintasulut.com*

Pilkada Serentak 2020, KPU RI Bakal Siapkan Program E-Rekap

MANADO --Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan

digelar pada tanggal 23 September 2020 mendatang, KPU RI bakal menyajikan program baru yakni E-Rekap. Ini disampaikan Anggota KPU RI, Viryan, SE. MM saat menjadi pemateri di kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Utara yakni Sosialisasi Stakeholder Pembentukan Badan Ad-Hoc Pemilihan Serentak Tahun 2020, Jumat (27/12/2019) di Hotel Four Points Manado.

“Salah satu yang sedang kami (KPU RI) persiapkan, mudah-mudahan berhasil. Ini juga masih ada beberapa proses lagi yang kami tunggu. Kami sedang mematangkan upaya E-Rekap,” tuturnya.

Selanjutnya disampaikan Viryan, rekapitulasi elektronik tersebut menggunakan handphone.

“Ini sedang disiapkan oleh tim teknis kami,” ucap dia.

Tentunya, masih oleh Anggota KPU RI ini, bila rencana tersebut terlaksana akan ada sosialisasi kepada jajaran Penyelenggara Pemilu.

Sedangkan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, SH menyampaikan bila akan membuat wacana yakni Live Stream terhadap semua kegiatan-kegiatan KPU Sulut.

“Termasuk rekapitulasi, rakor, dan sebagainya dalam rangka komitmen KPU Sulawesi Utara untuk melaksanakan Pilkada yang transparan dan berintegritas,” tandas Komisioner KPU Sulut dua periode ini.* (jane)

*Penulis: Jane Tungkagi
Diterbitkan: cintasulut.com*

Hasil Rekapitulasi KPU Sulut, Pasangan Olly Steven unggul dengan 821 Ribu 503 suara

MANADO -- Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, yang digelar KPU selama.3 hari sejak 17 Desember hingga 20 desember 2020 menrlempatkan



pasangan calon nomor urut 3 Olly Dondokambey-Steven Kandouw unggul dengan meraih 821.503 suara.

Rapat pleno dilaksanakan KPU Sulut di Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort, Minahasa, Kamis-Minggu (20/12/2020).

Yang dihadiri semua Kosisioner KPU Sulut, Koordinator Divis teknis Yessy Momongan membacakan hasil rekapitulasi

Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, pasangan Olly-Steven unggul di 12 daerah yakni Bolaang Mongondow 69.650 suara, Minahasa 128.737 suara, Sangihe 39.655 suara, dan Talaud 27.081 suara.

Kemudian, Minahasa Selatan 81.107 suara, Minahasa Utara 71.380 suara, Minahasa Tenggara 47.634 suara, dan Sitaro 25.237 suara.

Selanjutnya, Bolaang Mongondow Selatan 22.697 suara, Manado 129.318 suara, Bitung 65.624 suara, dan Tomohon 44.935 suara.

Pasangan calon nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar berada dirutan kedua dengan perolehan suara 491.457 suara.

Sementara, pasangan nomor urut 2 Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene berada diurutan terakhir dengan perolehan 125.627 suara.

Sementara itu Ketua KPU Ardiles Mewoh, memberikan apreseasi kepada warga Sulut terkait dengan tingkat partisipasi pemilih Sulut berada pada angka 79,84% dan menjadi tertinggi pertama dari sembilan provinsi yang menggelar Pemilihan Gubernur.

Rekapitulasi ini di hadiri oleh Bawaslu Sulut dan juga Komisiomer KPU Sesulut dan disiarkan secara live (Desi).

Penulis: Desi Hulong

Disiarkan: Radio Sion Sulut

KPU ingatkan Tunggu Hasil Resmi Perhitungan

MANADO -- Pemungutan suara pilkada serentak 2020 sudah berlangsung Rabu (9/12). Hasil hitung cepat lembaga survei hingga media centre paslon berseliweran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menunggu hasil pleno KPU di semua tingkatan.

Kepada wartawan Ketua KPU Ardiles Mewoh Memohon menunggu perhitungan resmi KPU yang dilakukan rekapitulasi secara berjenjang.

Lebih jauh dikatakan Mewoh, hari ini akan langsung digelar rekapitulasi di kecamatan. KPU akan menjalankan tahapan demi tahapan rekapitulasi hingga pleno dengan baik dan sesuai aturan. Mohon dukungan dari stakeholder untuk ikut mengawasi," tukasnya.

Di samping itu, KPU berterimakasih pada masyarakat yang antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, apalagi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Di sisi lain, prestasi ditorehkan penyelenggara pemilu. Digelar di tengah pandemi, ternyata partisipasi politik di Sulut tetap tinggi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Konsultan Citra Indonesia (KCI) merilis hasil quick count. Di mana suara yang sudah masuk 96,45%.

Partisipasi politik di Sulut untuk pilgub sangat tinggi. Yakni capai 79,82%," tutur Supervisi LSI Denny JA Firman, dalam konferensi pers di Swisbel Hotel, Manado, Rabu (9/12).(DESI)

Penulis: Desi Hulong

Disiarkan: Radio Sion Sulut

KPU Sulut Lakukan Proses Rekapitulasi Di Kota Manado

MINAHASA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Media Gathering Bersama Pers Secara Berkesinambungan Mewujudkan



Transparansi Pemilihan Yang Sehat Damai dan Bermartabat, kegiatan ini di laksanakan di Mercure Tateli Hotel Minahasa, Rabu 16 Desember 2020.

Dalam kegiatan tersebut Komisioner bidang teknis Yessy Momongan menyampaikan bahwa hari ini proses rekapitulasi di Kota Manado masih berlanjut dan tidak ada masalah sampai besok.

“Ketentuannya pukul 24.00 wita sudah selesai di kabupaten kota. Kami memulai yang sudah selesai, dan ini mendesain pelaksanaan dari KPU Talaud harus naik kapal semalam, dan tiba pagi ini untuk bisa tepat waktu. Kami akan melakukan rakor internal, karena kami ingin memaksimalkan terkait dengan informasi publik yang mungkin dulunya berbeda, karena dulunya informasi publik 1x24 informasinya sudah dapat, tapi sampai saat ini Sulut masih berpacu,”kata Momongan.

Adapun disampaikan Yessy Momongan bahwa Sulut informasi publik sudah 50%, yang sebenarnya sudah hampir 100%. Bagian kabupaten Minahasa Utara sudah 100% dan kabupaten Bolmong Selatan bisa 100% dari hasil rekapan, hanya saja di beberapa kabupaten kota yang di desain hasil rekapnya ternyata tidak ada jaringan, kendala dengan jaringan, sehingga proses ini tidak bisa jalan.

“Maka kami di tiap kecamatan membuka rekapitulasi dan kami minta para saksi dan bawaslu untuk foto Plano C hasil yang di tempel di tiap-tiap TPS. Ini fungsinya untuk membaca angka-angka hasil rekap, ini sebelum proses jalan, dan hasilnya pun tidak bisa di kirim, maka kami mengumpulkan foto-foto, dan minta bantuan dari KPU RI untuk memasukkan data dan di proses dan ini bisa signifikan terkait proses informasi perolehan suara dari beberapa TPS yang sudah terkirim untuk Plano C hasil”ucap Momongan. (Feicy)

Penulis: Feicy

Diterbitkan: Swarakawanua.com

Media Gathering KPU Sulut, Bahas Rekapitulasi Suara

MANADO – Rutinitas koordinasi antara KPU Sulut dan media massa kembali digelar usai tahapan pemungutan suara Pilkada 2020.

Kali ini, media gathering bersama puluhan jurnalis digelar di Hotel Mercure Tateli, Kabupaten Minahasa, Rabu (16/12/2020).

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi mengatakan titik berat dalam pertemuan kali ini adalah informasi rekapitulasi suara yang akan segera dimulai.

“Sebentar sore diawali dengan pleno. Rekapitulasi menjadi agenda terbuka yang wajib diketahui publik, ” kata Salman Saelangi saat membuka kegiatan.

Menurut dia, peran media dalam tahapan rekapitulasi ini sangat penting khususnya menyebarluaskan proses hingga hasil.

“Terima kasih juga karena selama ini teman-teman wartawan sudah setia bersama KPU dalam proses penyelenggara pilkada, ” katanya.

Hal yang patut disyukuri, tambah Salman, ialah tingkat partisipasi pemilih di Sulut yang sangat menggembirakan.

Media Gathering dihadiri Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan dan Meidy Tinangon.

Penulis: Alfrits Semen

Sumber: BeritaManado.com

Banyak Pergumulan, Pilkada Sukses Meski Corona Menyerang

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah menetapkan hasil perhitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut, beberapa waktu lalu. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengakui bahwa banyak pergumulan tantangan ketika melaksanakan pemilihan di tengah pandemi covid.

“Kita semua rasakan pekerjaan ini dan begitu sulit. Sebab kita belum punya pengalaman sedikitpun menyelenggarakan



pemilihan di masa pandemi covid. Oleh karena itu kami ajak kita semua panjatkan syukur pada Tuhan yang berkenankan laksanakan pilkada dengan lancar dan dalam keadaan sehat,” ungkap Mewoh.

Menurutnya, dalam proses tersebut, ada yang harus alami terinfeksi covid baik itu jajaran KPU, maupun Bawaslu. “Namun bisa terlindungi oleh Tuhan,” terangnya.

Mewoh berterima kasih untuk jajaran KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS yang bekerja di musim pandemi yang penuh tantangan sendiri. “Namun dengan semangat bisa laksanakan pemilihan,” ucapnya. Pihaknya juga berterima kasih untuk paslon yang sepanjang tahapan betul-betul mengikuti sesuai aturan, termasuk mentaati protap pencegahan covid.

“Terima kasih juga Kapolda Sulut atas dukungan luar biasa dari awal sampai proses rekapitulasi yang berjalan aman. Terima kasih juga untuk teman-teman media yang memberi informasi sejuk. Terakhir untuk masyarakat yang gunakan hak pilih,” tuturnya.

Ditambahkan Mewoh, Pilkada Sulut 2020 ini adalah pemilihan dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi dari 9 provinsi. Ini berdasarkan data rekapitulasi yang ditetapkan yakni 79,84 persen. “Di atas target nasional 77,5. Kemudian Kota Tomohon peringkat pertama tertinggi untuk pemilihan wali kota yakni 93,13 persen. Boltim peringkat dua tertinggi untuk tingkat kabupaten di 95,94 persen dan itu memilih secara langsung. Di Bolsel 94 persen,” paparnya.

Lanjutnya, untuk Mitra adalah kabupaten tertinggi yang tidak selenggarakan pemilihan bupati dan hanya gubernur yakni angkanya 85 persen. “Kami bangga. Ini luar biasa, kita beri apresiasi atas keinginan besar warga Sulut dalam berpartisipasi di Pilkada 2020,” ungkapnya. Di akhir, Mewoh menginformasikan bahwa Sulut adalah provinsi yang tak ada sengketa proses.

“Kemudian daftar pemilih kita juga mendapatkan predikat terbaik ketiga dalam

penetapan DPT. Ini hanya sederet angka yang kami upayakan semaksimal mungkin. Namun proses yang prosedural, itulah yang kami terapkan,” tutupnya.

Penulis: LivrAndo Kambey

Diterbitkan: Harian (Radar) Manado

Yessy : Terima Kasih Teman-teman KPU Kab/Kota

MANADO - Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid saat ini merupakan hal yang baru. Dari setiap proses tahapan, tak sedikit penyelenggara jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terinfeksi dengan virus tersebut. Namun, semangat penyelenggara membuat proses tahapan berjalan baik sampai akhirnya tuntas dalam rekapitulasi tingkat provinsi, Minggu (20/12). Rasa haru pun diungkapkan Komisioner KPU Sulut Divisi Teknis, Yessy Momongan di akhir penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut.

“Saya bangga dan salut untuk KPU kabupaten/kota. Sebab, dimasa pandemi ini teman-teman masih kuat semua,” ungkap Yessy sembari menitikkan air mata. Dikatakannya, beberapa teman-teman dari divisi teknis sempat masuk isolasi. Namun sudah keluar dan sehat. “

Umumnya dari divisi teknis. Tapi terima kasih. Tanpa kalian kami tak bisa laksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi,” ucapnya. Yessy juga memohon maaf karena kerja sampai larut pagi sehingga bisa menurunkan imun. “Namun dengan semangat teman-teman, akhirnya mampu sukseskan pemilihan,” tuturnya sembari berterima kasih pada semua saksi paslon, Bawaslu serta juga dukungan dari Sekretaris KPU Sulut dalam proses pelaksanaan pemilihan. “Sukses ini adalah sukses kita semua,” tutupnya.

Penulis: LivrAndo Kambey

Diterbitkan: Harian (Radar) Manado



Tak Ada Pengurangan atau Penambahan Hasil Perhitungan

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota sampai pada, Kamis (18/12) dimulai untuk tingkat provinsi. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menekankan bahwa dalam tahapan tersebut, jajaran KPU telah lakukan rekapitulasi dengan mempedomani undang-undang dan aturan yang ada.

“Tak ada upaya tindakan untuk menambah, mengurangi bahkan mengubah hasil. Itu tak ada sama sekali,” tegasnya. Dicontohkannya soal video yang beredar coblos dua kali dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut. “Kami tentu harus filter dulu sumbernya dari mana. Tapi ini dinamika. Publik bisa mengawasi, tapi juga harus cari tahu terlebih dahulu mekanisme yang dilakukan oleh KPU,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika ada penyelenggara lakukan hal di luar aturan, maka tak segan-segan akan tindak tegas. “Dari awal kami sudah ingatkan ke jajaran kita untuk tidak lakukan perbuatan tindak pidana, mengurangi atau menambah hasil pemilihan. Tidak ada jajaran kita lakukan itu,” tegasnya.

Pihaknya, lanjut Mewoh, sudah terbuka, transparan mulai dari TPS dan perhitungan. “Rekapitulasi di kecamatan juga dilakukan secara transparan. Dilakukan terbuka sehingga masyarakat luas bisa mengikuti bagaimana rekapitulasi itu. Kita manfaatkan transparansi publik ini untuk berikan keyakinan pada publik bagaimana kita bekerja,” terangnya.

Menurutnya, kalau pun ada keberatan, pihaknya akan terima. “Asalkan ada bukti yang kuat. Sebab tahapan berjalan terus sampai selesai,” tutupnya.

*Penulis: LivrAndo Kambey
Diterbitkan: Harian (Radar) Manado*

Data di Web KPU Bukan Hasil Resmi

MANADO - Data yang ditampilkan pada menu hitung suara di web pilkada2020.kpu.go.id bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Salman Saelangi mengatakan, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. “Tetap manual.

Sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) memang berproses, karena bagian dari rekap itu sendiri,” ujarnya. Jadi, kata dia, itu belum bisa menggambarkan secara utuh. “Nanti ada proses pleno perhitungan berjenjang mulai dari kecamatan. Di situ bisa dapat gambaran lebih,” terangnya. Data yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang hasil foto formulir Model C. Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap. “Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model

C. Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian, apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C. Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan,” jelasnya.

*Penulis: LivrAndo Kambey
Diterbitkan: Harian (Radar) Manado*

Warga Diminta Tunggu Hasil Resmi KPU

MANADO - Masing-masing pendukung pasangan calon baik gubernur dan wakil gubernur Sulut diminta untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, pihak KPU akan melakukan terlebih dahulu rapat pleno di tiap tingkatan. Untuk itu masyarakat diminta bersabar dan menunggu hasil pleno. “Paslon dan juga masyarakat agar supaya tunggu hasil resmi KPU,” tegas Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.



Dijelaskannya, mulai 10 Desember 2020 akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk itu diharapkan kerja sama semua elemen masyarakat dan stakeholder untuk sama-sama mengawasi jalannya pleno perhitungan suara. Mewoh pun bersyukur proses pemilihan telah berjalan dengan baik dan tetap mengikuti protap kesehatan pencegahan Covid-19.

“Tentu kami bersyukur tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut berjalan lancar. Protokol kesehatan di sebagian besar TPS berjalan baik,” terangnya. Mewoh juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah datang ke TPS menggunakan hak pilih dan mengikuti protap kesehatan.

*Penulis: LivrAndo Kambey
Diterbitkan: Harian (Radar) Manado*

Rekapitulasi Perolehan Suara Baru Dimulai, Belum Ada Penetapan Calon

MANADO - Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut akan mulai rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi. Sebelumnya telah dilakukan rekapitulasi secara berjenjang. Mulai dari kecamatan, kabupaten/kota dan saat ini tingkat provinsi.

“Rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah selesai. Berjalan baik. Tinggal ada beberapa kabupaten/kota yang sedang berlangsung,” kata Komisioner KPU Sulut Divisi Teknis, Yessy Momongan dalam media gathering, kemarin di salah satu hotel di Minahasa.

Lebih jauh dikatakannya, tanggal 17 Desember hari ini dijadwalkan mulai rekapitulasi di tingkat provinsi sampai 20 Desember. “Lebih cepat lebih baik sebenarnya. Tapi kita hargai dinamika di dalamnya,” jelasnya.

Dirinya pun mengingatkan bahwa saat ini rekapitulasi dan penetapan perhitungan perolehan suara. Bukan penetapan calon terpilih. “Karena masih ada proses jika

ada gugatan di MK. Jangan salah. Jadi ini nantinya penetapan hasil perolehan suara. Bukan penetapan calon,” tegasnya.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menerangkan, KPU secara berjenjang telah lakukan rekapitulasi tetap tunduk sesuai ketentuan, kode etik peraturan yang ada.

*Penulis: LivrAndo Kambey
Diterbitkan: Harian (Radar) Manado*

KPU Akui Ada Pelanggaran di TPS

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengakui terdapat pelanggaran di dua TPS yang pada akhirnya mendapat rekomendasi pengawas pemilu untuk dilakukan PSU.

“Dua TPS yang melaksanakan PSU khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Itu berdasarkan rekomendasi Panwascam Kotamobagu Timur dan Ranowulu kepada PPK yang diteruskan masing-masing kepada KPU kota Kotamobagu dan Kota Bitung,” kata Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon.

Dijelaskannya, soal pelanggaran yang menyebabkan PSU, di TPS 03 Moyag Tampoan terdapat 2 pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih di TPS tersebut menggunakan hak pilih tanpa formulir pindah memilih.

“Sedangkan di TPS 01 Duasudara terdapat 8 pemilih terdaftar dalam DPT pilgub di luar kota Bitung tanpa Form A5, diberikan kesempatan memilih untuk Pilgub,” terangnya.

Kepastian digelarnya PSU, kata dia, setelah KPU Kotamobagu dan Kota Bitung melaksanakan pleno dan menerbitkan SK penetapan PSU. Ditambahkan Tinangon, dasar hukum dan alasan pelaksanaan PSU adalah pasal 112 Undang-undang Pilkada Juncto Pasal 52 ayat 2 huruf e PKPU 8/2018 sebagaimana diubah dengan PKPU 18/2020.

Dimana disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari



hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan termasuk di dalamnya jika ditemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Penulis: LivrAndo Kambey

Diterbitkan: Harian (Radar) Manado

KPU Sulut Uji Coba Rekapitulasi Suara Eletronik

MANADO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Sirekap bakal digunakan pada Pilkada serentak 2020.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, aplikasi ini akan digunakan untuk menghitung hasil suara Pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid 19. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang berlangsung pada masa pandemi Covid 19 saat ini membutuhkan inovasi penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi.

Hal ini sangat penting untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat saat pemilihan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang,” kata Ardiles, Kamis (26/11).

Disampaikan Ardiles, semua jajaran mulai KPU Provinsi dan KPU di 15 Kabupaten/ Kota telah melakukan uji coba secara berjenjang. “Mulai Selasa sampai dengan Kamis tanggal 24-26 November 2020 kami bersama semua jajaran KPU Kabupaten/ Kota serta beberapa PPK, PPS dan KPPS menyelenggarakan kegiatan ujicoba rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Momongan mengatakan, kegiatan ujicoba ini dimaksudkan agar

jajaran penyelenggara khususnya di wilayah kerja KPU Provinsi Sulut mulai dari tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS dan petugas di TPS dapat memahami penggunaan Sirekap sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diminimalisasi.

“Secara teknis kegiatan uji coba ini dilakukan bagi daerah yang melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota Wakil Wali Kota simulasi dilaksanakan untuk semua jenis pemilihan,” kata Yessy.

Dalam Ujicoba ini masing-masing kabupaten/kota melakukan ujicoba pada 12 (dua belas) TPS dengan mekanisme simulasi pengisian Formulir Model C Hasil-KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual, dilanjutkan dengan proses foto dokumen sampai dengan proses pengiriman hasil foto Formulir Model C.

“Hasil-KWK simulasi ke server Sirekap Pemilihan 2020 menggunakan Aplikasi Sirekap Mobile (versi Beta). Setelah proses Sirekap mobile oleh yang bertugas sebagai KPPS dilanjutkan dengan proses rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh yang bertugas sebagai PPK, tingkat Kabupaten/ Kota dan tingkat Provinsi dengan menggunakan aplikasi Sirekap web,” terang Yessy.

Lanjut Yessy menjelaskan, adapun setiap tahapan proses rekapitulasi menggunakan Sirekap Mobile dan Sirekap Web sebagai alat bantu sehingga dapat dipantau secara langsung perkembangan proses input.

Penulis: Billy Tambahani

Diterbitkan: Harian Komentar

Pemenang Pilgub Diumumkan 26 Desember

MANADO — Sejumlah lembaga hitung cepat telah merilis calon Gubernur dan Wakil Gubernur peraih suara terbanyak. Namun demikian, KPU Provinsi Sulut meminta masyarakat bersabar menunggu hasil resmi real count KPU yang rekapitulasi suara



dilakukan berjenjang dan diumumkan paling lambat tanggal 26 Desember nanti. “Terkait adanya lembaga hitung cepat yang dirilis itu tidak apa-apa karena ada ketentuannya. Namun kami mohon kesabaran pasangan calon untuk menunggu hasil resmi KPU yang jadi dasar kemenangan Pilkada,” ujar Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Rabu (09/12) malam kemarin.

Ia mengatakan, setelah pencoblosan, tahapan selanjutnya yakni rekapitulasi suara. “Berdasarkan PKPU 5 tahun 2020, rekapitulasi suara akan dilakukan secara berjenjang dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan rekapitulasi tingkat Provinsi,” ujarnya.

Rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan mulai 10 sampai 14 Desember 2020. Kemudian rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota 13 sampai 17 Desember. Rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat Propinsi tanggal 20 Desember selanjutnya KPU paling lambat tanggal 26 Desember KPU umumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub. “Setelah rekapitulasi ada tiga hari masa gugatan. Jika tidak ada dilanjutkan pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih,” beberapa Ardiles.

Sementara itu, komisioner KPU Sulut divisi Sosialisasi, Salman Saelangi mengimbau kepada masyarakat dan pasangan calon untuk tidak melakukan euforia berlebihan karena saat ini dalam masa pandemi Covid-19. “Jangan dulu ada euforia berlebihan. Karena dari euforia ini akan terjadi penumpukan massa yang tidak memperhatikan pola jaga jarak. Kami harapkan setiap pasangan calon bisa mengimbau kepada pendukung untuk tidak berkumpul-kerumunan. Jangan sampai terjadi penambahan kasus covid dari momen euforia. Pencoblosan telah usai, kepada masyarakat diimbau untuk lebih tenang dan nyaman menunggu hasil resmi dari KPU,” harap Salman. KPU Provinsi Sulut mengapresiasi kepada masyarakat yang telah menyalurkan hal suaranya di TPS.

Meski di tengah pandemi namun animo masyarakat datang ke TPS cukup tinggi buktinya hasil rilis LSI tingkat partisipasi pemilih di Sulut mencapai 80 persen melewati target KPU 77,5 persen. Ini luar biasa meski ada kekurangan-kekurangan saat hari pencoblosan kemarin, “papar Salman.

Ia mengatakan, masyarakat bisa memantau hasil hitung cepat perolehan suara Pilgub melalui aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). “Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play. Semua informasi tentang penghitungan suara akan terintegrasi dalam halaman Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Laman ini dikelola langsung oleh KPU RI dan terdapat di website infopemilu.kpu.go.id. Masyarakat bisa mengakses dan memantau langsung dari laman Sirekap itu,” ujarnya.

Aplikasi Sirekap ini sebagai alat bantu selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang. “Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang hasil foto formulir Model C Hasil-KWK yang dikirim oleh KPSS melalui Sirekap. Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model C Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan. Namun, data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka, “bener Salman.

Sementara itu, dari pantauan harian ini, hasil hitung cepat versi Sirekap KPU hingga pukul 19.30 Wita, pasangan calon nomor urut 3, Olly Dondokambey-Steven Kandouw unggul sementara dengan presentasi perolehan suara 57, 8 persen, disusul paslon nomor urut 1, Christiany E Paruntu-



Sehan Salim Lanjar 29,9 persen dan paslon nomor urut 2 Vonny Panambunan-Hendry Runtuwene 12,3 persen. Namun, data presentasi perolehan suara yang ditampilkan Sirekap baru 3,12 persen dari total TPS atau baru 19 dari 1.572 TPS yang masuk.

*Penulis: Billy Tambahani
Diterbitkan: Harian Komentar*

Versi Sirekap KPU, ODSK Unggul 57,6 Persen

MANADO — Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) sementara unggul dalam Pilkada Sulut 2020. Berdasarkan hasil real count di situs resmi KPU (pilkada2020.kpu.go.id) pada Minggu (13/12) hingga pukul 21.30 WITA, ODSK unggul 57,6 persen atau 401.114 suara. Kemudian pasangan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Landjar (CEP-SSL) 33,0 persen atau 229.751 suara, disusul pasangan Vonny Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) dengan persentase suara 9,4 persen atau 65.623 suara. Perolehan suara yang terupdate di aplikasi Sirekap milik KPU itu berdasarkan hasil di 2727 TPS dari total 5809 TPS atau 46,94 persen.

Data yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap. Namun, data yang ditampilkan pada link Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) bukan merupakan hasil resmi perhitungan suara. Penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno yang dilakukan KPU. “Data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka yang saat ini sementara bergulir di tingkat kecamatan hingga 14 Desember. Kemudian rekapitulasi tingkat kabupaten/

kota berlangsung 13 sampai 17 Desember. Rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat provinsi tanggal 20 Desember selanjutnya KPU paling lambat tanggal 26 Desember mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub. Setelah rekapitulasi ada tiga hari masa gugatan. Jika tidak ada, maka dilanjutkan pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” beber anggota KPU Sulut, Salman Saelangi, Minggu (13/12).

la pun mengajak masyarakat untuk ikut memantau hasil perolehan suara melalui aplikasi Sirekap. “Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play. Semua informasi tentang penghitungan suara akan terintegrasi dalam laman tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran harian ini, pasangan calon Gubernur dan Wakil, ODSK untuk sementara unggul di 13 kabupaten/kota. Pasangan yang diusung PDIP ini kalah di Kabupaten Bolmut dan Boltim. Dua daerah itu dikuasai paslon CEP-SSL. Menariknya, ODSK berhasil meraih suara signifikan di Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara yang menjadi basis alias kandang dari paslon lawan.

*Penulis: Billy Tambahani
Diterbitkan: Harian Komentar*

KPU Plenokan Penghitungan Suara Pilgub Sulut

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, sebagai badan penyelenggara pemilu terus berkomitmen menggelar setiap tahapan pemilu dengan jujur adil, sehat dan bermartabat dalam setiap tahapan Pilkada.

Sesuai jadwal, KPU akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 15 Kabupaten/Kota, bertempat di Hotel Mercure Tateli-Minahasa, Kamis (17/12/2020).

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Yatty Momongan S.Th., M.Si., Divisi



Teknis Penyelenggara mengatakan ini masih dalam tahapan, KPU Provinsi akan melakukan rekapitulasi tingkat provinsi sekaligus penetapan perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih.

“Pada tanggal 17 Desember 2020 sampai 20 Desember 2020, ini adalah jadwal rapat pleno rekapitulasi 15 kabupaten/kota dan penetapan perolehan suara dari pasangan calon, bukan penetapan calon terpilih,” jelas Momongan

Momongan menjelaskan bahwa tahapan ini belum selesai karena nanti ada proses-proses memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk mencari keadilan dan ada juga proses yang nantinya informasi dari Mahkamah Konstitusi, apakah akan ada gugatan atau tidak atau akan ada berproses atau tidak.

Hal senada juga disampaikan Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si, Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan terkait tahapan sengketa hasil.

Dalam sistem pemilihan yang kita berlakukan kita memberikan ruang kesempatan untuk setiap pasangan calon untuk melakukan pengujian atau mengajukan permohonan sengketa terhadap hasil yang ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi.

Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal, disitu kita diatur tahapan penetapan calon terpilih.

“Jika tidak ada permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) maka akan menetapkan calon terpilih paling lambat 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU,” ungkap Tinangon.

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi, S.Kel, Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM mengatakan bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut

tahun 2020 tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19.

“Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 17 Desember sampai 20 Desember 2020,” jelas Saelangi. (*)

Penulis : Jellina Najoo

Diterbitkan : sulutreview.com

OD-SK Unggul Diperhitungan Cepat LSI dan KCI

MANADO -- Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA dan Konsultan Citra Indonesia langsung mempublis hasil Pilkada Sulawesi Utara. Dimana berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 jumlah suara masuk 96.45 persen dengan margin eror 1 persen menempatkan pasangan nomor urut 3 (OD-SK) sebagai Pemenang dengan perolehan 58,11 persen suara sementara menyusul pasangan pasangan no urut 1 (CEP-SSL) dengan perolehan suara 32,94 sementara pasangan nomor urut 2 (VAP-HR) hanya mendapatkan suara 8,95.

Sebagaimana penjelasan Firman juru bicara tim Survey KCI dan LSI hasil survey yang dilakukan dengan margin eror 1 persen dengan menggunakan metodologi menggunakan dua cara aplikasi berbasis Android dgn SMS Manual sampel berdasarkan jumlah pemilih 1.800 dari total 580 TPS diambil sampel 310 secara profesional kemenangan pasangan OD-SK. Sebagaimana data yang masuk berjumlah 79 persen lebih dengan rincian

Kota Manado 98 persen

1. CEP-SSK 36,40 persen

2. VAP-HR 9,7 persen

3. OD-SK 53,58 persen



Bitung minut 98 persen

- 1.CEP-SSL 24.11
- 2.VAP-HR 14.34
- 3.OD-SK 61,55

Kepulauan Sitaro, Sangihe. Talaut

- 1 CEP- SSL 30.58
- 2 VAP-HR 12.35
- 3.OD-SK 57 07

Bolaang Mongondo Raya 94 persen data masuk

- 1.CEP-SSL 46.22
- 2.VAP-HR 3.2
- 3.OD-SK 50.57

Minsel - Mitra

- 1.CEP-SSL 35.97
- 2.VAP- HR 5.73
- 3.OD-SK 58.38

Tomohon- Minahasa 96.3 persen

- 1.CEP-SSL 20.90
- 2.VAP-HR 10.8
- 3.OD-SK 68.20

Tingkat Partisipasi pemilih 79.82 persen, melebihi target KPU sehingga antusias masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya cukup tinggi.(*)\

Penulis : Josh Tinungki

Diterbitkan : sulutnews.com

Pantau Pengamanan Rapat Pleno KPU, Kapolda Bersama Danrem 131 Sulut Bertandang ke Boltim

BOLTIM– Kapolda Sulut (Sulawesi Utara) Irjen Pol R.Z. Panca Putra bersama Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong memantau pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Sulut serta Pilbup Boltim (Bolaang Mongondow Timur) tahun 2020, Senin (14/12/20) siang.

Irjen Pol R.Z. Panca Putra yang turut didampingi Dansat Brimob Polda Sulut, Kombes Pol Bruri Soekotjo Adyakso Putro dan Dirpolairud Kombes Pol

Edward Indharmawan Eka Chandra, tiba menggunakan helikopter Baharkam Polri, yang mendarat di halaman Mapolres Boltim sekitar pukul 14.30 WITA.

Kedatangan Irjen Pol R.Z. Panca Putra dan rombongan disambut oleh Kapolres Boltim AKBP Irham Halid beserta para Kabag dan Kasat.

Selanjutnya, rombongan meninjau jalannya pengamanan rapat pleno di Kantor KPU Kabupaten Boltim, yang telah dimulai sejak pukul 14.00 WITA.

Tiba di KPU, Irjen Pol R.Z. Panca Putra disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Boltim Jamal Rahman Irot beserta para Komisioner, Wakapolres Boltim Kompol M. Monoarfa dan Kabagops Kompol Brammy Tamalihis, serta Pejabat Kodim setempat.

Selanjutnya, Irjen Pol R.Z. Panca Putra dan rombongan juga mengecek pengamanan rapat pleno di tiga PPK yang belum selesai melaksanakan rekapitulasi, yaitu Modayag, Kotabunan dan Nuangan.

Irjen Pol R.Z. Panca Putra dalam kunjungan tersebut menegaskan, seluruh pihak tetap harus mematuhi protokol kesehatan termasuk dalam tahapan rekapitulasi ini, demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Guna menghindari terjadinya kerumunan, kami mengimbau para pendukung paslon tidak perlu datang ke KPU untuk melihat proses rekapitulasi. Agar tenang dan bersabar menunggu di rumah masing-masing, hasilnya pasti akan diumumkan oleh KPU melalui mekanisme tertentu,” imbau Irjen Pol R.Z. Panca Putra.

Lanjutnya, para pendukung paslon juga diimbau tidak melakukan konvoi, pawai, arak-arakan di jalan raya untuk merayakan kemenangan setelah ada penetapan hasil perolehan suara dari KPU Kabupaten Boltim.

“Tidak perlu euforia berlebihan. Karena hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, kemacetan arus lalu lintas bahkan penyebaran Covid-19. Kalau nekad dilakukan, aparat keamanan pasti akan menindak tegas dan menjatuhkan



sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Irjen Pol R.Z. Panca Putra. Selanjutnya, Irjen Pol R.Z. Panca Putra bersama rombongan bertolak kembali ke Manado, sekitar pukul 16.20 WITA. (*)

Penulis: Ferry Mamangkey
Diterbitkan : suluttimes.com

KPU Sulut Buka Kotak Tanggapan, Hasilnya Kosong

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara telah selesai melaksanakan tahapan pendaftaran dari tiga Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Sebagai penyelenggara, KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dengan menyediakan kotak tanggapan. Harapannya masyarakat dapat memberikan masukan terkait pendaftaran yang telah usai dilaksanakan.

Untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana atensi masyarakat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut mendatangi kantor KPU Provinsi Sulut yang kemudian disambut oleh Komisioner KPU Sulut, Meidy Yafet Tinangon SSi MSi untuk membuka kotak tanggapan masyarakat dan disaksikan juga oleh pihak keamanan pada pukul 18.07 Wita, Jumat (11/9/2020).

Namun ketika dibuka, kotak tanggapan masyarakat yang disediakan tidak ada isinya alias kosong.

Tinangon menjelaskan bahwa masih ada waktu bagi masyarakat sampai tanggal 21 September 2020 untuk memberikan tanggapan terkait syarat pencalonan dari tiga bakal pasangan calon (Bapaslon).

“Hari ini kita sudah membuka kotak tanggapan masyarakat dan sudah disaksikan oleh Bawaslu, pihak keamanan dan juga teman-teman pers, ternyata sampai

hari ini tidak ada tanggapan dari masyarakat yang masuk di kotak tanggapan,” katanya.

Meski demikian, Tinangon mengatakan masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada 2020.

“Kami masih akan menunggu sampai tanggal 21 September nanti, masih ada kesempatan untuk masyarakat memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah di umumkan yaitu syarat calon dan syarat pencalonan dari tiga bakal pasangan calon yang mendaftar untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara,” jelas Tinangon.

Anggota Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan ini, juga menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan KPU tentang pencalonan yang mengatur bahwa tanggapan masyarakat paling lambat sampai dengan 1 hari.

“Tepatnya, sebelum melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi dokumen syarat-syarat. Karena tanggal 23 nanti kita akan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dokumen syarat calon,” tandasnya. (*)

Penulis.: *Jellina Najoa*
Diterbitkan : sulutreview.com (11/9/2020)





Epilog

Sirekap Kandas di Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak 2020 gagal menggunakan program Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Aplikasi yang wajib digunakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tersebut kandas ketika pihak Komisi II DPR RI dan Kemendagri akhirnya menolak dengan alasan ketidaksiapan infrastruktur.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan tetap menggunakan Sirekap pada proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Serentak 9 Desember 2020. Hasil hitung dari Sirekap tidak akan menjadi patokan resmi pemilihan, tetapi hanya menjadi alat uji coba serta alat bantu dan publikasi.

Ketua KPU Sulut Dr Ardilles Mewoh mengatakan bahwa Sirekap batal digunakan pada Pilkada 2020. "Tetapi KPU tetap akan menggunakan Sirekap sebagai alat uji coba serta alat bantu dan publikasi saja," ujar Ardilles

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn J Malonda menilai Sirekap pada Pilkada 2020 hanya akan diuji coba serta menjadi alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara. Penghitungan akan tetap dilakukan secara manual di TPS. Sedangkan rekapitulasi akan dilakukan di tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU Provinsi.

"Kegagalan penggunaan Sirekap tidak akan menghambat karena kita sudah terbiasa melakukan secara manual," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan sosialisasi terkait Sirekap ini. Juga menggelar simulasi penggunaan Sirekap saat perhitungan dan rekapitulasi hasil pilkada di sejumlah Kabupaten dan Kota.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut, Yessy Momongan, menerangkan uji coba dilakukan agar penyelenggara di semua tingkatan memahami penggunaan Sirekap. Sehingga kesalahan penghitungan dan rekapitulasi suara diminimalisasi.

Secara teknis, lanjut Yessy Momongan, uji coba digelar bagi daerah yang melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota Wakil Wali Kota.

"Masing-masing kabupaten/kota melakukan pada dua belas TPS dengan simulasi pengisian formulir model C Hasil-KWK Simulasi oleh petugas KPPS secara manual. Kemudian dilanjutkan dengan proses foto dokumen sampai pengiriman hasil foto formulir model C," jelas Momongan.

Yessy menambahkan, hasil-KWK Simulasi ke server Sirekap Pemilihan 2020 menggunakan aplikasi Sirekap Mobile (versi Beta).

Setelah proses itu, berlanjut dengan rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK, kemudian untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi menggunakan aplikasi Sirekap Web. "Setiap proses ini dapat dipantau langsung oleh KPU RI," ujarnya.



Namun, Yessy mengakui saat pelaksanaan perhitungan dan rekapitulasi banyak kendala yang dihadapi untuk melakukan Sirekap meskipun itu hanya pada tingkatan PPK dan Provinsi.

” Kendalanya jaringan internet kurang memadai, juga traffic yang sangat tinggi karena digunakan dalam satu waktu bersamaan sangat berpengaruh. Makanya, mitigasi yang kita siapkan pada waktu itu adalah minta PPK untuk memfoto formulir model C Hasil terlebih dahulu baru dilakukan proses rekapitulasi,” kata Yessy disela acara Media Gathering bersama pers 16 Desember 2021 di Mercure Tateli Hotel.

Menurut Yessy, sedangkan hanya mengirim model c hasil di PPK , toh masih mengalami kendala pengiriman file foto ke server KPU.

” Sirekap belum berjalan sesuai tujuan Pilkada Serentak 2020, masih membutuhkan banyak perbaikan untuk Pemilihan Serentak 2024 nanti,” ujarnya.

Sirekap untuk Pemilu Serentak 2024, Siapkah?

Sekumpulan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus perhatian pada pemilu yang terdiri dari Perludem, Netgrit, Kode Inisiatif, Kemitraan, JPPR dan Netfid menilai meski hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara, serta untuk publikasi, Transparansi proses dan hasil perolehan suara merupakan salah satu kelebihan utama dari pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara.

Publikasi perolehan suara melalui Sirekap memudahkan, pemilih, peserta, saksi peserta, pengawas dan pemantau pilkada mengakses hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir Model C.Hasil – KWK dari setiap TPS.

Data ini juga bisa dijadikan pembanding dan alat kontrol bagi Penyelenggara Pemilihan terhadap proses rekapitulasi suara manual berjenjang yang menjadi rujukan utama penentuan hasil akhir perolehan suara pilkada.

Meskipun Sirekap hanya alat bantu untuk publikasi hasil pemilu, hal ini sekaligus akan sangat bermanfaat untuk mengukur kesiapan dan evaluasi aplikasi Sirekap untuk digunakan pada pemilihan mendatang. (Jr)

Penulis: *Jeane Rondonuwu*

Diterbitkan: *Sulutdaily.com*



komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab IX

Penetapan dan Pengusulan Pasangan Calon





Penetapan dan Pengusulan Pasangan Calon

KPUD Sulut Gelar Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pilgub/ Pilwagub 2020, Ini Undangannya

MANADO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara semakin dekat. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (4/12/2019) besok akan menggelar Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Ini undangannya.

KPUD Sulut mengundang Warga Sulut Hadiri Sosialisasi Pencalonan Cagub/ Cawagub jalur perseorangan.

Penulis : *Jane Tungkagi*
Sumber: *ciintasulut.com/ December 3, 2019*

KPU sudah Perjelas Syarat Mantan Narapidana Ikut Pilkada Liando Tegaskan jika Parpol Kuasai Aturan

MANADO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Tateli Minahasa, Rabu (12/8/2020).

Syarat mantan narapidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus jeda lima tahun dihitung dari ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh

masa pidana jadi salah-satu isu yang disosialisasikan.

Menurut dosen ilmu politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando, partai politik (Parpol) merupakan salah satu komponen yang bisa menentukan apakah Pilkada dapat berjalan baik dan berkualitas.

Tandas Liando, Rabu, 12 Agustus 2020, Sebagus apapun regulasi Pilkada yang dibuat dan sehebat apapun penyelenggara dalam menjalankan setiap tahapan, namun jika tak diikuti dengan kemampuan yang baik dari Parpol yang mengikuti Pilkada, maka sangat sulit mengharapkan lahirnya Pilkada berkualitas.

Menurut Ferry Liando, saat ini masing-masing Parpol atau gabungan Parpol yang memenuhi syarat mengusung calon sedang dalam proses memilih calon kepala daerah bersama pasangannya untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Selama ini yang menjadi perhatian sebagian Parpol dalam menentukan calon hanya sebatas pada kemampuan finansial atau kekuatan popularitas calon.

Ferry Liando menambahkan, memang tidak ada aturan yang bisa melarang itu, sebab Parpol punya kebebasan dalam menentukan calon sesuai kepentingan mereka. Sebagian masih dimaklumi namun sebagian sangat kebablasan.

Namun satu hal yang harus menjadi perhatian Parpol adalah jangan sampai calon yang hendak diusung ternyata tidaklah



sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Tambah Liando, Undang-undang ini mengatur tentang syarat pencalonan dan syarat calon. Agar tidak bermasalah di kemudian hari, sebaiknya masing-masing Parpol mempelajari dengan seksama ketentuan dan persyaratan sebelum memilih calon.

Jelas Liando, hal ini penting agar tidak menimbulkan keresahan dan konflik di kemudian hari. Konflik yang tidak terkontrol kerap menyeret masyarakat pendukung dalam dinamika itu.

Tambahnya, Sebagian masyarakat mendukung calon yang tidak memenuhi syarat dan sebagian lagi mendukung KPUD dan Bawaslu yang hendak bertahan dengan aturan.

Akibatnya, lanjut Ferry Liando, masyarakat terpolarisasi dan saling berhadap-hadapan, sehingga keadaan ini harus diantisipasi.

Sebelumnya diberitakan, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yessy Momongan, menjelaskan salah-satu syarat mantan narapidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Yessy Momongan, mantan terpidana mencalonkan diri harus jeda lima tahun dihitung dari ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh masa pidananya.

Diketahui, permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbuah hasil.

Dalam pembacaan putusan yang digelar pada Rabu (11/12/2019) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menerima sebagian permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu.

Dampak dari putusan itu, terjadi perubahan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Salah satu perubahannya menyatakan bahwa seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri pada pilkada lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara. (DESI)

Penulis : *Desi*

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

KPU Sulut Siap Gelar Penetapan Paslon Gubernur dan Wagub

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai Badan Penyelenggara Pemilu telah menggelar tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara.

Ketua KPU Provinsi Sulut, Dr. Ardiles Mewoh mengatakan tahapan selanjutnya adalah Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020.

Tahapan penetapan tersebut, mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Pilkada. Di mana penetapan calon akan dilaksanakan pada Rabu (23/9/2020).

“Dalam tahapan berikutnya adalah penetapan dari bakal pasangan calon menjadi pasangan calon. Dan saat ini, sejumlah persiapan sudah matang untuk dilaksanakan,” kata Ardiles saat ditemui oleh beberapa media di kantornya, Kamis (22/9/2020).

Ardiles lebih lanjut menjelaskan terkait sejumlah persiapan pada tahapan selanjutnya.

Untuk persiapan tahapan penetapan pasangan calon yang akan dilaksanakan, terlihat beberapa pekerja mulai bekerja memasang panggung, tenda, lighting, multimedia, dan LED Screen.

Bahkan tampilan halaman di KPU pun dirombak sehingga jalannya tahapan selama dua hari yang meliputi penetapan

pasangan calon dan pengundian nomor urut dapat dilaksanakan dengan suasana yang nyaman.

Meski demikian, Ardiles mengingatkan agar protokol Covid-19 menjadi prioritas utama yang harus dikedepankan. (*)

Penulis: *JellinaNajoan*

Sumber : *sulutreview.com*

Penetapan Paslon, Mewoh Ingatkan Jangan Ada Kumpul Massa

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menghimbau bakal pasangan calon yang Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan sebagai Calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara untuk tidak melakukan konvoi atau perayaan yang menyebabkan kerumunan orang.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulut Ardiles Mewoh. “Jika Paslon sudah memenuhi syarat agar menghindari perayaan-perayaan, kumpul-kumpul orang atau melakukan konvoi,” tegas Mewoh, Selasa (22/9/2020).

Mewoh juga mengingatkan, jika pelaksanaan pemilihan di masa pandemi Covid-19. Tidak ada iring-iringan, perayaan dan pesta. “Kami berharap himbuan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sulut dapat dipatuhi seluruh bakal pasangan calon yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon di Pilkada 2020,” ucap Mewoh.

Jika ada calon yang tidak mematuhi himbuan, diakui Mewoh KPU Provinsi Sulut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku. (*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Besok KPU Tetapkan Calon, Mewoh minta jangan ada mobilisasi massa

MANADO - Rabu, 23 September 2020, KPU sulut daj 7 Kabupaten Kota akan

menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mewoh kepada wartawan sore ini dikantor.KPU Sulut menjelaskan Pleno penetapan ini akan dilaksanakan secara serentak melalui pleno internal berdasarkan PKPU nomor 5, yang memenuhi syarat akan ditetapkan dan bagi yang belum diharapkan dapat menerima hasil penetapan sebagaimana pencermatan yang dilakukan KPU.

Bagi pasangan Calon yang ditetapkan Mewoh mengingatkan I, agar tidak ada mobilisasi atau pengerahan massa melakukan aksi konvoi.

Hasil penetapan Calon ini tambahnya bisa diketahui melalui website KPU.

Tegasnya KPU meminta paslon, parpol dan masyarakat dapat mematuhi aturan ini apalagi kondisi ini di masa pandemi.

Jika ada yang melanggar maka KPU akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. (DESI)

Penulis : *Desi Hulung*

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

3 Paslon Wajib Hadir di KPU Tanpa Bawa Massa

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menetapkan 3 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulut sebagai peserta pilkada, Rabu (23/9). Ketiga paslon yakni Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK), Christiany Eugenia Paruntu-Sehan S Landjar (CEP-SSL) dan Vonnice A Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR), ditetapkan karena oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, untuk tahapan selanjutnya yakni pengundian nomor urut yang akan dilakukan hari ini 24 September. Dalam tahap selanjutnya, pihaknya tetap akan



memperketat terkait protap covid. “Memang untuk penetapan tidak undang paslon. Karena juga penumpukan massa dilarang. Sama halnya dengan pengundian. Kami larang. Sebab ini di massa pandemi. Kita sudah berulang kali ingatkan tidak boleh berkerumun atau konvoi,” ujarnya.

Untuk tahapan pengundian nomor urut, ketiga paslon diwajibkan hadir dengan memperhatikan protap covid. “Hasil rakor, yang bisa masuk dalam kantor KPU adalah paslon, parpol pengusung 1 orang, tim kampanye 1 dan LO 1. Paling banyak 8 orang,” tegas Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan. Akan tetapi lanjutnya, rapat pleno terbuka itu disediakan zoom meeting kepada semua pendukung maksimal 1 akun 500 partisipan. “Sehingga disarankan mereka akan serahkan link zoom di 15 kabupaten/kota, supaya bisa disaksikan,” tandasnya.

Ditambahkan Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi, pihaknya telah lakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Satgas Covid dan Bawaslu membicarakan terkait jika ada inisiatif massa/pendukung yang tak terkontrol. “Nanti ada kesepakatan agar calon berkomitmen dengan pihak KPU, Bawaslu, Kepolisian untuk ada penindakan jika ada massa yang berinisiatif,” tegasnya. Menurutnya, regulasi yang akan diterapkan yakni UU Karantina dan Pengendalian Kesehatan. “Kemudian juga jika terjadi di halaman KPU, itu menggunakan PKPU 10. PKPU ini juga sedang dalam proses perubahan untuk mengakomodir hal-hal tersebut. Kemudian juga bisa ambil dasar Pergub 60,” pungkasnya.

Penulis : *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Paslon Dilarang Bawa Massa

MANADO--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut akan masuk pada tahapan penetapan calon kepala daerah dan pengundian nomor urut untuk Pilkada 9 Desember mendatang. Para bakal pasangan calon (paslon) pun diingatkan untuk tidak membawa massa

pendukungnya saat tahapan berlangsung. Hal ini dipertegas untuk mengantisipasi penyebaran covid.

“Pandemi covid di Sulut masih dalam kondisi membahayakan. Sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan,” tegas Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Diterangkannya, setiap paslon peserta pilkada hanya diwajibkan untuk mengutus satu orang penghubung dan menugaskan maksimal dua orang tim kampanye, dua orang saksi atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik. “Semua ketentuan yang ditetapkan wajib diikuti oleh peserta pilkada, termasuk bakal pasangan calon,” tandasnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Larang Paslon Kepala Daerah Bawah Simpatisan di Tahapan Pengundian Nomor Urut

MANADO - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 akan melewati tahapan pengundian nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020.

Terkait hal ini Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan aturan bagi Pasangan Calon (Paslon) yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada tidak diperkenankan membawa serta pendukung atau simpatisan saat kegiatan berlangsung.

Jelas Ketua KPU Sulut ArdiLes Mewoh, Pandemi Covid di Sulawesi Utara masih dalam kondisi membahayakan sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol Kesehatan.

Dalam kaitan pelaksanaan kegiatan pengundian nomor urut, setiap Paslon peserta Pilkada, hanya diwajibkan mengutus satu orang penghubung, juga menugaskan maksimal dua orang tim kampanye, dua orang Saksi atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik. Semua ketentuan



yang ditetapkan wajib diikuti, oleh pasangan calon peserta Pilkada.

Standar protokol kesehatan akan diberlakukan dalam setiap tahapan Pilkada yakni bagi Paslon peserta Pilkada wajib menggunakan APD berupa Masker yang menutupi hidung hingga dagu, Sarung Tangan jika dibutuhkan, juga menghindari kerumunan massa. (DESI)

Penulis : *Desi Hulong*

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

KPU Sulut Persiapkan Teknis Pencabutan Nomor Urut Paslon

MANADO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, Dr Ardiles Mewoh membuka rapat koordinasi persiapan pencabutan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 di kantor KPU Sulut, Senin (21/9/2020).

Melalui rapat koordinasi tersebut telah ditetapkan teknis pencabutan nomor urut bakal pasangan calon yang harus mengacu pada Prosedur Tetap (Protap) protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mewoh mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi ini, pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada menjangkir kesepakatan bersama antara pihak KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam proses pencabutan nomor kesepakatan.

Mewoh berharap adanya kepatuhan dari masing-masing peserta bakal pasangan calon untuk menaati protokol kesehatan Covid-19 dan benar-benar ditunjukkan dalam tahapan-tahapan selanjutnya.

“Bila nanti sudah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, tolong untuk dipatuhi protokol kesehatan Covid-19,” tegas Mewoh.

Hal itu ditegaskan Mewoh, mengingat pelaksanaan Pilkada di gelar di tengah pandemi Covid-19. Sehingga semua pihak wajib paham aturan mainnya.

“Kita menghindari penumpukan orang-orang dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Untuk menyepakati itu, KPU melaksanakan rapat koordinasi dan sudah ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.” tutup Mewoh.

Diketahui jumlah peserta yang akan hadir dalam tahapan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020, akan dibatasi baik dari partai pengusung, tim kampanye dan LO.

Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi persiapan pencabutan nomor urut paslon, yakni dari Bawaslu, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulut, Kepolisian dan Parpol.(*)

Penulis : *Jellina Najoan*

Sumber : *sulutreview.com*

KPU Undi Nomor Urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur

MANADO - Setelah, Rabu, 23 September 2020, KPU menetapkan 3 Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), hari ini, Kamis, 24 September 2020 KPU melakukan pengundian nomor urut.

Nomor urut ini nantinya akan digunakan pada setiap aktivitas kampanye dan akan dicetak pada kertas suara sebagai identitas masing-masing paslon.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon yang digelar KPU Sulut, Kamis (24/9/2020), nomor 1 diperoleh oleh paslon Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) yang diusung Partai Golkar dan PAN.

Sementara nomor urut 2 jatuh kepada paslon Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR) dan pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven) akan menggunakan nomor 3.

Pengundian dan penetapan nomor urut ini dihadiri oleh semua peserta pemilihan gubernur.

Sepanjang rapat, dilakukan standar protokol COVID-19 dengan pembatasan tamu undangan.

Selain lima komisioner KPU dan paslon, dalam area pleno hanya dihadiri perwakilan dua anggota Bawaslu dan LO.

Sebelumnya ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyatakan protokol ketat diberlakukan karena sesuai dengan aturan. (DESI)

Penulis : *Desi*

Disiarkan: *Radio Sion Sulut*

KPU Sulut Cabut Undi Nomor Paslon, Protokol Covid-19 Jadi Acuan

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Kamis (24/9/2020).

Pasangan Calon Christiany Eugenia Paruntu- Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) mendapatkan nomor urut 1 (satu), Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) nomor urut 2 (dua) dan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK) mendapatkan nomor urut 3 (tiga).

Ketiga pasangan calon yang telah mendapatkan nomor urut peserta, mereka akan siap bertarung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pada 9 Desember 2020 mendatang.

Mengacu pada PKPU nomor 13, Tahun 2020, pelaksanaan pleno menerapkan protokol kesehatan dan hanya dihadiri pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi Sulut, 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon (LO) dan 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Sulut.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh yang memimpin rapat pleno terbuka mengatakan bahwa peserta yang hadir sesuai dengan undangan yang ditetapkan.

“Sesuai aturan yang diberlakukan kehadiran pada pengundian dan pengumuman dibatasi,” ujarnya.

Ardiles juga menambahkan dalam tahapan selanjutnya, paslon dilarang untuk melakukan deklarasi damai, yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa.

Menariknya, usai pencabutan nomor urut, Komisioner KPU Provinsi Sulut, Yessy Momongan memberikan kesempatan kepada paslon untuk mengungkapkan makna yang tersirat dalam nomor urut yang didapatkan.

Christiany Eugenia Paruntu- Sehan Salim Landjar mengatakan bahwa nomor urut 1 yang didapatkan bermakna kemenangan.

“Nomor urut 1 adalah kemenangan bagi kita, angka yang diberikan Tuhan untuk kita berjuang demi satu kemenangan,” tukasnya.

“Nomor satu adalah berkat dan rahmat Tuhan. Karena yang terpilih hanya satu,” ujarnya.

Sementara Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene menyebutkan nomor 2 adalah angka victory.

“Haleluyah, Tuhan sudah memberikan angka terbaik, angka kemenangan bagi kami,” ujar Vonnie.

“Semua angka adalah baik. Namun kami akan berjuang untuk meraih victory, yakni kemenangan,” kata Hendry.

Sementara itu, paslon Olly Dondokambey- Steven Kandouw menjelaskan bahwa nomor urut 3 bermakna Pancasila sebagai landasan ideologis negara Indonesia, dalam sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya angka 3 merupakan simbol persatuan.

“Nomor urut 3 adalah nomor kemenangan. Karena PDI Perjuangan sebagai Partai Politik peserta Pemilu juga mempunyai



nomor urut yang sama yaitu angka 3. Selain itu, angka 3 juga punya makna teologis, di mana dalam ajaran Kristen dikenal dengan konsep Trinitas, dalam ajaran umat Buddha dikenal dengan ajaran Tri Dharma, bahkan angka 3 dalam Islam identik dengan Sunnah Rasul dengan ajaran serba 3,” tukasnya.

“Dalam pertandingan, disebutkan 1, 2 dan 3. Angka 3 adalah kemenangan bagi kami,” tandasnya. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : *sulutreview.com*

Memenuhi Syarat, KPU Tetapkan Tiga Paslon Gubernur dan Wagub Sulut 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020, melalui pleno yang digelar Rabu (23/9/2020).

KPU, melalui pengumuman dan konferensi pers menyebutkan paslon Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven), Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) resmi menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Setelah seluruh dokumen pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat.

“Ketiga paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020,” kata Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh SIP, MSi melalui konferensi pers.

Ardiles dalam penyampaiannya turut dihadiri lima anggota komisioner KPU yaitu Meidy Yafeth Tinangon SSi, MSi, Salman Saelangi S.Kel, Yessy Yatty Momongan S.Th M.Si, Lanny Anggriany Ointu SE, dan penanggung jawab Pujiastuti SE.Ak.

Dalam keterangannya, Ardiles mengatakan tiga paslon yang akan melaju pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Desember 2020 dinyatakan sah oleh KPU Sulut.

Pada tahapan penetapan paslon, komisioner membacakan pengumuman berita acara hasil penelitian, yang merupakan tindak lanjut dari perbaikan persyaratan.

Diketahui, hasil penelitian perbaikan berkas Olly-Steven dibacakan oleh Anggota Salman Saelangi yang menyatakan memenuhi syarat. Untuk berkas perbaikan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar dikatakan memenuhi syarat oleh komisioner Lanny Ointu.

Sementara itu, berkas Vonnie Anneke Panambunan (VAP) beserta Hendry Runtuwene dinyatakan memenuhi syarat oleh Yessy Momongan.

Pengumuman ini juga disiarkan secara langsung melalui aplikasi zoom dan youtube.

Diketahui, tahapan penetapan paslon dilakukan tanpa pengumpulan massa. Hal itu mengacu protokol Covid-19. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : *sulutreview.com*

Lengkapi Berkas, VAP - HR Yakin Ditetapkan Calon Gubernur dan Wagub

MANADO -- Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Vonny Aneke Panambunan dan Calon Wakil Gubernur Henry Runtuwene Rabu (16/9/202) mendatangi kantor KPU Sulut. Kedatangan Paslon yang diusung Partai Nasdem tersebut guna melengkapi kekurangan berkas persyaratan yang masih harus dipenuhi.

“Puji Tuhan hari ini kekurangan berkas yang menjadi kewajiban sudah terpenuhi semua dan puji Tuhan dapat selesai dan diterima oleh KPU, semoga pada tanggal 23 September mendatang kami dapat ditetapkan sebagai peserta Pilkada,” kata VAP.

Sementara itu Calon Wakil Gubernur Henry Runtuwene kepada wartawan mengatakan semua perbaikan dokumen syarat calon telah dipenuhi dan KPU telah menerima



berkas perbaikan.” Kelancaran pengurusan berkas perbaikan terjadi karena berkat penyertaan Tuhan, dan semoga pada saat penetapan semua dapat berjalan dengan baik,” ungkap Runtuwene.

Saat mendatangi kantor KPU Sulut, mereka didampingi sejumlah pengurus Nasdem Sulut seperti Victor Mailangky Sekertaris DPW Nasdem Sulut, serta sejumlah LO yang turut membantu kelengkapan berkas.

Penulis : *Josh Tinungki*
Sumber : *sulutnews.com*

Genggam Nomor Urut 2, VAP Sebut Angka Kemenangan

MANADO – Tahapan pengundian nomor urut kontestan Pilkada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui streaming KPU Sulut berlangsung lancar, Kamis (24/09/20).

Ekspresi kegembiraan langsung terpancar dari calon gubernur Sulut, Vonnie Anneke Panambunan (VAP) ketika mengetahui angka 2, berarti pasangan calon yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggenggam nomor urut 2.

“Jam 2 pagi saya sudah bangun. Saya berdoa agar Tuhan memberikan tanda kemenangan. Puji Tuhan, angka dua yang diberikan Tuhan yang berarti kemenangan,” ujar Panambunan sembari mengayunkan tangannya bersemangat.

Senada Hendry Runtuwene mengacungkan tangannya sembari meneriakkan “Victory” “Saya berdoa pada Tuhan memberi angka yang terbaik. Tuhan memberi angka 2, Tuhan memberi kemenangan,”ujarnya.

Pengundian Paslon nomor urut 1 yakni pasangan calon Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL), serta nomor urut 3 yakni pasangan calon Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK).

Penulis : *Dewi S*
Diterbitkan : *suluttimes.com*

Ketiga Paslon Gubernur dan Wagub Sulut Dapatkan Nomor Urut, Ini Tepatnya

MANADO – Rapat pleno KPU Sulawesi Utara yang berlangsung hari ini, akhirnya menetapkan nomor urut pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk Pilkada 2020. Nomor urut ini berdasarkan pengundian yang dilakukan oleh ketiga paslon.

Nomor urut 1 diperoleh paslon Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar (CEP-SSL). Nomor urut 2 jatuh kepada paslon Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene (VAP-HR), sementara pasangan Olly Dondokambey – Steven Kandouw (Olly-Steven) akan menggunakan nomor 3.

Nomor urut ini nantinya akan digunakan pada setiap aktivitas kampanye dan akan dicetak pada kertas suara sebagai identitas masing-masing paslon. (*)

Penulis : *Ronald Ginting*
Sumber : *suluttimes.com*

Kegiatan Pencabutan Nomor Urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Sukses.

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Kamis (23/9/2020) menggelar kegiatan pencabutan nomor urut bagi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Giat yang dipandu langsung 5 komisioner KPU, pasangan Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar mendapatkan nomor urut 1, kemudian pasangan Vonny A Panambunan dan Henry Runtuwene mencabut nomor urut 2 dan Pasangan Olly Dondokambey - Steven Kandouw dengan nomor urut 3. Masing- masing pasangan calon yakin dengan nomor urut yang mereka dapat CEP-SSL bangga dengan nomor urut 1 yang meyakini adalah nomor keberuntungan untuk mengantar mereka memdapatkan dukungan rakyat Sulut menuju kemenangan, juga pasangan VAP-HR yang mendapatkan



nomor 2 yang mengibaratkan Victory dan ini berarti juga kemenangan, sedangkan pasangan OD-SK juga bangga dengan nomor 3 yang selalu menjadi angka kemenangan bagi PDIP.

Dengan mendapatkan pengawalan ketat, dan memberlakukan protokol kesehatan ketat tersebut berlangsung aman dan sukses. (*)

Penulis : Josh Tinungki

Sumber : sulutnews.com

Saelangi : Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dilaksanakan 5 November 2020

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, selaku penanggungjawab pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, berencana akan menggelar tahapan Pilkada Debat kandidat bagi peserta Pilgub. Demikian disampaikan Salman Saelangi Komisioner KPU Sulut.

Menurutnya tahapan debat kandidat Pilkada 2020 akan digelar berbeda karena disaat pandemi Covid 19 ini dilaksanakan sebagai tahapan yang wajib diikuti oleh Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilgub tahun 2020. Menurutnya KPU akan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan akan dilaksanakan di tempat terbuka.

“Teknis pelaksanaan debat mengacu pada PKPU 13 pasal 51 dengan mengedepankan 4 Subtema yakni Kesehatan Masyarakat, Penanggulangan Covid 19 dan Bencana Alam,” jelas Saelangi

Terkait pelaksanaan debat yang akan digelar pada 5 November 2020 KPU juga telah menunjuk tim penyusun soal yakni Prof Handi muluk, Prof Elen Kumaat dan Prof Dr Johanis Ohoitimur MSC.”

Mekanisme menjawab soal diberikan waktu 90 menit sementara untuk tema dan segmentasi layanan masyarakat diberi waktu 30 menit yang dibagi dalam 5 segmen

dimana setiap segmen diisi dengan iklan layanan masyarakat selama 30 menit,” jelas Saelangi.

Saat pelaksanaan Debat Kandidat KPU akan menerapkan aturan bagi peserta dengan pembatasan jumlah peserta yang ikut yakni tim pendukung dan tim kampanye setiap paslon mengikutkan 4 org, KPU 5 orang dan Bawaslu dibatasi hanya 2 orang. (*)

Penulis: Josh Tinungki

Sumber : sulutnews.com

Rangkuti : KPU Perlu Memperkaya Materi Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur

MANADO -- Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara Pilkada serentak hendaknya dapat memasukan dalam materi debat terkait isu menggelitik yang dinilai menarik untuk dijadikan point penting dalam debat kandidat yakni soal pandangan atau pemahaman para kandidat yang akan menjadi Kepala Daerah terkait UU Omnibus Law yang telah menarik sejumlah kewenangan Kepala Daerah, juga terkait revisi UU KPK dalam perspektif sebagai penanggung jawab pemerintahan di daerah.

“Saya kira sangat menarik ketika materi debat calon kepala daerah dapat memasukan dua isu besar nasional yang saat ini selain masih ramai diperbincangkan tetapi juga mendapatkan tanggapan dari kandidat dalam menyikapi UU Omnibus Law dan juga revisi UU KPK,” kata Rangkuti saat gelar sosialisasi secara kelembagaan bersama media dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di sulut yang digelar di Hotel Aryaduta Manado oleh Bawaslu Sulut.

Alasan KPU dapat memasukan UU Omnibus Law dan revisi UU KPK karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan ketika mereka terpilih.” Harus ada sikap dari pemerintah daerah terhadap regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat,” ungkap Rangkuti.



Pandangan Direktur LIMA ini terkait debat putaran pertama juga cukup menarik karena mengangkat isu yang relevan dengan kondisi di Sulut, namun perlu juga ada diangkat isu secara nasional sehingga pengujian wawasan Kepala daerah dan Wakilnya juga bisa dinilai tidak hanya skala daerah tetapi juga skala nasional. (*)

Penulis : Josh Tinungki
Sumber : sulutnews.com

KPU Sulut Sukses Gelar Debat Kandidat Pilgub Putaran ke Dua

MANADO -- Debat publik yang kedua bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang digelar Rabu (11/11/2020) oleh Komisi Pemilihan Umum sukses dilaksanakan. Dengan mengangkat tema Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan itu menggambarkan bagaimana kesiapan KPU selaku pihak penyelenggara untuk mempersiapkan pemimpin Sulut yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.

“Penjabaran materi yang disusun oleh tim di dalamnya berbicara menyangkut Ekonomi, Industri, Perdagangan dan Teknologi, UMKM dan Koperasi, Gender, Disabilitas dan anak, cukup mendapat perhatian dari Pasangan Calon,” ungkap Ardiles Mewoh, Ketua KPU Sulut.

Juga kata Mewoh, untuk mempertajam tema, KPU telah melakukan berbagai kajian terhadap penyusunan materi yang disusun para ahli dan pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya. “ Saat ini untuk melakukan penilaian, kami mengundang perwakilan kelompok disabilitas agar dapat menilai,apakah tema yang kita angkat benar- benar mengena atau tidak,” Ungkap Mewoh saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan debat yang digelar di Hotel Mercure Manado.

Debat terbuka bagai kandidat juga dikandung maksud agar masyarakat bisa

bisa mendengar visi misi dan program dari masing-masing paslon serta dapat memberi keyakinan untuk menentukan pilihan.“Kami harap debat akan memunculkan berbagai ide dan gagasan yang dapat menjawab harapan masyarakat dan kegiatan debat ini dapat memberi edukasi bagi calon pemilih di Sulut, “ kata Mewoh.

Pilkada serentak 9 Desember 2020 kiranya dapat menjadi tonggak sejarah perpolitikan di Sulawesi Utara. (*)

Penulis : Josh Tinungki
Sumber : sulutnews.com

KPU Sulut Gelar Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran keTiga

MANADO -- Debat Publik putaran Ketiga atau terakhir bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut rencananya akan digelar Selasa (17/11/2020)), tiga pasangan calon akan kembali saling adu argumentasi menjual program visi misi untuk meyakinkan hati pemilih siapa yang bakal menjadi pilihan masyarakat. Debat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut merupakan yang terakhir dan ini bakal disiarkan secara langsung oleh Kompas TV, RRI dan akun Youtube, Facebook KPU Sulut. “Debat ini akan disiarkan langsung melalui Kompas TV, RRI dan akun Youtube, Facebook KPU Sulut,dan dapat diakses oleh masyarakat agar apa yang menjadi materi debat bisa dipahami dan menjadi rekomendasi bagi masyarakat siapa yang nanti akan dipilih “ ujar Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi. Sambil menambahkan Live debat akan dimulai pukul 19.00-21.00 WIB atau 20.00-22.00 WITA.

Juga dikatakan Saelangi,dalam debat terakhir ini, sudah disiapkan untuk tema. “Menuju Sulut Aman dan Tertib yang Berkeadilan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya soal Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum, Politik, Keamanan dan Bebas Korupsi,”



ungkap Saelangi sambil mempersilahkan masing-masing Paslon berdebat dengan mengikuti segmen yang sudah diatur oleh KPU selaku penyelenggara debat. “Kami harap muncul dialektika politik. Karena masyarakat menantikan visi misi program untuk pastikan pilihan pada 9 Desember mendatang,” tegasnya.

Dirinya pun mengajak masyarakat Sulut agar saksikan visi misi program paslon yang dapat beri keyakinan bahwa pemimpin yang dipilih bisa membawa kesejahteraan bagi Masyarakat Sulut.(*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber: *sulutnews.com*

KPU Mitra Gelar Rekapitulasi Suara Pilgub Sulut, Olly-Steven Raih 47.709 Suara

RATAHAN -- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), di Wale Wulan Lumintang, Senin (14/12/2020), berjalan dengan lancar dan sukses.

Rapat Pleno tersebut dipimpin oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Salman Saelangi, didampingi Dua Komisioner KPU Sulut lainnya, yakni Yessy Momongan dan Meydi Tinangon, serta dua Komisioner KPU Mitra, Otnie Tamod dan Otniel Wawo.

Adapun berdasarkan hasil rekapitulasi, perolehan suara untuk ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kabupaten Mitra, yakni:

1. Christiany Paruntu – Sehan Landjar: 19.859 suara.
2. Vonnie Panambunan – Hendry Runtuwene: 4.609 suara.
3. Olly Dondokambey – Steven Kandouw: 47.709 suara.

Sementara jumlah suara sah sekitar 72.177, jumlah suara tidak sah sekitar 551, dengan total suara sah dan tidak sah atau

pengguna hak pilih sekitar 72.728 suara, dari total DPT sebesar 85.377 wajib pilih.

Khusus untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Mitra berjumlah 553 orang, sementara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sekitar 491 orang.

“Secara umum rekapitulasi yang dilaksanakan di Kabupaten Mitra sudah berjalan baik. Kami juga mengapresiasi jajaran KPU Mitra, lebih khusus para PPK, Bawaslu Mitra, para saksi, dan insan pers, serta pihak keamanan yang telah mendukung jalannya rekapitulasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Salman Saelangi.

Secara khusus dirinya mengapresiasi KPU Mitra yang mengatur pelaksanaan pleno rekapitulasi yang tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama menghindari potensi terjadinya kerumunan di dalam ruangan rapat pleno.

Penyerahan salinan rekapitulasi bagi Bawaslu Mitra dan dua saksi pasangan calon di Pilgub Sulut 2020.

Lanjut dijelaskannya bahwa setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, hasilnya akan dibawa ke tingkat provinsi untuk diplenokan di KPU Sulut.

“Sebelumnya akan dilakukan Rakor pada tanggal 16 Desember, baru dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat provinsi pada 17-20 Desember,” katanya.

Lanjut diungkapkannya, berdasarkan data sementara, partisipasi pemilih pada Pilgub Sulut 2020 di tingkat provinsi mencapai target atau sekitar 81 persen, naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pilgub Sulut 2015 sebelumnya yang hanya 67 persen.

“Partisipasi pemilih naik signifikan atau selisih 14 persen dari Pilgub Sulut sebelumnya. Namun tentunya secara total kami akan mengumpulkan data rekapitulasi seluruh kabupaten/kota untuk memastikan agar angka tersebut sesuai,” jelasnya.\



Sementara berkaitan dengan kemungkinan adanya dampak pandemi di sebagian daerah yang disinyalir mempengaruhi partisipasi pemilih, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut perlu kajian lebih dalam lagi.

“Sebab walau dengan tantangan COVID-19, namun masyarakat masih bisa memberikan hak suaranya di TPS dan ini terukur dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan Pilgub sebelumnya,” pungkasnya.

Adapun Rapat Pleno Rekapitulasi ini turut dihadiri oleh personil Bawaslu Mitra, yakni Jobie Longkutoy, Dolly Van Gobel, dan Amran Ibrahim, serta saksi dari Olly-Steven dan CEP-Sehan, sedangkan pasangan VAP-Hendry tidak menghadirkan saksi.

Penulis: *Jenly Wenur/Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Tim Jibom Sat Brimob Sterilisasi Lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub

MINAHASA — Personel Brimob Polda Sulut yang masuk dalam Tim Jibom, melakukan sterilisasi lokasi tempat berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, di Convention Hall, Mercure Manado Hotel Tateli Resort and Convention Desa Tateli, Kamis (17/12/2020).

Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno yang dimulai, berbagai persiapan pengamanan sudah digelar oleh aparat Kepolisian yang masuk dalam Satgas Operasi Mantap Praja 2020.

Tim Jibom Satbrimob Polda Sulut yang dipimpin Panit I Subden II Jibom Aipda A Mashanafi melakukan penyisiran seluruh sudut ruangan yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan Rapat Pleno.

Selain Tim Jibom Satbrimob, Polda Sulut juga menurunkan personel pengamanan

dari gabungan berbagai Fungsi Kepolisian saat berlangsungnya kegiatan rekapitulasi hingga akhir nanti.

“Kita ingin memastikan lokasi betul-betul steril dan aman. Pengamanan dilakukan melekat 24 jam, yang dilaksanakan secara bergantian di lokasi tempat pelaksanaan rekapitulasi suara,” kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Lebih lanjut, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengimbau kepada masyarakat atau pendukung pasangan calon tidak perlu datang ke lokasi tempat pelaksanaan rekapitulasi suara.

“Hal ini untuk menghindari kerumunan yang berakibat terjadi potensi penyebaran Covid-19. Silahkan masyarakat atau para pendukung dan simpatisan menunggu hasilnya di tempatnya masing-masing. Kan sudah ada perwakilan saksi di lokasi rekapitulasi,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Pleno Rekapitulasi KPU Sulut, Olly Dondokambey – Steven Kandouw Peraih Suara Terbanyak

MANADO — KPU Sulut telah menuntaskan Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Sulut, Minggu (20/12/2020). Pada pleno terbuka ini total suara sah mencapai 1.438.587.

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Nomor 3, Olly Dondokambey – Steven Kandouw memperoleh suara terbanyak dengan total 821.503.

Kemudian Paslon nomor 1, Christiany Eugenia Paruntu – Sehan Salim Landjar 491.457 suara dan berada di posisi kedua.

Juru kunci dengan 125.627 suara adalah paslon nomor 2, Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh berterima kasih kepada semua jajaran penyelenggara



yang sudah bekerja serius sejak tahapan dimulai.

Ardiles Mewoh memberikan apresiasi kepada ketiga paslon karena tetap patuh pada semua aturan termasuk dalam mentaati protokol kesehatan.

“Terima kasih juga kepada masyarakat dan semua pihak yang berpartisipasi mendukung seluruh kerja-kerja penyelenggara, sehingga kami bisa menyelesaikan proses demi proses dengan baik,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

ODSK Pemenang Pilgub, Penetapan Tunggu MK

MANADO—KPU Provinsi Sulut telah menuntaskan rekapitulasi dan penetapan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut, Minggu (20/12) kemarin di Mercure Hotel. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan selama tiga hari, Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) unggul dari paslon lain dengan meraih suara terbanyak.

KPU Provinsi menetapkan pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 3 itu memperoleh suara sebanyak 821.503. Sementara pasangan nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar meraih 491.457 suara. Sedangkan paslon nomor 2, Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene meraih 125.627 suara. Sementara jumlah surat suara sah 1.438.587, jumlah surat suara tidak sah 24.012, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 1.462.605. “Pleno tingkat provinsi merupakan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPK di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Puji syukur, hari ini (kemarin-red) sudah selesai rekapitulasi,” ujar Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh seraya mengucapkan terima kasih kepada KPU kabupaten/kota dan jajarannya serta PPK karena telah

melaksanakan penyelenggaraan dengan baik.

“Terima kasih kepada Bawaslu, kepolisian dan seluruh stakeholder. Apresiasi kepada ketiga paslon karena tetap patuh pada semua aturan termasuk dalam mentaati protokol kesehatan,” ujarnya.

Sedangkan komisioner divisi teknis dan penyelenggara KPU Sulut Yessy Momongan menambahkan, rapat pleno terbuka yang dilakukan KPU hanya menetapkan hasil rekapitulasi suara dan belum menetapkan pasangan terpilih. Selanjutnya, paslon diberi waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga KPU Sulut juga masih menunggu proses itu di MK.

Penetapan kepala daerah terpilih diperkirakan dilakukan pada akhir tahun ini. Namun, KPU belum bisa menentukan tanggal pastinya. Sebab, proses itu bergantung kepada MK.

Komisioner divisi hukum KPU Sulut, Meidy Tinangon mengatakan penetapan calon Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal. “Disebutkan bahwa jika ada gugatan maka penetapan akan ditetapkan paling lambat lima hari setelah ada keputusan MK. Kalaupun itu tidak ada gugatan di MK, KPU tetap menunggu hasil registrasi dari MK. Ada atau tidak adanya gugatan di MK, lanjutnya, calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan ditetapkan pada Januari 2021 yang akan datang. Lembaga tinggi negara itu nanti merekap jumlah gugatan pilkada yang masuk. Sejurus kemudian, MK mengumumkan kepada KPU. Pengumuman itu tercantum di buku registrasi perkara konstitusi (BRPK),” jelasnya.

Nah, bagi wilayah yang tercantum pada BRPK, penetapan kepala daerah dipastikan tertunda. Sebab, salah satu paslon mengajukan perselisihan di MK. “Butuh waktu untuk sidang sengket,”



ungkapnya. Sebaliknya, bagi daerah yang tidak ada perselisihan, KPU bisa menindaklanjuti dengan mengajukan prosesi pelantikan. “Secara prinsip semua tahapan Pilkada di Sulut berjalan lancar dan tidak ada perbedaan yang dimiliki paslon di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat provinsi. Terkait gugatan atas selisih hasil perhitungan suara, semua menjadi ranah di MK, tapi yang jelas proses perhitungan di tingkat KPU telah diselesaikan dengan baik,” terang Tinangon.

Walaupun digelar di tengah pandemi Covid-19, namun partisipasi pemilih khusus Pilgub Sulut sangat tinggi. KPU Provinsi Sulut bahkan bisa lampau target. Di mana partisipasi pemilih ditargetkan 77,5 persen. “Ini hampir mencapai 80 persen dan tentu sudah melewati target bahkan naik dari persentase sebelumnya 69 persen pada pilgub 2015,” kata Komisioner KPU Sulut divisi sosialisasi, Salman Saelangi.

Penulis: *Billy Tambahani*
Sumber: *Harian Komentor*

Jadwal Penetapan Gubernur/Wakil Gubernur Masih Menunggu Surat KPU RI

MANADO - Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Hasil Pemilihan Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut segera dilakukan. Namun demikian, KPU Sulut harus menunggu surat dari KPU RI.

Ini ditegaskan juga oleh Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon dan Salman Saelangi saat dilaksanakannya Media Gathering Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020, di Gedung Grand Kawanua Convention Centre room Singapura, Selasa (19/1/2021) siang.

“Kami menunggu surat dari KPU RI. KPU RI sendiri sedang menunggu keputusan dari MK,” tutur keduanya.

Lebih lanjut disampaikan Saelangi, dipastikan pekan ini KPU Sulut pasangan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditetapkan.

“Kemungkinan Kamis tanggal 21 Januari ini,” ujar Saelangi.

Adapun tambah Saelangi, waktu pelaksanaan penetapan oleh KPU Sulut dipersiapkan sebaik mungkin.

“Diperhitungkan lagi tentang pendistribusian surat undangan untuk pasangan calon. Mungkin saja pas diundang calonnya lagi tidak ada ditempat. Jadi, diberikan waktu agar bisa mempersiapkan diri,” terang Komisioner KPU Sulut ini.

Diketahui, turut hadir di kegiatan tersebut sebagai narasumber adalah Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda dan sejumlah awak media.* (jane)

Penulis: *Jane Tungkagi*
Sumber : *ciintasulut.com/ January 19, 2021*

Penetapan Gubernur Terpilih Tunggu Arahan KPU RI

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memastikan bahwa penetapan calon terpilih dalam kontestasi pemilihan Gubernur harus menunggu arahan dari KPU RI.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Divisi Parmas Salman Saelangi dalam media gathering Selasa, (19/2) di Grand Kawanua Hotel, Kota Manado.

“Rencana targetnya Rabu 20 Januari namun kami masih menunggu surat dari KPU RI tapi kalau tertunda itu tidak lama mungkin bergeser sehari saja tetap kami terus memaksimalkannya,” ucap Salman.

Lanjut Salman mengatakan sebagai penyelenggara KPU Provinsi Sulut sudah mempersiapkan seluruh mekanismenya.

“Bisa dikatakan ini sebagai kegiatan terakhir dari seluruh tahapan pemilihan baik provinsi maupun kabupaten/kota, oleh itu kami memaksimalkan baik undangan yang akan hadir, calon terpilih, calon yang ikut kontestasi serta partai pengusung dapat



terkonfirmasi hadir,” tutur Salman Saelangi terkait persiapan penetapan.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulut Devisi Hukum Meidy Tinangon menambahkan, skenario rapat pleno penetapan sudah disusun dan siap digelar sesuai tahapan.

“Namun kami masih menunggu surat KPU RI, untuk penetapan Gubernur dan Bupati/Walikota tidak semua dapat dilakukan karena dua daerah yang bersengketa yaitu Kabupaten Boltim dan Kota Manado,” tambah Meidy Tinangon.

Penulis : *Andre Siwi*

Sumber : *VoxSulut.com*

KPU Sulut Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Paslon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Tinangon: Masih Menunggu Surat KPU RI

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di GKIC, Selasa 19 Januari 2021.

Kegiatan Media Gathering di buka langsung oleh Komisioner KPU Sulut Devisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon, dirinya mengatakan bahwa rencana ini pada prinsipnya sudah siap menggelar rapat pleno penetapan, namun masih menunggu surat KPU RI.

“Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada Bupati Walikota di 5 Kabupaten Kota tahun 2020 tidak semua dapat dilakukan karena ada dua Daerah yang bersengketa yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Manado. Untuk hasil Pilkada Boltim dan Kota Manado bisa saja ditunda,”tutur Tinangon.

Adapun Meidy Tinangon menambahkan, skenario rapat pleno penetapan sudah disusun dan siap digelar sesuai tahapan namun untuk itu masih menunggu Surat KPU RI.

“Jika sampai waktu yang telah dijadwalkan surat KPU belum ada maka bisa saja rapat pleno ditunda, maka dari itu kami belum membagikan undangan,”tambah Tinangon.

Sama hal juga dengan Komisioner Divisi Sosialisasi Salman Saelangi memastikan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melewati 21 Januari 2021. “Jika suratnya baru ada besok 20 Januari 2021, maka rapat pleno nanti akan digelar pada hari Kamis 21 Januari 2021. Maka kami saat ini masih menunggu surat dari KPU RI, yang meneruskan surat pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perkara yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),”ungkap Saelangi.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Sulut Dr Herwyn Malonda juga menjelaskan Bawaslu Sulut akan tetap menjaga hasil Pilkada. “Ketika diplenokan jika ada sengketa wajib mengikuti prosedur agar tidak terjadi persoalan yang diakibatkan sengketa namun berharap semua tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai tahapan, Bawaslu Sulut siap melaksanakan fungsi dan dapat menjadi mediator jika terdapat sengketa akibat Pilkada,”pungkas Herwyn Malonda.(Feicy)

Penulis: *Feicy*

Sumber : *Swarakawanua.com*

KPU Sulut Gelar Penetapan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Saelangi: Kabupaten/Kota Mengikuti

MANADO,- Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi saat diwawancarai awak media usai menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020, di Hotel Novotel Manado Selasa 19 Januari 2021.

Dalam wawancaranya Salman Saelangi mengatakan bahwa saat ini KPU Sulut sedang memaksimalkan untuk mempersiapkan akomodasi baik persiapan undangan dan tempat.



“Karena ini merupakan akhir dari Tahapan Kegiatan Pilkada di masing-masing Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyelenggarakan Pilkada,”ucap Saelangi.

Adapun Salman Saelangi menyampaikan saat ini tentunya sedang dalam upaya memaksimalkan undangan untuk undangan yang akan hadir, begitu juga untuk para calon terpilih bahkan juga para kontestan yang berkontestasi pada Pilkada tersebut, juga Partai pengusul yang bisa terkonfirmasi hadir.

“Kalo ada calon yang belum bisa hadir ini menjadi bahan pertimbangan dengan digesernya waktu sehingga preparanya maksimal,”tutur Saelangi.

Dan untuk penetapan calon kata Salman Saelangi akan di usahakan secepatnya.

“Targetnya Rabu besok dan kalo pun bergeser pastinya tidak akan sampai beberapa hari. Dan walaupun tertunda kami maksimalkan bisa dilakukan satu hari setelahnya yaitu di hari Kamis, itu pun akan dilaksanakan pagi hari bukan siang atau sore hari,”jelas Saelangi.

Sementara Salman Saelangi juga mengatakan setelah Provinsi, Kabupaten/ Kota mengikuti bisa jadi di hari Kamis. Dikarenakan di sisi persiapan undangan dan sebagainya.

“Untuk undangan kami masih menunggu, intinya undangan dari KPU RI belum ada, bahkan kami belum bisa memastikan apakah hari ini dari Mahkamah Konstitusi (MK) sudah maupun belum mengirim undangan ke KPU RI, karena masih butuh informasi dari sana. Yang pastinya dari KPU RI ke seluruh KPU yang melaksanakan Pilkada, belum ada surat yang keluar,”tutup Saelangi.(Feicy)

Penulis: Feicy

Sumber : Swarakawanua.com

Penetapan Paslon Terpilih Tunggu MK

MANADO--Hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Minggu (20/12). Namun, ini bukanlah akhir dari tahapan. Sebab sistem keadilan pemilihan tetap memberi ruang kepada setiap kandidat untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pasca penetapan rekapitulasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan.

“Kesempatan mengajukan sengketa diberikan selama 3 hari kerja sejak KPU mengumumkan hasil rekapitulasi,” ujar Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum, Meidy Tinangon. Dijelaskannya, jika tidak ada yang mengajukan sengketa, maka KPU akan melaksanakan penetapan calon terpilih paling lambat 5 (lima) hari sejak MK memberitahukan secara resmi kepada KPU perkara perselisihan hasil yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Lepas dari itu, KPU telah siap menghadapi PHPU Pilkada 2020 di MK.

Terbukti, KPU telah melakukan serangkaian rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bimtek) dalam persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu/ Pilkada (PHPU) di MK. “Dalam menghadapi PHPU di MK, KPU akan mengkoordinasikan dalam penyediaan jawaban dan penyerahan alat bukti ke MK, supaya dapat berjalan satu pintu dan dapat dikendalikan oleh KPU Pusat,” terangnya. Advokat atau kuasa hukum disiapkan oleh masing-masing KPU Provinsi/Kab/Kota penyelenggara pilkada.

Penulis: LivrAndo Kambey

Sumber: Harian (Radar) Manado

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Tunggu Surat dari KPU RI

MANADO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut rencananya akan melaksanakan penetapan pasangan calon



gubernur dan wakil gubernur Sulut, Rabu (20/1/2021). KPU Sulut saat melaksanakan Media Gathering, Selasa (19/1/2021).

Dari penjelasan dua Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon dan Salman Saelangi, sesuai agenda penetapan calon gubernur dan wakil gubernur memang akan dilaksanakan besok, bahkan persiapan Rapat Pleno sudah sangat siap.

“Kami belum menyebarkan undangan. Karena KPU Sulut belum menerima surat dari KPU RI. Yang meneruskan surat pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perkara yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),” ungkap Saelangi.

Hal yang sama juga diungkapkan Meidy Tinangon. Menurutnya, surat dari KPU RI ini menjadi patokan kapan penetapan akan digelar. “Tapi semoga sebentar sudah ada, sehingga undangan bisa disebar dalam waktu dekat ini,” jelas Tinangon.

Sementara Salman Saelangi memastikan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur tidak melewati 21 Januari 2021. “Jika suratnya baru ada besok, rapat pleno nanti digelar Kamis,” ucap Saelangi saat KPU Sulut melaksanakan Media Gathering bersama para wartawan di Hotel Novotel, Selasa (19/1/2021).(*)

Penulis: *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Tunda Penetapan Paslon Gubernur dan Wagub, Ini Alasannya

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunda jadwal penetapan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur (wagub) Provinsi Sulut, yang rencananya bakal dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center, pada Rabu (20/1/2021), besok.

Menurut Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi, ada penyebabnya mengapa dilakukan penundaan penetapan pasangan

calon terpilih gubernur dan wagub Sulut.

Salman mengatakan terkait penetapan pasangan calon terpilih, sebenarnya semua sudah terkoordinir dengan baik dan maksimal. Hari, tempat, dan mekanisme pelaksanaan dalam penetapan sudah siap.

“Tempat dan mekanisme pelaksanaan penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang akan dilaksanakan besok hari sudah siap. Namun ternyata harus ditunda beberapa hari ke depan,” ungkap Saelangi, di kegiatan media gathering KPU Provinsi Sulut bersama insan pers, Selasa (19/01/2021).

Saelangi lebih lanjut mengatakan bahwa ditundanya penetapan pasangan calon terpilih gubernur dan wagub ini karena masih akan menunggu surat dari KPU RI.

“Rencananya besok tetapi tetap masih harus menunggu surat dari KPU RI yang akan meneruskan surat dari Mahkamah Konstitusi (MK).” jelas Saelangi.

Ketika ditanya oleh wartawan, kapan pastinya pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih gubernur dan wagub, Saelangi menjawab akan secepatnya melaksanakan tahapan penetapannya.

“Kami mencoba secepatnya. Walaupun tertunda kami maksimalkan bisa dilakukan satu hari setelahnya, yakni hari Kamis,” tutup Saelangi. (*)

Penulis : *Jellina Najoan*
Sumber : *sulutreview.com*

KPU Siapkan Penetapan Cagub-Cawagub Sulut Terpilih

MANADO--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut telah mempersiapkan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Sulut terpilih. Senin (11/1), KPU Sulut pun menggelar rapat koordinasi terkait persiapan penetapan tersebut dengan mengundang seluruh LO pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut.



Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, rakor digelar agar nantinya pelaksanaan penetapan sesuai aturan yang berlaku. “Sesuai Peraturan KPU, sebelum pelaksanaan penetapan calon, dilaksanakan dulu rakor. Jadi kami menggelar rakor sesuai aturan dan jadwal yang ada,” ujarnya. Terkait penetapan, dirinya belum memastikan tanggalnya. “Nanti akan diumumkan kapan pelaksanaannya. Yang pasti di bulan Januari ini,” pungkas Ardiles.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Bahas Penetapan Paslon Gubernur dan Wagub Sulut

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara bersama insan pers menggelar media gathering.

Kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam rangka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020, media gathering ini digelar di Grand Kawanua Convention Center. Selasa, (19/1/2021).

Media gathering ini dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 13.00 wita, dibuka oleh komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon.

Dalam sambutan, Tinangon menjelaskan terkait mekanisme tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Manado, yang rencananya akan dilaksanakan pada besok hari, Rabu (20/1/2021).

“Adapun pertemuan kita saat ini, seperti yang biasa kita laksanakan. Kita tinggal menyisakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,” kata Tinangon.

Turut hadir komisioner KPU Sulut yang membidangi Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, Salman Saelangi, S.Kel dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Herwyn Malonda, dalam kegiatan media gathering KPU Sulut bersama insan media.(*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

KPU Sulut Gelar Media Gethering, Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Menunggu Surat KPU RI

SULUT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar Media Gathering KPU, dalam Rapat Pleno Terbuka, Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Pemilihan Tahun 2020.

Rencananya penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut ini akan akan dilaksanakan Rabu 20/1/2021) namun saat ini masih menunggu surat dari KPU RI.

Komisioner KPU Sulut Devisi Hukum Meidy Tinangon Dalam membuka Media Gathering Mengatakan bahwa rencana ini pada prinsipnya sudah siap menggelar rapat pleno penetapan, namun masih menunggu surat KPU RI.

“Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada Bupati Walikota di 5 Kabupaten Kota tahun 2020 tidak semua dapat dilakukan karena ada dua Daerah yang bersengketa yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Manado. Untuk hasil Pilkada Boltim dan Kota Manado bisa saja ditunda.

“Skenario rapat pleno penetapan sudah disusun dan siap digelar sesuai tahapan namun untuk itu masih menunggu Surat KPU RI, jika sampai waktu yang telah dijadwalkan surat KPU belum ada maka bisa saja rapat pleno ditunda, makanya kami belum membagikan undangan.” Sambung Tinangon. Selasa (19/1/2021) di GKIC Manado.



Sama hal juga dengan Komisioner Divisi Sosialisasi Salman Saelangi memastikan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur tidak melewati 21 Januari 2021.

“Jika suratnya baru ada besok 20 Januari 2021, maka rapat pleno nanti digelar Kamis 21 Januari 2021. Kami saat ini masih menunggu surat dari KPU RI. Yang meneruskan surat pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perkara yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).”pungkas saelangi

Sementara itu Ketua Bawaslu Sulut Dr Herwyn Malonda juga menjelaskan Bawaslu Sulut akan tetap menjaga hasil Pilkada,

” Ketika diplenokan jika ada sengketa wajib mengikuti prosedur agar tidak terjadi persoalan yang diakibatkan sengketa namun berharap semua tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai tahapan, Bawaslu Sulut siap melaksanakan fungsi dan dapat menjadi mediator jika terdapat sengketa akibat Pilkada,” pungkas Herwyn Malonda.(*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber : *portalsulutnews.com*

KPU Sulut Siap Tetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Terpilih hasil Pilkada 2020

MANADO -- Menghadapi persiapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut hasil pemilihan 9 Desember 2020, rencananya akan dilaksanakan Rabu 20/1/2021) terkait rencana tersebut Komisioner KPU Sulut Devisi Hukum Meidy Tinangon mengatakan KPU Sulut pada prinsipnya sudah siap menggelar rapat pleno penetapan, namun masih menunggu surat KPU RI.

“Skenario rapat pleno penetapan sudah disusun dan siap digelar sesuai tahapan namun untuk itu masih menunggu Surat KPU RI, jika sampai waktu yang telah dijadwalkan surat KPU belum ada maka bisa saja rapat pleno ditunda,” kata Tinangon

saat membuka acara media gathering yang digelar di GKIC Selasa (19/1/2021).

Juga disampaikan Tinangon, terkait pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada Bupati Walikota di 5 Kabupaten Kota tahun 2020 tidak semua dapat dilakukan karena ada dua Daerah yang bersengketa yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Manado.” Untuk hasil Pilkada Boltim dan Kota Manado bisa saja ditunda,” jelas Tinangon.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sulut Dr Herwyn Malonda juga menjelaskan Bawaslu Sulut akan tetap menjaga hasil Pilkada, agar ketika diplenokan jika ada sengketa wajib mengikuti prosedur agar tidak terjadi persoalan yang diakibatkan sengketa namun berharap semua tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai tahapan,

“Bawaslu Sulut siap melaksanakan fungsi dan dapat menjadi mediator jika terdapat sengketa akibat Pilkada,” kata Malonda.(*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber: *sulutnews.com*

Hari Ini, KPU Tetapkan Cagub-Cawagub Sulut Terpilih

MANADO--Hari ini, Kamis 21 Januari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut akan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) terpilih Pilkada 2020. Agenda penetapan sempat tertunda yang sebelumnya dijadwalkan 20 Januari. Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan, penetapan tertunda karena pihaknya menunggu surat dari KPU RI.

“Kita memang menunggu surat dari KPU RI soal buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Atas dasar itu baru kami laksanakan penetapan,” kata Salman.

Namun pihaknya telah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penetapan. “Kami memang telah siapkan semua keperluan penetapan. Termasuk undangan-undangan. Nah ketika surat KPU RI diterima, maka disepakati rapat



pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut terpilih, 21 Januari hari Kamis Pukul 09.00,” terang Salman. Terkait dengan pola pelaksanaannya, penetapan tersebut menurut Salaman, tak dilaksanakan dalam waktu yang lama.

“Hanya akan dibacakan SK. Satu jam sudah cukup panjang. Apalagi masih pandemi covid. Jadi kami tetap laksanakan sesuai standar protap,” jelasnya. Lanjut Salman, penetapan tersebut dilaksanakan secara terbuka untuk publik, dengan disiarkan langsung lewat akun resmi KPU Sulut. “Kami publikasikan pleno terbuka seperti biasanya. Supaya bisa diikuti. Akan kami siapkan supaya bisa berjalan sebagaimana agenda sebelum-sebelumnya, agar informasi bisa diterima publik,” tutupnya. Dalam penetapan tersebut, undangan yang disebar hanya terbatas. Sebab masih dalam pandemi covid. Diketahui, cagub-cawagub Sulut terpilih yang akan ditetapkan KPU yakni Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK).

Penulis: *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

KPU Sulut Tetapkan ODSK Pasangan Terpilih Pilkada 2020

MANADO—Pasangan calon Gubernur Olly Dondokambey dan calon Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK), Kamis (21/1/2021) ditetapkan sebagai calon terpilih Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut lewat Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Ardiles Mewoh.

Pleno Penetapan calon gubernur dan Wakil gubernur oleh KPU Sulut. Sebelum penetapan dilakukan penyerahan berita acara dan pembacaan berita acara oleh Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama

Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” kata Momongan.

Setelah itu, pengumuman hasil penetapan pasangan calon di papan pengumuman KPU Sulut. Dalam rapat pleno, berita acara penetapan diserahkan KPU Sulut disaksikan Bawaslu Sulut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan didampingi partai pengusul. Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut dan ke partai politik.

Ardiles Mewoh mengakui rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur ini disyukuri karena cuacanya begitu baik. Dan KPU Sulut mengambil tanggal cantik yaitu (21/1/2021).(*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

Sah! KPU Tetapkan OD-SK Pemenang Pilkada Sulut Tahun 2020

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan rapat terbuka penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK) sebagai Calon terpilih Pilkada Tahun 2020, Kamis (21/1/2021) di Grand Kawanua Convention Center Manado.

Sebelum penyerahan berita acara didahului dengan pembacaan berita acara yang dilakukan Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” ucap Momongan.

Kemudian mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman dan papan pengumuman KPU Sulut.



Berita acara tersebut diserahkan KPU Sulut disaksikan Bawaslu Sulut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan didampingi partai pengusul. Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut, dan ke partai politik.(*)

Penulis: *Olvi Kapojos*

Sumber: *manadoaktual.com*

Ditetapkan KPU Sulut Sebagai Pemenang Pilgub 2020, Steven Kandouw: Terima Kasih 800 Ribu Sekian Pendukung ODSK

MANADO - Pilkada serentak 2020 telah usai namun tahapan Pilkada serentak 2020 di Sulut masih terus berlanjut.

Hari ini, Kamis (23-1-2021) KPU Sulut melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang bertempat di Grand Kawanua Convention Center.

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Ardiles Mewoh. Dihadiri oleh Calon wakil gubernur nomor urut 3 Steven Kandouw, Marhany Pua, Novi Lumowa bersama pengurus lainnya.

Sebelum memulai rapat pleno, Mewoh mengajak undangan dan pasangan calon berdoa untuk para korban bencana alam yang terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan.

Dalam rapat pleno ini, KPU Sulut menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK) sebagai calon terpilih pilkada 2020.

Penyerahan berita didahului dengan pembacaan berita acara yang dilakukan Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan. "Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey

dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih," ucap Momongan. Kemudian mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman dan papan pengumuman KPU Sulut.

Selanjutnya berita acara tersebut diserahkan KPU Sulut disaksikan Bawaslu Sulut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan didampingi partai pengusul. Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut, dan ke partai politik.

Calon wakil gubernur Steven Kandouw dari PDI Perjuangan berterimakasih pada jajaran penyelenggara pemilihan.

"Bersyukur tahapan demokrasi lebih dari setengah tahun sudah dilalui dan berjalan baik. Atas nama paslon OD-SK saya mengucapkan apresiasi sangat tinggi pada KPU Sulut yang secara profesional berintegritas melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut dengan baik,"kata Kandouw.

Ucapan terima kasih ini menurutnya bukan karena sudah ditetapkan sebagai pemenang tapi penilaian ini secara objektif.

"Pemilihan berjalan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Begitu juga dengan stakeholder terutama TNI/Polri selama ini bahu membahu memberikan kenyamanan, perhatian, dan pendampingan pada kita semua," tambahnya.

Begitu juga dengan paslon lain, menurut Kandouw mereka berperilaku dan bertindak profesional sebagai kandidat dalam pelaksanaan pilkada.

Di bagian akhir Steven Kandouw berterima kasih pada 800 ribu sekian pendukung pasangan ODSK yang secara sukarela dan yakin memberikan kepercayaan

Untuk memimpin Sulut 5 tahun lagi. "Kerja kerja kita belum selesai, kerja politik boleh selesai tapi tugas untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara akan kita jadikan patokan dan target paling utama," merdeka, pekik Steven



Kandouw mengakhiri pernyataannya pada awak media. Sebagai informasi, pleno terbuka pada hari ini digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Di mana undangan yang hadir dibatasi. Meski demikian, pleno terbuka ini bisa disaksikan secara live di laman Youtube KPU Sulawesi Utara.(*)

Penulis: *Olvi Kapojos*
Sumber: *manadoaktual.com*

KPU Tetapkan Olly-Steven Sebagai Cagub dan Cawagub Sulut Terpilih Pada Pilgub 2020

MANADO - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (SULUT) Olly Dondokambey-Steven Kandouw ditetapkan sebagai calon gubernur dan wagub Sulut terpilih pada perhelatan Pilkada 2020.

Paslon Olly-Steven ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulut lewat rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wagub Sulut terpilih pada pemilihan tahun 2020 yang digelar di Hotel GKIC, Kairagi, Kota Manado, Kamis (23/1/2021) siang.

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Ardiles Mewoh. Dihadiri oleh calon wakil gubernur nomor urut 2 Hendry Runtuwene dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Steven Kandouw.

Sebelum memulai rapat pleno, Mewoh mengajak undangan dan pasangan calon berdoa untuk para korban bencana alam yang terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan.

Penetapan Olly-Steven sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2020 didahului dengan pembacaan berita acara yang dibacakan oleh komisioner KPU Sulut Yessy Momongan.

Momongan membacakan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan

calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih.

Sementara itu, Steven Kandouw dalam sambutannya berterimakasih pada jajaran penyelenggara pemilihan.

Jelasnya, Bersyukur tahapan demokrasi lebih dari setengah tahun sudah dilalui dan berjalan baik. Atas nama paslon OD-SK dirinya mengucapkan apresiasi sangat tinggi pada KPU Sulut yang secara profesional berintegritas melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut dengan baik. Ucapan terima kasih ini menurutnya bukan karena sudah ditetapkan sebagai pemenang tapi penilaian ini secara objektif.

Tambahnya, Pemilihan berjalan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Begitu juga dengan stakeholder terutama TNI Polri selama ini bahu membahu memberikan kenyamanan, perhatian, dan pendampingan pada kita semua.

Begitu juga dengan paslon lain, menurut Kandouw mereka berperilaku dan bertindak profesional sebagai kandidat dalam pelaksanaan pilkada.

Wagub juga berterima kasih Kepada seluruh masyarakat Sulut yang sudah berperan serta aktif menjadikan pilkada di Sulut dengan tingkat partisipasi sangat tinggi dan lebih baik dari pilkada lalu. Gesekan relatif tidak ada. (Desi).

Penulis : *Desi*
Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

Sah...KPU Sulut Tetapkan Olly-Steven Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (21/1) menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pemilihan tahun 2020 di Hotel Grand Kawanua International Center, kota Manado.



Rapat pleno dibuka Ketua KPU Sulut Dr. Ardiles Mewoh didampingi Ketua Divisi Teknis KPU Sulut Yessy Momongan, S.Th, M.Si, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny A. Ointu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si, Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Salman Saelangi, S.Kel dan Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, SE.

Dalam rapat pleno terbuka KPU Sulut menetapkan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 3, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK) sebagai calon terpilih pilkada tahun 2020.

Berita acara dibacakan komisioner KPU Sulawesi Utara Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” ucap Momongan.

Selanjutnya berita acara tersebut diserahkan KPU Sulut disaksikan Bawaslu Sulut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 didampingi partai pengusul. Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut, dan ke partai politik.

Sementara itu, Wakil Gubernur terpilih Steven Kandouw kepada awak media mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

“Terima kasih Sulawesi Utara yang mengizinkan kami Olly Dondokambey dan Steven Kandouw untuk kembali melanjutkan memimpin Sulut yang lebih maju dalam pembangunan dan mensejahterakan rakyat Sulawesi Utara,” ungkap Wagub Sulut itu. Pelaksanaan rapat pleno terbuka KPU Sulut dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 dan disiarkan secara live streaming.

Turut hadir calon wakil gubernur nomor urut 2 Hendry Runtuwene dan calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Steven Kandouw, Wasek PDIP Sulut Novie Lumowa, Wakil DPD PDIP Sulut Lucky Senduk, Wakapolda Sulut, Wakajati Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Danrem 131 Santiago dan Sejumlah Forkompinda.

Penulis : *Andre Siwi*

Sumber: *VoxSulut.com*

KPU Sulut Tetapkan OD-SK Pasangan Terpilih Pada Pilgub Tahun 2020

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih pada pemilihan tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan di Grand Kawanua Hotel Manado, Kamis 21 Januari 2021.

Sebelum penyerahan berita acara didahului dengan pembacaan berita acara yang dibawakan oleh Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan.

“Dengan ini menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” tutur Momongan.

Kemudian mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman dan papan pengumuman KPU Sulut.

Selanjutnya KPU Sulut menyerahkan berita acara tersebut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dan disaksikan Bawaslu Sulut dengan didampingi partai pengusul.

Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut, dan ke partai politik.(Feicy)

Penulis: *Feicy*

Sumber : *Swarakawanua.com*



KPU Tetapkan Olly-Steven Sebagai Cagub dan Cawagub Sulut Terpilih Pada Pilgub 2020

MANADO - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (SULUT) Olly Dondokambey- Steven Kandouw ditetapkan sebagai calon gubernur dan wagub Sulut terpilih pada perhelatan Pilkada 2020.

Paslon Olly-Steven ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulut lewat rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wagub Sulut terpilih pada pemilihan tahun 2020 yang digelar di Hotel GKIC, Kairagi, Kota Manado, Kamis (21/02/21) siang.

Penetapan Olly-Steven sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2020 didahului dengan pembacaan berita acara yang dibacakan oleh komisioner KPU Sulut Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” kata Yessy.

Sementara itu, Steven Kandouw dalam sambutannya berterimakasih pada jajaran penyelenggara pemilihan.

“Bersyukur tahapan demokrasi lebih dari setengah tahun sudah dilalui dan berjalan baik. Atas nama paslon OD-SK saya mengucapkan apresiasi sangat tinggi pada KPU Sulut yang secara profesional berintegritas melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut dengan baik,” ucap Kandouw.

Ucapan terima kasih ini menurutnya bukan karena sudah ditetapkan sebagai pemenang tapi penilaian ini secara objektif.

“Pemilihan berjalan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Begitu juga dengan stakeholder terutama TNI/Polri selama ini bahu membahu memberikan kenyamanan, perhatian, dan pendampingan pada kita semua,” tambahnya.

Begitu juga dengan paslon lain, menurut Kandouw mereka berperilaku dan bertindak profesional sebagai kandidat dalam pelaksanaan pilkada.

“Kepada seluruh masyarakat Sulut yang sudah berperan serta aktif menjadikan pilkada di Sulut dengan tingkat partisipasi sangat tinggi dan lebih baik dari pilkada lalu. Gesekan relatif tidak ada. Atas nama OD-SK mari sama-bekerja untuk pembangunan Sulut,” tandasnya.

Penulis: *RAKA*

Sumber: *Elnusanews.com*

KPU Tetapkan Olly-Steven, Gubernur dan Wagub Terpilih 2020

MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur (wagub), Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (Olly-Steven) sebagai calon terpilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Prosesi penetapan diawali dengan penyerahan berita acara berikut pembacaan berita acara oleh Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” ucap Momongan,” di Grand Kawanua International City (GKIC), Kamis (21/01/2021).

Selanjutnya, mengumumkan hasil penetapan pasangan calon dapat diketahui di laman dan papan pengumuman KPU Sulut.

Diketahui, berita acara diserahkan KPU Sulut dengan disaksikan Bawaslu Sulut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan didampingi partai pengusul. Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi



Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut, dan ke partai politik.

Sementara itu, Wakil Gubernur terpilih Steven Kandouw yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan, mengungkapkan terima kasih kepada KPU Sulut yang merupakan penyelenggara pilkada 2020.

“Bersyukur karena tahapan demokrasi, yang berlangsung lebih dari setengah tahun sudah dilalui dan berjalan baik. Atas nama pasangan calon Olly Dondokambey dan Steven Kandouw saya mengucapkan apresiasi setinggi-tinggi kepada KPU Sulut, yang secara profesional berintegritas telah melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut dengan baik,” ungkap Kandouw.

Ucapan terima kasih ini menurutnya bukan karena sudah ditetapkan sebagai pemenang tapi penilaian ini secara objektif. “Pemilihan berjalan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Begitu juga dengan stakeholder terutama TNI/Polri selama ini bahu membahu memberikan kenyamanan, perhatian, dan pendampingan pada kita semua,” tambahnya.

Begitu juga dengan paslon lain, menurut Kandouw mereka berperilaku dan bertindak profesional sebagai kandidat dalam pelaksanaan pilkada. “Kepada seluruh masyarakat Sulut yang sudah berperan serta aktif menjadikan pilkada di Sulut dengan tingkat partisipasi sangat tinggi dan lebih baik dari pilkada lalu. Gesekan relatif tidak ada. Atas nama OD-SK mari sama-bekerja untuk pembangunan Sulut,” tutupnya.

Pada kesempatan ini juga dihadiri pasangan calon nomor urut 2, Hendry Runtuwene. Sebelumnya, kegiatan diawali dengan rapat pleno yang dibuka oleh Ketua KPU Ardiles Mewoh.

Mewoh mengajak undangan dan pasangan calon berdoa untuk para korban bencana alam yang terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan.

Pleno terbuka digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Di mana undangan yang hadir dibatasi.

Pleno terbuka ini bisa disaksikan secara live di laman Youtube KPU Sulawesi Utara. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*

Sumber : *sulutreview.com*

Olly-Steven di Tetapkan KPU Sulut Sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

SULUT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar,Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020.Kamis (21/01/21) di Grand Kawanua Hotel.Penetapan ini di pimpin langsung ketua KPU Sulut Ardiles mewoh.

Sebelum penetapan dilakukan penyerahan berita acara dan pembacaan berita acara oleh Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” kata Momongan.

Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut dan ke partai politik. Setelah itu, pengumuman hasil penetapan pasangan calon di papan pengumuman KPU Sulut.

Ardiles Mewoh mengakui rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur ini disyukuri karena cuacanya begitu baik.

“Bersyukur saat ini KPU Sulut mengambil tanggal cantik yaitu 21/01/21 untuk moment penetapan ini.” pungkas Mewoh. (*)

Penulis : *Friska Tewu*

Sumber : *portalsulutnews.com*



KPU Sulut Tetapkan Cagub-cawagub Terpilih di Tanggal Cantik

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut memilih tanggal cantik dalam penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Sulut. Yakni hari ini Kamis 21-1-2021 di salah satu hotel di Manado.

Ketua KPU Provinsi Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, KPU agendakan pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan setelah menerima surat KPU RI perihal penetapan calon terpilih. "Sehubungan dengan diterimanya surat panitera Mahkamah Konstitusi (MK) soal keterangan perkara yang teregistrasi di MK," kata Ardiles.

Menurut Ardiles, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota yang tak ada perselisihan di MK, maka penetapan dilakukan paling lambat 5 hari. "Pilgub Sulut tak ada permohonan hasil perselisihan di MK. Kami memilih hari ini untuk penetapan. Tanggal cantik 21-1-2021," ungkap Ardiles. Diketahui, pasangan cagub-cawagub Sulut terpilih Pilkada 2020 yakni Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK) dengan jumlah 821.503 suara.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Nyawa Dipertaruhkan, Pilkada Sukses Digelar

MANADO - Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut menggelar Pilkada 2020, tuntas. Menyusul, Kamis (21/1) kemarin telah ditetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut terpilih. Suka duka telah dilewati KPU dari tingkat provinsi sampai jajaran paling bawah. Sebab, pelaksanaan Pilkada 2020, penyelenggara harus bertaruh nyawa melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah pandemi Virus Covid 19.

"Penetapan sudah kita laksanakan. Dengan ditetapkannya cagub-cawagub

Sulut Pilkada 2020, maka tuntas sudah tanggung jawab penyelenggara pemilihan untuk hadirkan gubernur dan wakil gubernur Sulut periode ke depan. Kami mengakhiri seluruh tahapan secara teknis," kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sulut yang punya kedaulatan.

"Kita tentu selalu dan tidak pernah berhenti beri apresiasi, termasuk di akhir seluruh tahapan ini. Dimana masyarakat Sulut sudah antusias berikan hak suara. Itu dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih di Sulut dengan angka 79, 7 persen di atas target partisipasi nasional dan jadi tertinggi diantara 9 daerah provinsi," ungkap Ardiles.

Tak hanya itu, Pilkada Kota Tomohon juga meraih 91 persen tertinggi di seluruh Indonesia untuk pilkada kota. Kemudian Boltim dan Bolsel peringkat kedua dan ketiga tertinggi untuk pilkada kabupaten. "Mitra tak selenggarakan pilkada, hanya pilgub. Namun mencatat angka partisipasi tertinggi," sambungnya.

Menurut Ardiles, daftar pemilih di Sulut semakin baik. Itu dibuktikan dengan menurunnya angka jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan. Kemudian semakin baiknya pemahaman masyarakat menggunakan hak pilih, sebab dibuktikan dengan menurunnya angka surat suara tidak sah dan surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos.

"Secara teknis menunjukkan bahwa masyarakat memahami terkait dengan penggunaan hak pilih di TPS," ucapnya.

Yang paling penting, lanjutnya, adalah tahapan pemilihan berjalan lancar dan kondusif dan tak ada masalah. Dia juga mengungkapkan dan beri apresiasi jajaran penyelenggaraan pemilihan KPU baik di kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, pengamanan TPS. "Meski pelaksanaan di masa pandemi, ternyata niat warga sangat tinggi untuk menjadi penyelenggara pemilihan. Buktinya banyak yang mendaftar penyelenggara ad hoc. Kami awalnya

khawatir tak ada yang mendaftar, karena masa pandemi. Tapi banyak yang antusias,” ungkap Ardiles.

Dia juga berterima kasih kepada Bawaslu Sulut juga dan jajaran, Forkopimda yang luar biasa beri dukungan dalam setiap tahapan. “Situasi Sulut kondusif karena pengamanan dengan kolaborasi yang mantap sehingga sukses. Kita semua bekerja semaksimal mungkin untuk hadirkan kualitas pemilihan yang berintegritas meski nyawa terancam, meninggalkan keluarga kita. Namun kita semangat dan termotivasi gelar pemilihan. Terima kasih juga untuk teman-teman media massa yang luar biasa hadirkan pemberitaan kondusif, mendidik, fakta untuk masyarakat. Selamat untuk calon terpilih. Mudah-mudahan tetap menjaga komitmen, konsisten jalankan program sebagaimana yang disampaikan pada warga,” tutupnya. (An1)

Penulis: *LivrAndo Kambey*
 Sumber: *Harian (Radar) Manado*

MANTAP! Seluruh Tahapan Pilkada 2020 Mulus Tanpa Pelanggaran

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut terbilang sukses menggelar Pilkada 2020. Salah satu hal yang bisa dibuktikan yakni tak adanya pelanggaran dan keberatan di setiap tahapan pemilihan.

“Pada pemilihan kali ini tidak terjadi pelanggaran terhadap tata cara mekanisme prosedur pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dalam sambutannya di kegiatan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih di Pilkada 2020, Kamis (21/1).

Hal ini, kata Ardiles, dibuktikan dengan tak adanya sengketa proses dari tahap awal sampai akhir KPU menetapkan paslon. “Terima kasih Bawaslu. Meski telah membuka ruang, tapi tak ada,” ucapnya. Terkait hasil pemilihan juga, lanjutnya, diyakini seluruh pihak dan dibuktikan bahwa tak ada sengketa hasil di Mahkamah

Konstitusi (MK).

“Ini catatan baik untuk kita. Pilkada sebelum-sebelumnya ada gugatan. Tapi kali ini tidak,” ungkapnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut pun memberi apresiasi kepada KPU karena tak adanya sengketa proses dalam tahapan Pilkada 2020 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Herwyn Malonda. “Sengketa proses tak ada. Berarti merasa tak ada masalah dan tak ada yang merasa keberatan. Termasuk TSM juga tak ada,” kata Herwyn. Dirinya memberi apresiasi kepada KPU bahwa tak ada keberatan diproses sengketanya. “Itu ukuran prestasinya. Baik di tingkat provinsi maupun kab/kota. Karena semua calon lolos. Termasuk objek sengketa yang kami keluarkan melalui keputusan berita acara,” ungkapnya.

Penulis: *LivrAndo Kambey*
 Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Pasangan CS-WL Ditetapkan KPU Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon

TOMOHOH -- Pasangan Carol Senduk dan Wenny Lumentut resmi ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih oleh KPUD Kota Tomohon. Pasangan yang diusung PDIP dan didukung oleh Partai Gerindra yang pada Pilkada Kota Tomohon 9 Desember 2020, mendapatkan dukungan suara mayoritas masyarakat Kota Tomohon sebanyak 43.611 suara tersebut ditetapkan oleh KPU lewat rapat pleno terbuka Kamis (21/1/2021).

“Atas penetapan ini bersyukur kepada Tuhan dan atas nama PDIP dan Partai Gerindra menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Kota Tomohon yang telah mempercayakan kami untuk memimpin Kota Tomohon,” kata Lumentut.

Politisi yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Sulut ini juga berharap agar segenap elemen masyarakat Kota Tomohon dapat juga berpartisipasi aktif menunjang jalannya



roda pemerintahan CS-WL.” Pasangan CS-WL adalah milik seluruh masyarakat Tomohon, untuk itu mari torang sama-sama membangun Kota Tomohon kearah yang lebih baik agar tujuan kesejahtraan yang diharapkan dapat terealisasi,” ajak WL. Untuk acara pelantikan masih akan menunggu jadwal namun direncanakan akan digelar pada 17 Februari 2021 mendatang. (*)

Penulis : Josh Tinungki
Sumber : sulutnews.com

SUKSES: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menuntaskan tahapan pemilihan tahun 2020 dengan menorehkan prestasi.*(Tidak ada nama penulis dan penerbit)*

MANADO - Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Sulawesi Utara, sarat prestasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sukses menjalankan amanat. “Sejarah mencatat, perkembangan demokrasi di Indonesia diawali di Sulut. Yakni pertama kali dilaksanakan pemilihan di Minahasa dan Sangihe pada tahun 1951. Puji Tuhan, pemilihan tahun 2020 Sulut banyak mencatatkan prestasi. Terima kasih,” sebut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, di sela rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Kamis (21/1), kemarin.

Di tanggal cantik 21-1-2021, sebut Mewoh yang didampingi komisioner Yessy Momongan, Lanny Ointu, Salman Saelangi, Meidy Tinangon, dan sekretaris KPU Pudjiastuti, KPU Sulut menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Olly Dondokambey dan Steven Kandouw sebagai calon terpilih. Penetapan ini dituangkan dalam berita acara yang dibacakan Komisioner KPU Yessy Momongan.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut 3 atas

nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” ucap Momongan, sembari menambahkan, akan mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman dan papan pengumuman KPU Sulut. Berita acara tersebut diserahkan KPU Sulut disaksikan Bawaslu Sulut pada pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan didampingi partai pengusul. Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut, dan ke partai politik.

Sebelum menutup rapat pleno yang merupakan akhir dari tahapan pilkada 2020, Ardiles Mewoh mengucapkan selamat pada calon terpilih. Dia kemudian berterimakasih pada semua stakeholder yang sudah bersama menyukseskan tahap demi tahap pemilihan tahun 2020.

Sederet prestasi ditorehkan. Diungkapkan Mewoh, partisipasi pemilih di pemilihan gubernur mencapai angka 79,7% di atas target partisipasi nasional dan jadi tertinggi di antara 9 provinsi penyelenggara pilgub. “Demikian juga pilkada Kota Tomohon 91 persen. Ini tertinggi di seluruh Indonesia untuk tingkat kota. Selanjutnya Boltim dan Bolsel peringkat kedua dan ketiga tertinggi untuk kabupaten. Sementara Mitra, yang bukan penyelenggara pilkada hanya pilgub, namun mencatat angka partisipasi tertinggi,” sebut Mewoh.

Tak sampai di situ, pada pemilihan kali ini tidak terjadi pelanggaran terhadap tata cara mekanisme prosedur pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan tak adanya sengketa proses. “Dari tahap awal sampai akhir kami menetapkan paslon. Terima kasih Bawaslu,” lanjutnya. Terkait hasil pemilihan, diyakini seluruh pihak dan dibuktikan dengan tak ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. “Ini catatan baik untuk kita. Pilkada sebelumnya ada. Tapi kali ini tidak,” tukasnya.

Mewoh juga memaparkan, semakin baik daftar pemilih. Dibuktikan dengan menurunnya angka jumlah pemilih



dalam daftar pemilih tambahan. “Pun semakin baiknya pemahaman masyarakat menggunakan hak pilih. Karena angka surat suara tidak sah dan syarat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos turun. Secara teknis ini menunjukkan masyarakat memahami penggunaan hak pilih di TPS,” sebutnya.

Paling penting, lanjut Mewoh, tahapan pemilihan lancar dan kondusif. “Tak ada gangguan. Terima kasih semua pihak, masyarakat. Kami apresiasi jajaran penyelenggara pemilihan. KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, pengamanan TPS. Meski pelaksanaan di masa pandemi ternyata niat warga sangat tinggi menjadi penyelenggara pemilihan. Buktinya banyak yang mendaftar penyelenggara adhoc. Kami awalnya khawatir tak ada yang mendaftar karena pandemi,” paparnya.

KPU juga berterimakasih pada Bawaslu Sulut dan jajaran. “Kita semua bekerja semaksimal mungkin hadirkan kualitas pemilihan yang berintegritas meski nyawa terancam. Namun kita semangat dan termotivasi. Terima kasih Forkopimda yang luar biasa beri dukungan dalam setiap tahapan. Situasi Sulut kondusif karena pengamanan dengan kolaborasi yang mantap sehingga sukses,” tandasnya.(*)

Penulis :

Sumber :

Pasca Ditetapkan KPU, Kandouw Sampaikan Terima Kasih Kepada Seluruh Masyarakat Sulut

MANADO - Wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 9 April 2020 Steven OE Kandouw mengatasnamakan Pasangan OD - SK dan Seluruh Partai Pendukung menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dari Miangas sampai Pinogaluman yang sudah berpartisipasi aktif memenangkan pasangan OD-SK dengan memberikan dukungan suara sebanyak 821.503.

“Kami memberikan apresiasi yang paling tinggi kepada seluruh rakyat Sulawesi utara yang telah berpartisipasi aktif serta menunjukkan Sikap, Perilaku, Pola berdemokrasi yang semakin hari semakin matang dan semakin mantap,” kata Kandouw kepada wartawan usai mengikuti rapat pleno terbuka KPU terkait penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kamis (21/1/2021) di Hotel Novotel Manado.

Kandouw juga menyampaikan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, TNI- POLRI, Pers yang bahu- membahu mensukseskan pelaksanaan Pilkada, juga Paslon Nomor Urut 1 dan 2 yang telah menjadi kontestan yang baik dalam semua tahapan selama pelaksanaan Pilkada.(*)

Penulis : Josh Tinungki

Sumber : sulutnews.com

MK Tolak Gugatan PAHAM, KPU Manado Siapkan Penetapan Calon Terpilih, AARS Tinggal Tunggu Lantik

MANADO - Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (17/2) membacakan putusannya terhadap gugatan Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021, yang diajukan pasangan calon walikota dan wakil walikota Manado nomor Urut 4 Julyeta Paulina A Runtuwene dan Harley Mangindaan, terkait pelaksanaan Pilwako Manado tahun 2021. Hasilnya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dengan adanya putusan tersebut, pihak KPU akan segera menyiapkan penetapan calon terpilih dalam waktu dekat ini.

Sidang dimulai pukul 10.47 WIB itu digelar lewat Daring dan dihadiri semua yang berkepentingan yakni pemohon, pihak terkait kuasa hukum paslon nomor urut 1, Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS), KPU dan Bawaslu Kota Manado.

Terpantau, 9 Majelis hakim MK yang diketuai Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo,



Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyatakan secara tegas permohonan pemohon tidak ada keterkaitan dengan penetapan perolehan suara.

Selain itu dalam pertimbangan putusan Hakim menyebut tidak memiliki keyakinan untuk menyimpang dari dari ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 terkait ambang batas.

“Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon (PAHAM) dan pihak terkait (AARS) adalah 21.573 suara atau melebihi persentase persyaratan sebagaimana pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 a quo. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016,” tegas Hakim Anwar Usman sebelum mengetuk palu putusan.

Masih menurut hakim, eksepsi Termohon/KPU dan Pihak Terkait/AARS beralasan menurut hukum dan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sehingga MK memutuskan Permohonan Pemohon/PAHAM tidak dapat diterima.

Wakil Walikota Manado terpilih, Richard Sualang mewakili Andrei Angouw, menyatakan ucap syukur atas hasil putusan MK. “Pertama saya mewakili pak walikota mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kedua, seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya bahwa gugatan itu tidak beralasan dan hanya membuang waktu dan energi saja dan terbukti dalam putusan di MK pada hari ini,” ucap Sualang.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon menyatakan akan segera memproses hasil putusan MK itu. “Setelah menerima salinan putusan maka sudah

bisa menyiapkan tahapan penetapan calon terpilih,” pungkas Tinangon.

Dengan adanya putusan MK tersebut, Ketua Tim Kampanye Roland Roeroe, mengucap syukur atas pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 itu.

“Terima kasih Tuhan. Perjuangan kita direstui Tuhan. AARS Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2021-2024,” tegasnya sembari mewakili AARS mengucapkan terima kasih kepada semua kader PDIP dan Gerindra, simpatisan serta relawan AARS yang telah mendoakan sehingga proses persidangan ini boleh berakhir dengan indah.

Paul Manusu SH, salah satu tim hukum PAHAM saat diminta tanggapan, menyebut menghormati putusan MK dan harus diterima.

“Kami memandang itu sebuah hal yang wajar, karena kalau berperkaranya kita tetap harus mengedepankan hasil putusan kalau mahkamah berpandangan begitu yah harus diterima,” ujarnya.

Dilain pihak, Julieta Paulina Runtuwene (JPAR) dalam akun facebooknya telah mengakui dan mengucapkan selamat kepada AARS.

“Syalom, selamat siang semua. Awali dengan Doa dan akhiri dengan Syukur. Salam sehat utk kita semua. Pada kesempatan ini, saya selaku pribadi dan keluarga mengucapkan banyak selamat kepada Andrei Angouw dan Richard Sualang yang telah terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado periode 2021-2024. Kiranya Kota Manado akan lebih baik lagi kedepan dibawah kepemimpinan Andre dan Richard,” tulis JPAR akun facebooknya.

JPAR pun mengajak masyarakat Kota Manado untuk sama-sama memberikan doa dan dukungan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Manado yang saat ini sudah baik dan diharapkan akan lebih baik lagi kedepan.



“Kompetisi sudah berakhir, jangan saling buli dan saling menghujat antara para pendukung calon walikota dan wakil walikota. Mari sama-sama bergandengan tangan untuk Manado yang lebih maju dan sejahtera. Tuhan Memberkati Kota kita Kota Manado tercinta. Manado tetap Kota Doa. JPAR dan keluarga,” pungkas JPAR.

Penulis: RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

Pasangan CS-WL Ditetapkan KPU Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon

TOMOHON--Pasangan Carol Senduk dan Wenny Lumentut resmi ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih oleh KPUD Kota Tomohon. Pasangan yang diusung PDIP dan didukung oleh Partai Gerindra pada Pilkada Kota Tomohon 9 Desember 2020, mendapatkan dukungan suara mayoritas masyarakat Kota Tomohon sebanyak 43.611 suara tersebut ditetapkan oleh KPU lewat rapat pleno terbuka. Kamis (21/1/2021).

“Atas penetapan ini bersyukur kepada Tuhan dan atas nama PDIP dan Partai Gerindra menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Kota Tomohon yang telah mempercayakan kami untuk memimpin Kota Tomohon,” kata Lumentut.

Politisi yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Sulut ini juga berharap agar segenap element masyarakat Kota Tomohon dapat juga berpartisipasi aktif menunjang jalannya roda pemerintahan CS-WL.” Pasangan CS-WL adalah milik seluruh masyarakat Tomohon, untuk itu mari torang sama-sama membangun Kota Tomohon kearah yang lebih baik agar tujuan kesejahteraan yang diharapkan dapat terealisasi,” ajak WL. Untuk acara pelantikan masih akan menunggu jadwal namun direncanakan akan digelar pada 17 Februari 2021 mendatang.(*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Diterbitkan : *sulutnews.com (22/1/2021)*

KPU Sulut Kawal Sidang Sengketa Pilkada Manado dan Boltim di MK

MANADO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan konsistensi dan tanggung jawab untuk mengawal sidang sengketa hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan termohon KPU Manado dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Dipimpin Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, tim fasilitasi PHP KPU Sulut mengawal langsung persiapan sidang hingga pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar Jumat (29/01/2021). Sidang untuk 2 perkara Pilbup Boltim dan 1 perkara Pilwako Manado dilaksanakan di Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.

MK membatasi peserta sidang yang hadir langsung (luring) di Gedung Konstitusi MK. Dari pihak termohon hanya 1 orang kuasa hukum dan 1 orang komisioner. Sisanya mengikuti sidang secara daring dari homebase KPU RI di Hotel Grand Mercure.

Mewoh dan anggota KPU Sulut lainnya, masing-masing Yessy Momongan, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon mengikuti sidang secara luring di hotel Grand Mercure.

Selain mengikuti dan menganalisa perkembangan sidang, keseriusan mengawal sengketa pilkada Boltim dan Manado ditunjukan dengan digelarnya koordinasi dan konsolidasi dengan fasilitasi KPU Sulut.

Dua kali rakor dilaksanakan yakni sebelum sidang dan sesudah sidang. Rapat dihadiri KPU Sulut, Boltim, Manado dengan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Eddy Gurning dan rekan.

Agenda sidang kedua bakal digelar 9 Februari 2021 dengan agenda



mendengarkan jawaban termohon dan pengesahan alat bukti termohon KPU Boltim dan Manado.

Karenanya, hari ini (30/01) tim langsung kembali ke Manado untuk menyiapkan alat bukti, diantaranya dengan mekanisme pembukaan kotak suara sesuai prosedur Peraturan KPU.

PEMBUKAAN KOTAK SUARA UNTUK PENGAMBILAN ALAT BUKTI, DIKETAHUI DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PASAL 71 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BERIKUT MEPERHATIKAN SURAT DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 PERIHAL PEMBUKAAN KOTAK SUARA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020.(*)

Penulis : *Jellina Najoa*

Diterbitkan : *sulutreview.com(29/1/2021)*

Epilog

Pilkada Sulut 2020 Tanpa Calon Perseorangan

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Sulawesi Utara tidak mampu menggeser paradigma kekuasaan bahwa calon perseorangan mampu setara dengan partai politik untuk mengusung calon menjadi kepala daerah. Faktanya, di Sulut hingga pendaftaran calon perseorangan ditutup, tidak satupun yang datang mendaftar ke KPU.

Pembentukan norma hukum yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-V/2007 telah membuka kesempatan bagi pasangan calon perseorangan.

Putusan MK tersebut tentang pencabutan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), karena hanya memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan. Namun rupanya regulasi pencalonan bagi jalur perseorangan atau independen ini cukup berat, dan rawan pemalsuan data. Pasangan jalur perseorangan butuh dukungan dan anggaran yang besar. .

Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Yessy Momongan menekankan jika dihitung, untuk Sulawesi Utara bakal calon perseorangan harus menyiapkan sekitar 190.812 e-KTP yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota sebagai modal untuk bisa mencalonkan



diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.” Pihak perseorangan membutuhkan waktu, tenaga dan fasilitas untuk menginput data ini ke format yang telah disiapkan melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog), untuk kemudian akan diverifikasi secara faktual (vertual),” kata Momongan di acara Sosialisasi ‘Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Rabu (04/11/2019) di Hotel Aston Manado.

Terdapat 5 status pekerjaan yang tidak bisa masuk dalam daftar e-KTP bakal calon perseorangan yakni TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu dan Kepala Desa dan Aparatnya. Terkait kemungkinan masalah yang akan ditimbulkan, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menjelaskan antara lain ; KTP manual dan Suket, jumlah dukungan pemilik yang tidak memenuhi syarat, penarikan dukungan pemilik saat vertual, pendukung tidak dapat ditemui saat vertual sehingga dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. “ Juga manipulasi dukungan serta dokumen palsu,” kata Herwyn.

Terkait teknisnya, KPU Sulut menawarkan bantuan dengan membuka helpdesk bagi bakal calon perseorangan yang akan bertanya secara mendalam proses dan teknis pelaksanaannya.” Kami siap membantu bagi bakal calon perseorangan yang membutuhkan informasi lebih jelas,” kata Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Sulut, Salman Saelangi. Namun hingga waktu pendaftaran berakhir hanya satu LO calon yang datang ke KPU Sulut untuk konsultasi.

Kita sangat menantikan seorang pemimpin daerah yang akrab dengan rakyatnya. Pemimpin yang independensinya terjaga dan bebas dari intervensi partai politik. Namun harus diakui, saat ini kekuatan politik yang paling efektif masih menjadi milik Parpol. Banyak contoh yang telah kita lihat, Kepala Daerah merasa kesulitan mendapatkan dukungan politik di parlemen mengingat komunikasi antara Kepala Daerah dengan Parpol berkuasa yang sangat terbatas. Pasti Kepala Daerah Perseorangan akan merasakan kondisi yang lebih parah.

Merujuk dari titik kelemahan calon Kepala Daerah Perseorangan yangki mesin politik premature ataupun minim dukungan parlemen, maka untuk Pilkada 2024 mendatang, calon Kepala Daerah Perseorangan harus lebih siap dan perlu mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, memaksimalkan komunikasi persuasif, profesional dan objektif dengan konstituen awal sehingga menjadi kekuatan politik yang membuat kekuatan parpol dan birokrasi dapat diimbangi.

Kedua, legitimasi Kepala Daerah Perseorangan dan anggota parlemen yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat membuat Kepala Daerah tidak perlu takut dengan gangguan politik yang sengaja dikondisikan Parpol. Biarkan saja rakyat yang memberi sanksi kepada parpol yang tidak pro rakyat. *Ketiga*, memerlukan kekuatan pressure extra parlemen untuk melakukan kontrol atas kinerja Parpol di parlemen.

Siapakah putra/putri terbaik Sulut yang mampu menerobos dan menggeser paradigma kekuasaan bahwa Kepala Daerah Perseorangan juga sama kemampuannya dengan Parpol karena dukungan rakyat berpihak kepadanya? Mari kita tunggu di Pilkada Serentak 2024 mendatang.(Jr)

Penulis: *Jeane Rondonuwu*
Sumber : *sulutdaily.com*





komisi
pemilihan
umum
Sulawesi Utara

Bab X

Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2020





Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

KPU Sulut Gelar Media Gathering Hadirkan Dewan Pers, Ini Kata Agus Sudibyo

MANADO - KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (29/1/2020) kemarin menggelar kegiatan Media Gathering dengan tema “Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Bersama Media Sukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020”, Kegiatan yang digelar di salah satu ruang meeting Hotel Arya Duta Manado itu dihadiri para wartawan yang ada di Sulut dan menghadirkan pemateri dari Dewan Pers, Agus Sudibyo.

Saat memberikan materi, Agus Sudibyo yang adalah Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional di Dewan Pers ini mengatakan bahwa media itu harus bertindak independen. Selain itu ditegaskan pula oleh Sudibyo, Dewan Pers tidak turut campur terkait hubungan kerjasama dalam hal ini iklan antara media dengan pihak instansi maupun perusahaan.

“Tidak masalah bila sertifikasi Dewan Pers digunakan untuk mencari iklan. Tetapi yang perlu diingat adalah sertifikasi yang diberikan ke media itu bukan syarat satu-satunya untuk mendapatkan iklan. Itu syarat minimal bukan syarat utama,” tutur Sudibyo.

Jadi lanjut Sudibyo, jika ada media yang sudah memiliki sertifikasi dan tidak terakomodir soal iklan jangan marah. “Karena tidak syarat utama, itu hanya syarat minimal agar media bisa menjalin hubungan kontraktual dengan institusi atau perusahaan,” ungkap dia.

Dirinya pun mengatakan bila pemasangan iklan oleh suatu institusi merupakan kepercayaan institusi itu sendiri terhadap media. “Itu di luar kewenangan Dewan Pers. Tergantung pada institusi dan media masing-masing,” tegas Sudibyo.

“Jadi saya tegaskan pak Ketua, sertifikasi media dan sertifikasi wartawan itu syarat minimal. Syarat yang harus ada untuk menegaskan status profesional, status kelayakan media dan wartawan, tidak ada urusan langsung dengan hubungan kontraktual, bisnis antara media dan institusi atau perusahaan,” kata Sudibyo sambil mengulang bahwa itu di luar kewenangan Dewan Pers.

Sebagai Dewan Pers dirinya berharap agar media yang belum tersertifikasi agar segera mendaftar. “Baik sertifikasi media maupun uji kompetensi wartawannya,” himbau Sudibyo.

Diketahui, kegiatan Media Gathering tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Dan turut pula sebagai pemateri adalah Komisioner KPU Sulut lainnya yaitu, Meidy Tinangon, Yessy Momongan, Lanny.A Ointu, dan Salman Saelangi.* (jane)



Penulis : *Jane Tungkagi*

Sumber : *ciintasulut.com/ January 30, 2020*

Komisioner KPU Sulut Terima Kunjungan Pengurus PPUA-Penca, Meidy Tinangon Ungkap Soal Ini

MANADO - Lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) yakni, Ardiles Mewoh (Ketua), Meidy Tinangon, Salman Sailangi, Yessy Momongan, dan Lanny Ointu, Senin (24/2/2020) menerima kunjungan Pusat Pemilihan Umum Akses – Penyandang Cacat (PPUA-Penca) di kantor KPU Sulut di Jalan Diponegoro Manado.

Adapun kunjungan PPAU-Penca tersebut dipimpin langsung Steven Kowaas. Kunjungan tersebut diapresiasi para Komisioner KPU Sulut.

Dikatakan Meidy Tinangon, ia sudah mengenal Ketua PPUA-Penca sejak dirinya menjadi Komisioner di KPU Kabupaten Minahasa.

“Steven adalah penyandang disabilitas (tuna netra), kami telah bermitra sejak di Minahasa. Steven adalah Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Minahasa,” tutur Tinangon.

Lebih lanjut dikatakan Tinangon, semangat Steven yang tinggi dalam mengangkat kaum difabel patut diacungkan jempol.

“Penguasaan terhadap regulasi menunjukkan meskipun dia tunanetra namun tak hilang semangat untuk membaca,” ucapinya.

Dituturkan Tinangon, pertemuan tersebut membicarakan tentang bagaimana penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam Pilgub 2020.

“Bagaimana Pilkada makin ramah disabilitas, makin aksesibel,” tandasnya.*
(jane)

Penulis : *Jane Tungkagi*

Sumber : *ciintasulut.com/ February 24, 2020*

PPUA Kunjungi KPU Sulut

MANADO - Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Steven Kowaas, Senin (24/2/2020) berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Pengurus PPUA diterima langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh bersama komisioner KPU Meidy Tinangon, Lanny Ointu.

Meidy Tinangon menjelaskan, Steven adalah penyandang disabilitas (tunanetra).

“Kami telah bermitra sejak di Minahasa. Steven adalah Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Minahasa,” jelas Tinangon.

Tinangon menyatakan, KPU Sulut sangat mengapresiasi akan kekukuhan kaum disabilitas pimpinan Steven Kowaas, terlebih semangat mereka yang tinggi dalam mengangkat kaum difabel.

”Patut diacungkan jempol, Penguasaan terhadap regulasi menunjukkan meskipun dia tunanetra namun tak hilang semangat untuk membaca,” ucap Tinangon.

Tinangon pun mengakui sempat bercakap cakup tentang bagaimana penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam Pilgub 2020. “Intinya bagaimana Pilkada makin ramah disabilitas, makin aksesibel,” jelas Tinangon. Dalam pertemuan itu dilakukan Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengurus PPUA Penyandang cacat Sulut kepada Ketua KPU Sulut.(*)

Penulis: *Mekar Salindeho*

Sumber: *manadoline.com*

KPU Sulut Bahas Hak Politik Penyandang Disabilitas

MANADO -- Dewan Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Senin (24/2/2020).

Kunjungan tersebut dikoordinir oleh Steven Kowaas, yang disambut oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh bersama Komisioner KPU Meidy Tinangon dan Lanny Ointu.

Pembahasan yang menarik adalah berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas yang perlu dilibatkan dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi bagian dalam sistem pemilu yang inklusif dengan segala tahapannya.

Penulis: *Mekar Salindeho*
 Sumber: *manadoline.com*

Media Ditengah Pandemi Covid-19 dan Pilkada 2020

MANADO- Di tengah kondisi menurunnya pendapatan atau revenue media-media saat pandemi masyarakat terus berharap memperoleh informasi akurat dan kredibel dari media yang independen dan berkualitas. Itu dibuktikan naiknya jumlah pengunjung atau pembaca khususnya media siber di masa pandemi COVID-19.

“Pendapatan berkurang drastis, ya itu harus diakui. Tapi pembaca media online naik 80 hingga 200 persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan informasi media massa. Mereka menganggap informasi media sosial diragukan validitasnya, sehingga mereka mencari informasi secara pasti melalui media massa,” ujar Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat, Wenseslaus Manggut saat diskusi online yang digelar AMSI Sulut bekerjasama dengan Pusat Studi Kepemiluan FISIPOL Unsrat, Jumat (8/5).

Mantan Pemred Merdeka.com ini menyampaikan dalam kondisi menghadapi Pilkada 2020, media massa harus dijadikan sebagai alat yang dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas keberhasilan Pemilu itu sendiri.

“Karena baik atau tidaknya Pemilu dilihat dari sisi akuntabilitas Pemilu tersebut. Sehingga di situ peran media massa sangat penting. Selanjutnya, media massa dijadikan media partisipasi Pemilu, media massa harus terus menyebarkan informasi mengenai Pemilu agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi. Terakhir, media harus menjadi clearing house mengenai berita hoax dan misinformasi di tengah masyarakat sehingga media massa jadi rujukan utama suksesnya Pilkada 2020,” kata Direktur Konten Kapanlagi Youniverse.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh kesempatan itu menyampaikan peran media massa sejauh ini dapat memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat melalui informasi-informasi kredibel sehingga masyarakat memiliki ketertarikan mengenai Pemilu maupun Pilkada.

“Namun paling juga media harus tetap menjaga independensinya dalam Pilkada 2020. Media tidak dijadikan alat untuk mendorong opini atau condong terhadap satu pihak dan tetap menjadi media yang independen,” katanya.

Jika Pilkada 2020 harus dilaksanakan pada Desember nanti maka KPU mendorong tahapan-tahapan menuju pemilihan sudah segera dilakukan dengan tetap berpegang pada ketentuan protokol kesehatan sehingga terhindar dari resiko dan bahaya COVID-19.

“Terakhir, KPU terus mengupayakan bahwa pemilih terlindungi hak pilihnya agar partisipasi pemilih tetap baik dan tidak tergerus,” ujar Ardiles.

Lalu bagaimana dengan pengawasan? Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan peran pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu tapi media sebagai alat sentral sarana pengawasan.

“Termasuk juga media menjadi salah satu bagian yang harus diawasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2020 di tengah COVID-19,” tuturnya.



Bawaslu melihat media massa harus dijadikan media pendidikan politik kepada masyarakat.

“Media kontrol dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada. Media hiburan untuk membuat keadaan yang cair dalam proses pilkada. Media informasi yang dapat menangkal berita hoax dan media informasi, serta media sebagai wahana ekonomi yang menghidupi kehidupan para pekerja di dalamnya,” ujar Herwyn.

Media sebagai pilar keempat demokrasi harus berupaya menunjukkan eksistensinya.

“Media bukan menjadi bagian dari tim sukses calon gubernur, bupati atau walikota sehingga proses pilkada benar-benar berkualitas. Dan pemimpin yang dihasilkan juga berkualitas bukan pemimpin yang hanya datang gunting pita. Termasuk juga pemimpin yang mampu mencari solusi di tengah pandemi COVID-19. Lagi-lagi butuh peran media yang artikulasikan itu,” ujar Pengamat Politik dan Kepemiluan Unsrat Manado, Ferry Daud Liando.

Liando mengingatkan, Pilkada yang berbiaya mahal jangan sampai menghasilkan pemimpin yang legitimasinya diragukan.

Olehnya media harus memahami aturan dalam Pilkada sehingga dapat memberitakan pelanggaran-pelanggaran pilkada sehingga memudahkan pihak Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pilkada 2020 dimana banyak bantuan yang dipolitisir di masa pandemi COVID-19. “Apabila memang tahapan Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada Juni seharusnya pemerintah sudah memberikan kepastian bahwa sebelum Juni keadaan sudah normal dan memungkinkan tahapan menuju Pilkada 2020 pada Desember 2020 sehingga tidak ada penundaan kembali. Dan tidak terjadi pemborosan dana yang sudah digunakan untuk mencapai Pilkada 2020,” katanya.

Diskusi yang dipandu Mineshia Lesawengan dari Pusat Studi Kepemiluan FISIPOL Unsrat dan diawali pengantar oleh

Ketua AMSI Sulut, Agust Hari. Tak hanya diikuti pemimpin media anggota AMSI, namun ada juga Ketua KPU Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, Boltim. Termasuk Komisioner Bawaslu Minut, mahasiswa serta masyarakat umum.(Ody)

Penulis : *Noldy Kaeng*

Sumber : *Sulutpos.com/5/6/20*

Disabilitas Sulut Sampaikan Aspirasi soal Pilkada ke KPU Sulut

MANADO – Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara, Salman Saelangi menyambut baik kedatangan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Sulawesi Utara, Steven Kowaas S.Sos bersama pengurus dan anggota di gedung KPU Sulut. Senin (5/10/2020).

Kedatangan para pengurus dan anggota pemilihan umum akses disabilitas melakukan pertemuan sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Maksud dan tujuan dari kedatangan mereka ke KPU Sulut yakni ingin menyampaikan sejumlah point penting, antara lain pelayanan saat pemilihan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), khususnya berkaitan dengan kondisi dekat TPS yang nyaman bagi disabilitas untuk datang ke lokasi dan alat coblos untuk para penyandang disabilitas.

Menanggapi beberapa point aspirasi yang telah disampaikan oleh ketua, pengurus dan anggota pemilihan umum akses disabilitas, Saelangi mengatakan bahwa aspirasi yang telah disampaikan terkait Pilkada untuk para penyandang disabilitas pada 9 Desember 2020 akan segera ditindak lanjuti agar dapat mempermudah akses para disabilitas dalam memberikan hak pilih mereka di TPS.

“Kami akan memperhatikan dan akan segera menindak lanjuti masukan dari ketua disabilitas untuk memberikan hak suara pada pemilihan umum kepala daerah



(Pilkada) sehingga pelaksanaan pilkada bagi disabilitas bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para disabilitas,” jelas Saelangi

Empat organisasi turut hadir dalam pertemuan ini, yaitu Asosiasi Pertuni, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulut, Perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Sulut, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

KPU Sulut Gelar Media Gathering terkait Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020

SULUT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020, Kamis (8/10/2020) menggelar Media Gathering yang melibatkan puluhan pekerja Pers di Sulawesi Utara.

Pada giat yang dibuka pelaksanaannya oleh Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh tersebut adalah untuk lebih mensosialisasikan berbagai regulasi terkait Pilkada agar informasi terkait regulasi dapat disebarluaskan seluas- luasnya kepada Masyarakat. “Diharapkan media dapat menjembatani penyebaran informasi terkait sukses penyelenggaraan Pilkada,” kata Ardiles saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Kantor KPU Sulut.

Pada kesempatan tersebut Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi menguraikan terkait PKPU 13 tahun 2020 terkait tahapan Pilkada yang wajib menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19.

“KPU berharap semua tahapan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, dan wajib diikuti oleh semua peserta Pilkada,” jelas Saelangi.

Pada kegiatan yang berlangsung satu hari tersebut juga memaparkan tentang regulasi kampanye PKPU 13 tahun 2020 pasal

57 terkait metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog yang perubahannya mengatur protokol Covid-19 pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak, termasuk Perpu No 6 tahun 2020 yang Sumber untuk mengatur teknis pelaksanaan juga Materi Debat Paslon dan kebijakan strategi tentang penanganan pencegahan dan pengendalian Covid 19. (*)

Penulis : *Jellina Najoa*
Sumber : *sulutreview.com*

KPU Optimis Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 9 Desember Capai 77,5 Persen

SULUT -- Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM, Salman Saelangi mengatakan, KPU selaku pihak penyelenggara Pilkada optimis tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya bisa mencapai 77,5 persen, hal ini disampaikan Saelangi usai melakukan monitoring pelaksanaan kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Menurutnya optimisme KPU terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya didasarkan atas animo peserta seleksi KPPS yang membludak, serta jaminan KPU dalam upaya mengantisipasi penyebaran Corona Virus 2019 dengan menyiapkan APD bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS .

“ Bagi masyarakat yang datang menyalurkan hak pilihnya tetap mengikuti protokol kesehatan dengan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) yang disiapkan oleh KPU, “Semua petugas KPPS yang bertugas di TPS telah melakukan Swab dan difasilitasi APD lengkap,” jelas Saelangi.

Saelangi juga mengatakan dalam upaya mensukseskan tahapan Pilkada serentak 2020, KPU juga akan melakukan simulasi cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, agar masyarakat lebih memahami



seperti apa tata cara pemungutan suara disaat pandemi. (*)

Penulis : *Josh Tinungki*

Sumber : *sulutnews.com*

KPU Optimis Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 9 Desember Capai 77,5 Persen

MANADO - Komisioner KPU Sulut Devisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Sahelangi mengatakan KPU selaku pihak penyelenggara Pilkada optimis tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya bisa mencapai 77,5, hal ini disampaikan Sahelangi usai melakukan monitoring pelaksanaan kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menurutnya optimisme KPU terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya didasarkan atas animo peserta seleksi KPPS yang membludak, serta jamin KPU dalam upaya mengantisipasi penyebaran Virus dengan menyiapkan APD bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS .

Jelas Saelangi, Bagi masyarakat yang datang menyalurkan hak pilihnya tetap mengikuti protokol kesehatan dengan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) yang disiapkan oleh KPU. Semua petugas KPPS yang bertugas di TPS telah melakukan Swab dan difasilitasi APD lengkap.

Saelangi juga mengatakan dalam upaya mensukseskan tahapan Pilkada serentak 2020, KPU juga akan melakukan simulasi cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, agar masyarakat lebih memahami seperti apa tata cara pemungutan suara disaat pandemi. (DESI)

Penulis : *Desi*

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5%

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan tingkat partisipasi pemilih 77,5 persen. Sebagai penyelenggara, mereka berharap datang ke TPS pada 9 Desember mendatang.

Target 77,5 persen partisipasi pemilih dipatok KPU. Seperti disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Saelangi, Selasa (1/9) dalam kegiatan lanjutan di Hotel Swissbell Hotel Manado. "Kita berharap target warga memilih 77,5 persen kalau bisa lebih dari itu. Makanya perlu bantuan dan peran aktif masyarakat guna mensukseskan pilkada serentak," kata Saelangi.

Di samping masyarakat, dirinya meminta peran pers serta stakeholder pemilu.

Sementara itu, dalam kampanye pasangan calon, warga diminta dapat menilai terkait visi misi setiap calon. "Di kampanye ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Yakni mampu melihat atau menilai visi misi bakal calon. Apakah mereka layak, apakah mereka cocok jadi pemimpin atau tidak. Tahapan kampanye jadi wadah yang sangat terbuka luas untuk calon ini," terangnya.

Dijelaskannya pula, KPU bakal memfasilitasi jalannya kampanye pilkada serentak tahun ini. "Ada fasilitas kampanye berupa debat publik pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye, percetakan Alat Peraga Kampanye (APK) juga iklan di media massa baik cetak, online maupun elektronik," jelasnya.

Pada kegiatan tersebut, KPU juga bakal menerapkan protokol kesehatan ketat. "Dalam Pilkada tahun ini memang wajib menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya dalam pemungutan, tahapan per tahapan kita lakukan juga sesuai protokol Covid-19," kata Komisioner Perencanaan dan Data KPU Sulut Lanny Ointu.

Diungkapkannya, ada sembilan hal baru yang wajib diketahui masyarakat. Dijabarkannya, pemilih dalam TPS dibatasi, KPPS sehat dari Covid-19, suhu tubuh sehat pemilih dan KPPS 37,3°, kedatangan pemilih diatur, areal TPS bebas Covid-19, sterilisasi paku, wajib memakai masker, sarung tangan plastik sekali pakai, dan yang terakhir tinta tak lagi dicelup, kini wajib ditetes saja.

"Jumlah pemilih di TPS dalam Pilkada nanti



diatur maksimal hanya 500. Sebelumnya diatur dalam PKPU 19 2019 maksimal pemilih 800, dan di PKPU terbaru 2020 diatur kembali hanya 500. Dan di daerah yang melaksanakan Pilkada kami atur hanya 400 pemilih saja,” jelas Ointu.(***)

Penulis : *Angel Rumeen*
Sumber di : *Manado Post*

KPU Sulut Gelar Media Gathering terkait Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020, Kamis (8102020) menggelar Media Gathering yang melibatkan puluhan pekerja Pers di Sulawesi Utara. Pada giat yang dibuka pelaksanaannya oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh tersebut adalah untuk lebih mensosialisasikan berbagai regulasi terkait Pilkada agar informasi terkait regulasi dapat disebarluaskan seluas- luasnya kepada Masyarakat.

Mewoh berharap media dapat menjembatani penyebaran informasi terkait sukses penyelenggaraan Pilkada, tahapan demi tahapan. Pada kesempatan tersebut Anggota KPU Sulut Salman Sahelangi menguraikan PKPU 13 tahun 2020 terkait tahapan Pilkada yang wajib menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Covid 19.KPU berharap semua tahapan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, dan wajib diikuti oleh semua peserta Pilkada.

Pada kegiatan yang berlangsung satu hari tersebut juga dipaparkan terkait regulasi kampanye PKPU 13 thun 2020 pasal 57 terkait metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog yang perubahannya mengatur protokol Covid 19 pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak, termasuk Perpu No 6 tahun 2020 yang Sumber untuk mengatur teknis pelaksanaan juga Materi

debat Paslon dan kebijakan strategi tentang penanganan pencegahan dan pengendalian Covid 19

Berbagai pertanyaan diungkap wartawan baik menyangkut partisipasi masyarakat, dana kampanye dan berbagai pertanyaan terkait dengan pilkada yang dimoderatori oleh Kasub Teknis Perundang undangan dan Humas Rudi Lalonsang.

Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Komisioner bidang Teknis Yessy Momongan.

Penulis : *Desi Holung*
Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

Salman Saelangi Terima Aspirasi Pengurus Disabilitas

MANADO - Senin (5102020) kurang lebih, tujuh pengurus dan anggota pusat pemilihan umum akses disabilitas Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pertemuan sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember mendatang.

Ketua Pusat pemilihan umum akses disabilitas Sulawesi Utara Steven Kowaas S.Sos mengatakan, kedatangan mereka di KPU Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa point penting antara lain pelayanan saat pemilihan di lokasi Tempat pemungutan suara (TPS), mereka berharap agar penyandang disabilitas lokasi dekat TPS sehingga tidak menyulitkan bagi disabilitas untuk datang dilokasi dan lebih mudah mencoblos.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Salman Saelangi mengatakan, aspirasi dari disabilitas diterima untuk ditindaklanjuti. Dimana penyandang disabilitas bisa mendapatkan lokasi TPS yang dekat tempat tinggal sehingga dapat mempermudah akses dari disabilitas untuk memberikan hak suara di TPS.

Hadir pada pertemuan Senin sore tersebut ada empat organisasi antara lain Asosiasi



pertuni, Gerkatin gerakan kesejahteraan tunarungu indonesia Sulut, Perkumpulan penyandang disabilitas indonesia Sulut, ikatan tunanetra muslim indonesia.(DESI)

Penulis : Desi Holung

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

Lewat Media, KPU SULUT Berharap terbangun Partisipasi Aktif Masyarakat

MANADO - Untuk membangun sinergitas yang baik antara KPU dan Pers, dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi tahapan Pilkada serentak yang digelar, 9 Desember 2020 mendatang, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Kamis, 3 September 2020 menggelar media Gathering.

Salman Saelangi, Komisioner KPU Sulut bidang Palmas saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di ruang Media Center KPU Sulut Jalan Diponegoro Teling Manado mengatakan, Peran media sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak. Jelas Saelangi ini sudah dialami oleh KPU saat pileg kemarin, dimana fungsi edukasi, sosialisasi bahkan juga pengawasan dilakukan secara baik oleh media.

Peran media juga jelas Saelangi sangat strategis dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi setiap tahapan pilkada.

Tumbuhnya berbagai masukan dan tanggapan masyarakat untuk kelangsungan pelaksanaan tahapan Pilkada penting agar proses demokrasi berjalan baik.

Juga kata Salangi Pesta Demokrasi ini bukan hanya milik KPU tetapi milik bersama untuk itu yang dibutuhkan adalah kerja bersama semua stakeholder untuk mengawal tahapan sehingga dapat terealisasi dan berjalan tepat waktu. Setiap tahapan Pilkada jelasnya, dibutuhkan ketelitian agar tidak menimbulkan persoalan, sehingga dibutuhkan pengawasan dan kerja bersama dari semua pihak.

Sementara itu sejumlah materi yang disampaikan terkait peran pers dalam menciptakan demokrasi berkeadilan yang disampaikan oleh para narasumber diantaranya Raymod Paslah , Komisi Informasi Publik (KIP), Amanda Komaling (IJTI) dan Erick Kawatu (KPID) memberi pemahaman terkait peran pers untuk turut serta mensukseskan terselenggaranya Pilkada yang berkualitas serta berkeadilan.

Kegiatan media Gathering ini digelar 2 Sesi hal ini menurut Komisioner Salman Saelangi guna memenuhi standar Covid 19 dengan pembatasan jumlah kehadiran.(DESI)

Penulis: *Desi Holung*

Disiarkan : *Radio Sion Sulut*

Bersama Korem 131/Santiago, Saelangi Buka Kegiatan Coffee Morning Pemilihan Sehat dan Damai

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Kegiatan Coffee Morning Pemilihan Sehat dan Damai dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang diselenggarakan di Aula Makorem 131 Santiago, Jumat 20 November 2020.

Sambutan pembuka yang di bawahkan Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, dimana dirinya memberikan support atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan."Saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan coffee morning yang dilaksanakan pagi ini, bahkan saya terus mensupport berjalannya kegiatan ini,"tutur Saelangi.

Membuka diskusi pagi tadi Salman Saelangi menyampaikan bahwa diskusi ini membahas tentang Pilkada sehat dan damai."Yang pertama sehat dulu untuk Pilkada baru selanjutnya damai. Dimana kalo bicara damai tidak akan dapat kalo kita semuanya belum sehat, atau kalo kita sakit, maka akan susah bicara damai. Maka kemudian di kedepankan sehatnya dulu,"kata Saelangi.

Selanjutnya Salman Saelangi mengatakan dimana berbicara Pilkada



sehat di masa pandemi Covid-19 ini, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan.”Pilkada ini harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan menerapkan Protokol Covid-19 itu sendiri. Baik proses pelaksanaannya, dari kontesannya dan kemudian proses kontesasinya,”ucap Saelangi.

Adapun Salman Saelangi mengatakan akan terus mendorong bagaimana pada pelaksanaan pilkada ini tetap patuh terhadap pelaksanaan Covid-19.”Ketika Protokol Covid-19 bisa kita jaga maka konteks selanjutnya kita berbicara tentang pilkada damai,”jelas Saelangi.

Dalam kegiatan ini turut hadir Danrem 131/ Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda, para dokter, akademisi dan media massa.(Feicy)

Penulis : Feicy Tatilu
Sumber : Swarakawanua.com

KPU Sulut Gelar Rapat Evaluasi Keterbukaan, Saelangi: Kegiatan Dilaksanakan Untuk Mengevaluasi Ke Media Terkait Tahapan Dalam Pilkada 2020

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut gelar Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Kegiatan ini di gelar di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara, Selasa 23 Februari 2020.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Komisioner Bidang Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Saelangi, didampingi Kasub Rudy Lalonsang.“Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Rapat ini telah dibuka,”tutur Saelangi.

Dalam kegiatan evaluasi ini Salman Saelangi mengungkapkan saat ini akan mengevaluasike media dari apa-apa yang telah diberitakan terkait tahapan dalam Pilkada 2020. “Setiap awal tahapan sampai selesainya penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena ini

sangat penting akan dibuat satu buku agar tulisan-tulisan dari setiap media dari awal tahapan bisa dievaluasi dan bisa menjadi kritikan untuk kami,”ungkap Saelangi.(Feicy)

Penulis : Feicy Tatilu
Sumber : Swarakawanua.com

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2020 Sangat Dibutuhkan

MANADO – Tingkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah stakeholder Pemerhati Pemilu yang bertempat di Aston Hotel,Kamis (04/11).

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan peran pemerhati pemilu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang tahapannya mulai berlangsung.

” Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 mendatang kami membutuhkan masukan dan saran dari stakeholder yang ada sehingga nanti KPU dapat sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” Kata Mewoh.

Sementara itu Komisioner KPU Divisi Program dan Data, Lanny Ointu menjelaskan, berdasarkan data yang ada di KPU Sulut untuk tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan antara Pemilu tahun 2015 tingkat partisipasinya sebesar 65,77% dan pada pilkada tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih mencapai 83,55%.

” Kita berharap ada pilkada tahun 2020 nanti di Sulawesi Utara bisa mendapat dukungan dari seluruh stakeholder yang hadir dalam rapat koordinasi ini,” Harap Lanny.

Meidy Tinangon yang membidangi Divisi Hukum dan SDM,KPU Sulut berharap partisipasi masyarakat dalam penyusunan



produk hukum.

” KPU Sulut,nantinya akan melibatkan stakeholder dalam kelompok kerja penyusunan pedoman teknis dan juga berharap masukan stakeholder dalam workshop dan uji publik pedoman teknis nantinya serta penyuluhan produk hukum kepada stakeholder,” pinta Tinangon

Dalam Pilkada 2020 mendatang, pihak KPU bakal membuka kesempatan bagi masyarakat untuk pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di jajaran KPU.(Ody)

Penulis : Noldy Kaeng

Sumber: Sulutpos.com, (06/12/2019)

Kejati Sulut Apresiasi Kegiatan KPU Sulut Gelar “Coffee Morning” Bersama Stakeholder

MANADO - Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Coffee Morning dengan topik “Menuju Pemilihan Tahun 2020 Sehat dan Damai” yang dipimpin langsung Komisioner KPU Sulut, Meidy Yafeth Tinangon Divisi Hukum bertempat di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut, Jumat (27/11/2020) pagi.

Raimel Jesaja, SH. MH Selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut dalam sambutannya sangat mengapresiasi gagasan KPU Sulut untuk mengadakan Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Utara yang Sehat dan Damai dengan mematuhi protokol pencegahan Covid 19.

Diharapkan dengan pelaksanaan Coffee Morning ini akan tercipta sinergitas antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat.

“Sehingga kita dapat mensukseskan pelaksanaan Pilkada yang damai dan sehat, karena Pilkada di tahun 2020 ini

dilaksanakan di masa pandemi Covid 19 sehingga sangat berbeda dengan Pilkada yang dilaksanakan tahun sebelumnya, sehingga sangat tepat gagasan yang dilakukan KPU dalam satu kegiatan Coffee Morning ini bisa menyatukan persepsi kita semua demi mensukseskan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Tanggal 9 Desember 2020 nantinya,” ucap Wakajati.

Coffee Morning ini dibuka oleh Evans Steven Liouw, S.Sos Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulut mewakili Pjs. Gubernur Sulut.

Kegiatan ini diikuti pula oleh Perwakilan Forkopimda Sulut, pihak Rumah Sakit, Ketua Satgas Covid-19 Sulut dan pers di antaranya, Aster Kasdam XIII/Mdk Kolonel Inf Idris Soemantri Roni S.I.P, Direktur Dit Intelkam Polda Sulut Kombes Pol Budhy Herwanto S.H, M.H, Kadisfaslan Mayor Laut (T) Harry Prasetyo, ST, Dansatpom Lanudsri Sam Ratulangi, Mayor Pom Andi Irawan, Direktur Utama RSUP Prof Kandou Manado Dr.dr.Jimmy Panelewen, SpB-KBD, Kaur Wasbin Rs Bhayangkara, Direktur Rs Siloam dr. Andreas N.S, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka, SIP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sedangkan dari pihak Kejati Sulut turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Asisten Intelijen Kejati Sulut Stanley Y. Bukara, SH. MH, Plt. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulut Ledrik V.M.Takaendengan, SH. MH, Kabag TU Reinhard Tololiu, SH. MH, dan Koordinator Fien Ering, SH. MH. Kegiatan ini tetap menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.* (jane)

Penulis : *Jane Tungkagi*

Sumber : *ciintasulut.com*

Partisipasi Pemilih Mitra di Pilgub Sulut 85,18 Persen

RATAHAN -- Walau di tengah masa Pandemi COVID-19, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) masih berada dalam angka yang memuaskan.

Sebab dari sekitar 85.377 wajib pilih yang



masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengguna hak pilih yang tercatat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) sebesar 72.728 suara.

Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Mitra pada Pilgub Sulut berada di angka 85,18 persen, menurun jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) silam, yakni dengan angka 90,47 persen.

“Memang tingkat partisipasi menurun jika dibandingkan Pileg dan Pilpres, namun jika dilihat dari kondisi saat ini, hasil tersebut sangat memuaskan. Apalagi kami hanya menyelenggarakan Pilgub,” ungkap Ketua Divisi SDM, Sosialisasi dan Parmas KPU Mitra, Otniel Wawo, di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Mitra pada Pilgub Sulut, di Wale Wulan Lumintang, Senin (14/12/2020).

Sementara jika dilihat per-kecamatan yang ada di Kabupaten Mitra maka tingkat partisipasi pemilih tertinggi ada di Kecamatan Ratahan Timur dengan perolehan 89,73 persen, sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Tombatu dengan angka 79,33 persen.

“Kami bersyukur karena rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada masalah yang berarti. Beberapa koreksi yang ada berkaitan dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTp), namun tidak mempengaruhi hasil,” pungkask Otniel Wawo.

Penerapan protokol kesehatan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Mitra pada Pilgub Sulut. Senada dikatakan Plh Ketua KPU Mitra, Otnie Tamod, dirinya bersyukur karena Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Mitra pada Pilgub Sulut berjalan dengan baik. Dirinya kemudian menjelaskan bahwa guna mendukung pencegahan penyebaran COVID-19, KPU Mitra telah menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam kegiatan

rapat pleno tersebut.

“Sejak awal penerapan disiplin protokol kesehatan sudah dilakukan, di mana selain menyediakan tempat cuci tangan, harus menggunakan masker, diukur suhu tubuh, dan menggunakan sarung tangan, serta jumlah orang yang masuk ke ruangan dibatasi,” kata Otnie Tamod.

Dijelaskannya, mereka yang masuk ke ruangan pleno hanya pihak yang berkepentingan dan dirinya bersyukur karena semua pihak mendukung penerapan protokol kesehatan, lebih khusus pihak Kepolisian yang dengan setia terus mengawal tahapan Pilgub Sulut 2020.

“Bahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang masuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara bergantian, mereka yang belum mendapat giliran menunggu di luar ruangan. Demikian juga insan pers yang ingin mengambil gambar juga bergantian agar tidak terjadi kerumunan dalam ruangan rapat pleno terbuka,” tutupnya.

Penulis : *Jenly Wenur/Alfrits Semen*
Diterbitkan: *BeritaManado.com*

Pilkada Berjalan Sehat dan Damai, Kapolda Sulut: Terima Kasih Masyarakat Sulawesi Utara

MANADO – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol R.Z. Panca Putra mengucapkan terima kasih atas partisipasi nyata masyarakat, pemerintah daerah, TNI-Polri serta penyelenggara Pilkada Serentak 2020, sehingga Pilkada di wilayah Sulut berjalan dengan sehat dan damai.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyelenggara Pilkada dan pihak terkait lainnya yang telah bersama-sama turut mensukseskan Pilkada di Sulut, sehingga berlangsung dengan sehat dan damai. Kita semua patut bersyukur dan bangga,” ujar Irjen Pol R.Z. Panca Putra, Kamis (10/12) pagi, di Mapolda.



Lanjutnya, hasil pemantauan pelaksanaan tahap pemungutan suara di beberapa wilayah oleh Forkopimda Sulut pada Rabu (09/12), seluruhnya berjalan aman dan kondusif.

“Hasil pantauan bersama Forkopimda, protokol kesehatan benar-benar diterapkan di setiap TPS. Termasuk penjagaan ketat oleh personel Polri, TNI, dan Linmas. Semua berjalan sesuai aturan. Dan hingga saat ini kami belum menerima laporan kejadian menonjol terkait pelaksanaan tahap pemungutan suara,” jelas Irjen Pol R.Z. Panca Putra. (*)

Penulis : *Ryan Tinggogoy*
Sumber : *suluttimes.com*

Pdt Gilbert Lumoindong: Yang Menang Merangkul, Kalah Jangan Menghasut

MANADO - Pdt Gilbert Lumoindong memberikan pesan khusus kepada publik Sulawesi Utara (Sulut) setelah sukses menggelar hajatan Pemilihan Serentak. Ia mengapresiasi penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Sulut dan jajaran karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Terkhusus kepada calon yang unggul berdasarkan hasil hitung cepat, Gilbert Lumoindong meminta tetap rendah hati dan menunggu hasil resmi dari penyelenggara dalam hal ini KPU Sulut.

Begitu pula bagi kubu yang kalah, hamba Tuhan berdarah kawanua ini berharap terus menjadi pilar dalam proses pembangunan daerah kedepan. “Menang harus merangkul, kalah jangan menghasut,” tegas Gilbert Lumoindong kepada BeritaManado.com, Jumat (11/12/2020)

Menurut Lumoindong, pesta demokrasi bukan soal menang atau kalah, tetapi siapa yang dipercaya memimpin. Olehnya kata dia, mereka yang diberikan amanah mesti menjadi contoh dan teladan yakni takut akan Tuhan. “Dan bertanggung jawab. Kedua, betul-betul berjiwa nasionalis pancasila serta bersemangat membangun dengan konsep juang. Sulut mesti menunjukkan kemajuan luar biasa, jangan begitu-begitu terus,”

harapnya.

• Kepada calon yang belum berhasil,
• Lumoindong menilai mereka adalah
• pemimpin dengan kapasitas berbeda.

• “Tidak mesti memiliki jabatan untuk berbuat
• bagi Sulut. Dimanapun dan apapun profesi
• kita, andil membawa perubahan positif bagi
• daerah tetap terbuka,” tandasnya.

• Penulis : *Alfrits Semen*
• Sumber: *BeritaManado.com*

Partisipasi Pemilih di Tomohon Tertinggi se-Indonesia

• TOMOHON - Ini jadi prestasi bagi
• penyelenggara pilkada di Kota Tomohon.
• Partisipasi pemilih pada pilkada serentak
• 9 Desember lalu capai 91,98%. Tertinggi
• se-Indonesia. Ini berdasarkan data KPU RI.
• Kota Bunga berada di peringkat pertama
• kota dengan partisipasi pemilih tertinggi
• dalam Pilkada 2020. “Partisipasi pemilih
• tertinggi dalam pemilihan wali kota ialah
• Tomohon (91,98 persen),

• Tidore Kepulauan (91,34 persen), Ternate
• (83,82 persen), Sungai Penuh (82,81
• persen), dan Blitar (79,2 persen),” beber
• Ketua KPU RI Arief Budiman, Kamis (17/12).

• Atas capaian tersebut, Ketua KPU
• Tomohon Haryanto Lasut menuturkan, itu
• bukan semata-mata prestasi KPU Tomohon.
• “Tapi prestasi semua pihak di Tomohon.
• Mulai dari jajaran penyelenggara sampai
• KPPS, kontribusi teman-teman Bawaslu dan
• jajaran, TNI-Polri, pemerintah, media, serta
• peserta Pilkada,” tutur Lasut.

• Komisioner KPU Tomohon Divisi
• Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat
• Stenly Kowaas SP menambahkan,
• kontribusi electoral terbesar diberikan
• masyarakat Kota Tomohon saat datang
• di TPS pada 9 Desember 2020. “KPU
• Tomohon tentu saja mengapresiasi
• kedewasaan masyarakat pemilih Tomohon
• dalam melihat kontestasi Pilkada sebagai
• sarana demokrasi secara nyata,” tukasnya.

• Lebih jauh dia mengatakan, capaian
• fantastis partisipasi pemilih di tengah



pandemi Covid-19 ini, tak lepas dari peran stakeholder. Termasuk media massa yang gencar lakukan sosialisasi mengenai pilkada serentak termasuk protap pemungutan suara di TPS. “Kami sangat bersyukur dengan capaian ini. Terima kasih bagi semua pihak yang terus menopang kerja-kerja KPU Kota Tomohon,” tandasnya.

Sebelumnya Pemkot Tomohon dalam konferensi pers Kamis (17/12) membeberkan, Tomohon mencatatkan prestasi di perhelatan pilkada baru lewat. “Evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Mendagri,

Kota Tomohon peringkat pertama kategori kota dengan partisipasi tertinggi dalam Pilkada. Dengan nilai persentase 91,98 persen,” ujar Plh Sekkot Tomohon Dolvien Karwur. Lebih jauh dia menilai, hasil ini membuktikan kerja bersama baik Pemkot Tomohon dan insan pers berjalan baik. Ketika mensosialisasikan Pilkada serentak sehingga terlaksana dengan baik. Dia menambahkan, Pilkada sudah selesai. Kini saatnya fokus membangun Tomohon dengan menyingkirkan berbagai perbedaan politik. “Kita sekarang menatap ke depan dan tidak ada lagi perbedaan politik,” kuncinya.(*)

Penulis : *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Partisipasi Pemilih Melonjak, Mewoh-Saelangi Puji Media

MANADO - Kenaikan partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur (pilgub) 9 Desember lalu, menjadi prestasi tersendiri bagi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dari sisi partisipasi masyarakat, tak lepas dari peran media. Partisipasi pemilih naik 14,78 persen.

Sulut juga mencatat ada kota tertinggi tingkat partisipasinya, yakni Tomohon. Paling tertinggi memang ada di Papua. Mendekati 100 persen. Namun artinya secara riil, rekornya ada di Sulut,” kata komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, di sela media gathering, kemarin. Dia Pun

berterima kasih pada media massa yang ikut berperan mengajak masyarakat untuk tidak golput di 9 Desember lalu. “Meski digelar di tengah pandemi Covid-19, namun antusiasme masyarakat untuk ke TPS sangat besar. Ini juga berkat bantuan teman-teman. Dan mari kita kawal terus tahapan pilkada yang sudah hampir menyentuh garis akhir,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Ardiles Mewoh juga sudah menyampaikan jika kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak di Sulut ikut dibantu media massa. “Komitmen kita sejak tahapan awal hingga memasuki pleno rekapitulasi ini adalah tetap bergandengan tangan dan berkolaborasi dengan media. Peran media sangat strategis penting dan pengaruh terhadap kesuksesan pilkada. Itu jadi bukti bahwa sepanjang tahapan, masyarakat mendapat info yang luas dan masif, detail serta memberikan dukungan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat,” tutur Mewoh.

Salah satu buktinya adalah tingginya partisipasi pemilih. “Meski pastinya belum diketahui. Baru gambaran secara umum berdasarkan data yang dikumpulkan di kabupaten/kota untuk pilkada. Bahwa kami catat tertinggi secara nasional. Sulut kenaikan paling tinggi, 14,7. Ini tentu dan paling utama peran serta media. Bahkan jelang rekapitulasi puncak, kami tetap berkolaborasi. Kami ingin memanfaatkan hal yang jadi poin penting, strategis untuk rekapitulasi.

Yang pasti kami sampaikan terima kasih atas dukungan dari media selama kami laksanakan tahapan pemilihan,” tandasnya.

Komisioner Yessy Momongan menambahkan, hari ini tahapan pilkada memasuki rapat pleno tingkat provinsi untuk rekapitulasi penghitungan suara. “Sesuai dengan PKPU, peserta dalam rapat pleno ini dibatasi. Ini sesuai dengan protap kesehatan pencegahan penularan Covid-19,” kata Momongan sembari memastikan jika media massa tetap akan memperoleh update dari rapat pleno tersebut.



Selanjutnya, komisioner Meidy Tinangon dalam kesempatan itu menitikberatkan pada kemungkinan-kemungkinan adanya gugatan usai rapat pleno nanti. Menurut Tinangon, sebagai penyelenggara akan sangat terbuka dengan gugatan dari paslon jika memang tidak terima dengan hasil pleno KPU.(*)

Penulis : *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Salman Saelangi: Tingkat Partisipasi Pemilih di Sulut Capai 79,99 Persen

MANADO - Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara (Sulut) hampir mendekati 80 persen yakni 79,99 persen. Hal ini dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut Salman Saelangi kepada wartawan, Senin (14/12/20) siang.

Dikatakan Salman, meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember di tengah pandemi covid 19 namun, tidak mengurangi keinginan pemilih untuk menyalurkan hak suaranya.

“Jadi, sesuai target nasional tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara, pada pilkada 9 lalu melewati target nasional 77,5 persen sedangkan tingkat partisipasinya di Sulut 79,99 persen hampir mendekati 80 persen,” tandas Salman.

Penulis : *RAKA*
Sumber: *Elnusanews.com*

Partisipasi Pemilih Tinggi, KPU Lampaui Target

MANADO - Walaupun digelar di tengah pandemi Covid-19, namun partisipasi pemilih khusus Pilgub Sulut sangat tinggi. KPU Provinsi Sulut bahkan bisa lampaui target. Di mana partisipasi pemilih ditargetkan 77,5 persen. “Ini hampir mencapai 80 persen. Dan tentu sudah melewati target,” kata Komisioner Komisi pemilihan umum (KPU) Sulut Salman Saelangi. Dia menilai, antusias masyarakat menggunakan hak pilih masih tinggi. “Memang ada yang pesimis. Sebab pilkada

digelar di masa pandemi Covid-19. Tapi kami jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala peralatan terkait protap pencegahan Covid-19,” tukasnya.

Selain itu juga, lanjut Salman, sosialisasi ke masyarakat untuk tidak khawatir ke TPS, gencar dilakukan. “Sebab ini tugas kami. Karena memang berat ketika melaksanakan pilkada di masa pandemi. Meskipun berat, kami harus meyakinkan masyarakat, sudah dijamin di TPS penerapan protap pencegahan sangat ketat. Makanya kami sediakan semua yang diperlukan untuk pencegahan,” kuncinya.(*)

Penulis : *Angel Rumeen*
Sumber: *Manado Post*

Keren, Ini Sederet Prestasi Penyelenggara pada Pemilihan Serentak di Sulut

MANADO - KPU Sulawesi Utara (Sulut) baru saja menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Sulut, Minggu (20/12/2020).

Pada pleno terbuka tersebut suara sah mencapai 1.438.587.

Dari total ini, ternyata penyelenggara pilkada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menorehkan prestasi dan sejarah positif bagi proses demokrasi di Sulut.

Menurut Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, tingkat partisipasi pemilih Sulut berada pada angka 79,84% dan menjadi tertinggi pertama dari sembilan provinsi yang menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub).

“Bahkan di atas target nasional sebesar 77,5%. Ini tentu membanggakan,” kata Ardiles Mewoh.

Selanjutnya, Kota Tomohon menjadi peringkat pertama dengan partisipasi pemilih sebagai daerah yang menggelar pemilihan wali kota dengan capaian 93,13%.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga patut berbangga karena



mencatatkan partisipasi 95,94 persen.

Boltim berada di posisi kedua nasional untuk kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati.

“Urutan satu itu Kabupaten Fakfak dengan sistem noken. Sementara Boltim memilih secara langsung sesuai prinsip dan asas pilkada,” terang Ardiles.

Lanjut dia, partisipasi di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) juga sangat menggembirakan dengan 94%. “Sementara Minahasa Tenggara menjadi daerah non penyelenggara atau hanya memilih gubernur dan wakil gubernur, namun memberikan partisipasi hingga 85%,” terang Mewoh.

Di kesempatan itu, Ardiles menyampaikan bahwa KPU telah menuntaskan 100% Sirekap di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, ini akan menjadi sarana kepada masyarakat luas dalam mengakses informasi hasil pemilihan.

Selain itu, tambah Mewoh, Sulut merupakan provinsi yang sampai hari ini tidak mempunyai sengketa proses baik tingkat Pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota. Diakhir sambutannya, Ardiles berterima kasih kepada semua masyarakat Sulut yang telah menyalurkan suaranya pada 9 Desember 2020.

Apresiasi juga diberikan jajaran penyelenggara kepada insan pers karena selama ini menjadi pilar suksesnya pilkada serentak. “Teman-teman wartawan tanpa lelah memberikan informasi sejuk kepada publik,” tandasnya.

Penulis : *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Besok Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil, KPU Sulut Belum Sebar Undangan

MANADO - Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut sedianya akan digelar Rabu (20/1/2021).

KPU Sulut sudah menyiapkan tempat. Bahkan jalannya agenda rapat pleno terbuka ini sudah matang. Tetapi undangan

belum disebar penyelenggara pilkada.

Penyebabnya karena KPU Sulut belum menerima surat KPU RI yang meneruskan surat pemberitahuan resmi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perkara yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). “Surat pemberitahuan dari MK ini akan diserahkan kepada KPU RI dan diteruskan ke kami. Nah, nah sampai sekarang belum ada,” kata Meidy Tinangon pada Media Gathering, Selasa (19/1/2021).

Meidy Tinangon menjelaskan, surat ini menjadi patokan kapan penetapan akan digelar. “Tapi semoga sebentar sudah ada, sehingga undangan bisa disebar dan penetapan tetap berlangsung besok,” katanya. Di tempat yang sama, Komisioner Salman Saelangi memastikan penetapan tidak melewati 21 Januari. “Kalau suratnya baru ada besok, kami gelar Kamis nanti,” tandasnya.

Penulis: *Alfrits Semen*
Sumber: *BeritaManado.com*

Sah! Olly Dondokambey – Steven Kandouw Paslon Gubernur dan Wagub Terpilih

MANADO - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey – Steven Kandouw ditetapkan sebagai kandidat terpilih oleh KPU Sulut.

Paslon nomor tiga ini dinobatkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 821.503 suara. “Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 sebagai paslon terpilih,” ujar Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan, Kamis (21/1/2021).

Menurut Yessy Momongan, pengumuman penetapan tersebut akan dipublikasi pada laman dan papan pengumuman KPU Sulut. “Berita acara ini dibuat dan akan disampaikan saat ini juga kepada DPRD Sulut, partai politik pengusul, paslon terpilih, KPU dan Bawaslu Sulut,” terang Momongan.



Di kesempatan sama, Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengucapkan terima kasih kepada semua warga Sulut karena begitu antusias menyalurkan hak pilihnya.

“Partisipasi di Sulut sangat baik dengan 79,7 persen atau di atas target nasional. Ini juga tertinggi dari semua provinsi penyelenggara Pilgub,” tandas Ardiles.

Penulis : *Alfrits Semen*

Sumber : *BeritaManado.com*

Ditetapkan Paslon Terpilih, Steven Kandouw: Pekerjaan Masih Banyak!

MANADO - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey – Steven Kandouw ditetapkan sebagai kandidat terpilih oleh KPU Sulut.

Paslon nomor tiga ini dinobatkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 821.503 total suara pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan, Kamis (21/1/2021).

Steven Kandouw yang berkesempatan menyampaikan sambutan, menegaskan bahwa kerja-kerja Gubernur dan Wakil Gubernur masih banyak.

Atas nama Gubernur Olly Dondokambey, Steven menyampaikan keinginan pemerintah mewujudkan Sulawesi Utara menjadi lebih baik.

“Tugas dan tanggung jawab menunggu,” beber Kandouw. Dikatakan, pembangunan masyarakat menjadi prioritas digerakkan bersama. Ia pun berharap dukungan dari semua elemen saat menjalankan roda pemerintahan di bumi nyiur melambai.

Penulis : *Alfrits Semen*

Sumber: *BeritaManado.com*

Steven Kandouw: Terima Kasih kepada Paslon 1 dan 2

MANADO - Calon Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw mengucapkan terima kasih kepada Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Christinia Eugenia Paruntu – Sehan Salim

Landjar dan Paslon nomor 2 Vonnie Anneke Panambunan – Hendry Runtuwene.

Apresiasi diberikan Steven Kandouw kepada semua peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut karena telah bertindak profesional dan bertanggung jawab selama tahapan pilkada bergulir. “Mari terus bersinergi membangun Sulut,” kata Steven Kandouw saat menyampaikan sambutan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Sulut dengan agenda Penetapan Paslon Terpilih, Kamis (21/1/2021).

Steven juga memberikan penghargaan kepada KPU Sulut karena nilainya berhasil melaksanakan pesta demokrasi. “Ini bukan karena kami adalah pemenang, tapi melihat secara objektif bahwa KPU Sulut sukses dengan tugasnya,” kata Kandouw.

Begitu pula, lanjut Steven, para stakeholder khususnya aparat keamanan yang tidak pernah lelah mengawal jalannya pemilihan serentak. “Dan yang pasti apresiasi setinggi-tingginya kepada semua masyarakat Sulut, karena pilkada kemarin nyaris tidak ada gesekan,” tandasnya.

Penulis : *Alfrits Semen*

Sumber : *BeritaManado.com*

KPU Sulut Kawal Sidang Sengketa Hasil Manado dan Boltim di MK

MANADO - KPU Sulawesi Utara (Sulut) konsisten melakukan tanggung jawabnya mengawal sidang sengketa hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Termohon KPU Manado dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Dipimpin Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Tim Fasilitasi PHP KPU Sulut mengawal langsung persiapan sidang hingga pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (29/1/2021).

Sidang untuk 2 perkara Pilbup Boltim dan 1 perkara Pilwako Manado dilaksanakan di Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.



MK membatasi peserta sidang yang hadir langsung (luring) di Gedung Konstitusi MK.

Dari pihak termohon hanya 1 orang kuasa hukum dan 1 orang komisioner. Sisanya mengikuti sidang secara daring dari homebase KPU RI di Hotel Grand Mercure.

Mewah dan anggota KPU Sulut lainnya, masing-masing Yessy Momongan, Lanny Ointu dan Meidy Tinangon mengikuti sidang secara luring di hotel Grand Mercure.

Selain mengikuti dan menganalisa perkembangan sidang, keseriusan mengawal sengketa pilkada Boltim dan Manado ditunjukkan dengan digelarnya koordinasi dan konsolidasi dengan fasilitasi KPU Sulut.

Dua kali rakor dilaksanakan yakni sebelum sidang dan sesudah sidang. Rapat dihadiri KPU Sulut, Boltim, Manado dengan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Eddy Gurning dan rekan.

Agenda sidang kedua bakal digelar 9 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pengesahan alat bukti termohon KPU Boltim dan Manado.

Karenanya, hari ini (30/1/2021) tim langsung kembali ke Manado untuk menyiapkan alat bukti, diantaranya dengan mekanisme pembukaan kotak suara sesuai prosedur Peraturan KPU.

Pembukaan kotak suara untuk pengambilan alat bukti, diketahui dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan memperhatikan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Tahun 2020.

Penulis : *Alfrits Semen*

Sumber : *BeritaManado.com*

Salman Saelangi: Terima Kasih Kawan-kawan

MANADO - Insan jurnalis di nusantara sedang memperingati Hari Pers Nasional (HPN) hari ini, Selasa (9/2/2021).

Apresiasi atas sepakterjang wartawan di Sulut juga diberikan Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi.

Salman paham betul dengan kerja-kerja pewarta karena selalu menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Bahkan, baru-baru ini fungsi pers dirasakan betul KPU Sulut dalam perannya mempublikasikan program dan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak di bumi nyiur melambai.

"Kami dan wartawan adalah partner. Media massa melalui teman-teman jurnalis menjadi bagian suksesnya pemilihan gubernur dan tujuh kabupaten/kota," kata Salman kepada BeritaManado.

Dikatakan, keberhasilan KPU Sulut menorehkan partisipasi pemilih terbaik juga tidak lepas dari peran pers. Menurut Salman, capaian itu akan menjadi sejarah manis antara penyelenggara pilkada dan pewarta sebagai pengawal demokrasi.

"Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan. Pers di Sulut telah bersama kami selama ini. Semoga tetap solid dan bekerja sesuai amanah undang-undang," pesan Salman.

Penulis : *Alfrits Semen*

Sumber : *BeritaManado.com*

Catat Rekor, Sulut Tertinggi Partisipasi Pemilih

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sukses "merayu" masyarakat Sulut untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) gunakan hak pilih, 9 Desember lalu.



Meski di tengah pandemi covid 19. Terbukti, dari data sementara yang dirangkum, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sulut tahun ini meningkat.

Tak hanya itu, dari beberapa provinsi yang gelar Pilkada, Sulut menempati ranking atas partisipasi pemilih. "Sulut partisipasi pemilih naik 14,78 persen. Dibandingkan pilgub di daerah lain," beber Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, kemarin. Menurutnya, selain itu juga, di Sulut mencatat ada beberapa daerah yang juga partisipasi pemilihannya meningkat.

"Memang Sulut mencatat ada kota tertinggi yakni Tomohon. Kabupaten di Boltim dan Bolsel. Paling tertinggi memang Papua. Mendekati 100 persen. Artinya secara ril, rekornya ada di Sulut. Ini tak terlepas dari peran media juga," ujarnya.

Senada dikatakan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. Menurutnya, ini adalah komitmen dari awal dilaksanakan tahapan sampai sejauh ini mendekati rekor secara berjenjang, pihaknya tetap bergandengan dan kolaborasi bersama media.

"Peran media sangat strategis, penting dan pengaruh terhadap kesuksesan pilkada. Itu jadi bukti bahwa sepanjang tahapan, masyarakat mendapat info yang luas dan masif, detail serta memberikan suport pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ini berkat upaya media juga," ujarnya. Salah satu bukti, kata dia, adalah tingginya partisipasi pemilih.

Meski pastinya belum diketahui. Baru gambaran secara umum berdasarkan data yang dikumpulkan di kabupaten/kota untuk pilkada. "Bahwa kami catat tertinggi secara nasional. Sulut kenaikan paling tinggi, 14,7 persen. Ini tentu dan paling utama peran serta media. Bahkan jelang rekapitulasi puncak, kami tetap berkolaborasi.

Kami ingin memanfaatkan hal yang jadi poin penting, strategis untuk rekapitulasi. Yang pasti kami sampaikan terima kasih atas dukungan dari media selama kami melaksanakan tahapan pemilihan," ucapnya.

Penulis : *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Partisipasi Pemilih Pilkada Sulut Lampau Target

MANADO - Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Sulut 9 Desember lalu bisa melampaui target nasional. Diketahui, sebelum hari H pemungutan suara,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) targetkan partisipasi pemilih sebanyak 77,5 persen. Namun ternyata, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut, partisipasi pemilih mencapai nyaris sampai 80 persen. "Ini hampir mencapai 80 persen. Dan tentu sudah melewati target yakni 77,5 persen," kata Komisioner Komisi pemilihan umum (KPU) Sulut Salman Saelangi.

Menurutnya, antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilih masih tinggi. Apalagi di tengah pandemi covid 19. "Memang ada yang pesimis. Sebab pilkada di masa pandemi covid. Namun jauh-jauh hari kami sudah mempersiapkan segala peralatan terkait dengan protap pencegahan covid," ujarnya. Selain itu juga, lanjut Salman, sosialisasi ke masyarakat untuk jangan khawatir datang ke TPS, gencar dilakukan. "Sebab ini tugas kami. Karena memang berat ketika melaksanakan pilkada di masa pandemi ini.

Tapi, meskipun berat, kami harus meyakinkan masyarakat bahwa sudah dijamin di TPS penerapan protap pencegahan sangat ketat. Makanya kami sediakan semua yang diperlukan untuk pencegahan," tuturnya.

Penulis : *LivrAndo Kambey*

Sumber: *Harian (Radar) Manado*

Pilkada Sulut Catat Sejarah, Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi di Indonesia

MANADO - Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember di Propinsi Sulut tidak hanya berjalan aman dan lancar. Namun, ternyata penyelenggara Pilkada baik di tingkat



provinsi maupun kabupaten/kota telah menorehkan prestasi dan sejarah positif bagi proses demokrasi di daerah ini.

Tingkat partisipasi pemilih Sulut berada pada angka 79,84% dan menjadi tertinggi pertama dari sembilan provinsi yang menggelar pilgub. “Bahkan di atas target nasional sebesar 77,5%. Ini tentu membanggakan,” kata Ardiles Mewoh, saat sidang Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut, berakhir kemarin (20/12).

Selanjutnya, Kota Tomohon menjadi peringkat pertama dengan partisipasi pemilih sebagai daerah yang menggelar pemilihan wali kota dengan capaian 93,13%. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga patut berbangga karena mencatatkan partisipasi 95,94 persen.

Boltim berada di posisi kedua nasional untuk kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati. “Urutan satu itu Kabupaten Fakfak dengan sistem noken. Sementara Boltim memilih secara langsung sesuai prinsip dan asas pilkada,” terang Ardiles. Lanjut dia, partisipasi di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) juga sangat menggembirakan dengan 94%. “Sementara Minahasa Tenggara menjadi daerah non penyelenggara atau hanya memilih gubernur dan wakil gubernur, namun memberikan partisipasi hingga 85%,” terang Mewoh.

Di kesempatan itu, Ardiles menyampaikan bahwa KPU telah menuntaskan 100% Sirekap di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, ini akan menjadi sarana kepada masyarakat luas dalam mengakses informasi hasil pemilihan. Selain itu, tambah Mewoh, Sulut merupakan provinsi yang sampai hari ini tidak mempunyai sengketa proses baik tingkat Pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota.

”Terima kasih kepada semua masyarakat Sulut yang telah menyalurkan suaranya pada 9 Desember 2020. Apresiasi juga diberikan jajaran penyelenggara kepada insan pers karena selama ini menjadi pilar suksesnya pilkada serentak.

• Teman-teman wartawan tanpa lelah
• memberikan informasi sejuak kepada publik,”
• tandasnya. Sementara itu, koordinator
• Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat (Parmas)
• dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU
• Sulut, Salman Saelangi, mengucapkan
• terima kasih kepada seluruh masyarakat
• Sulut yang telah menyalurkan hak suara
• dalam pesta demokrasi pemilihan kepala
• daerah serentak tahun 2020. “kami ucapkan
• terima kasih kepada seluruh pemilih Boltim
• yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada
• tanggal 9 Desember, meskipun memang
• situasi ini ada di situasi sulit, tapi masyarakat
• masih antusias dalam memberikan hak
• pilihnya,” ucap Salman.

• Menurutnya, tingginya partisipasi pemilih
• pada Pilkada 2020 bukan menjadi prestasi
• KPU semata, melainkan prestasi semua
• pihak. “Mulai dari jajaran penyelenggara
• sampai KPPS, kontribusi teman Bawaslu
• dan jajaran TNI/Polri, pemerintah, peserta
• Pilkada baik parpol maupun paslon, teman-
• teman media serta masyarakat pemilih. Ini
• prestasi kita semua,” ujarnya.

• Tingkat partisipasi publik di Sulut
• merupakan yang paling tinggi untuk
• daerah yang menggelar Pilkada di
• Indonesia. Kabupaten dan kota di daerah
• ini juga berada paling tinggi se-Indonesia.
• Sementara kabupaten dan kota lainnya,
• rata-rata mengalami kenaikan angka jumlah
• partisipasi pemilih yang signifikan. “Adanya
• Covid-19 sempat membuat kami was-
• was. Karena dia membatasi publik untuk
• terlibat langsung. Padahal animo sangat
• tinggi. Kalau kami kesulitan mengendalikan,
• karena memang di Sulut animo masyarakat
• memang begitu besar,” aku Saelangi. KPU
• Sulut melibatkan banyak stakeholder selain
• masyarakat orang per orang.

• Selain itu ikut melibatkan media massa
• secara maksimal. “Karena pola kami,
• setiap tahapan ada media gathering. Kami
• sampaikan semua tahapan sehingga semua
• media menyampaikan secara serentak itu
• ke publik. Jadi informasi kegiatan sudah
• diviralkan lebih dahulu. Kami mengukur,
• partisipasi media massa sangat luar biasa.



Sehingga setiap ada persoalan, langsung cepat terselesaikan. Ini juga bagian dari upaya pelibatan publik lebih luas,” bebernya. Lanjut Salman, KPU juga melibatkan publik secara luas dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Kami (KPU) memang sudah punya PKPU (Peraturan KPU) terkait partisipasi masyarakat dan sosialisasi. Ada regulasinya,” kata Saelangi. Dijelaskan, bentuk pelibatan masyarakat itu dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik dalam berpartisipasi di setiap tahapan yang ada.

“Bukan hanya hari pencoblosan. Kami sengaja mendorong itu agar proses interaksi publik dengan penyelenggara semakin baik. Agar ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap agenda demokrasi ini,” ujarnya. KPU Sulut pun melibatkan publik dalam debat pasangan calon. “Misalnya, kami umumkan ke publik untuk menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Kami juga menggelar FGD untuk mendapatkan apa yang ingin ditanyakan publik. Setelah dapat, baru disaring oleh tim penyusun soal,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, KPU Sulut memang memaksimalkan semua media sosial yang dimiliki. “Viewers akun YouTube kami, yang nonton saat debat masih tertinggi se-Indonesia. Jadi partisipasi Sulut itu tinggi. Makanya Sulut partisipasi pemilih tertinggi di Indonesia, 78 persen,” ujarnya.

Penulis : *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

Hadirkan Dewan Pers, KPU Sulut Gelar Media Gathering Bersama Ratusan Wartawan

MANADO – Hadirkan anggota Dewan Pers Agus Audiby, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar media gathering dengan ratusan wartawan,(28/01).

Kegiatan yang digelar di Aryaduta Hotel, KPU Sulut bahas sinergitas kerja bersama pers dalam mensukseskan dan mewujudkan

tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak di Sulut yang tahapannya tengah berjalan.

“Media gathering dimaksudkan untuk menyatukan sinergi antara KPU Sulut dengan rekan-rekan pers. Kami telah mengevaluasi ada progres yang positif dalam kebersamaan kita selama ini. Semoga sosialisasi tentang agenda KPU Sulut terus dipublikasikan dan masyarakat mendapatkan informasi yang proporsional,” ujar Koordinator Divisi SDM dan Hupmas KPU Sulut, Salman Saelani.

Adapun dalam kegiatan itu, tampil sebagai narasumber selain Agus Sudiby, Ketua KPU Sulut, Adiles Mewoh, koordinator divisi Hukum KPU Sulut, Meidy Tinangon, divisi teknis, Yessy Momongan, divisi data Lanny Ountu pun paparkan setiap program mereka.

Berbagai hal dibahas dalam kegiatan tersebut seperti kode etik penyelenggara KPU, mekanisme dan proses pemilihan, soal tahapan pencalonan perseorangan yang sedang berjalan serta tahapan penyusunan data pemilih yang sebentar lagi dilaksanakan KPU termasuk kerja sama KPU dan media massa.

Agus Sudiby menuturkan pentingnya wartawan memahami tentang profesionalitas, mengharuskan para wartawan lebih meningkatkan kualitasnya dimana era kompetisi terbuka penting membangkitkan semangat membangun bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya.

“Jurnalis dan media perlu memperhatikan kualifikasinya, ya tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pers,”ujarnya.

Dikatakan Sudiby, ada beberapa syarat yang patut diperhatikan bagi KPU dalam melakukan kerja sama media, diantaranya soal terdaftar dan terverifikasi media tersebut di dewan pers.

“Namun verifikasi dewan pers itu bukan syarat utama bagi media untuk



mendapatkan kerja sama. Itu hanya salah satu syarat minimal dari sekian syarat dasar bagi media,”ujarnya.

Ia juga berharap independensi media dan wartawan dalam menghadapi momen Pilkada tahun ini. “Wartawan harus mampu memosisikan dirinya khususnya dalam hal pemberitaan. Independensi dan imparialitas wajib dijunjung. Setidaknya jurnalis bukan jurkam,”terangnya.(Ody)

Penulis: *Noldy Kaeng*

Sumber: *Sulutpos.com/29/01/2020*

Mewoh Beber Prestasi KPU Sulut di Pemilihan 2020

MANADO - Tahapan Pemilihan Tahun 2020 sudah tuntas. Dengan digelar rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dalam proses tahapan pilkada ini, sejumlah prestasi ditorehkan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Diungkapkan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, partisipasi pemilih di pemilihan gubernur kali ini mencapai angka 79,7 persen di atas target partisipasi nasional dan jadi tertinggi di antara sembilan provinsi penyelenggara pilgub. “Demikian juga Pilkada Kota Tomohon 91 persen. Ini tertinggi di seluruh Indonesia untuk tingkat kota. Selanjutnya Boltim dan Bolsel peringkat kedua dan ketiga tertinggi untuk pilkada kabupaten. Sementara Mitra, yang bukan penyelenggara pilkada hanya pilgub, namun mencatat angka partisipasi tertinggi juga,” sebut Mewoh.

Tak sampai di situ, pada pemilihan kali ini tidak terjadi pelanggaran terhadap tata cara mekanisme prosedur pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan tak adanya sengketa proses. “Dari tahap awal sampai akhir kami menetapkan paslon. Terima kasih Bawaslu,” lanjutnya. Terkait hasil pemilihan, diyakini seluruh pihak dan dibuktikan dengan tak ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. “Ini catatan baik untuk kita. Pilkada sebelumnya ada. Tapi kali ini tidak,” tukasnya. Mewoh

juga memaparkan, semakin baik daftar pemilih. Dibuktikan dengan menurunnya angka jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan. “Pun semakin baiknya pemahaman masyarakat menggunakan hak pilih. Karena angka surat suara tidak sah dan suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos turun. Secara teknis ini menunjukkan masyarakat memahami penggunaan hak pilih di TPS,” sebutnya.

Paling penting, lanjut Mewoh, tahapan pemilihan lancar dan kondusif. “Tak ada gangguan. Terima kasih semua pihak, masyarakat. Kami apresiasi jajaran penyelenggara pemilihan. KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, pengamanan TPS. Meski pelaksanaan di masa pandemi ternyata niat warga sangat tinggi menjadi penyelenggara pemilihan. Buktinya banyak yang mendaftar penyelenggara ad hoc. Kami awalnya khawatir tak ada yang mendaftar karena pandemi,” paparnya.

KPU juga berterima kasih pada Bawaslu Sulut dan jajaran. “Kita semua bekerja semaksimal mungkin hadirkan kualitas pemilihan yang berintegritas meski nyawa terancam. Namun kita semangat dan termotivasi. Terima kasih Forkopimda yang luar biasa beri dukungan dalam setiap tahapan. Situasi Sulut kondusif karena pengamanan dengan kolaborasi yang mantap sehingga sukses,” tandasnya.

Penulis : *Billy Tambahani*

Sumber: *Harian Komentor*

Berprestasi di Pilgub Sulut, KPU Mitra Kans Diganjar Penghargaan

RATAHAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) siap memberikan apresiasi atas kinerja dari KPU kabupaten/kota terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Salah satu di antaranya yang memiliki kans diganjar penghargaan adalah KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang dinilai memiliki kinerja yang baik dalam



menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020

“Nanti di bagian akhir kita kasih penghargaan,” singkat Ketua KPU Sulut, Ardilles Mewoh, saat menghadiri evaluasi Pilgub Sulut divisi Teknis Penyelenggaraan di Kabupaten Mitra, Jumat (12/2/2021).

Walau Kabupaten Mitra sendiri bukanlah penyelenggara Pilkada atau hanya menyelenggarakan Pilgub Sulut Tahun 2020, namun tingkat partisipasi pemilihnya sangat tinggi.

“Tingkat partisipasi pemilih di Mitra tertinggi secara nasional untuk kabupaten/kota non penyelenggara yang ada di 9 Provinsi yang menggelar Pilgub,” jelas Ardilles Mewoh.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari upaya sungguh-sungguh dari jajaran KPU Mitra yang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara masif sampai ke tingkat kelurahan dan desa, untuk memastikan masyarakat tahu pemungutan suara pada 9 Desember 2020 lalu.

“Banyak faktor yang menunjang hal ini. Namun saya yakin faktor yang paling dominan adalah kinerja kawan-kawan KPU Mitra, termasuk PPK, PPS, hingga KPPS yang tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi berkomitmen menjangkau sebanyak mungkin orang terkait sosialisasi hingga ajakan memilih,” ujarnya.

Secara teknis diakuinya, Mitra juga tidak ada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang menggelar PSU (Pemilihan Suara Ulang) dan walau perlu kajian mendalam, namun bisa dibilang penyelenggara Adhoc KPPS pada umumnya mengetahui bagaimana prosedur, mekanisme, dan tata cara pemilihan suara di TPS.

Begitu juga Mitra diketahui tidak ada PSS (Pemungutan Suara Susulan) yang salah satunya bisa disebabkan karena terlambat logistik, serta tidak ada Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) akibat berhenti di tengah jalan, salah satunya bisa disebabkan karena kekurangan surat suara.

“Jadi secara teknis penyelenggaraan Pilgub Sulut di Mitra sudah mencatatkan prestasi yang baik, tetapi tentunya tetap belum sempurna. Inilah kemudian yang diharapkan dari tahap evaluasi yang dilakukan agar memberikan output yang baik sebagai referensi ke depan,” pungkasnya.

Pelaksanaan Pilkada di Sulut yang semakin baik dari tahun ke tahun menurutnya tidak lepas dari tahap evaluasi yang dilakukan setiap periode pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pilkada.

“Output dari evaluasi ini selain laporan, kita juga mencoba menyusun catatan evaluasi ini dalam bentuk buku. Supaya tidak hanya didapatkan intisari catatan laporan yang tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan ke depan, namun juga sebagai bahan bacaan bagi para stakeholder terkait,” tutupnya.

Penulis : *Jenly Wenur/Alfrits Semen*
Sumber : *BeritaManado.com*

Olly Dondokambey – Steven Kandouw Sah Pimpin Sulut Hingga 2024

MANADO - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey – Steven Kandouw resmi memimpin Sulut hingga 2024.

Olly – Steven dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (15/2/2021).

Pasangan petahana ini memenangkan pilkada Sulut pada 2020 lalu dengan perolehan suara 821.503.

Sulut tercatat tidak memiliki tanggungan gugatan pilgub dalam pilkada 2020 lalu. Karenanya, pasangan gubernur dan wakil gubernur Sulut dilantik paling pertama oleh Presiden Jokowi bersama gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara.

Total ada sembilan provinsi yang menggelar pilgub pada 2020 lalu. Selain Sulut dan Kaltara, provinsi lain yang menggelar pemilihan gubernur dan wagub



adalah Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

Sebelum dilantik, Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw terlebih dahulu mengikuti kirab yang dipimpin langsung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kirab itu juga diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Keputusan Presiden RI tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara periode 2021-2024 dibacakan Deputy Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Nanik Purwanti.

Nanik Purwanti mengatakan, melalui keputusan Presiden tersebut, maka terhitung sejak pelantikan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Kepada kepala daerah yang dilantik, lanjut Nanik, akan mendapatkan gaji pokok serta tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Demi Tuhan saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-sebaiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ujar Jokowi yang diikuti Olly dan Steven.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti tes swab PCR sebelum hari H, memakai masker, menjaga jarak. Undangan yang hadir pun sangat terbatas.

Fabian Kaloh memuji segudang keberhasilan Olly – Steven pada periode sebelumnya. Selain prestasi dan lobi yang diakui publik, Fabian menilai pasangan Olly

– Steven begitu spesial. Salah satu faktor yang membuat keduanya meraih suara terbanyak 9 Desember 2020, menurut Kaloh karena harmonisasi selama bertugas.

“Menurut saya, tidak banyak kepala daerah di Indonesia seperti Olly – Steven. Yang dua periode banyak, tapi sedikit berlanjut dengan wakil sama,” terang Fabian.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berhasil mewujudkan visi pemerintahan periode 2016-2021 yaitu Terwujudnya Sulawesi Utara Yang Berkediri Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik Serta Berkepribadian dalam Budaya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi perubahan besar di Sulawesi Utara. Hingga tahun 2020, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw telah melaksanakan program kegiatan di semua lini sehingga sangat membanggakan karena ini adalah soal kepercayaan bukan hanya membawa Sulut semakin dikenal dan lebih disegani, tetapi juga dapat mendukung perekonomian dan investor untuk berinvestasi.

Pemerintahan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw tetap komit untuk kolaborasi, sinergitas dan penyatuan pemikiran yang melibatkan semua elemen sehingga bisa dinikmati bersama baik Infrastruktur, kepariwisataan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, maupun investasi dan lainnya.

Penulis : *Alfrits Semen*

Sumber : *BeritaManado.com*

Saputra: Pilkada Berhasil Harus Didukung Penuh Masyarakat

MANADO - Suksesnya pilkada serentak pada 23 September 2020 bukan hanya peran penyelenggara. Tapi juga butuh dukungan dari semua elemen masyarakat. Penegasan ini disampaikan langsung oleh



Komisioner KPU RI Ilham Saputra saat KPU Sulut melaksanakan coffee morning bersama media, Rabu (19/2/2020).

Kepada wartawan, Saputra mengakui meskipun KPU sudah bekerja maksimal dengan penuh integritas dan independen, namun akan lebih berhasil dengan baik jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Saat ini, KPU sudah bekerja semaksimal mungkin untuk persiapan pilkada serentak termasuk di Provinsi Sulut. Nah, yang dilakukan masyarakat bukan sekedar ikut pencoblosan, tapi harus mengawal setiap proses dalam tahapan yang berlangsung, jika ada jajaran penyelenggaranya melakukan tindakan menyalahi aturan, laporkan ke Bawaslu,” ucap Saputra. Sambil menyatakan dirinya yakin pilkada serentak di Sulut dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh media. (*)

Penulis : *Mekar Salindeho*
Sumber: *manadoline.com*

KPU Sulut Ingin Kemitraan dengan Media Massa Berlanjut

MANADO - KPU Sulawesi Utara (Sulut) ingin kemitraan dengan media massa berlanjut meskipun tahapan pilkada usai.

Ia berharap kerjasama publikasi yang terjalin selama ini bisa bersambung bahkan hingga ke periode selanjutnya.

“Tidak bisa dipungkiri prestasi penyelenggara seperti meningkatnya prestasi pemilih saat pandemi adalah campur tangan dari kawan-kawan jurnalis,” kata Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi pada lanjutan Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, Rabu (24/2/2021).

Di Kabupaten/Kota, lanjut Salman, fungsi wartawan sangat dirasakan positif penyelenggara.

Terlebih, gerak sosialisasi agak terbatas oleh wabah corona sehingga keterlibatan media massa dalam publikasi begitu

dibutuhkan. “Sebagai apresiasi kami ingin menggandeng kawan-kawan membuat jejak manis pilkada melalui karya jurnalistiknya,” terang Saelangi.

Dikatakan, semua hasil liputan bakal dikumpulkan kemudian Sumber lagi dalam sebuah buku.

“Silahkan mengirimkan karya yang selama ini dibuat. Ada apresiasi khusus bagi tulisan terbanyak,” tandasnya.

Penulis : *Alfrits Semen*
Sumber : *BeritaManado.com*

KPU Sulut Gandeng Wartawan Tinggalkan Jejak Manis Pilkada

MANADO - KPU Sulawesi Utara (Sulut) bersama jurnalis ingin meninggalkan jejak manis usai Pemilihan Serentak.

Hal itu dibahas pada Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, Selasa (23/2/2021).

Di kesempatan ini, Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi mengatakan dukungan media kepada penyelenggara begitu luar biasa selama ini.

“Makanya kami ingin menggandeng wartawan membuat jejak manis pilkada lewat karya jurnalistiknya,” terang Saelangi.

Dikatakan, semua hasil liputan bakal dikumpulkan kemudian Sumber lagi dalam sebuah buku.

“Silahkan mengirimkan karya yang selama ini dibuat. Ada apresiasi khusus bagi jurnalis dengan tulisan terbanyak,” bebarnya.

Dalam rapat ini, Salman juga meminta media menilai kinerja penyelenggara selama ini, khususnya dalam sinergitas publikasi informasi

“Mungkin masih ada kelemahan, tolong beri saran agar lebih baik lagi kedepan,” tandasnya.

Penulis : *Alfrits Semen*
Sumber : *BeritaManado.com*



Stroke Saat Bertugas di Tahapan Pilgub, KPPS Ini Terima Santunan KPU

MANADO - Kepedulian KPU-RI kepada jajarannya patut diacungi jempol. Dalam kunjungan kerja Plt Ketua KPU-RI Ilham Saputra di Sulut, Kamis (16/2/2021) dibarengi dengan penyerahan santunan kepada Melly Tatilu sebesar Rp30.800.000.

Melly Tatilu adalah seorang petugas KPPS yang terserang stroke saat bertugas pada tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut Kelurahan Paleloan Tondano Selatan. Selain Melly, santunan juga diberikan kepada penyelenggara di Lembean Timur dan satu orang di Bolaang Mongondow Utara.

Menurut Ilham, bantuan akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Kedatangan Ilham yang didampingi Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, juga menjadi kabar baik bagi para CPNS formasi 2019.

Ilham menyerahkan SK bagi 714 CPNS se-Indonesia termasuk Sulut. "Mari dalam bertugas kedepan tetap berpondasi pada Undang-undang dan mesti berintegritas," pesannya.

Penulis : *Alfrits Semen*
Sumber : *BeritaManado.com*

Penyusunan Buku 'Bunga Rampai' KPU Sulut Dimulai, 22 Jurnalis Terlibat

MANADO - Penyusunan Buku 'Bunga Rampai' KPU Sulut dimulai.

Lewat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU Sulut, Kamis (18/3/2021), tahapan pengeditan informasi seputar Pemilihan Serentak 2020 di Sulut disepakati.

Mereka mengirimkan karya masing-masing yang nantinya menjadi jejak manis Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut 2020. "Tulisan yang masuk cukup banyak. Ada 600 lebih baik dari wartawan media cetak dan elektronik," ujar Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi dalam FGD itu.

Menurut dia, KPU telah menunjukan lima orang editor dalam penyusunan buku. Dikatakan, semua karya jurnalis Sulut akan menjadi kenangan manis sekaligus bukti nyata dalam proses demokrasi di bumi nyiur melambai.

Penulis : *Alfrits Semen*
Sumber : *BeritaManado.com*

Bakal Terbitkan Buku Tahapan Pilkada, KPU Sulut Gelar Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi

MANADO - Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Salman Saelangi menyampaikan bersama media KPU Sulut akan melakukan pembuatan buku dari seluruh pemberitaan sepanjang tahapan Pilkada tahun 2020.

Hal ini disampaikan Salman Saelangi didampingi Kasub Teknis Rudi Lalongsang saat membawa sambutan pada kegiatan Rapat Evaluasi terkait Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan kemitraan Media Massa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. di Hotel Sutan raja, Minahasa Utara, 23-25 Februari 2021. "Jadi dari seluruh pemberitaan teman-teman kita kumpul dan kita akan buat buku, mulai dari tahapan pertama hingga terakhir pada evaluasi ini," tukas Salman.

Menurut Salman bahwa ini menjadi kenangan dan jejak manis antara KPU Sulut dan media. "Ini menjadi jejak manis, bahwa selama ini KPU Sulut selalu di backup oleh media dalam pemberitaan dan informasi seluruh kegiatan KPU hingga tersuksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020," tandas Salman, sembari memberikan apresiasi kepada mitra kerja KPU Sulut yang melakukan peliputan KPU Sulut.

Diakui Salman, dengan adanya pembuatan buku maka menjadi kenangan dan jejak manis antara KPU Sulut dan media. "KPU Sulut selalu di backup oleh media dalam



pemberitaan dan informasi seluruh tahapan pilkada 2020 hingga sukses,” tandasnya.

Penulis : RAKA

Sumber: *Elnusanews.com*

Keterbukaan Informasi Publik Pilgub 2020, KPU Sulut Segera Terbitkan Satu Buku

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bertekad menciptakan keterbukaan informasi kepada publik. Tak tanggung-tanggung, pemberitaan media sejak awal pada tahapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2020 dijadikan KPU sebagai bahan tulisan dalam buku tersebut.

Hal ini disampaikan Salman Saelangi, Komisioner Bidang Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM KPU Sulut saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Keterbukaan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Selasa (23/02/21) di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara.

“Saat ini akan mengevaluasi apa-apa yang telah diberitakan media terkait tahapan dalam Pilkada 2020,” ucap Saelangi didampingi Kepala Sub (Kasub) Rudy Lalonsang di pembukaan kegiatan tersebut.

Dirinya pun membeberkan pemberitaan apa saja yang akan menjadi bahan tulisan buku tersebut. “Dari awal tahapan sampai selesainya penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena ini sangat penting untuk dalam membuat suatu buku. Ini juga bisa menjadi kritikan untuk kami,” tandas Saelangi.* (jane)

Penulis : *Jane Tungkagi*

Sumber : *ciintasulut.com*

KPU Sulut Gandeng Media Terbitkan Buku Tahapan Pilkada

MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (23/2) melaksanakan Rapat Evaluasi terkait Keterbukaan Akses Informasi dan

Dukungan kemitraan Media Massa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Salman Saelangi, S.Kel didampingi Kasub Teknis Rudi Lalonsang di Hotel Sutanraja, Minahasa Utara, 23-25 Februari 2021.

Kadiv Salman Saelangi mengatakan bersama media KPU Sulut akan melakukan pembuatan buku dari seluruh pemberitaan sepanjang tahapan Pilkada. “Jadi dari seluruh pemberitaan teman-teman kita kumpul dan kita akan buat buku, mulai dari tahapan pertama hingga terakhir pada evaluasi ini,” ucap Salman.

Lebih lanjut, menurutnya bahwa ini menjadi kenangan dan jejak manis antara KPU Sulut dan media.

“Ini menjadi jejak manis, bahwa selama ini KPU Sulut selalu di backup oleh media dalam pemberitaan dan informasi seluruh kegiatan KPU hingga tersuksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020,” ujarnya sembari memberikan apresiasi kepada mitra kerja KPU Sulut yakni media peliputan KPU Sulut.

Penulis : *Andre Siwi*

Sumber : *VoxSulut.com*

Evaluasi Bersama Media, KPU Sulut Rangkum Pemberitaan Jadi Sebuah Buku

MINUT - Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara gelar rapat evaluasi keterbukaan informasi publik dan dukungan kemitraan media massa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi utara bersama pimpinan dan awak media selama 2 hari 23-24 Februari 2021 di hotel Sutan Raja Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Rapat evaluasi dibuka Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi. Saat membuka rapat, Saelangi memberikan ucapan terima kasih atas dukungan media lewat pemberitaan-pemberitaan dan supporting



sejak awal tahapan sampai hari H pemilihan tanggal 9 desember 2020 sehingga partisipasi pemilih sangat besar.

“Terima kasih kepada media yang selalu mendukung dan suporting melalui pemberitaan kepada KPU Sulut sejak mulai tahapan-tahapan sampai saat ini. Kontribusi dari teman-teman sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, “ucap Saelangi.

Untuk itu, mengevaluasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilaksanakan KPU Sulut, Dalam Rapat, Saelangi meminta agar semua media merangkum semua tulisan-tulisan dalam pemberitaan semua kegiatan KPU dalam sebuah file untuk dikemas menjadi sebuah buku.

“Prinsipnya bagaimana kita akan evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2020 dan juga untuk meninggalkan jejak berupa tulisan-tulisan pemberitaan yang pernah dikontribusi dari tahapan awal sampai selesai untuk dikemas dalam sebuah buku. Teman-teman bisa meninggalkan jejak baik untuk masyarakat dan publik, itulah harapan kami output evaluasi yang akan dilakukan,”terangnya.

Sementara, Kasub Rudi Lalonsang menambahkan, semua pemberitaan dirangkum menjadi sebuah buku tentang penyelenggaraan pilkada 2020. Sehingga melalui evaluasi ini, harapan kami ini sudah sangat baik, dan nantinya kedepan akan lebih baik lagi.

Penulis : *Deibby Malongkade*
Sumber : *Viralberitanet.com*

KPU Sulut Bakal Bukukan Karya Jurnalistik Gelaran Pilkada

MANADO – Karya jurnalistik yang disajikan selama gelaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) bakal dibukukan.

Terobosan yang digagas Komisi pemilihan umum (KPU)Provinsi Sulut, merupakan bentuk apresiasi sekaligus juga evaluasi.

Hal itu terungkap melalui rapat evaluasi keterbukaan informasi publik dan dukungan kemitraan media massa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulut bersama insan media. Kegiatan rapat evaluasi ini digelar di hotel Sutan Raja Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan digelar selama 2 hari, pada 23-24 Februari 2021.

Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Salman Saelangi, S.Kel, yang di dampingi oleh Kasub Rudi Lalonsang membuka rapat evaluasi. Dalam pembukaannya, Salman mengucapkan terima kasih kepada media yang telah berkontribusi dan mendukung KPU Sulut dalam setiap tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lewat pemberitaanpemberitaan, sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan sangat besar. “Terima kasih kepada media yang selalu mendukung dan suporting melalui pemberitaan kepada KPU Sulut sejak mulai tahapan-tahapan sampai saat ini. Kontribusi dari teman-teman sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” ucap Saelangi.

Dalam rapat ini, Saelangi juga meminta agar para insan media untuk merangkum semua tulisan-tulisan dalam pemberitaan semua kegiatan KPU Sulut di dalam sebuah file dan akan dikemas menjadi sebuah karya tulis dalam buku.

“Prinsipnya bagaimana kita akan evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2020 dan juga untuk meninggalkan jejak berupa tulisan-tulisan pemberitaan yang perna dikontribusi dari tahapan awal sampai selesai untuk dikemas dalam sebuah buku. Teman-teman bisa meninggalkan jejak baik untuk masyarakat dan publik, itulah harapan kami output evaluasi yang akan dilakukan,” jelas Saelangi.

Sementara, Kasub Rudi Lalonsang menambahkan, semua pemberitaan akan dirangkum menjadi sebuah buku tentang penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga



melalui evaluasi ini, harapan kami ini sudah sangat baik, dan nantinya kedepan akan lebih baik lagi.(lina)

Penulis: *Jellina Najoan*

Sumber: *sulutreview.com*

Saelangi: Setiap Tahapan Pilkada Yang Diberitakan Akan Dibuat Dalam Satu Buku

MANADO --KPU Sulut gelar Rapat Evaluasi Keterbukan Akses Informasi dan Dukungan Kemitraan Media Massa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Selasa (23/02/21) di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara.

Rapat ini di buka oleh Komisioner Bidang Devisi Sosialisasi Parmas dan SDM Salman Saelangi, di dampingi Kasub Rudy Lalonsang. “Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan, rapat ini telah dibuka.” ucap saelangi.

Dalam Kegiatan evaluasi ini Salman Saelangi mengungkapkan saat ini akan mengevaluasi ke media dari apa-apa yang telah di beritakan terkait tahapan dalam Pilkada 2020 “Setiap awal tahapan sampai selesainya penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena ini sangat penting akan dibuat satu buku agar tulisan-tulisan dari setiap media dari awal tahapan bisa di evaluasi dan bisa menjadi kritikan untuk kami,” pungkas Saelangi.(*)

Penulis : *Friska Tewu*

Diterbitkan:*portalsulutnews.com (23/2/21)*

KPU Sulut Bakal Bukukan Karya Jurnalistik Gelaran Pilkada

MANADO -- Karya jurnalistik yang disajikan selama gelaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) bakal dibukukan.

Terobosan yang digagas Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sulut, merupakan bentuk apresiasi sekaligus juga evaluasi.

Hal itu terungkap melalui rapat evaluasi keterbukaan informasi publik dan dukungan kemitraan media massa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulut bersama insan media.

Kegiatan rapat evaluasi ini digelar di hotel Sutan Raja Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan digelar selama 2 hari, pada 23-24 Februari 2021.

Komisioner KPU Sulut Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Salman Saelangi, S.Kel, yang di dampingi oleh Kasub Rudy Lalonsang membuka rapat evaluasi.

Dalam pembukaannya Salman mengucapkan terima kasih kepada media yang telah berkontribusi dan mendukung KPU Sulut dalam setiap tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lewat pemberitaan-pemberitaan, sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan sangat besar.

“Terima kasih kepada media yang selalu mendukung dan suporting melalui pemberitaan kepada KPU Sulut sejak mulai tahapan-tahapan sampai saat ini. Kontribusi dari teman-teman sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” ucap Saelangi.

Dalam rapat ini, Saelangi juga meminta agar para insan media untuk merangkum semua tulisan-tulisan dalam pemberitaan semua kegiatan KPU Sulut di dalam sebuah file dan akan dikemas menjadi sebuah karya tulis dalam buku.

“Prinsipnya bagaimana kita akan evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2020 dan juga untuk meninggalkan jejak berupa tulisan-tulisan pemberitaan yang pernah dikontribusi dari tahapan awal sampai selesai untuk dikemas dalam sebuah buku. Teman-teman bisa meninggalkan jejak baik untuk masyarakat dan publik, itulah harapan kami output evaluasi yang akan dilakukan,” jelas Saelangi.



Sementara, Kasub Rudi Lalonsang menambahkan, semua pemberitaan akan dirangkum menjadi sebuah buku tentang penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga melalui evaluasi ini, harapan kami ini sudah sangat baik, dan nantinya ke depan akan lebih baik lagi. (*)

Penulis: *Jellina Najoan*

Sumber: *sulutreview.com* (23/2/2021)

Epilog

Optimis yang Berbuah Manis

SEJARAH indah terukir dalam proses demokrasi di bumi nyiur melambai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mengukir prestasi pada kontestasi lima tahunan yang digelar 2020. Pemilihan Serentak yang sebelumnya dibalut pesimis, terjawab manis dengan optimisme jajaran penyelenggara. Sulut pun terbaik dalam hal partisipasi pemilih.

Sempat dilanda ketidakpastian karena pandemi Covid-19, pemerintah kemudian memutuskan Pemungutan Suara digelar 9 Desember 2020. Kerja-kerja pun dipacu. Termasuk jajaran KPU di Sulut yang mesti menggelar Pemilihan Gubernur dan Pilkada di tujuh kabupaten/kota. Ini tentu pekerjaan berat, karena saat bersamaan laju pandemi corona di daerah ini cukup mengerikan. Nada-nada kurang enak sempat dialamatkan kepada KPU. Masuk akal juga, karena beberapa tahapan pemilihan serentak dianggap berisiko terjangkit Covid-19. Tetapi, tanggungjawab sebagai pejuang demokrasi mesti dilakukan. Ada sumpah yang wajib dilaksanakan meski susah maupun senang. Di saat bencana atau kondisi normal.

Tahapan berjalan. Kehati-hatian dan disiplin protokol kesehatan menjadi pondasi di setiap kegiatan pilkada. Aturan yang mewajibkan jajaran KPU mementingkan kesehatan publik pun prioritas. Kerja-kerja badan adhoc diawasi, aktifitas kampanye pasangan calon dipantau, hingga aturan ketat yang wajib dipatuhi pemilih saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Doa, kerja keras dan optimisme penyelenggara akhirnya berbuah manis. Pilgub dan pilkada berjalan sukses. Plus aman dan lancar. Bonusnya, pada Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Sulut, KPU terbukti mencetak partisipasi di atas nasional. Lelah dan keringat terbayar lunas. Apalagi suara sah mencapai 1.438.587. Capaian positif ini merembet juga di kabupaten/kota. Semua bahagia. Sosialisasi dan kerja-kerja selama ini berhasil meyakinkan publik.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menjelaskan partisipasi pemilih Sulut 79,84% dan menjadi tertinggi dari sembilan provinsi yang menggelar Pilgub. "Target nasional sebesar 77,5%. Kami melebihi itu," kata Ardiles Mewoh. Tomohon menjadi peringkat pertama dengan partisipasi pemilih sebagai daerah yang menggelar pemilihan wali kota. Kota bunga mencatatkan persentase 93,13%.

Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga patut berbangga karena mencatatkan sejarah dengan partisipasi 95,94 persen. Boltim berada di posisi kedua nasional untuk kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati. Sekadar diketahui, urutan satu Kabupaten Fakfak namun sistem noken. Sementara Boltim memilih secara langsung sesuai prinsip dan asas pilkada. Di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), warga yang datang ke TPS 94% dari jumlah pemilih. Sangat menggembirakan. Sementara Minahasa Tenggara menjadi daerah non penyelenggara atau hanya memilih gubernur dan wakil gubernur, namun memberikan partisipasi sangat baik hingga 85%.



Atas nama kawan-kawan penyelenggara, Ardiles menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Sulut. Terlebih mereka yang menyalurkan hak suaranya pada 9 Desember 2020. Apresiasi penting turut diberikan Mewoh kepada jurnalis. Insan pers dianggap sebagai pilar suksesnya tahapan pilkada. Sekali lagi, KPU Sulut dan jajaran telah mencatat sejarah manis. Ini akan menjadi modal penting sekaligus tantangan penyelenggara berikutnya. Apalagi, kurang dari tiga tahun tugas berat menanti.

Sampai jumpa di tahun 2024.

Penulis : *Alfrits Semen*

Diterbitkan : *BeritaManado.com*



Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas,
Wenang, Mahakeret Timur, Kec. Wenang,
Kota Manado, Sulawesi Utara 95112



jdih.kpu.go.id

ISBN 978-623-6183-26-7

9 786236 183267